



PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR



RPJMD

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah

KOTA  MAKASSAR
TAHUN 2025-2029



BAPPEDA
KOTA MAKASSAR



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kota Makassar yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Makassar sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun).
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

- (1) RPJMD tahun 2025-2029 ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, serta RTRW.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan RPJMN, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 20 Agustus 2025

WALIKOTA MAKASSAR,



Diundangkan di Makassar

pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.03.042.25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari visi dan misi kepala daerah yang memimpin. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang mengamanatkan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Penyusunannya harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD juga harus memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program kerja yang mencakup satuan kerja perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan yang dilengkapi dengan regulasi serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pendelegasian kewenangan kepada Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar Di Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi bagian dari daerah yang wajib menyusun RPJMD. Saat ini, pembangunan Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Namun, dalam konteks kebijakan pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 dan pelantikan kepala daerah terpilih pada 10 Februari 2025, keberlakuan Perda RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan RPJMD harus memuat visi dan misi kepala daerah yang baru, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, setelah pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang baru,

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tidak lagi memiliki daya laku.

Berakhirnya daya laku dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021, menegaskan dibutuhkannya pembentukan Peraturan Daerah yang berisikan tentang dasar perencanaan Pembangunan daerah Kota Makassar berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 3



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua baik berupa kesehatan lahir dan batin maupun nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025-2029 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan RPJMD merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana RPJMD merupakan dokumen perencanaan jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, dan disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW.

RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan tahun 2024, yaitu pasangan Munafri Arifuddin, SH dan Aliyah Mustika Ilham, SE, MAP, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2025-2029 setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025, yang mengusung Visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan”. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periodisasi pertama dari RPJPD Tahun 2025-2045, dimana RPJPD memiliki visi “Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang *Sombere*’ dan *Smart* Untuk Semua”.

Sebagaimana diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945, visi abadi tujuan bernegara Kita adalah mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang didukung misi abadi negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai visi dan misi abadi negara tersebut, Pemerintah Pusat telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan Visi “Bersama Indonesia maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mencapai Visi tersebut harus didukung oleh segenap elemen bangsa, termasuk Pemerintah Kota Makassar melalui penyusunan RPJMD 2025-2029. Bagi masyarakat dan *stakeholder*, RPJMD menjadi pedoman dan rujukan dalam berpartisipasi dan menyatukan langkah dalam rangka membangun Kota Makassar.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan seluruh *stakeholder* dan semua pihak yang terkait yang telah membantu penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025-2029 ini, semoga apa yang telah kita lakukan dapat memberi manfaat bagi kemajuan Masyarakat dan Kota Makassar serta dapat bernilai ibadah dimata Allah SWT. Amin, Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Agustus 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik.....	xv
Daftar Istilah.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	7
1.4. Maksud dan Tujuan	9
1.5. Sistematika	10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	11
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	11
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	11
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam.....	12
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	18
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	21
2.1.4.1. Konsumsi Listrik Per Kapita (KwH)	21
2.1.4.2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.....	22
2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan	22
2.1.4.4. Skor Pola Pangan Harapan	23
2.1.4.5. Kapasitas Air Baku	25
2.1.4.6. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	27
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	28
2.1.5.1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia	28
2.1.5.2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	29
2.1.5.3. Angka Konsumsi Ikan	30
2.1.5.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.....	31
2.1.5.5. Indeks Kualitas Air	32
2.1.5.6. Indeks Kualitas Udara	33
2.1.5.7. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	35
2.1.5.8. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	36
2.1.5.9. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	37
2.1.5.10. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	38
2.1.6. Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	39
2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana.....	39
2.1.6.2. Indeks Ketahanan Daerah.....	41
2.1.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK	41
2.1.7. Demografi	42
2.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	42
2.1.7.2. Komposisi Penduduk	44
2.1.7.3. Kepadatan Penduduk.....	45
2.1.7.4. Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun ke Depan	46



2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	49
2.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi	49
2.2.1.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	49
2.2.1.2.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	51
2.2.1.3.	Tingkat Kemiskinan	52
2.2.1.4.	PDRB Per Kapita	56
2.2.1.5.	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha	58
2.2.1.6.	Pengeluaran Per Kapita	59
2.2.1.7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	60
2.2.1.8.	Indeks Gini	61
2.2.1.9.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	64
2.2.2.	Kesehatan Untuk Semua	66
2.2.2.1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	66
2.2.2.2.	Angka Kematian Ibu	67
2.2.2.3.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	67
2.2.2.4.	Prevalensi <i>Stunting</i> Pada Balita	68
2.2.2.5.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis	69
2.2.2.6.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkolosis	72
2.2.2.7.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	73
2.2.3.	Pendidikan Berkualitas Yang Merata	74
2.2.3.1.	Indeks Pendidikan	74
2.2.3.2.	Literasi	75
2.2.3.3.	Numerasi	77
2.2.3.4.	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	79
2.2.3.5.	Harapan Lama Sekolah	80
2.2.3.6.	Angka Putus Sekolah	81
2.2.3.7.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	82
2.2.3.8.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	83
2.2.4.	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	85
2.2.4.1.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	85
2.2.4.2.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	86
2.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	87
2.2.5.1.	Indeks Kota Toleran	87
2.2.5.2.	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	88
2.2.5.3.	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Mendapat Dukungan/Fasilitasi	89
2.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	91
2.2.6.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	91
2.2.6.2.	Indeks Perlindungan Anak	91
2.2.6.3.	Indeks Pembangunan Gender	93
2.2.6.4.	Indeks Pemberdayaan Gender	94
2.2.6.5.	Indeks Ketimpangan Gender	96
2.2.6.6.	Indeks Pembangunan Pemuda	97



2.2.6.7.	Indeks Pembangunan Olahraga	98
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	99
2.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	99
2.3.1.1.	Angka Ketergantungan	99
2.3.2.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	100
2.3.2.1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	100
2.3.2.2.	Rasio PDRB Peyediaan Akomodasi Makan Minum.	101
2.3.2.3.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik	102
2.3.2.4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	103
2.3.2.5.	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	104
2.3.2.6.	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda	105
2.3.2.7.	Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan	106
2.3.2.8.	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang Aktif	107
2.3.2.9.	Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital	108
2.3.2.10.	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	109
2.3.2.11.	Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar	109
2.3.2.12.	<i>Return on Assets</i> (ROA) BUMD	110
2.3.2.13.	Produktivitas Padi	113
2.3.2.14.	Produktivitas Perikanan Tangkap	114
2.3.2.15.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	116
2.3.2.16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	118
2.3.2.17.	Indeks Kapabilitas inovasi	119
2.3.2.18.	Indeks Inovasi Daerah	122
2.3.2.19.	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah	124
2.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	125
2.3.3.1.	Indeks Ekonomi Hijau	125
2.3.3.2.	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	125
2.3.4.	Transformasi Digital	127
2.3.4.1.	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	127
2.3.5.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	128
2.3.5.1.	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	128
2.3.5.2.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	130
2.3.5.3.	Net Ekspor Barang dan Jasa	132
2.3.6.	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	134
2.3.6.1.	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional	134
2.3.6.2.	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan	134
2.3.6.3.	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	136
2.3.6.4.	Indeks Layanan Infrastruktur	137
2.3.6.5.	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	139
2.3.6.6.	Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakarya	140
2.3.6.7.	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	141
2.3.7.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	143
2.3.7.1.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	143
2.3.7.2.	Tingkat Inflasi Gabungan	144



2.3.7.3. Persentase Peningkatan Investasi Daerah	147
2.3.7.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	150
2.3.7.5. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	150
2.4. Aspek Pelayanan Umum	152
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif.....	152
2.4.1.1. Nilai SAKIP	152
2.4.1.2. Indeks Reformasi Hukum	152
2.4.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .	155
2.4.1.4. Indeks Reformasi Birokrasi	158
2.4.1.5. Indeks Pelayanan Publik	159
2.4.1.6. Indeks Survey Penilaian Integritas	160
2.4.1.7. Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK ..	162
2.4.1.8. Indeks Maturitas SPIP	163
2.4.2. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangung Serta Demokrasi Substansial	164
2.4.2.1. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	164
2.4.2.2. Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	165
2.4.2.3. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah .	166
2.4.2.4. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani.....	167
2.4.2.5. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD.....	168
2.4.2.6. Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD	169
2.4.2.7. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik	170
2.4.3. Daya Saing Daerah Tinggi	171
2.4.3.1. Jumlah Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya (<i>Sister City</i>)	171
2.4.3.2. Indeks Daya Saing Daerah	172
2.4.4. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah	174
2.4.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	174
1. Urusan Pendidikan	174
2. Urusan Kesehatan	175
3. Urusan Pekerjaan Umum	179
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	187
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	192
6. Urusan Sosial	197
2.4.4.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	198
1. Urusan Tenaga Kerja	198
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	201
3. Urusan Pangan	202
4. Urusan Pertanahan	203
5. Urusan Lingkungan Hidup	206
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	208
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .	211
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	211
9. Urusan Perhubungan	213
10. Urusan Komunikasi dan Informatika	215



11.	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	217
12.	Urusan Penanaman Modal	218
13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	219
14.	Urusan Statistik	221
15.	Urusan Persandian.....	222
16.	Urusan Kebudayaan	223
17.	Urusan Perpustakaan	224
18.	Urusan Kearsipan.....	225
2.4.4.3.	Urusan Pilihan.....	226
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan	226
2.	Urusan Pariwisata	227
3.	Urusan Pertanian	229
4.	Urusan Perdagangan	230
5.	Urusan Perindustrian	231
2.4.4.4.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	233
1.	Perencanaan Dan Keuangan	233
2.	Pengadaan	235
3.	Kepegawaian	237
4.	Manajemen Keuangan.....	238
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik.....	239
2.4.5.	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	240
2.4.6.	Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	257
2.5.	Gambaran Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	274
2.5.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	274
2.5.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	274
2.5.1.2.	Neraca Daerah	278
2.5.1.3.	Aset Daerah	279
2.5.1.4.	Kewajiban	280
2.5.1.5.	Ekuitas Dana.....	280
2.5.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	280
2.5.2.1.	Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Eksentifikasi PAD	281
2.5.2.2.	Proporsi Penggunaan Anggaran	281
2.5.2.3.	Analisis Pembiayaan	282
2.5.3.	Analisis Keuangan Daerah	284
2.5.3.1.	Analisis Fiskal Daerah	284
2.5.3.2.	Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB.....	288
2.5.4.	Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)	290
2.5.5.	Dana Bagi Hasil (DBH)	291
2.5.6.	Kerangka Pendanaan	293
2.5.6.1.	Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah.....	293
2.5.6.2.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	294
2.5.6.2.1.	Proyeksi Pendapatan Daerah.....	295
2.5.6.2.2.	Proyeksi Belanja Daerah	297
2.5.6.2.3.	Proyeksi Pembiayaan Daerah	299
2.5.7.	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	301
2.6.	Permasalahan dan Isu Strategis	303
2.6.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	303
2.6.2.	Isu Strategis Daerah	313



BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 321

3.1. Visi dan Misi 321

3.1.1 Visi 321

3.1.2 Misi 323

3.2. Tujuan dan Sasaran 328

3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 347

3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan 347

3.3.2. Arah Kebijakan 376

3.3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah 379

3.3.4. Arah Pembangunan Kewilayahan 427

BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 557

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 557

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 596

4.2.1. Indikator Kinerja Makro 596

4.2.2. Indikator Kinerja Utama..... 596

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah 599

BAB V. PENUTUP 617

5.1. Perencanaan dan Penganggaran 617

5.2. Kaidah Pelaksanaan 618

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi 620



DAFTAR GAMBAR

BAB I		1
Gambar 1.1.	Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029.....	3
Gambar 1.2.	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah	4
Gambar 1.3.	Aspek Spasial dalam Penyusunan RPJMD.....	8
Gambar 1.4.	Hubungan RPJMD Kota Makassar Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	9
BAB II		11
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Kota Makassar.....	11
Gambar 2.2.	Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024	142
Gambar 2.3.	Timeline Proses Penetapan RDTR Kota Makassar	143



DAFTAR TABEL

BAB II		1
Tabel 2.1.	DDLH Penyedia Pangan Kota Makassar Berdasarkan Wilayah Kecamatan	18
Tabel 2.2.	Ketersediaan, Kebutuhan Air dan Ambang Batas di Kota Makassar	19
Tabel 2.3.	DDDLH Penyedia Air Kota Makassar Berdasarkan Wilayah Kecamatan	20
Tabel 2.4.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%) Kota Makassar Tahun 2020 – 2024	22
Tabel 2.5.	Indeks Ketahanan Pangan Kota Makassar dan Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024	23
Tabel 2.6.	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024	23
Tabel 2.7.	Kapasitas Pengelolaan Air Baku pada 71-unit SPAM di Kota Makassar	26
Tabel 2.8.	Data Kejadian Bencana Kota Makassar 2021-2024 ..	40
Tabel 2.9.	Indeks Ketahanan Daerah Kota Makassar Tahun 2020 – 2024	41
Tabel 2.10.	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Makassar Tahun 2024.....	44
Tabel 2.12.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Setiap Kecamatan Kota Makassar Tahun 2024	45
Tabel 2.13.	Sebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2021 – 2024	45
Tabel 2.14.	Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Makassar Tahun 2025-2030.....	47
Tabel 2.15.	Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	48
Tabel 2.16.	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Beberapa Daerah Lain di Indonesia Tahun 2024	54
Tabel 2.17.	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Juta Rupiah /Orang/Tahun) Tahun 2020-2024	60
Tabel 2.18.	Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	64
Tabel 2.19.	Indeks Pendidikan Kota Makassar tahun 2020-2024	75
Tabel 2.20.	Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kota Makassar Tahun 2024.....	75
Tabel 2.21.	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kota Makassar Tahun 2021-2024	79
Tabel 2.22.	Anak Putus Sekolah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	81
Tabel 2.23.	Jumlah Penduduk yang Berpendidikan Tinggi di Kota Makassar Tahun 2024.....	84
Tabel 2.24.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal Kota Makassar Tahun 2024.....	85
Tabel 2.25.	Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja Kota Makassar Tahun 2024	86



Tabel 2.26.	Indeks Pembangunan Pemuda Berdasarkan Komponen Kota Makassar Tahun 2023	97
Tabel 2.27.	Rasio ketergantungan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	100
Tabel 2.28.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024 ..	106
Tabel 2.29.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	106
Tabel 2.30.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2024 ..	107
Tabel 2.31.	Skor IBEI Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2023	126
Tabel 2.32.	Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Makassar, Tahun 2020 – 2024	143
Tabel 2.33.	Rincian Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024	154
Tabel 2.34.	Rata-Rata Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Makassar berdasarkan Domain dan Aspek Tahun 2020-2024	157
Tabel 2.35.	Konstruksi Dimensi dan Sub Dimensi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	165
Tabel 2.36.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020-2024	199
Tabel 2.37.	Capaian IKK Urusan Penberdayaan Masyarakat dan Desa	211
Tabel 2.38.	Jumlah total produksi perikanan Tahun 2020-2024	226
Tabel 2.39.	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsaan Tahun 2020-2024	227
Tabel 2.40.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan Nusantara Tahun 2020-2014	227
Tabel 2.41.	Tingkat Hunian Akomodasi	228
Tabel 2.42.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	229
Tabel 2.43.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Tahun 2020-2024	229
Tabel 2.44.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Tahun 2020-2024	230
Tabel 2.45.	Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar Tahun 2020-2024	231
Tabel 2.46.	Persentase pencapaian sasaran Pembangunan industri Tahun 2020-2024	232
Tabel 2.47.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Tahun 2020-2024	232
Tabel 2.48.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Tahun 2020-2024	232
Tabel 2.49.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Tahun 2020-2024	232
Tabel 2.50.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Kota Makassar Tahun 2020-2024	233



Tabel 2.51.	Rasio PAD Kota Makassar Tahun 2020-2024	234
Tabel 2.52.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	234
Tabel 2.53.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Makassar Tahun 2020-2024	235
Tabel 2.54.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	235
Tabel 2.55.	Opini Laporan Keuangan Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	235
Tabel 2.56.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	236
Tabel 2.57.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	236
Tabel 2.58.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui Pengadaan Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	236
Tabel 2.59.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	237
Tabel 2.60.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar Kota Makassar Tahun 2020-2024	237
Tabel 2.61.	Rasio pegawai Fungsional Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	237
Tabel 2.62.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	238
Tabel 2.63.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	238
Tabel 2.64.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	238
Tabel 2.65.	Manajemen Aset Kota Makassar Tahun 2020-2024 ..	239
Tabel 2.66.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	239
Tabel 2.67.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	240
Tabel 2.68.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	240
Tabel 2.69.	Pelayanan Pendidikan Dasar Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	241
Tabel 2.70.	Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	243
Tabel 2.71.	Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	244
Tabel 2.72.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	245
Tabel 2.73.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	245
Tabel 2.74.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	245
Tabel 2.75.	Pelayanan Kesehatan Balita Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	246



Tabel 2.76.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	246
Tabel 2.77.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	247
Tabel 2.78.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	247
Tabel 2.79.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	248
Tabel 2.80.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	248
Tabel 2.81.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kota Makassar Tahun 2022-2024	249
Tabel 2.82.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	249
Tabel 2.83.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Kota Makassar Tahun 2022-2024 ...	250
Tabel 2.84.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	250
Tabel 2.85.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kota Makassar Tahun 2022-2024	251
Tabel 2.86.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	251
Tabel 2.87.	Fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	252
Tabel 2.88.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	253
Tabel 2.89.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	253
Tabel 2.90.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.....	254
Tabel 2.91.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kota Makassar Tahun 2022-2024	254
Tabel 2.92.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	255
Tabel 2.93.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	255
Tabel 2.94.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di Luar Panti Kota Makassar Tahun 2022-2024	256
Tabel 2.95.	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Panti Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	256
Tabel 2.96.	Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial di Luar Panti Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	257
Tabel 2.97.	Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	257
Tabel 2.98.	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Makassar Tahun 2022-2024	259
Tabel 2.99.	Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024....	275
Tabel 2.100.	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	278
Tabel 2.101.	Aset Daerah Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	279



Tabel 2.102.	Kewajiban Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	280
Tabel 2.103.	Ekuitas Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	280
Tabel 2.104.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Makassar Tahun 2022-2025.....	282
Tabel 2.105.	Perhitungan Surplus/ Defisit Riil Anggaran Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	283
Tabel 2.106.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	283
Tabel 2.107.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Riil Anggaran Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	284
Tabel 2.108.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	284
Tabel 2.109.	Rasio Fiskal Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	285
Tabel 2.110.	Rasio Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	286
Tabel 2.111.	Rasio Belanja Pegawai Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	286
Tabel 2.112.	Rasio Belanja Modal Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	287
Tabel 2.113.	Rasio Belanja Per Kapita Penduduk Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	288
Tabel 2.114.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Ribu Rupiah)	289
Tabel 2.115.	Kontribusi APBD terhadap PDRB pada Komponen Konsumsi Pemerintah.....	289
Tabel 2.116.	Kontribusi APBD terhadap PDRB pada Komponen PMTB	290
Tabel 2.117.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Likuiditas) Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	290
Tabel 2.118.	Rasio Solvabilitas Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	291
Tabel 2.119.	Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	291
Tabel 2.120.	Proyeksi Indikator Makro Kota Makassar Tahun 2025-2030.....	293
Tabel 2.121.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2026-2030.....	296
Tabel 2.122.	Proyeksi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030.....	298
Tabel 2.123.	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2026-2030.....	300
Tabel 2.124.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Makassar untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026 – 2030	302
BAB III		321
Tabel 3.1	Penjelasan Visi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029	322
Tabel 3.2	Penyelarasan Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029	322
Tabel 3.3	Perumusan Misi Janji Politik (Sapta Mulya) ke Dalam Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029	323



Tabel 3.4	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029	324
Tabel 3.5	Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029	327
Tabel 3.6	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1	329
Tabel 3.7	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2	330
Tabel 3.8	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3	331
Tabel 3.9	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 4	332
Tabel 3.10	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5	334
Tabel 3.11	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 6	335
Tabel 3.12	Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 7	336
Tabel 3.13	Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030	338
Tabel 3.14	Strategi dan Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030	348
Tabel 3.15	Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030	376
Tabel 3.16	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Program Strategis MULIA (Janji Politik)	379
Tabel 3.17	Program Prioritas RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030	382
Tabel 3.18	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja RPJMD Dalam Pencapaian Janji Politik Kota Makassar Tahun 2025-2029	399
Tabel 3.19	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Makassar Tahun 2025-2030	483
BAB IV		557
Tabel 4.1	Program dan Pagu Indikatif SKPD Kota Makassar Tahun 2026-2030	558
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Makro Kota Makassar Tahun 2025-2030	596
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2025-2030	597
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029	600



DAFTAR GRAFIK

BAB II		1
Grafik 2.1	Sebaran, Luas Ekosistem Terumbu Karang, dan Terumbu Karang dalam Kondisi Rusak di Sekitar Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar	16
Grafik 2.2	Konsumsi Listrik Per Kapita di Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	21
Grafik 2.3	Kapasitas Air Baku dan Produksi Air Bersih yang dikelola Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	25
Grafik 2.4	Luas Sebaran Cekungan Air Tanah berdasarkan Kecamatan (Ha)	26
Grafik 2.5	Proporsi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%) Tahun 2020-2024.....	28
Grafik 2.6	Volume (Ribuan Ton) dan Pertumbuhan (%) Produksi Perikanan Budidaya Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	29
Grafik 2.7	Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan Kota Makassar Tahun 2020-2024	30
Grafik 2.8	Perkembangan Angka Konsumsi Ikan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2020-2024 ...	31
Grafik 2.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	32
Grafik 2.10	Indeks Kualitas Air Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	33
Grafik 2.11	Indeks Kualitas Udara Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	34
Grafik 2.12	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	35
Grafik 2.13	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	36
Grafik 2.14	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	37
Grafik 2.15	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	39
Grafik 2.16	Indeks Risiko Bencana Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	40
Grafik 2.17	Potensi Penurunan Emisi GRK Tahunan	42
Grafik 2.18	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2024.....	44
Grafik 2.19	Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan & Nasional Tahun 2020-2024 (%)	50
Grafik 2.20	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota & Sulawesi Selatan Tahun 2024	50
Grafik 2.21	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Provinsi Sulsel, Nasional & Tujuh Kota Setara Lainnya Tahun 2024	51
Grafik 2.22	Perbandingan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berdasarkan distribusi Persentase Kota Makassar dan Sulawesi selatan Tahun 2020-2024	52



Grafik 2.23	Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	53
Grafik 2.24	Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar dan Provinsi Sul-Sel	53
Grafik 2.25	Garis Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2020-2024 ..	55
Grafik 2.26	Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Makassar Tahun 2020-2024 ..	55
Grafik 2.27	PDRB/PDB per Kapita Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional.....	57
Grafik 2.28	PDRB Per Kapita Provinsi & Kab/Kota di Provinsi Sulsel Tahun 2024 (Juta Rupiah)	57
Grafik 2.29	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Makassar ADHK Menurut Lapangan Usaha Utama (Persen) Tahun 2020-2024.....	58
Grafik 2.30	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Makassar ADHK Menurut Lapangan Usaha Utama (Persen) Tahun 2020-2024.....	59
Grafik 2.31	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	60
Grafik 2.32	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024	61
Grafik 2.33	Indeks Gini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2024	62
Grafik 2.34	Indeks Gini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia	63
Grafik 2.35	Capaian Gini Ratio Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya Tahun 2020 s.d 2024.....	63
Grafik 2.36	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024	65
Grafik 2.37	Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	65
Grafik 2.38	Usia Harapan Hidup Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional	66
Grafik 2.39	Angka Kematian Ibu Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	67
Grafik 2.40	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Makassar.....	68
Grafik 2.41	Prevalensi stunting Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional berdasarkan SSGI Tahun 2021-2024.....	68
Grafik 2.42	Prevalensi Stunting Kota Makassar berdasarkan Data EPPGBM Tahun 2021-2024	69
Grafik 2.43	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Kota Makassar Tahun 2020-2024	70
Grafik 2.44	Jumlah Penderita baru TBC BTA(+) yang Ditemukan dan Diobati dan Jumlah Perkiraan Penderita baru TBC BTA (+) di Kota Makassar Tahun 2020-2024	71
Grafik 2.45	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	72
Grafik 2.46	Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Ditangani Dan Sembuh dan Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) di Kota Makassar Tahun 2020-2024	73
Grafik 2.47	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Makassar Tahun 2020-2025.....	74



Grafik 2.48	Persentase Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Literasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2022-2024.....	76
Grafik 2.49	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Literasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Berdasarkan Satuan Pendidikan di Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	76
Grafik 2.50	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Makassar Tahun 2021-2024.....	77
Grafik 2.51	Persentase Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2022-2024.....	78
Grafik 2.52	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Berdasarkan Satuan Pendidikan di Kota Makassar ..	78
Grafik 2.53	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	80
Grafik 2.54	Harapan lama Sekolah Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	81
Grafik 2.55	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Makassar Tahun 2019-2024.....	82
Grafik 2.56	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	83
Grafik 2.57	Cakupan kepesertaan Jamsostek Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	87
Grafik 2.58	Indeks Kota Toleran Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	88
Grafik 2.59	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan situs cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	89
Grafik 2.60	Data Objek Cagar Budaya yang teregistrasi dan ditetapkan	89
Grafik 2.61	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Mendapat Dukungan/Fasilitasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019-2024.....	90
Grafik 2.62	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	91
Grafik 2.63	Indeks Perlindungan Anak Kota Makassar.....	92
Grafik 2.64	Klaster Pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Makassar.....	92
Grafik 2.65	Indeks Pembangunan Gender Kota Makassar 2019-2023.....	93
Grafik 2.66	Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Makassar Tahun 2019-2023.....	94
Grafik 2.67	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Makassar Tahun 2019-2023.....	95
Grafik 2.68	Komposit Indeks Pembangunan Gender (IDG) Kota Makassar 2019-2023.....	95



Grafik 2.69	Indeks Ketimpangan Gender Kota Makassar 2019-2023.....	96
Grafik 2.70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2024 Kota Makassar.....	96
Grafik 2.71	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	97
Grafik 2.72	Indeks Pembangunan Pemuda Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2023	98
Grafik 2.73	IPO Kota Makassar, Provinsi Sul-Sel dan Nasional Tahun 2024.....	99
Grafik 2.74	Perkembangan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024	101
Grafik 2.75	Rasio PDRB dan PDB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024.....	102
Grafik 2.76	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik di Kota Makassar Tahun 2020-2024	103
Grafik 2.77	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar Tahun 2020-2024...	104
Grafik 2.78	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	105
Grafik 2.79	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif Kota Makassar Tahun 2021-2024.....	108
Grafik 2.80	Jumlah Industri Kecil Menengah Kota Makassar tahun 2019-2023	109
Grafik 2.81	Persentase Jumlah Koperasi Sehat Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	110
Grafik 2.82	Perkembangan Kinerja ROA BUMD Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	111
Grafik 2.83	Perkembangan Net Profit BUMD Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	111
Grafik 2.84	Perkembangan Total Aset BUMD Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	112
Grafik 2.85	Produksi Tanaman Padi dan Luas Area Tanaman Padi Kota Makassar Tahun 2020 – 2024.....	113
Grafik 2.86	Produktivitas Padi (ton/ha) Kota Makassar Tahun 2020 – 2024	114
Grafik 2.87	Volume dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kota Makassar Tahun 2020- 2024	115
Grafik 2.88	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Penduduk Usia Kerja di Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	116
Grafik 2.89	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	117
Grafik 2.90	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar, di Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	117
Grafik 2.91	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Makassar Tahun 2020-2024	119
Grafik 2.92	Indeks Kapabilitas Inovasi Kota Makassar Tahun 2022-2024.....	120
Grafik 2.93	Nilai Komponen Indeks Kapabilitas Inovasi Kota Makassar Tahun 2024.....	121



Grafik 2.94	Indeks Kapabilitas Inovasi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	121
Grafik 2.95	Indeks Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024.....	122
Grafik 2.96	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	123
Grafik 2.97	Perbandingan Indeks Inovasi Daerah Kota Makassar dengan Kota Lain Tahun 2024.....	123
Grafik 2.98	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024	124
Grafik 2.99	Indeks Ekonomi Hijau Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	125
Grafik 2.100	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	127
Grafik 2.101	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet pada Berbagai Media di Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	128
Grafik 2.102	Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok Kota Makassar Tahun 2020-2024	129
Grafik 2.103	Tren Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kota Makassar berdasarkan Komoditas Tahun 2020 – 2024	129
Grafik 2.104	Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	130
Grafik 2.105	Perbandingan Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2020-2024	131
Grafik 2.106	Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020- 2024	132
Grafik 2.107	Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar dan Kota Besar Lainnya Tahun 2019-2023.....	133
Grafik 2.108	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional.....	134
Grafik 2.109	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-HB) dan PDRB-HK Kota Makassar, Tahun 2020-2024.....	135
Grafik 2.110	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	136
Grafik 2.111	Rata-Rata Pengeluaran untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	137
Grafik 2.112	Indeks Layanan Infrastruktur Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	138
Grafik 2.113	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	139
Grafik 2.114	Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakaryaan Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	140
Grafik 2.115	Perbandingan Rasio Pajak Daerah Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024.....	144
Grafik 2.116	Perkembangan Inflasi Kota Makassar Tahun 2020 – 2024 (%).....	145



Grafik 2.117	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Makassar Tahun 2024.....	145
Grafik 2.118	Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2025.....	146
Grafik 2.119	Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Bulukumba, Watampone, Parepare, dan Palopo Tahun 2020 – 2024	146
Grafik 2.120	Perkembangan PMA Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Serta Pertumbuhan PMA Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	147
Grafik 2.121	Perkembangan PMDN Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024	148
Grafik 2.122	Perkembangan PMA dan PMDN Kota Makassar dan Provinsi Selatan Selatan, Tahun 2020 – 2024.....	149
Grafik 2.123	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2020 – 2023	150
Grafik 2.124	Nilai SAKIP Kota Makassar Tahun 2020-2024	152
Grafik 2.125	Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023-2024.....	153
Grafik 2.126	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	156
Grafik 2.127	Perbandingan Rata-Rata Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Nasional Tahun 2024.....	156
Grafik 2.128	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019-2023.....	158
Grafik 2.129	Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	159
Grafik 2.130	Indeks SPI Kota Makassar Tahun 2021-2024	160
Grafik 2.131	Ringkasan Indeks SPI Tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar.....	161
Grafik 2.132	Nilai MCP Kota Makassar Tahun 2021-2024	162
Grafik 2.133	Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Makassar Tahun 2020-2024	164
Grafik 2.134	Persentase Gangguan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2020-2024	166
Grafik 2.135	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan Tahun 2020-2024	167
Grafik 2.136	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani Tahun 2020-2024.....	168
Grafik 2.137	Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Anggota DPRD	169
Grafik 2.138	Perda Inisiatif DPRD Tahun 2020-2024	170
Grafik 2.139	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Tahun 2020-2024.....	171
Grafik 2.140	Jumlah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Sister City) Tahun 2020-2024	172
Grafik 2.141	Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kota Makassar Tahun 2022 – 2024	173
Grafik 2.142	Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia, Tahun 2022-2024.....	173



Grafik 2.143	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama Tahun 2020-2024.....	174
Grafik 2.144	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020-2024	175
Grafik 2.145	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Tahun 2020-2024.....	176
Grafik 2.146	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Balita, dan Anak Usia Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024	177
Grafik 2.147	Persentase Warga Negara Usia 15-59 Tahun dan 60 Tahun keatas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024.....	178
Grafik 2.148	Persentase Penderita Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ, TBC, dan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024.....	179
Grafik 2.149	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kota Tahun 2020-2024 ...	180
Grafik 2.150	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	181
Grafik 2.151	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024.....	182
Grafik 2.152	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota Tahun 2020-2024	183
Grafik 2.153	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024	184
Grafik 2.154	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....	185
Grafik 2.155	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.....	186
Grafik 2.156	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2020-2024	186
Grafik 2.157	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2020-2024.....	187
Grafik 2.158	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2020-2024.....	188
Grafik 2.159	Fasilitasi Hunian Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	189
Grafik 2.160	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 ha di Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024	190
Grafik 2.161	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2020-2024.....	191



Grafik 2.162	Jumlah Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) Tahun 2020-2024.....	192
Grafik 2.163	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	193
Grafik 2.164	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Tahun 2020-2024.....	194
Grafik 2.165	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2020-2024	195
Grafik 2.166	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2020-2024	196
Grafik 2.167	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran Tahun 2020-2024	196
Grafik 2.168	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Tahun 2020-2024.....	197
Grafik 2.169	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Tahun 2020-2024.....	198
Grafik 2.170	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja Tahun 2020-2024	198
Grafik 2.171	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2020-2024	199
Grafik 2.172	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak Tahun 2020-2024	200
Grafik 2.173	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja Tahun 2020-2024 ..	200
Grafik 2.174	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD Tahun 2020-2024	201
Grafik 2.175	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota Tahun 2020-2024 ..	202
Grafik 2.176	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2020-2024.....	202
Grafik 2.177	Persentase Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024 .	203
Grafik 2.178	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan Tahun 2020-2024	203
Grafik 2.179	Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum Tahun 2020-2024	204
Grafik 2.180	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Tahun 2020-2024	204
Grafik 2.181	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Tahun 2020-2024.....	205
Grafik 2.182	Tersedianya tanah untuk Masyarakat Tahun 2020-2024.....	205
Grafik 2.183	Penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi Tahun 2020-2024	206
Grafik 2.184	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2024.....	207
Grafik 2.185	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota Tahun 2020-2024	207



Grafik 2.186	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan Tahun 2020-2024.....	208
Grafik 2.187	Persentase Perekaman KTP elektronik Tahun 2020-2024.....	209
Grafik 2.188	Persentase anak usia 0–1 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) Tahun 2020-2024.....	209
Grafik 2.189	Kepemilikan akta kelahiran (%) Tahun 2020-2024 ...	210
Grafik 2.190	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Tahun 2020-2024	210
Grafik 2.191	Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Makassar Tahun 2020-2024.....	212
Grafik 2.192	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) Kota Makassar Tahun 2020-2024	212
Grafik 2.193	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (<i>unmet need</i>) Kota Makassar Tahun 2020-2024	213
Grafik 2.194	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota tahun 2020-2024.....	214
Grafik 2.195	V/C Ratio di Jalan Kota tahun 2020-2024	214
Grafik 2.196	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet Tahun 2020-2024.....	215
Grafik 2.197	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2020-2024.....	216
Grafik 2.198	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public Tahun 2020-2024	216
Grafik 2.199	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Tahun 2020-2024.....	217
Grafik 2.200	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha Tahun 2020-2024	218
Grafik 2.201	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Tahun 2020-2024.....	219
Grafik 2.202	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tahun 2020-2024.....	219
Grafik 2.203	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Tahun 2020-2024	220
Grafik 2.204	Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024	221
Grafik 2.205	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020-2024.....	221
Grafik 2.206	Persentase PD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2020-2024.....	222
Grafik 2.207	Tingkat keamanan informasi pemerintah Tahun 2020-2024.....	223
Grafik 2.208	Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2020-2024...	223
Grafik 2.209	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2020-2024.....	224
Grafik 2.210	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024.....	225
Grafik 2.211	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024.....	225



Grafik 2.212	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan Tahun 2020-2024	226
Grafik 2.213	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	228
Grafik 2.214	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	229
Grafik 2.215	Persentase kinerja realisasi pupuk	230
Grafik 2.216	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.....	231
Grafik 2.217	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah Tahun 2020-2024.....	233



DAFTAR ISTILAH

%	Persentase	ATS	Anak Tidak Sekolah
3R	Reduce, Reuse, dan Recycle	B2SA	Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
ABK	Angka Beban Ketergantungan	B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
ADHB	Atas Dasar Harga Berlaku	Babinsa Balitbangda	Bintara Pembina Desa Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
ADHK	Atas Dasar Harga Konstan	Bapenda	Badan Pendapatan Daerah
AI	Artificial intelligence	Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
AKABA	Angka Kematian Balita	BBWS	Balai Besar Wilayah Sungai
AKB	Angka Kematian Bayi	BerAKHLAK	Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif
AKG	Angka Kecukupan Energi	Bhabinkantibmas	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
AKI	Angka Kematian Ibu	BJP	Bukan Jaringan Perpipaan
AKN	Angka Kematian Neonatal	BJP	Bukan Jaringan Perpipaan
AKSARA	Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon	BKPSDMD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
ALKI	Alur Laut Kepulauan Indonesia	BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Alsintan	Alat Mesin Pertanian	BOD	Biochemical Oxygen Demand
AN	Asesmen Nasional	BOP	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan
ANC	Antenatal Care	BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
APBN	Anggaran Pendapatan Belanja Negara	BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
APIP	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
APK	Angka Partisipasi Kasar		
APM	Angka Partisipasi Murni		
APS	Angka Partisipasi Sekolah		
APS	Angka Putus Sekolah		
ARG	Anggaran Rensponsif Gender		
Arsinum	Air Siap Minum		
ASFR	Age Specific Fertility Rate		
ASN	Aparatur Sipil Negara		
ATM	Anjungan Tunai Mandiri		
ATR	Agraria dan Tata Ruang		



BPN	Badan Pertanahan Nasional	DP3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
BPS	Badan Pusat Statistik		Perlindungan Anak
BPU	Bukan Penerima Upah	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
BSPS	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BSU	Bank Sampah Unit		Kependudukan dan Catatan Sipil
BTA(+)	Bakteri Tahan Asam Positif	Dukcapil	Ecosystem Approach to Aquaculture
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah	EAA	Escherichia coli
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	E-Coli	Ekonomi Kreatif
CAT	Cekungan Air Tanah	Ekraf	Education
CHSE	Cleanliness, Health, Safety, Environment	EMIS	Management Information System
CHT	Cukai Hasil Tembakau	e-PPGBM	Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
Co2	Karbon Dioksida		International Eight Festival and Forum
CO ₂ eq	Carbon Dioxide Equivalent	F8	Gemar Makan Ikan
COD	Chemical Oxygen Demand	GEMARIKAN	Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi
COVID-19	Corona Virus Disease 2019	GEMASKOP	Gas Rumah Kaca
CPR	Contraceptive Prevalence Rate	GRK	Graha Tata Cemerlang
CSR	Corporate Social Responsibility	GTC	Hektar Are
DAK	Dana Alokasi Khusus	Ha	Hak Asasi Manusia
Dapodik	Data Pokok Pendidikan	HAM	Harga Berlaku
DAS	Daerah Aliran Sungai	HB	Human
DAU	Dana Alokasi Umum	HIV	Immunodeficiency Virus
DBH	Dana Bagi Hasil	HK	Harga Konstan
DDLH	Daya Dukung Lingkungan Hidup	HKPD	Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
DHL	Daya Hantar Listrik		Harapan Lama Sekolah
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	HLS	Indeks Pembangunan Keluarga
Dishub	Dinas Perhubungan	iBangga	Indonesia Blue Economy Index
Diskominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	IBEI	Indeks Pemberdayaan Gender
Disnaker	Dinas Tenaga Kerja	IDG	Indeks Daya Saing Daerah
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta	IDSD	Innovative Government Award
DLH	Dinas Lingkungan Hidup	IGA	Indeks Kualitas Air
DLHK	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	IKA	Indeks Akses Keuangan Daerah
DM	Diabetes Melitus	IKAD	Indeks Ketahanan Daerah
DO	Dissolved Oxygen		
DP2KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IKD	



IKD	Indikator Kinerja Daerah	IPTEKIN	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi
IKK	Indikator Kinerja Kunci	IPUI	Izin Perlindungan Industri
IKK	Indikator Kinerja Kunci	IRB	Indeks Reformasi Birokrasi
IKL	Indeks Kualitas Lahan	IRB	Indeks Resiko Bencana
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IRH	Indeks Reformasi Hukum
IKM	Industri Kecil Menengah	ITB	Insiden Tuberkulosis
IKN	Ibu Kota Negara	IUI	Izin Usaha Industri
IKP	Indeks Ketahanan Pangan	IUKI	Izin Usaha Kawasan Industri
IKT	Indeks Kota Toleran	IUP	Indikator Utama Pembangunan
IKU	Indeks Kualitas Udara	IUPP	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
IKU	Indikator Kinerja Utama	IUTM	Izin Usaha Toko Modern
IMB	Izin Mendirikan Bangunan	IUTS	Izin Usaha Toko Swalayan
Inmendagri	Instruksi Menteri Dalam Negeri	Jabar	Jawa Barat
IPA	Indeks Perlindungan Anak	JAKON	Jasa Konstruksi
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jamsostek	Jaminan Sosial Tenaga Kerja
IPG	Indeks Pembangunan Gender	Jateng	Jawa Tengah
IPHA	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Jatim	Jawa Timur
IPKA	Indeks Perlindungan Khusus Anak	JDIH	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
IPKD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
IPKI	Izin Perluasan Kawasan Industri	Jt	Juta
IPKKU	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Juknis	Petunjuk Teknis
IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	K/L	Kementerian/Lembaga
IPLT	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	KA	Kereta Api
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	Kab	Kabupaten
IPO	Indeks Pembangunan Olahraga	Kanwil	Kantor Wilayah
IPP	Indeks Pelayanan Publik	KB	Keluarga Berencana
IPP	Indeks Pembangunan Pemuda	Kec.	Kecamatan
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	KEHATI	Keanekaragaman Hayati
		KEK	Kekurangan Energi Kronis
		Kemenag	Kementerian Agama
		Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
		KemenPANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi



KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	LPNK	Lembaga Pemerintah Non Kementerian
KEN	Karisma Event	LPPD	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kesbangpol	Nusantara	LRA	Laporan Realisasi Anggaran
KFD	Kesatuan Bangsa dan Politil	m ²	Meter Persegi
Kg	Kapasitas Fiskal	m ³	Meter Kubik
KI	Daerah	MA	Madrasah Aliyah
KIA	Kilogram	MBG	Makan Bergizi Gratis
KLHS	Kekayaan Intelektual	MCP	Monitoring Center for Prevention
Km	Kartu Identitas Anak	mCPR	Modern Contraceptive
Km ²	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	MI	Madrasah Ibtidaiyah
KPBU	Kilometer	MICE	Meeting, Incentive, Convention, Exhibition
KPK	Kilometer Persegi	MNP	Makassar New Port
KPUD	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	MoU	Memorandum of Understanding
KSN	Komisi Pemberantasan Korupsi	MTs	Madrasah Tsanawiyah
KSP	Komisi Pemilihan Umum Daerah	Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
KSW	Kawasan Strategis Nasional	Musrenbang	Musyawarah Rencana Pembangunan
KSP	Kawasan Strategis Provinsi	N/A	Not Available
KSPI	Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur	Narkoba	Narkotika dan Obat Terlarang
KSW	Kelompok Sadar Wisata	NIB	Nomor Induk Berusaha
KSW	Kawasan Strategis Wisata	NKV	Nomor Kontrol Veteriner
KTI	Kawasan Timur Indonesia	ODGJ	Orang Dengan Gangguan Jiwa
KTP	Kartu Tanda Penduduk	OJK	Otoritas Jasa Keuangan
KUA	Kebijakan Umum Anggaran	OPD	Organisasi Perangkat Daerah
KwH	Kilowatt-hour	OSS	Online Single Submission
KwP	Kilowatt Peak	P1	Indeks Kedalaman Kemiskinan
Lab	Laboratorium	P2	Indeks Keparahan Kemiskinan
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PA	Perlindungan Anak
LKS	Lembaga Kerja Sama	PAD	Pendapatan Asli Daerah
LLAJ	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	P-APBD	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LNPR	Lembaga Non-Profit Rumah Tangga	PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
LNS	Lembaga Non Struktural		



PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa	PLTD	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PBB-P2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PBG	Persetujuan Bangunan Gedung	PMA	Penanaman Modal Asing
PBI	Penerima Bantuan Iuran	PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PBJ	Pengadaan Barang dan Jasa	PMTB	Pembentukan Modal Tetap Bruto
PD	Perangkat Daerah	PNS	Pegawai Negeri Sipil
PD	Perusahaan Daerah	Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum	PoU	Prevalance of Undernourishment
PDB	Produk Dometik Bruto	PPA	Perlindungan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto	PPAS	Perempuan dan Anak
PEKPPP	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	PPh	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pemda	Pemerintah Daerah	PPH	Pajak Penghasilan
Perda	Peraturan Daerah	PPKS	Pola Pangan Harapan
Perkada	Peraturan Kepala Daerah	PPLH	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Perkin	Perjanjian Kinerja	Prov	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri	PSDH	Provinsi
Perwali	Peraturan Wali Kota	PSN	Provisi Sumber Daya Hutan
pH	Potensial Hidrogen	PSU	Proyek Strategis Nasional
PHA	Pemenuhan Hak Anak	PTSP	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PHMS	Penyakit Hewan Menular Strategis	PU	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PIHPS	Pusat Informasi Harga Pangan Strategis	PU	Pekerjaan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah	PUG	Penerima Upah
PISA	Program for International Student Assessment	PUS	Pengarusutamaan Gender
PKB	Perjanjian Kerja Bersama	Puspaga	Pasangan Usia Subur
PKBM	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	PUU LH	Pusat Pembelajaran Keluarga
PKK	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	PUU	Peraturan Perundangan-Undangan Lingkungan Hidup
PKL	Pedagang Kaki Lima	QRIS	Peraturan Undang-Undang
PKS	Perjanjian Kerjasama	RAD	Quick Response Code Indonesian Standard
PLB	Pendidikan Luar Biasa	Ranperda	Rencana Aksi Daerah
PLN	Perusahaan Listrik Negara		Rancangan Peraturan Daerah



Rantek	Rancangan Teknokratik	RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RAPBD	Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RAPBN	Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara	RPJPD	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RAT	Rapat Anggota Tahunan	RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RB	Reformasi Birokrasi		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang	RPPLH	Rumah Sakit
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi		Rukun Tetangga
Renja	Rencana Kerja	RS	Ruang Terbuka Hijau
Renstra	Rencana Strategis	RT	Rumah Tidak Layak Huni
RI	Republik Indonesia	RTH	Ruang Terbuka Non Hijau
RIPIN	Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional	RTLH	Rencana Tata Ruang
		RTNH	Rencana Tata Ruang Wilayah
RIPJPID	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	RTR	Rukun Warga
		RTRW	Strata II/Magister
RIPK	Rencana Pengembangan Indsutri Kab/Kota	RW	Strata III/Doktoral
		S2	Survey Angkatan Kerja Nasional
RISPAM	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum	S3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran	Sakernas	Satuan Perlindungan Masyarakat
RKFD	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	SAKIP	Satuan Polisi Pamong Praja
RKP	Rencana Kerja Pemerintah		Sekolah Dasar
		Satlinmas	Sumber Daya Air
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Satpol PP	Sumber Daya Alam
RLS	Rata-Rata Lama Sekolah	SD	Sustainable Development Goals
ROA	Return on Assets	SDA	Sport Development Index
Rombel	Rombongan Belajar	SDA	Sumber Daya Manusia
Rp	Rupiah	SDG's	Surat Edaran
RP3KP	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	SDI	Sekretariat Daerah
		SDM	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
		SE	Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum
		Setda	
		SILPA	
RPIP	Rencana Pembangunan Industri Provinsi	SIMPAM	



SIPSN	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional	TB TBC TDS	Tuberkulosis Tuberculosis Total Dissolved Solids
SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	TFR THIS	Total Fertility Rate Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
SISRUTE	Sistem Rujukan Terintegrasi	Thn TI	Tahun Teknologi Informasi
SIUP	Surat Izin Usaha Perdagangan	TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional	TKD TOD	Transfer ke Daerah Transit Oriented
SKM	Survey Kepuasan Masyarakat	TOL	Development Tanah Obyek
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Ton	Landreform Tonase
SMA	Sekolah Menengah Atas	TPA	Tempat Pemrosesan Akhir
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
SMP	Sekolah Menengah Pertama	TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SOP	Standar Operasional Prosedur	TPG	Tunjangan Profesi Guru
SPALD-S	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat	TPI	Tempat Pelelangan Ikan
SPALD-T	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat	TPP TPPO	Tambahan Penghasilan Pegawai Tindak Pidana
SPAM	Sistem Penyediaan Air Minum	TPS	Perdagangan Orang Tempat Penampungan Sementara
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	TPS3R	Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
SPI	Survey Penilaian Integritas	TPST	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
SPIP	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
SPM	Standar Pelayanan Minimal	Trantibumlinmas	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
SPP	Standar Pelayanan Perkotaan		Masyarakat
SR	Sambungan Rumah	TSS	Total Suspended Solids
SR	Sambungan Rumah	TT	Tidak Terakreditasi
SSGI	Studi Status Gizi Indonesia	UHH	Usia Harapan Hidup
STBM	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	UKM	Usaha Kecil dan Menengah
Sulsel	Sulawesi Selatan	UKPBJ	Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
Sumut	Sumatera Utara		Usaha Kesehatan Sekolah
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional	UKS	
Tamsil	Tambahan Penghasilan		



UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMKMK	Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
UMR	Upah Minimum Regional
UNDP	United Nations Development Programme
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
USD	US Dollar
UTTP	Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
UU	Undang-Undang
WASH	Water, Sanitation, and Hygiene
WDP	Wajar Dengan Pengecualian
Wisman	Wisatawan Mancanegara
Wisnus	Wisatawan Nusantara
WS	Wilayah Sungai
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	Year on Year



BAB I

Pendahuluan



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah kabupaten dan kota, dimana masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah, guna menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan 3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang disahkan pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Peraturan Daerah Kota Makassar 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5). Peroidesasi RPJMD Kota Makassar, masih mempunyai masa keberlakuan sampai dengan tahun 2026, akan tetapi peroidesasi RPJMD Kota Makassar hanya memiliki keberlakuan 3 (tiga) tahun, sebagai konsekuensi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pasal 201 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur bahwa waktu menjabat bagi kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 adalah sampai tahun 2024, sebagai konsekuensi yuridis dari diadakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 27 November 2024. Dengan demikian, RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh Pemerintah Kota Makassar untuk periodisasi Tahun 2025-2029. Proses pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2024, telah memilih pasangan **Munafri Arifuddin, SH** dan **Aliyah Mustika Ilham, SE, MAP**, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2025-2029 setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Makassar mempunyai kewajiban untuk menyusun RPJMD Tahun 2025-



2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Landasan penting penyusunan RPJMD adalah Indonesia Emas Tahun 2045 yang tertuang dalam RPJPD Kota Makassar dan RPJPN Tahun 2025-2045. Cita-cita Indonesia Emas 2045 perlu didukung dengan kontribusi pembangunan tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi secara maksimal sesuai urusan dan kewenangan masing-masing. Dalam usaha perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045, maka sinkronisasi dan sinergitas perencanaan mulai dari nasional, provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, inovatif, dan responsif, serta selaras. Landasan penting lainnya dalam penyusunan RPJMD adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2024-2043. Penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dimana KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD, sehingga pengambilan keputusan pembangunan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dapat dihindari.

Proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu: Pendekatan teknokratik, Pendekatan politis, Pendekatan partisipatif, dan Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Adapun secara substansi, penyusunan dokumen RPJMD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Selain itu, pada perspektifnya, RPJMD ini didesain dengan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dalam perspektif ekonomi hijau dan ekonomi biru, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan daya saing daerah melalui pendekatan kemandirian lokal. Seluruh desain perencanaan tersebut bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa depan.

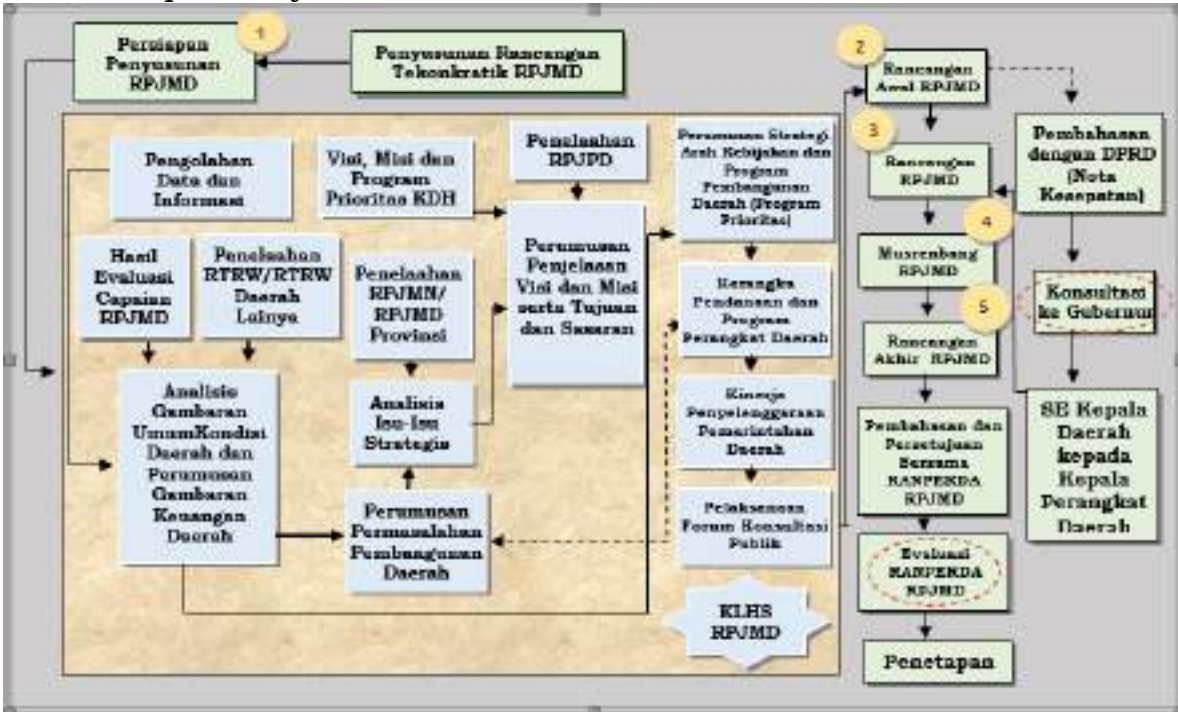
Pembangunan daerah kedepan harus menggunakan paradigma baru agar lebih dapat mencapai kesejahteraan masyarakat serta pemerataan hasil-hasil pembangunan. Paradigma baru pembangunan yang dikedepankan adalah Transformasi, dimana transformasi mengandung makna perubahan dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru sama sekali, dari keadaan yang sebelumnya menjadi baru dan lebih baik. Transformasi dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, yang didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi pembangunan Kota Makassar meliputi Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola. Transformasi tersebut dapat berjalan baik dengan ditopang oleh kuatnya landasan daerah yang meliputi supremasi hukum, keamanan dan ketertiban, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah yang kondusif serta daya saing daerah yang tinggi. Selanjutnya, dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat sekaligus pembangunan yang berkelanjutan diperlukan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Interaksi yang kuat dan sinergis antara ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dengan mengintegrasikan konsep pembangunan manusia yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya baik fisik dan non fisik secara bijaksana sehingga tercipta



keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif serta pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Transformasi Kota Makassar memerlukan kerangka implementasi berupa pembangunan kewilayahan yang didukung oleh sarana prasarana yang dilaksanakan secara bertahap. Untuk itu diperlukan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

RPJMD Kota Makassar disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi Rancangan Awal ke pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRD Kota Makassar, evaluasi/fasilitasi pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan, hingga penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029. Tahapan penyusunan RPJMD Kota Makassar sebagai dokumen perencanaan pembangunan periode 5 (lima) tahun, dapat digambarkan pada tahapan penyusunan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029



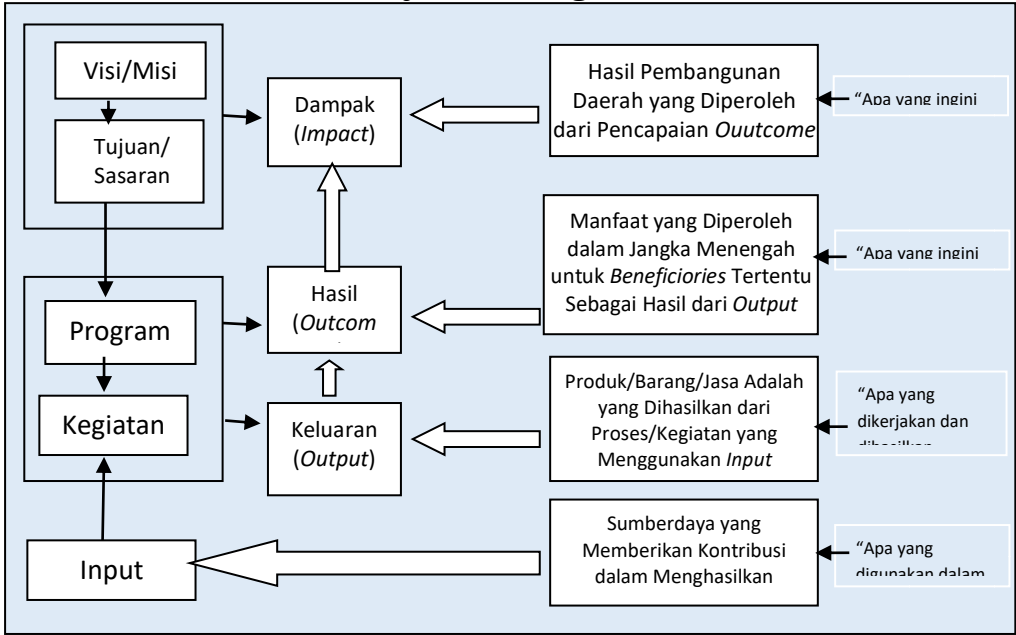
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akan memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Visi menjelaskan suatu kondisi ideal yang ingin dicapai di masa depan (*desired future*) oleh Kota Makassar berdasarkan kondisi dan situasi saat ini. Visi kemudian dirumuskan ke dalam misi-misi pembangunan, dimana misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-



upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, sebagai komitmen keseluruhan *stakeholders* pembangunan daerah. Dimensi dan agenda pembangunan pada visi dan misi, kemudian diuraikan ke dalam tujuan dan sasaran akan dikuantifikasi menjadi indikator dan target kinerja yang dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi. Guna mencapai target-target kinerja tujuan dan sasaran RPJMD, disusun arah kebijakan sebagai pedoman untuk menentukan prioritas pembangunan 1 (satu) tahunan.

Gambar 1.2
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Menengah selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 adalah:

1. Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Undang-Undang Nomor 134 tahun 2024 tentang Kota Makassar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 459 tahun 2018);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1114 Tahun 2019);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;



31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 304);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

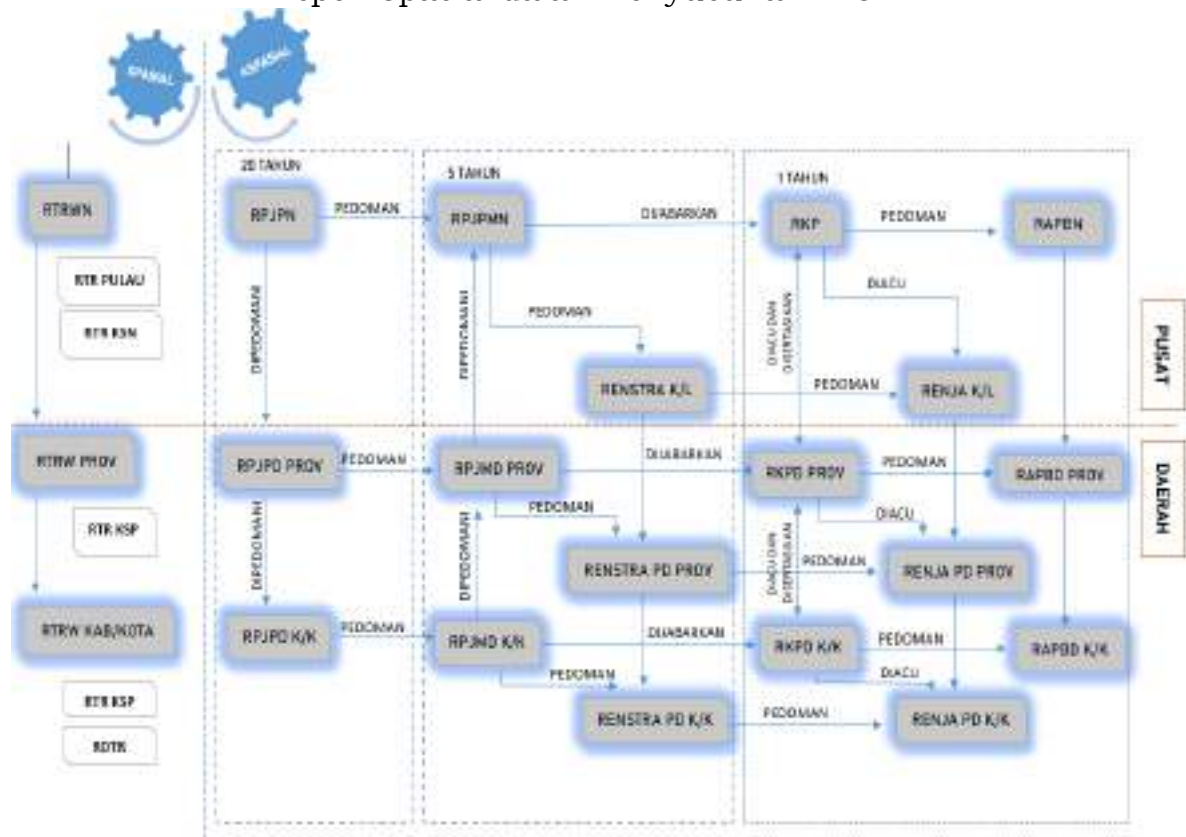
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanahkan bahwa Daerah sesuai kewenangannya menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut pada pasal 263 ayat (3) mengatur bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan periode 20 (dua puluh) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah, secara substansi harus memperhatikan substansi perencanaan dengan pendekatan spasial untuk mempertimbangkan dimensi keruangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanahkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dengan mengacu pada RPJPN. RPJPD Kota Makassar telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2024. Penyusunan RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045 disusun selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 serta RTRW Kota Makassar. Keselarasan RPJPD Kota Makassar dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut meliputi keselarasan dalam visi, misi/agenda pembangunan, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan. Selain itu, penyusunan RPJPD Kota Makassar juga memperhatikan isu strategis dan arah kebijakan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Makassar, hasil evaluasi RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 terutama pada tingkat ketercapaian dan rekomendasi, serta dokumen perencanaan pembangunan sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

RPJMD mempedomani dan selaras dengan RTRW Kota Makassar, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah. RPJMD dan RTRW memiliki keterkaitan yang erat dalam rangka mencapai pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, dimana RTRW merupakan dokumen yang lebih mengedepankan aspek spasial dalam penyusunannya, sedangkan RPJMD lebih kepada aspek aspasial. Fokus utama RTRW adalah pada pengaturan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan memberikan arah dan pedoman



dalam pengembangan ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu konsistensi, integrasi, sinkronisasi serta sinergi antara dokumen RPJPD dan RTRW merupakan hal yang sangat penting. RPJPD sebagai dokumen perencanaan jangka panjang daerah harus mempedomani pemanfaatan ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan di Kota Makassar. Aspek spasial dalam penyusunan RPJPD Kota Makassar, dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1.3
Aspek Spasial dalam Penyusunan RPJMD



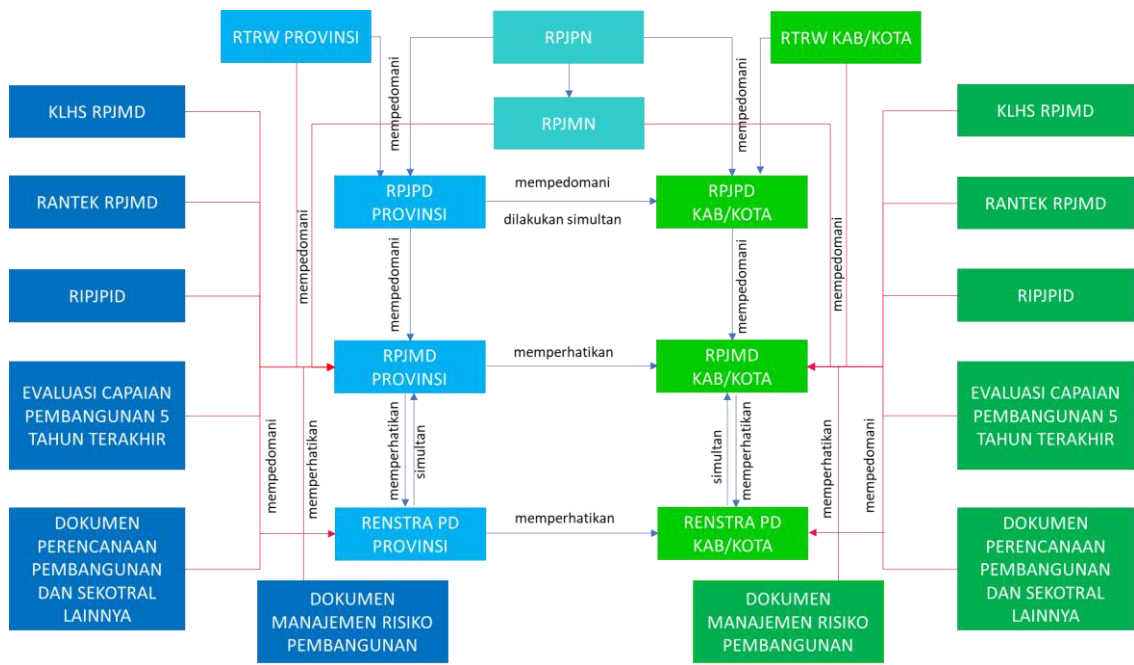
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

Dokumen RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup pemerintah Kota Makassar dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja SKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, yang selanjutnya



menjadi bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD (RAPBD). Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4
Hubungan RPJMD Kota Makassar Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, data diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kota Makassar dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Kepala Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Sebagai penjabaran periodisasi pertama (2025-2029) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar 2025-2045.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
3. Menjamin kesinambungan pembangunan Kota Makassar dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin keselarasan serta berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan menengah Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya.
5. Sebagai pedoman penetapan arah kebijakan, indikator kinerja dan target kinerja, sebagai sasaran Pembangunan Daerah yang ingin dicapai, yang

dijabarkan melalui RKPD dan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

6. Menjadi instrumen bagi DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pembangunan Kota Makassar;
7. Menjadi instrumen bagi masyarakat dan *stakeholder* dalam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kota Makassar, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menciptakan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna mengoptimalkan potensi dan karakteristik Kota Makassar dengan menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

1.5. Sistematika

Sistematika penyusunan RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, memuat:

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah:
 - a. Aspek geografi dan demografi;
 - b. Aspek kesejahteraan masyarakat;
 - c. Aspek daya saing daerah; dan
 - d. Aspek pelayanan umum,
2. Gambaran Keuangan Daerah:

Penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029;
3. Permasalahan dan Isu Strategis:
 - a. Permasalahan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Isu Strategis Daerah

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat:

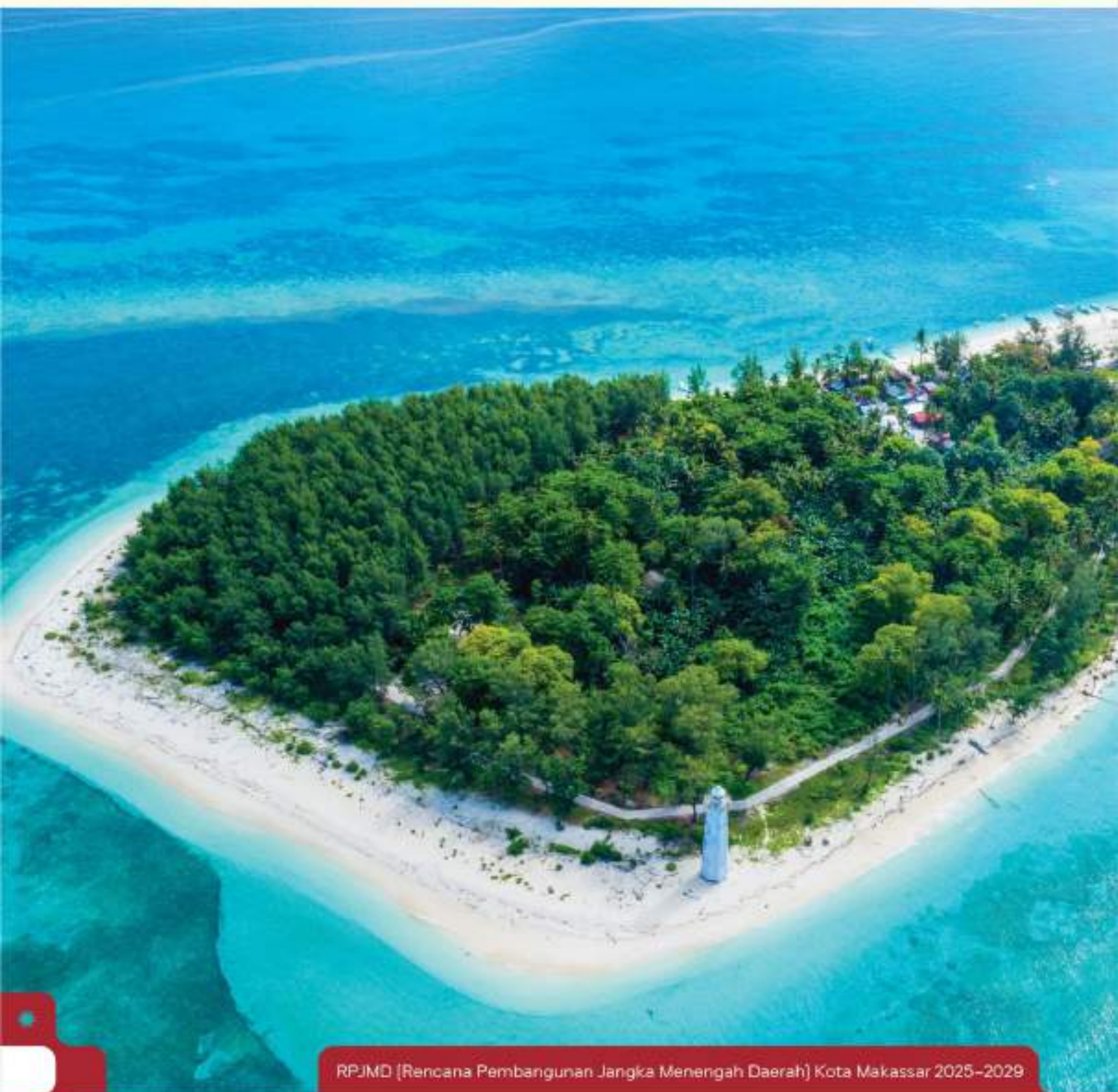
1. Visi dan Misi; dan
2. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat:

1. Program Perangkat Daerah
 - a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan
 - b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
 - b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

BAB V PENUTUP, memuat:

Kaidah Pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

Gambaran Umum Daerah





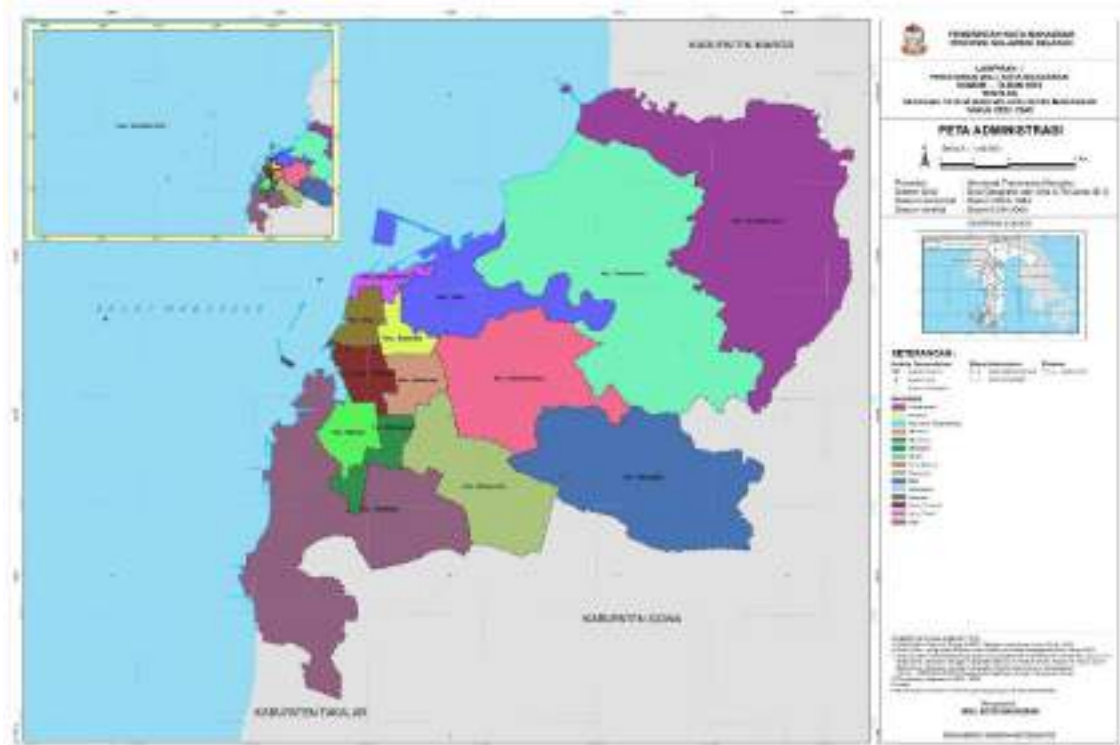
BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kota Makassar memiliki luas wilayah 177,174 km² yang terbagi dalam 15 kecamatan, yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mariso, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Secara administratif, Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Maros di bagian utara, Kabupaten Gowa dan Takalar di bagian selatan, Kabupaten Gowa dan Maros di bagian timur, serta Selat Makassar di bagian barat. Letak geografisnya yang strategis menjadikan Makassar sebagai simpul konektivitas utama yang menghubungkan kawasan barat dan timur Indonesia, serta wilayah selatan dan utara Pulau Sulawesi.

Gambar 2.1.
Peta Wilayah Kota Makassar



Sumber: Perda Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024

Secara geografis, Kota Makassar terletak di Pantai Barat Pulau Sulawesi pada koordinat 119°4'29,038" – 119°32'35,781" Bujur Timur dan 4°58'30,052" – 5°14'0,146" Lintang Selatan. Posisi strategis ini menjadikan Kota Makassar sebagai simpul penting dalam jalur transportasi yang menghubungkan wilayah selatan dan utara Pulau Sulawesi serta kawasan barat dan timur Indonesia. Hal ini menjadikan Makassar sebagai pusat konektivitas yang mendukung perdagangan, transportasi, dan interaksi budaya di Indonesia.

Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar merupakan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia dan memiliki peran sentral dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, dan politik. Kota ini berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan berbagai potensi yang mendukung perkembangan sektor-sektor strategis. Selain memiliki wilayah

daratan yang luas, Makassar juga memiliki pesisir pantai sepanjang 52,8 km yang memberikan nilai tambah dari sisi keindahan alam dan potensi maritim.

Dalam konteks Sistem Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kota Makassar diharapkan untuk menjadi pusat pertumbuhan yang tidak hanya mempercepat perkembangan kota itu sendiri, tetapi juga mendorong kemajuan wilayah-wilayah di sekitarnya. Makassar diposisikan untuk menjadi pusat produksi dan pusat pelayanan dengan skala internasional yang dapat menjadi penggerak utama bagi kawasan Timur Indonesia (KTI). timur, serta berperan aktif dalam perekonomian regional dan nasional.

Posisi geografis Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di antara ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan ALKI III memberikan potensi besar untuk menjadi hub transportasi internasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Asia Tenggara dan Australia. Dengan letaknya yang strategis, Makassar berpotensi besar untuk mendorong konektivitas dan aksesibilitas ke berbagai pasar global.

Selain itu, dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berlangsung, Kota Makassar semakin memiliki peluang untuk berkembang menjadi wilayah penyanggah yang berfungsi sebagai superhub ekonomi nusantara. Hal ini membuka berbagai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor industri berbasis sumber daya alam yang menjadi kekuatan Makassar, seiring dengan arah pembangunan wilayah Sulawesi yang didasarkan pada potensi lokal yang ada. Sebagai daerah penyanggah IKN, kontribusi Kota Makassar akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan nilai tambah dalam beberapa sektor ekonomi, terutama industri pengolahan, akomodasi makan dan minum, perdagangan, serta pariwisata. Penguatan sektor-sektor tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pada akhirnya memperkuat posisi Kota Makassar sebagai pusat ekonomi yang terkemuka di kawasan timur Indonesia.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Makassar memainkan peran penting dalam menunjang kehidupan dan pembangunan kota. Beberapa aspek sumber daya air yang ada di Kota Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sungai

Kota Makassar dilalui oleh tiga sungai besar yang menjadi penopang penting dalam sistem pengelolaan air kota, yaitu Sungai Jeneberang, Sungai Maros, dan Sungai Tallo. Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar adalah DAS Sungai Jeneberang, yang mencakup wilayah seluas 7.609,43 ha dan melintasi 12 kecamatan. DAS Sungai Maros, yang melintasi dua kecamatan, Biringkanaya dan Tamalanrea, mencakup area seluas 5.050,8 ha. Sementara itu, DAS Sungai Tallo memiliki luas wilayah sekitar 4.909,48 ha dan melewati enam kecamatan. Ketiga sungai besar ini bermuara ke laut dalam wilayah pesisir Kota Makassar,

Dua sungai besar, yakni Sungai Jeneberang dan Sungai Maros, memiliki peran vital sebagai sumber air baku bagi kota, serta berfungsi sebagai pengatur aliran air di dalam kota. Kedua sungai tersebut mempengaruhi pola drainase di Kota Makassar, termasuk Sungai Pampang yang terhubung dengan Kanal Sinrijala, yang mana pasang surut air sungai juga berpengaruh terhadap volume air yang mengalir ke kanal-kanal tersebut.

B. Danau dan Waduk

Kota Makassar juga memiliki sejumlah danau dan waduk yang penting dalam pengelolaan air, pengendalian banjir, serta berbagai kegiatan rekreasi dan budidaya ikan. Beberapa danau dan waduk tersebut antara lain:

1. Danau Balang Tonjong yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, memiliki kedalaman antara 1 hingga 6 meter dengan luas area 27 ha dan volume air 1.200.000 m³. Danau ini berfungsi sebagai penampung air hujan, tempat pemancingan ikan, dan untuk budidaya ikan air tawar.
2. Waduk Pantai (long storage) Jeneberang/Danau GTC di Kecamatan Tamalate, yang memiliki luas area 79 ha, berfungsi sebagai penampung air hujan, transportasi air, tempat pemancingan, dan budidaya ikan.
3. Danau Unhas yang terletak di area Universitas Hasanuddin, Kecamatan Tamalanrea, memiliki luas sekitar 2,2 ha hingga 1,2006 ha (data digitasi Danau Unhas) dan berfungsi sebagai tempat penampung air hujan.
4. Waduk Tunggu Sungai Pampang di Kecamatan Manggala, dengan luas area 42,5 ha dan volume air 320.000 m³, berfungsi untuk menampung air hujan dan pemancingan ikan.
5. Danau Borong di Kecamatan Panakkukang, dengan luas 67 ha, yang juga berfungsi sebagai penampung air hujan dan tempat pemancingan ikan.
6. Kolam Regulasi Nipa-Nipa yang memiliki luas area 84 ha dan volume air 3,56 juta m³, berfungsi sebagai pengendali banjir.

Secara keseluruhan, danau dan waduk ini berperan penting dalam pengendalian banjir, pengelolaan air hujan, serta sebagai fasilitas rekreasi dan budidaya ikan. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaannya, seperti adanya titik penambangan pasir di Waduk GTC dan tingginya sedimentasi serta perkembangan tanaman enceng gondok di Danau Balang Tonjong yang berdampak pada kapasitas tampung air danau tersebut.

C. Air Tanah

Air tanah di Kota Makassar tersebar terutama di wilayah bagian barat kota, dengan kedalaman yang bervariasi antara 15 hingga 150 meter pada wilayah yang memiliki morfologi berbukit. Potensi air tanah di kota ini cukup besar, dengan volume penggunaan air tanah yang berkisar antara 20 m³/hari hingga 150 m³/hari. Air tanah ini menjadi salah satu sumber utama air baku, selain dari air bersih yang disalurkan melalui sistem perpipaan oleh Perumda Air Minum.

Namun, kualitas air tanah di beberapa wilayah Kota Makassar menunjukkan tantangan serius, di mana beberapa parameter kualitas air melebihi ambang batas yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya intrusi air laut yang mengakibatkan peningkatan kadar salinitas (keasinan air). Wilayah yang terdampak oleh intrusi air laut ini mencakup Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Bontoala, dan Biringkanaya. Berdasarkan parameter salinitas, sekitar 2,6% potensi air tanah di wilayah-wilayah ini berada pada kondisi rawan kerusakan. Selain itu, berdasarkan nilai daya hantar listrik (DHL), sekitar 6,6% air tanah mengalami kerusakan pada tingkat rawan, sementara 4% berada pada tingkat kerusakan berat.

Secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya air di Kota Makassar memerlukan perhatian lebih, mengingat adanya permasalahan seperti intrusi air laut, sedimentasi, dan penambangan pasir yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan.

D. Sumber Daya Pesisir

Kota Makassar, dengan garis pantai dan letak geografis yang strategis, memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, baik dari sisi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perairan di sekitar Kota Makassar, khususnya Selat Makassar dan Teluk Bone, merupakan jalur migrasi penting bagi berbagai jenis ikan pelagis bernilai ekonomi tinggi seperti cakalang, tongkol, tuna, dan kembung. Kondisi ini menjadikan perikanan tangkap sebagai salah satu sektor unggulan Kota Makassar, yang berkontribusi besar terhadap mata pencaharian nelayan lokal serta pengembangan industri perikanan berskala nasional dan ekspor.

Selain potensi perikanan tangkap, Makassar juga dikenal memiliki kekuatan dalam perikanan budidaya, khususnya budidaya udang dan ikan bandeng. Kegiatan ini tersebar di pesisir Kecamatan Tallo, Tamalate, dan Biringkanaya, yang memiliki karakteristik lahan dan perairan yang sangat mendukung. Selain memberikan penghasilan bagi masyarakat pesisir, juga berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan, serta menyediakan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan di daerah.

Sektor kelautan dan perikanan di Makassar tidak hanya terbatas pada produksi bahan mentah, tetapi juga menjadi pendorong tumbuhnya industri pengolahan hasil laut. Produk-produk seperti fillet ikan, udang beku, abon ikan, hingga kerupuk ikan diproduksi dengan standar kualitas tinggi, menjadikan Makassar sebagai pusat pengolahan dan pengemasan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global. Keberadaan industri ini memberikan nilai tambah pada komoditas lokal, sekaligus membuka lapangan kerja, mengembangkan sektor logistik, dan memperkuat struktur ekonomi daerah secara menyeluruh.

Selain potensi perikanan, Kota Makassar merupakan salah satu kota pesisir yang memiliki potensi wisata bahari, dengan Pantai Losari sebagai salah satu ikon wisata. Kota Makassar menawarkan pengalaman menikmati keindahan laut dan tempat menikmati matahari terbenam. Kawasan ini telah berkembang menjadi ruang publik yang modern dan representatif. Kota Makassar juga dikelilingi oleh sejumlah pantai alami seperti Pantai Akkarena serta Pantai Tanjung Bayang.

Kota Makassar juga memiliki gugusan kepulauan yang terdiri dari 13 pulau karang yang indah dan tersebar di sekitarnya. Pulau-pulau tersebut, termasuk Pulau Lanjukang (pulau terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Gusung, Pulau Kolokoloang, dan Pulau Kayangan (pulau terdekat), memiliki peranan penting dalam keanekaragaman hayati serta menjadi bagian integral dari sistem lingkungan yang ada, pulau-pulau ini juga tercatat secara resmi sebagai bagian dari wilayah administrasi pemerintahan yang memperkaya identitas kota ini, dan menjadi potensi dalam pengelolaan pariwisata bahari.

Sebagai kota yang terletak di wilayah pesisir, Kota Makassar juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa di sekitar garis pantainya, yang terdiri dari tiga ekosistem utama, yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Masing-masing ekosistem ini memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan dan mendukung keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tersebut.

Mangrove di Kota Makassar tersebar di enam wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea. Hutan mangrove terluas terdapat di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea dan Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo. Ekosistem mangrove di Kota Makassar berperan vital sebagai



habitat bagi berbagai jenis fauna, seperti insekta, ular, burung (terutama bangau), kepiting, kerang, serta berbagai jenis invertebrata lainnya.

Padang lamun menjadi salah satu ekosistem penting yang ditemukan di sekitar pesisir Kota Makassar. Padang lamun memiliki manfaat sebagai habitat berbagai biota laut seperti ikan, udang dan moluska; mencegah erosi dan menstabilkan sedimen; meningkatkan kualitas air dengan menyerap karbon dioksida (Co₂), menyaring zat-zat berbahaya dan mengurangi kadar nitrogen di perairan; menjadi area perikanan tangkap, sumber biota konsumsi dan tempat wisata bahari.

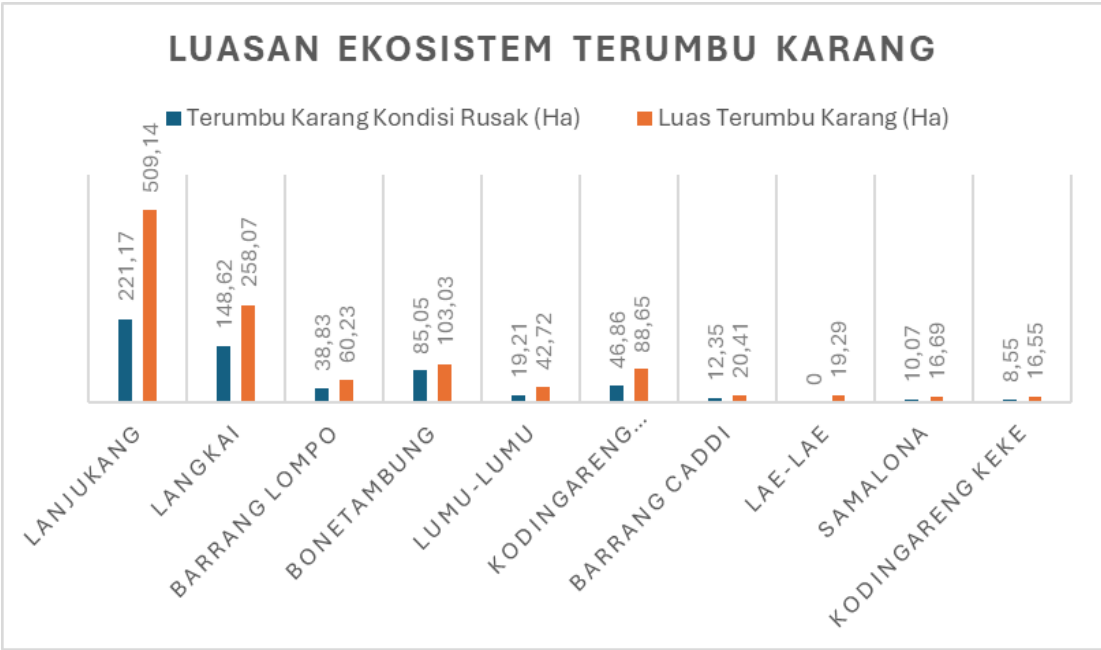
Padang lamun di sekitar wilayah pulau memiliki kepadatan antara 17 hingga 232 tegakan/m² dan dapat ditemukan di sekitar Pulau Lumu-Lumu, Pulau Lanjukang, Pulau Bonetambung, dan Pulau Langkai. Di antara jenis-jenis lamun yang ada, *Cymodocea rotundata* adalah yang paling dominan, dengan luas tutupan mencapai 27,12% dari total tutupan lamun yang berada di pulau Lumu-Lumu sedangkan luas tutupan terendah adalah jenis *Halophila ovalis* di lokasi pengamatan Pulau Bone Tambung yaitu 6,36%. Pada tahun 2022, tercatat bahwa sekitar 31% hingga 81,3% ekosistem lamun mengalami kerusakan, dengan tingkat kerusakan tertinggi ditemukan di sekitar Pulau Lanjukang. Sebagian besar hal ini diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti reklamasi pantai dan penangkapan ikan secara berlebihan dan tidak ramah lingkungan.

Terumbu karang adalah ekosistem laut yang terdiri dari koloni hewan karang dan berbagai organisme laut lainnya. Terumbu karang memiliki manfaat sebagai habitat bagi hewan laut, seperti ikan, invertebrata laut dan mikroorganisme laut; Sebagai pemecah gelombang alami yang mengurangi dampak gelombang besar dan mencegah abrasi pantai; Membantu menyerap karbon dioksida dan menjaga kualitas air laut; dan terumbu karang memiliki potensi sebagai destinasi untuk wisata selam dan snorkeling yang mendukung ekonomi lokal dan nasional.

Terumbu karang yang berada di sekitar pesisir Kota Makassar merupakan bagian dari gugusan terumbu karang Spermonde, yang membentang dari Pulau Pangkep di bagian utara Kabupaten Pangkep hingga Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar. Pada wilayah sekitar pulau-pulau kecil Makassar, pada tahun 2022 sebaran, luas ekosistem dan terumbu karang dalam kondisi rusak disajikan pada grafik berikut:



Grafik 2.1
Sebaran, Luas Ekosistem Terumbu Karang, dan Terumbu Karang dalam Kondisi Rusak di Sekitar Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar



Sumber: Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, Tahun 2023

Pada tahun 2022, banyak wilayah sekitar pulau-pulau kecil di Makassar mengalami kerusakan pada ekosistem terumbu karangnya. Kerusakan terbesar pada ekosistem terumbu karang terjadi di sekitar Pulau Lanjukang, di mana kerusakan mencapai 82,55% dari luas total terumbu karang di wilayah tersebut, yang mencakup 221,17 ha, lalu pada Pulau Langkai kerusakan mencapai 57,58% dari luas terumbu karang atau sebesar 148,62 Ha dan lalu pada Pulau Bonetambung kerusakan mencapai 82,55% dari luas terumbu karang pada pulau tersebut atau sebesar 85,05 Ha. Salah satu penyebab utama kerusakan tersebut adalah aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, yang sering kali melibatkan penggunaan bahan peledak dan alat penangkap ikan yang merusak struktur karang. Fenomena kenaikan suhu permukaan laut juga menyebabkan pemutihan terumbu karang (coral bleaching) yang mematikan banyak terumbu karang. Selain itu, pemangsaan oleh *Acanthaster planci* (Bintang Laut Mahkota Duri) yang berlebihan turut memperburuk kondisi terumbu karang.

Secara keseluruhan, ketiga ekosistem pesisir Kota Makassar mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam pesisir. Namun, kerusakan yang terjadi pada ekosistem-ekosistem tersebut perlu menjadi perhatian serius, agar potensi alam ini dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

E. Budidaya Hidroponik dan Aquaponik

Budidaya hidroponik dan aquaponik di Kota Makassar menjadi salah satu bentuk urban farming atau pertanian perkotaan. Jenis budidaya ini lahir sebagai respon terhadap keterbatasan lahan di wilayah perkotaan sekaligus menjadi solusi cerdas dalam memanfaatkan ruang sempit seperti halaman rumah, atap bangunan, maupun lahan terbatas. Melalui pendekatan ini, masyarakat perkotaan tetap dapat produktif menghasilkan pangan segar.

Pemerintah kota secara aktif mendorong masyarakat untuk mengadopsi metode pertanian modern yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,



guna menjamin ketersediaan bahan pangan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau. Hidroponik, yang menanam tanaman tanpa tanah melalui larutan nutrisi, serta aquaponik, yang mengintegrasikan budidaya ikan dengan tanaman dalam satu sistem terpadu, terbukti mampu meningkatkan produktivitas pangan lokal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dengan penerapan sistem pertanian inovatif ini, Makassar tidak hanya menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang berketahanan pangan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang hijau produktif.

F. Ekonomi Kreatif

Kota Makassar memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya, seni, dan kuliner. Yang merupakan kekayaan tradisi yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, dipadukan dengan keragaman seni pertunjukan serta cita rasa kuliner khas, menjadikan Makassar sebagai salah satu kota strategis dalam mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Budaya Kota Makassar kaya akan tradisi dan kesenian yang masih dilestarikan hingga kini. Tari tradisional seperti Tari Pakarena dan Tari Paraga mencerminkan keanggunan serta kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, sementara Baju Bodo sebagai pakaian adat Makassar tetap menjadi simbol identitas budaya Kota Makassar. Kehadiran warisan seni dan tradisi ini tidak hanya memperkuat karakter kota, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi tumbuhnya kreativitas masyarakat.

Salah satu wujud nyata dari kekuatan ekonomi kreatif Makassar adalah penyelenggaraan berbagai festival budaya dan kuliner yang mampu menarik perhatian masyarakat luas. Di antara kegiatan tersebut, Makassar International Eight Festival & Forum (F8 Makassar). Event ini kembali terpilih sebagai salah satu dari *10 Top Karisma Event Nusantara (KEN) 2025* oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa F8 sebagai festival berskala internasional memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif kota.

Selain festival dan seni pertunjukan, kuliner khas Makassar juga menjadi daya tarik utama yang memperkuat citra kota. Hidangan legendaris seperti coto Makassar, sop konro, hingga pisang ijo tidak hanya populer di kalangan masyarakat lokal, tetapi juga telah dikenal luas sebagai ikon kuliner nasional. Keunikan cita rasa yang khas menjadikan kuliner Makassar sebagai tujuan pariwisata sekaligus motor penggerak pertumbuhan pelaku usaha kreatif di sektor makanan dan minuman.

Dengan perpaduan kekuatan budaya, seni, dan kuliner, Kota Makassar menempati posisi strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Didukung oleh event berskala nasional dan internasional, serta potensi pariwisata yang terus bertumbuh, Makassar memiliki peluang besar untuk tampil sebagai pusat kreativitas sekaligus destinasi unggulan di kawasan timur Indonesia, yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan global.

G. Wisata Sejarah dan Budaya

Jejak sejarah Makassar dapat ditemui pada berbagai situs bersejarah yang masih terjaga yaitu Benteng Rotterdam, peninggalan kolonial Belanda, menjadi simbol penting dinamika politik dan militer, sementara Makam Pangeran Diponegoro, tempat peristirahatan terakhir sang pahlawan nasional di masa pengasingannya, kini menjadi destinasi ziarah dan wisata edukatif yang sarat nilai historis. Monumen Mandala, yang dibangun untuk mengenang



perjuangan pembebasan Irian Barat. Monumen ini bukan hanya sekadar penanda sejarah, tetapi juga simbol semangat perjuangan bangsa yang tumbuh di jantung kota. Kehadiran berbagai situs bersejarah tersebut menjadikan Makassar tampil sebagai kota yang tidak hanya modern dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga teguh menjaga warisan sejarah dan nilai-nilai perjuangan bangsa.

Selain kekayaan sejarah, budaya Makassar juga memperlihatkan kekuatan tradisi berupa Tari tradisional seperti Tari Pakarena dan Tari Paraga yang mencerminkan keanggunan serta kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Sementara Baju Bodo, sebagai pakaian adat khas Makassar, tetap menjadi simbol identitas budaya yang dijunjung tinggi. Identitas historis yang melekat pada kota ini membuka peluang besar bagi pengembangan sektor pariwisata sejarah dan budaya, sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai pusat kebudayaan, pendidikan, serta sumber inspirasi nasional di kawasan timur Indonesia

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kota Makassar mengacu pada kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, khususnya dalam hal energi penyediaan bahan pangan dan ketersediaan air bersih. Kemampuan lingkungan ini menentukan keseimbangan antara suplai dan permintaan terhadap kebutuhan dasar penduduk serta ekosistem yang ada.

Kondisi daya dukung penyedia bahan pangan di Kota Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
DDLH Penyedia Pangan Kota Makassar Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	LUAS (Ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Kecamatan Biringkanaya	3665,84	12,34
2	Kecamatan Bontoala	4,47	169,33
3	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	20,06	75,33
4	Kecamatan Makassar	-	265,36
5	Kecamatan Mamajang	2,23	248,64
6	Kecamatan Manggala	1640,05	651,42
7	Kecamatan Mariso	45,86	236,03
8	Kecamatan Panakukang	624,03	943,61
9	Kecamatan Rappocini	135,74	960,54
10	Kecamatan Tallo	384,32	577,21
11	Kecamatan Tamalanrea	3854,82	2,27
12	Kecamatan Tamalate	1203,31	1209,57
13	Kecamatan Ujung Pandang	71,47	214,61
14	Kecamatan Ujung Tanah	5,45	133,85
15	Kecamatan Wajo	7,65	197,07
TOTAL		11665,3	5897,18

Sumber: Laporan KLHS RPJMD, Tahun 2025-2029

Berdasarkan data yang tersaji, wilayah dengan luas 5.897,18 ha tersebar di berbagai kecamatan. Pada wilayah ini, ketersediaan energi pangan yang bersumber dari hasil laut, pertanian, dan peternakan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dan makhluk hidup lainnya. Artinya, pasokan



pangan di wilayah tersebut mengalami defisit akibat tingginya permintaan (demand) dibandingkan dengan ketersediaannya (supply).

Secara lebih spesifik, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo hampir sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari wilayah lain. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya pangan lokal sehingga lingkungan di wilayah tersebut tidak mampu menyuplai kebutuhan pangannya sendiri.

Di sisi lain, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Tamalanrea memiliki proporsi wilayah dengan ketersediaan pangan yang lebih baik. Keunggulan ini didukung oleh masih tersedianya lahan produktif untuk budidaya tanaman pangan dengan total luas mencapai 487,36 hektare, serta adanya sektor perikanan tambak dan peternakan yang berkontribusi terhadap suplai pangan di wilayah tersebut.

Ambang batas dan status DDLH Jasa Lingkungan Hidup penyedia air bersih dihitung menggunakan sumber daya air yang berasal dari air permukaan. Sementara itu, kebutuhan yang diperhitungkan adalah kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian tertentu, dan kebutuhan air untuk industri. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian dihitung luas lahan, intensitas penanaman, dan standar penggunaan air.

Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan jumlah penduduk, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian dihitung luas lahan, intensitas penanaman, dan standar penggunaan air. Untuk akumulasi ketersediaan, kebutuhan dan selisih ketersediaan air di setiap kecamatan di Kota Makassar dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2
Ketersediaan, Kebutuhan Air dan Ambang Batas di Kota Makassar

No	Kecamatan	LUAS (Ha)					Ambang Batas (Jiwa)	Jumlah Penduduk
		Ketersediaan Air	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Untuk Lahan	Kebutuhan Air Total	Selisih		
1	Biringkanaya	139,39	176,87	44,70	221,57	-82,18	174.162	58.730
2	Bontoala	8,08	46,20	0,00	46,20	-38,12	10.101	58.293
3	Kepulauan Sangkarrang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	188.432
4	Makassar	10,63	64,60	0,00	64,60	-53,97	13.286	150.613
5	Mamajang	11,56	52,66	0,00	52,66	-41,10	14.456	82.237
6	Manggala	90,18	130,41	38,30	168,71	-78,53	112.638	24.851
7	Mariso	1,71	51,28	1,31	52,58	-40,71	14.839	29.503
8	Panakukang	60,37	136,11	5,32	141,42	-81,05	75.448	55.201
9	Rappocini	41,06	144,54	0,00	144,54	103,49	51.324	36.745
10	Tallo	40,95	134,10	7,08	141,18	100,23	51.165	14.981
11	Tamalanrea	150,27	98,61	35,28	133,89	16,38	187.689	148.055
12	Tamalate	83,46	178,18	29,94	208,12	124,66	104.220	144.204
13	Ujung Pandang	10,27	34,34	0,00	34,34	-24,06	12.841	160.466
14	Ujung Tanah	4,79	35,60	0,00	35,60	-30,81	5.980	215.820
15	Wajo	7,19	32,72	0,00	32,72	-25,53	8.987	106.262
TOTAL		670,07	1316,19	161,93	1478,12	-808,05	837.136	1.474.393

Sumber: Laporan KLHS RPJMD, Tahun 2025-2029

Berdasarkan data yang tersaji, kebutuhan air total di Kota Makassar sebesar 1.478,12 M3/tahun. DDLH air bersih dihitung berdasarkan selisih



antara ketersediaan dengan kebutuhan air bersih. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa ketersediaan air bersih di Kota Makassar sebesar 670,07 M3/tahun dan hal ini menjadikan bahwa untuk ketersediaan dan kebutuhan air bersih di Kota makassar memiliki selisih. Wilayah yang memiliki selisih air paling besar berada di Kecamatan Tamalate dengan - 124,66 M3/Tahun, dan untuk wilayah yang tidak mengalami selisih kebutuhan dan ketersediaan air bersih berada di 1 kecamatan saja yaitu kecamatan Tamalanrea. Untuk selisih air yang bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih suatu wilayah lebih besar dibandingkan ketersediaannya sehingga lingkungan hidup wilayah tersebut tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air bersih penduduk di atasnya. Sebaran spasial selisih ketersediaan air bersih di Kota Makassar.

Untuk Kondisi daya dukung penyediaan air bersih dapat dianalisis berdasarkan ketersediaan air tanah dan air permukaan yang tersebar di berbagai kecamatan. Tabel berikut menyajikan data terkait kondisi tersebut:

Tabel 2.3
DDDLH Penyedia Air Kota Makassar Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	LUAS (Ha)	
		Belum Melampaui	Sudah Melampaui
1	Kecamatan Biringkanaya	651,25	3026,92
2	Kecamatan Bontoala	-	173,8
3	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang	95,39	-
4	Kecamatan Makassar	-	265,36
5	Kecamatan Mamajang	-	250,87
6	Kecamatan Manggala	589,32	1702,14
7	Kecamatan Mariso	1,71	280,18
8	Kecamatan Panakukang	309,16	1258,49
9	Kecamatan Rappocini	-	1096,28
10	Kecamatan Tallo	125,73	835,79
11	Kecamatan Tamalanrea	2173,55	1683,53
12	Kecamatan Tamalate	199,49	2213,38
13	Kecamatan Ujung Pandang	26,39	258,21
14	Kecamatan Ujung Tanah	1,92	135,88
15	Kecamatan Wajo	31,66	173,05
TOTAL		4205,58	13353,89

Sumber: Laporan KLHS RPJMD, Tahun 2025-2029

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa wilayah seluas 13.353,89 hektare tidak lagi mampu menopang kebutuhan air bersih penduduk di atasnya. Dengan kata lain, ketersediaan air tanah dan air permukaan di wilayah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Akibatnya, penduduk di area tersebut harus mengandalkan sumber air alternatif, seperti sistem perpipaan dan suplai air dari daerah lain. Keseluruhan faktor ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar, guna memastikan keseimbangan antara pertumbuhan populasi, pemanfaatan sumber daya, serta kelestarian lingkungan hidup.



2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
2.1.4.1. Konsumsi Listrik Per Kapita (KwH)

Konsumsi energi Listrik Per Kapita menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi listrik yang tinggi dapat memberikan dampak positif antara lain meningkatkan produktivitas, mendorong investasi, mendukung inovasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsumsi energi listrik di Kota Makassar disajikan pada grafik berikut:



Sumber: PLN UP3 Makassar Utara dan Selatan, Tahun 2025.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, konsumsi listrik per kapita Kota Makassar terus meningkat sejak tahun 2020. Tercatat pada tahun 2024 realisasi konsumsi listrik di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ini mencapai 1.561,47 KwH, meningkat 7,83% atau 113,49 KwH dari tahun 2020 dan peningkatan jumlah pelanggan atau sambungan listrik dalam 5 tahun terakhir sebesar 12,98%. Jika dibandingkan terhadap rata-rata konsumsi listrik di Indonesia pada tahun 2023, konsumsi listrik di Kota Makassar berada diatas rata-rata nasional yaitu 1.337 KwH per Kapita. Tetapi masih berada jauh dibawah rata-rata negara Asean yaitu 3.896 KwH per Kapita.

Penyediaan energi listrik di Kota Makassar sebagian besar diselenggarakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan jumlah pelanggan di tahun 2024 mencapai 492.620 pelanggan. Pada 8 pulau di 3 wilayah kelurahan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, penyediaan energi listrik bersumber dari PT.PLN dan Genset. Kelurahan Kodingareng mencakup Pulau Kodingareng dan Pulau Kodingareng Keke, dilayani oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Kodingareng dengan kapasitas 260 KwP dan jumlah pelanggan sebanyak 996 pelanggan. Layanan PLTS ini dapat dinikmati 24 jam oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kelurahan Barrang Lompo dilayani oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) oleh PT.PLN dengan kapasitas 500 KwH dan beroperasi pada pukul 17.00-06.00 Wita. Sedangkan Kelurahan Barrang Caddi mencakup Pulau Barrang Caddi, Pulau Bonetambu, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang dilayani oleh Genset



yang merupakan hibah Pemerintah Kota Makassar kepada warga kelurahan Barrang Caddi.

Pengembangan PLTS di wilayah kepulauan merupakan bentuk dukungan PLN dalam peningkatan pemanfaatan energi hijau untuk mencapai target netral karbon di tahun 2060, sekaligus menjadi potensi pengembangan sumber energi baru terbarukan di Kota Makassar yang bersumber dari energi matahari.

2.1.4.2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Perkembangan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Makassar disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)
Kota Makassar Tahun 2020 – 2024

Makassar	2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%)	5.46	4.35	6.35	5,18	3,97
Pertumbuhan PoU (%)	85,71	-20,33	45,89	-18,43	-23,36

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kota Makassar menunjukkan tren cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tercatat sebesar 5,46%, dan mengalami penurunan signifikan menjadi 4,35% di tahun 2021, atau turun sebesar 20,33%, yang mencerminkan peningkatan akses pangan masyarakat.

Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan PoU menjadi 6,35%, meningkat sebesar 45,98% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, terganggunya rantai pasok pangan, serta meningkatnya tekanan ekonomi rumah tangga.

Kondisi mulai membaik kembali pada tahun 2023, di mana PoU turun menjadi 5,18%, atau menurun 18,43% dari tahun sebelumnya. Perbaikan ini berlanjut pada tahun 2024, saat angka PoU berhasil ditekan lebih jauh menjadi 3,97%, mencatatkan penurunan sebesar 23,36%, sekaligus menjadi level terendah dalam lima tahun terakhir. Nilai 3,97% tergolong rendah, artinya mayoritas penduduk Kota Makassar telah memiliki akses pangan yang cukup dalam hal kuantitas energi. Angka ini juga menunjukkan perbaikan kondisi ketahanan pangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa program ketahanan pangan, bantuan sosial, peningkatan produksi dan distribusi pangan, serta edukasi gizi mulai menunjukkan hasil positif. Namun, meskipun angka sudah rendah, tetap penting untuk menargetkan kelompok rentan seperti rumah tangga miskin, lansia, atau anak-anak di wilayah padat dan miskin, agar angka PoU bisa ditekan lebih lanjut ke level <3%.

2.1.4.3. Indeks Ketahanan Pangan

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang



dinyatakan dalam bentuk persentase. IKP disusun berdasarkan beberapa indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Makassar dan Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Indeks Ketahanan Pangan Kota Makassar dan Sulawesi Selatan
Tahun 2020 – 2024

Indeks Ketahanan Pangan	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Makassar	84,32	83,81	83,86	89,28	87,95
Provinsi Sulawesi Selatan	81,81	80,82	81,38	83,36	83,82

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2025.

IKP Kota Makassar menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, IKP Kota Makassar tercatat sebesar 84,32 persen, sedikit menurun menjadi 83,81 persen pada tahun 2021. Penurunan ini diduga merupakan dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi stabilitas distribusi dan akses pangan masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi sedikit perbaikan menjadi 83,86 persen, dan kemudian melonjak signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai 89,28 persen. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam aspek ketersediaan dan distribusi pangan, serta dampak positif dari intervensi program pemerintah seperti penguatan produksi pangan lokal dan pengendalian inflasi pangan. Meskipun demikian, pada tahun 2024, IKP kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 87,95 persen. Penurunan ini perlu dicermati, terutama untuk mengevaluasi efektivitas keberlanjutan program-program diversifikasi pangan dan distribusi pangan strategis.

Dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, capaian IKP Kota Makassar secara konsisten lebih tinggi, di mana IKP provinsi hanya berada pada kisaran 80,82 hingga 83,82 persen dalam periode yang sama. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum, Kota Makassar memiliki ketahanan pangan yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di provinsi.

2.1.4.4. Skor Pola Pangan Harapan

Secara komparatif, Skor PPH Kota Makassar menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan skor PPH secara nasional, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian skor PPH Provinsi Sulawesi Selatan. Skor PPH Kota Makassar berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2024, PPH Kota Makassar (89,73) melampaui PPH Provinsi Sulawesi Selatan (87,7), namun masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional (92,9).

Tabel 2.6
Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Skor Pola Pangan Harapan	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Makassar	78,8	83,6	84,13	85,2	89,7
Provinsi Sulawesi Selatan	80,4	80,1	83,1	86,5	87,74
Nasional	86,9	87,6	92,3	93,8	92,9

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2024.

Selama periode 2020–2024, Skor PPH Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan dan berkelanjutan. Secara umum, skor PPH Kota Makassar berada pada kategori “Cukup” dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, kecuali pada tahun 2023 dan 2024 yang sempat masuk kategori “Tinggi”. Capaian ini menunjukkan perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam dan seimbang, mendekati target ideal Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).

Perjalanan ketahanan pangan di Kota Makassar selama periode 2020–2024 memperlihatkan dinamika yang menarik sekaligus mencerminkan tantangan dan capaian dalam upaya mewujudkan konsumsi pangan yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan berkelanjutan.

Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, skor Pola Pangan Harapan (PPH) Makassar hanya berada pada angka 78,8. Angka ini lebih rendah dibandingkan Sulawesi Selatan (80,4) dan jauh tertinggal dari rata-rata nasional (86,9). Kondisi ini menggambarkan pola konsumsi masyarakat yang masih bertumpu pada pangan pokok seperti beras, sementara konsumsi pangan sumber protein hewani, sayur, dan buah masih terbatas. Faktor pembatas utama pada masa itu adalah terganggunya distribusi pangan serta penurunan daya beli rumah tangga akibat pembatasan aktivitas ekonomi.

Memasuki tahun 2021, terjadi perbaikan signifikan. Skor PPH Makassar melonjak menjadi 83,6, naik hampir 5 poin dari tahun sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Makassar berhasil melampaui skor rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (80,1), walaupun masih tertinggal dari nasional (87,6). Lonjakan ini menunjukkan tanda pemulihan pasca-pandemi. Aktivitas ekonomi yang kembali bergerak mendorong konsumsi pangan lebih beragam, terutama protein hewani yang relatif mudah diperoleh di perkotaan. Berbagai program intervensi pemerintah daerah, seperti pemanfaatan pekarangan dan edukasi gizi, juga mulai menunjukkan hasil.

Namun pada tahun 2022, tren peningkatan melambat. Skor PPH Makassar hanya naik tipis menjadi 84,13. Situasi ini berkaitan erat dengan gejolak harga pangan global akibat konflik Rusia–Ukraina, yang berdampak pada harga gandum, kedelai, dan energi. Kenaikan harga pangan menekan daya beli, sehingga rumah tangga cenderung kembali pada pola konsumsi berbasis karbohidrat murah. Meskipun demikian, posisi Makassar tetap lebih baik dari Provinsi Sulawesi Selatan (83,1) meski masih tertinggal jauh dari nasional (92,3).

Tahun berikutnya, 2023, menunjukkan arah pemulihan yang lebih kuat. Skor PPH Makassar meningkat menjadi 85,2, mendekati rata-rata provinsi (86,5). Kestabilan harga pangan, penguatan distribusi melalui pasar induk, serta peningkatan program edukasi gizi mulai mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lebih seimbang. Walaupun demikian, kesenjangan konsumsi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah masih terlihat, terutama pada akses terhadap buah-buahan dan protein hewani berkualitas.

Puncaknya terjadi pada tahun 2024, ketika skor PPH Makassar melonjak signifikan menjadi 89,7. Angka ini bukan hanya melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (87,74), tetapi juga semakin mendekati capaian nasional (92,9). Lompatan ini menandakan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah, termasuk program nasional percepatan diversifikasi pangan dan Makan Bergizi Gratis yang mulai memberikan dampak nyata pada pola konsumsi masyarakat. Pemanfaatan pangan lokal, seperti ikan, jagung, dan kacang-kacangan, juga semakin meningkat di perkotaan, memperlihatkan tren positif menuju konsumsi yang lebih sehat dan beragam.

Secara keseluruhan, perjalanan lima tahun terakhir memperlihatkan transformasi pola pangan Makassar dari ketertinggalan pada masa krisis menjadi daerah dengan capaian lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi.

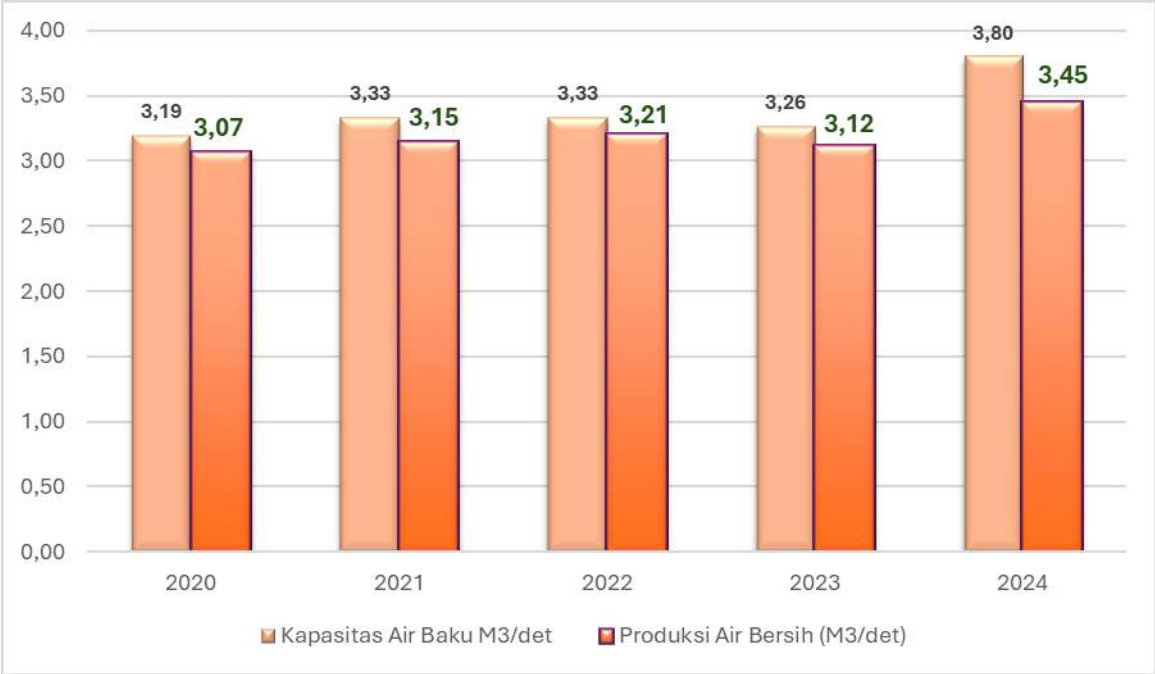


Meski demikian, masih ada tantangan untuk mengejar standar nasional, terutama dalam memastikan keberlanjutan tren positif dan memperluas akses pangan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin perkotaan.

2.1.4.5. Kapasitas Air Baku

Penyediaan air bersih di wilayah Kota Makassar dilaksanakan melalui SPAM baik perpipaan maupun non perpipaan dengan memanfaatkan potensi sumber air baku dan potensi sumber air tanah. Sumber air baku terbesar untuk Kota Makassar berupa sumber air permukaan yang berasal dari sumber air permukaan terdekat kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yaitu Sungai Maros (Bendung Lekopancing) pada intake Panaikang dengan kapasitas 1.300 l/det, Sungai Maros pada intake Nipa-Nipa dengan kapasitas 150 l/det dan Sungai Jeneberang pada intake Maccini Sombala dengan kapasitas 300 l/det, menggunakan sistem gravitasi dan perpompaan untuk pengambilan air baku. Rata-rata kapasitas air baku yang dikelola oleh Perumda Air Minum Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir disajikan pada grafik:

Grafik 2.3
Kapasitas Air Baku dan Produksi Air Bersih yang dikelola Perumda Air Minum Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Perumda Air Minum Kota Makassar, Data Diolah Tahun 2025.

Dari grafik diatas dapat dijelaskan, kapasitas air baku mengalami fluktuasi tergantung kondisi debit aliran Sungai Maros dan Sungai Jeneberang yang sangat dipengaruhi oleh faktor iklim dan cuaca. Dari volume air baku yang diperoleh, rata-rata yang dapat diolah untuk diproduksi menjadi air bersih berkisar 90%-96%. Kapasitas produksi sangat bergantung pada volume air baku dimana kapasitasnya berfluktuasi mengikuti naik turunnya kapasitas air baku. Selain itu juga dipengaruhi oleh kualitas air baku yang jika terdapat kandungan zat tertentu melebihi ambang batas maka pengolahan akan dihentikan sementara.

Pengelolaan air baku pada 71 unit SPAM di Kota Makassar baik yang dikelola berbasis masyarakat maupun non masyarakat berdasarkan SIMSPAM disajikan pada tabel berikut:



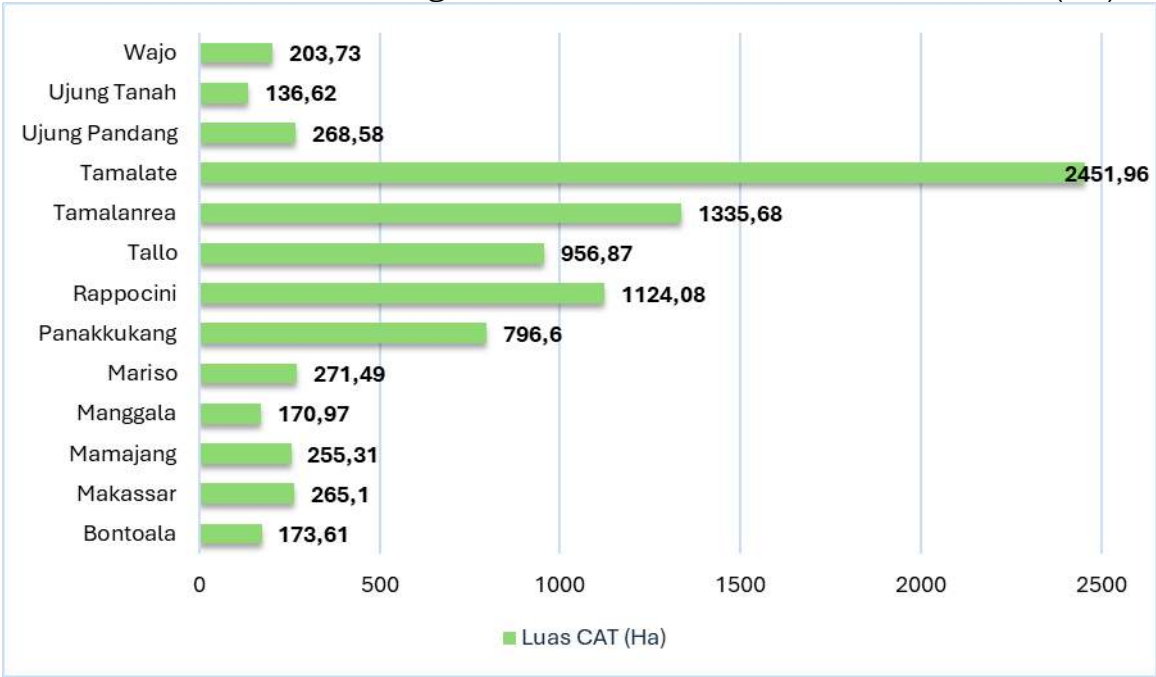
Tabel 2.7
Kapabilitas Pengelolaan Air Baku pada 71-unit SPAM di Kota Makassar

No	Uraian	Volume	
		liter/detik	m ³ /det
1	Alokasi Air Baku	3.482,60	3,482
2	Kapasitas Terpasang	3.666,80	3,666
3	Kapasitas Produksi	3.397,80	3,398
4	Kapasitas Distribusi	2.967,61	2,968
5	Kapasitas Air Terjual	1.633,70	1,633
6	Idle Capacity Terpasang	15,80	0,016
7	Idle Capacity Produksi	69,00	0,069

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Sistem Penyediaan Air Minum (SIMSPAM), Tahun 2025

Selain sumber air permukaan, di wilayah Kota Makassar juga teridentifikasi Cekungan Air Tanah (CAT) yang dapat menjadi potensi untuk pemanfaatan air tanah sebagai sumber air baku. Kendala pemanfaatan air tanah adalah dari segi kuantitas dan kontinuitas karena bergantung dari adanya imbuhan/resapan air hujan. Adapun sebaran CAT pada 13 wilayah kecamatan, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.4
Luas Sebaran Cekungan Air Tanah berdasarkan Kecamatan (Ha)



Sumber: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Makassar, Tahun 2023

CAT Makassar terbentuk dari resapan air hujan yang mengisi ruang pada lapisan batuan di bawah tanah yang luasnya diidentifikasi meliputi daerah imbuhan atau celah resapan sampai daerah lepasan. Pada Grafik dapat disimpulkan bahwa CAT Makassar berada pada 13 wilayah kecamatan dengan total luas 8.410,60 Ha dan pada masing-masing wilayah kecamatan memiliki luasan yang bervariasi dan didominasi oleh Kecamatan Tamalate dengan luas CAT 2.451,96 Ha, Kecamatan Tamalanrea dengan luas CAT 1.335,68 Ha dan Kecamatan Rappocini 1.124,08 Ha.

Pada wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, pemenuhan kebutuhan air dengan pemanfaatan sumber air tanah dan air permukaan berupa air hujan. Berdasarkan RISPAM Kota Makassar, pada Kelurahan

Kodingareng seluruhnya dengan sistem komunal menggunakan sumur bor sebanyak 120 titik, Kelurahan Barrang Caddi menggunakan 11 titik sumur bor dengan sistem individual dan 742 titik sumur secara komunal, dan Kelurahan Barrang Lompo dengan sistem komunal sebanyak 200 titik sumur bor. Selain pemanfaatan sumur, berdasarkan RP3KP Kota Makassar teridentifikasi sebanyak 55 unit rumah memanfaatkan sumber air bersih dari air hujan.

2.1.4.6. Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Terdapat perbedaan teknik perhitungan terhadap capaian tahun 2023 dan tahun 2024, dimana hasil perhitungan capaian tahun 2023 masih memasukkan seluruh sarana air minum baik perpipaan maupun non perpipaan, dan telah dilakukan penyempurnaan perhitungan untuk tahun 2024 dengan hanya menggunakan data sambungan air minum perpipaan.

Penyediaan air siap minum melalui sistem perpipaan di Kota Makassar bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas air bersih bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan data SIMSPAM tahun 2024, dari total 369.465 rumah tangga di Kota Makassar, sebanyak 238.610 rumah tangga telah terlayani oleh jaringan perpipaan. Total sambungan rumah ini terdiri dari 13.062 sambungan yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 224.778 sambungan yang disediakan oleh PDAM.

Namun, setelah melalui pengujian kualitas yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023, hanya 64,58% dari total sambungan rumah tersebut yang benar-benar memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat 84.757 rumah tangga (35,42%) yang airnya belum memenuhi ambang batas standar untuk parameter kritis seperti E-Coli, TDS, pH, Nitrat, dan Nitrit.

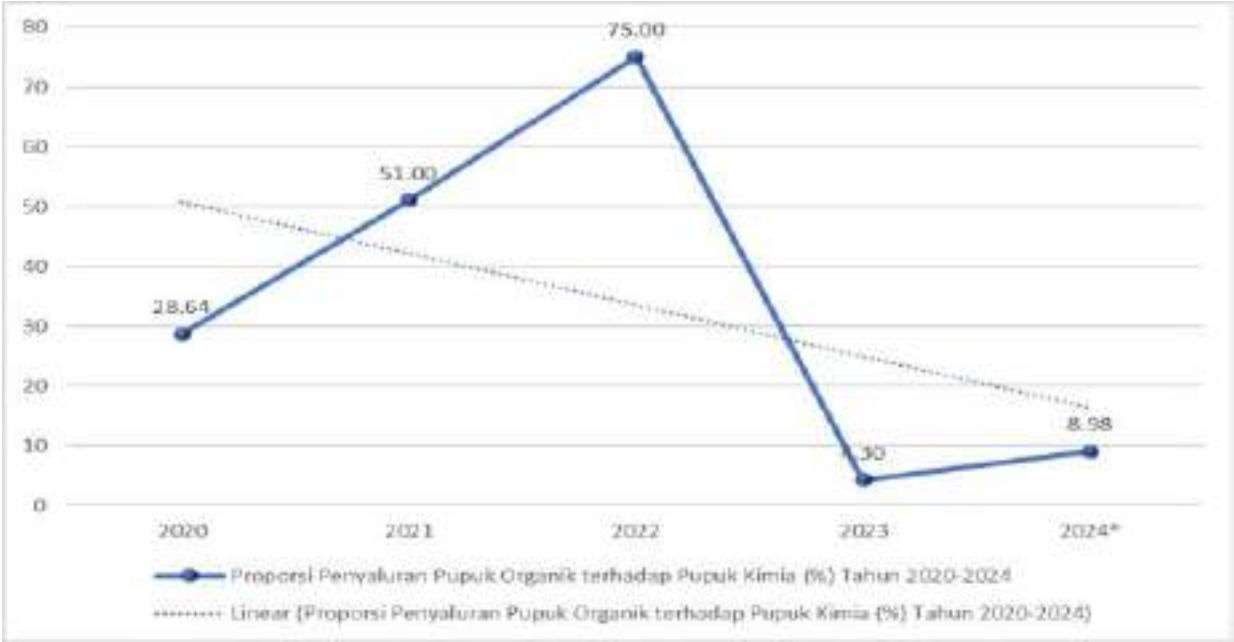
Penyediaan air bersih di Kota Makassar menghadapi tantangan kuantitas dan kualitas. Meskipun sebagian besar rumah tangga telah terhubung dengan jaringan perpipaan, faktanya air yang mereka konsumsi masih berisiko bagi kesehatan. Selain itu, masih terdapat 1 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dan 12 kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Tamalanrea yang belum mendapatkan pelayanan air melalui jaringan perpipaan.

Untuk wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan perpipaan, pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan melalui Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang memanfaatkan sistem komunal dan individual, seperti sumur bor, air sungai, dan air hujan. Secara khusus, di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, pemenuhan air bersih dilakukan melalui sumur komunal, sumur individual, dan air hujan. Sementara itu, untuk sumber air minum, beberapa pulau seperti Pulau Kodingareng dan Pulau Barrang Lompo memanfaatkan depot air, sedangkan Pulau Kodingareng Keke, Pulau Barrang Caddi, Pulau Bonetambung, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Langkai, dan Pulau Lanjukang dilayani oleh depot dan layanan air siap minum (arsinum). Pemerintah Kota Makassar perlu mendorong kolaborasi dan kerjasama pendanaan dengan Perusahaan Daerah serta perangkat daerah terkait. Upaya ini sangat penting untuk meningkatkan pengujian kualitas air secara berkala dan memastikan setiap rumah tangga tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga akses terhadap air yang benar-benar aman dan layak untuk dikonsumsi.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas
2.1.5.1. Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia

Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia merupakan perbandingan antara jumlah pupuk organik yang disalurkan dengan jumlah pupuk kimia yang disalurkan dalam suatu periode tertentu. Pengukuran proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia dapat dibangun dengan menggabungkan beberapa variabel yang mencerminkan aspek ketersediaan, distribusi, penggunaan, serta dampaknya terhadap sektor pertanian. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Kota Makassar menunjukkan perkembangan yang intens dalam penggunaan pupuk organik dibandingkan pupuk kimia, hal ini menunjukkan pergeseran progresif menuju praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Terlihat pada Grafik juga menampilkan trend linier yang menunjukkan kecenderungan penurunan dalam jangka panjang. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan atau hambatan yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan distribusi, ketersediaan pupuk organik, atau preferensi petani terhadap pupuk kimia yang perlu diatasi untuk menjaga momentum penggunaan pupuk organik yang telah terbentuk sebelumnya.

Grafik 2.5
Proporsi Penyaluran Pupuk Organik terhadap Pupuk Kimia (%)
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Tahun 2024 (data Diolah)

Penurunan tajam di tahun 2023 ini tidak hanya mengindikasikan gangguan dalam distribusi pupuk organik, tetapi juga menimbulkan potensi ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Ketergantungan kembali pada pupuk kimia dapat menyebabkan degradasi tanah, pencemaran air, serta terganggunya keseimbangan ekosistem mikro di lahan pertanian, yang semuanya berdampak langsung terhadap hilangnya flora dan fauna lokal. Kenaikan kembali proporsi pupuk organik di tahun 2024 menjadi 8,98%, meski belum signifikan, mencerminkan adanya upaya pemulihan dari pemerintah dan dinas terkait. Program seperti pelatihan penggunaan pupuk organik, perbaikan sistem distribusi, serta peningkatan kesadaran petani tentang pentingnya keberlanjutan pertanian dan pelestarian ekosistem, menjadi langkah awal untuk menanggulangi ancaman tersebut. Implementasi pertanian berkelanjutan berbasis pupuk organik bukan hanya strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kesuburan tanah, tetapi juga merupakan



bentuk perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, peningkatan distribusi pupuk organik secara konsisten perlu menjadi prioritas kebijakan pertanian di Makassar dan sekitarnya. Dengan pendekatan yang tepat, ancaman degradasi ekosistem akibat ketergantungan pupuk kimia dapat ditekan, dan keanekaragaman hayati, baik mikroba tanah, serangga, hingga spesies tanaman lokal, dapat terus dilestarikan untuk generasi mendatang.

2.1.5.2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya di Kota Makassar menunjukkan dinamika yang menarik dalam kurun waktu 2020-2024. Tidak seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya mengalami fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi peningkatan dan penurunan ini tercermin pada tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan produksi dari 1,93 ribu ton menjadi 1,53 ribu ton yang disebabkan oleh faktor alam fenomena El Niño dan kekeringan yang menyertainya. Produktivitas perikanan budidaya menunjukkan pola yang dinamis, berbeda dengan sektor perikanan tangkap yang cenderung lebih stabil.

Grafik 2.6
Volume (Ribuan Ton) dan Pertumbuhan (%) Produksi Perikanan Budidaya Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Tahun 2025

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perikanan budidaya di Kota Makassar memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, perikanan budidaya dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pasokan ikan secara cepat dan berkelanjutan. Fluktuasi signifikan ini mengindikasikan ketidakstabilan dalam sistem produksi perikanan budidaya yang dapat mempengaruhi kelestarian keanekaragaman hayati perairan. Hal yang patut dicermati, karena jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan, peningkatan produksi yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan ekologis, seperti pencemaran air, degradasi kualitas habitat, dan berkurangnya spesies asli akibat dominasi spesies budidaya. Situasi ini menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya perairan secara bijak, dengan mengadopsi prinsip akuakultur berkelanjutan berbasis ekosistem (*Ecosystem Approach to Aquaculture/EAA*), yang menjamin keseimbangan antara peningkatan produksi dan konservasi biodiversitas perairan.



Dengan berbagai tantangan yang ada, perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan produktivitas perikanan budidaya di Kota Makassar. Peningkatan kualitas perairan, pengendalian penyakit, serta pengembangan teknologi budidaya serta memperhatikan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati yang lebih baik merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan potensi sektor ini. Dengan demikian, perikanan budidaya dapat berkontribusi lebih besar dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.3. Angka Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan per kapita di Kota Makassar dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2024, yang datanya diperoleh dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar bekerja sama dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dengan pertimbangan ketersediaan data yang paling mutakhir dan terverifikasi, serta relevansi kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan preferensi konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, rentang tahun 2021–2024 dinilai paling representatif untuk menggambarkan dinamika konsumsi ikan terkini di Kota Makassar. Angka konsumsi ikan Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada tabel berikut:

Grafik 2.7

Perkembangan Realisasi dan Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Dapat dilihat bahwa pola yang tidak stabil, dengan fluktuasi cukup tajam dari tahun ke tahun. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya perubahan dalam pola konsumsi akibat pandemi covid 19 sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan. Namun terjadi kenaikan yang dapat menandakan mulai pulihnya kondisi ekonomi, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan, atau membaiknya akses terhadap komoditas perikanan dan menunjukkan bahwa konsumsi ikan telah pulih sepenuhnya setelah penurunan besar. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi. Peningkatan angka konsumsi ikan didorong dari 2 sisi, yakni permintaan (demand) dan penawaran (supply). Dari sisi permintaan (demand), faktor utama yang mendorong kenaikan angka konsumsi ikan berupa peningkatan konsumsi ikan didorong oleh kesadaran masyarakat yang meningkat akan pentingnya mengkonsumsi ikan yang dapat dilihat meningkat dari tahun 2022 sebesar 29,16 kg menjadi 48,55 kg di tahun 2024.



Program GEMARIKAN (Gerakan Masyarakat Makan Ikan) berhasil mengedukasi masyarakat mengenai manfaat gizi yang terkandung dalam ikan. Selain itu, Usaha kecil dan menengah, seperti rumah makan dan restoran, serta berbagai kegiatan sosial seperti pernikahan, juga berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi ikan. Keberadaan tempat makan yang menawarkan menu ikan mendorong masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi ikan. Sementara itu dari sisi penawaran (supply), pada musim tertentu, pasokan ikan meningkat sehingga harga ikan menjadi relatif lebih murah dibandingkan komoditas lain seperti ayam dan daging. Hal ini membuat ikan menjadi pilihan yang lebih ekonomis bagi masyarakat.

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Konsumsi Ikan di Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2025

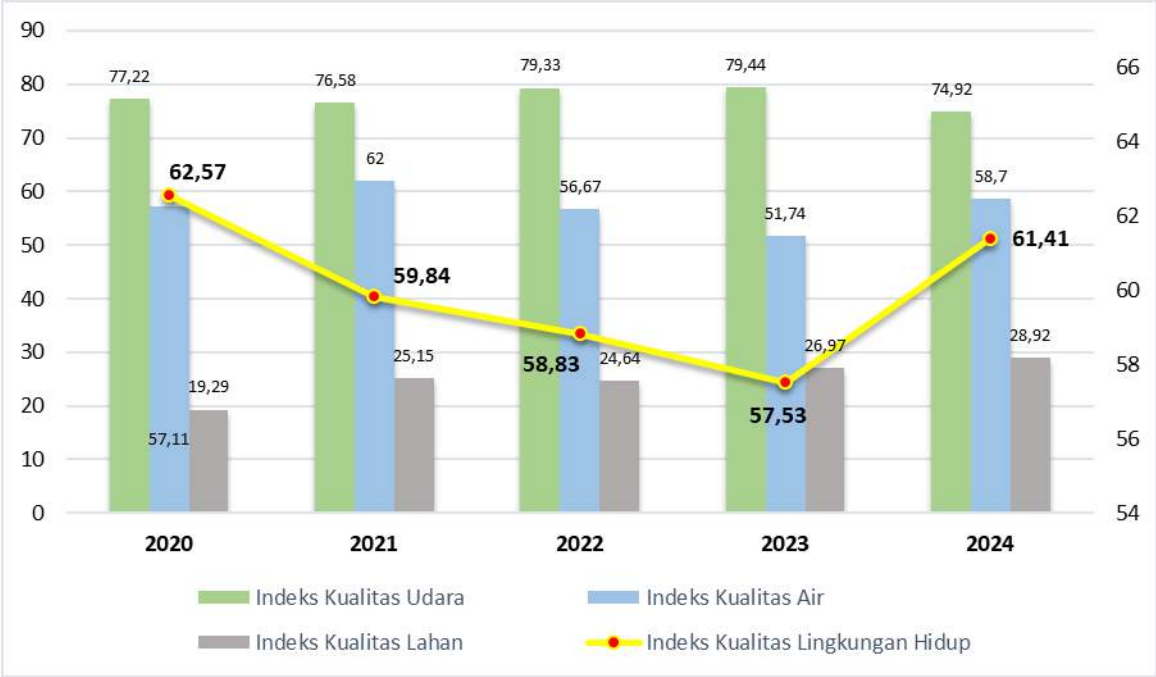
Grafik menampilkan perkembangan angka konsumsi ikan di tiga tingkat wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, dan nasional dari tahun 2020 hingga 2024. Angka konsumsi ikan menunjukkan dinamika yang berbeda-beda antara Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tingkat nasional. Masing-masing wilayah memperlihatkan pola konsumsi yang dipengaruhi oleh faktor lokal dan nasional, seperti akses terhadap ikan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati, preferensi masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi. Ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan di tingkat provinsi tetap kuat dan bahkan meningkat, kemungkinan besar karena budaya makan ikan yang kuat, serta ketersediaan ikan yang melimpah dari sektor perikanan daerah. Sebaliknya, di tingkat nasional, konsumsi ikan sempat mengalami kenaikan moderat, namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang sangat kontras dengan tren di Sulawesi Selatan. Kota Makassar, meskipun sempat berada jauh di bawah rata-rata provinsi dan nasional, menunjukkan kemampuan pemulihan yang baik dalam dua tahun terakhir dimana meningkat dari 36,96 kg menjadi 48,55 kg.

2.1.5.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan dimana IKLH mencapai nilai tertinggi sebesar 62,57 pada tahun 2020, sebelum mengalami tren penurunan hingga mencapai angka 57,53 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 nilai indeks ini kembali meningkat menjadi 61,41.



Grafik 2.9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2020-2024



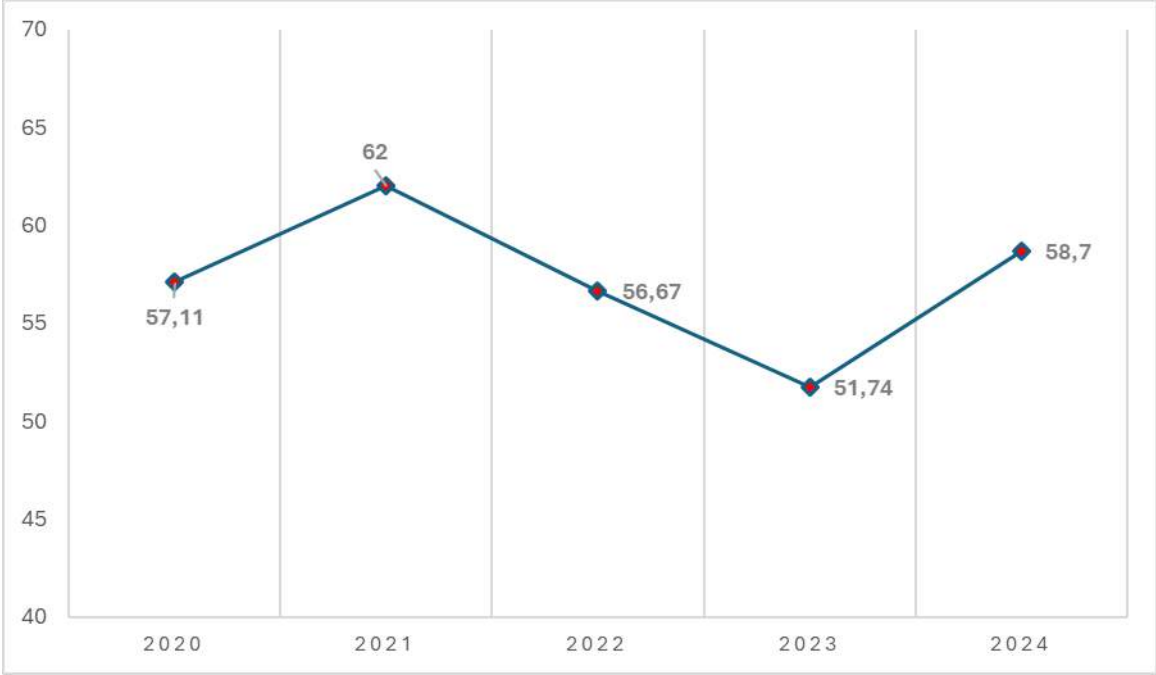
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Tahun 2025

Penurunan IKLH setelah tahun 2020 terutama disebabkan oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) juga mengalami penurunan dari 57,11 pada tahun 2020 menjadi 51,74 pada tahun 2023, sebelum meningkat menjadi 58,70 pada tahun 2024. Demikian pula Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan bertahap dari 77,22 pada tahun 2020 menjadi 74,92 pada tahun 2024. Faktor utama yang menyebabkan penurunan IKLH termasuk pencemaran pada sungai dan waduk yang tidak memenuhi standar baku mutu, berkurangnya volume air selama musim kemarau yang meningkatkan konsentrasi bahan pencemar, serta masih minimnya ruang terbuka hijau.

2.1.5.5. Indeks Kualitas Air

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Makassar diperoleh berdasarkan hasil analisis data kualitas air pada badan air dengan menggunakan 8 parameter untuk sungai yaitu pH, BOD, COD, TSS, DO, NO3-N, Total Fosfat, dan Fecal Coliform. Sedangkan untuk waduk menggunakan 10 parameter dengan menambahkan kecerahan dan clorofil. Pemantauan dilaksanakan dalam setahun mewakili musim kemarau ketika debit air sungai rendah dan musim hujan ketika debit air sungai tinggi. Indeks Kualitas Air Kota Makassar dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 berdasarkan hasil pengukuran pemerintah kota dan telah divalidasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disajikan pada grafik:

Grafik 2.10
Indeks Kualitas Air Kota Makassar Tahun 2020-2024



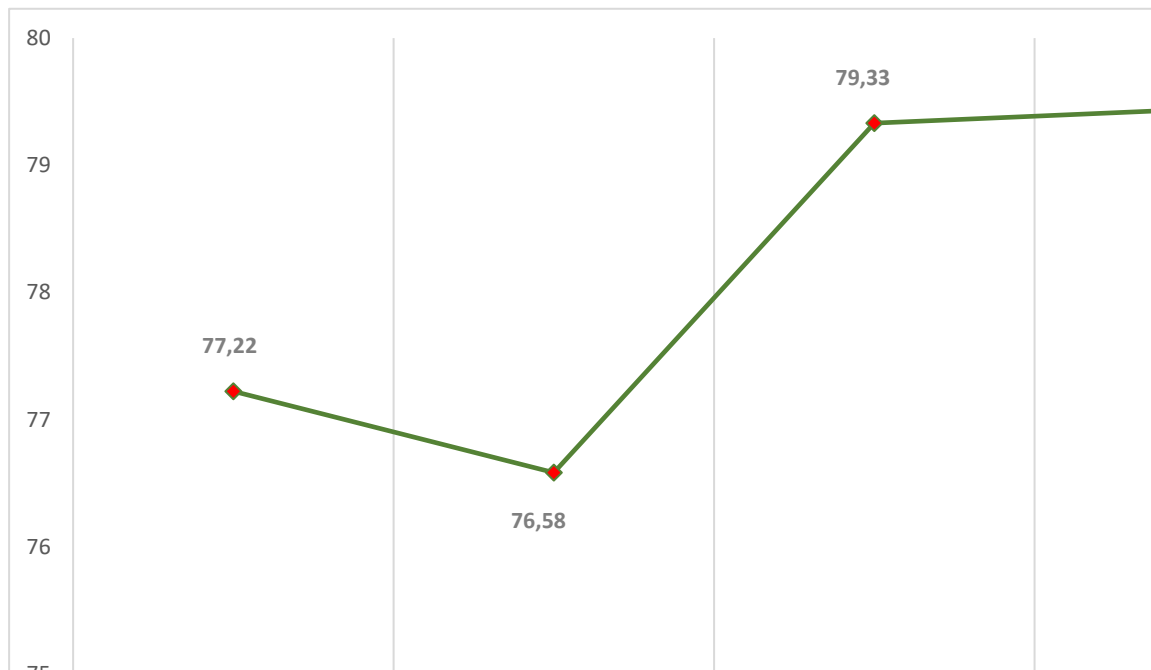
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Tahun 2025

Nilai Indeks Kualitas Air yang ditunjukkan pada grafik diatas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024, kualitas air pada badan air berada pada kategori cemar sedang atau tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi nilai indeks adalah buangan air limbah baik oleh badan usaha maupun limbah domestik oleh masyarakat sebelum diolah dan memenuhi baku mutu. Selain itu debit air juga berpengaruh terhadap hasil pengujian kualitas air dimana konsentrasi beban pencemar akan semakin tinggi ketika debit air berkurang atau rendah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan peran dunia usaha dalam pengendalian pembuangan air limbah, meningkatkan pelibatan masyarakat dan badan usaha dalam usaha peningkatan kualitas air serta meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah dan limbah domestik.

2.1.5.6. Indeks Kualitas Udara

Pengukuran kualitas udara ambien di Kota Makassar dilakukan pada empat lokasi yang mewakili wilayah industri, permukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Indeks Kualitas Udara Kota Makassar dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 berdasarkan hasil pengukuran pemerintah kota dan telah divalidasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.11
Indeks Kualitas Udara Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Tahun 2025

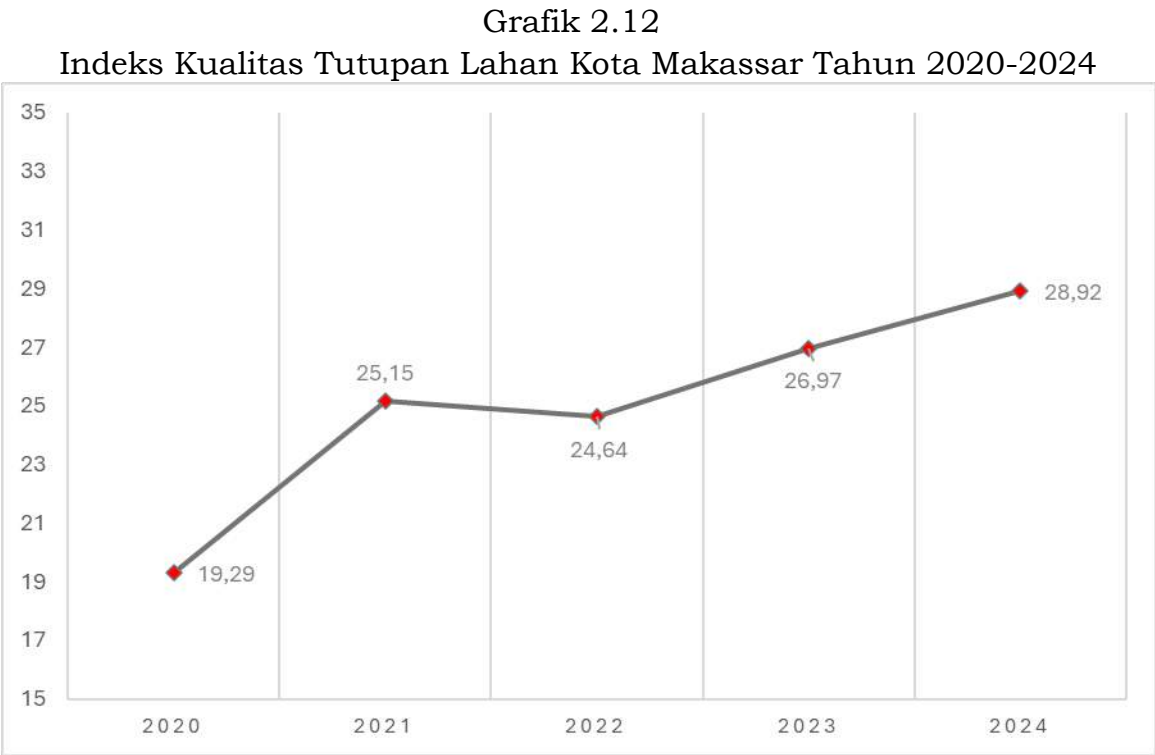
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai Indeks Kualitas Udara menunjukkan penurunan dari 77,22 pada tahun 2020 menjadi 74,92 pada tahun 2024 atau menurun sebesar 2,3 point. Indeks Kualitas Udara Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi serta upaya yang berkontribusi terhadap kualitas udara. Berbagai kegiatan mitigasi dalam pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan dan berpotensi menurunkan emisi GRK berdasarkan aksi yang telah tercantum di aplikasi pelaporan AKSARA yaitu pada sektor transportasi (penerapan hari bebas kendaraan bermotor,peremajaan angkutan umum, smart driving/eco driving, perbaikan sistem transit dan manajemen perparkiran), energi (penggunaan lampu hemat energi), limbah (optimalisasi bank sampah dan TPS3R), dan lahan (peningkatan cadangan karbon dan penggunaan pupuk organik) memiliki peran positif dalam meningkatkan kualitas udara. Namun kualitas udara masih menghadapi tantangan pada sektor transportasi dan terbatasnya fungsi ruang terbuka hijau yang luasnya belum memenuhi standar ketersediaan RTH perkotaan.

Jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar pada awal tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan) tercatat sebanyak 2.091.501-unit terdiri dari mobil penumpang sebanyak 349.973 unit, bus 3.161 unit, truk 100.111 unit, dan sebanyak 1.638.256 unit sepeda motor. Dengan kondisi panjang dan kapasitas jalan yang tidak bertambah serta pertumbuhan jumlah kendaraan, berdampak timbulnya titik-titik macet dimana titik macet ini menjadi penyebab tingginya konsentrasi emisi gas buang kendaraan bermotor. Tantangan lainnya adalah masih kurangnya luas RTH utamanya keberadaan vegetasi yang memiliki kemampuan menyerap karbon seperti mangrove yang menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional, merupakan vegetasi dengan kemampuan menyerap emisi karbon lima kali lebih besar dibandingkan pohon di hutan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengendalian emisi sektor transportasi serta optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau, guna memastikan kualitas udara Kota Makassar tetap terjaga.



2.1.5.7. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

IKL Kota Makassar menunjukkan tren meningkat seiring dengan penambahan proporsi ruang terbuka hijau kota, dimana meskipun belum memenuhi ketentuan proporsi RTH perkotaan sebesar 30%, terjadi peningkatan proporsi RTH dari tahun 2021 sebesar 9,08% menjadi 12,42% pada tahun 2024. Meskipun demikian nilai IKL Kota Makassar berada pada kategori kurang. Indeks Kualitas Lahan Kota Makassar dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berdasarkan hasil perhitungan pemerintah kota dan telah divalidasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disajikan pada grafik berikut:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Tahun 2025

Tutupan hutan di Kota Makassar teridentifikasi yaitu hutan mangrove meliputi wilayah seluas 102,74 ha yang tersebar di 6 wilayah kecamatan dan 16 wilayah kelurahan yaitu Kecamatan Biringkanaya pada Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Untia; Kecamatan Manggala pada Kelurahan Bitowa; Kecamatan Panakkukang pada Kelurahan Pampang, Kelurahan Panaikang dan Kelurahan Tello Baru; Kecamatan Tallo pada Kelurahan Buloa, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kelurahan Lakkang, dan Kelurahan Tallo; Kecamatan Tamalanrea pada Kelurahan Bira, Kelurahan Kapasa Raya, Kelurahan Parangloe, Kelurahan Tamalanrea Indah dan Kelurahan Tamalanrea Jaya; serta Kecamatan Tamalate pada Kelurahan Barombong. Sebaran ini menunjukkan bahwa hutan mangrove merupakan elemen penting dalam ekosistem pesisir Kota Makassar sehingga diperlukan upaya pelestarian khususnya di wilayah pesisir.

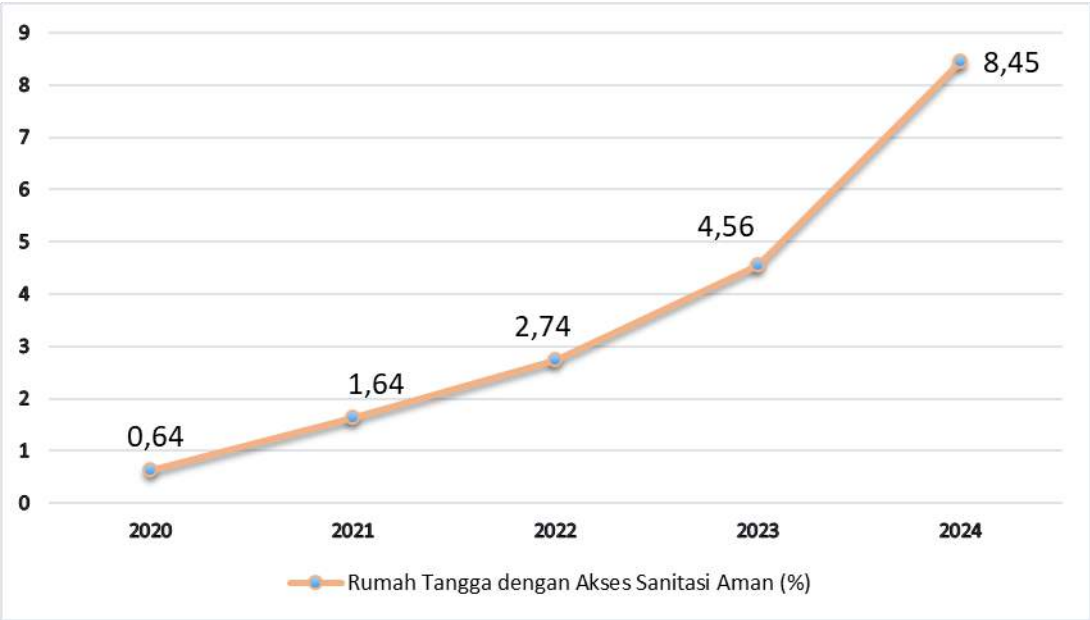
Dengan mempertimbangkan peran strategis tutupan vegetasi, khususnya hutan mangrove sebagai penyangga ekosistem pesisir, serta tren peningkatan ruang terbuka hijau yang belum mencapai ambang proporsi ideal, maka diperlukan langkah-langkah pelestarian dan rehabilitasi lahan yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis kawasan. Peningkatan Indeks Kualitas Lahan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan, tetapi juga pondasi penting dalam mewujudkan kota yang tangguh, berkelanjutan, dan ramah terhadap perubahan iklim.



2.1.5.8. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman merupakan layanan dasar yang merujuk pada kondisi dimana masyarakat memiliki fasilitas yang memadai untuk mengelola limbah manusia dengan cara yang aman dan tidak mencemari lingkungan. Di Kota Makassar pencapaian akses sanitasi aman selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan meskipun belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan yang disajikan pada grafik dibawah.

Grafik 2.13
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025.

Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, hanya 0,64% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Angka ini sedikit meningkat berturut-turut menjadi 1,64% pada tahun 2021, 2,74% pada tahun 2022, kemudian 4,56% pada tahun 2023 dan tahun 2024 bertambah menjadi 8,45% rumah tangga yang memiliki septik tank sesuai standar dan dilakukan penyedotan secara berkala minimal 3 tahun sekali serta rumah tangga yang terkoneksi melalui sambungan rumah (SR) pada IPAL Komunal skala lingkungan dan kawasan.

Akses rumah tangga terhadap sanitasi aman di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun angkanya masih tergolong kecil. Pada tahun 2020, hanya 0,64% rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman. Angka ini secara bertahap terus meningkat menjadi 1,64% pada tahun 2021, kemudian 2,74% pada tahun 2022, dan mencapai 4,56% di tahun 2023. Puncaknya, pada tahun 2024, persentase tersebut naik menjadi 8,45% rumah tangga yang memiliki septik tank sesuai standar dan dilakukan penyedotan secara berkala minimal 3 tahun sekali serta rumah tangga yang terkoneksi melalui sambungan rumah (SR) pada IPAL Komunal skala lingkungan dan kawasan.

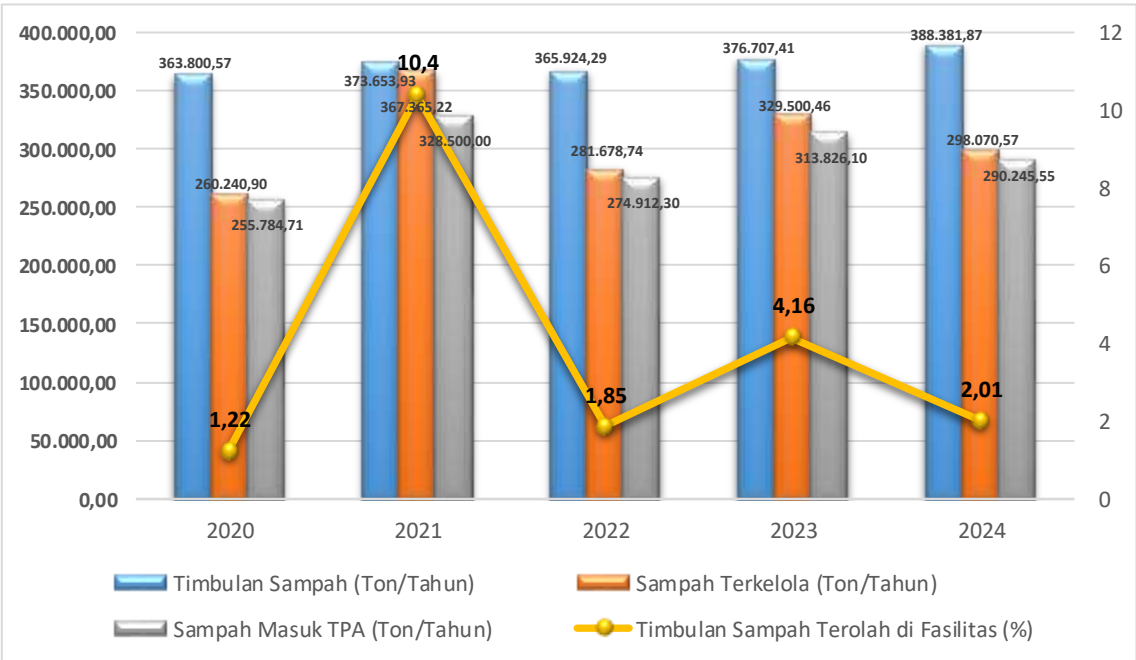
Meskipun dalam 5 tahun terakhir capaian akses sanitasi aman mengalami peningkatan, tantangan yang dihadapi masih sangat besar. Fakta bahwa 91,55% rumah tangga di Kota Makassar belum memiliki akses sanitasi aman adalah isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Jika dibandingkan dengan total jumlah rumah tangga dan target pencapaian akses

sanitasi aman yaitu target nasional 30% dan target provinsi 15% pada tahun 2029, capaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan layanan sanitasi aman. Masih rendahnya capaian sanitasi aman dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan masyarakat memenuhi infrastruktur sanitasi aman secara mandiri karena faktor pengetahuan dan ekonomi yang tercermin dari penyedotan tangki septik rumah tangga yang tidak dilaksanakan secara berkala sehingga limbah tidak dikelola secara optimal dan berpotensi mencemari lingkungan. Demikian pula IPAL komunal skala lingkungan pada lingkungan permukiman termasuk rusunawa, industri, sekolah dan rumah potong hewan, yang berfungsi sebanyak 68,3% dari total 161 unit IPAL Komunal yang telah terbangun. Selain itu terbatasnya kapasitas pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Nipa-Nipa yang belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan pengolahan limbah domestik di Kota Makassar, dimana tercatat pada tahun 2024 dari kapasitas desain IPLT Nipa-Nipa 100 m³/hari, yang dapat diolah maksimal 65 m³/hari. Dengan beroperasinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan limbah domestik dan mendorong peningkatan cakupan akses sanitasi aman bagi masyarakat. Sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup dan keseimbangan ekosistem lingkungan tetap terjaga.

2.1.5.9. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata sampah yang terkelola dibandingkan jumlah timbulan sampah sebesar 82,2%, menunjukkan bahwa tidak seluruh timbulan sampah dilakukan pengumpulan dan pengolahan, tetapi diperlakukan secara mandiri seperti dibuang ke badan air atau dibakar. Pengelolaan sampah melalui bank sampah, TPST, TPS3R, pusat daur ulang dan fasilitas pengolahan sampah lainnya belum signifikan mengurangi volume sampah sejak dari sumber. Capaian kinerja pengelolaan sampah di Kota Makassar 5 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.14
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Tahun 2025

Dari jumlah sampah terkelola, rata-rata hanya sekitar 3,9% yang terolah di fasilitas pengolahan sampah baik melalui pemilahan dan daur ulang. Sistem pemilahan belum diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota dan secara umum sampah dari TPS maupun dari sumber masih tercampur. Kondisi ini menyebabkan sekitar 70-80% dari total timbunan sampah masuk ke TPA dengan pola kumpul, angkut dan buang tanpa melalui proses pengolahan. Dengan rata-rata sampah masuk TPA Tamangapa sebanyak 750 ton/hari dan timbunan sampah berdasarkan hasil pemetaan topografi pada tahun 2023 menunjukkan tinggi tumpukan sampah sekitar 25 meter.

Tantangan lain dalam pengelolaan sampah belum ada dukungan pengurangan sampah berbasis kawasan secara signifikan; kualitas SDM yang melakukan pemilahan, kuantitas serta sistem pemilahan yang masih rendah. Pemilahan sampah masih dilakukan secara mandiri oleh anggota bank sampah dan komunitas-komunitas di masyarakat; sarana dan prasarana pengangkut sampah yang belum optimal baik dari segi kualitas dan kuantitas. Jumlah armada yang belum proporsional antar kecamatan, tidak semua armada memenuhi standar, dan sebagian armada dalam kondisi rusak; serta belum masifnya kontribusi bank sampah dan TPS3R dalam pengurangan sampah. Dari sekitar 1000 unit Bank sampah pada tahun 2018, namun yang tercatat masih aktif hingga tahun 2024 hanya sekitar 463 bank sampah. Dan dari 9 TPS3R, hanya 3 TPS3R yang beroperasi hingga saat ini, dengan total pengurangan sampah rata-rata 3,9% per tahun.

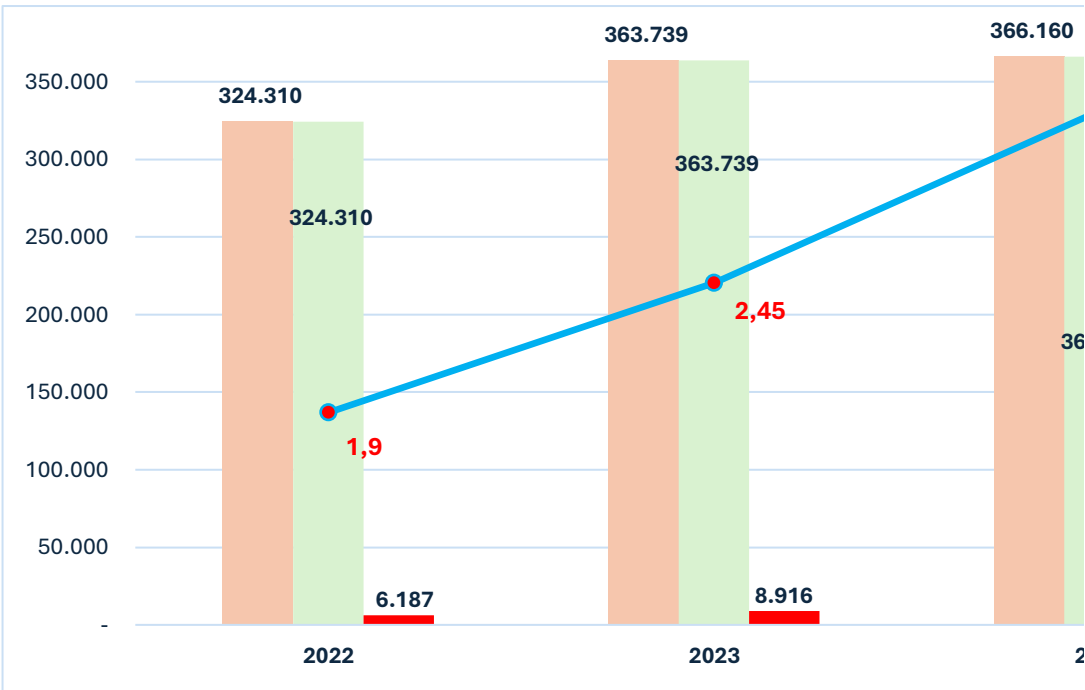
Implementasi sistem pengolahan sampah memerlukan pendekatan komprehensif mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan hingga pembuangan akhir. Diperlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, edukasi kepada masyarakat, kolaborasi, kebijakan dan inovasi teknologi yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang lebih baik.

2.1.5.10. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan penuh pengumpulan sampah dilaksanakan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah baik dari pintu ke pintu maupun penyediaan tempat pembuangan sampah secara komunal dengan radius pelayanan 200 meter serta dilakukan pemilahan minimal untuk 3 jenis sampah. Dalam layanan pengumpulan sampah di Kota Makassar, pelayanan pengumpulan sampah telah mencakup seluruh wilayah kelurahan pada 15 kecamatan meskipun dengan frekuensi yang berbeda, dan hanya sebagian kecil yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah.



Grafik 2.15
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kota Makassar Tahun 2022-2024



Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Tahun 2025

Dari grafik diatas dapat dijelaskan, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah menunjukkan peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Meskipun demikian hingga tahun 2024, proporsinya masih rendah yaitu 3,18% atau sebanyak 11.664 rumah tangga yang sampahnya terpilah pada Bank Sampah Unit yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan 3 TPS3R. Tantangan dalam layanan penuh pengumpulan sampah pada pengelolaan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir yang diselenggarakan tanpa upaya pemilahan yang signifikan. Belum masifnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga yang diakibatkan lemahnya dukungan sarana prasarana pemilahan. Selain itu juga akibat menurunnya jumlah Bank Sampah Unit dan TPS3R yang aktif secara signifikan.

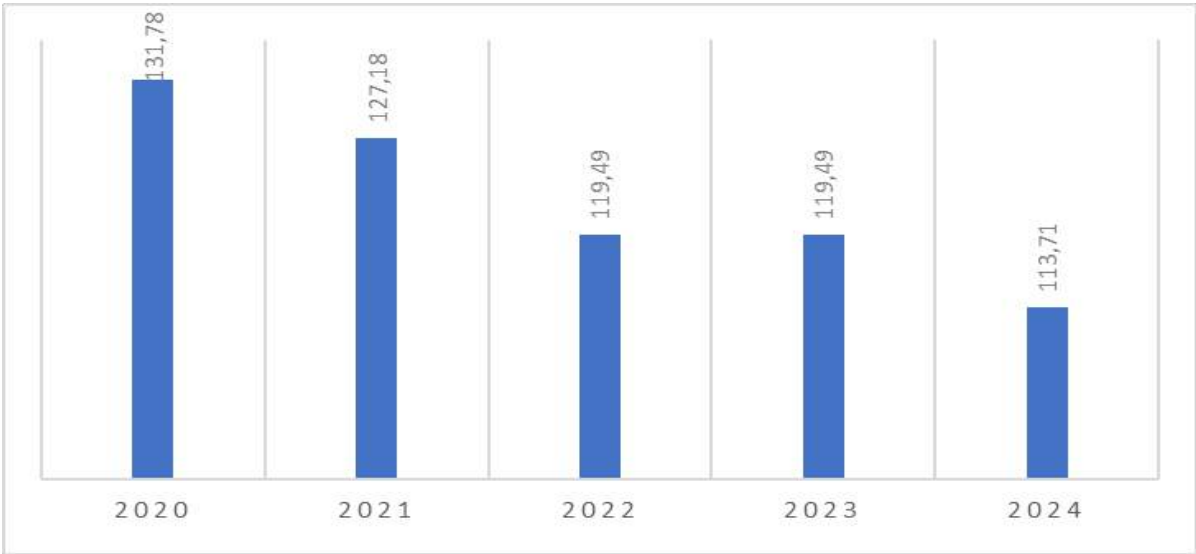
2.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana merupakan indeks yang digunakan untuk menilai dampak yang diperkirakan terjadi jika suatu ancaman menjadi bencana di suatu daerah. Nilai Indeks Risiko Bencana diklasifikasikan menjadi 3 yaitu tinggi dengan nilai 144 keatas, sedang 13 sampai 144 dan rendah 0 sampai 13. Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.



Grafik 2.16
Indeks Risiko Bencana Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Tahun 2025

Dalam 5 tahun terakhir, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Makassar mengalami penurunan. Pada tahun 2020 di angka 131,78 atau kategori sedang. Angka ini terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2021 turun menjadi 127,18 masih dalam kategori sedang, tahun 2022 dan tahun 2023 berada pada angka yang sama yaitu 119,49 masuk kategori sementara tahun 2024 nilai IRB Kota Makassar turun menjadi 113,71 dan masuk kategori sedang. Penurunan nilai indeks Risiko Bencana mengindikasikan adanya perbaikan pada kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas masyarakat dalam memitigasi dampak bencana.

Bencana banjir merupakan bencana yang paling besar membawa kerugian bagi manusia dibandingkan dengan bencana yang lain, hampir setiap tahun dan setiap daerah bermasalah dengan banjir, kontunuitas bencana inilah yang membuat banjir paling memberikan efek kerugian bagi manusia, perkembangan perkotaan dan alih fungsi kawasan resapan merupakan penyebab penting dari semakin meluasnya potensi banjir di perkotaan dan kawasan penyangga urban yang lain. Disisi lain, bencana angin kencang / angin puting beliung juga tidak boleh dianggap sepele dan harus tetap waspada karena hal ini pun bisa mendatangkan kerugian. Adapun data bencana banjir dan bencana angin puting beliung yang terjadi di Kota Makassar sepanjang tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Data Kejadian Bencana Kota Makassar 2021-2024

Tahun	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Jumlah Korban	
			KK	Jiwa
2021	Banjir	94	9.857	24.268
	Angin puting beliung	16	68	259
2022	Banjir	142	1.888	7.365
	Angin puting beliung	120	91	330
2023	Banjir	133	13.249	43.223
	Angin puting beliung	69	421	1346
2024	Banjir	63	1.254	4.974
	Angin puting beliung	26	49	248

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, Tahun 2025



2.1.6.2. Indeks Ketahanan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, disebutkan bahwa terdapat 3 tahapan dalam penanggulangan bencana yaitu prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Ketiga tahapan tersebut menjadi kewajiban untuk dijalankan di setiap daerah. Indeks ketahanan daerah dikategorikan berdasarkan nilai risiko bencana, dengan 3 kategori utama: rendah, sedang, dan tinggi. Adapun capaian indeks ketahanan daerah Kota Makassar tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Indeks Ketahanan Daerah Kota Makassar
Tahun 2020 - 2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	N/A	0.40	0.46	NA	0.46

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, Tahun 2025

Indeks Ketahanan Daerah Kota Makassar mengalami peningkatan, yaitu 0,40 di tahun 2021 meningkat sebesar 0.06 sehingga di tahun 2022 Indeks Ketahanan Daerah Kota Makassar menjadi sebesar 0.46 yang artinya Penyelenggaraan Penanggulan Bencana di Kota Makassar semakin meningkat, pencapaian indeks ketahanan daerah kota makassar tahun 2020 dan tahun 2023 tidak terukur/kosong karena evidence penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak terinput. untuk Tahun 2024 Indeks Ketahanan Daerah Kota Makassar yaitu: 0.46, yang artinya Penyelenggaraan Penanggulan Bencana Tahun 2024 dengan Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, Peningkatan Resiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat bencana, dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana harus lebih ditingkatkan lagi di tahun tahun berikutnya.

2.1.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK

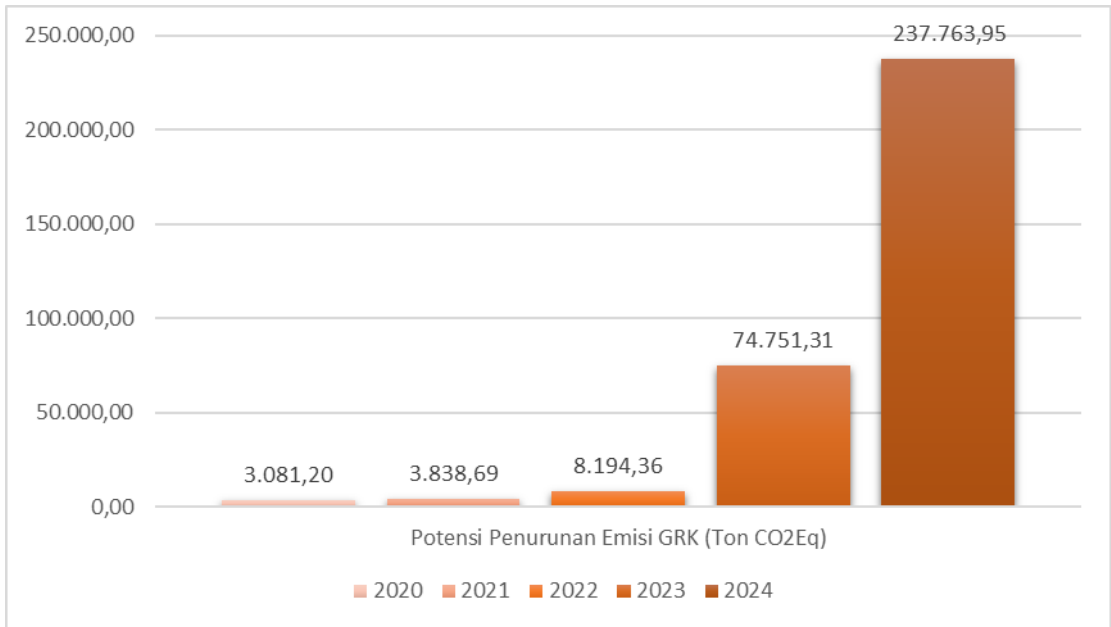
Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan indikator yang menunjukkan efektivitas upaya penurunan emisi seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Indikator ini menggambarkan seberapa besar emisi GRK dapat ditekan untuk setiap satuan nilai ekonomi (PDRB) yang dihasilkan. Penurunan intensitas emisi GRK mencerminkan pembangunan ekonomi tidak lagi bertumpu pada aktivitas yang menghasilkan emisi tinggi, tetapi diarahkan pada aktivitas rendah karbon dan berkelanjutan. Namun demikian, persentase capaian penurunan intensitas emisi GRK di Kota Makassar belum dapat disajikan dalam dokumen RPJMD ini, karena hingga saat ini Kota Makassar belum memiliki dokumen Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) atau dokumen sejenis yang memuat baseline penurunan emisi. Tanpa baseline emisi GRK, penghitungan tren penurunan emisi GRK dan penurunan intensitas emisi GRK tidak dapat dilakukan secara terukur dan valid.

Sebagai upaya mendukung arah kebijakan rendah karbon, data potensi penurunan emisi GRK disajikan dalam dokumen ini sebagai gambaran kontribusi pemerintah Kota Makassar terhadap penurunan emisi GRK. Berdasarkan hasil pelaporan Pemerintah Kota Makassar melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA), potensi penurunan emisi GRK sebagai bentuk penerapan strategi pembangunan rendah karbon selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.



Potensi penurunan emisi GRK Kota Makassar terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020, capaian tercatat sebesar 3.081,20 Ton CO₂eq dan meningkat menjadi 8.194,36 Ton CO₂eq pada tahun 2022. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 74.751,31 Ton CO₂eq, dan tren ini berlanjut pada tahun 2024 dengan peningkatan tajam hingga mencapai 237.763,95 Ton CO₂eq. Capaian ini mencerminkan optimalisasi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar, serta meningkatnya kontribusi dari berbagai sektor dalam mendukung upaya penurunan emisi GRK. Pada tahun 2024 tercatat 60 kegiatan aksi pembangunan rendah karbon yang dilaksanakan termasuk pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan peningkatan transportasi berkelanjutan:

Grafik 2.17
Potensi Penurunan Emisi GRK Tahunan



Sumber: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA), Tahun 2025

Capaian potensi penurunan emisi GRK menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu kontributor penurunan emisi GRK di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 4,28 % dari total capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun belum masuk dalam kategori daerah dengan potensi penurunan emisi yang tinggi seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Selayar, Kota Makassar memiliki pengaruh signifikan karena perannya sebagai ibukota provinsi dan pusat aktivitas perekonomian di Sulawesi Selatan.

2.1.7. Demografi

2.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dengan ditunjang berbagai potensi, salah satunya adalah jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa, dan terus berkembang. Pertumbuhan penduduk absolut Kota Makassar pada tahun 2024 yaitu sebesar 7.600 jiwa dari tahun 2023. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kota Makassar yaitu 1.484.912 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebesar 1.462.442. hal ini dikarenakan adanya perpindahan penduduk serta kematian. Dalam 4 tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2024, penduduk Kota Makassar terus bertambah, yakni dari 1.462.442 pada tahun 2021 menjadi 1.477.861 pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 15.419 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Makassar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya jumlah kelahiran, kematian, imigrasi (pendatang) dan emigrasi (penduduk keluar). Berdasarkan jumlah penduduk pada setiap Kecamatan,



pada tahun 2024 jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 216.704 jiwa dan yang terkecil ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah penduduk 15.007 jiwa. Data jumlah penduduk Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020			2021			2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Biringkanaya	105929	105566	211495	105359	105551	210910	106287	106947	213234
2	Bontoala	28751	29064	57815	27950	28219	56169	27591	27853	55444
3	Makassar	42693	43499	86192	41310	42295	83605	40758	41567	82325
4	Mamajang	29453	3049	59943	28682	29687	58369	28559	29619	58178
5	Manggala	76803	76749	153552	76705	77237	153942	78379	79123	157502
6	Mariso	30087	30155	60242	29427	29485	58912	29177	29324	58501
7	Panakkukang	73266	73494	14676	71834	72492	144326	71462	72462	143924
8	Rappocini	75322	77947	153269	73858	76886	150744	73388	76557	149945
9	Tallo	76873	75414	152287	74651	73502	148153	74306	73260	147566
10	Tamalanrea	5229	52151	104441	51712	51948	103660	52097	52490	104587
11	Tamalate	94718	94117	188835	93115	93034	186149	93248	93601	186849
12	Ujung Pandang	12566	133	25866	12270	13039	25309	12107	12804	24911
13	Ujung tanah	19092	18915	38007	18662	18486	37148	18429	18335	36764
14	Wajo	15845	15754	31599	15216	15319	30535	14717	15065	29782
15	Kep Sangkarrang	7272	7337	14609	7219	7292	14511	7433	7456	14889
	Jumlah	74096	743952	1484912	727970	734472	1462442	727938	736463	1464401

No	Kecamatan	2023			2024			Laju Pertumbuhan
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	
1	Biringkanaya	106937	107719	214656	107869	108835	216704	0,50
2	Bontoala	27547	27873	5542	27414	2783	55244	0,20
3	Makassar	40783	41508	82291	40638	41338	81976	0,10
4	Mamajang	28604	29634	58238	28516	29559	58075	0,02
5	Manggala	79019	7993	158949	80434	81393	161827	0,57
6	Mariso	29221	29375	58596	29316	29481	58797	0,30
7	Panakkukang	71681	72684	144365	71682	72694	144376	0,04
8	Rappocini	73505	76837	150342	73744	77125	150869	0,03
9	Tallo	74523	73357	14788	7456	73448	148008	0,30
10	Tamalanrea	52495	52943	105438	53074	53694	106768	0,05
11	Tamalate	93627	94138	187765	94368	94854	189222	0,40
12	Ujung Pandang	12101	12805	24906	12071	12805	24876	0,10
13	Ujung tanah	18401	1835	36751	18381	1834	36721	0,45
14	Wajo	14652	15078	2973	1444	14951	29391	0,21
15	Kep Sangkarrang	746	7474	14934	7501	7506	15007	0,45
	Jumlah	730556	739705	1470261	734008	743853	1477861	0,26

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2025



2.1.7.2. Komposisi Penduduk

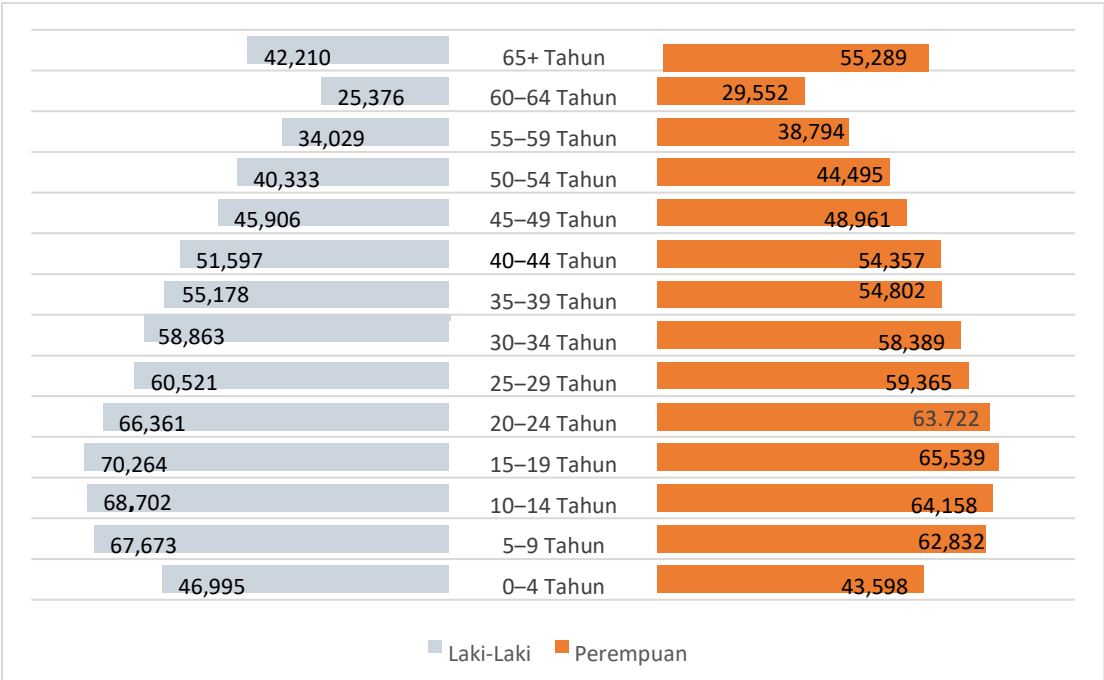
Berdasarkan kelompok umur, Penduduk Kota Makassar terbesar berada pada kelompok umur 15-19 tahun (9,25%) dan yang terendah pada kelompok umur 60-64 tahun (3,61%). Data penduduk berdasarkan kelompok umur memberikan informasi penting terkait dengan pembangunan sosial, pasar tenaga kerja, dimana Makassar memiliki penduduk yang berada di usia produktif, sehingga kebutuhan tenaga kerja dapat relatif terpenuhi dengan adanya penduduk kelompok umur usia produktif. Penduduk Kota Makassar berdasarkan kelompok umur, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Makassar Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 - 4	90.593	6,31
05-09	130.505	8,88
10-14	13286	9,11
15 - 19	135.803	9,25
20 - 24	130.083	9,03
25 - 29	119.886	8,17
30 - 34	117.252	7,98
35 - 39	10998	7,45
40 - 44	105.954	7,23
45 -49	94.867	6,29
50 - 54	84.828	5,83
55 - 59	72.823	4,69
60 - 64	54.928	3,61
65+	97.499	6,17
Jumlah	1.477.861	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2025

Grafik 2.18
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Makassar Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2025



Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Setiap Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Biringkanaya	107.869	108.835	216.704
2	Bontoala	27.414	27.830	55.244
3	Makassar	40.638	41.338	81.976
4	Mamajang	28.516	29.559	58.075
5	Manggala	80.434	81.393	161.827
6	Mariso	29.316	29.481	58.797
7	Panakkukang	71.682	72.694	144.376
8	Rappocini	73.744	77.125	150.869
9	Tallo	74.560	73.448	148.008
10	Tamalanrea	53.074	53.694	106.768
11	Tamalate	94.368	94.854	189.222
12	Ujung Pandang	12.071	12.805	24.876
13	Ujung Tanah	18.381	18.340	36.721
14	Wajo	14.440	14.951	29.391
15	Kep Sangkarrang	7501	7506	15.007
Jumlah		734.008	743.853	1.477.861

Sumber : Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kota Makassar di tahun 2024 lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki yakni sebesar 9,845 jiwa lebih banyak penduduk perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan berbasis gender seperti sarana prasarana kesehatan, ketenagakerjaan, dan sarana infrastruktur lainnya. Data penduduk Kota Makassar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di atas.

2.1.7.3. Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kota Makassar 1.477.861, terjadi peningkatan sebanyak 7.600 jiwa. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelahiran serta migrasi penduduk. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk 216.704 jiwa dan yang terkecil ada di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan jumlah penduduk 15.007 jiwa. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Gambaran lebih lengkap mengenai jumlah penduduk, luas, dan kepadatan penduduk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Sebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
Kota Makassar Tahun 2021 – 2024

No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	Biringkanaya	210910	4822	43.74	213,234	4,822	44.22
2	Bontoala	56169	210	267.47	55,444	210	264.02
3	Makassar	83605	252	331.77	82,325	252	326.69



No	Kecamatan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)
4	Mamajang	58369	225	259.42	58,178	225	258.57
5	Manggala	153942	2414	63.77	157,502	2,414	65.25
6	Mariso	58912	182	323.69	58,501	182	321.43
7	Panakuk kang	144326	1705	84.65	143,924	1,705	84.41
8	Rappocini	150744	923	163.32	149,945	923	162.45
9	Tallo	148153	583	254.12	147,566	583	253.11
10	Tamalanrea	103660	3184	32.56	104,587	3,184	32.85
11	Tamalate	186149	2021	92.11	186,849	2,021	92.45
12	Ujung Pandang	25309	263	96.23	24,911	263	94.72
13	Ujung Tanah	37148	440	84.43	36,764	440	83.55
14	Wajo	30535	199	153.44	29,782	199	149.66
15	Kep. Sangkarrang	14511	154	94.23	14,889	154	96.68
Jumlah		1462442	175.77	8320.20	1,464,401	175.77	8331.35

No	Kecamatan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	kepadatan penduduk (jiwa/ha)
1	Biringkanaya	214.656	48,22	4.451	216.704	48,22	4.451
2	Bontoala	55.420	2,1	26.390	55.244	2,1	26.390
3	Makassar	82.291	2,52	32.655	81.976	2,52	32.655
4	Mamajang	58.238	2,25	25.883	58.075	2,25	25.883
5	Manggala	158.949	24,14	6.584	161.827	24,14	6.584
6	Mariso	58.596	1,82	32.195	58.797	1,82	32.195
7	Panakuk kang	144.365	17,05	8.467	144.376	17,05	8.467
8	Rappocini	150.342	9,23	16.288	150.869	9,23	16.288
9	Tallo	147.880	5,83	25.365	148.008	5,83	25.365
10	Tamalanrea	105.438	31,84	3.311	106.768	31,84	3.311
11	Tamalate	187.765	20,21	9.290	189.222	20,21	9.290
12	Ujung Pandang	24.906	2,63	9.469	24.876	2,63	9.469
13	Ujung Tanah	36.751	4,4	8.352	36.721	4,4	8.352
14	Wajo	29.730	1,99	14.939	29.391	1,99	14.939
15	Kep. Sangkarrang	14.934	1,54	9.697	15.007	1,54	9.697
Jumlah		1.470.261	175.77	8.364	1.477.861	175.77	8.364

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2025

2.1.7.4. Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun ke Depan

Sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan, Kota Makassar diproyeksi mengalami kenaikan sepanjang 5 tahun ke depan, namun dengan pertumbuhan yang melambat. Proyeksi tersebut didasarkan pada 3 asumsi utama yaitu pertama, diperkirakan angka kelahiran total (total fertility rate) akan menurun hingga berada di bawah replacement rate. Asumsi kedua, karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, diperkirakan angka kematian mengalami penurunan. Asumsi ketiga, jumlah migrasi keluar akan cenderung lebih banyak dibandingkan migrasi masuk sehingga menyebabkan angka net migrasi negative. Proyeksi penduduk yang dimaksud bukan



merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu penghitungan ilmiah yang didasarkan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang. Komponen-komponen tersebut akan menentukan besaran jumlah penduduk dan struktur penduduk.

Tabel 2.14
Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kota Makassar Tahun 2025-2030

No	Kelompok Umur	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	0-4	60.36	57.87	60.16	57.69	59.96	57.5
2	5-9	57.78	54.43	58.1	54.85	58.16	55.05
3	10-14	56.7	53.69	55.69	52.77	55.48	52.49
4	15-19	66.8	62.16	65.12	60.67	62.82	58.7
5	20-24	66.95	62.89	67.27	63.05	67.7	63.25
6	25-29	64.99	61.35	65.02	61.16	64.91	60.96
7	30-34	61.45	60.76	61.16	59.63	61.03	59.06
8	35-39	58.82	58.41	59.13	58.68	59.11	58.73
9	40-44	50.98	52.99	51.99	53.74	53.16	55.53
10	45-49	45.54	48.31	46.31	48.97	46.91	49.54
11	50-54	38.39	42.81	39.32	43.54	40.37	44.35
12	55-59	33.2	38.03	33.68	38.73	34.21	39.36
13	60-64	28.17	31.74	28.87	32.88	29.38	33.86
14	65-69	19.65	22.61	20.71	23.88	21.85	23.3
15	70-74	12.78	16.13	13.44	16.87	14.07	17.55
16	75+	11.02	16.68	11.81	17.89	12.65	19.18
Jumlah		733.57	740.34	737.79	744.97	741.76	749.39
		1.473,91		1.482,55		1.491,15	

No.	Kelompok Umur	Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	0-4	59.75	57.3	59.52	57.09	59.28	56.86
2	5-9	58.02	55.13	57.95	55.29	58.45	55.97
3	10-14	55.84	52.68	56.29	52.92	56.11	52.6
4	15-19	60.26	56.53	57.89	54.51	56.1	52.96
5	20-24	67.97	63.31	67.76	62.98	66.83	62.08
6	25-29	64.78	60.79	64.73	60.7	64.84	60.73
7	30-34	61.03	58.56	61.09	58.16	61.18	57.91
8	35-39	58.83	58.57	58.45	58.23	58.06	57.72
9	40-44	54.35	55.31	55.35	55.97	56.02	56.44
10	45-49	47.44	50.06	48.05	50.63	48.81	51.27
11	50-54	41.46	45.17	42.49	45.97	43.41	46.7
12	55-59	34.78	39.96	35.44	40.57	36.2	41.22
13	60-64	29.77	34.69	30.13	35.46	30.53	36.17
14	65-69	22.58	26.78	23.99	28.17	24.81	29.42
15	70-74	14.71	18.23	15.4	19.02	16.18	19.97
16	75+	13.54	20.55	14.45	21.95	15.36	23.34
Jumlah		745.49	753.61	748.96	757.6	752.16	761.36
		1.499,10		1.506,56		1.513,52	

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2020 (data diolah)

Ditinjau berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, Kota Makassar termasuk daerah yang memiliki populasi laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan, serta memiliki penduduk yang didominasi oleh usia produktif sehingga diproyeksi hingga tahun 2030 kondisi tersebut masih tetap sama namun dengan selisih yang semakin membesar. Adapun jumlah penduduk yang diproyeksikan untuk tahun 2025-2030 bisa di lihat pada tabel di atas.



Proyeksi penduduk ini dapat digunakan dalam rangka perencanaan pembangunan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan untuk memperkirakan kebutuhan layanan kesehatan di masa depan. Ini termasuk estimasi jumlah tenaga medis, obat-obatan, dan tempat tidur di rumah sakit yang dibutuhkan sesuai dengan struktur umur dan jumlah penduduk. membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Bidang pendidikan membantu merencanakan kebutuhan sekolah, guru, dan fasilitas pendidikan lainnya, sehingga dapat menjangkau semua anak usia sekolah. Bidang Perumahan perencanaan kebutuhan perumahan yang sesuai dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan masyarakat, bidang pangan dapat memperkirakan kebutuhan pangan bidang ketenagakerjaan, dapat memperkirakan jumlah angkatan kerja terkait dengan penciptaan lapangan kerja dan lain sebagainya.

Tabel 2.15
Rasio Jenis Kelamin Penduduk menurut Kecamatan
di Kota Makassar Tahun 2020-2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mariso	100,7	100,74	100,07	99,19	99,44
Mamajang	96,4	96,44	96,46	96,53	96,47
Tamalate	100	99,98	100,00	99,57	99,49
Rappocini	95,9	95,92	95,93	95,44	95,62
Makassar	98,2	98,20	98,22	98,32	98,31
Ujung Pandang	94,1	94,17	94,18	94,25	94,27
Wajo	99,8	99,81	99,83	96,80	96,58
Bontoala	98,5	98,47	98,49	98,62	98,51
Ujung Tanah	100,2	100,24	100,26	100,31	100,22
Kepulauan Sangkarrang	98,8	98,81	98,83	99,88	99,93
Tallo	101,6	101,63	101,65	101,51	101,51
Panakkukang	99,6	99,64	99,66	98,73	98,61
Manggala	99,6	99,66	99,68	98,81	98,82
Biringkanaya	99,9	99,92	99,94	99,17	99,11
Tamalanrea	99,2	99,25	99,27	99,05	98,85
Kota Makassar	99,2	99,22	99,24	98,70	98,68

Sumber: BPS kota Makassar, Tahun 2025

Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk Perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Sebagian besar kecamatan yang ada di Kota Makassar memiliki penduduk Perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Namun, pada Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo, jumlah penduduk laki laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Perempuan. Melihat pada tahun 2024, perbandingan penduduk di Kecamatan Mariso pada 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki; di Kecamatan Mamajang pada 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki; di Kecamatan Tamalate pada 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki; di Kecamatan Rappocini, pada 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki; di



Kecamatan Makassar pada 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki; di Kecamatan Ujung Pandang, pada 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki; di Kecamatan Wajo, pada 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki; di Kecamatan Bontoala, pada 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki; di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, pada 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki; di Kecamatan Panakkukang, pada 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki; di Kecamatan Manggala, pada 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki; di Kecamatan Biringkanaya, pada 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki; serta di Kecamatan Tamalanrea, pada 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Adapun rasio penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Makassar pada tahun 2024 yaitu 98,68 yang artinya pada 100 penduduk perempuan terdapat 98-99 penduduk laki-laki.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses meningkatnya kapasitas produksi suatu negara yang ditandai dengan kenaikan output barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di seluruh wilayah akibat dampak pandemi COVID-19. Kota Makassar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar -2,00%, lebih ringan dibandingkan kontraksi di tingkat nasional sebesar -2,07%. Namun, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kontraksi lebih ringan sebesar -0,71%.

Memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar melonjak menjadi 4,47%, Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 4,64%, dan tingkat nasional juga menunjukkan pemulihan sebesar 3,70%. Ini menunjukkan respon yang positif terhadap kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

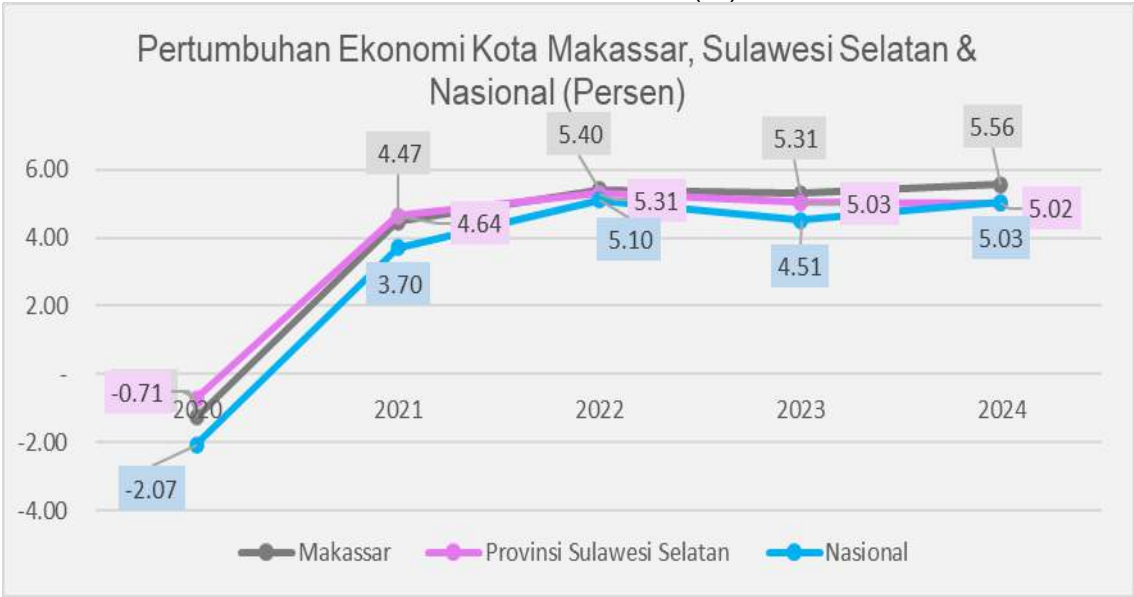
Pada tahun 2022, tren pemulihan berlanjut dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kota Makassar mencatat pertumbuhan sebesar 5,40%, mengungguli pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional yang masing-masing sebesar 5,31% dan 5,10%. Hal ini menunjukkan penguatan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor-sektor utama Kota Makassar.

Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi cenderung melandai. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menurun menjadi 5,31%, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi 5,03%, dan nasional mengalami penurunan lebih signifikan menjadi 4,51%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian global serta tekanan inflasi.

Pada tahun 2024, perekonomian kembali menunjukkan perbaikan. Kota Makassar mencatat pertumbuhan sebesar 5,56%, tertinggi dalam periode lima tahun tersebut. Pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional juga meningkat masing-masing menjadi 5,02% dan 5,03%. Ini mencerminkan pemulihan yang semakin menguat dan stabilnya kondisi perekonomian secara umum.



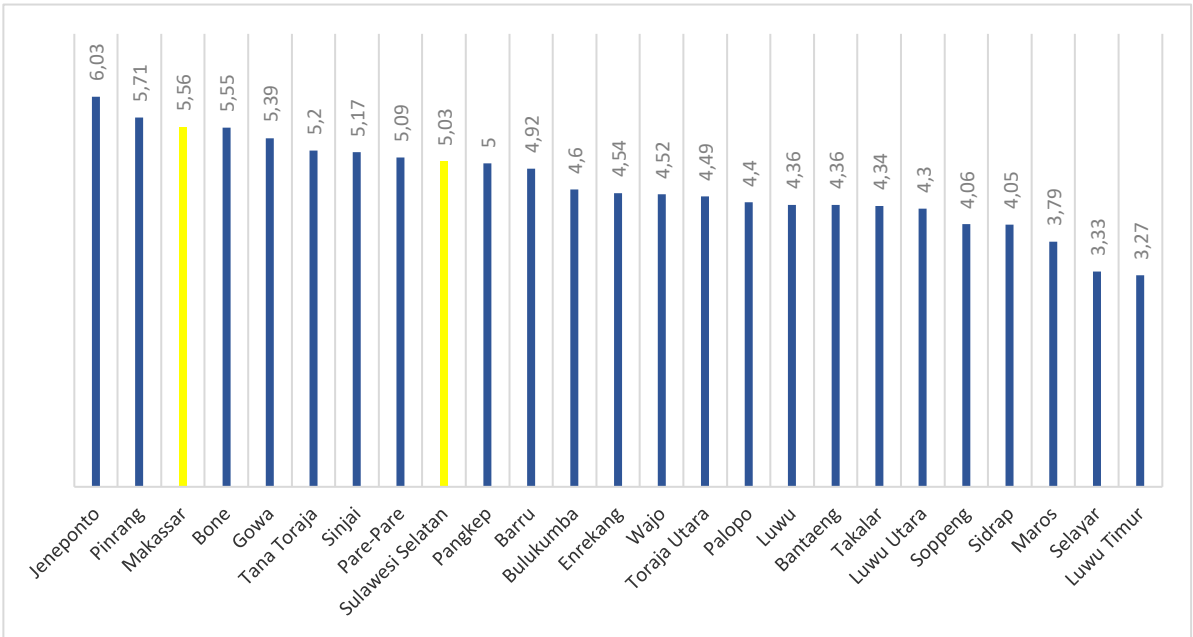
Grafik 2.19
Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar, Sulawesi Selatan & Nasional
Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Bila dilihat posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kota Makassar diantara kabupaten dan kota lainnya di Sulsel pada tahun 2024, juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, bahkan tergolong daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi, melebihi delapan belas kabupaten kota lainnya di Sulsel. Tantangannya, bagaimana mempertahankannya dan terus mengoptimalkan kinerjanya agar mampu menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulsel ke depan. Hal ini penting, mengingat Kota Makassar memberi kontribusi 37% total PDRB Provinsi Sulsel, sehingga tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Makassar akan berdampak pada tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.

Grafik 2.20
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota & Sulawesi Selatan Tahun 2024

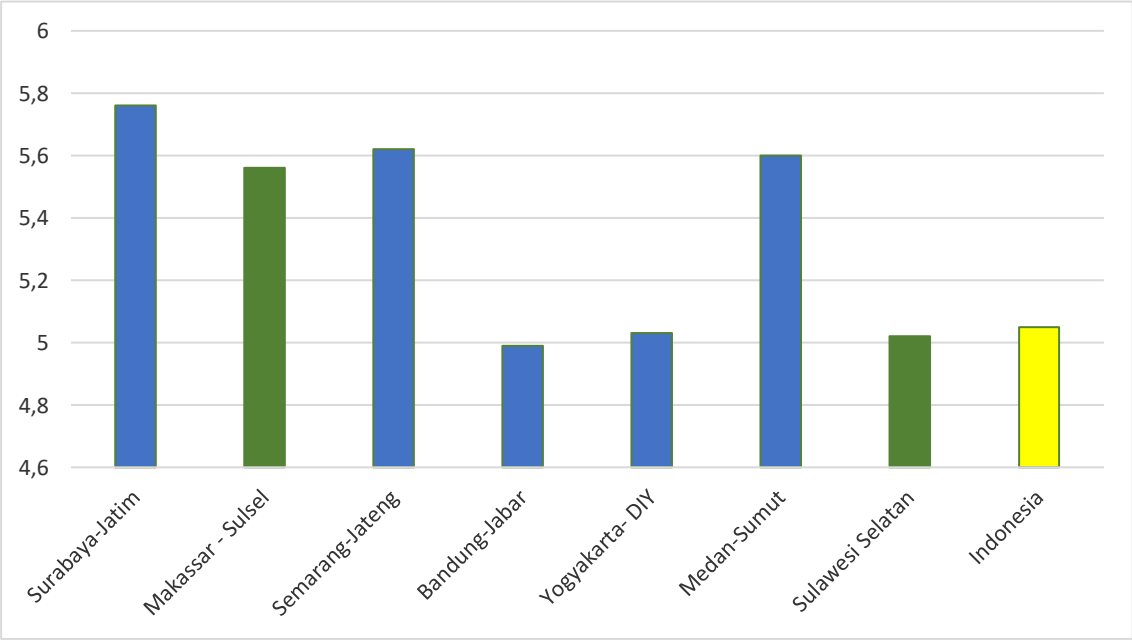


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Secara nasional, posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, juga cukup baik, tetapi memiliki tantangan besar untuk lebih akseleratif agar ke

depan mampu setara dengan kota-kota besar yang menjadi pusat pertumbuhan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Meskipun mampu bertumbuh lebih besar dari Kota Bandung (Jabar) dan Yogyakarta (DIY).

Grafik 2.21
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar dengan Provinsi Sulsel,
Nasional & Tujuh Kota Setara Lainnya Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

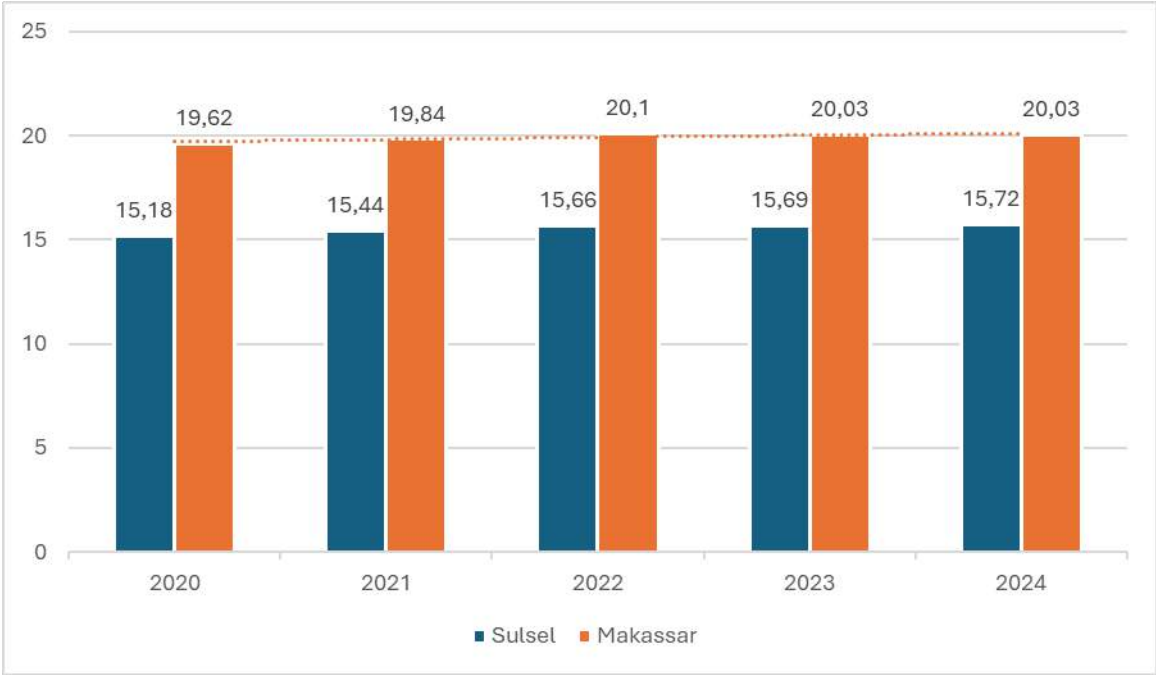
Tantangan Kota Makassar adalah harus mampu bertumbuh setara dengan pertumbuhan ekonomi kota besar lainnya seperti Kota Surabaya, bahkan sejatinya menjadi yang tertinggi agar mampu mewujudkan, mendorong Provinsi Sulsel sebagai salah satu provinsi kontributor utama dalam mewujudkan Indonesia dengan pendapatan per kapita masyarakat yang setara dengan negara maju di dunia pada tahun 2045 yang akan datang.

**2.2.1.2. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki peran penting dalam perekonomian, mencerminkan konsumsi masyarakat dan efisiensi distribusi barang. Sebagai salah satu kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor ini mencakup perdagangan grosir, ritel, dan layanan perbaikan kendaraan. Perkembangannya dipengaruhi oleh pendapatan, tren konsumsi, infrastruktur logistik, serta teknologi digital. Rasio PDRB sektor ini menggambarkan kontribusinya terhadap ekonomi lokal sekaligus mencerminkan daya beli masyarakat, yang penting untuk perumusan kebijakan ekonomi yang tepat dan pertumbuhan berkelanjutan. Berikut disajikan tabel perbandingan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berdasarkan distribusi Persentase antara pemerintah Kota Makassar dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.



Grafik 2.22
Perbandingan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berdasarkan distribusi Persentase Kota Makassar dan Sulawesi selatan Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025, diolah

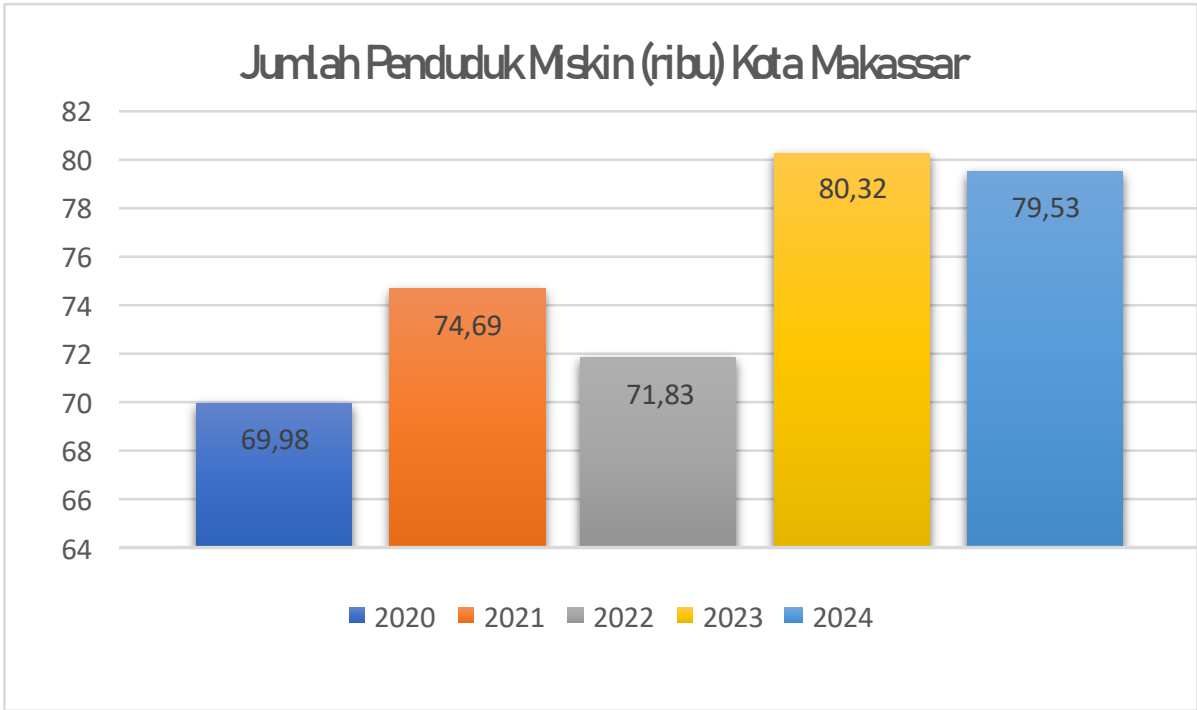
2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Pada tahun 2020 pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kota Makassar. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, terutama di sektor informal. Akibatnya, persentase penduduk miskin meningkat di masa pandemi. Bantuan sosial dari Pemerintah, meskipun masif, tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Badan pusat statistik merilis jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 74,69 ribu orang dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,98 ribu orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 71,83 ribu jiwa. Namun angka ini mengalami lonjakan pada tahun 2023 sebesar 8,49 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin Kota Makassar menjadi 80,32 ribu orang dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 79,53 ribu orang.



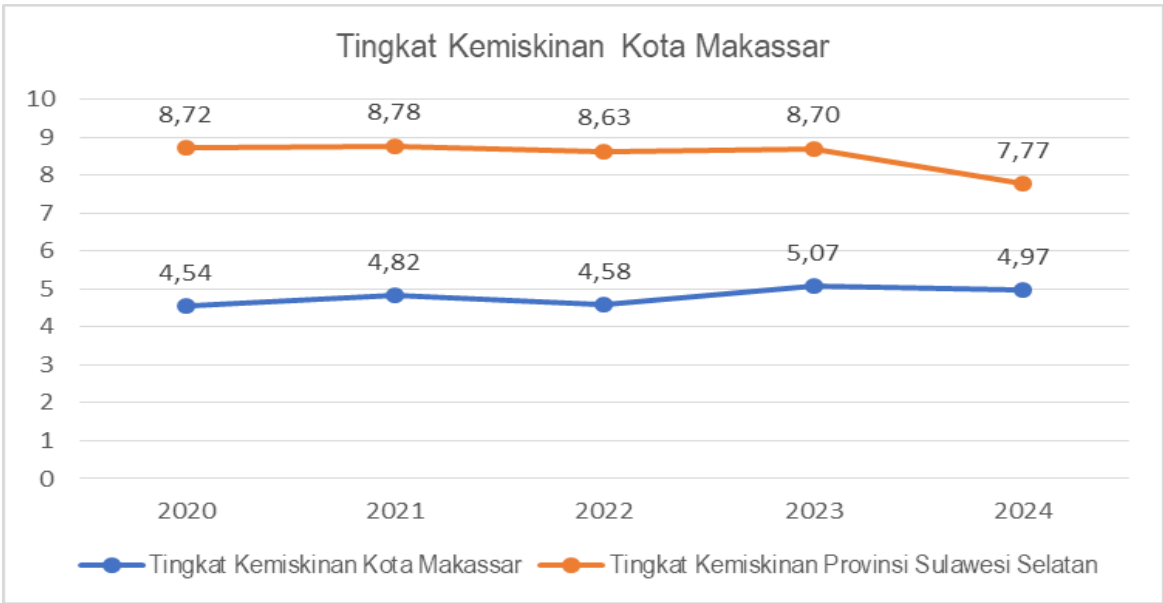
Grafik 2.23
Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2024

Selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 Kemiskinan Kota Makassar selalu berada dibawah rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Angka kemiskinan Kota Makassar masih relatif stabil, diperkirakan berada di kisaran 4-5%. Tahun 2023 rilis data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,07 persen. Angka tersebut termasuk yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat pandemi Covid-19 yang hanya 4,54 persen tahun 2020 dan 4,82 persen tahun 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 4,97%.

Grafik 2.24
Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar dan Provinsi Sul-Sel



Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2024



Dibandingkan dengan 541 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, Kota Makassar menempati urutan ke-70 daerah dengan berdasarkan persentase penduduk miskin rendah, hal ini menunjukkan masih ada 69 Kabupaten/Kota lainnya yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah daripada Kota Makassar. Kota Badung Provinsi Bali menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah di Indonesia dengan angka 2,23 persen, disusul dengan Kota Balikpapan, Kota Sawah Lunto, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan masing-masing mencatat angka 2,23 persen, 2,33 persen, 2,34 persen dan 2,36 persen. Daerah lain seperti Banjar, Bangka Barat, Kota Denpasar, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jakarta Selatan menempati posisi ke-5 hingga ke-10.

Tabel 2.16
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Beberapa Daerah Lain di Indonesia Tahun 2024

No	Kota/Kabupaten	Persentase Penduduk Miskin	Peringkat Persentase Penduduk Miskin Terendah
1	Badung	2,23	1
2	Balikpapan	2,23	2
3	Sawah Lunto	2,33	3
4	Depok	2,34	4
5	Tangerang Selatan	2,36	5
6	Banjar	2,36	6
7	Bangka Barat	2,59	7
8	Denpasar	2,59	8
9	Sungai Penuh	2,92	9
10	Jakarta Selatan	3,03	10
11	Makassar	4,97	70

Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2024

Faktor utama penyebab kenaikan tingkat kemiskinan Kota Makassar adalah kenaikan signifikan pada garis kemiskinan. Kenaikan garis kemiskinan tahun 2024 adalah termasuk kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Saat pandemi Covid-19, garis kemiskinan hanya naik 7,44 persen dari Rp. 442.513 per kapita/bulan menjadi Rp. 475.444 per kapita/bulan. Tahun 2023, angkanya naik sampai 11,58 persen hingga menyentuh angka Rp. 570.286 per kapita/bulan dan Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp. 592.753 per kapita/bulan. Umumnya penyebab utama kenaikan garis kemiskinan adalah inflasi. Namun data menunjukkan inflasi secara umum di Kota Makassar ternyata melambat dari 5,77 persen tahun 2022 menjadi 2,89 persen tahun 2023 (yoy). Meski begitu perlu dilihat lebih detail perubahan garis kemiskinan akibat perubahan inflasi.

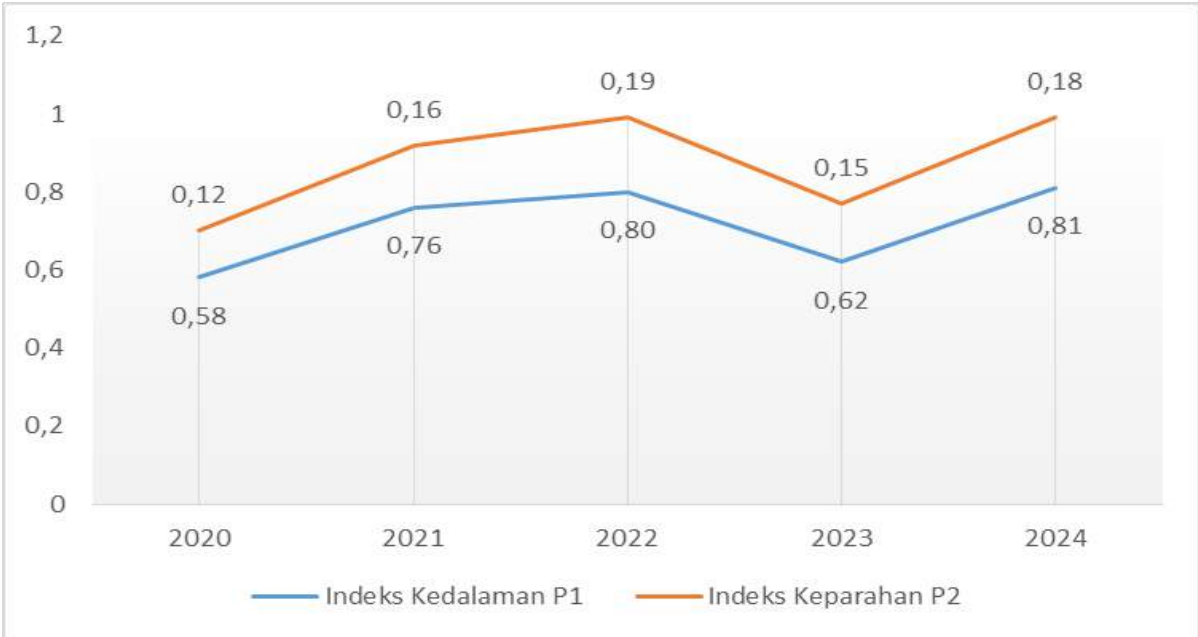
Grafik 2.25
Garis Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2024

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, hal lain yang perlu diperhatikan adalah Indikator kemiskinan yang lain adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Grafik 2.26
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar

berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

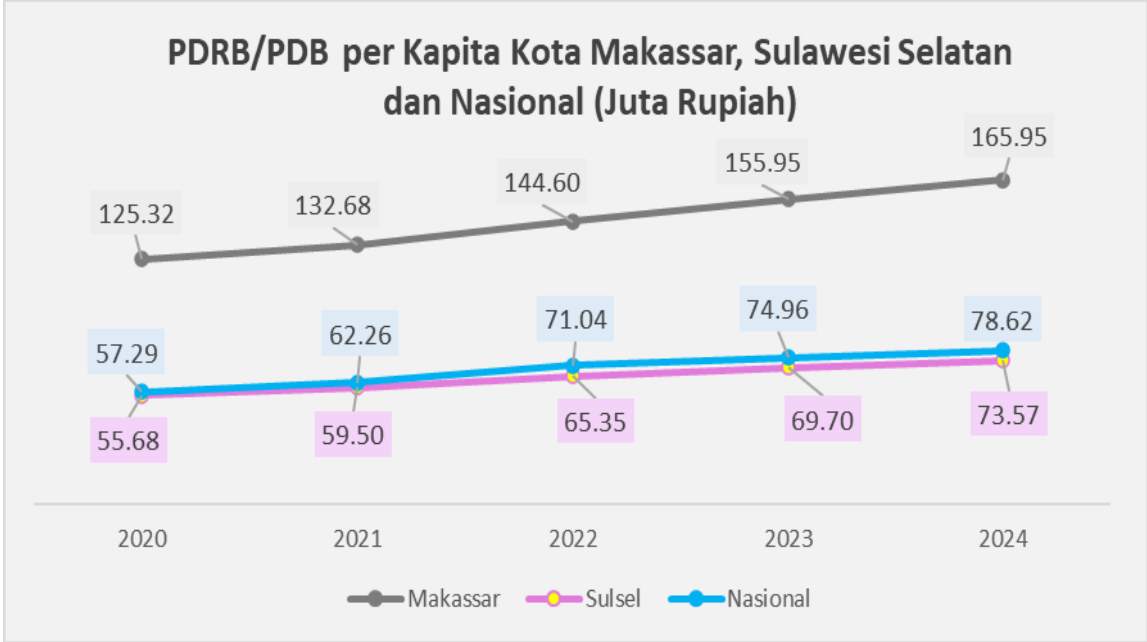
Tahun 2021 indeks kedalaman meningkat dari 0,58 ke 0,76, kemungkinan hal ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Tahun 2022 dan 2023 indeks menunjukkan stabilisasi sekitar 0,62-0,80. Pada tahun 2024 indeks kedalaman mengalami penurunan menjadi 0,81. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2020 indeks keparahan Kota Makassar 0,12 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 sebesar 0,16 dan 0,19. Tahun 2023 Indeks Keparahannya mengalami penurunan sebesar 0,15. Penurunan ini mungkin terjadi terkait dengan adanya program pengentasan kemiskinan yang berhasil. Tetapi pada tahun 2024 indeks keparahan kembali naik menjadi 0,18 hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada bantuan sosial, kenaikan harga pangan yang tidak terkendali menyebabkan rumah tangga miskin semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenaikan inflasi dan harga bahan baku, terutama setelah pandemi membatasi upaya pemulihan ekonomi bagi masyarakat miskin yang ada di Kota Makassar

2.2.1.4. PDRB Per Kapita

PDRB merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan. Namun demikian yang secara rutin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penghitungan dari sisi produksi dan pengeluaran/penggunaan. Pencapaian PDRB per Kapita Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja peningkatan yang menakjubkan. Meningkat dari hanya Rp.125,32 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.165,95 juta pada tahun 2024. Kinerja peningkatan PDRB Kota Makassar jauh melampaui kinerja Provinsi Sulsel dan nasional, sehingga gap-nya akan semakin melebar. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan perlu ditingkatkan hingga Kota Makassar mampu mendorong peningkatan PDRB Provinsi Sulsel dapat melampaui capaian PDB per Kapita nasional dalam jangka panjang yang akan datang.

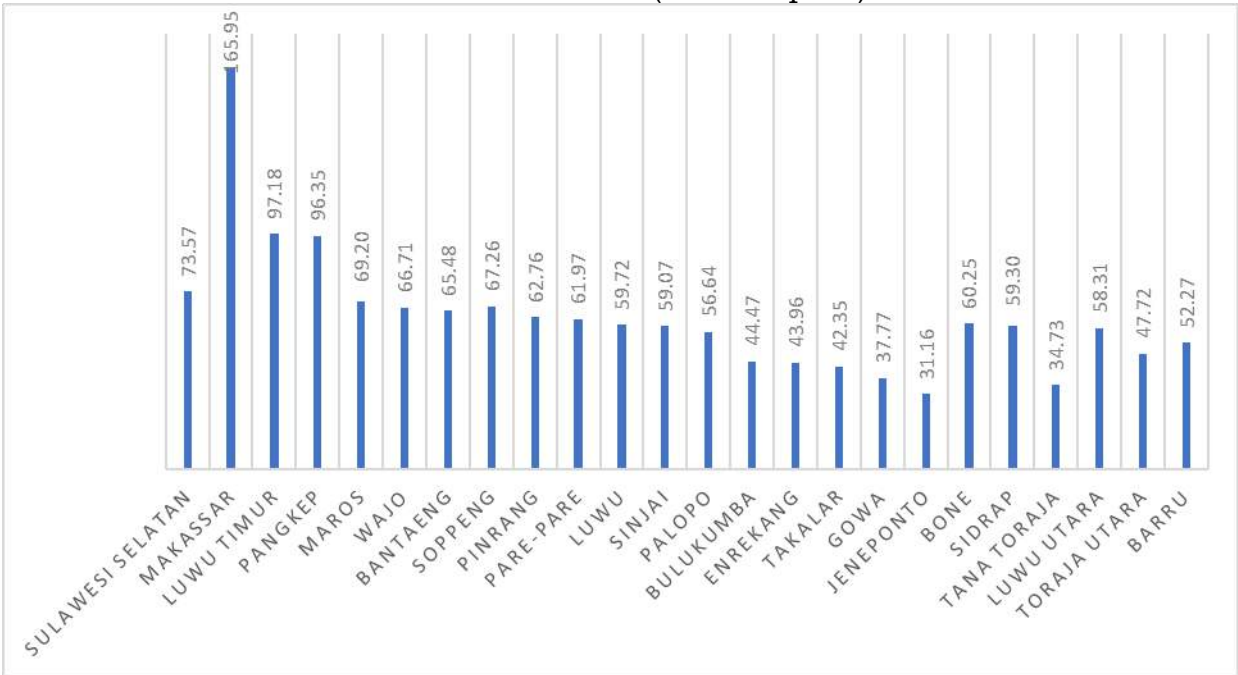
Grafik 2.27
PDRB/PDB per Kapita Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Bila dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sulsel, PDRB per Kapita Kota Makassar juga menggambarkan pencapaian yang superior hingga tahun 2024. Jauh meninggalkan pencapaian Kabupaten Jeneponto yang mencatat kinerja terendah. Bahkan bila dibandingkan dengan pencapaian PDRB per Kapita Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pangkep sebagai yang tertinggi kedua dan ketiga, Kota Makassar hanya sedikit lebih rendah bila PDRB per Kapita keduanya digabungkan. Padahal pada kedua kabupaten ini terdapat PMA dan BUMN pertambangan dan industri pengolahan berskala besar dan berlevel global dan nasional.

Grafik 2.28
PDRB Per Kapita Provinsi & Kab/Kota di Provinsi Sulsel
Tahun 2024 (Juta Rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Fakta ini menggambarkan bahwa dalam hal pencapaian kinerja PDRB per Kapita Kota Makassar menunjukkan kinerja yang sangat baik. Tantangannya,

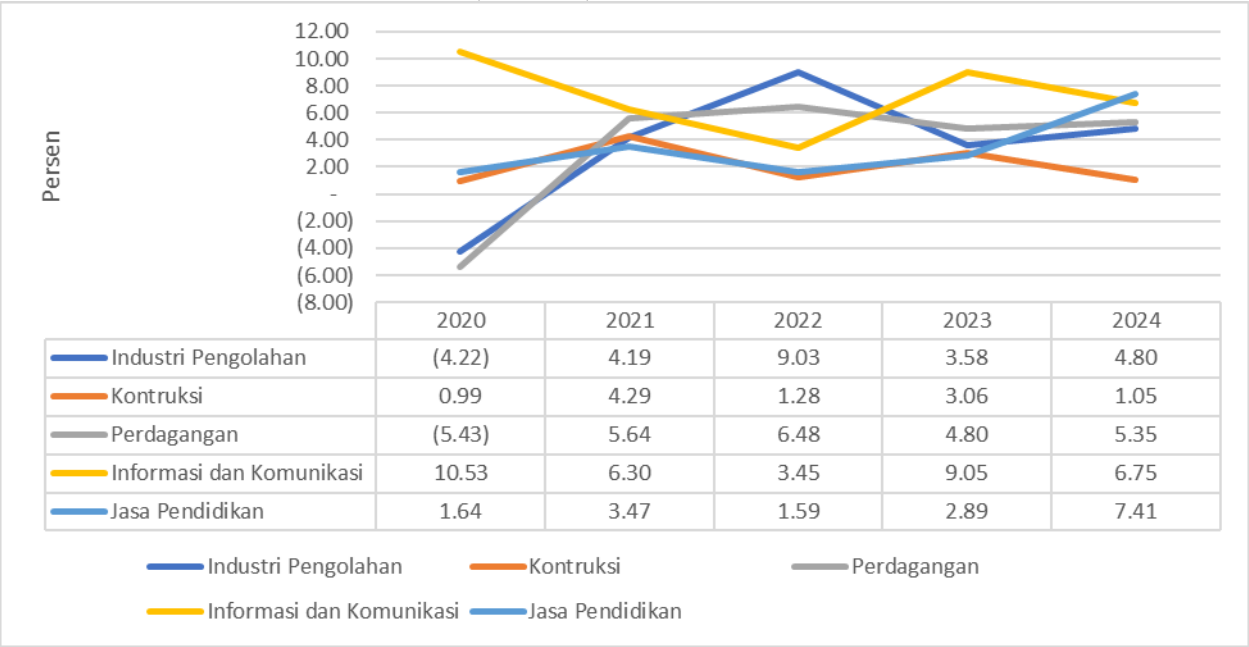


untuk terus mempertahankan kinerja tersebut dan terus berusaha mengoptimalkan agar mampu setara dan bahkan melampaui pencapaian kinerja kota setara lainnya di Indonesia.

2.2.1.5. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Laju pertumbuhan PDRB Kota Makassar berdasarkan lapangan usaha utama menunjukkan tren yang beragam pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Selama lima tahun terakhir, sektor-sektor utama menunjukkan dinamika pertumbuhan yang bervariasi dalam PDRB ADHK (Atas dasar harga Konstan). Sektor Industri Pengolahan mengalami kontraksi tajam pada 2020 sebesar -4,22% akibat pandemi, namun pulih signifikan pada 2022 (9,03%) meski melambat kembali di tahun-tahun berikutnya. Sektor Konstruksi menunjukkan tren fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada 2021 (4,29%) tetapi terus menurun hingga hanya 1,05% di 2024, mengindikasikan lemahnya pemulihan atau berkurangnya aktivitas pembangunan. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mencatat kontraksi besar di 2020 (-5,43%) namun berhasil stabil dengan pertumbuhan positif sejak 2021, mencapai 5,35% pada 2024. Informasi dan Komunikasi tampil stabil sebagai sektor yang tangguh, tumbuh positif setiap tahun, meskipun melambat pada 2022 (3,45%), ia kembali tumbuh kuat di 2023 (9,05%). Sementara itu, Jasa Pendidikan menunjukkan pemulihan bertahap pasca-pandemi, dari 1,64% di 2020 menjadi lonjakan signifikan ke 7,41% pada 2024, mencerminkan peningkatan kembali aktivitas pendidikan.

Grafik 2.29
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Makassar ADHK Menurut Lapangan Usaha Utama (Persen) Tahun 2020-2024

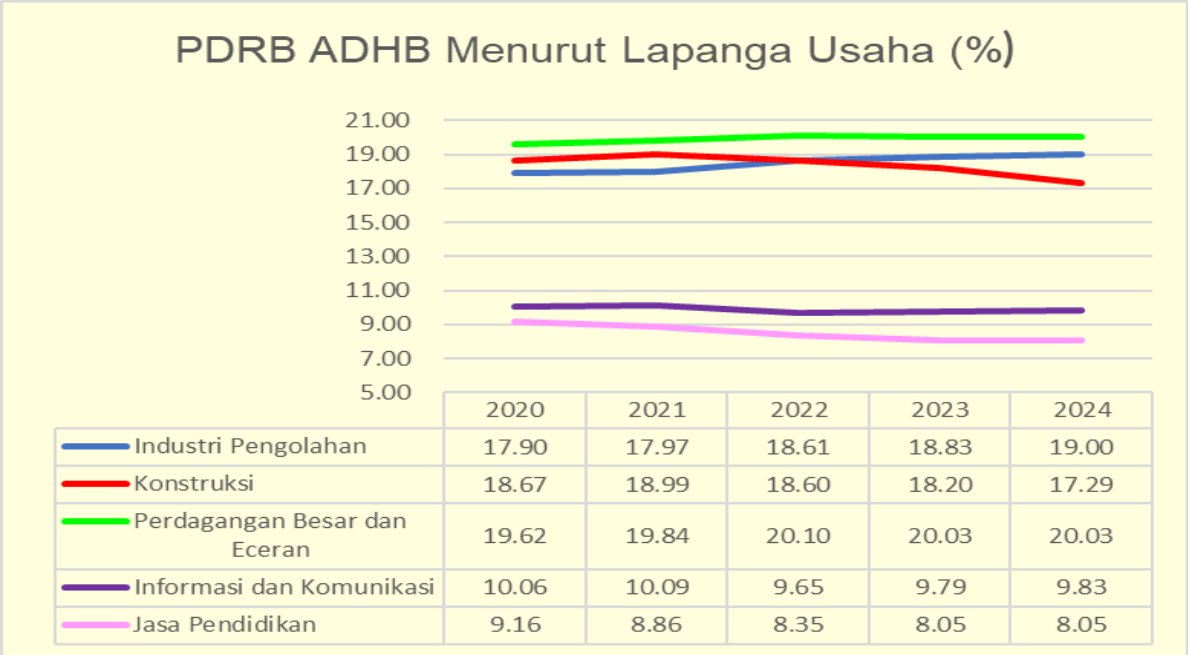


Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Dalam PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku), yang mencerminkan nilai nominal tanpa memperhitungkan inflasi, terlihat bahwa Industri Pengolahan dan Perdagangan konsisten mengalami kenaikan nilai tiap tahun, mencerminkan pertumbuhan ekonomi nominal meskipun sempat mengalami gangguan pertumbuhan riil. Industri Pengolahan meningkat dari 17,90% (2020) menjadi 19,00% (2024), menunjukkan peran pentingnya dalam struktur ekonomi meski dengan pertumbuhan riil yang fluktuatif. Perdagangan Besar dan Eceran relatif stabil di kisaran 19–20%, mempertahankan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Sektor Konstruksi

mengalami penurunan kontribusi dari 18,67% di 2020 ke 17,29% di 2024, yang selaras dengan tren perlambatan di ADHK. Sektor Informasi dan Komunikasi menunjukkan pertumbuhan nominal moderat namun stabil, menandakan konsistensi meskipun kontribusinya terhadap total PDRB relatif kecil (sekitar 10%). Sebaliknya, Jasa Pendidikan menunjukkan penurunan kontribusi dari 9,16% ke 8,05%, menunjukkan meskipun terjadi pemulihan dalam volume (ADHK), dari sisi nilai nominal kontribusinya stagnan atau bahkan menurun, kemungkinan karena perubahan struktur pembiayaan atau preferensi layanan pendidikan.

Grafik 2.30
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Makassar ADHK Menurut Lapangan Usaha
Utama (Persen) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2.2.1.6. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun) untuk tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat bahwa secara umum terdapat tren peningkatan pengeluaran per kapita di seluruh kabupaten/kota yang tercatat, meskipun dengan laju yang bervariasi antar wilayah. Di Kota Makassar, pengeluaran per kapita mengalami kenaikan yang konsisten setiap tahunnya, dari 16,87 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,39 juta rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli atau pengeluaran konsumsi di Kota Makassar.

Sebaliknya, kabupaten lainnya seperti Maros, Pangkep, Takalar, dan Gowa juga menunjukkan tren kenaikan, meskipun dengan angka yang lebih rendah dibandingkan Makassar. Di Maros, pengeluaran per kapita meningkat dari 10,96 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 12,21 juta rupiah pada tahun 2024. Pangkep memiliki kenaikan serupa, dengan pengeluaran per kapita yang meningkat dari 11,41 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 12,64 juta rupiah pada tahun 2024. Takalar dan Gowa mengalami pola yang hampir serupa, dengan peningkatan pengeluaran per kapita yang stabil, meskipun jumlahnya lebih rendah dari kabupaten/kota lainnya, yakni di Takalar dari 10,45 juta rupiah pada 2020 menjadi 11,68 juta rupiah pada 2024, dan Gowa dari 9,39 juta rupiah pada 2020 menjadi 10,70 juta rupiah pada 2024.



Tabel 2.17
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun)
Tahun 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Makassar	16.87	17.10	17.41	17.89	18.39
Maros	10.96	11.03	11.40	11.80	12.21
Pangkep	11.41	11.52	11.82	12.24	12.64
Takalar	10.45	10.54	10.75	11.24	11.68
Gowa	9.39	9.50	9.81	10.23	10.70

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025, data diolah

Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan tingkat pengeluaran antar kabupaten dan kota, tren peningkatan yang tercatat menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi daerah, yang dapat disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat atau faktor pendorong ekonomi lainnya. Perbedaan laju peningkatan pengeluaran per kapita antar wilayah dapat mencerminkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan daya beli Masyarakat. Namun, perbedaan laju kenaikan antara Makassar dan kabupaten sekitar lainnya mengindikasikan ketimpangan ekonomi yang masih ada antara pusat kota dan daerah sekitarnya

2.2.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Faktor ekonomi memberikan kontribusi signifikan terhadap TPT, mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi dan penciptaan lapangan kerja, kondisi upah dan produktivitas, serta tingkat inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi pasar tenaga kerja juga menjadi indikator krusial, termasuk kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, ketersediaan informasi pasar kerja, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, serta tingkat fleksibilitas pasar kerja.

Grafik 2.31
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Makassar Tahun 2020-2024



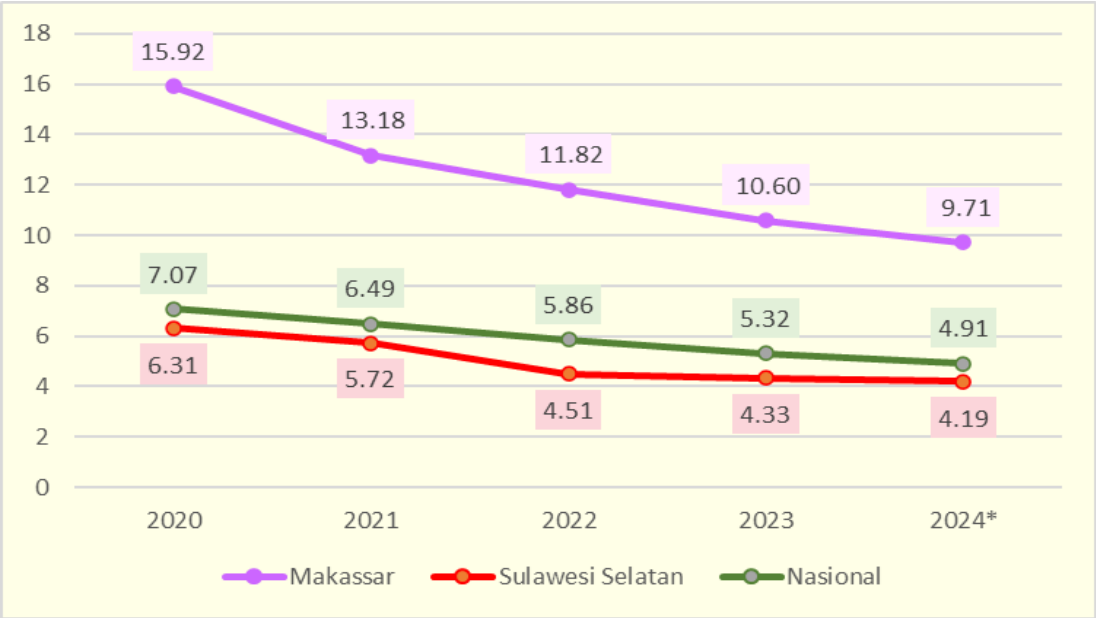
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Makassar pada lima tahun terakhir di atas menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 15,92% pada 2020 menjadi 9,71% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang dimulai pada 2021, seiring



dibukanya kembali sektor-sektor ekonomi, pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Kreatif, peningkatan investasi di sektor properti, pelabuhan dan pembangunan infrastruktur jalan, serta peran kebijakan pemerintah menjalankan program pelatihan keterampilan, Pendidikan Vokasi, dan Inkubasi Bisnis bagi usahawan muda.

Grafik 2.32
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (angka sementara), Tahun 2025

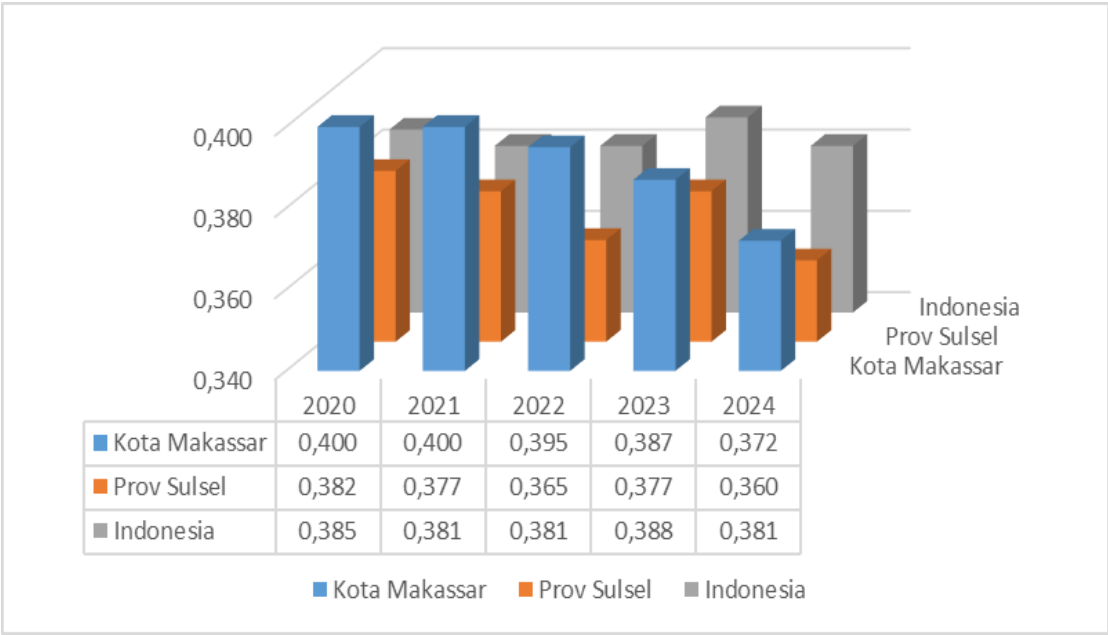
Perkembangan pengangguran Kota Makassar meski mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19 persen dan tingkat nasional sebesar 4,91 persen. Terindikasi bahwa berbagai sarana dan prasarana yang lebih memadai dan berkualitas adalah menjadi pilihan tenaga kerja yang berasal dari kabupaten maupun kota di sekitarnya untuk mencari pekerjaan di Kota Makassar. Arus urbanisasi tenaga kerja dari desa ke kota yang pada umumnya tidak selalu didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai. Jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan banyaknya angkatan kerja yang tersedia setiap tahunnya.

2.2.1.8. Indeks Gini

Perkembangan nilai Indeks Gini Kota Makassar dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami penurunan. Selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan angka di kisaran 0,3-0,4 yang tergolong dalam kategori sedang. Tahun 2020 dan 2021 Indeks gini Kota Makassar menunjukkan angka sebesar 0,400 selanjutnya di tahun 2022 angkanya turun ke 0,395 dan tahun 2023 menjadi 0,387. Pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,372 menurun 0,015 poin dibandingkan tahun 2023. Meski turun, nilai indeks gini Kota Makassar masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih rendah 0,009 poin dari angka nasional.



Grafik 2.33
Indeks Gini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber: Data BPS, Tahun 2024

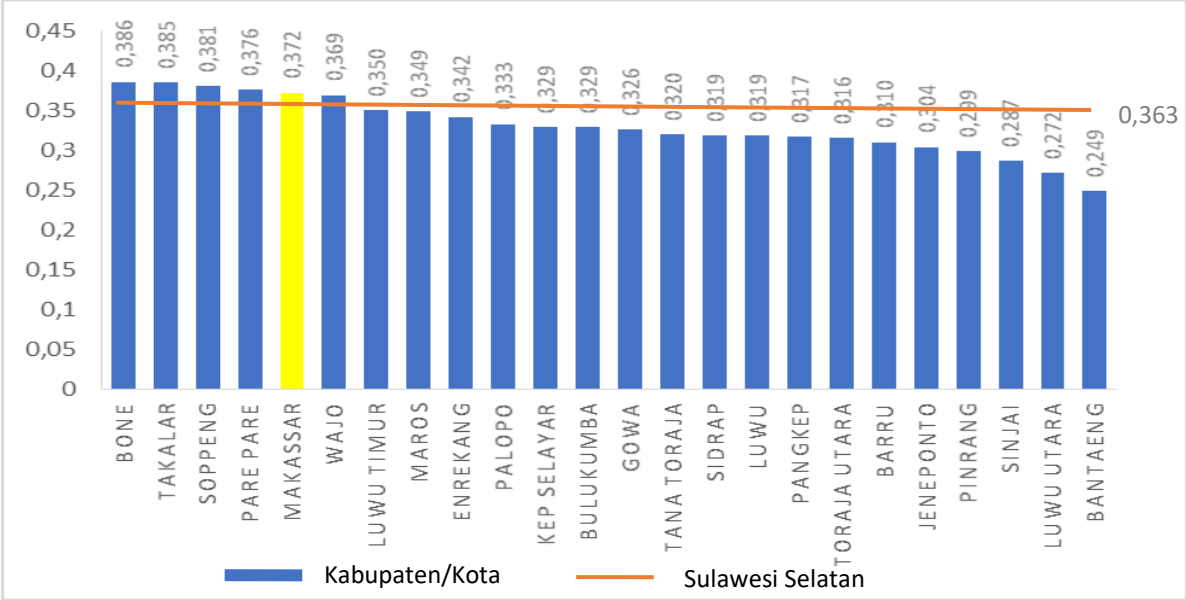
Dari angka gini ratio tersebut, menunjukkan bahwa angka ketimpangan di Kota Makassar cukup tinggi. Hal ini menandakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata baik. Isu ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, menjadi barometer bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang baik, tentu mengindikasikan angka ketimpangan yang rendah dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sehingga semua daerah mencoba untuk menangani hal ini secara serius, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari Pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera.

Kota Makassar termasuk daerah yang mencatat angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meski dalam beberapa tahun melambat. Kota Makassar menguasai lebih dari 1/3 perekonomian Sulawesi Selatan yang membuat daerah ini menjadi daya tarik bagi angkatan kerja daerah lain untuk mencari pekerjaan. Meski begitu, implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dilihat lebih mendalam karena data menunjukkan alih-alih mensejahterakan semua kelompok masyarakat, ketimpangan pendapatan di Kota Makassar masih sangat tajam.

Secara relatif, indeks gini Kota Makassar berada di urutan kelima tertinggi setelah Kabupaten Bone, Takalar, Soppeng dan Pare-pare. Keempat daerah ini mencatat indeks gini masing- masing 0,386, 0,385, 0,381 dan 0,376. Selain kelima daerah tersebut, ada daerah lain yang memiliki indeks gini lebih tinggi dari provinsi yaitu Kabupaten Wajo sebesar 0,369.



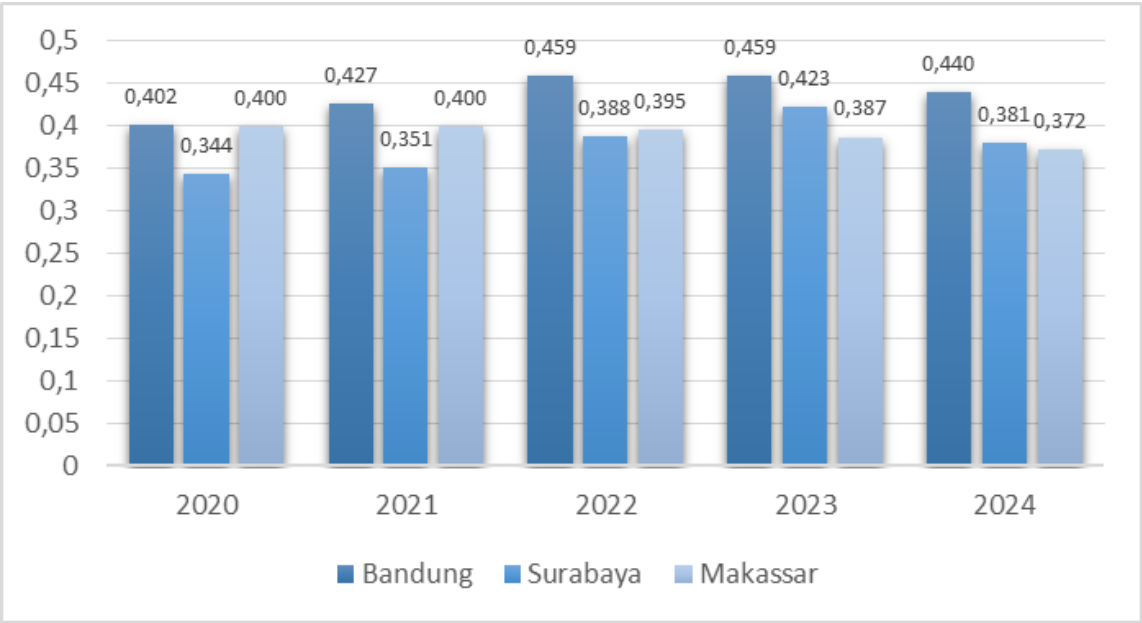
Grafik 2.34
Indeks Gini Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia



Sumber: BPS, Tahun 2024

Posisi relatif yang masih tinggi menunjukkan bahwa isu ketimpangan pendapatan harus dimasukkan sebagai salah satu masalah pembangunan daerah yang perlu mendapat intervensi. Pemerintah daerah dalam jangka panjang perlu fokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, tidak semata-mata mendorong angka pertumbuhan. Masih tingginya ketimpangan pendapatan di Kota Makassar, disebabkan oleh empat faktor, yaitu adanya ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah.

Grafik 2.35
Capaian Gini Ratio Kota Makassar dengan Wilayah Setaranya
Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPS, Tahun 2024

Berdasarkan data capaian gini rasio Kota Makassar dengan kota setaranya Tahun 2020 Kota Makassar yakni sebesar 0,400 untuk Kota Bandung sebesar 0,402 dan Kota Surabaya 0,344 artinya angka ketimpangan di Kota Makassar masih lebih rendah dibandingkan dengan kota Bandung dan



lebih tinggi dari Kota Surabaya. Namun pada tahun 2023 tingkat ketimpangan Kota Makassar menunjukkan penurunan yakni 0,372 lebih rendah daripada kota setaranya yaitu Kota Bandung 0,440 dan Kota Surabaya 0,381

2.2.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dimana tahun 2021 telah mencapai 82,66. IPM Makassar lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional yang masih pada angka 70. Program-program di sektor Pendidikan, Kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah.

Tabel 2.18
Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024

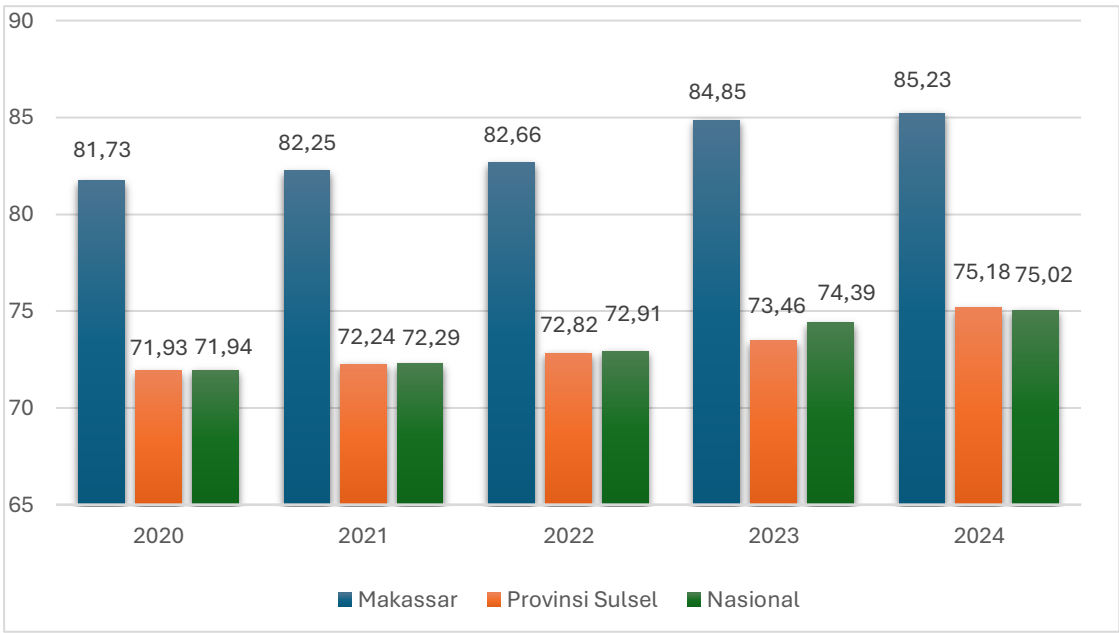
Indiaktor	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PENDIDIKAN						
Harapan lama sekolah	Tahun	15,57	15,58	15,59	15,61	15,62
Rata-rata Lama sekolah	Tahun	11,21	11,43	11,55	11,56	11,57
KESEHATAN						
Angka Harapan Hidup	Tahun	72,09	72,13	72,40	75.15	75,33
STANDAR HIDUP LAYAK						
Pengeluaran per kapita	Rp/Orang	16.873	17.097 8	17.406	17.88 9	18,38 6
Indek Pembangunan Manusia		81,73	82,25	82,66	84,85	85,23

Sumber: BPS Kota Makassar, tahun 2024

IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2020 mencapai 81,73 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 85,23 atau mengalami pertumbuhan 3,74 dalam lima tahun. Pertumbuhan IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebesar 71,93 meningkat menjadi 75,18 pada tahun 2024, artinya pertumbuhan IPM provinsi Sulawesi Selatan hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,25 dalam lima tahun. Demikian pula secara nasional IPM pada tahun 2020 berada pada angka 71,94 menjadi 75,02 di Tahun 2024 atau meningkat hanya 3,08 dalam lima tahun. Program-program di sektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah. Perbandingan Indek Pembangunan Manusia Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dapat dilihat pada grafik berikut:



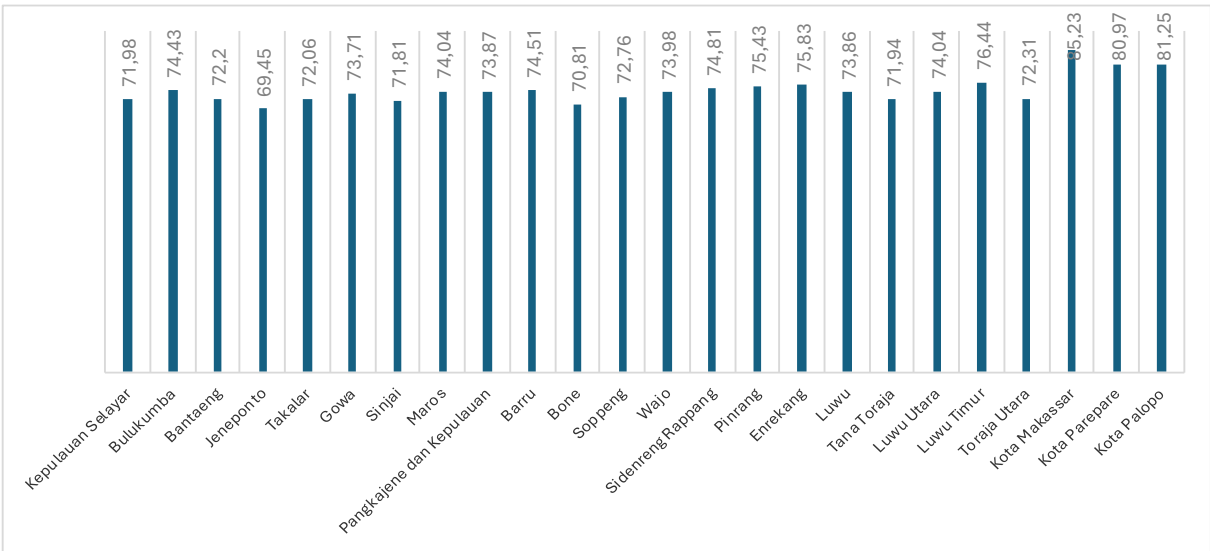
Grafik 2.36
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: BPS Kota Makassar, Tahun 2024

Analisis komparasi dengan tingkat nasional dan Provinsi Sulawesi selatan, menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kota Makassar mengalami peningkatan dengan nilai yang lebih tinggi dari IPM tingkat nasional dan Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Makassar relatif lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Sebagai kota metropolitan, maka sudah selayaknya IPM Kota Makassar berada di atas level provinsi dan nasional. IPM Kota Makassar juga lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut grafik Indeks Pembangunan Manusia 2020-2024 Wilayah kabupaten Kota Se wilayah Sulawesi Selatan yang menunjukkan bahwa posisi Kota Makassar masih berada pada posisi yang pertama jika dibanding dengan 23 Kab/Kota lainnya.

Grafik 2.37
Perbandingan IPM Kab/Kota di Provinsi Sulawesi selatan
Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi-Selatan, Tahun 2024



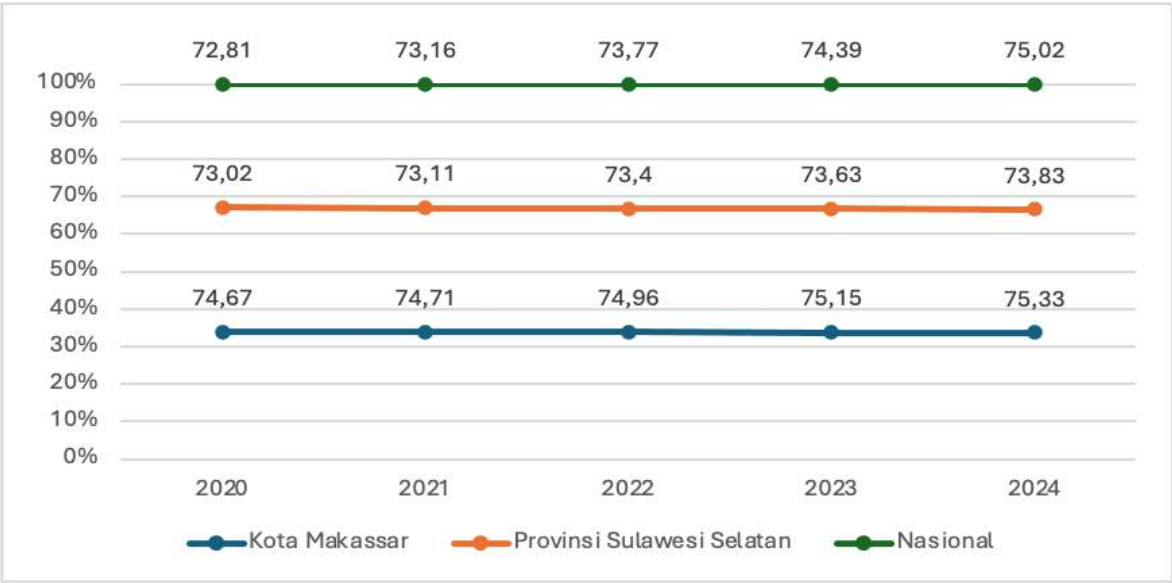
Grafik komparasi nilai IPM kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki nilai IPM tertinggi di tahun 2024 dengan nilai IPM 85,23. IPM tertinggi dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti Kota Palopo pada angka 81,23 dari 24 Kabupaten Kota, sedangkan TPM terendah dicapai oleh Kabupaten Jeneponto dengan angka 69,45. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara berkelanjutan melalui perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan di segala bidang harus diupayakan untuk dapat tetap mempertahankan tingkat daya saing yang semakin dinamis.

Badan Program Pembangunan PBB. UNDP adalah jaringan pembangunan global PBB yang bekerja untuk membantu negara-negara mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). UNDP bekerja di berbagai bidang, termasuk pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Menurut standar United Nations Development Program (UNDP), terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi, serta IPM 60-69 kategori sedang. Berdasarkan standar ini maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Makassar berada pada kategori sangat tinggi sedangkan provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih berada pada kategori tinggi.

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua
2.2.2.1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Makassar selama lima tahun terakhir mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2020 berada pada angka 74,67 dan di tahun 2021 mengalami peningkatan di angka 74,71. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Makassar terus mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 meningkat 0,25 point menjadi 74,96. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Makassar terus mengalami peningkatan di dibandingkan angka rata-rata provinsi dan nasional, Di tahun 2023 capaian UHH kembali meningkat sebanyak 0,19 point dengan angka 75,15. Dan capaian di tahun 2024 usia harapan hidup (UHH) nasional masih dibawah angka usia harapan hidup Kota Makassar sebesar 75,33.

Grafik 2.38
Usia Harapan Hidup Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

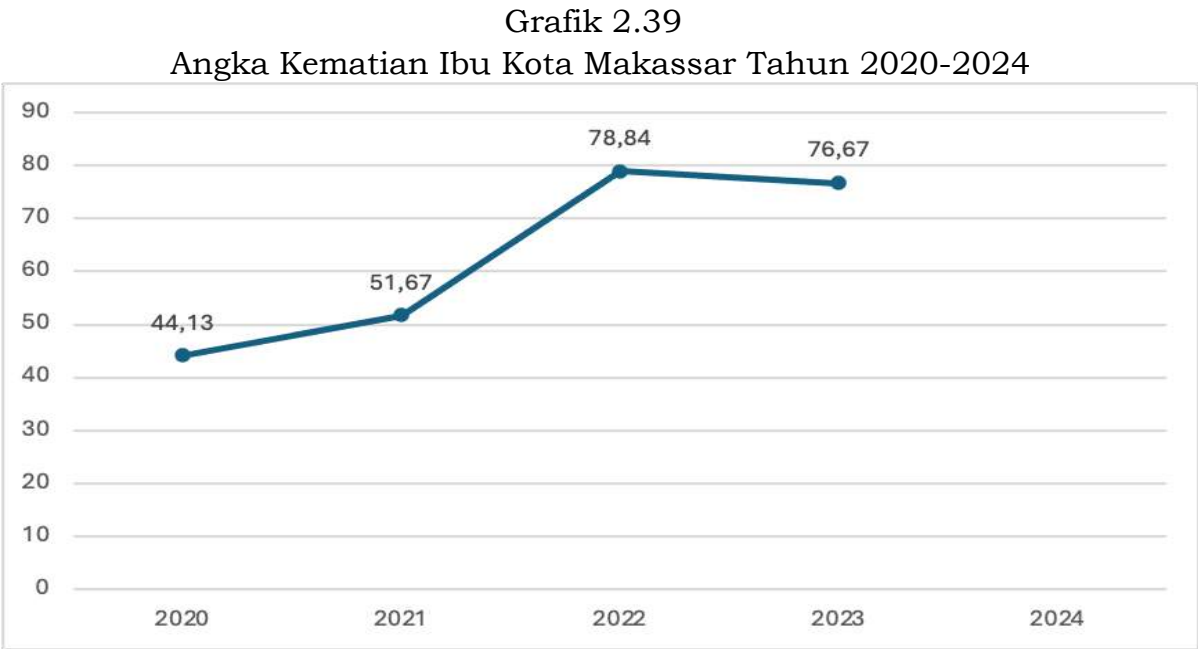
Kondisi peningkatan UHH menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi, karena membaiknya derajat



Kesehatan Masyarakat Kota Makassar sehingga angka kematian bayi turut berkurang. Adanya kemajuan teknologi di bidang Kesehatan, dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan serta tingginya kepedulian Masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat dan menjadi tren pada beberapa tahun terakhir di Kota Makassar.

2.2.2.2. Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator Pembangunan Kesehatan dan indikator pemenuhan hak reproduksi serta kualitas dalam pemanfaatan Kesehatan secara umum. AKI adalah kematian yang disebabkan kehamilan, melahirkan atau nifas bukan karena kecelakaan. AKI dihitung per 100.000 kelahiran.



Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024

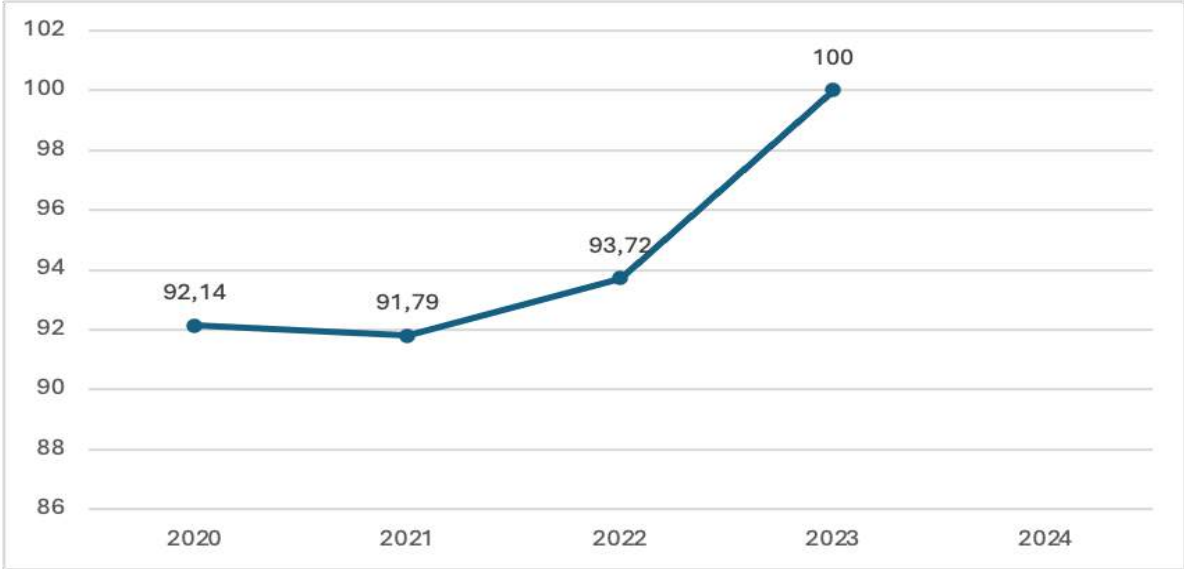
Berdasarkan data di atas, angka kematian ibu di Kota Makassar mengalami kenaikan, dimana tahun 2021 sebesar 51,67 dibandingkan tahun sebelumnya 44,13 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 27,17 point dengan angka 78,84. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan 2,17 point dengan nilai 76,66 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab meningkatnya angka kematian ibu dikarenakan adanya keterlambatan penanganan terutama pada kasus emergency, hal ini disebabkan karena masih sulitnya proses rujukan pada beberapa fasilitas-fasilitas Kesehatan.

2.2.2.3. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Persalinan di fasilitas Kesehatan memiliki manfaat besar dalam menjaga Kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap komplikasi yang mungkin saja terjadi selama proses persalinan.



Grafik 2.40
Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kota Makassar



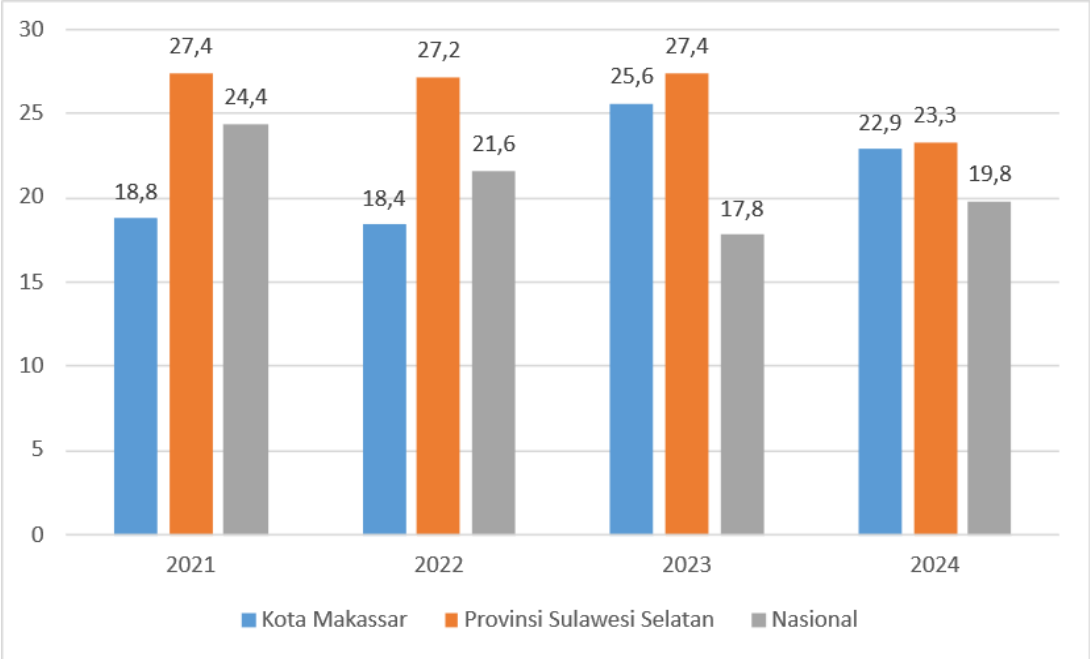
Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024

Angka persentase persalinan di fasilitas Kesehatan Kota Makassar tahun 2020 sebesar 92,14 namun pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 91,79 kemudian kembali mengalami peningkatan di tahun 2022 pada angka 93,72 dan di tahun 2023 persalinan di fasilitas Kesehatan meningkat tajam dengan nilai sebesar 100 persen.

2.2.2.4. Prevalensi Stunting Pada Balita

Perhitungan prevalensi *stunting* menggunakan dua metode pengukuran berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Prevalensi *stunting* tahun 2021 berdasarkan data SSGI sebesar 18,8 persen, cukup rendah dibandingkan data prevalensi stunting nasional yang berada di angka 24,4 persen dan prevalensi stunting provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi 27,4 persen.

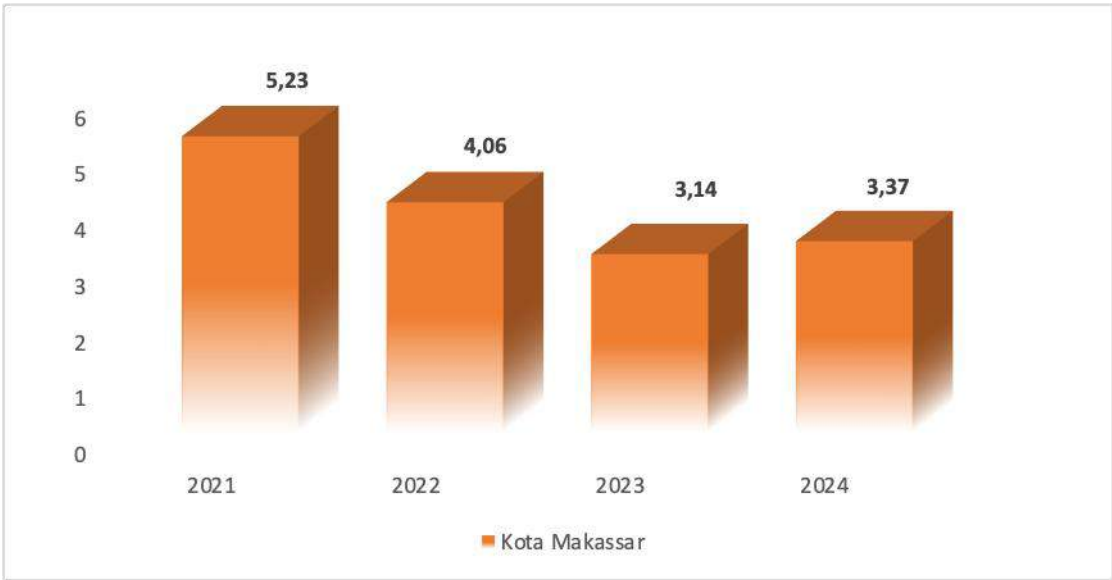
Grafik 2.41
Prevalensi *stunting* Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional berdasarkan SSGI Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Untuk data tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran prevalensi stunting dikarenakan adanya covid 19. Untuk tahun 2022 angka prevalensi stunting Kota Makassar mengalami penurunan 0,4 point dengan nilai 18,4 persen, cukup rendah dibandingkan nasional dan provinsi. Namun di tahun 2023 prevalensi stunting mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 25,6 bertambah 7,2 point dan untuk tahun 2024 perhitungan prevalensi stunting untuk seluruh kab/kota berdasarkan data SSGI belum dirilis oleh kementerian kesehatan. Prevalensi stunting tahun 2024 untuk kota Makassar sebesar 22,9 persen, provinsi Sulawesi Selatan 23,3 persen dan Nasional 19,8 persen mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya.

Grafik 2.42
Prevalensi Stunting Kota Makassar berdasarkan Data EPPGBM
Tahun 2021-2024



Sumber: Data Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pada grafik diatas diketahui bahwa pada tahun 2021 dan 2022 terdapat 3.333 balita *stunting* dengan prevalensi 4,06 persen dan tahun 2023 terdapat 2.734 balita *stunting* dengan prevalensi 3,14 persen. Untuk tahun 2024 angka prevalensi *stunting* 3,37 persen dengan jumlah balita *stunting* 3.049. Berdasarkan data prevalensi stunting Kota Makassar yang melalui pengukuran E-PPGBM menunjukkan tren penurunan mulai tahun 2020-2024, meskipun pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sasaran pengukuran balita yang mencapai 99.7 persen yang bersamaan dengan kegiatan intervensi serentak pencegahan *stunting*. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan *stunting* antara lain akses air bersih, infeksi cacangan pada anak balita, tidak memiliki jamban sehat, kebiasaan merokok pada keluarga balita, riwayat ibu hamil KEK serta adanya infeksi penyakit penyerta dan masih banyak balita dan ibu hamil yang belum memiliki JKN.

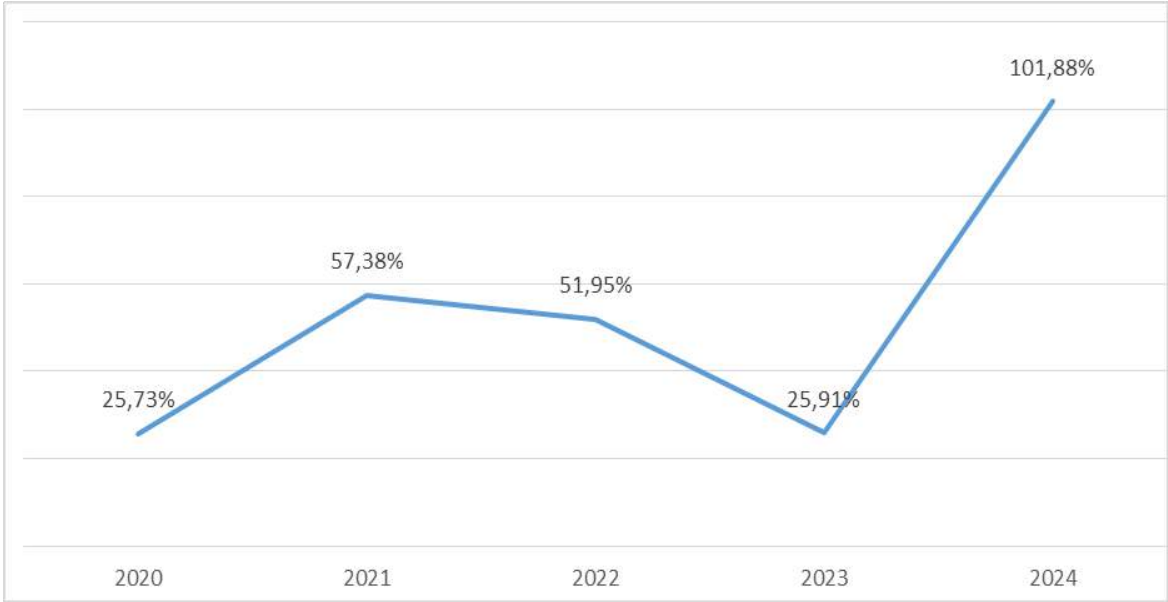
2.2.2.5. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis

Dalam 13 tahun terakhir, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Makassar cenderung menurun. Pada awal-awal gerakan nasional penanggulangan TBC diterapkan, Kota Makassar mengalami kenaikan penemuan kasus TBC dan pengobatan dari 64,32 persen tahun 2011, kemudian naik ke 72,76 persen tahun 2012, dan hingga menyentuh 79,65 persen tahun 2014. Penurunan mulai terjadi di tahun 2015 hingga 2020, awalnya turun ke angka 72,46 persen, kemudian sampai pada level yang cukup rendah yaitu 25,73 persen. Penurunan tersebut menunjukkan



kinerja yang tak begitu baik karena itu artinya orang yang diduga menderita TBC yang diobati terus menurun. Angka cakupannya sempat naik di tahun 2021 menjadi 57,38 persen, tapi dua tahun berturut-turut kembali turun yaitu 51,95 persen tahun 2022 dan 25,91 persen tahun 2023, untuk tahun 2024 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Kota Makassar berada pada angka 101.88%.

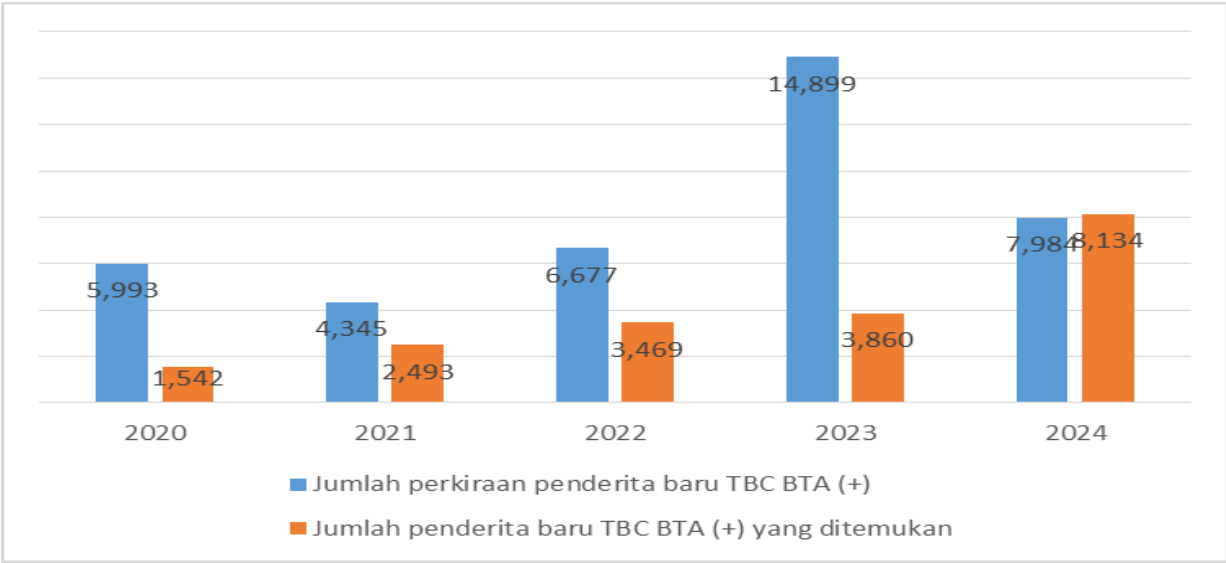
Grafik 2.43
Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

Penyebab Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis tahun 2024 yang melonjak tajam dengan nilai lebih 100 persen (101,88%) disebabkan karena adanya pelaksanaan skrining di 153 kelurahan serta di beberapa perguruan tinggi dan adanya perluasan layanan TB di beberapa klinik dan layanan Kesehatan lainnya di Kota Makassar. Faktor lain adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dimana Masyarakat di Kota Makassar semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan TBC; Peningkatan akses ke layanan kesehatan: Kota Makassar memiliki banyak fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC; Peningkatan kerja sama antar sektor: Pemerintah Kota Makassar bekerja sama dengan berbagai sektor, seperti puskesmas, rumah sakit, dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan penemuan dan pengobatan kasus TBC dan Program-program pemerintah: Pemerintah Kota Makassar melaksanakan program-program seperti Mandiri-TB untuk meningkatkan penemuan dan pengobatan kasus TBC.

Grafik 2.44
Jumlah Penderita baru TBC BTA(+) yang Ditemukan dan Diobati dan Jumlah
Perkiraan Penderita baru TBC BTA (+) di Kota Makassar Tahun 2020-2024



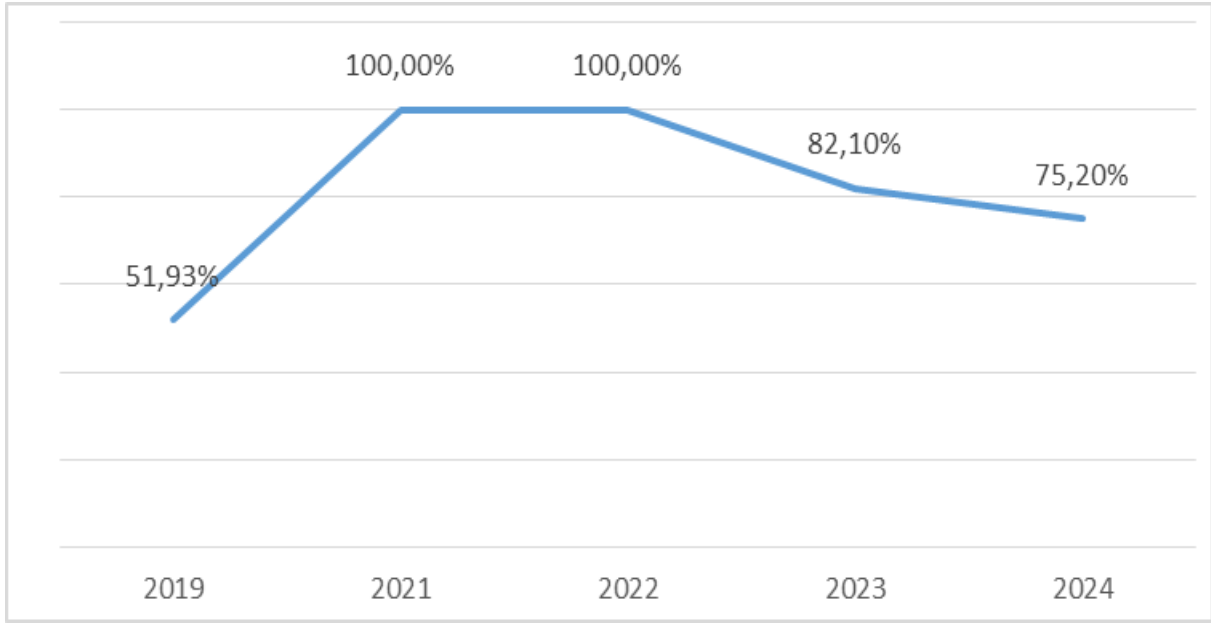
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

Beberapa kemungkinan alasan mengapa Jumlah Penderita baru TBC BTA(+) yang Ditemukan dan Diobati tahun 2024 menurun dibanding dengan tahun 2023 karena Faktor Penunjang seperti Peningkatan Kerja Sama Antar Sektor: Kerja sama antar sektor yang lebih baik, seperti antara puskesmas, rumah sakit, dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan penemuan dan pengobatan kasus TBC; kemudian Peningkatan Sumber Daya: Sumber daya yang lebih banyak, seperti tenaga medis dan fasilitas kesehatan, untuk memastikan bahwa penemuan dan pengobatan kasus TBC menjadi lebih efektif. Dan juga Peningkatan Kesadaran Petugas Kesehatan: Petugas kesehatan yang lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan TBC, sehingga lebih banyak orang yang dapat mendapatkan pengobatan yang tepat; Sedangkan Kecenderungan menurunnya Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kota Makassar pada tahun 2024 disebabkan karena jumlah penderita baru TBC BTA(+) yang ditemukan dan diobati lebih rendah dibandingkan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+), meski jumlah penderita yang diobati juga terus meningkat. Dinas Kesehatan Kota Makassar mencatat, jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) terus naik dalam 13 tahun terakhir, dan semakin tinggi di tahun 2019 hingga 2023. Tahun 2024, jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) di Kota Makassar mencapai 7.984 orang, lebih rendah dari Tahun 2023, sementara jumlah penderita baru TBC BTA(+) yang ditemukan dan diobati pada angka 8.134 orang lebih banyak dari Tahun 2023 disebabkan karena Masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan TBC, sehingga lebih banyak orang yang melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara dini selain itu Fasilitas kesehatan yang lebih banyak dan lebih mudah diakses, sehingga lebih banyak orang yang dapat mengakses layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC, kemudian Pengobatan TBC yang lebih efektif dan lebih tepat, sehingga lebih banyak orang yang dapat sembuh dari TBC dukungan Program-program pemerintah yang lebih efektif juga sangat mendukung dalam mengendalikan TBC, seperti program pengobatan TBC yang lebih intensif dan program pencegahan TBC yang lebih luas.

2.2.2.6. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Kota Makassar cenderung mengalami kenaikan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2019 di angka 51,93 persen. Kemudian Kota Makassar akhirnya bisa mencapai angka 100 persen tahun 2021 dan 2022, sebelum kemudian turun menjadi 82,10 persen tahun 2023, Meski cenderung mengalami kenaikan, tapi angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Kota Makassar masih relatif lebih rendah dari target nasional untuk 2023. Dalam laporan tahunan penanggulangan TBC, Indonesia menargetkan keberhasilan pengobatan TBC atau *treatment success rate* sebesar 90 persen. Untuk tahun 2024 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Makassar mencapai angka 75,20 % turun dari angka Tahun sebelumnya.

Grafik 2.45
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di
Kota Makassar Tahun 2020-2024

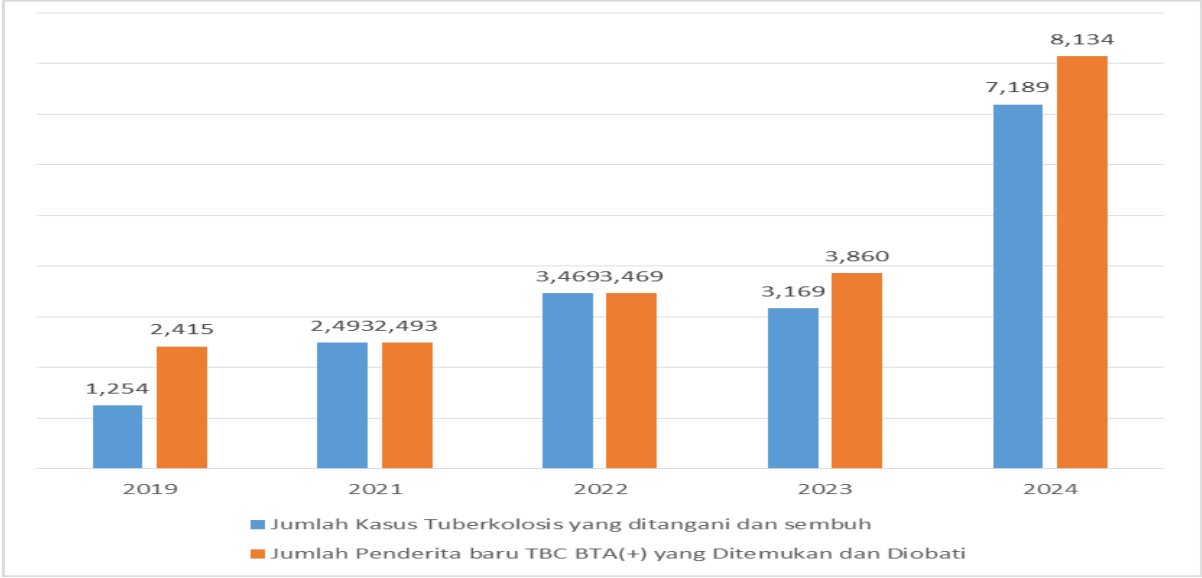


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

Turunnya angka keberhasilan pengobatan TB ini kemungkinan penyebabnya adalah Kurangnya Kepatuhan Pasien juga Pengobatan TBC yang terlambat dapat menyebabkan penyakit menjadi lebih parah dan sulit diobati kemudian Kualitas Pengobatan yang Kurang selain itu juga Keterbatasan sumber daya, seperti tenaga medis dan fasilitas kesehatan, dapat menyebabkan pengobatan TBC tidak efektif dan yang utama adalah Kurangnya pemantauan dan evaluasi pengobatan TBC dapat menyebabkan pengobatan tidak efektif.



Grafik 2.46
Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Ditangani Dan Sembuh dan Jumlah
Perkiraan Penderita Baru TBC BTA (+) di Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

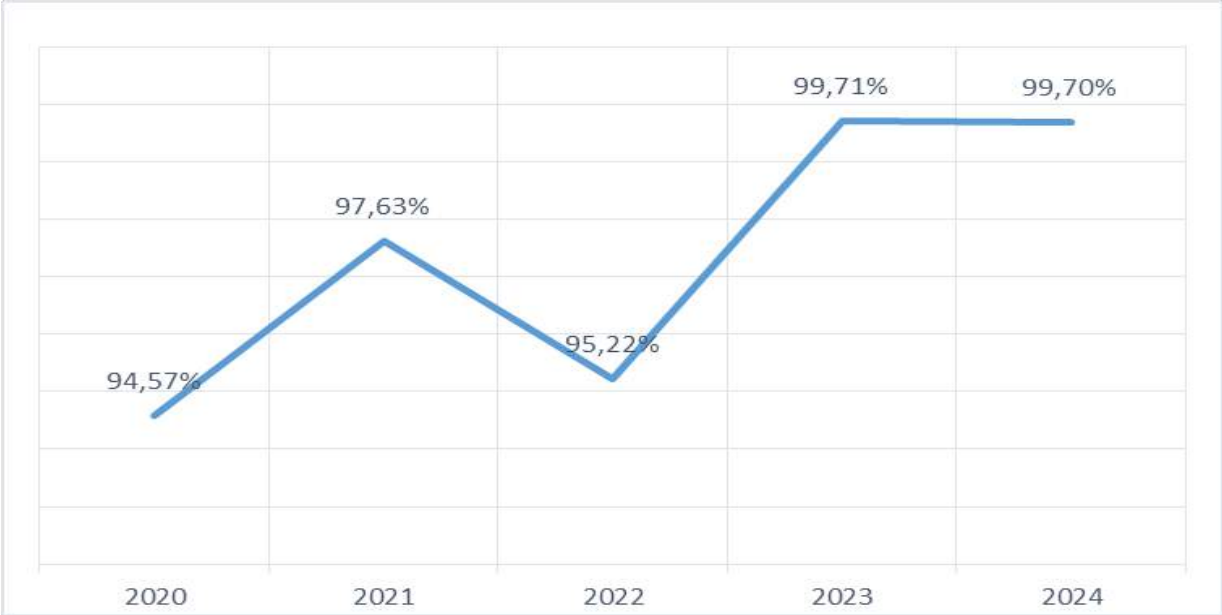
Kota Makassar menempati peringkat pertama dalam jumlah kasus TBC di Sulawesi Selatan walaupun jumlah kasus baru TBC cenderung mengalami penurunan di tahun 2021 yaitu sebesar 2.614 kasus akibat Sistem Kesehatan teralihkan kepada penanganan COVID dan kebiasaan penggunaan masker. berdasarkan data tahun 2021, Kota Makassar memiliki angka keberhasilan pengobatan TBC sebesar 78,3%. Untuk Kasus TBC di kota Makassar masih cukup tinggi dimana 92,2% dari kasus yang ditemukan merupakan penderita baru. Kasus yang ditemukan 37,8% terkonfirmasi klinis dan 62,2% terkonfirmasi bakteriologis. Pada kasus yang ditemukan umumnya tidak dilakukan pemeriksaan kontak yang berisiko menjadi potensi penularan di masyarakat Pada tahun 2022, jumlah kasus TB yang diobati di Kota Makassar adalah 5.863 kasus, dan 4.864 kasus di antaranya sembuh, Untuk mengobati TB, pasien harus patuh minum obat yang direkomendasikan. Dengan pengobatan yang tepat, 85% kasus TB dapat disembuhkan.

Untuk penemuan aktif TB di Masyarakat dibagi ke-47 Puskesmas se-Kota Makassar berdasarkan jumlah penduduk di Wilayah Makassar, melalui kegiatan skrining maupun investigasi kontak erat pada penderita TB. Capaian tertinggi dalam penemuan dan penanganan kasus TB di Kota Makassar didapatkan pada Tahun 2024, dengan terbentuknya FMS (Forum Multi Sektor) penanggulangan TB yang menjangkau hingga ke Kelurahan dan Kecamatan,

2.2.2.7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Makassar sudah hampir menjangkau semua penduduk, dilihat dari angka cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tahun 2020 hingga 2023, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kota Makassar naik persisten, hingga akhirnya sampai ke 99,71 persen tahun 2023. Angka itu menunjukkan hampir tak ada lagi penduduk di Kota Makassar yang belum di cover oleh JKN. Kemudian untuk Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar pada tahun 2024 telah mencapai 99,70%.

Grafik 2.47
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Makassar
Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

Meskipun berhasil menaikkan cakupan hingga hampir mencapai 100 persen, catatan penting terkait JKN kaitanya dengan layanan kesehatan adalah kepesertaan JKN tidak serta merta bisa membuat masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan, khususnya bagi rumah tangga miskin. Hal ini disebabkan keseimbangan dampak program untuk melindungi orang miskin, baik dalam rangka mempromosikan kesehatan dan pemanfaatan perawatan maupun dalam rangka mengurangi dampak dari biaya yang dikeluarkan, paket manfaatnya tidaklah sebesar yang diperkirakan. Banyak orang miskin kurang memahami jenis layanan asuransi kesehatan yang mereka dapatkan dan cenderung tidak memanfaatkannya. Akibatnya, individu miskin dan keluarga di sektor informal mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap nutrisi dan investasi dalam kesehatan manusia seperti yang dinikmati oleh mereka yang memiliki perlindungan asuransi kesehatan.

2.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata
2.2.3.1. Indeks Pendidikan

Dalam 5 tahun terakhir harapan Lama sekolah meningkat 0,05 poin dari 15,57 tahun 2020 menjadi 15,62 tahun 2025, demikian halnya Rata-Rata lama sekolah meningkat 4,36 poin dari 11,21 pada tahun 2021 menjadi 11,57 pada tahun 2025. Kedua komponen tersebut telah memberi kontribusi peningkatan Indeks Pendidikan dengan kenaikan 1,33 poin pada tahu periode tahun yang sama. Hal ini menunjukkan, masyarakat semakin menyadari bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan memiliki potensi untuk dilakukan pembinaan dan peningkatan dalam pencapaian pendidikan yang lebih baik di Kota Makassar yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan. Gambaran Indeks Pendidikan kota makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat di lihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.19
Indeks Pendidikan Kota Makassar tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah	15,57	15,58	15,59	15,61	15,62
2	Rata-Rata Lama Sekolah	11,21	11,43	11,55	11,56	11,57
3	Indeks Pendidikan	80,62	81,38	81,81	81,89	81,96

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2025

Penduduk Kota Makassar berdasarkan tingkat pendidikan, yang tertinggi berada pada tingkat Sekolah Menengah (SMA/MA/Sederajat) dengan jumlah 457.346 jiwa (30,90%), dan yang terendah berada pada tingkat Doktoral (S3) yakni sebesar 2.692 jiwa atau 0,17%. Tingkat pendidikan menentukan Kualitas Sumber Daya Manusia, sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan sebuah kota. SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi dapat memberikan kontribusi besar dalam sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus, seperti industri, teknologi, dan pelayanan profesional. SDM dengan Pendidikan yang baik menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, inovatif, dan dapat bersaing secara global. Pentingnya pengembangan SDM dalam kemajuan sebuah kota menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pembangunan kapasitas manusia merupakan langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Penduduk Kota Makassar berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.20
Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Kota Makassar Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1.	Tidak / Belum Sekolah	332,118	21,75
2.	Tidak / Belum Tamat SD	163,367	11,57
3.	TAMAT SD / MI Sederajat	151,881	10,53
4.	SMP / MTs / Sederajat	160,039	11,02
5.	SMA / MA / Sederajat	457,346	30,9
6.	Diplomat I / II / III	4,724	0,33
7.	Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	31,373	2,13
8.	Diplomat IV / Strata I	154,936	10.31
9.	Strata II	19,385	1,28
10.	Strata III	2,692	0.17
Jumlah		1.477.861	100

Sumber: Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Tahun 2025

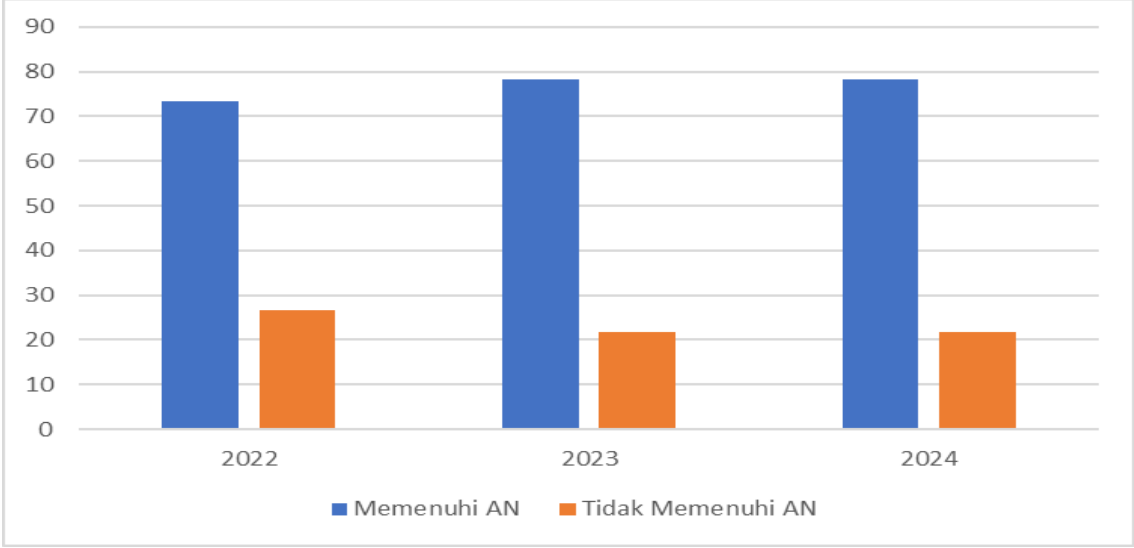
2.2.3.2. Literasi

Ukuran kualitas pendidikan secara internasional adalah nilai PISA, namun Indonesia merumuskan indikator tersendiri yang cukup komprehensif dengan berbagai macam nilai indeks yang dimuat dalam rapor pendidikan. Rapor Pendidikan menampilkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Rapor pendidikan pertama kali dipublikasi tahun 202 dan terbaru tahun 2023. Tahun 2022, terdapat 73,36 persen satuan pendidikan yang menjadi kewenangan yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan literasi, sementara yang belum memenuhi kompetensi



hanya 26,64 persen. Tahun 2023, satuan pendidikan yang memenuhi standar naik menjadi 78,29 persen dan yang belum memenuhi standar turun ke 21,71 persen.

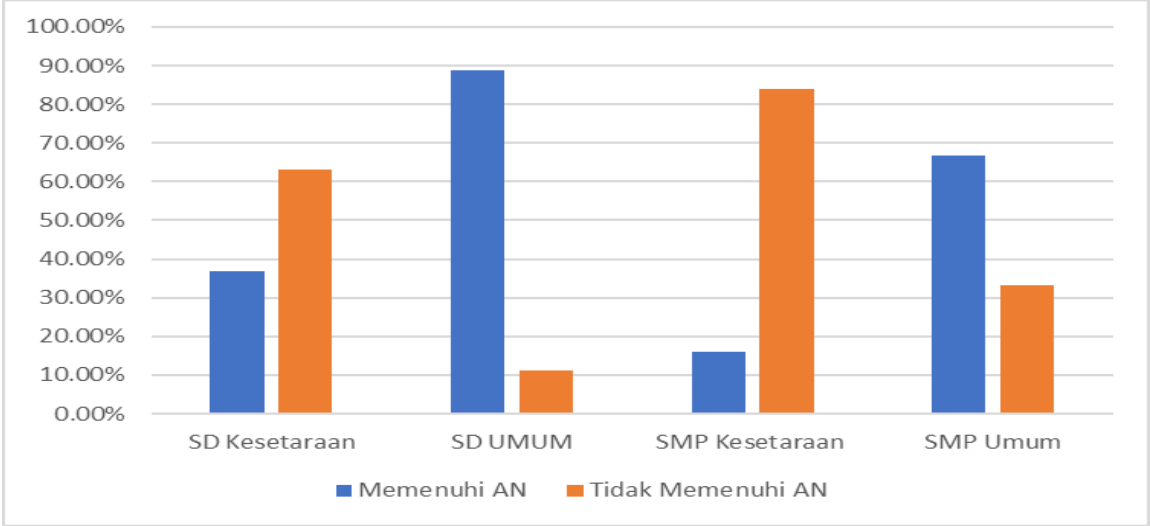
Grafik 2.48
Persentase Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Literasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2022-2024



Sumber: Rapor Pendidikan, Diolah, 2025

Dari seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, satuan pendidikan SD umum yang paling besar proporsinya mencapai standar kompetensi minimum untuk kemampuan literasi. Tahun 2023, 88,94 persen SD umum di Kota Makassar memenuhi standar kompetensi minimum bidang literasi dan hanya 11,06 persen tidak memenuhi kompetensi minimum. Satuan pendidikan SMP kesetaraan yang paling rendah proporsinya, hanya 16 persen yang memenuhi standar kompetensi minimum, sementara yang tidak memenuhi mencapai 84 persen. SD kesetaraan juga menunjukkan proporsi serupa, dimana satuan pendidikan yang memenuhi standar hanya 36,84 persen dan yang tidak memenuhi mencapai 63,16 persen. SMP umum memiliki proporsi 66,67 persen untuk satuan pendidikan yang memenuhi kompetensi minimum kemampuan literasi dan yang tidak memenuhi hanya 33,33 persen.

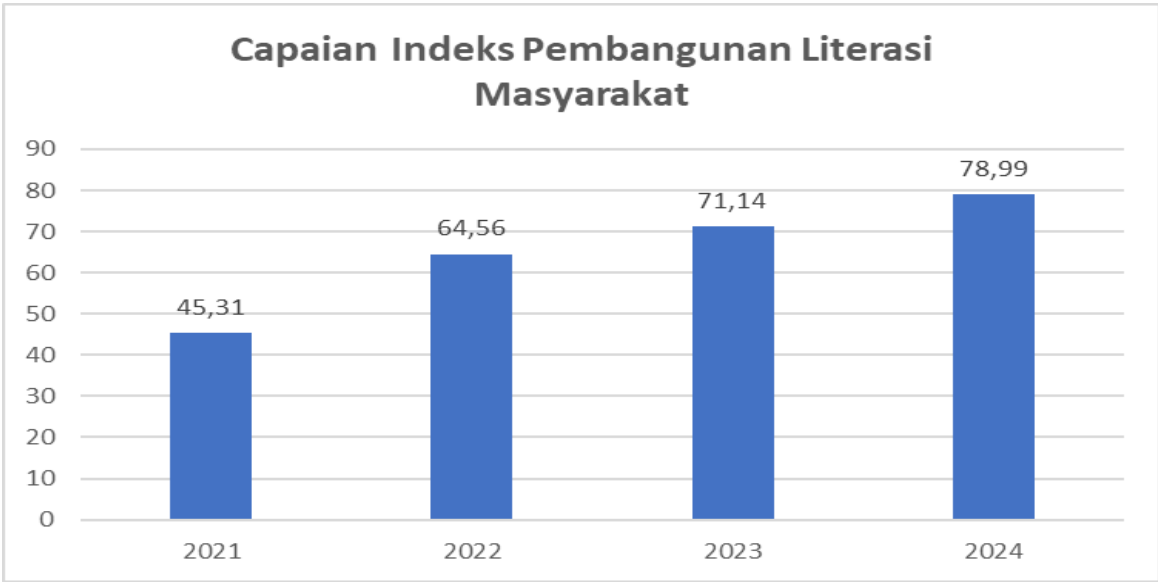
Grafik 2.49
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Literasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Berdasarkan Satuan Pendidikan di Kota Makassar Tahun 2022-2024



Sumber: Rapor Pendidikan, Diolah, 2025

Selama ini Indonesia mengukur pencapaian sektor pendidikan menggunakan indikator yang sifatnya kuantitas seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dll. Indikator ini penting dalam melihat pencapaian pembangunan pendidikan, tapi tidak cukup karena tidak menggambarkan sejauh mana kualitas pendidikan di Indonesia. Bank Dunia merilis laporan tentang kualitas pendidikan Indonesia. Dalam laporannya, dijelaskan bahwa Indonesia telah meraih banyak pencapaian pembangunan pendidikan diukur dengan berbagai indikator kuantitatif, misalnya angka partisipasi sekolah (APS). Bank Dunia memberikan catatan kritis terhadap pencapaian pendidikan Indonesia yang bermasalah dalam kualitas pendidikan dengan menyebut bahwa sebagian besar siswa di Indonesia memang bersekolah tapi tidak belajar.

Grafik 2.50
Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kota Makassar Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar, 2025

Pada tahun 2022 pengukuran dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui kegiatan survey minat baca diangka 44,81 persen. Pada tahun 2021-2024 Pembangunan literasi masyarakat dalam perhitungan IPLM yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Lembaga kajian, selama kurun waktu empat tahun terakhir, indeks pembangunan literasi masyarakat yang menunjukkan tren pertumbuhan positif yang signifikan. Pada tahun 2021, dengan target capaian sebesar 47 persen IPLM berhasil dicapai pada angka 45,31 persen sedikit melampaui target yang ditetapkan. Kinerja ini terus meningkat pada tahun 2022, dimana target 50 persen berhasil dicapai 64,56 persen.

Peningkatan yang konsisten berlanjut pada tahun 2023 dengan target 55 persen namun capaian berhasil menembus angka 74,14 persen. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dimana target 60 persen dilampaui dengan capaian mengesankan sebesar 78,99 persen. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif strategi, serta partisipatif aktif masyarakat dalam membangun budaya literasi yang berkelanjutan.

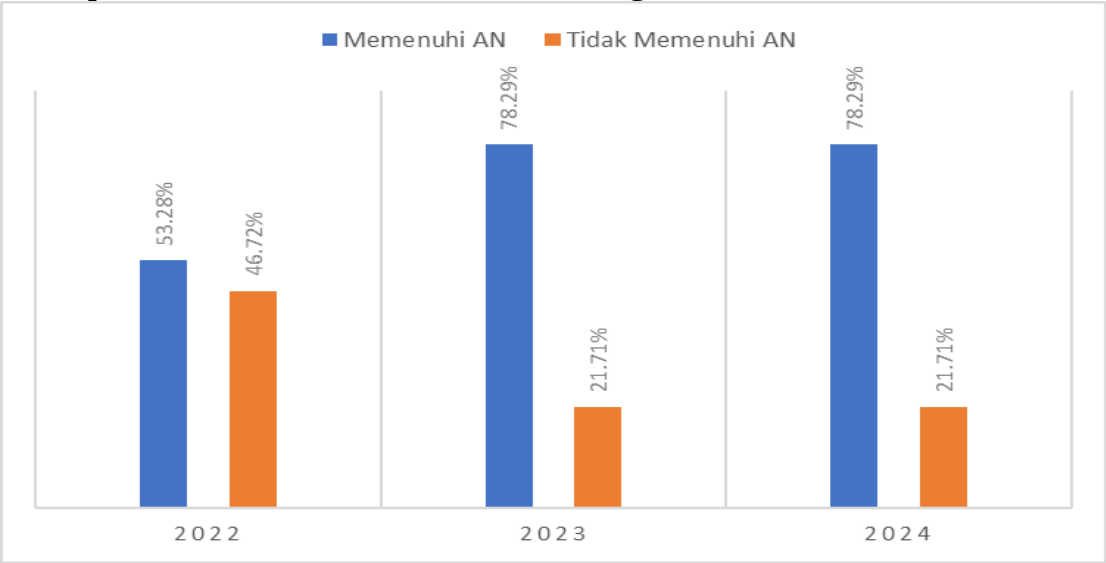
2.2.3.3. Numerasi

Progres pencapaian persentase satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Kota Makassar yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi juga cukup baik dalam dua tahun terakhir. Proporsi



satuan pendidikan yang mencapai standar minimum kemampuan numerasi naik dari 53,28 persen atau setara dengan 398 satuan pendidikan pada tahun 2022 ke 78,29 persen atau 349 satuan pendidikan tahun 2023.

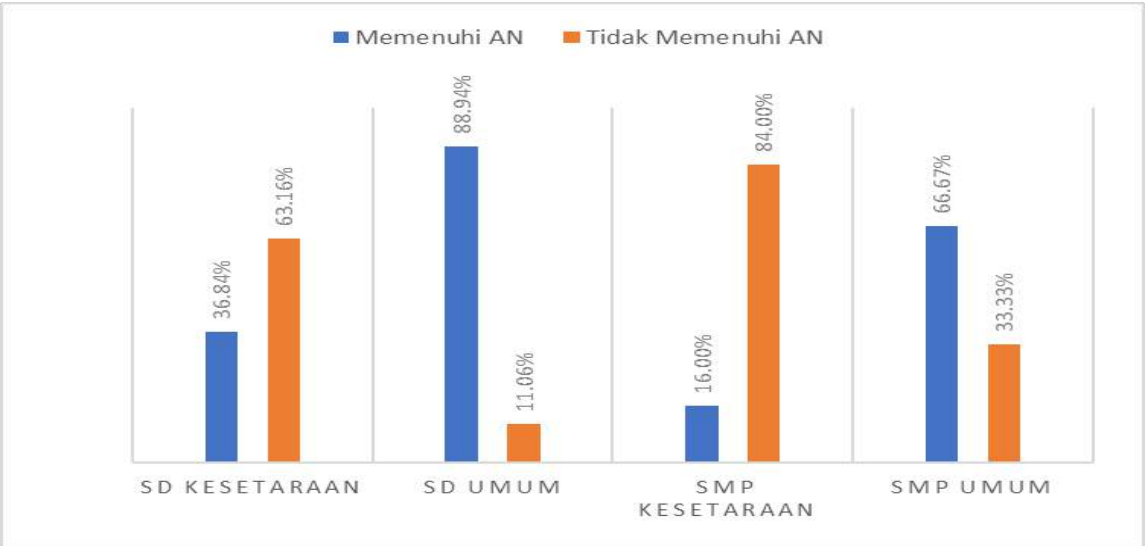
Grafik 2.51
Persentase Satuan Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2022-2024



Sumber: Rapor Pendidikan, Diolah, 2025

Satuan pendidikan yang memiliki proporsi besar yang mencapai standar kompetensi yaitu SD umum dan SMP umum. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum kemampuan numerasi pada asesmen tingkat nasional untuk satuan pendidikan SD umum mencapai 88,94 persen dan satuan pendidikan SMP umum 66,67 persen, sementara dua satuan pendidikan lain yaitu SD kesetaraan dan SMP kesetaraan lebih dominan tidak memenuhi standar minimum dengan proporsi masing-masing 63,16 persen dan 84,00 persen yang belum mampu memenuhi kompetensi umum.

Grafik 2.52
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Kemampuan Numerasi Pada Asesmen Tingkat Nasional Berdasarkan Satuan Pendidikan di Kota Makassar



Sumber: Rapor Pendidikan, Diolah, 2025



Tabel 2.21
Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi Kota Makassar Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	7,59	13,13	31,35	42,94
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	25,18	34,07	42,25	50,42
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	55,57	59,13	68,09	71,30
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	37,10	45,83	61,94	42,94

Sumber: Mendikbudristek Tahun 2025

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional numerasi, jumlah satuan Pendidikan di Kota Makassar memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan Pendidikan di Kota Makassar dikategorikan “Kurang”.

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional literasi membaca, jumlah satuan Pendidikan di Kota Makassar memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan Pendidikan di Kota Makassar dikategorikan “Sedang”.

Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional literasi membaca, jumlah peserta didik di Kota Makassar memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah peserta di Kota Makassar dikategorikan “Baik”.

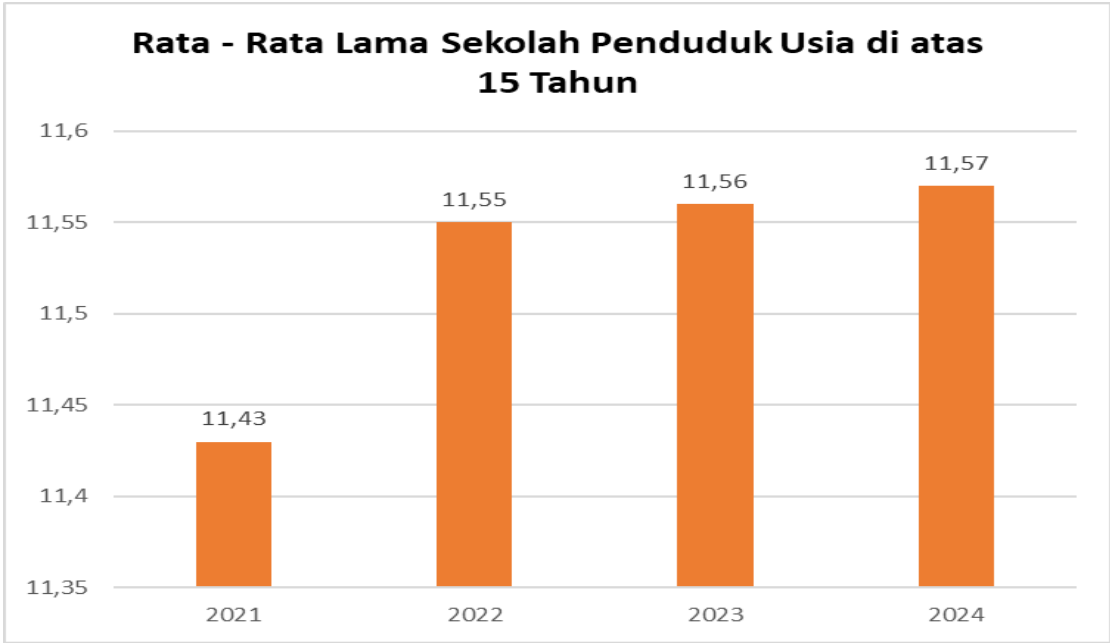
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional numerasi, jumlah peserta didik di Kota Makassar memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah peserta di Kota Makassar dikategorikan “Kurang”.

2.2.3.4. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Rata-rata lama sekolah di Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2022 sebesar 11.21 persen, tahun 2021 sebesar 11.43 persen, tahun 2022 sebesar 11.55 persen, tahun 2023 sebesar 11.56 persen dan di tahun 2024 sebesar 11.57 persen. Adapun beberapa faktor dapat menjadi penyebab meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dalam suatu Masyarakat. Pertama, akses terhadap Pendidikan sudah mencukupi, selain itu infrastruktur Pendidikan yang memadai. Upaya dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah dengan memperkecil angka putus sekolah atau mengembalikan anak putus sekolah ke bangku sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang Pendidikan.



Grafik 2.53
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

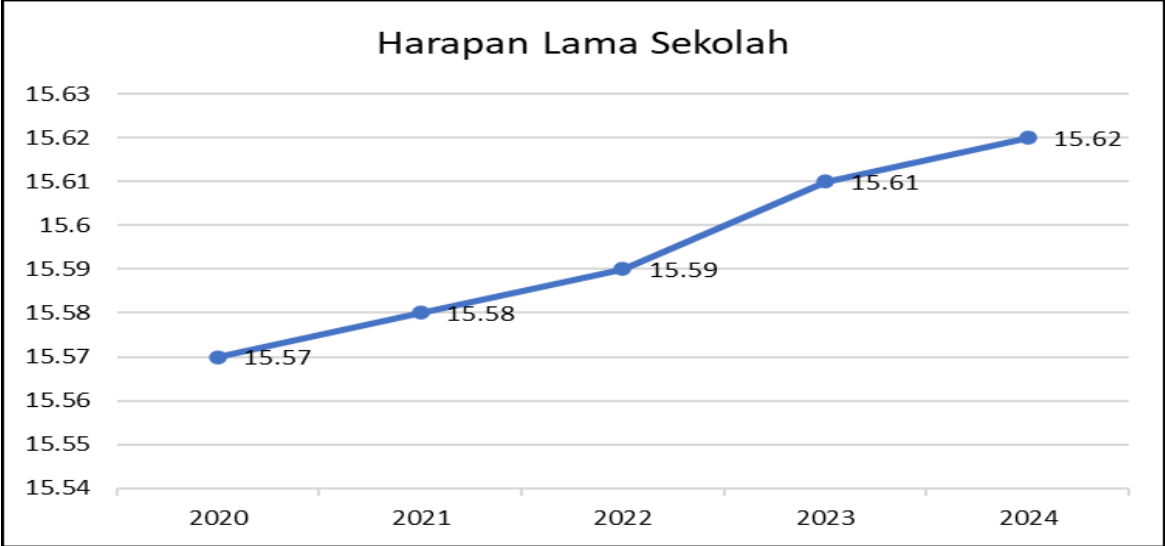
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator dasar yang sangat berpengaruh terhadap kualitas Pendidikan. Daerah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi tidak selalu memiliki kualitas Pendidikan yang tinggi pula, namun daerah rata-rata lama sekolah yang rendah, pasti kualitas Pendidikannya juga rendah. Lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam lingkungan Pendidikan, berkorelasi positif dengan kemampuan kognitif, keterampilan interpersonal dan pemahaman yang luas. Hal ini memberikan dasar yang kuat dalam meningkatkan kualitas Pendidikan. Dengan memperpanjang durasi Pendidikan formal, individu bisa memiliki lebih banyak waktu menyerap pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan mengeksplorasi minat mereka. Selain itu, Masyarakat yang memiliki tingkat Pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam Pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Oleh karena itu, Upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan stakeholder Pendidikan guna mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.2.3.5. Harapan Lama Sekolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometris dari angka usia harapan hidup, indeks Pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah). Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kota Makassar memang menjadi daerah dengan HLS tertinggi di Sulawesi Selatan. Capaian 15,61 tahun menepati HLS Kota Makassar jauh berada di atas provinsi yang HLS-nya hanya 13,54 tahun. Sementara ada dua daerah yang angkanya mendekati Kota Makassar yaitu Kota Palopo dan Kota Parepare masing-masing 15,12 tahun dan 14,54 tahun. Kota Makassar yang memiliki HLS tertinggi di Sulawesi Selatan salah satunya disebabkan karena aksesibilitas pendidikannya relatif lebih baik dari banyak daerah lain, sebab fasilitas pendidikannya jauh lebih baik.



Grafik 2.54
Harapan lama Sekolah Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2024

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan, di tahun 2020 sebesar 15.57 persen, tahun 2021 sebesar 15.58 persen, tahun 2022 sebesar 15.59 persen, tahun 2023 sebesar 15,61 persen. Sama halnya dengan RLS, faktor yang mempengaruhi HLS juga beragam. Pertama, aksesibilitas Pendidikan merupakan faktor utama, yaitu apakah individu memiliki akses yang cukup terhadap sekolah dan infrastruktur Pendidikan lainnya. Faktor ekonomi juga memainkan peran signifikan, karena biaya Pendidikan, termasuk biaya sekolah, buku, dan seragam, dapat menjadi hambatan bagi keluarga dengan sumber daya terbatas. Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi, seperti norma-norma yang mengatur pernikahan, pekerjaan, atau tanggung jawab keluarga. Kualitas Pendidikan, termasuk ketersediaan guru yang berkualitas dan kurikulum yang relevan, juga dapat mempengaruhi harapan lama sekolah, karena hal ini mempengaruhi motivasi dan kesiapan siswa untuk melanjutkan Pendidikan mereka

2.2.3.6. Angka Putus Sekolah

Anak Putus Sekolah (APS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang Pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 Tahun, 13-15 Tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi Pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu juga sebaliknya, angka putus sekolah yang semakin kecil maka kondisi Pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Tabel 2.22
Anak Putus Sekolah Kota Makassar Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Anak Putus Sekolah (SD-SMP)	1,66 %	1,69 %	0,65 %	6,2 %	3,89 %

Sumber: Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas akumulasi anak putus sekolah setiap tahunnya memberikan dampak pada bertambahnya anak tidak sekolah. Banyaknya anak putus sekolah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal, faktor eksternal yang dimaksud seperti perhatian orang tua, keadaan status ekonomi keluarga, fasilitas pembelajaran, jarak sekolah dari rumah ke sekolah, sanksi yang diterima dari sekolah dan budaya. Faktor



internal yang dimaksud seperti kurangnya minat anak untuk bersekolah (kemalasan) dan masih suka bermain.

2.2.3.7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tahun 2019, ada 22,8% penduduk usia kerja di Kota Makassar yang berkualifikasi pendidikan tinggi atau setara 258.431 orang. Dari total penduduk usia kerja yang berkualifikasi pendidikan tinggi, 75,13% adalah angkatan kerja dan 24,87% bukan angkatan kerja. Dua tahun kemudian, proporsinya naik ke 23,15% atau setara 281.364 orang, menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja berkualifikasi tinggi Kota Makassar bertambah sebanyak 22.933 orang, 74,59% diantaranya adalah angkatan kerja dan sisanya bukan angkatan kerja. Tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Makassar turun sebanyak 35.582 orang sehingga totalnya menjadi 245.782 orang atau 19,97%. Penurunan terjadi pada penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja masing-masing berkurang 21.382 orang dan 14.200 orang dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, proporsinya kembali naik ke 21,91% atau 243.183 orang, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi hanya bertambah 2.599 orang, tapi jika dibandingkan pada kategori angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, penambahan hanya terjadi pada kategori bukan angkatan kerja, sementara pada angkatan kerja terjadi penurunan penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi.

Grafik 2.55

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Makassar Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2025

Selain penurunan proporsi penduduk usia kerja berkualifikasi Pendidikan tinggi, pemerintah daerah juga perlu mewaspadai tingginya tingkat pengangguran terdidik atau pengangguran yang berasal dari perguruan tinggi. Tahun 2022, tercatat ada 6,28% dari total angkatan kerja berkualifikasi pendidikan tinggi belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Persentase tersebut setara dengan jumlah 11.844 orang. Setahun kemudian, persentasenya naik ke 7,12% atau sebanyak 12.672 orang. Artinya, dari sisi persentase terjadi kenaikan 0,84%, sementara dari sisi jumlah, angkatan kerja yang berkualifikasi pendidikan tinggi yang menganggur bertambah sebanyak

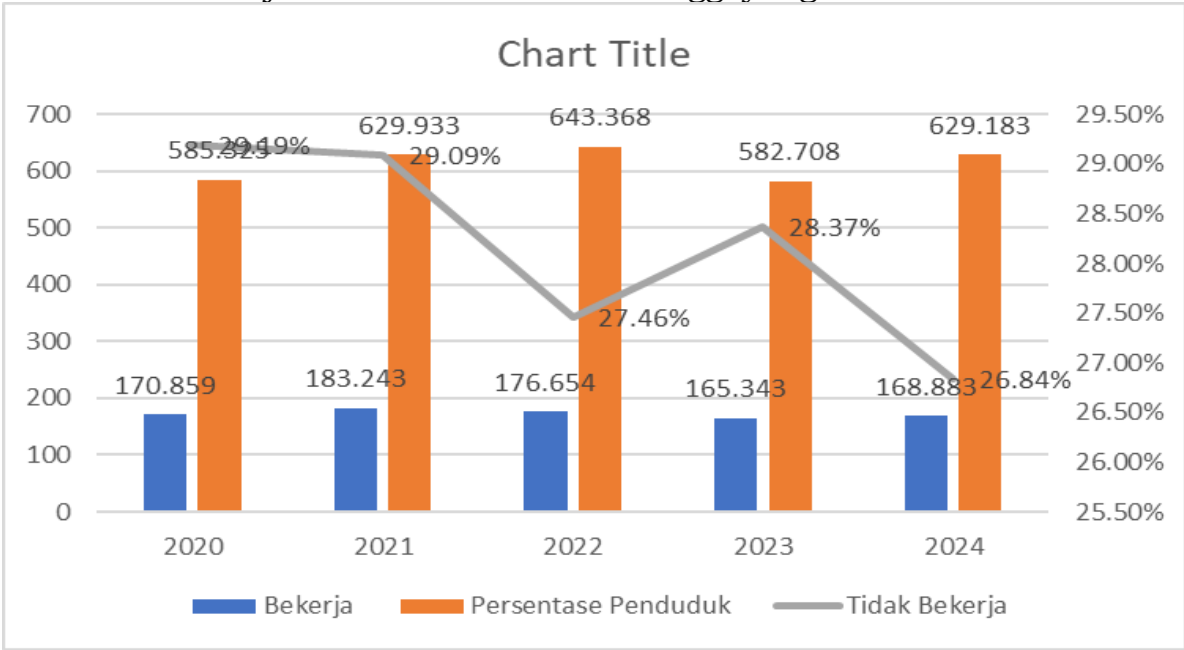


828 orang. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan angkatan kerja berpendidikan tinggi sulit mendapatkan pekerjaan, salah satunya adalah ketidaksesuaian antara keahlian/kompetensi yang diperoleh dari pendidikan tinggi dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja atau disebut dengan skill mismatch. Seseorang bisa saja memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, tapi seringkali tingkat pendidikan tidak selalu sejalan dengan skill/keahlian, bahkan lulusan diploma sekalipun. Di era pasar tenaga kerja saat ini, pendidikan hanya menjadi syarat administratif semata, tidak menentukan sepenuhnya mereka diterima oleh pemberi kerja. Era pasar tenaga kerja bergerak ke orientasi skill dan perlahan mulai tidak mementingkan kualifikasi pendidikan. Ini menjadi tantangan bagi pendidikan tinggi untuk terus menyesuaikan diri dengan perubahan. Faktor kedua yang juga umum terjadi adalah kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Seiring bertambahnya penduduk sebagai akibat dari periode bonus demografi, Kota Makassar akan terus mengalami kenaikan angkatan kerja. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah lowongan pekerjaan, khususnya pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi pendidikan tinggi, maka pasti pengangguran terdidik bertambah banyak

2.2.3.8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota makassar cenderung turun kemudian mulai meningkat di tahun 2023 dan menurun di tahun 2024. Tahun 2020, dari total pekerja di Kota Makassar, 29,19 persen diantaranya berkualifikasi pendidikan tinggi atau setara dengan 170.859 orang. Kemudian di tahun 2021 sebesar 29.09 persen atau setara dengan 183.243, tahun 2022 sebesar 27.46 persen atau setara dengan 176.654, tahun 2023 sebesar 28.37 persen atau setara dengan 165.343 orang. Tahun 2024 sebesar 26.84 persen atau setara dengan 168.883 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan, tersaji pada tabel berikut:

Grafik 2.56
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2024



Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan menurunnya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota makassar. Pertama, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang menempuh pendidikan tinggi yang mengalami penurunan sehingga secara langsung tentu berpengaruh terhadap jumlah pekerja berkualifikasi pendidikan tinggi.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk yang Berpendidikan Tinggi di Kota Makassar Tahun 2024

Kecamatan	D I/II	Akademi/D iploma III	Diploma IV/Strata I	Strata II	S III	Total	Total Penduduk	%
Mariso	183	1.035	4.181	358	34	5.791	58.797	9,85%
Mamajang	194	1.307	5.809	607	66	7.983	58.075	13,75%
Makassar	210	1.260	5.993	517	54	8.034	81.976	9,80%
Ujung Pandang	88	495	2.536	258	31	3.408	24.876	13,70%
Wajo	58	448	2.986	193	18	3.703	29.397	12,60%
Bontoala	109	698	3.983	338	49	5.177	55.244	9,37%
Tallo	232	1.641	7.139	707	157	9.876	148.008	6,67%
Ujung Tanah	67	371	1.641	113	9	2.201	36.721	5,99%
Panakkukang	422	2.880	15.144	1.797	270	20.513	144.376	14,21%
Tamalate	602	3.534	18.436	2.485	294	25.351	189.222	13,40%
Biringkanaya	909	6.188	26.302	3.175	297	36.871	216.704	17,01%
Manggala	572	4.084	21.204	2.695	332	28.887	161.827	17,85%
Rappocini	708	4.362	24.078	3.549	456	33.153	150.869	21,97%
Tamalanrea	355	3.034	15.349	2.588	625	21.951	106.768	20,56%
Kepulauan Sangkarrang	15	36	155	5	-	211	15.007	1,41%
Total	4.724	31.373	154.936	19.385	2.692	213.110	1.477.867	14,42%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan kecamatan bahwa jumlah penduduk yang berkualifikasi Pendidikan tinggi di Kota Makassar meningkat dari tahun sebelumnya. Menurun, bisa disebabkan karena jumlah penduduk Angkatan kerja berkualifikasi Pendidikan tinggi yang menganggur mengalami kenaikan. Kenaikan pengangguran berkualifikasi Pendidikan tinggi di Kota Makassar mesti menjadi perhatian pemerintah kota ke depan. Kenaikan pengangguran terdidik mengindikasikan bahwa masih terdapat *mismatch* antara kebutuhan pemberi kerja dan keahlian/skill yang dimiliki oleh pencari kerja. Tingginya pengangguran terdidik juga mengindikasikan bahwa pasar tenaga kerja di Kota makassar sebagian besar hanya membutuhkan pekerja tidak terdidik, dengan jenis pekerjaan berupah rendah. Begitu juga sebaliknya mengalami peningkatan disebabkan tingkat pengangguran juga menurun karena lapangan kerja yang sesuai dengan penduduk yang berpendidikan yang tinggi yang ditamatkan yang bekerja.

Pendidikan tinggi hingga level perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pekerja yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi cenderung memiliki keterampilan teknis dan analitis yang lebih baik, kemampuan berpikir kritis, serta keahlian profesional yang relevan dengan tuntutan industri modern. Selain itu, mereka umumnya lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan inovasi yang terus berkembang, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi. Peningkatan pengetahuan dan keahlian ini juga membuka peluang bagi mereka untuk



mengisi posisi manajerial dan kepemimpinan, yang sangat penting dalam strategi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia.

Jika sebuah daerah didominasi oleh pekerja yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dampak positifnya akan sangat terasa di berbagai sektor. Pertama, tingkat inovasi dan kreativitas di daerah tersebut akan meningkat, karena tenaga kerja yang terdidik lebih mampu mengembangkan ide-ide baru dan solusi kreatif untuk masalah yang ada. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan industri dan penciptaan lapangan kerja baru. Kedua, kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan juga akan meningkat, seiring dengan bertambahnya pendapatan rata-rata dan meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Selain itu, adanya tenaga kerja berkualifikasi tinggi juga menarik investasi dari perusahaan-perusahaan besar yang mencari sumber daya manusia kompeten, sehingga memperkuat perekonomian daerah dan memperluas peluang ekonomi bagi penduduk setempat.

2.2.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif
2.2.4.1. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Inklusivitas pasar tenaga kerja khususnya terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar dapat dilihat dari indikator persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal. Untuk konteks inklusivitas Kota Makassar khususnya terhadap penyandang disabilitas, masih belum inklusif. Hal itu dapat dilihat dari parameter persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kota Makassar. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yang bersumber dari beberapa perusahaan dan kantor pemerintahan mencatat jumlah penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kota Makassar pada tahun 2024 sebanyak 180 orang atau hanya 0,048 persen dari total pekerja formal di Kota Makassar.

Tabel 2.24
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal
Kota Makassar Tahun 2024

Variabel	Satuan	Jumlah
Jumlah Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal	Orang	180
Jumlah Pekerja Formal	Orang	375.598
Persentase Penyandang Disabilitas	%	0,048%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Tahun 2025

Data tersebut merupakan informasi awal yang membuat Pemerintah Kota Makassar dalam jangka panjang perlu menaruh perhatian terhadap isu inklusifitas dalam pasar tenaga kerja. Kota Makassar memiliki 2.869 jiwa penyandang disabilitas tahun 2024 berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Makassar. Jika dikomparasi dengan jumlah penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, hanya 6,27 persen. Karena indikator ini tergolong baru, sehingga data diuraikan punya banyak keterbatasan, sehingga tidak menggambarkan sepenuhnya tentang penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Terkait isu ini, Pemerintah Kota Makassar ke depan perlu fokus pada penyempurnaan database terkait penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, serta ada hal-hal yang substansial yang bisa membuat pasar tenaga kerja Kota Makassar jauh lebih inklusif.



2.2.4.2. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022 dan 2023 masih dibawah 50%, masing-masing 47,33% dan 46,65%. Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 56,19. Masih rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Tahun 2022 dan 2023 di Kota Makassar salah satunya disebabkan rendahnya kepesertaan pada pekerja non formal. Bagi pekerja formal, pemerintah punya aturan yang ketat terhadap pemberi kerja untuk mendaftarkan semua pekerjaanya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, namun tidak ada kewajiban yang bisa memaksa pekerja non formal untuk mendaftar sebagai peserta. Dengan adanya Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2275/560.05/2022 tentang pembentukan Forum Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepesertaan Jamsostek di Kota Makassar.

Tabel 2.25
Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja
Kota Makassar Tahun 2024

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tenaga Tata Usaha Dan Yang Sejenis	67.388
2	Tenaga Tata Usaha Penjualan	179.447
3	Tenaga Usaha Jasa	47.684
4	Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan Dan Perikanan	14.169
5	Tenaga Produksi, Operator Alat – Alat Angkutan Dan Pekerja Kasar	222.577
6	Lainnya	12.024
	Jumlah	629.183

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka, Tahun 2025

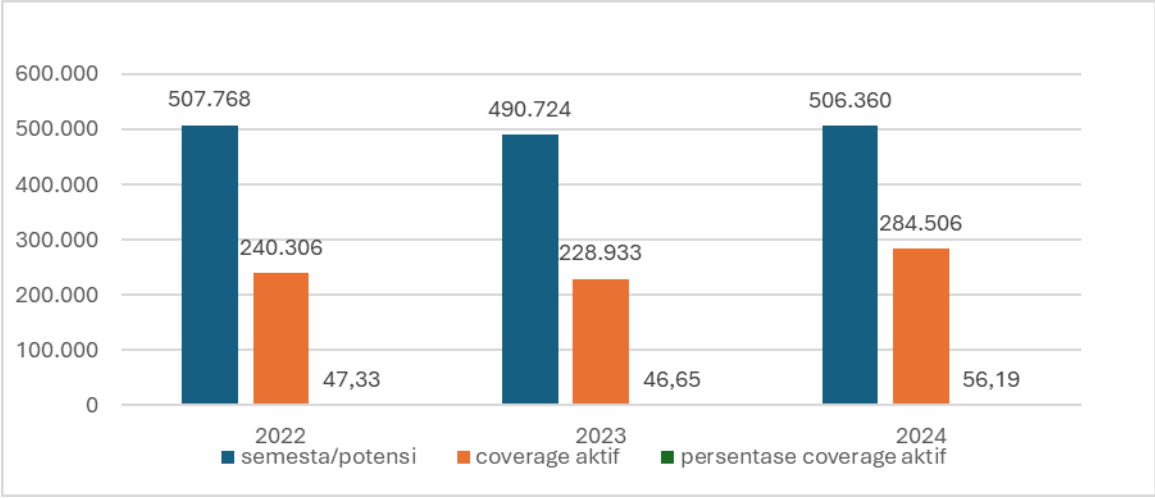
Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan data dari Kota Makassar dalam angka tahun 2025 sebanyak 629.183 orang yang terdiri dari Tenaga Tata Usaha dan sejenis 67.388 orang, Tenaga Usaha penjualan 179.447 orang, tenaga usaha jasa 47.684 orang, pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 14.169 orang , tenaga produksi , operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar sebanyak 222.577 orang serta lainnya sebanyak 12.024 orang.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kategori kepesertaan Jamsostek adalah Pekerja Penerima Upah (PU) Pekerja (Bukan Penerima Upah (BPU) dan Jasa Konstruksi (JAKON). Ketiga kategori ini tahun 2022 terdapat potensi sebanyak 507.768 orang namun yang menjadi peserta aktif sebanyak 240.306 orang atau sebesar 47,33 persen. Tahun 2023 yang potensi sebanyak 490.724 orang dan yang aktif sebanyak 228.933 orang sehingga persentasenya sebesar 46,65 persen. Tahun 2024 jumlah potensi sebanyak 506.360 orang dan aktif sebanyak 284.506 orang dengan persentase sebesar 56,19 persen. Presentasi tersebut mengcover dengan total 284.506 peserta. Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar melakukan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu 69.024 pekerja melalui APBD tahun 2024, yang terdiri dari 16.097 Aparatur Sipil Negara (ASN), 5.888 ketua RT/RW, 6.082 kader posyandu dan keluarga berencana, 5.696



pekerja keagamaan, serta 35.261 pekerja rentan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Grafik 2.57
Cakupan kepesertaan Jamsostek Kota Makassar Tahun 2022-2024



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar, Tahun 2025

Tantangan pemerintah Kota Makassar ke depan untuk menaikkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ada pada pekerja informal. Pekerja informal umumnya mengalami kesulitan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka membayar iuran karena sebagian besar pekerja informal berupah rendah sementara biaya hidup yang harus ditanggung relatif tinggi.

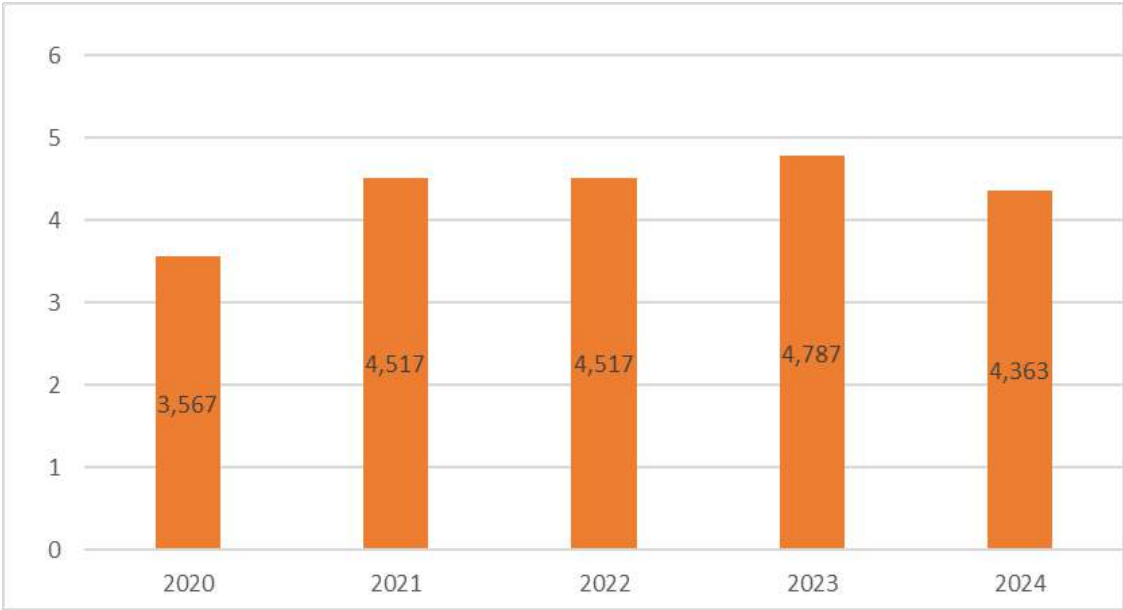
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
2.2.5.1. Indeks Kota Toleran

Indeks Kota Toleran (IKT) merupakan pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengkombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM Internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif untuk memotret secara komprehensif praktik dan promosi toleransi di masing-masing kota, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat secara umum.

Pada tahun 2020, Kota Makassar mengalami beberapa peristiwa yang dinilai mencederai toleransi. Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga Kota Makassar dimasukkan dalam 10 kota dengan indeks paling rendah pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, di Kota Makassar telah terjadi 11 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Posisi Kota Makassar sebagai 10 kota dengan IKT paling rendah bertahan hingga tahun 2021. Kota Makassar baru keluar dari 10 kota IKT terbawah di tahun 2022 dengan nilai 4,517 dan menunjukkan tren meningkat di tahun 2023 dengan nilai IKT 4,787. Pada Tahun 2024 nilai IKT Kota Makassar kembali menurun menjadi 4,363 dan kembali masuk dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah.



Grafik 2.58
Indeks Kota Toleran Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: SETARA Institute, Tahun 2024

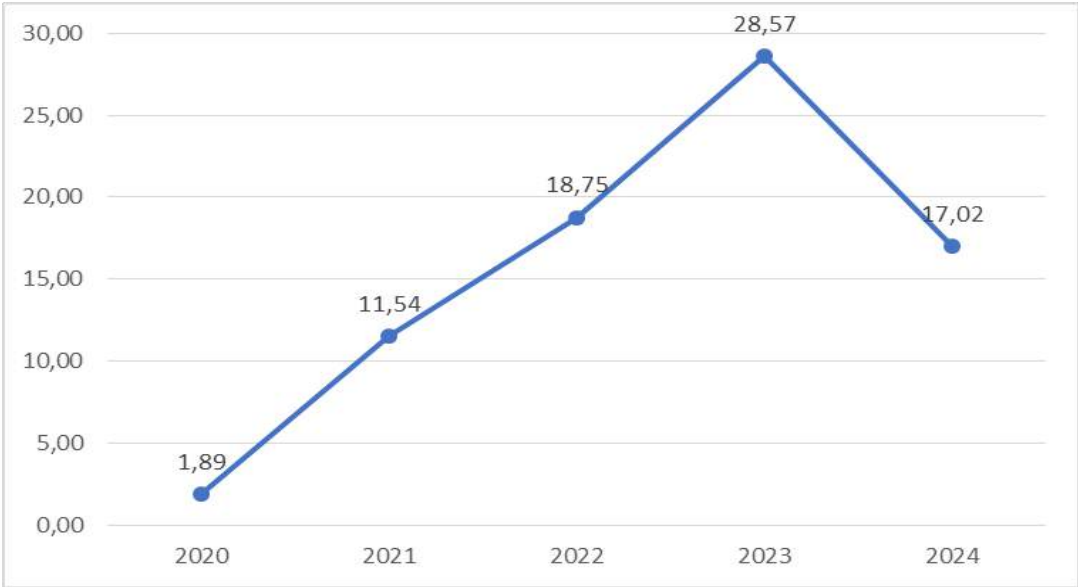
Penurunan nilai IKT Kota Makassar disebabkan adanya kerapuhan ekosistem toleransi kental terlihat melalui potret problematika di Kota Makassar. Meskipun dalam temuan studi IKT sebelumnya berbagai upaya pemajuan toleransi telah dilakukan berbagai elemen di Makassar, baik pemerintah kota maupun masyarakat, tetapi pada tahun 2024 kondisi regresif kembali terjadi. Kepemimpinan politik dan kemasyarakatan tidak bekerja optimal, berakibat peristiwa-peristiwa intoleran maupun regresif terhadap keberagaman terjadi, seperti penyesatan dan penolakan ceramah keagamaan. Beragamnya inisiatif yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan komunitas keagamaan di Kota Makassar untuk isu toleransi belum sepenuhnya berhasil mencegah sekaligus membendung peristiwa intoleransi yang terjadi. Meskipun demikian Pemerintah Kota Makassar tetap bertekad untuk memperbaiki IKT, sehingga Kota Makassar dapat menjadi kota yang betul-betul toleran sesuai dengan kalimat “*sombere*” dalam visi jangka panjangnya yang bermakna keramahan, kebaikan dan persaudaraan.

2.2.5.2. Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan situs cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 tercatat objek cagar budaya yang teregistrasi sebanyak 193 objek dengan target dan capaian yang dilakukan tiap tahunnya. Jumlah objek cagar budaya yang teregistrasi pada tahun 2020 sebanyak 53 objek dan yang ditetapkan hanya sebanyak 1 objek cagar budaya saja, hal ini disebabkan karena ada beberapa pendukung dari objek cagar budaya yang diusulkan tidak dapat dipenuhi seperti sertifikat tanah dan bangunan. Tahun 2021 ada sebanyak 26 objek cagar budaya dan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 3 objek cagar budaya dan di tahun 2022 ada sebanyak 32 objek cagar budaya dan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 6 objek. Pada tahun 2023 sebanyak 10 objek cagar budaya ditetapkan sebagai cagar budaya dari 35 objek cagar budaya yang ada. Pada tahun 2024 Objek cagar budaya sebanyak 47 objek dan yang ditetapkan sebanyak 8 objek.

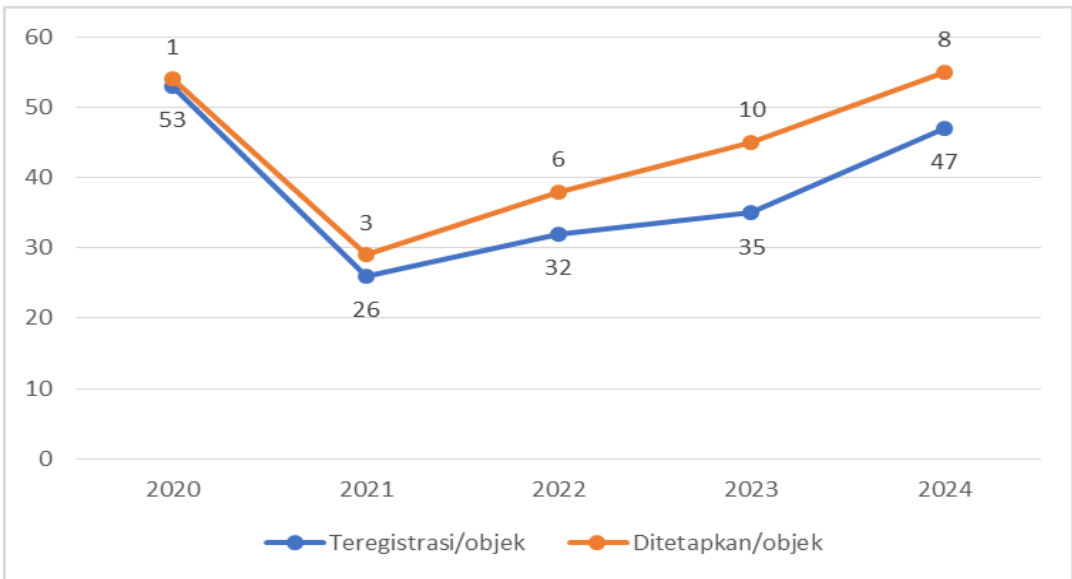


Grafik 2.59
Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan situs cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Tahun 2025

Grafik 2.60
Data Objek Cagar Budaya yang teregistrasi dan ditetapkan



Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa sejak tahun 2020–2024 dari 193 objek cagar budaya yang teregistrasi hanya 28 yang ditetapkan atau sebesar 14,50%, hal ini disebabkan sidang penetapan cagar budaya membutuhkan waktu yang panjang untuk pengkajian dan penulisan objek cagar budaya yang sudah diregistrasi bahkan pada prosesnya tidak dapat ditetapkan karena belum ditemukan objek sebagai cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

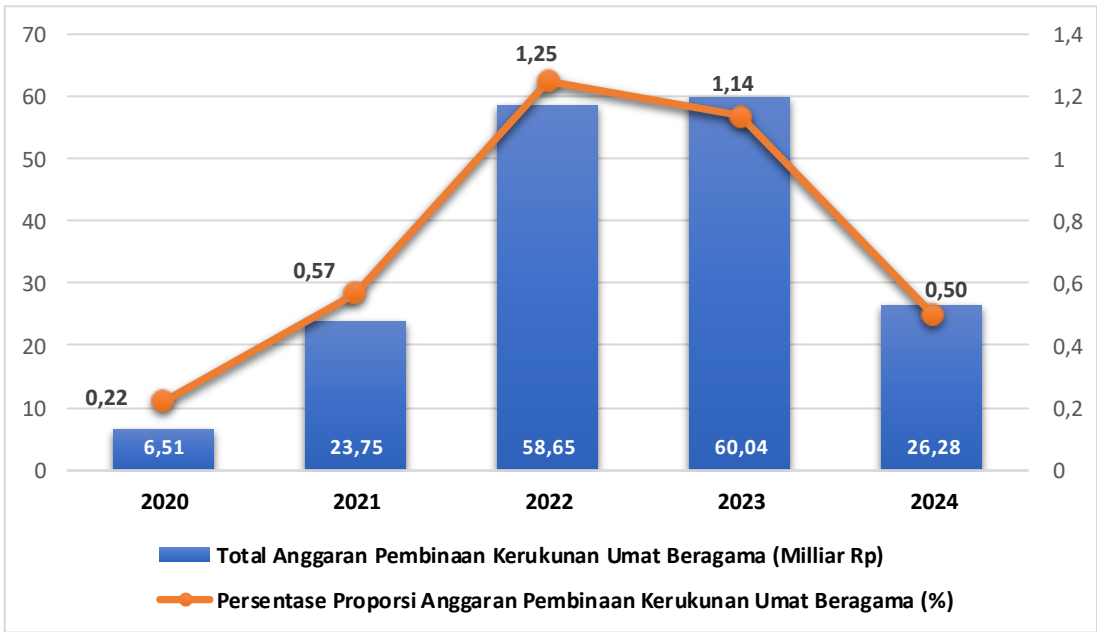
2.2.5.3. Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Mendapat Dukungan/Fasilitasi

Selama lima tahun terakhir, proporsi anggaran pembinaan kerukunan umat beragama terhadap total APBD Kota Makassar cenderung naik, meski



sempat mengalami penurunan dari 0,44% ke 0,22% di tahun 2020 ini disebabkan karena APBD Kota Makassar Tahun 2020 juga mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu 3.458 Miliar turun menjadi 3.008 Milliar pada tahun 2020 sehingga pengalokasian anggaran pembinaan kerukunan umat beragama juga terjadi pengurangan/penurunan alokasi anggaran. Tahun 2021 proporsi anggaran pembinaan kerukunan umat beragama mengalami kenaikan sebesar 0,57% dari total APBD ini dikarenakan adanya penambahan alokasi anggaran sejumlah Rp. 23,75 miliar yang setahun sebelumnya hanya dialokasikan Rp. 6,51 miliar, kenaikan alokasi anggaran tersebut seiring dengan meningkatnya APBD Kota Makassar pada tahun 2021 sebesar 4.170 miliar. Untuk memperluas dukungan atau fasilitasi kegiatan keagamaan, tahun 2022 pemerintah kota menaikkan anggaran pembinaan kerukunan umat beragama hingga 146,90% dari jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya menjadi Rp. 58.65 miliar sehingga proporsinya terhadap APBD naik sampai 1,25%, kenaikan yang cukup drastis ini juga disebabkan karena APBD Kota Makassar semakin naik dari tahun sebelumnya menjadi 4.699 Miliar pada tahun 2022. Tahun 2023, proporsi alokasi anggaran pembinaan kerukunan umat beragama mengalami kenaikan sebesar 2,37% atau berjumlah Rp. 60.04 miliar dari alokasi anggaran tahun sebelumnya, namun proporsinya turun karena persentase anggaran pembinaan kerukunan umat beragama lebih rendah dibandingkan kenaikan APBD Kota Makassar yang berjumlah 5.262 Miliar. Untuk tahun 2024 proporsi anggaran pembinaan kerukunan umat beragama kembali turun menjadi 0,50% dari APBD Kota Makassar yang berjumlah 5.291 Miliar.

Grafik 2.61
Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Mendapat Dukungan/Fasilitasi
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019-2024



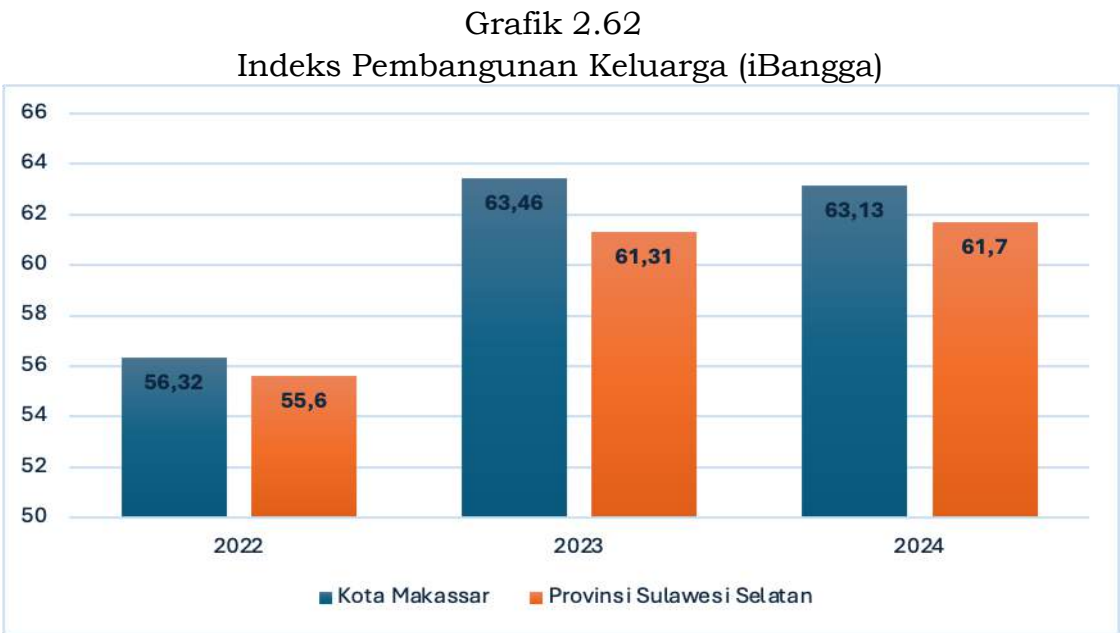
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Tahun 2024

Proporsi anggaran yang memadai dan mencukupi untuk pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Makassar akan menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan toleran. Dengan alokasi anggaran yang cukup, Pemerintah Kota Makassar dapat melaksanakan berbagai program yang mendukung dialog antar umat beragama, meningkatkan pemahaman antar kelompok agama, dan mengurangi potensi konflik sosial yang akan terjadi.



2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
2.2.6.1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga.



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

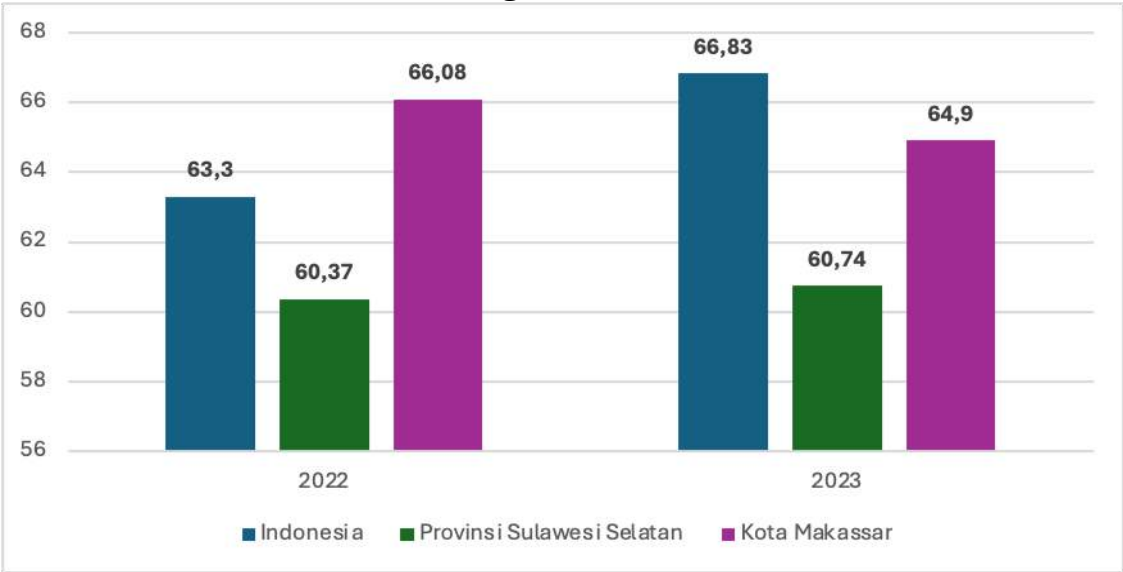
Untuk capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Makassar tahun 2022 sebesar 56,32 persen dengan kategori cukup baik (berkembang), di tahun 2023 meningkat sebesar 7,14 persen menjadi 63,46 persen dengan kategori cukup baik (berkembang). Pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,33 persen menjadi 63,13 persen dengan kategori cukup baik (berkembang).

2.2.6.2. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Dalam mengukur capaian pembangunan perlindungan anak yang terdiri dari Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) dihasilkan dari capaian lima klaster yang terdiri dari Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan), Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) serta Klaster V (Perlindungan Khusus).



Grafik 2.63
Indeks Perlindungan Anak Kota Makassar



Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Tahun 2024

Data diatas menunjukkan bahwa Indeks Perlindungan Anak di Kota Makassar menunjukkan adanya penurunan angka capaian dari tahun sebelumnya, dimana di tahun 2022 capaian IPA sebesar 66,08 persen sementara di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,18-point atau sebesar 64,90 persen. Walaupun jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang masih dibawah capaian Kota Makassar. Namun jika dibandingkan dengan capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) nasional pada tahun 2022, capaian Kota Makassar masih lebih tinggi, namun di tahun 2023 capaian IPA nasional cukup tinggi sebesar 68,83 persen dibandingkan kota Makassar yang berada di angka 64,90.

Grafik 2.64
Klaster Pembentuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Makassar



Sumber: Kementerian PPPA, Tahun 2024

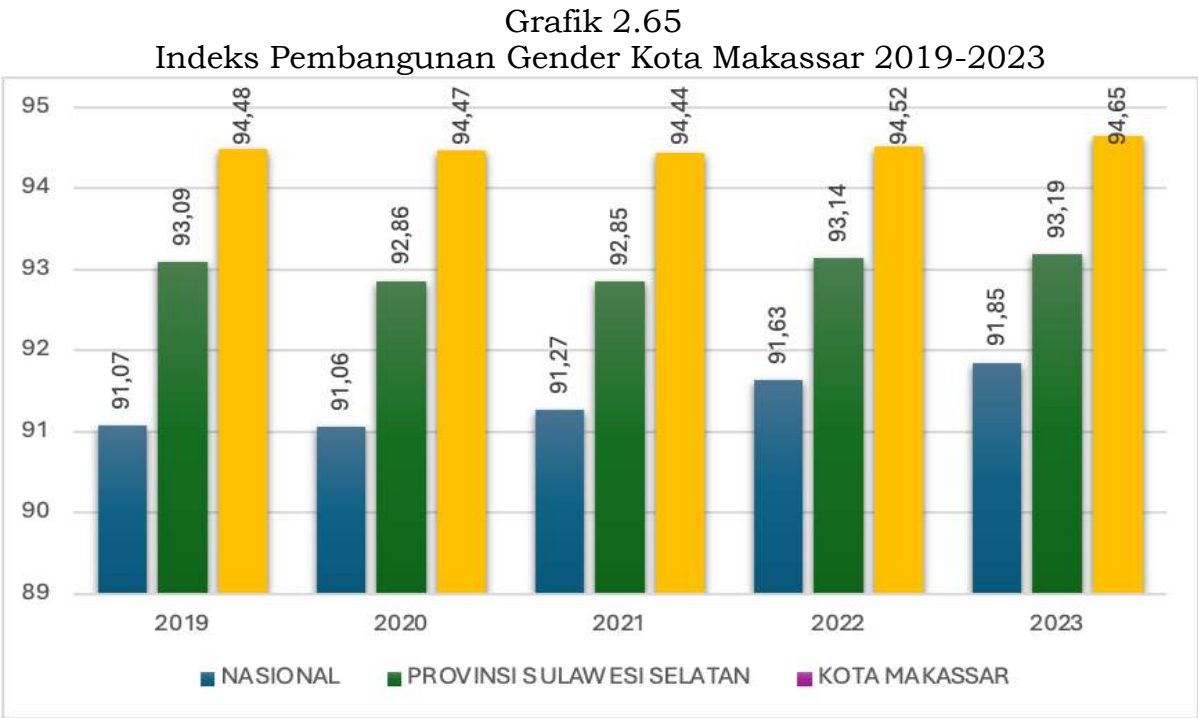
Capaian Indeks Perlindungan Anak yang datanya mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya Koordinasi Antar Sektor, dimana terdapat kekurangan dalam pemahaman dan komitmen lintas sektor terhadap pembangunan perlindungan anak secara komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan program secara efektif. Sistem Data, Informasi, dan Monitoring yang Belum Optimal, yang ditandai dengan



masih terdapat kendala dalam sistem data dan informasi anak. Ketidaktepatan data dan kurangnya monitoring dapat mengurangi efektivitas intervensi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) & Dukungan Hukum. Penelitian menunjukkan bahwa layanan perlindungan anak di UPTD PPA masih belum maksimal, terutama karena minimnya pemahaman yang sinkron antara pihak layanan dengan penegak hukum dan Kekurangan SDM seperti konselor, psikolog, dan penasihat hukum. Permasalahan dalam Pemenuhan Hak Anak, dalam beberapa segmen anak, terutama yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, disabilitas, atau terabaikan, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang memadai. Trend Kasus Kekerasan Berubah, Terutama Kekerasan Seksual. Meskipun total kasus kekerasan perempuan dan anak di Makassar menurun (dari 634 kasus di 2023 menjadi 510 kasus di 2024), terdapat peningkatan proporsi kasus kekerasan seksual yang kini lebih mendominasi dibanding kekerasan fisik. Ini mungkin berdampak pada indeks yang lebih fokus pada kualitas perlindungan daripada hanya jumlah kasus.

2.2.6.3. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Makassar pada tahun 2019 berada pada angka 94,48 persen dan di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan 94,47 persen dan 94,44 persen namun lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi, dan di tahun 2022 IPG Kota Makassar meningkat menjadi 94,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan di tahun 2023 terus mengalami peningkatan 94,65 persen mendekati angka ideal sementara di nasional hanya berada di angka 91,85 begitupun di provinsi Sulawesi Selatan 93,13 persen.

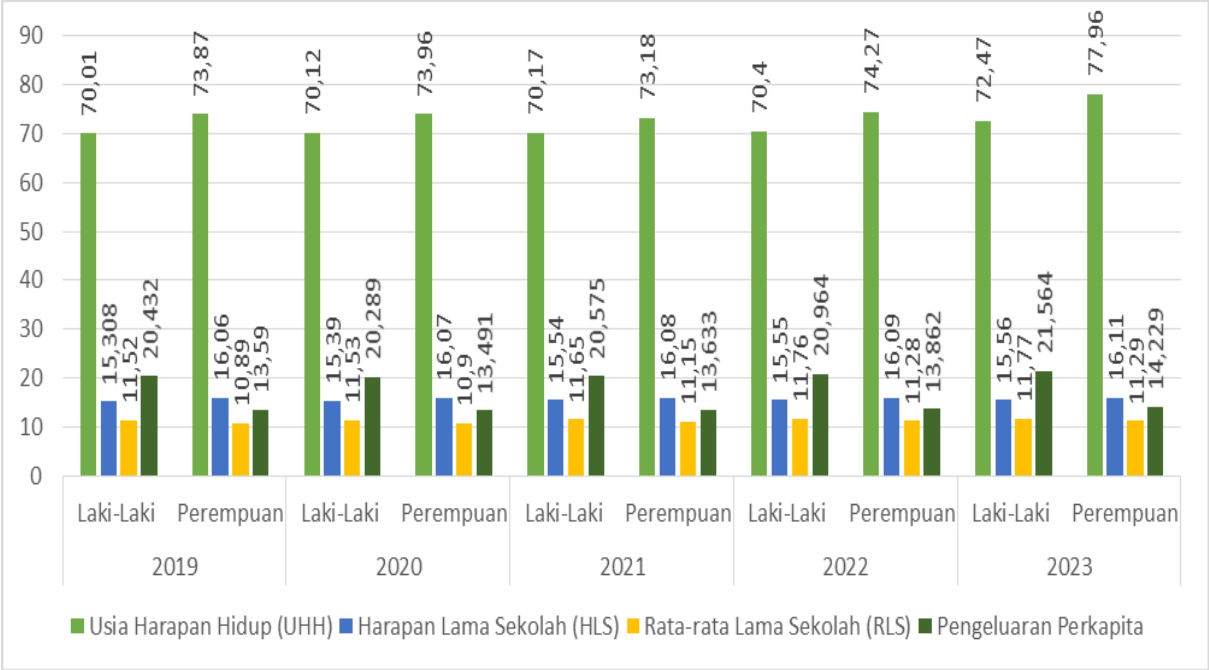


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Hal ini menunjukkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Gender di Kota Makassar masuk kategori sangat tinggi, hal ini disebabkan pencapaian laki-laki dan pencapaian perempuan yang terdiri dari tiga aspek dasar yaitu hampir seimbang, perlu diketahui bahwa komposit pembentuk dari Indeks Pembangunan Manusia.



Grafik 2.66
Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Makassar Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas peluang anak perempuan setiap tahunnya meningkat lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Untuk keberhasilan kebijakan pendidikan tercatat dalam angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dimana untuk Kota Makassar trend pertumbuhan RLS perempuan lebih cepat dibandingkan laki-laki. Ukuran capaian pembangunan manusia dari sisi ekonomi dilihat dari standar hidup layak dan diwakili oleh pengeluaran perkapita, dimana tren pengeluaran perkapita di Sulawesi selatan untuk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, dimana pengeluaran perkapita tahun 2023 untuk laki-laki sebesar 21,56 persen sementara perempuan 14,22 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebelumnya dimana untuk laki-laki sebesar 20,964 persen dan perempuan sebesar 13,862 persen.

2.2.6.4. Indeks Pemberdayaan Gender

Untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Makassar setiap tahunnya selalu berada diatas Provinsi dan Nasional, dimana tahun 2019 IDG Kota Makassar sebesar 78,32 persen dan pada tahun 2020 angka Indeks Pemberdayaan Gender Kota Makassar sebesar 77,61 persen, walaupun nilainya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya namun nilai IDG Kota Makassar masih tinggi dibandingkan dengan nasional 75,57 persen dan provinsi sulsel 76,32 persen. Di tahun 2021 angka IDG Kota Makassar turun di 1,02 point atau sebesar 76,59 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan untuk Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 78,15 mengalami peningkatan sebesar 1,56 point dan di tahun 2023 angka IDG Kota Makassar 78,13 persen. Untuk dimensi dimensi atau indikator partisipasi politik diukur melalui keterwakilan perempuan di parlemen, dimensi pengambilan keputusan dari keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dan profesional dan dimensi distribusi pendapatan melalui kontribusi pada kesempatan dan pendapatan kerja.



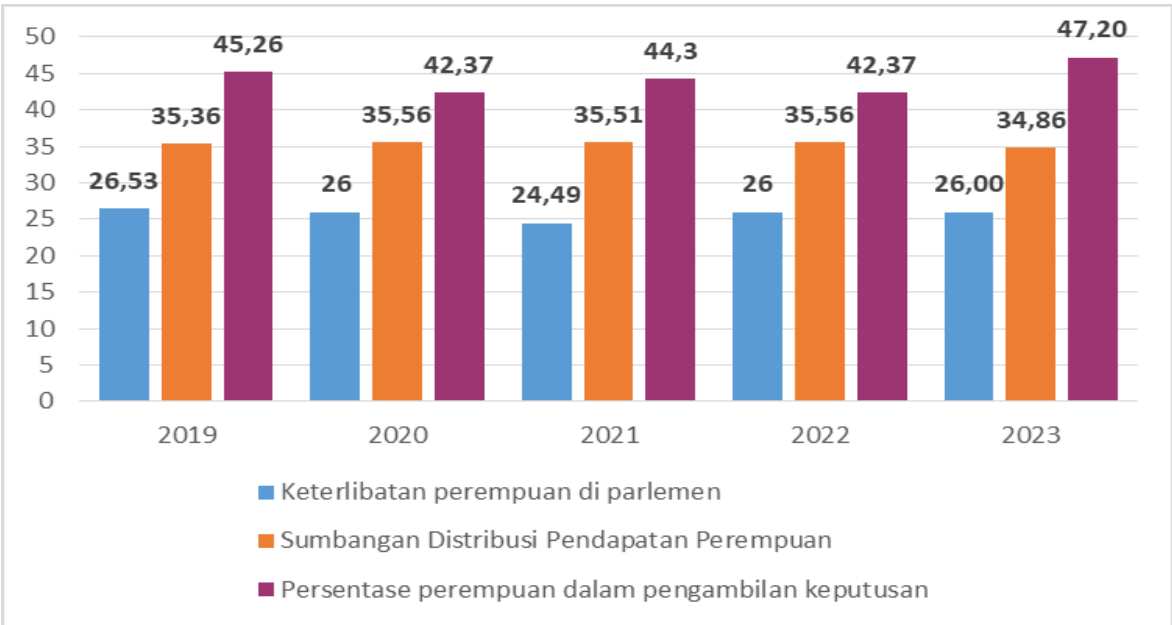
Grafik 2.67
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Makassar
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2024

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR/DPRD mengatur sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan dalam pengurusan partai politik, dimana periode tahun 2019-2023 angka menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam parlemen menunjukkan hal yang baik setiap tahunnya dimana jumlah legislator terus bertambah walaupun di tahun 2021 sempat mengalami penurunan sebesar 24,49 persen. Untuk perkembangan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan atau sebagai tenaga profesional agak berfluktuasi namun secara umum memiliki gambaran yang positif. Data tahun 2024 menunjukkan angka 47,20 artinya hampir mendekati 50 persen artinya perempuan di Kota Makassar terkait pengambilan keputusan yang bekerja sebagai tenaga profesional telah mengalami kesetaraan gender.

Grafik 2.68
Komposit Indeks Pembangunan Gender (IDG)
Kota Makassar 2019-2023

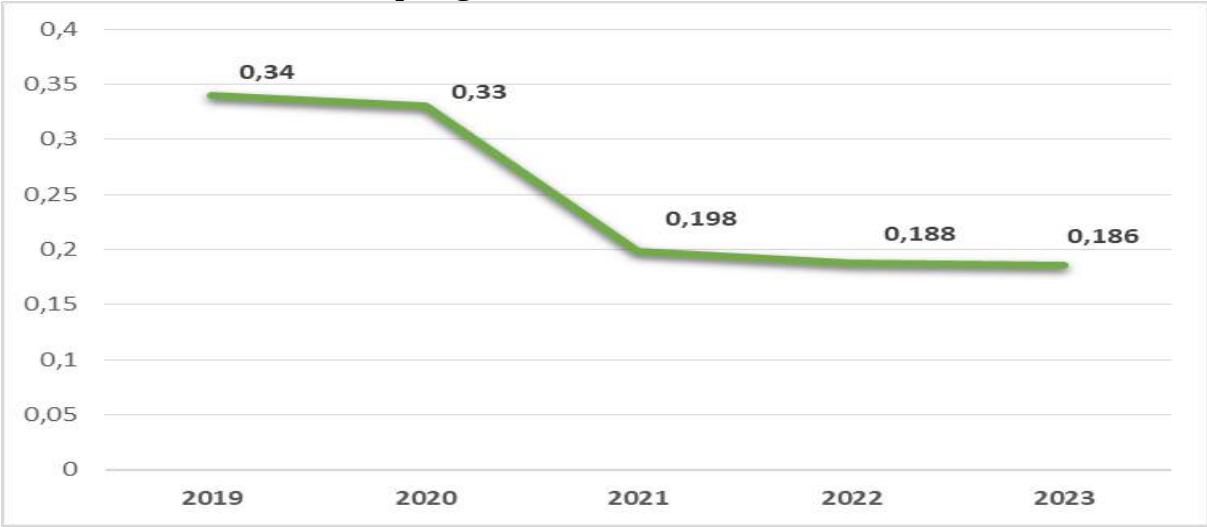


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

2.2.6.5. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender merupakan Indeks yang bertujuan mengukur kemajuan kesetaraan gender dan membandingkan ketimpangan gender antara laki-laki dan Perempuan dengan berdasarkan beberapa indikator Kesehatan reproduksi, pemberdayaan tenaga kerja.

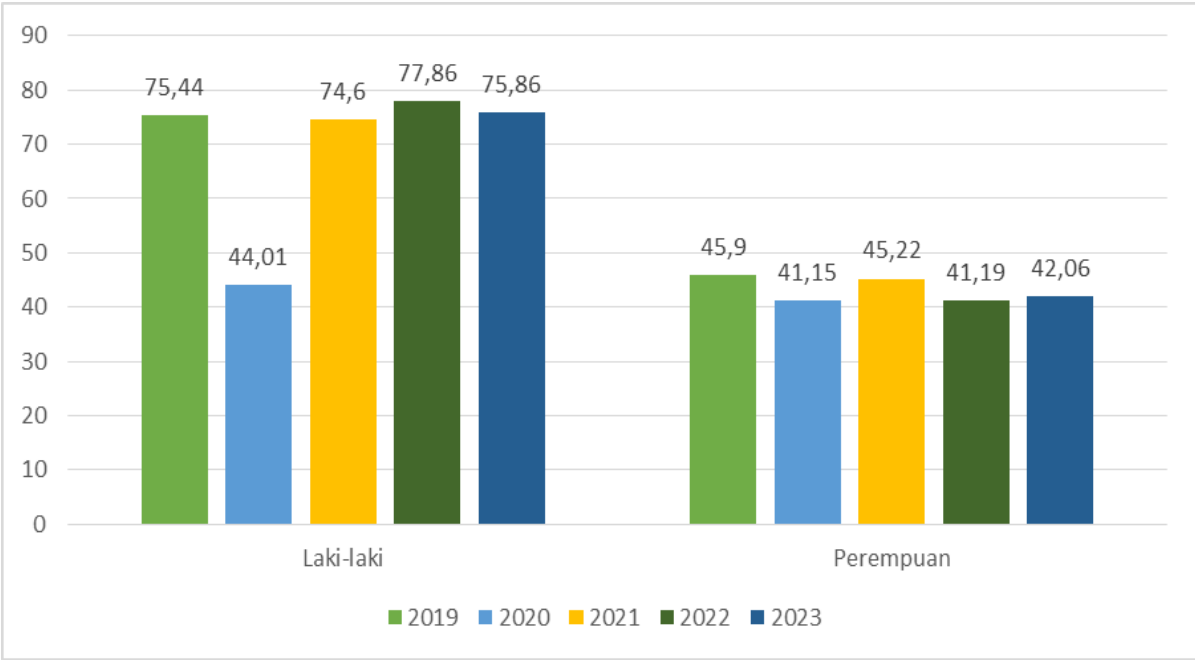
Grafik 2.69
Indeks Ketimpangan Gender Kota Makassar 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Berdasarkan data indeks ketimpangan gender Kota Makassar tahun 2019 sebesar 0,344 dan mengalami penurunan sebesar 0,01 point tahun 2020 dengan angka 0,333 selanjutnya pada tahun 2021 menurun tajam dengan nilai indeks ketimpangan gendernya sebesar 0,198 turun sebanyak 0,13 point dan untuk tahun 2022 sebesar 0,188 dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 0,186.

Grafik 2.70
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2019-2024
Kota Makassar



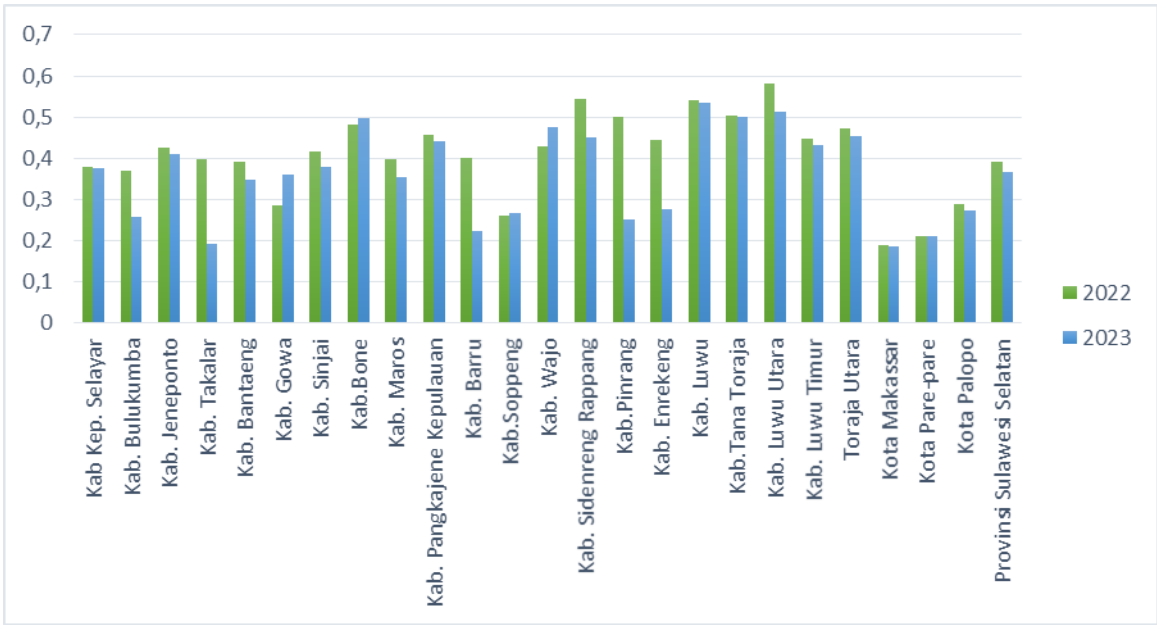
Sumber: BPS Nasional, Tahun 2024

Berdasarkan data angkatan kerja untuk Kota Makassar, di tahun 2023 berada di angka 42,06 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2022



sebesar 0,87 point. Dan berdasarkan data tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih didominasi oleh laki-laki.

Grafik 2.71
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kab/Kota
Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Perbandingan Indeks Kesetaraan Gender di Kab/Kota menunjukkan untuk Kota Makassar nilai IKG yang sebesar 0,188 di tahun 2022 dan 0,186 di tahun 2023 jauh dibawah dari indeks ketimpangan gender provinsi yang sebesar 0,314 dan beberapa kab/kota lainnya di Sulawesi selatan. Semakin rendah nilai maka ketimpangan semakin membaik. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam mengurangi ketimpangan gender di Kota Makassar.

2.2.6.6. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Makassar (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Dimana indikator terkait indeks kepemudaan terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

Tabel 2.26
Indeks Pembangunan Pemuda Berdasarkan Komponen
Kota Makassar Tahun 2023

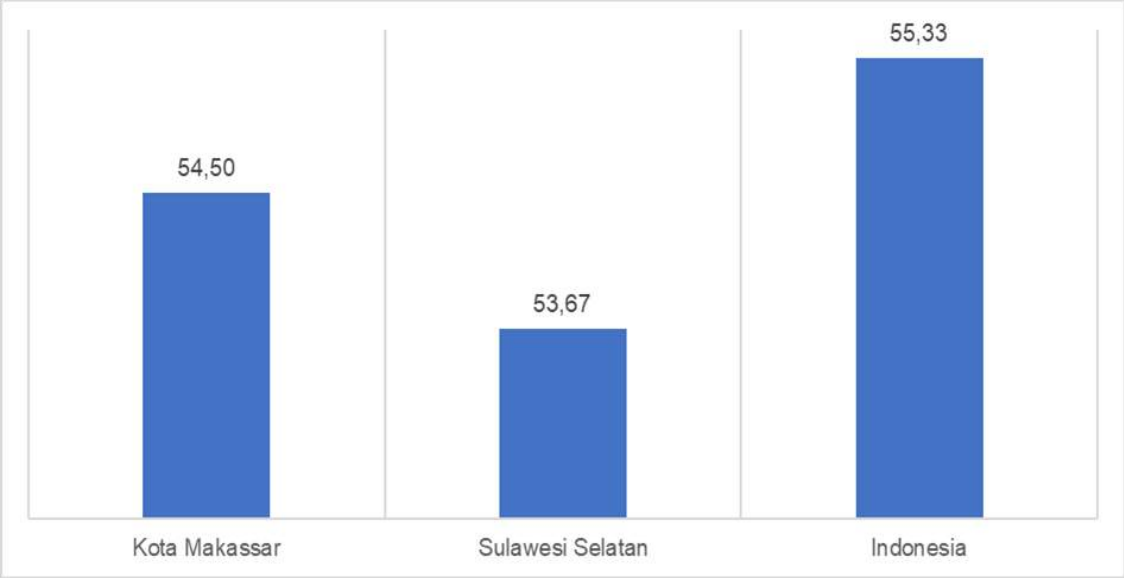
Indikator Kinerja Pembangunan	Tahun 2023
Indeks Pembangunan Pemuda	54,50
• Pendidikan	73,33
• Kesehatan & Kesejahteraan	57,50
• Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja	35,00
• Partisipasi & Kepemimpinan	40,00
• Gender & Diskriminasi	66,67

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga , Tahun 2023

Untuk Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar belum dilakukan pendataan time series sampai tahun 2023, namun terkait

kepemudaan untuk Kota Makassar jumlah pemuda sebesar 519.272 jiwa dimana terdiri dari pemuda perempuan sebesar 235.202 dan pemuda laki-laki sebesar 241,660 jiwa. Untuk Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara Nasional sejak tahun 2019 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun IPP pada tahun 2020 sebesar 51,00 mengalami penurunan 1,67 poin dibandingkan capaian IPP tahun sebelumnya 2019 sebesar 52,67 persen. Dari lima domain pembentuk IPP, domain pendidikan paling berkontribusi terhadap capaian IPP dengan nilai indeks tertinggi sebesar 70,00. Disisi lain, lapangan dan kesempatan kerja adalah domain IPP terlemah dengan dengan nilai indeks 40,00.

Grafik 2.72
Indeks Pembangunan Pemuda
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2023



Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga , Tahun 2023

2.2.6.7. Indeks Pembangunan Olahraga

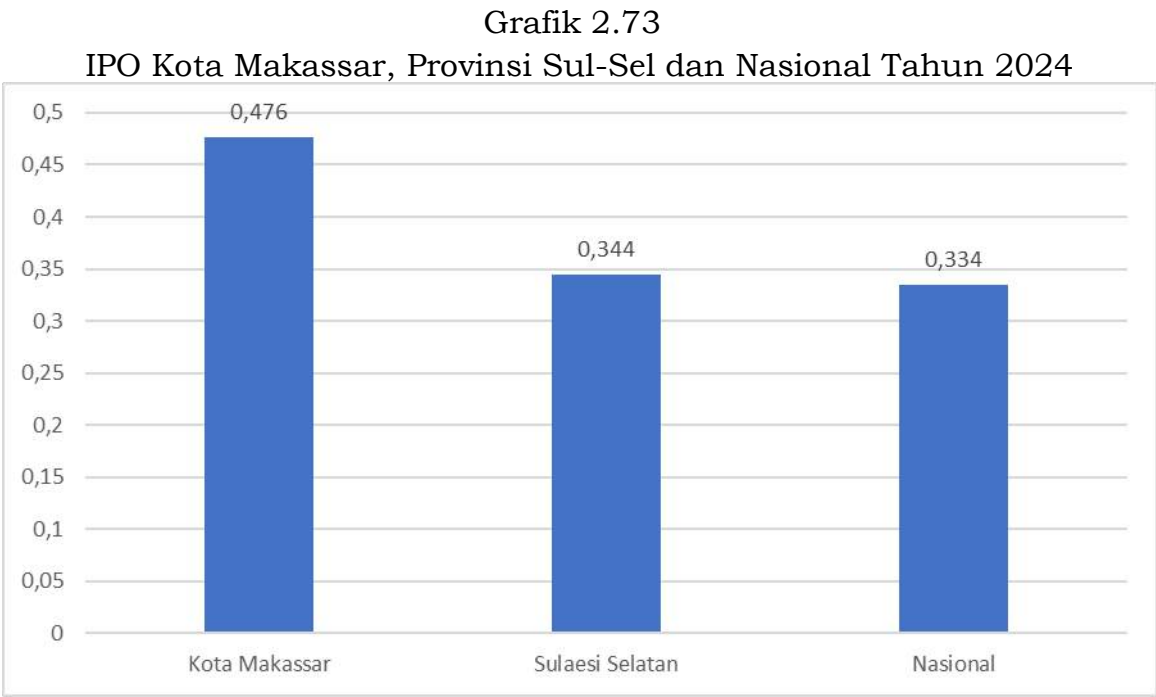
Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 1 Tahun 2022, telah disusun alat ukur atau parameter yaitu Indeks Pembangunan Olahraga yang biasa disebut *Sport Development Index* (SDI), melalui 9 (sembilan) indikator/dimensi yaitu: partisipasi, kebugaran, ruang terbuka olahraga, SDM olahraga, kesehatan, ekonomi, ketahanan sosial, dan literasi fisik. Dalam perhitungan IPO yang menjadi komposit pembentuknya yaitu a) Literasi Fisik dan Partisipasi yang terdiri dari Frekuensi olahraga dalam seminggu, Durasi Olahraga, intensitas, ketertarikan, keingintahuan dan kesenangan berolahraga b) Perkembangan Personal terdiri dari persepsi terhadap tantangan, keputusan, kegigihan dan rasa saling percaya, c) Ekonomi terdiri dari komponen pengeluaran (fisik) dan pengeluaran non fisik.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kota Makassar belum tersedia, namun berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar yang mencapai 57,67 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 56,33 persen. Meskipun IPP bukan IPO, pencapaian ini menunjukkan adanya upaya pembangunan di berbagai sektor, termasuk bidang keolahragaan, Kota Makassar memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan olahraga karena statusnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa, yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Olahraga Kota Makassar.

Nilai Indeks Pembangunan Olahraga terdapat 3 kategori yaitu rendah dengan skor 0 - 0,499, kategori menengah 0,500 – 0,799 dan kategori tinggi 0,800 – 1. IPO Kota Makassar Tahun 2024 berada pada skor 0,476 dan termasuk rendah. Untuk tahun 2025-2029 IPO Kota Makassar diproyeksikan

dengan 3 skenario yaitu skenario 1 baseline (status -quo), skenario 2 (Program moderat, rekomendasi intervensi dijalankan secara konsisten) dan skenario 3 (program ambisius, pendanaan dan koordinasi lintas OPD optimal).

IPO Kota Makassar tahun 2024 sebesar 0,476 dengan rincian sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, tahun 2025

Beberapa langkah untuk mempercepat peningkatan IPO adalah: 1) Penguatan Infrastruktur Olahraga: Pembangunan dan perawatan fasilitas olahraga yang lebih baik di seluruh Indonesia sangat penting untuk mendukung partisipasi olahraga yang lebih luas. Fasilitas olahraga yang mudah diakses akan mendorong lebih banyak orang untuk berolahraga. 2) Peningkatan Literasi Fisik: Pendidikan tentang pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat harus ditanamkan sejak dini, termasuk melalui kurikulum sekolah dan kampanye masyarakat yang lebih luas. 3) Inovasi dalam Program Olahraga: Program-program olahraga yang lebih menarik, mudah diakses, dan menyenangkan akan membantu masyarakat untuk lebih aktif. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi olahraga, bisa menjadi sarana efektif untuk mendorong partisipasi yang lebih luas. 4) Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat pengembangan industri olahraga, baik dari sisi infrastruktur, pembinaan atlet, maupun penyelenggaraan event olahraga. 5) Peta Jalan Industri Olahraga: Indonesia membutuhkan peta jalan yang jelas untuk mengembangkan industri olahraga yang tidak hanya berfokus pada prestasi, tetapi juga pada aspek ekonomi dan pariwisata olahraga.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan besarnya tingkat kelahiran yakni dengan melihat perubahan persentase penduduk usia muda. Indikator turunan lainnya yang dapat digambarkan dari komposisi kelompok umur adalah angka beban ketergantungan (ABK) yaitu perbandingan antara banyaknya penduduk umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas yang dianggap sebagai usia tidak produktif terhadap penduduk umur 15-64 tahun yang dianggap sebagai usia produktif.



Tabel 2.27
Rasio ketergantungan Kota Makassar
Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penduduk usia <15th + usia>64	434.829	432.219	430.240	428891	436.980
2.	Penduduk usia 15-64	989.048	1.423.877	1.001.949	1.007.735	1.027.680
3.	Rasio ketergantungan (%)	43,96	30,36	42,94	42,56	42,52

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah Tahun 2025

Dari Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Kondisi Rasio Ketergantungan Kota Makassar selama selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami penurunan sebesar 1,44 persen. Dimana pada tahun 2020 Rasio Ketergantungan Kota Makassar tercatat sebesar 43,96 persen menjadi sebesar 42,52 persen pada tahun 2024 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 42-43 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi

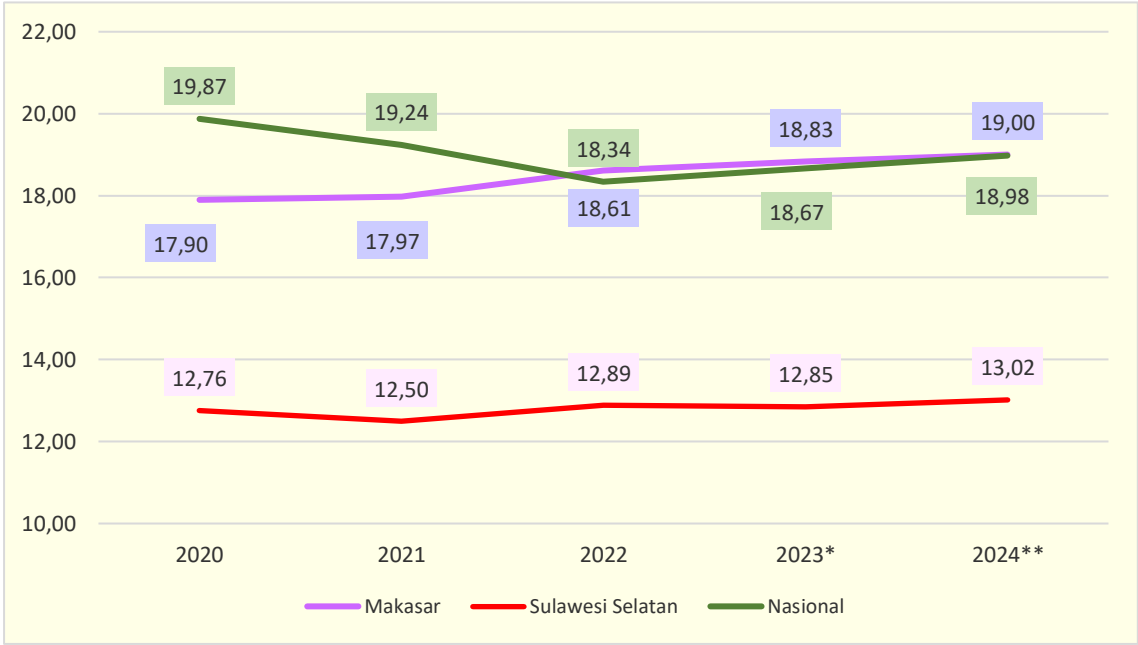
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sisi lapangan usaha, salah satu sektor yang berperan penting adalah industri pengolahan. Sektor ini dapat menghasilkan nilai tambah dari hasil pengolahan produk, sehingga bisa berdampak secara signifikan pada perekonomian. Selain itu, sektor industri pengolahan juga bisa menjadi penopang sektor jasa, misalnya sektor perdagangan dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang menggunakan hasil dari industri pengolahan sebagai input. Lebih lanjut, industri pengolahan yang padat karya juga menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja.



Grafik 2.74
Perkembangan Rasio Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025 (data diolah)

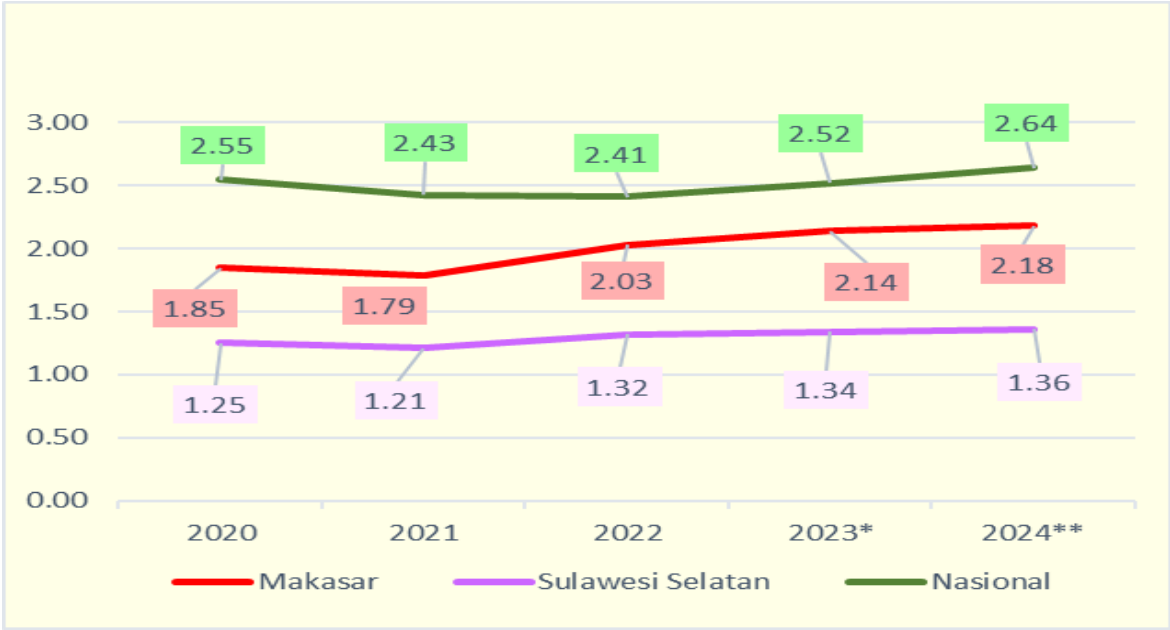
Selama periode 2020-2024, industri pengolahan memegang peranan penting dalam struktur ekonomi Kota Makassar, dengan kontribusi yang secara konsisten berada di posisi kedua tertinggi setelah sektor perdagangan. Rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap total PDRB menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat, yakni dari 17,90% pada tahun 2020 menjadi 19,00% pada tahun 2024. Rata-rata kontribusinya selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 18,46%, menggambarkan penguatan peran sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kota. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan kapasitas industri lokal serta perbaikan iklim investasi dan infrastruktur pendukung sektor manufaktur. Dominasi sektor ini juga mencerminkan pergeseran struktur ekonomi Makassar ke arah yang lebih industrial, mempertegas peran strategisnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah timur Indonesia. Tren positif ini juga sejalan dengan strategi nasional untuk memperkuat hilirisasi industri dan meningkatkan nilai tambah produk domestik, menjadikan sektor ini semakin strategis dalam menopang ketahanan dan keberlanjutan ekonomi daerah.

2.3.2.2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum

PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyediaan akomodasi mencakup penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. Penyediaan makan minum mencakup makanan dan minuman untuk konsumsi segera.



Grafik 2.75
Rasio PDRB dan PDB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2024



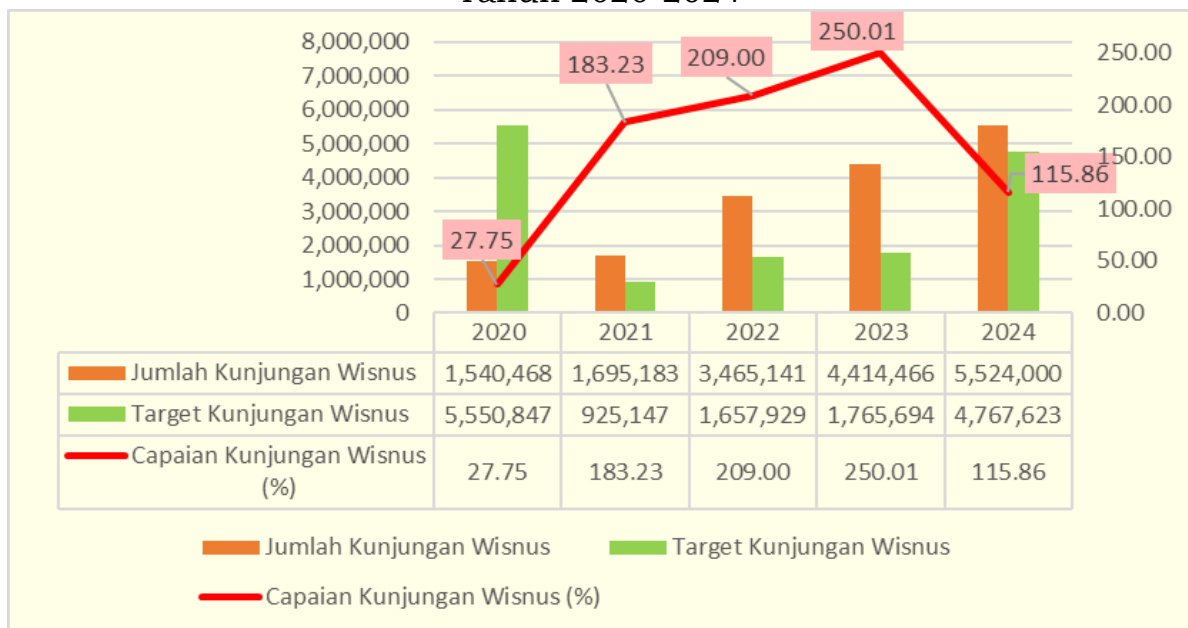
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025 (data diolah)

Selama periode 2020–2024, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan tren yang meningkat dalam struktur ekonomi Kota Makassar, dengan rasio PDRB yang naik dari 1,85% pada tahun 2020 menjadi 2,18% pada tahun 2024. Rata-rata kontribusi sektor ini selama lima tahun terakhir tercatat sebesar 2,00%, mencerminkan pemulihan yang kuat pasca pandemi COVID-19 serta pertumbuhan sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner yang signifikan di kota ini. Meskipun kontribusinya masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,51%, Makassar mencatat angka yang lebih tinggi dibandingkan Sulawesi Selatan secara keseluruhan, yang hanya berkisar pada 1,21% hingga 1,36%. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas konsumsi, kunjungan wisata, serta pusat-pusat pelayanan jasa di Makassar berperan besar dalam menopang sektor ini. Perkembangan ini tidak lepas dari posisi Kota Makassar sebagai gerbang Indonesia Bagian Timur dan juga penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia. Selain itu Kota Makassar ramai dengan kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE). Wisata MICE dapat memberi kontribusi 45% hingga 50% dalam peningkatan sektor usaha akomodasi di Kota Makassar. Jumlah rumah makan dan restoran mengalami kenaikan berarti dari 281 unit pada tahun 2020 menjadi 4.156 unit pada tahun 2024. Hadirnya beberapa program promosi unggulan yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar seperti Makassar Kota Makan Enak, Explore Makassar, Desa Wisata, dan Kota Kreatif juga menjadi alasan meningkatnya sektor ini.

2.3.2.3. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik

Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan menyadari hal itu Pemerintah Kota Makassar menjadikan industri pariwisata ini sebagai salah satu tulang punggung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 4% dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang.

Grafik 2.76
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik di Kota Makassar
Tahun 2020-2024



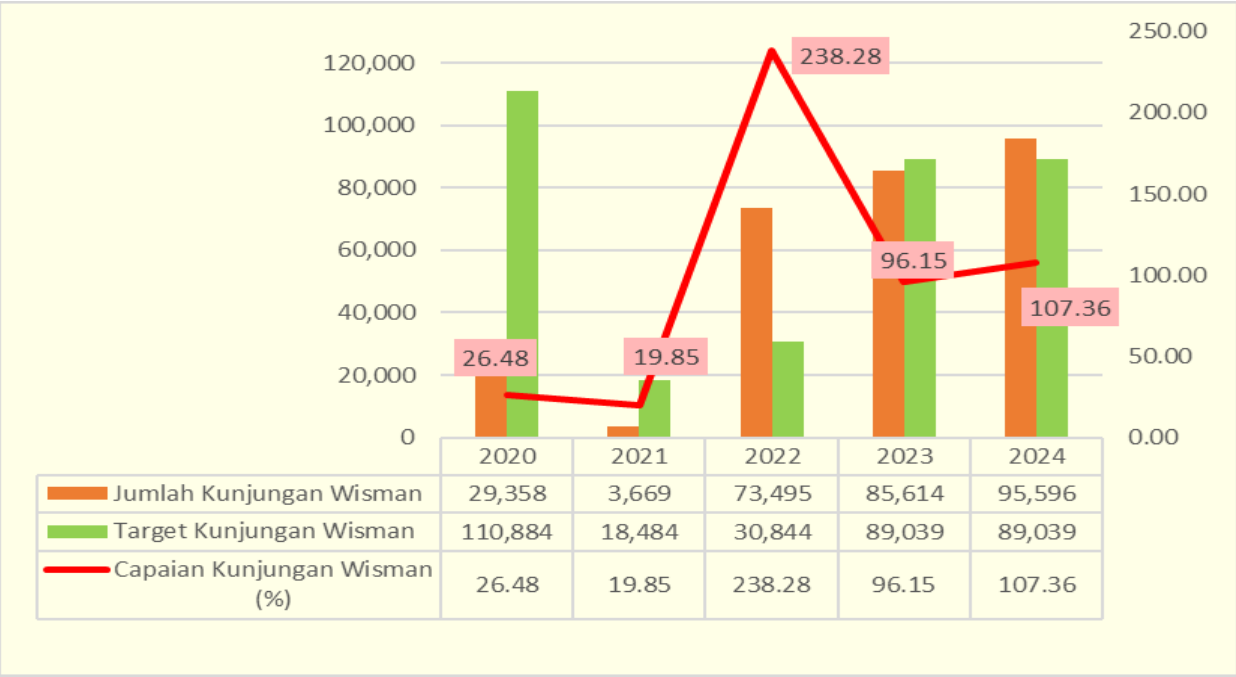
Sumber: Data Sektoral Dinas Pariwisata Tahun 2025

Perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) di Kota Makassar selama tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan dinamika signifikan, diawali penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi dengan capaian hanya 27,75% dari target. Namun, periode 2021–2023 mencatat lonjakan luar biasa, bahkan melebihi target hingga lebih dari 200%, mencerminkan antusiasme masyarakat berwisata domestik dan keberhasilan strategi pemulihan pariwisata. Meski pada 2024 target meningkat tajam, capaian tetap tinggi di angka 115,86%, menandakan pasar yang mulai stabil. Fluktuasi ini menggambarkan dampak faktor eksternal seperti pandemi dan efektivitas kebijakan pemulihan pariwisata terhadap pergerakan wisatawan nusantara.

2.3.2.4. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Pariwisata merupakan salah satu sektor utama yang berkontribusi terhadap perekonomian, terutama melalui kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang membawa devisa dan mendorong pertumbuhan berbagai industri terkait, seperti perhotelan, transportasi, dan kuliner. Analisis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menjadi penting untuk memahami tren pergerakan wisata global, efektivitas strategi promosi pariwisata, serta dampak berbagai daya tarik eksternal seperti kebijakan visa, kondisi ekonomi global, dan stabilitas politik. Dengan melihat data jumlah kunjungan wisman, kita dapat mengidentifikasi pola kedatangan, menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor pariwisata, serta merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi pelancong internasional.

Grafik 2.77
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Makassar
Tahun 2020-2024



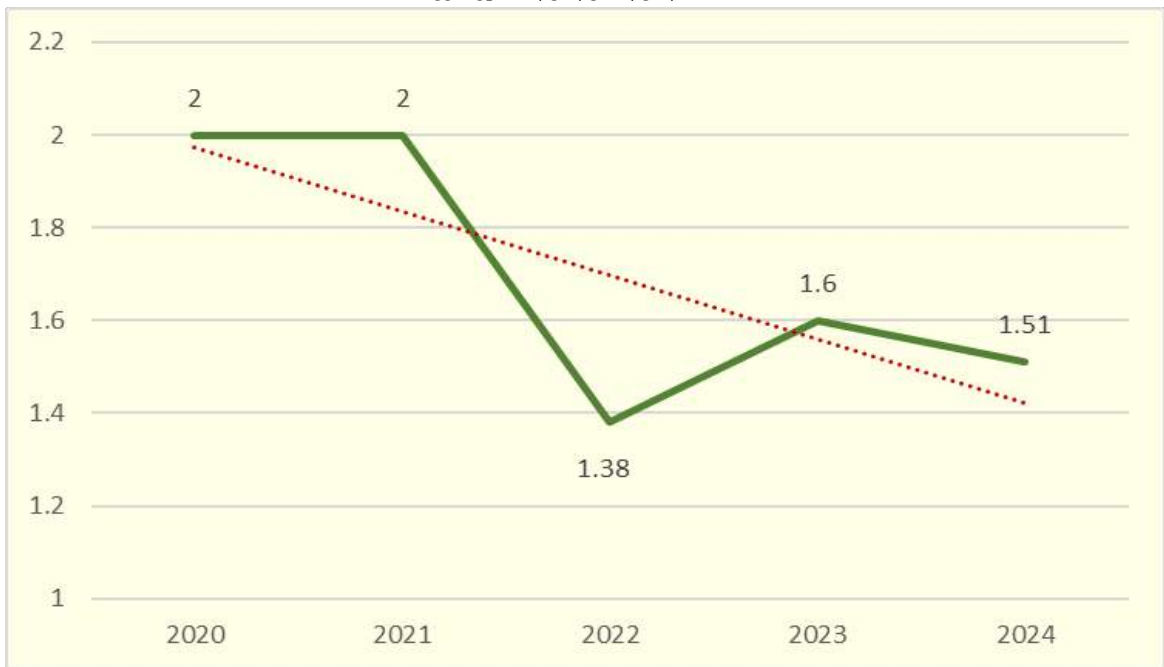
Sumber: Data sektoral Dinas Pariwisata, Tahun 2025 (data diolah)

Perkembangan jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Wisman) mengalami dinamika tajam yang mencerminkan dampak langsung pandemi dan proses pemulihan yang bertahap. Pada 2020 dan 2021, capaian sangat rendah masing-masing hanya 26,48% dan 19,85% akibat pembatasan perjalanan internasional. Namun, pada 2022 terjadi lonjakan drastis dengan capaian 238,28% dari target, menandakan pemulihan minat dan akses masuk wisatawan asing. Tahun 2023 menunjukkan penyesuaian dengan capaian 96,15%, mendekati target yang jauh lebih tinggi. Pada 2024, jumlah tamu meningkat lagi dengan capaian 107,36%, menunjukkan tren positif yang lebih stabil. Fluktuasi ini menunjukkan pemulihan yang kuat namun bertahap, dengan tantangan besar di awal dan potensi pertumbuhan signifikan ke depan jika momentum terus dijaga. Ke depan, optimalisasi digitalisasi pariwisata, diversifikasi produk wisata, serta peningkatan daya saing destinasi menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan positif ini secara berkelanjutan.

2.3.2.5. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata-rata Lama Tinggal adalah rata-rata jumlah hari yang dihabiskan oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, selama berada di suatu daerah tujuan wisata pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa lama wisatawan bertahan di suatu destinasi, sehingga dapat menggambarkan tingkat daya tarik dan daya saing pariwisata di daerah tersebut.

Grafik 2.78
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan di Kota Makassar
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan grafik diatas rata-rata lama tinggal wisatawan di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 dan 2021, rata-rata lama tinggal berada pada posisi relatif stabil yaitu 2 hari, namun pada 2022 mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 1,38 hari, diduga kuat sebagai dampak transisi pascapandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas wisatawan dan menurunkan minat tinggal lebih lama. Pada 2023 terjadi pemulihan dengan peningkatan menjadi 1,60 hari seiring mulai pulihnya kegiatan pariwisata, termasuk event MICE dan kegiatan pariwisata skala nasional, namun pada 2024 kembali melemah ke 1,51 hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi perbaikan, daya tarik dan diversifikasi produk wisata Kota Makassar masih terbatas sehingga wisatawan cenderung melakukan kunjungan singkat. Fenomena tersebut berdampak pada rendahnya multiplier effect sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, khususnya kontribusi belanja wisatawan dan tingkat okupansi akomodasi.

2.3.2.6. Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda

Warisan budaya tak benda adalah segala bentuk praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan, serta alat, benda, artefak, dan ruang budaya terkait yang dianggap sebagai bagian dari warisan budaya suatu komunitas. Warisan ini tidak bisa dipegang, namun tetap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dinyatakan bahwa cakupan pemajuan kebudayaan 10 (sepuluh) yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Bahasa, permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Kesepuluh cakupan ini merupakan karya budaya tak benda.



Tabel 2.28
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi	0	0	9	10	10
2	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi	50	25	14	25	25
3	Jumlah karya udaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (1+2)	50	25	23	35	35

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Tahun 2025

Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi tahun 2024 sebanyak 10 karya budaya seperti : Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang, Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk, Buaya, A' Cini Wattu, A' Jene Sapara Accera Kalompoang, Jumlah karya budaya yang di inventarisasi di tahun 2024 sebanyak 25 yaitu: Manuskrip (Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang, Lontara Kutika), Tradisi Lisan (Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk dan Buaya, Kelong, Cerita Si Lumpuh dan Si Buta, Kondo Buleng, Cerita Monyet dan Kura-Kura, Sinrlik Poosi Tianunung, Sigajang Lalang Lipa). Adat Istiadat (A' Cini Wattu, A' Jene Sapara, Antama Balla, Menre Bola, Appakaramulla), Ritus (Accera Kalompoang, Akbarasanji, Appasili, Maulud), Teknologi Tradisional, Pembuatan Badik, Bumbu), Tahun 2024 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi sebanyak 35

2.3.2.7. Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi dan Dimanfaatkan

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tabel 2.29
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Kota Makassar Tahun 2020 s.d 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20	26	32	32	40
2	Total benda, situs & Kawasan yang dimiliki daerah	138	153	162	162	162
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (1/2 x 100)	14	17	20	20	24

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kota Makassar, tahun 2025



Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2024 Adalah sebagai berikut: Situs Bastion Karabbaka, Komplek Makam Raja Bone, Basttion Mangara bombang, Benda Parang, Benda Tombak, Benda Badik, Benda Keris, Struktur Bungung Lompo, Badik Luwu, Tombak, Badik Gecong, Badik Lompo Battang, Komp Makam Karaeng Katinting, Kareng Tanralili, Bunker Tallo, Badik Luwu, Badik Sakking, Struktur Batu Manggala, Keris Lamba Tujuh, Cegele (Tombak Gengam), Badik Raja, Keris, Tombak, Parang, Badik Luwu, Keris, Badik Luwuk, Keris Sapukalla, Keris Luwu Luk 3, Kerik Lamba 13, Badik Luwu, Badik Bugis, Menara Mercusuar.

Tabel 2.30
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Kota Makassar Tahun 2019 s.d 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi	0	0	9	10	10
2	Jumlah karya budaya yang diinventarisasi	50	25	14	25	25
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi (1+2)	50	25	23	35	35

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kota Makassar tahun 2024

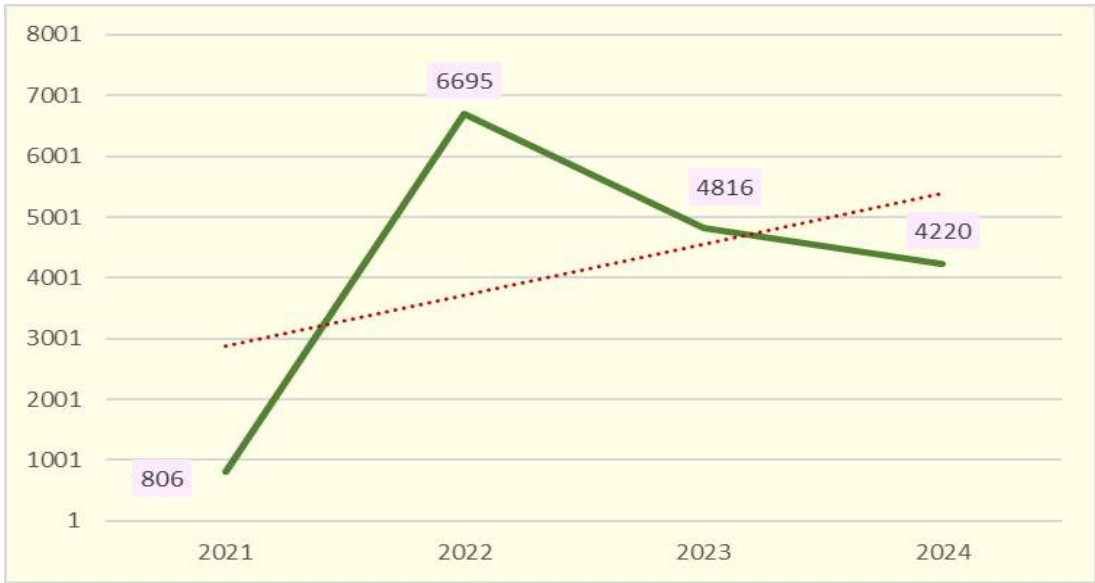
Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi tahun 2024 sebanyak 10 karya budaya seperti : Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang, Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk, Buaya, A' Cini Wattu, A' Jene Sapara Accera Kalompoang, Jumlah karya budaya yang di inventarisasi di tahun 2024 sebanyak 25 yaitu: Manuskrip (Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang, Lontara Kutika), Tradisi Lisan (Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk dan Buaya, Kelong, Cerita Si Lumpuh dan Si Buta, Kondo Buleng, Cerita Monyet dan Kura-Kura, Sinrlik Poosi Tianunung, Sigajang Lalang Lipa). Adat Istiadat (A' Cini Wattu, A' Jene Sapara, Antama Balla, Menre Bola, Appakaramulla), Ritus (Accera Kalompoang, Akbarasanji, Appasili, Maulud), Teknologi Tradisional, Pembuatan Badik, Bumbu), Tahun 2024 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi sebanyak 35.

2.3.2.8. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif

Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang Aktif adalah banyaknya unit usaha yang bergerak di sektor ekonomi kreatif dan masih melakukan kegiatan produksi atau jasa secara berkelanjutan pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur dinamika perkembangan subsektor ekonomi kreatif di suatu wilayah dan mencerminkan sejauh mana sektor ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun untuk Kota Makassar data jumlah industri ekonomi kreatif aktif di Kota Makassar baru tersedia mulai tahun 2021 karena pendataan dan pencatatan resmi melalui sistem terintegrasi OSS/NIB serta basis data ekraf daerah baru dilakukan sejak tahun tersebut.



Grafik 2.79
Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif
Kota Makassar Tahun 2021-2024



Sumber: Data Sektorl Dinas Pariwisata Kota Makassar, Tahun 2025

Grafik diatas menunjukkan jumlah industri ekonomi kreatif (ekraf) yang aktif di Kota Makassar menunjukkan dinamika pertumbuhan yang signifikan namun fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 806 unit usaha, kemudian melonjak tajam menjadi 6.695 unit pada 2022 yang diduga kuat dipengaruhi oleh pemulihan pasca pandemi, masifnya pendataan dan perizinan usaha melalui sistem OSS/NIB, serta peningkatan minat masyarakat pada subsektor ekraf berbasis digital dan kreatif. Namun, pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 4.816 unit dan kembali turun menjadi 4.220 unit pada 2024, yang mengindikasikan adanya proses normalisasi dan konsolidasi usaha dimana sebagian pelaku tidak berlanjut atau kembali ke sektor informal. Meskipun demikian, jumlah ekraf aktif pada 2024 masih lebih dari lima kali lipat dibandingkan tahun 2021, sehingga secara umum menggambarkan adanya ekspansi basis usaha kreatif di Kota Makassar. Fluktuasi ini juga menandakan bahwa pertumbuhan kuantitas belum sepenuhnya diikuti dengan keberlanjutan dan ketahanan usaha, sehingga ke depan diperlukan strategi pengembangan yang menekankan pada penguatan kapasitas pelaku, akses pembiayaan, perluasan pasar, kurasi produk, serta dukungan terhadap ekosistem ekonomi kreatif agar sektor ini tidak hanya tumbuh secara jumlah tetapi juga memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap perekonomian daerah

2.3.2.9. Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital

Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital adalah unit usaha pada subsektor ekonomi kreatif yang dalam proses produksi, distribusi, promosi, atau transaksi usahanya menggunakan sarana digital seperti *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, aplikasi *mobile*, atau *platform* berbasis teknologi informasi lainnya untuk menjangkau pasar dan meningkatkan nilai tambah produk maupun jasa yang dihasilkan. Indikator ini dipakai untuk mengukur sejauh mana pelaku ekraf telah bertransformasi memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama pengembangan usaha dan pemasaran.

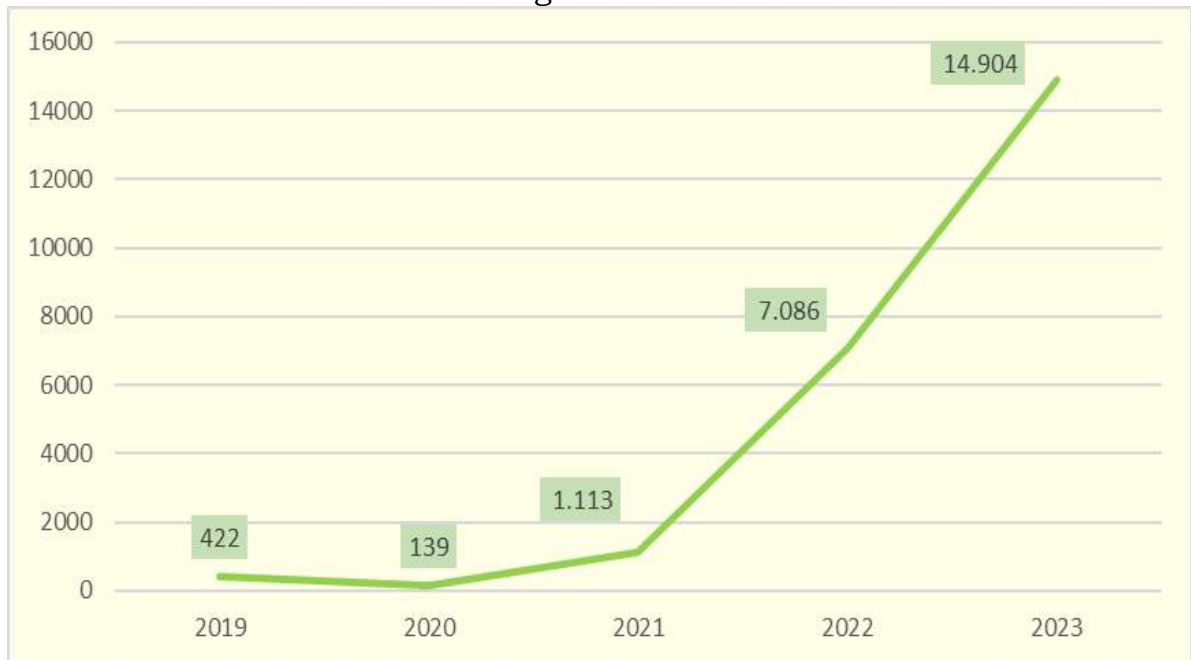
Indikator yang digunakan untuk menghitung indikator ini terdiri atas jumlah industri ekraf yang telah menggunakan platform digital (seperti *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, *website*, atau aplikasi) dibandingkan

dengan jumlah seluruh industri ekraf aktif pada periode tertentu, sehingga menghasilkan proporsi yang menunjukkan tingkat adopsi digital oleh pelaku Ekraf.

2.3.2.10. Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kota Makassar

Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) dalam lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan mencerminkan tren pemulihan serta kebangkitan ekonomi pasca-pandemi. Tren ini mencerminkan keberhasilan program pemulihan ekonomi, meningkatnya semangat kewirausahaan, dan mungkin juga transformasi digital serta kemudahan akses terhadap permodalan dan pasar lokal. Adapun data tahun 2024 akan dirilis di bulan Desember 2025, namun jika melihat tren yang ada, kemungkinan besar juga akan bertumbuh positif.

Grafik 2.80
Jumlah Industri Kecil Menengah Kota Makassar tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2.3.2.11. Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar

Koperasi Sehat adalah koperasi yang memenuhi prinsip-prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan, atau dapat diartikan sebagai koperasi yang dapat memberikan manfaat bagi anggotanya. Koperasi yang sehat dapat dikenali dari: Pembukuan yang transparan, Pertumbuhan anggota yang konsisten, Peningkatan modal, Pelaksanaan rapat anggota setiap tahunnya.



Grafik 2.81
Persentase Jumlah Koperasi Sehat Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Data Sektoral Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Tahun 2025

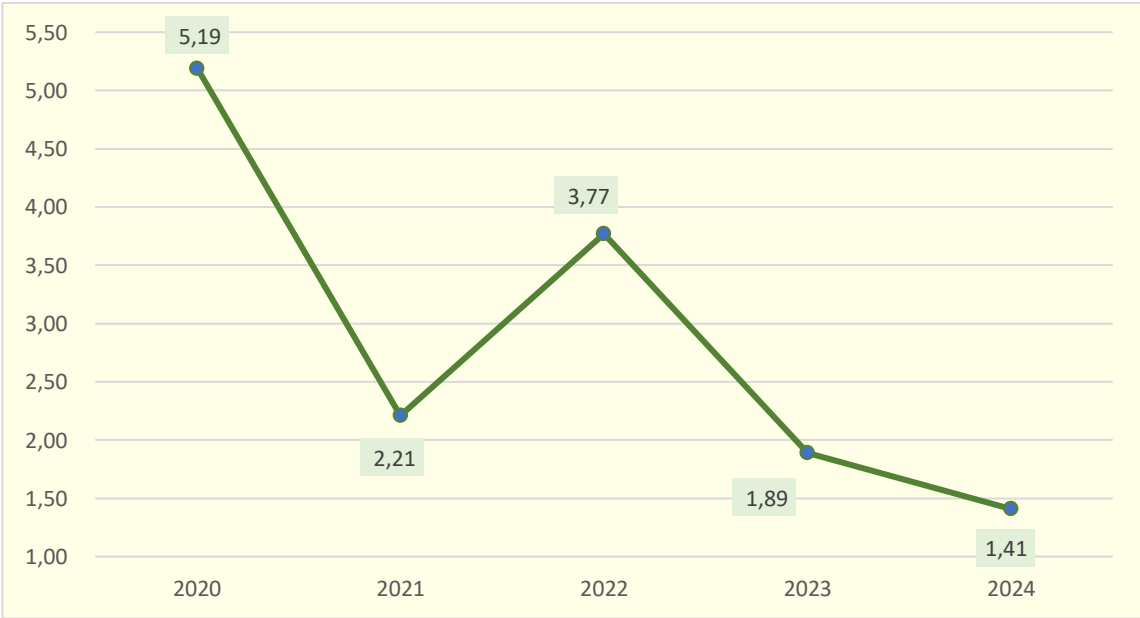
Berdasarkan data lima tahun terakhir, Persentase Jumlah Koperasi Sehat di Kota Makassar mengalami trend peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga tahun 2023, dimulai dari 11,66% pada tahun 2020 naik menjadi 15,39% pada tahun 2021, 19,11% pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya di 22,31 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas koperasi yang berhasil dalam kurun waktu tersebut. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis ke angka 15,65% yang menandakan adanya kemunduran dalam kualitas atau jumlah koperasi yang memenuhi kriteria sehat. Penurunan ini disebabkan berbagai faktor, antara lain jumlah koperasi yang melapor melakukan RAT berkurang, serta jumlah pengawas dan pemeriksa koperasi yang berada di Dinas Koperasi dan UKM berkurang. Anomaly ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan Dinas terkait untuk meninjau kembali kebijakan pembinaan koperasi serta mengidentifikasi penyebab utama penurunan agar keberlanjutan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan tetap terjaga.

2.3.2.12. **Return on Assets (ROA) BUMD**

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. ROA merupakan indikator penting untuk menilai kinerja manajemen perusahaan. ROA dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset, kemudian dikalikan 100. Laba bersih adalah laba setelah membayar pajak. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan profitabilitas dari BUMD adalah Return on Asset (ROA). Semakin besar nilai ROA mengindikasikan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh aset suatu perusahaan yang semakin besar atau dengan kata lain, pemanfaatan asset perusahaan tersebut menjadi semakin produktif.

Kota Makassar memiliki lima BUMD yang terdiri dari: 1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, 2) Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, 3) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya, 4) Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar, dan 5) Perusahaan Daerah (PD) Terminal Makassar Metro.

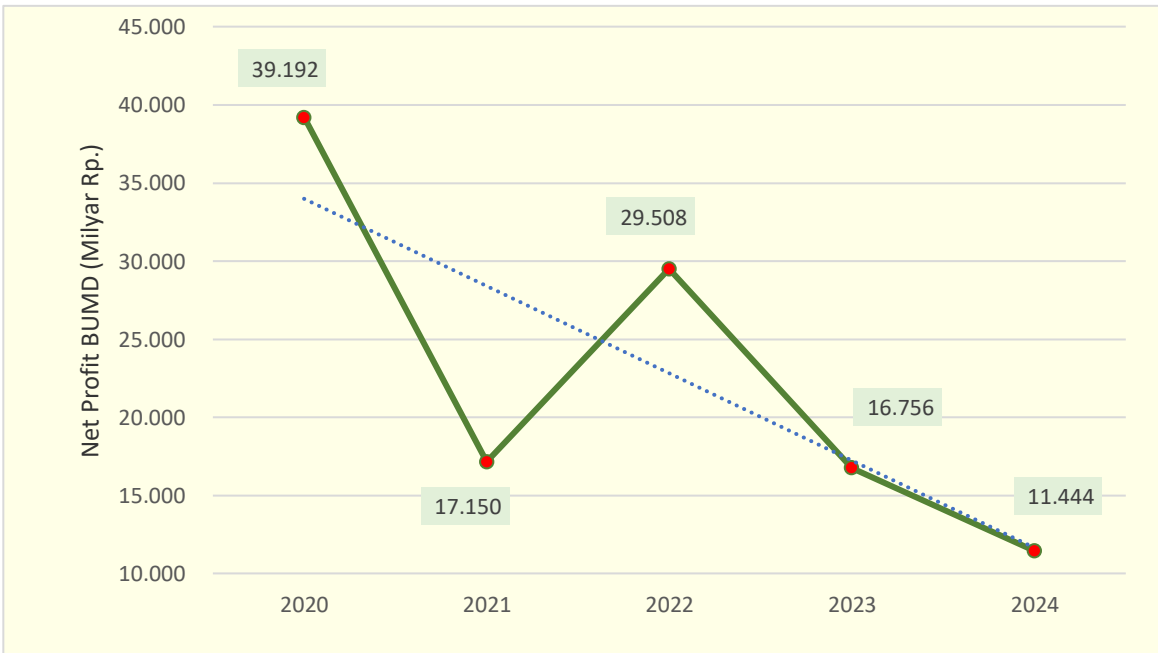
Grafik 2.82
Perkembangan Kinerja ROA BUMD Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Bidang Perekonomian Setda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2025

Return on Assets (ROA) menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Berdasarkan data dari 2019 hingga 2023, tren ROA perusahaan cenderung menurun, dengan penurunan tajam dari 5.69% pada 2019 menjadi 2.21% pada 2021, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap operasional dan profitabilitas. Meskipun ada sedikit pemulihan ke 3.77% pada 2022, ROA kembali turun ke 1.89% pada 2023, yang bisa mengindikasikan tantangan dalam efisiensi aset, meningkatnya beban operasional, atau penurunan profitabilitas. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya tekanan pada kinerja keuangan perusahaan, sehingga perlu analisis lebih lanjut terkait strategi pengelolaan aset dan profitabilitas agar perusahaan dapat meningkatkan ROA di masa depan.

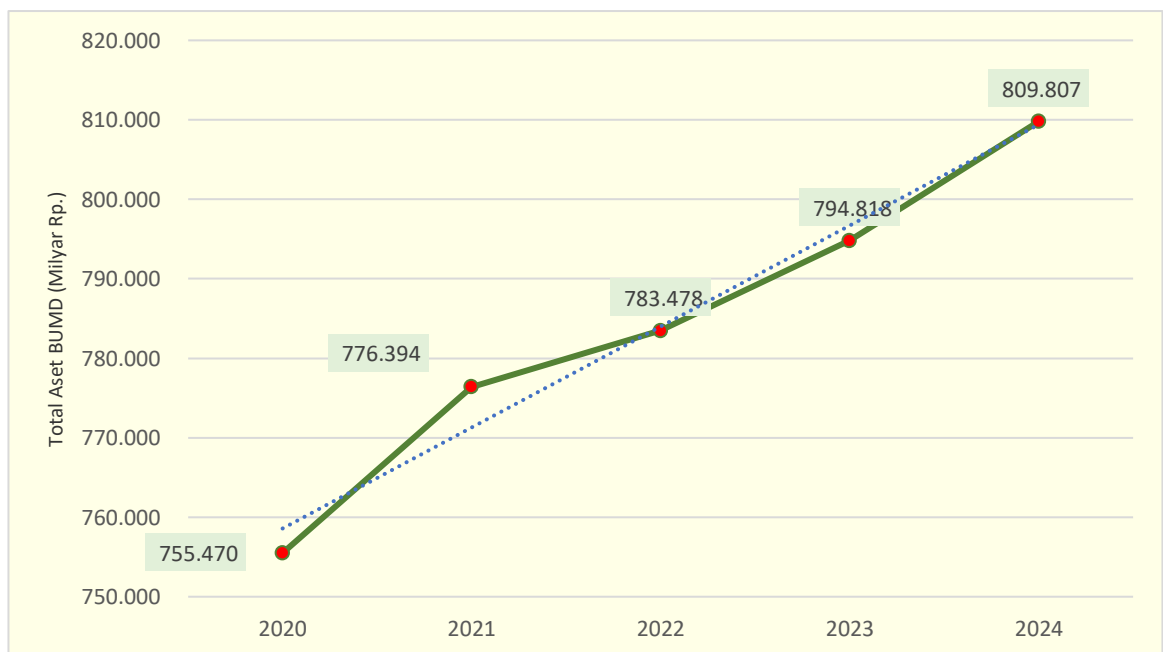
Grafik 2.83
Perkembangan Net Profit BUMD Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Bidang Perekonomian Setda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2025

Perkembangan Net Profit BUMD dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2020, laba bersih BUMD tercatat mencapai Rp. 39.192 juta. Pada 2021, laba bersih BUMD anjlok drastis hingga Rp. 17.150 juta, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yang berakibat pada melemahkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Meskipun terjadi pemulihan pada 2022 dengan laba meningkat ke Rp. 29.508 juta, tren kembali memurun pada 2023 hingga akhir 2024 yang mencatatkan laba sebesar ke Rp. 11.444 juta. Penurunan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya beban operasional, efisiensi yang menurun, atau tekanan ekonomi eksternal seperti inflasi dan kenaikan suku bunga. Untuk membalikkan tren negatif ini, BUMD perlu meningkatkan strategi efisiensi, diversifikasi pendapatan, serta optimalisasi pengelolaan aset dan biaya operasional guna memastikan keberlanjutan profitabilitas di masa mendatang.

Grafik 2.84
Perkembangan Total Aset BUMD Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Bidang Perekonomian Setda Kota Makassar (data diolah), Tahun 2025

Perkembangan total aset BUMD dari 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, meskipun tidak selalu berbanding lurus dengan profitabilitas perusahaan. Pada 2020, total aset tercatat sebesar Rp. 755.470 juta dan terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp. 809.807 juta pada akhir tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan ekspansi aset yang mungkin berasal dari investasi, akuisisi, atau peningkatan modal kerja. Namun, meskipun aset terus bertambah, net profit dan ROA mengalami penurunan, yang dapat mengindikasikan bahwa efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan keuntungan belum optimal. Kemungkinan faktor seperti peningkatan beban operasional, tingginya aset tidak produktif, atau investasi yang belum memberikan hasil optimal perlu dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, BUMD perlu memastikan bahwa pertumbuhan aset diimbangi dengan strategi manajemen keuangan yang lebih efisien agar dapat meningkatkan profitabilitas secara berkelanjutan.

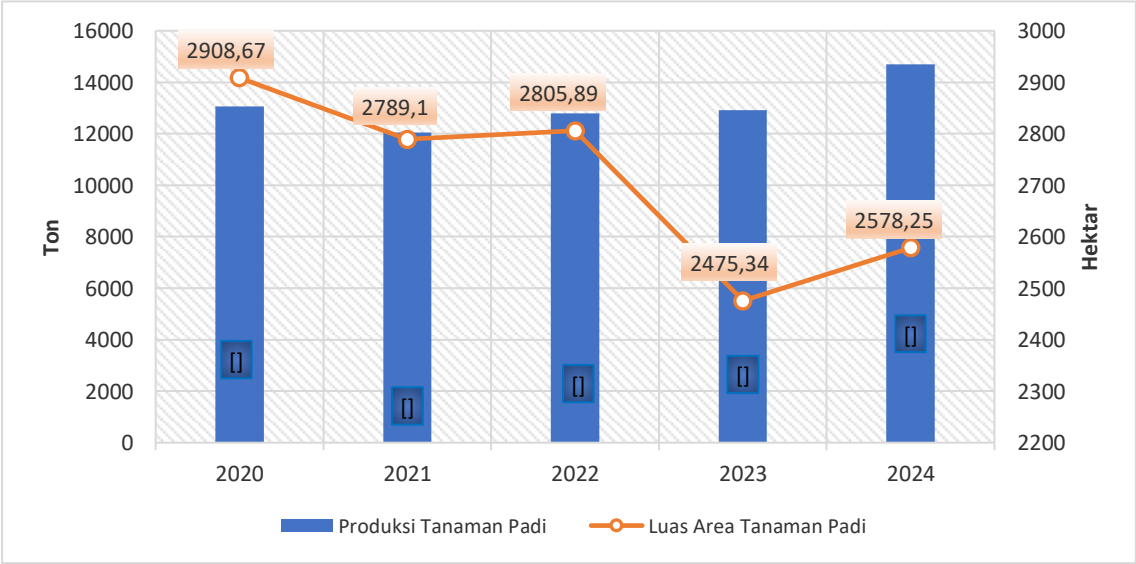
Tren kinerja net profit yang mengalami penurunan cenderung tidak sejalan dengan tren yang ditunjukkan pada nilai total aset BUMD. Tren yang ditunjukkan oleh kinerja laba dalam kurun 2020-2024 cenderung kontraproduktif dengan realisasi nilai total aset BUMD yang cenderung menunjukkan tren peningkatan dalam periode yang sama. Dalam lima tahun

terakhir (2020-2024), nilai rata-rata total aset BUMD Kota Makassar berada di kisaran Rp.783,99 Miliar. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa peningkatan aset yang dimiliki oleh BUMD belum sepenuhnya dapat dioptimalkan dengan baik dalam menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa terdapat pertambahan total asset yang bersifat tidak produktif.

2.3.2.13. Produktivitas Padi

Produktivitas padi merupakan ukuran hasil panen padi per satuan luas lahan dalam periode waktu tertentu, yang umumnya dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha). Dalam proses peningkatan produktivitas padi, terdapat beberapa faktor penting yang saling mempengaruhi dan harus diperhatikan secara seksama. Faktor lingkungan menjadi aspek fundamental yang mencakup ketersediaan air, sistem irigasi yang memadai, tingkat kesuburan tanah, serta kondisi iklim dan cuaca yang mendukung pertumbuhan tanaman padi. Berikut adalah data produktivitas padi periode 2020 – 2024.

Grafik 2.85
Produksi Tanaman Padi dan Luas Area Tanaman Padi
Kota Makassar Tahun 2020 – 2024



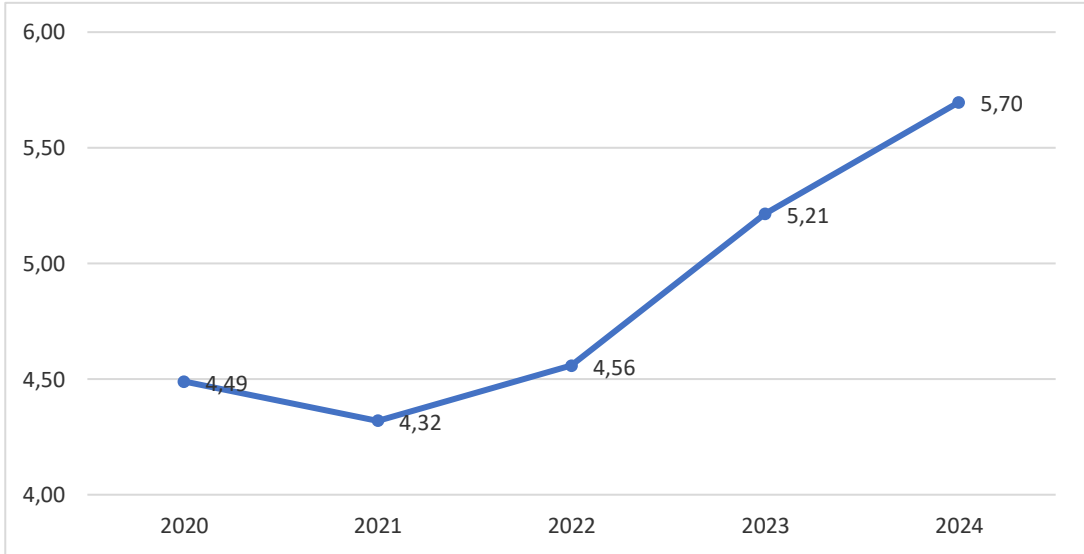
Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Terlihat adanya tren penurunan dari segi produksi tanaman padi maupun luas area tanaman padi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, produksi padi mencapai sekitar 13.055,81 ton dengan luas area tanam sebesar 2.908,67 hektar. Di tahun 2021, terjadi penurunan baik produksi padi menjadi 12.046,39 ton dan luas area tanam menjadi 2.789,1 hektar.

Tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan produksi menjadi 12.788,19 ton, dengan luas area tanam yang juga meningkat menjadi 2.805,89 hektar. Namun, Pada tahun 2023, meskipun produksi meningkat sedikit menjadi 12.907,7 ton, luas area tanam justru mengalami penurunan signifikan menjadi 2.475,34 hektar, yang merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Tahun 2024 menandai lonjakan produksi yang signifikan hingga mencapai 14.687,42 ton, meskipun luas area tanam hanya meningkat sedikit menjadi 2.578,25 hektar. Hal ini menunjukkan efisiensi produksi yang meningkat pesat, dimana dengan luas area tanam yang lebih kecil dibandingkan tahun 2020-2022, Kota Makassar mampu menghasilkan produksi padi tertinggi dalam rentang waktu lima tahun tersebut.

Grafik 2.86
Produktivitas Padi (ton/ha) Kota Makassar Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Produktivitas padi di Kota Makassar menunjukkan tren positif sejak tahun 2022, dengan peningkatan yang cukup signifikan pada dua tahun terakhir (2023-2024). Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi, seperti perubahan iklim, serangan hama, atau perubahan dalam praktik pertanian. Pada tahun 2020, produktivitas padi Kota Makassar mencapai 4,49 ton/ha. Memasuki tahun 2021, terjadi sedikit penurunan produktivitas menjadi 4,32 ton/ha, yang merupakan titik terendah dalam lima tahun terakhir.

Mulai tahun 2022, produktivitas padi mulai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun tersebut, produktivitas naik menjadi 4,56 ton/ha. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dimana produktivitas mencapai 5,21 ton/ha. Puncak produktivitas dicapai pada tahun 2024 dengan angka 5,70 ton/ha, yang menandai peningkatan sangat signifikan sebesar 1,21 ton/ha atau sekitar 26,9%.

2.3.2.14. Produktivitas Perikanan Tangkap

Produktivitas perikanan tangkap adalah ukuran hasil tangkapan ikan yang diperoleh dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam jumlah tangkapan per unit usaha (seperti per kapal, per nelayan, atau per hari melaut). Produktivitas ini mencerminkan efisiensi dan keberhasilan kegiatan penangkapan ikan di suatu wilayah perairan. Semakin tinggi produktivitas, berarti semakin banyak ikan yang berhasil ditangkap dengan sumber daya yang digunakan. Data Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Kota Makassar, tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.87
Volume dan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap
Kota Makassar Tahun 2020- 2024



Sumber : Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (data diolah), Tahun 2025

Pada tahun 2020 – 2023 produksi perikanan tangkap mengalami pertumbuhan yang menjanjikan disebabkan oleh penurunan kasus dan pelonggaran kembali aktivitas melaut pasca pandemi membuat volume produksi perikanan di Kota Makassar kembali meningkat dan sektor ini berhasil bangkit dengan mencatatkan pertumbuhan positif dari -5,93 persen menjadi 5,9 persen dimana volume produksi juga berturut-turut meningkat dari tahun 2020 sebesar 18,76 ribu ton sampai tahun 2023 sebesar 20,77 ribu ton karena Ketersediaan sumber daya ikan yang masih cukup di perairan sekitar Makassar turut mendukung peningkatan hasil tangkapan. Momentum pertumbuhan ini juga tidak lepas dari peran pemerintah dan pelaku usaha yang mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai program pemulihan sektor perikanan, termasuk dukungan fasilitas, peralatan, dan pasar. Namun pada tahun 2024, momentum peningkatan diiringi dengan penurunan volume produksi dari 20,77 ribu ton menjadi 20,6 ribu ton atau menurun sebesar 0,81 persen. Penurunan disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan perairan memburuk, meningkatnya biaya operasional yang menyebabkan efisiensi usaha penangkapan menurun, dan yang paling signifikan adalah perubahan suhu akibat iklim yang merubah arus migrasi ikan sehingga populasi ikan berpindah ke wilayah laut yang lebih dalam atau lebih jauh dari wilayah tangkap tradisional, juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam regulasi atau sistem distribusi yang turut mempengaruhi rantai pasok yang pada akhirnya berdampak pada jumlah produksi perikanan tangkap di Kota Makassar. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas perikanan tangkap di Kota Makassar adalah migrasi ikan yang semakin jauh dari pesisir, yang mengakibatkan biaya produksi yang meningkat. Hal ini terjadi karena ekosistem perairan di sekitar pesisir sudah tidak lagi kondusif bagi ikan untuk bertelur dan mencari makan.

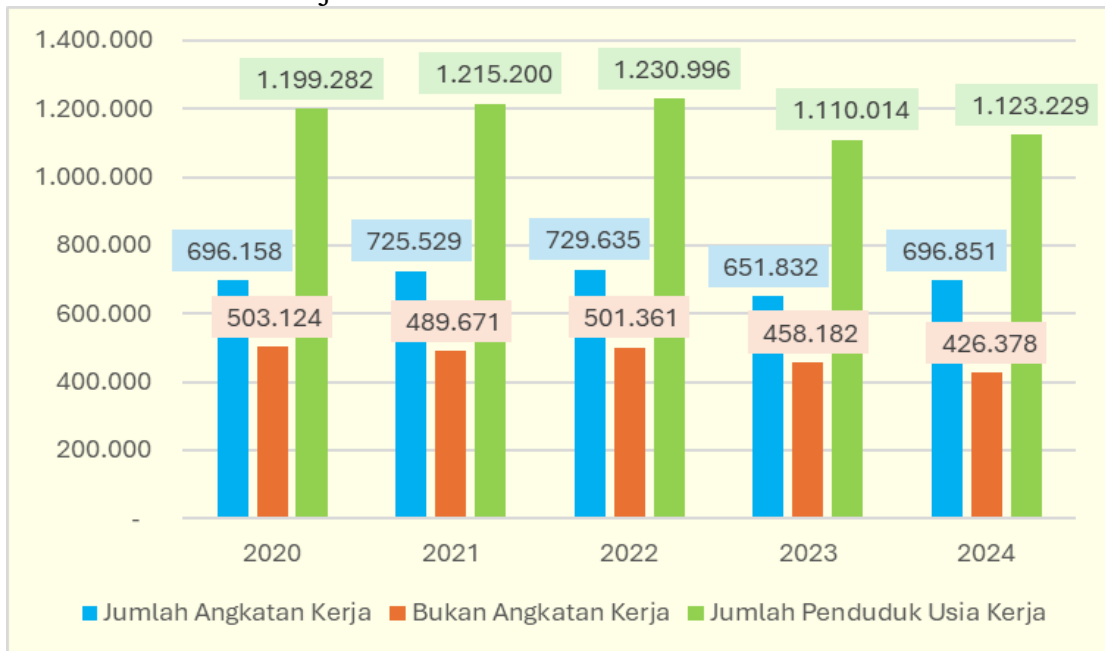
Upaya untuk mengatasi penurunan produktivitas perikanan tangkap di Kota Makassar memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perairan. Langkah-langkah perlindungan terhadap terumbu karang, pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kunci dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang vital bagi Kota Makassar.

2.3.2.15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menjadi ukuran penting yang menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dinamika penawaran tenaga kerja di Kota Makassar selama periode 2019-2024 menunjukkan perkembangan yang substansial. Aspek potensial dari penawaran tenaga kerja, yang tercermin dalam jumlah penduduk usia kerja, yang mengalami pertumbuhan.

Fenomena tersebut mengindikasikan adanya preferensi yang kuat di kalangan penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dibandingkan dengan pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengambil peran sebagai pengelola rumah tangga. Pertumbuhan populasi usia produktif, khususnya dalam rentang 15-64 tahun, dipengaruhi oleh tiga komponen demografis utama: tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pola migrasi.

Grafik 2.88
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja, dan Penduduk Usia Kerja di Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Tahun 2025

Analisis terhadap tren tersebut mengungkapkan bahwa peningkatan substansial dalam penawaran tenaga kerja di Kota Makassar memiliki korelasi kuat dengan intensifikasi arus migrasi masuk selama periode yang diamati. Ekspansi kuantitatif angkatan kerja ini berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan transformasi struktural dalam komposisi ketenagakerjaan di Kota Makassar, yang ditandai dengan peningkatan signifikan dalam proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja.

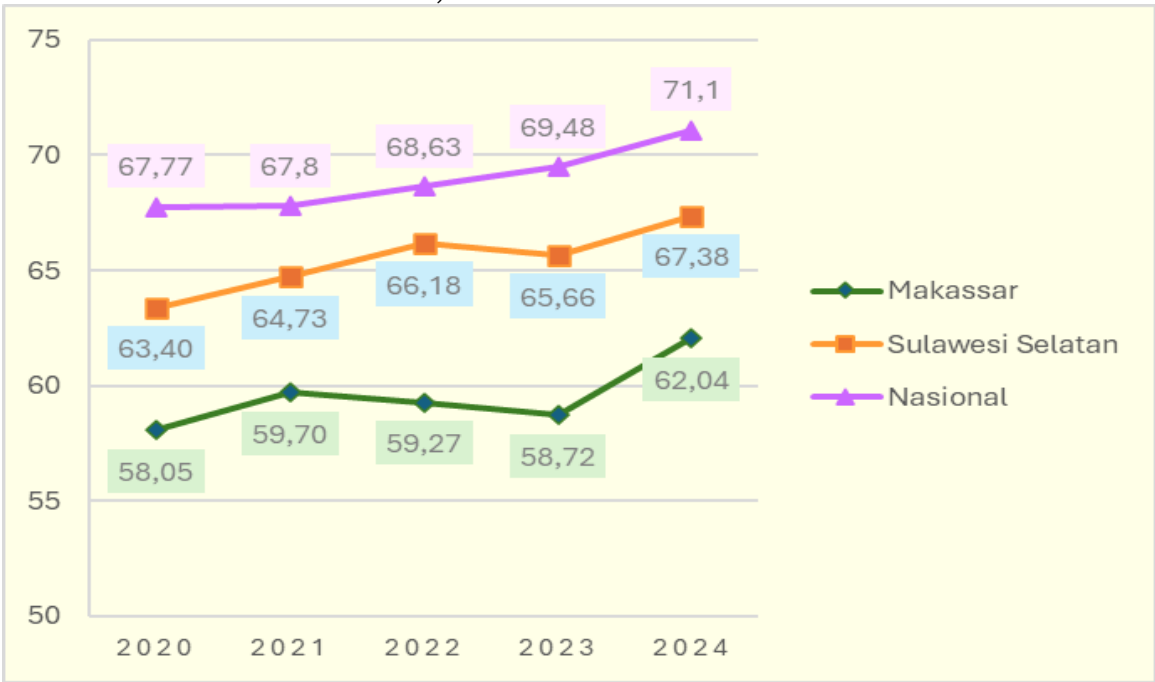
Grafik 2.89
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS & Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, dan diakhiri dengan lonjakan tajam pada tahun 2024. Fluktuasi disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 62,04% karena adanya dorongan kuat dalam keterlibatan angkatan kerja, yang dipicu oleh pemulihan penuh sektor ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta keberhasilan intervensi pemerintah dalam mendorong partisipasi kerja melalui pelatihan, pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi ekonomi lokal.

Grafik 2.90
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Makassar, di
Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

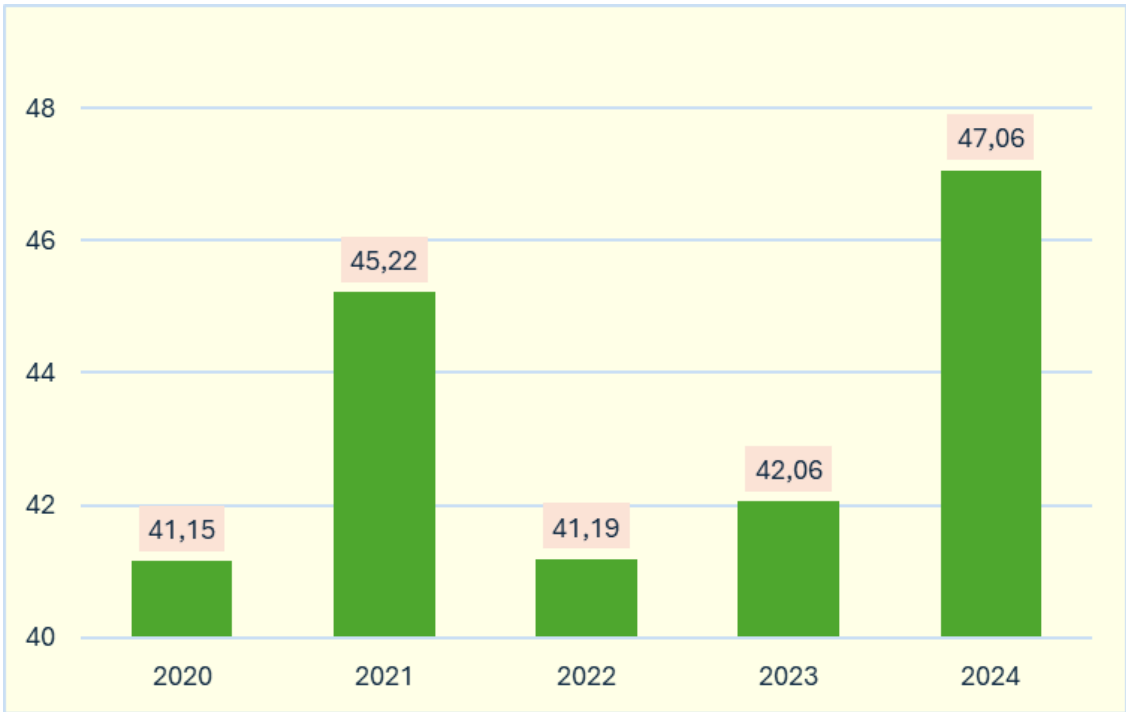
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tingkat Nasional menunjukkan pola peningkatan, namun dengan perbedaan signifikan dalam tingkat pertumbuhan. TPAK Makassar cenderung stagnan di kisaran 58–59% dari 2020 hingga 2023, sebelum melonjak tajam ke 62,04% pada 2024. Sementara itu, Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan yang lebih stabil dari 63,40% (2020) menjadi 67,38% (2024), dan nasional mengalami kenaikan paling konsisten dan signifikan dari 67,77% menjadi 71,10% pada periode yang sama. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa meskipun Makassar sebagai kota besar memiliki potensi tenaga kerja yang besar, partisipasinya masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional, dan baru menunjukkan peningkatan berarti pada 2024, kemungkinan akibat pemulihan ekonomi, ekspansi lapangan kerja, serta program pemberdayaan angkatan kerja di level kota.

2.3.2.16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan merupakan indikator penting yang menggambarkan keterlibatan perempuan dalam pasar tenaga kerja. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi terhadap total populasi perempuan usia kerja, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. TPAK perempuan tidak hanya mencakup mereka yang sudah bekerja, tetapi juga termasuk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. TPAK secara keseluruhan (laki-laki dan perempuan) memiliki selisih 38,0 yakni masing-masing TPAK laki-laki dan perempuan sekitar 58,0 sedangkan TPAK perempuan saja sekitar 40,0. Hal tersebut menunjukkan bahwa TPAK laki-laki adalah dua kali lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Kondisi ini terindikasi bahwa Kota Makassar masih terjadi ketidaksetaraan gender di bidang ketenagakerjaan. Relatif rendahnya TPAK perempuan dibandingkan dengan TPAK laki-laki sangat ditentukan oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan lingkungan, termasuk risiko pekerjaan dan status gender. Status gender yang dimaksud adalah bagi perempuan yang belum menikah kurang termotivasi masuk ke pasar kerja karena faktor budaya dan faktor ekonomi yang masih bisa dihidupi atau ditanggung oleh keluarga (orang tua). Kemudian bagi perempuan yang sudah menikah sangat tergantung pada status perempuan sebagai ibu dalam rumah tangga, sebagai istri, dan sebagai anggota masyarakat sosial. Rendahnya TPAK perempuan boleh jadi disebabkan karena opportunity cost perempuan menikah relatif tinggi daripada upah yang diterima jika perempuan tersebut bekerja di luar rumah, terutama bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak usia balita.



Grafik 2.91
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, tahun 2025

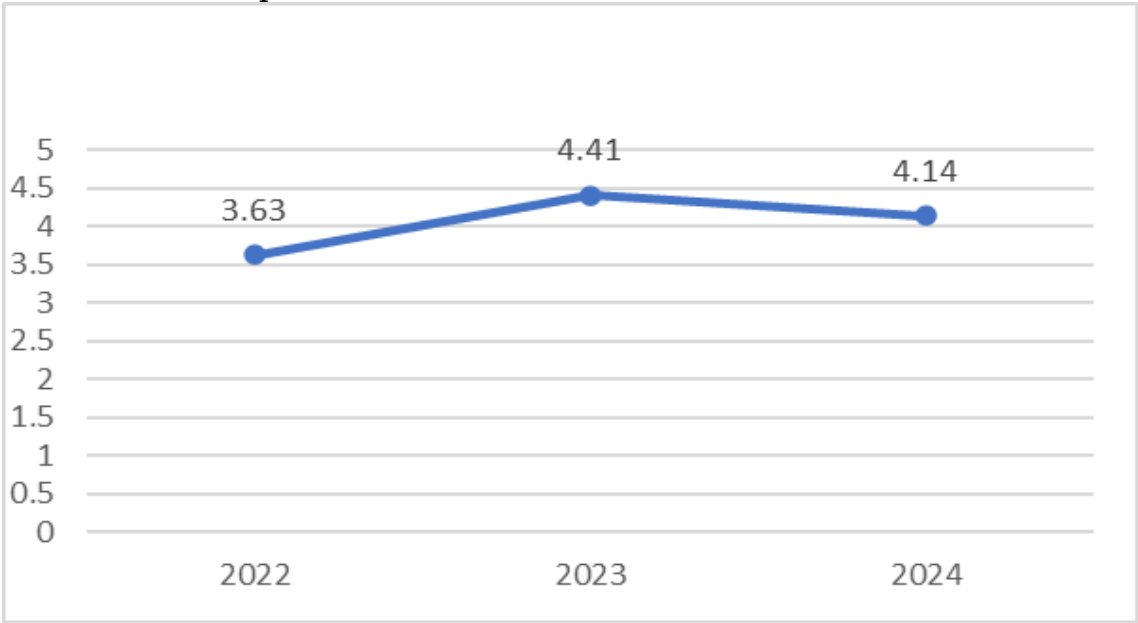
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kota Makassar selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif namun mengarah pada peningkatan signifikan di tahun terakhir. Setelah mengalami naik-turun dalam beberapa tahun, partisipasi perempuan dalam pasar kerja akhirnya menunjukkan perbaikan nyata. Trend ini mencerminkan mulai pulihnya kepercayaan diri dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, kemungkinan sebagai dampak dari membaiknya kondisi ekonomi, meningkatnya akses terhadap peluang kerja fleksibel, serta program pemberdayaan dan pelatihan keterampilan yang semakin menjangkau perempuan di berbagai lapisan masyarakat.

2.3.2.17. Indeks Kapabilitas inovasi

Dalam dua tahun terakhir, indeks kapabilitas inovasi Kota Makassar naik dari tahun 2022 sampai 2023 sebesar 4,41 namun pada tahun 2024 menurun menjadi 4,14. Pemerintah Kota Makassar terus menerus melakukan perbaikan lingkungan inovasi agar terjadi kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda untuk menghasilkan produk inovatif. Pada tahun 2024 ada penambahan indikator penilaian yaitu indikator pengembangan klaster dengan nilai 1,04 yang sebelumnya tidak ada sehingga capaian tahun 2024 ini menunjukkan indeks kapabilitas inovasi Kota Makassar agak menurun dari tahun 2023.



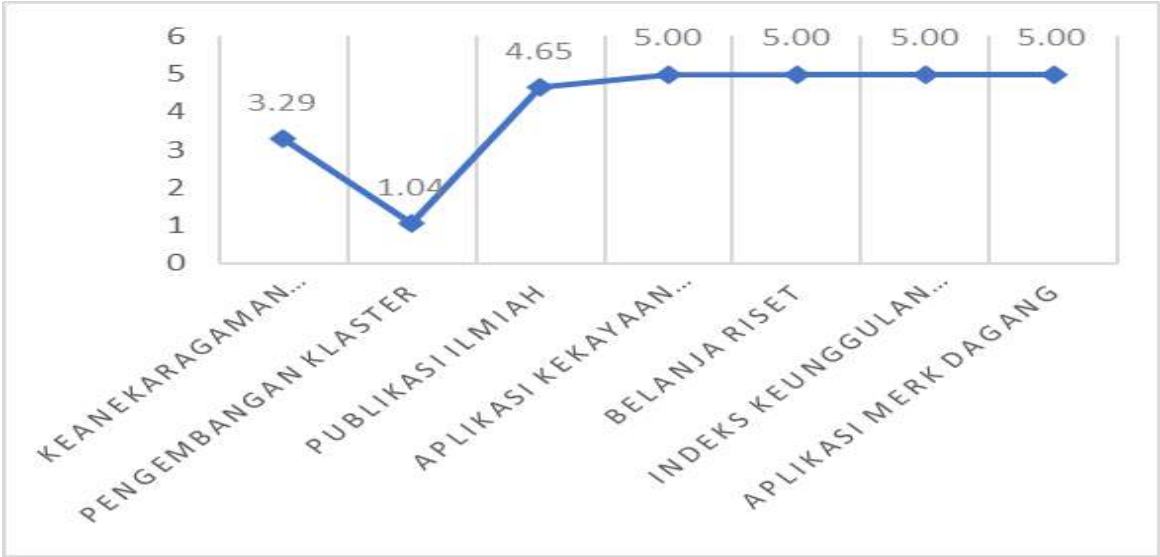
Grafik 2.92
Indeks Kapabilitas Inovasi Kota Makassar Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2024

Tujuh indikator untuk mengukur indeks kapabilitas inovasi, yaitu keanekaragaman tenaga kerja; pengembangan klaster; publikasi ilmiah; aplikasi kekayaan intelektual (KI); belanja riset; indeks keunggulan lembaga riset; dan aplikasi merek dagang. Dari tujuh indikator tersebut, Kota Makassar sudah mendapat nilai ideal (5) untuk empat indikator yaitu aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang, satu indikator publikasi ilmiah dengan nilai 4,65. Namun ada dua indikator yang masih relatif rendah dan sangat strategis yaitu pengembangan klaster 1,04 dan keanekaragaman tenaga kerja 3,29. Keanekaragaman tenaga kerja sangat penting jika sebuah perusahaan atau daerah ingin mendorong inovasi karena keragaman tenaga kerja (dalam hal ide, skill, pengetahuan, budaya dan lain-lain) merupakan pondasi untuk membangun inovasi. Sementara indikator pengembangan klaster ini untuk mengukur jumlah klaster yang dapat terbentuk dari sejumlah industri yang berkembang di wilayah tersebut. Semakin banyak jumlah *cluster* yang terbentuk maka pengembangan klaster makin bagus dan makin banyak industri yang saling terhubung atau berkolaborasi/berinteraksi. Hal ini memperkuat ekosistem inovasi di daerah tersebut. Pengembangan klaster inovasi adalah strategi untuk mendorong peningkatan daya saing dan inovasi melalui kerjasama antar pelaku ekonomi di suatu wilayah. Klaster inovasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk berinovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar.

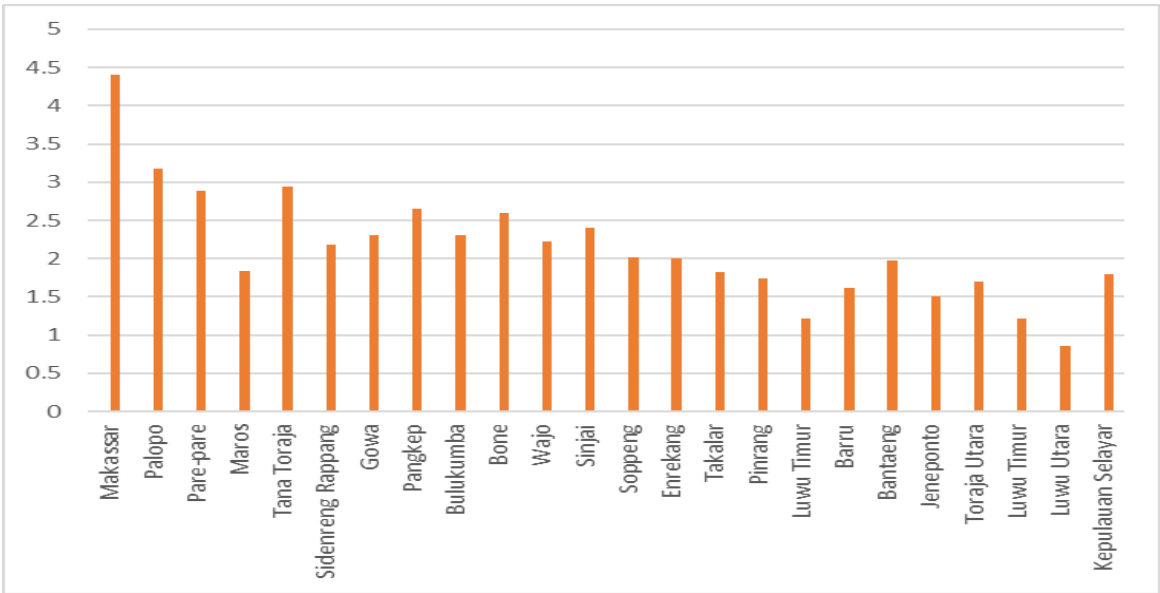
Grafik 2.93
Nilai Komponen Indeks Kapabilitas Inovasi
Kota Makassar Tahun 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2024

Capaian indeks kapabilitas inovasi Kota Makassar tahun 2024 masih pada posisi pertama daerah dengan nilai indeks tertinggi di Sulawesi Selatan dan juga melampaui angka provinsi. Kota Makassar sangat terbantu dengan banyaknya kampus yang menghasilkan lebih banyak penelitian, publikasi, dan merek dagang serta kekayaan intelektual. Kota Makassar termasuk daerah yang memiliki banyak universitas namun tahun 2024 komponen ini mengalami penurunan dan adanya penambahan komponen pengembangan kluster hanya mendapat nilai 1.04, sehingga indeks kapabilitas inovasi menurun. Selain Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Pare-pare, Kabupaten Maros memiliki banyak perguruan tinggi sehingga mereka bisa mencatat angka yang tinggi setidaknya pada indikator publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual. Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Kepulauan Selayar tidak memiliki banyak perguruan tinggi, dan kemungkinan belanja riset dan keragaman tenaga kerjanya juga rendah, sehingga menyebabkan nilai indeksnya lebih rendah.

Grafik 2.94
Indeks Kapabilitas Inovasi Kab/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

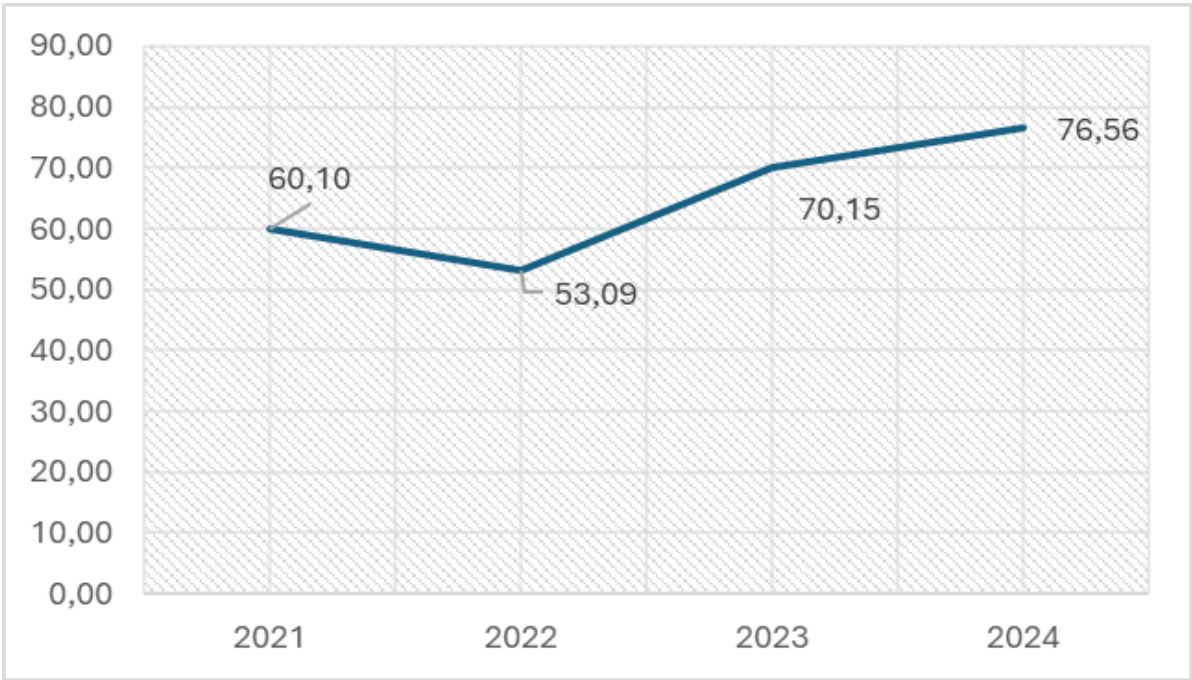


Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2024

2.3.2.18. Indeks Inovasi Daerah

Selama empat tahun terakhir, Kota Makassar berhasil mencatat angka indeks inovasi daerah yang cenderung naik. Tahun 2021, angka indeks Makassar sudah mencapai 60,1 atau termasuk kategori “sangat inovatif”, tapi setahun kemudian turun ke 53,09 atau kategori “inovatif”, tahun 2023 mendapat nilai sebesar 70,15. Memasuki tahun 2024, Kemendagri memberikan nilai indeks inovasi daerah ke Kota Makassar sebesar 76,56, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Capaian tersebut kembali menjadikan Kota Makassar sebagai daerah yang “sangat inovatif”.

Grafik 2.95
Indeks Inovasi Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2024

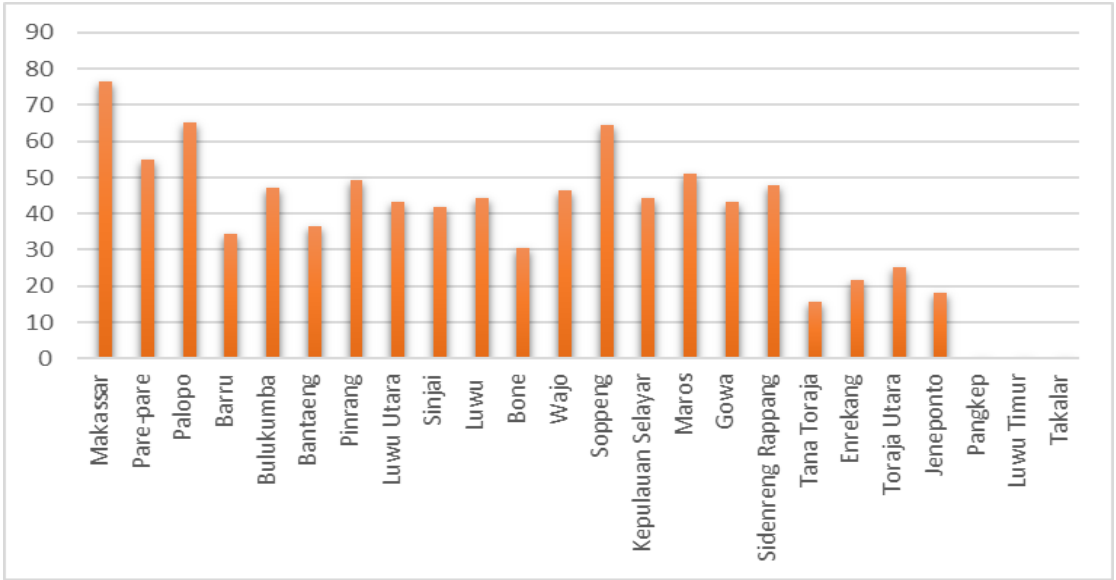


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2025

Kenaikan nilai indeks di tahun 2024 tidak hanya mengembalikan predikat Kota Makassar sebagai daerah yang sangat inovatif, tapi juga menempatkannya sebagai daerah dengan indeks inovasi daerah tertinggi di Sulawesi Selatan. Hanya ada tiga daerah yang masuk kategori sebagai daerah “sangat inovatif” di Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kabupaten Soppeng, sebagian besar masih dalam kategori “inovatif”. Tak hanya tinggi secara relatif di Sulawesi Selatan, indeks inovasi daerah Kota Makassar juga termasuk tinggi jika dikomparasi dengan kategori kota. Dari 93 kota yang dinilai oleh Kemendagri, posisi indeks inovasi Kota Makassar berada pada peringkat ke-10. Karena capaian tersebut, Kemendagri memberikan penghargaan kepada Kota Makassar pada ajang *Innovative Government Award* (IGA) 2024.



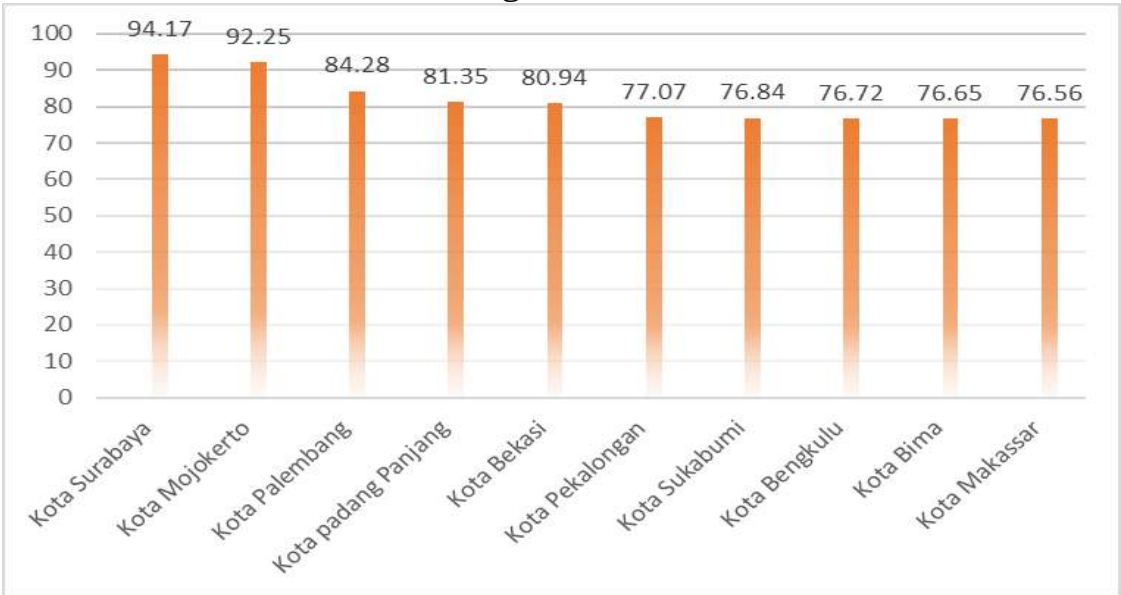
Grafik 2.96
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2025

Meski berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kota inovatif, indeks inovasi Kota Makassar masih relatif lebih rendah dibandingkan beberapa kota lainnya. Secara nasional, Kota Makassar berada pada peringkat ke sepuluh daerah dengan indeks inovasi tertinggi pada kategori kota, masih tertinggal dari sembilan daerah lainnya. Daerah yang memiliki indeks inovasi paling tinggi dan menempati peringkat pertama adalah Kota Surabaya dengan nilai indeks 94,17.

Grafik 2.97
Perbandingan Indeks Inovasi Daerah
Kota Makassar dengan Kota Lain Tahun 2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2025

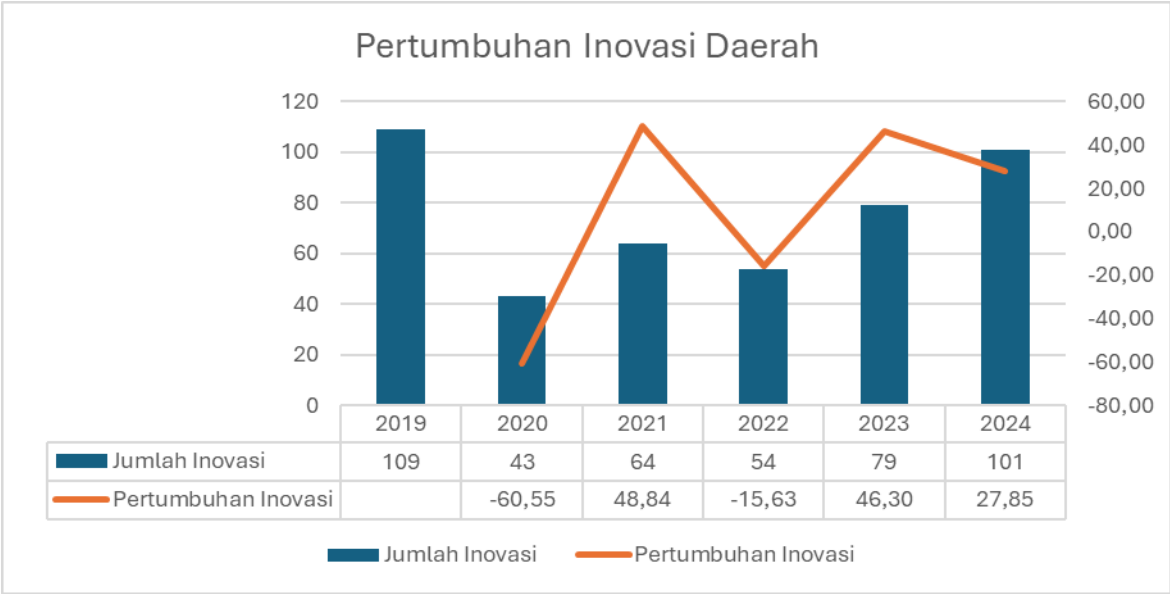
Sembilan daerah lain yang memiliki indeks inovasi lebih tinggi dari Kota Makassar adalah Kota Surabaya, Mojokerto, Palembang, Padang Panjang, Bekasi, Pekalongan, Sukabumi, Bengkulu dan Bima. Kesembilan kota ini juga memiliki inovasi yang lebih banyak dibandingkan Kota Makassar. Jika membandingkan antara Kota Makassar dan kota lainnya yang memiliki indeks inovasi lebih tinggi, kota-kota tersebut tidak hanya memiliki kuantitas inovasi

lebih banyak, tapi juga inovasi mereka ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang sangat berdampak terhadap masyarakat. Membandingkan Kota Makassar dengan daerah lain yang memiliki indeks inovasi lebih tinggi, dapat membuat pemerintah kota melakukan perbaikan di masa depan dengan meningkatkan kuantitas inovasinya, juga kualitas inovasinya juga harus lebih mengarahkan manfaat inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

2.3.2.19. Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah

Grafik di atas menunjukkan jumlah inovasi daerah di Kota Makassar tahun 2020 meningkat dari 43 menjadi 64 inovasi yang terealisasi pada tahun 2021 dengan persentase peningkatan sebesar 48,84%. Namun demikian terjadi penurunan jumlah inovasi pada tahun 2022 yaitu hanya 54 inovasi yang terealisasi atau menurun 15,63%. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari menurunnya aktivitas pemerintahan pasca pandemi Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah inovasi yang terealisasi kembali meningkat sebanyak 79 atau terjadi peningkatan sebesar 46,30%. Pada tahun 2024 jumlah inovasi terus meningkat menjadi 101 inovasi dengan persentase kenaikan 27,85%.

Grafik 2.98
Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah Kota Makassar
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar, Tahun 2025

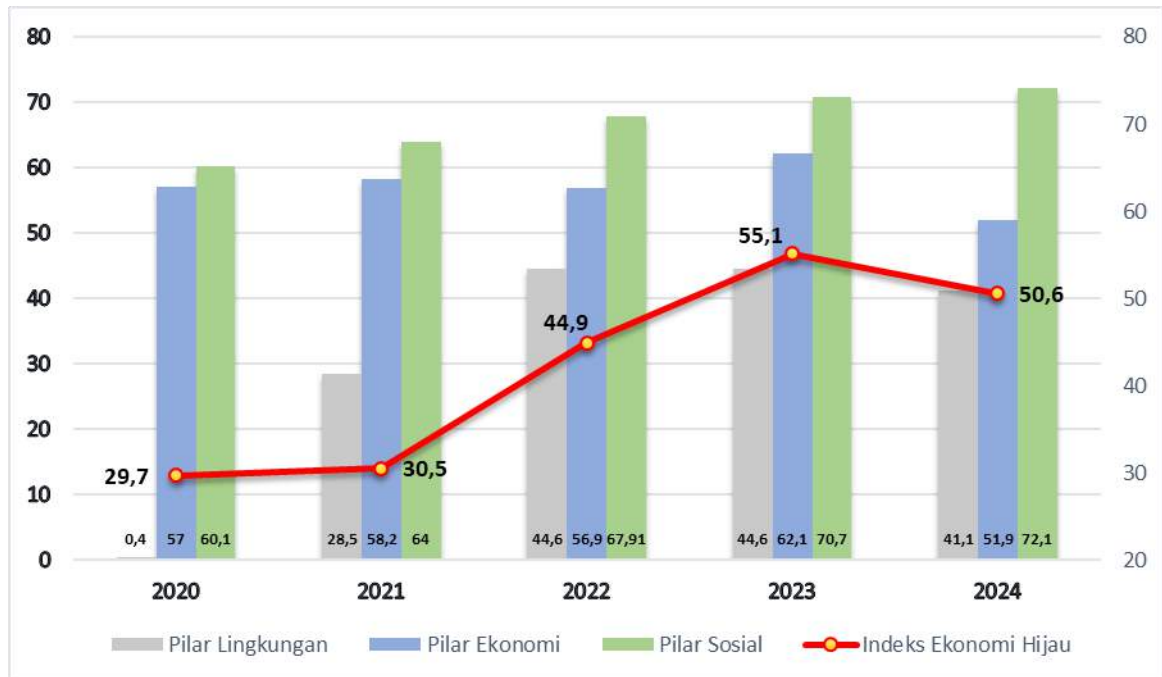
Peningkatan inovasi di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keinginan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu ketersediaan peluang untuk berinovasi juga menjadi pemicu termasuk dengan adanya Penghargaan IGA (*Innovative Government Award*) yang memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, dan pembangunan daerah melalui berbagai inovasi daerah. Penghargaan ini juga meningkatkan semangat inovasi di berbagai level pemerintahan, sehingga terwujud perubahan positif yang berdampak nyata. Peningkatan inovasi daerah memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya saing, daya tahan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup. Inovasi juga membantu daerah dalam mengatasi permasalahan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Dalam 5 tahun terakhir, efektivitas transformasi ekonomi hijau di Kota Makassar menunjukkan peningkatan yang positif, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Ekonomi Hijau yang terus meningkat dari tahun 2022 pada nilai 29,7 dan tahun 2024 pada nilai indeks 50,6 atau meningkat sebesar 20,9 poin. mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan berkelanjutan yang meliputi pilar lingkungan, ekonomi dan sosial.

Grafik 2.99
Indeks Ekonomi Hijau
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025 (Data Diolah)

Pilar lingkungan masih menghadapi tantangan signifikan terkait beban pencemar pada badan air dan udara. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas lingkungan yang terus berjalan meskipun belum sepenuhnya optimal.

Pilar ekonomi menghadapi tantangan yang lebih kompleks, terutama dengan menurunnya produktivitas tanaman padi dan perikanan budidaya, serta penurunan produktivitas tenaga kerja di sektor jasa. Meskipun demikian secara keseluruhan sektor ekonomi tetap menunjukkan tren positif dan berada pada kategori baik tier-1 dalam 5 tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat hambatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, masih menjadi prioritas utama.

Pilar sosial juga mengalami perbaikan dengan indikator rata-rata lama sekolah yang meningkat, angka harapan hidup yang membaik, serta tingkat pengangguran yang menurun. Namun masih menghadapi tantangan masih tingginya tingkat kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Secara keseluruhan pilar sosial berada pada kategori baik tier-2 yang mencerminkan adanya perkembangan dalam pembangunan bidang sosial, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan.

2.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

Indeks Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai skor 80,86. Dari 3 pilar pembentuk indeks ini, pilar sosial memiliki skor tertinggi sebesar 85,5 diikuti oleh pilar ekonomi 52,0 dan pilar lingkungan 50,2.



Dengan capaian tersebut menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan IBEI (Indonesia Blue Economy Index) tertinggi di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini memberikan indikasi pentingnya peran kegiatan ekonomi berbasis ekosistem akuatik. Indeks ini menunjukkan luasnya peluang Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun sektor-sektor ekonomi biru guna peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemulihan ekosistem akuatik.

Sejalan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, Indeks Ekonomi Biru Kota Makassar telah mencapai skor 78, menjadikannya urutan ke 7 dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang memiliki skor IBEI tertinggi pada tahun 2023. Dari beberapa pilar pembentuk indeks tersebut, pilar sosial memiliki skor tertinggi sebesar 81,5 diikuti oleh pilar ekonomi 57,3 dan pilar lingkungan 55,8. Skor IBEI untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.31

Skor IBEI Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2023

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Pilar 1: Ekonomi	Pilar 2: Sosial	Pilar 3: Lingkungan	Skor
Sulawesi Selatan	52,0	85,5	50,2	80,86
Kota Makassar	57,3	81,5	55,8	78,0

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Belum optimalnya capaian pilar ekonomi diantaranya disebabkan oleh masih terbatasnya diversifikasi produk hasil laut dan nilai tambah (hilirisasi), Infrastruktur pelabuhan dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang belum sepenuhnya modern, dan keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi bagi pelaku UMKM sektor kelautan.

Kemudian pada pilar lingkungan, capaiannya belum optimal diantaranya disebabkan oleh pencemaran laut dari limbah rumah tangga dan industri masih tinggi, rehabilitasi ekosistem laut (terumbu karang dan mangrove) belum menjangkau seluruh wilayah dan minimnya penggunaan teknologi pengolahan limbah dan sistem pemantauan kualitas air laut. Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pilar ekonomi dan lingkungan untuk mendukung peningkatan sektor ekonomi biru di masa depan.

Secara umum hasil capaian indeks ekonomi biru didukung oleh posisi Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan di wilayah ini. Selain itu, Kota Makassar juga memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi biru. Potensi ini dapat dianalisis berdasarkan tiga pilar IBEI:

1. Pilar Ekonomi: 1). Pelabuhan dan Logistik, 2) Pariwisata Bahari, 3) Perikanan dan Akuakultur
2. Pilar Sosial: 1). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2) Inklusi Sosial
3. Pilar Lingkungan: 1). Konservasi Laut, 2) Pengelolaan Limbah

Untuk meningkatkan skor IBEI, Kota Makassar dapat mempertimbangkan langkah-langkah strategis berikut:

- Pengembangan SDM: Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan keterampilan di sektor kelautan.
- Inovasi Teknologi: Mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.
- Kemitraan Multisektor: Membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi

- program ekonomi biru.
- Penguatan Infrastruktur: Meningkatkan fasilitas pelabuhan dan transportasi laut untuk mendukung kegiatan ekonomi biru.

2.3.4. Transformasi Digital

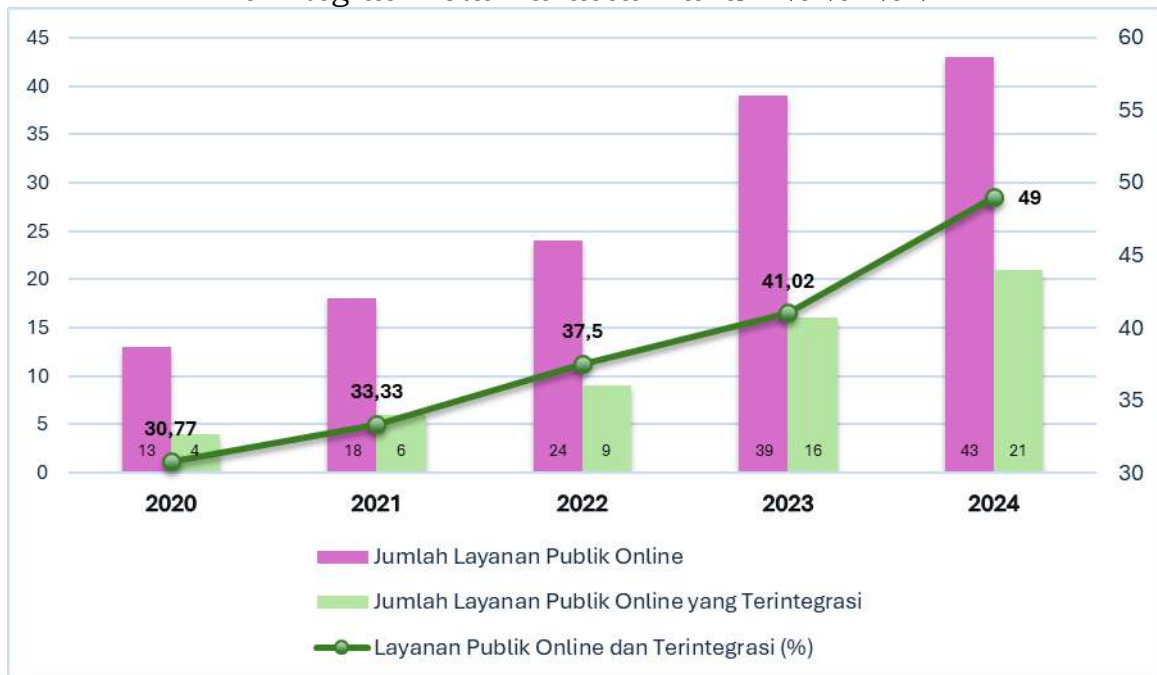
2.3.4.1. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, layanan publik di Kota Makassar mengalami peningkatan dalam aspek digitalisasi. Namun hingga tahun 2024 hanya 49% layanan publik yang telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi, yaitu sebanyak 21 dari 43 layanan publik online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam digitalisasi layanan, masih terdapat tantangan dalam integrasi sistem dan interoperabilitas antar aplikasi.

Salah satu faktor utama yang menghambat integrasi layanan adalah kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dan pengembangan aplikasi yang dilakukan secara terpisah tanpa memperhatikan interoperabilitas, sehingga menyebabkan kesulitan dalam menyatukan berbagai sistem yang saling terkait. Untuk hal tersebut perlu ditingkatkan koordinasi, peningkatan kualitas infrastruktur dan sumberdaya manusia di bidang TIK, sehingga dapat mengoptimalkan pengembangan pelayanan publik secara online serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah secara efisien dan efektif.

Grafik 2.100

Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi Kota Makassar Tahun 2020-2024



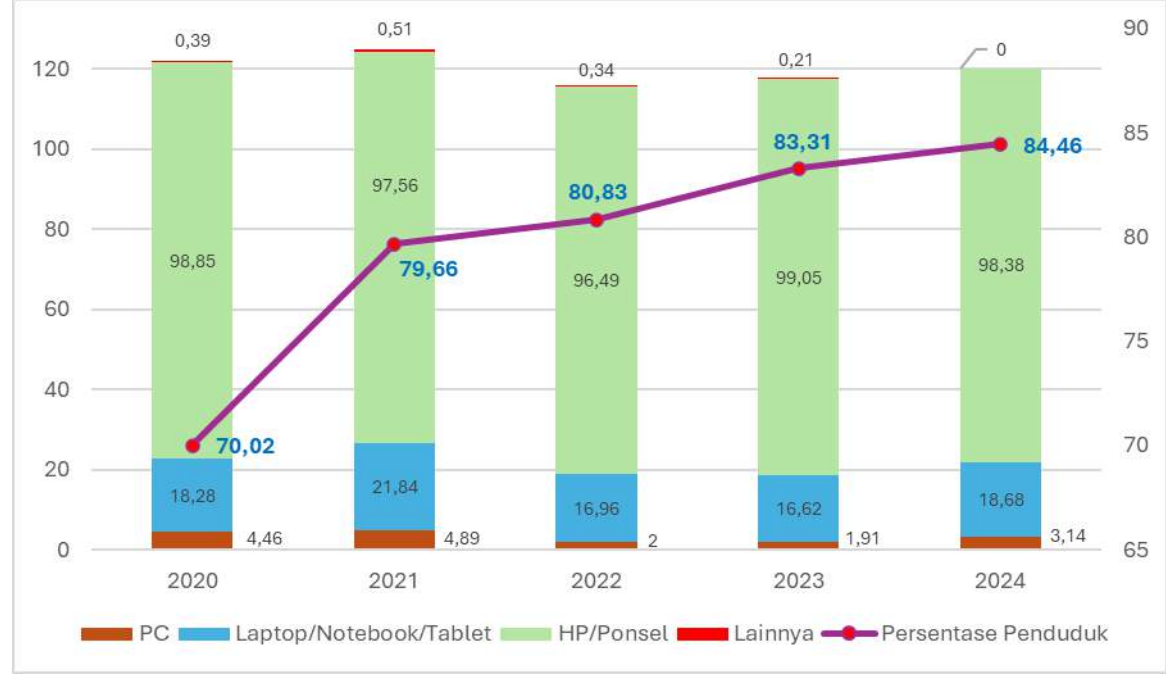
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Tahun 2025

Pengembangan layanan publik terintegrasi dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, masih menjadi tantangan dimana umumnya masyarakat belum mengetahui saluran yang sesuai untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian aspirasi yang tersebar di berbagai media masih terkendala untuk mengetahui tindak lanjutnya, dan layanan publik secara luar jaringan (luring) dianggap kurang efisien dalam hal waktu dan biaya. Pengembangan layanan publik digital didukung ketersediaan jaringan internet di seluruh wilayah kota atau dengan kata lain 100% wilayah tercover jaringan internet dari beberapa



provider yang beroperasi di wilayah Kota Makassar. Selain itu berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat dalam 5 tahun terakhir, persentase penduduk yang menggunakan internet berada pada angka lebih dari 70% pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 84,46% pada tahun 2024.

Grafik 2.101
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet pada Berbagai Media di Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, Tahun 2024

Grafik diatas menggambarkan bahwa diatas 80% masyarakat Kota Makassar telah menggunakan jaringan mobile untuk mengakses internet dari mana saja, selebihnya mengakses internet pada perangkat menggunakan kabel. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia pada Tahun 2024 Kota Makassar berada pada angka indeks 51,09 dengan kategori tinggi. Dari pilar keterampilan digital masyarakat, dengan skor keterampilan digital 58,80, menggambarkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi di ranah digital, memiliki kemampuan menggunakan kata kunci yang tepat dalam pencarian dan mengolah informasi sesuai kebutuhan, kemampuan berpikir kritis merespon informasi di media digital, kemampuan menghubungkan perangkat ke jaringan internet dan mengoperasikan perangkat mobile, serta menyadari pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Dengan didukung oleh infrastruktur digital yang telah menjangkau seluruh wilayah kota, tingginya tingkat penggunaan internet oleh masyarakat, serta kecakapan digital yang memadai, pengembangan *super platform* layanan publik merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan keterpaduan layanan, efektivitas penyampaian aspirasi, dan efisiensi pelayanan publik. Keberadaan platform digital yang terintegrasi akan menjadi solusi strategis dalam membangun komunikasi dua arah yang transparan, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan di era digital.

2.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
2.3.5.1. Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok

Berdasarkan data harga pangan yang dirilis oleh Pusat Informasi Harga

Pangan Strategis (PIHPS), secara umum koefisien variasi harga antar waktu Kota Makassar dalam kurun empat tahun terakhir (2020-2023) menunjukkan tren peningkatan, walaupun tingkat yang masih moderat. Hal ini mengindikasikan kecenderungan terjadinya peningkatan gejolak harga pangan dari tiap tahunnya dalam kurun 2020-2023. Koefisien variasi harga antar waktu yang paling tinggi tercatat pada Tahun 2020 dengan nilai 10,94%.

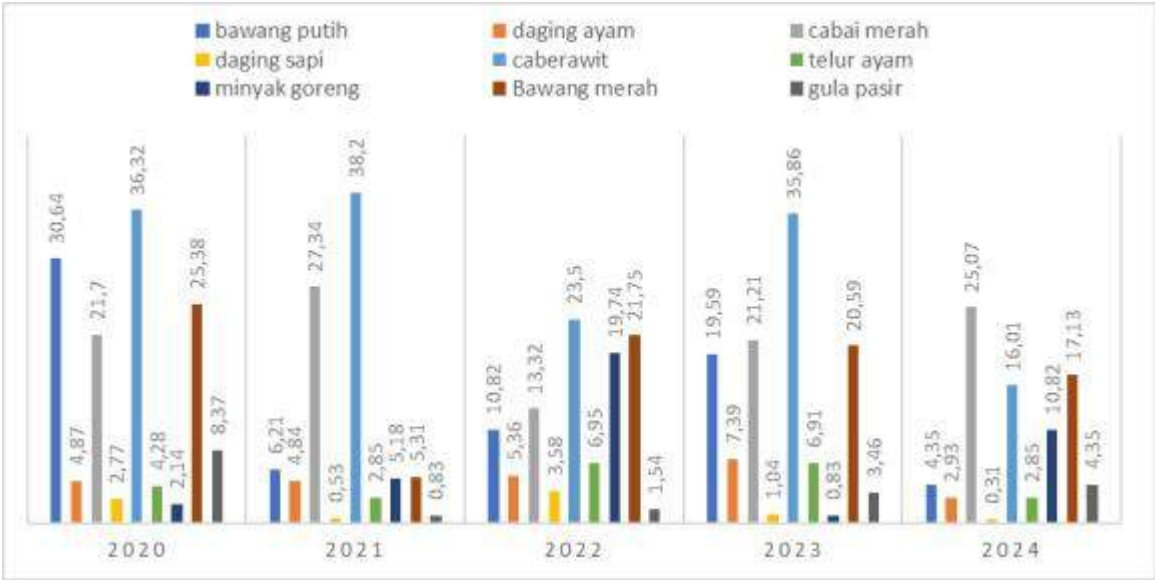
Grafik 2.102
Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Tahun 2024 (data diolah)

Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi gejolak harga yang cukup signifikan di masa Pandemi Covid-19. Meskipun di tahun berikutnya (2021) koefisien variasi harga antar waktu sempat menurun pada level 8,05%, di dua tahun berikutnya nilai koefisien selalu mencatatkan di atas angka 10%, dan berada di kisaran 10,5 – 10,6%.

Grafik 2.103
Tren Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kota Makassar berdasarkan
Komoditas Tahun 2020 - 2024



Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), diolah, Tahun 2024

Sementara itu, Berdasarkan data Koefisien Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren

peningkatan volatilitas harga yang cukup signifikan selama periode tersebut. Pada tahun 2020, koefisien variasi sebesar 10,94% menunjukkan tingkat fluktuasi harga yang relatif moderat. Namun, sejak tahun 2021 dan seterusnya, tingkat volatilitas ini mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 10,62% dan sedikit menurun pada 2023 menjadi 10,53%. Yang menjadi perhatian utama adalah Pada tahun 2024, koefisien variasi harga antar waktu untuk barang kebutuhan menurun menjadi 8,56%, menunjukkan adanya peningkatan stabilitas harga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk upaya pengendalian pasokan dan distribusi barang yang lebih efektif, sehingga fluktuasi harga menjadi lebih terkendali. Selain itu, langkah-langkah kebijakan pemerintah, seperti pengendalian harga, subsidi, dan cadangan strategis, berperan penting dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, mengurangi volatilitas yang terjadi di masa-masa sebelumnya.

Selain faktor kebijakan, kondisi ekonomi nasional yang semakin membaik dan inflasi yang terkendali turut berkontribusi terhadap penurunan variasi harga. Pasokan barang yang cukup dan permintaan yang stabil juga membantu mengurangi ketidakpastian harga di pasar. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor kebijakan yang tepat dan kondisi ekonomi yang kondusif memungkinkan terjadinya penurunan koefisien variasi harga, sehingga menunjukkan tingkat stabilitas yang lebih baik dalam harga barang kebutuhan pokok di tahun 2024.

2.3.5.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Investasi merupakan salah satu kunci utama dalam menggerakkan perekonomian Kota Makassar. Aktivitas investasi dapat dianalisis melalui nilai pembentukan modal tetap Bruto (PMTB) sebagaimana tercermin dalam PDRB menurut penggunaan. BPS mencatat bahwa nilai pembentukan modal tetap Bruto (PMTB) selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana dari Rp 10,13 triliun menjadi Rp 105,81 triliun. Peningkatan aktivitas investasi didorong oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan infrastruktur, kebijakan penciptaan iklim investasi, daya beli masyarakat, dan beberapa faktor lain.

Grafik 2.104

Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Makassar, Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

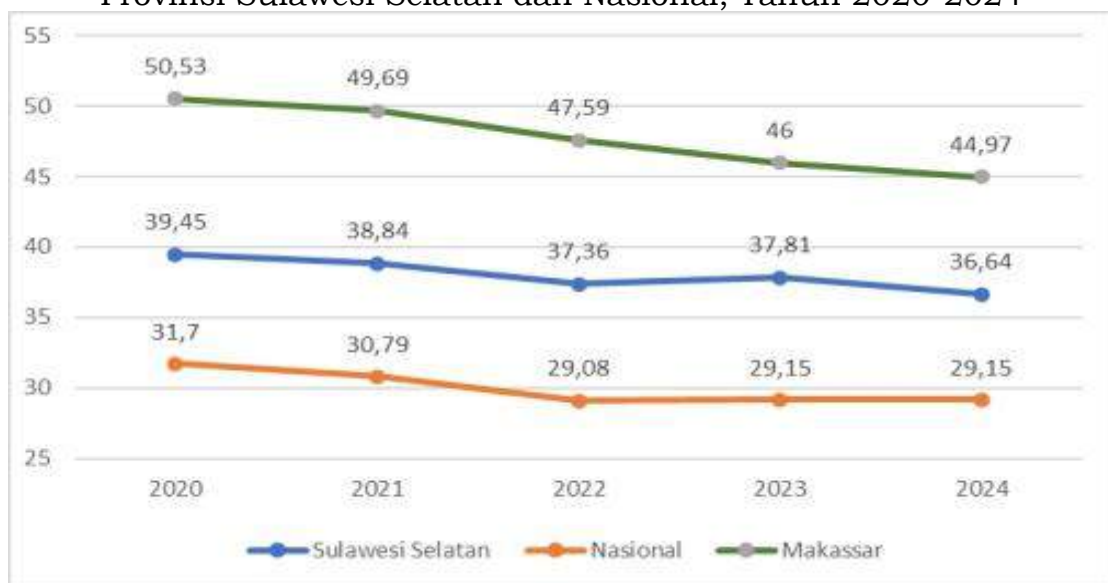
Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat sebesar 85 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5,35%. Selama periode 2020 hingga 2024, nilai PMTB menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, mencapai 109 pada tahun 2024. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan tahunan relatif stabil, yaitu 4,95% dan 5,14%, yang menunjukkan adanya investasi yang cukup konsisten. Di tahun 2023, terjadi lonjakan pertumbuhan sebesar 6,42%, menandai peningkatan investasi yang cukup signifikan dan menunjukkan adanya dorongan ekonomi yang kuat.

Meskipun tingkat pertumbuhan tahunan menurun di tahun 2024 menjadi 3,31%, nilai PMTB tetap meningkat dari 105 Triliun di tahun 2023 menjadi 109 triliun di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju pertumbuhan relatif melambat, akumulasi investasi tetap berlangsung, yang mendukung pertumbuhan nilai total PMTB secara positif. Perubahan ini mencerminkan adanya stabilitas dalam pengembangan modal tetap dengan tren peningkatan nilai yang berkelanjutan, menunjukkan bahwa investasi tetap menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, perbandingan data dari tahun 2020 ke 2024 menunjukkan bahwa meskipun tingkat pertumbuhan tahunan mengalami fluktuasi dan penurunan di tahun terakhir, nilai total PMTB tetap menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari 85 Triliun menjadi 109 Triliun. Hal ini menandakan bahwa investasi dalam pembentukan modal tetap terus berjalan dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, dengan tren kenaikan nilai yang konsisten meskipun pertumbuhan tahunan sedikit melambat.

Grafik 2.105

Perbandingan Proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

Secara umum dapat disimpulkan bahwa proporsi PMTB terhadap PDRB Kota Makassar selama 5 tahun terakhir cukup besar, menempati posisi di atas dari rata-rata Kabupaten di Kawasan Mamminasata, di atas dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, di atas dari rata-rata Nasional, dan beberapa kota yang setara, namun kontribusinya dalam beberapa tahun terakhir tampaknya mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penurunan kontribusi PMTB terhadap PDRB disebabkan oleh antara lain: (i) perlambatan pembentukan modal bagi dunia usaha. (ii) Produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian

sebagian besar digunakan oleh sektor rumah tangga untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga, (iii) pelaku sektor luar negeri juga cenderung mengalami peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam perekonomian. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pembentukan modal yang terjadi belum sepenuhnya efektif meningkatkan percepatan perputaran ekonomi sehingga masih memerlukan arah kebijakan yang terkait pada penciptaan iklim investasi yang kondusif.

2.3.5.3. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam konteks perekonomian Internasional, net ekspor menjadi salah satu parameter yang dapat mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan suatu negara. Nilai net ekspor diperoleh dari selisih antara nilai ekspor terhadap impor (barang dan jasa) pada suatu negara dalam periode tertentu. Secara umum net ekspor yang diperoleh memiliki benefit bagi perekonomian yakni meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan Impor. Namun, jika net ekspor bernilai negatif maka hal ini berdampak terhadap defisitnya neraca perdagangan, melemahnya daya saing produk domestik serta menghambat pertumbuhan Ekonomi.

Grafik 2.106

Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020- 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

Data menunjukkan bahwa nilai net ekspor di kota Makassar negative, perkembangan net ekspor di kota makassar berfluktuatif selama tahun 2020-2023 dan secara umum mengalami trend yang meningkat. Hal ini disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya. Nilai net ekspor kota makassar Tahun 2020 sebesar (-22.981.59) miliar rupiah. Namun tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 19,05% persen yakni sebesar (-21,076,54). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah perlambatan kegiatan ekonomi global dan domestik akibat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi volume ekspor dan impor. Selain itu, kemungkinan adanya gangguan rantai pasok, fluktuasi harga komoditas internasional, dan hambatan logistik juga turut berkontribusi terhadap penurunan nilai net ekspor tersebut. Nilai net ekspor kota Makassar kemudian menjadi membaik seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemic hingga tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, nilai net ekspor

kota Makassar masih lebih rendah, kecuali di tahun 2020, nilai net ekspor provinsi Sulawesi Selatan cukup besar yakni (-30.659,13) miliar Rupiah. Kondisi tersebut merupakan akumulasi dari kabupaten kota di Provinsi. Jika dibandingkan dengan Nilai Net Ekspor pada sejumlah kota besar relative lainnya di Indonesia, maka Kota Makassar relative lebih tinggi Net Net Ekspornya di bandingkan dengan Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.107
Perkembangan Net Ekspor Kota Makassar dan Kota Besar Lainnya
Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024, perkembangan net ekspor Kota Makassar masih menunjukkan tren defisit meskipun menunjukkan perbaikan secara bertahap. Pada 2020, Makassar mengalami defisit sebesar -22.981,59 miliar rupiah, yang secara konsisten berkurang setiap tahunnya hingga mencapai -12.771,8 miliar rupiah di 2024. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam aktivitas ekspor dan pengurangan ketergantungan terhadap impor, namun kota ini tetap mengalami defisit yang cukup besar.

Sementara itu, kota besar seperti Surabaya dan Semarang menunjukkan tren surplus yang signifikan selama periode tersebut. Surabaya, yang merupakan pusat industri dan pelabuhan utama di Indonesia, mengalami peningkatan net ekspor dari 26.510,36 miliar rupiah di 2020 menjadi sekitar 62.878,51 miliar rupiah di 2024. Hal ini menunjukkan kemampuan Surabaya dalam mengembangkan kegiatan ekspor secara konsisten dan meningkatkan daya saing internasionalnya. Sebaliknya, Semarang juga menunjukkan tren positif, dengan surplus yang meningkat dari -40.560,51 miliar rupiah di 2020 menjadi -33.599,57 miliar rupiah di 2024, meskipun tetap menunjukkan angka negatif, tren ini menunjukkan perbaikan meskipun belum sepenuhnya positif.

Perbandingan ini menegaskan bahwa sementara Makassar masih dalam proses memperbaiki ketidakseimbangan neraca perdagangannya, kota-kota besar seperti Surabaya dan Semarang telah menunjukkan kekuatan dan keberhasilan dalam meningkatkan kegiatan ekspor mereka. Kinerja Surabaya terutama menonjol dengan peningkatan surplus yang signifikan, mencerminkan keberhasilan strategi industri dan pengembangan pelabuhan yang mendukung pertumbuhan ekspor nasional.



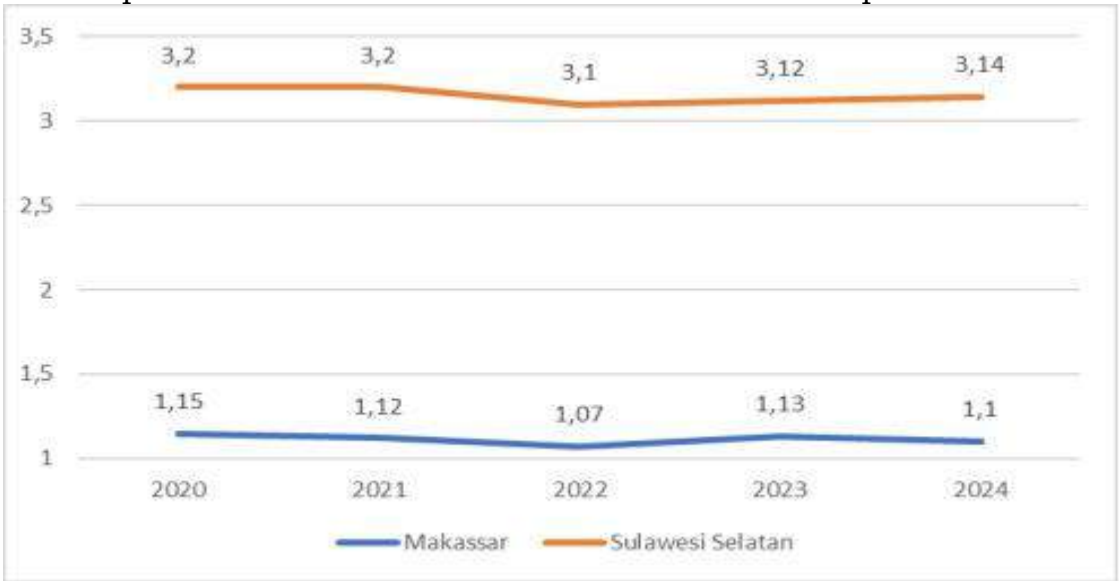
2.3.6. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional

Secara umum, tren kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap perekonomian Indonesia cenderung memperlihatkan tren kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap perekonomian nasional dari 2020 hingga 2024 cenderung menunjukkan sedikit penurunan, dari 1,15% di 2020 menjadi sekitar 1,10% di 2024. Meskipun demikian, kontribusi ini relatif stabil di kisaran 1,1% hingga 1,15%, dan fluktuasi kecil tersebut menunjukkan bahwa peran ekonomi Makassar terhadap perekonomian nasional tetap konsisten meskipun mengalami sedikit penurunan selama periode tersebut.

Grafik 2.108

Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

Tren kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap perekonomian nasional dari 2020 hingga 2024 cenderung menunjukkan penurunan yang sedikit dan relatif stabil di kisaran sekitar 1,1% hingga 1,15%. Hal ini mengindikasikan bahwa peran ekonomi Makassar sebagai salah satu pusat penggerak utama perekonomian Indonesia tidak signifikan.

Ini disebabkan karena kontribusinya terhadap PDB nasional tetap kecil dan tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti, sehingga Makassar belum menjadi motor utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kendati kota ini memiliki peran penting secara regional di Sulawesi Selatan, pengaruhnya terhadap perekonomian nasional masih terbatas, kemungkinan karena faktor skala ekonomi, kapasitas industri, dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan.

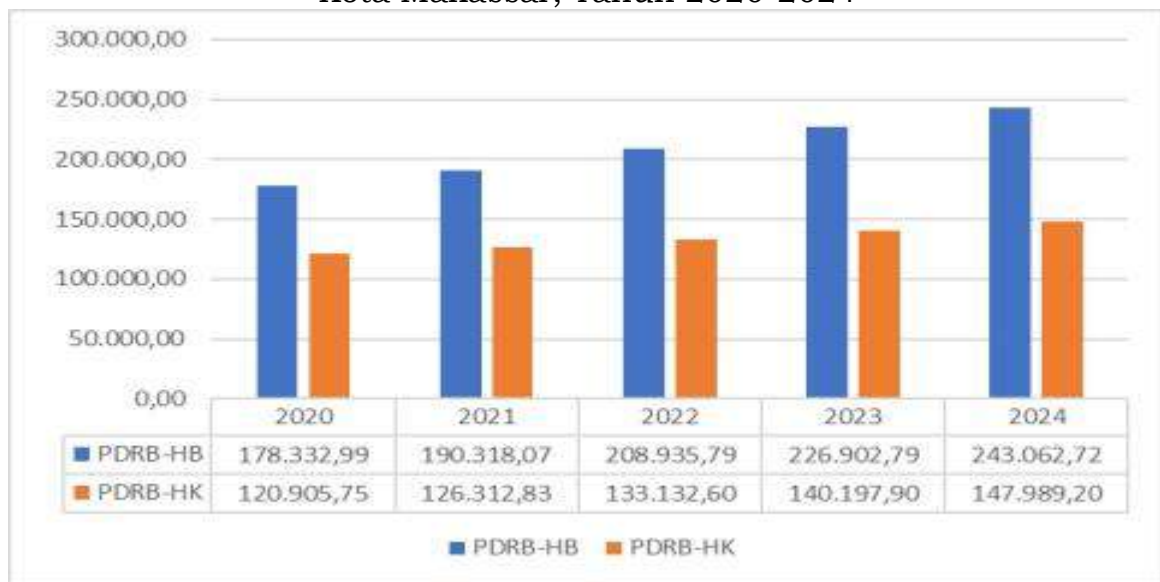
2.3.6.2. Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Dari tahun 2020 hingga 2024, Kota Makassar mengalami fluktuasi dalam PDRB baik ADHK maupun ADHB. Perbedaan antara ADHK dan ADHB mencerminkan pengaruh inflasi dalam pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19, ekonomi Kota Makassar menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan pertumbuhan yang positif di tahun-tahun berikutnya. Nilai PDRB menurun sekitar 97 miliar dari Rp 120.905.752,03 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 126.312,83 miliar di tahun 2021. Pada tiga tahun berikutnya nilai PDRB-HB dan PDRB-HK mengalami perbaikan sebagai dampak positif dari upaya pemulihan

perekonomian baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah Kota Makassar. Peningkatan nilai PDRB-HB disebabkan oleh peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan peningkatan harga produk (pengaruh inflasi). Sementara pada peningkatan PDRB-HK disebabkan oleh peningkatan volume produksi barang dengan tingkat harga yang konstan.

Dari sisi supply, peningkatan nilai tambah PDRB Kota Makassar berkontribusi oleh secara berbeda oleh 17 sub lapangan usaha. Dari ke-17 sub lapangan usaha PDRB ADHK menurut lapangan usaha terdapat lima sub lapangan usaha yang mempengaruhi struktur perekonomian yaitu sub lapangan usaha industri pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, informasi dan pendidikan dengan total nilai sebesar 76,79 persen di tahun 2024. Selebihnya sebesar 23,21 persen terdistribusi pada ke-12 sub lapangan usaha yang lain.

Grafik 2.109
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-HB) dan PDRB-HK Kota Makassar, Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-HB) dan PDRB Harga Konstan (PDRB-HK) dari tahun 2020 hingga 2024, Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pada tahun 2020, PDRB-HB Kota Makassar sebesar 178.332,99 juta rupiah dan meningkat secara konsisten setiap tahunnya hingga mencapai 243.062,72 juta rupiah pada tahun 2024. Demikian pula, PDRB-HK mengalami kenaikan dari 120.905,75 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 147.989,20 juta rupiah di tahun 2024. Pertumbuhan ini menunjukkan kontribusi signifikan Kota Makassar terhadap perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan.

Jika dibandingkan dengan total PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan, kontribusi rata-rata Kota Makassar terhadap PDRB Provinsi selama periode ini sekitar 40-45%. Secara umum, Kota Makassar tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi utama di wilayah tersebut, dengan peningkatan yang terus-menerus baik dari segi nilai nominal maupun nilai konstan. Hal ini menunjukkan peran strategis Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Tingginya proporsi PDRB Kota Makassar terhadap provinsi disebabkan oleh Tingginya proporsi PDRB Kota Makassar terhadap provinsi disebabkan oleh beberapa faktor seperti Kondisi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa di

Sulawesi Selatan, Fasilitas Infrastruktur dan Pelayanan Kota yang lebih lengkap, seperti pelabuhan, bandara, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendidikan yang menarik investasi dan aktivitas ekonomi, jumlah penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi, meningkatkan permintaan barang dan jasa, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kota, Kegiatan Industri dan Perdagangan Kota Makassar menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan, termasuk sektor pengangkutan, komunikasi, dan keuangan yang menyumbang signifikan terhadap PDRB.

2.3.6.3. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Jumlah hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan jika dirata-ratakan mengalami pertumbuhan dari capaian pada tahun 2020, sebesar 9,14% jika dibandingkan terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan. Hal ini menunjukkan kemampuan rumah tangga memenuhi syarat kelayakhunian baik dari sisi ketahanan bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah, hunian yang memiliki akses terhadap air minum layak, hunian yang memiliki akses terhadap sanitasi layak dan kemampuan rumah tangga menghuni rumah dengan kecukupan luas tempat tinggal perkapita minimal 7,2 m2. Di wilayah perkotaan satu unit rumah dengan luas 36 m2 dapat dihuni oleh maksimal 4 jiwa, sehingga jika terjadi dinamika jumlah penghuni rumah akan mempengaruhi nilai kecukupan luas tempat tinggal perkapita. Dalam 5 tahun terakhir, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kota Makassar disajikan pada grafik berikut

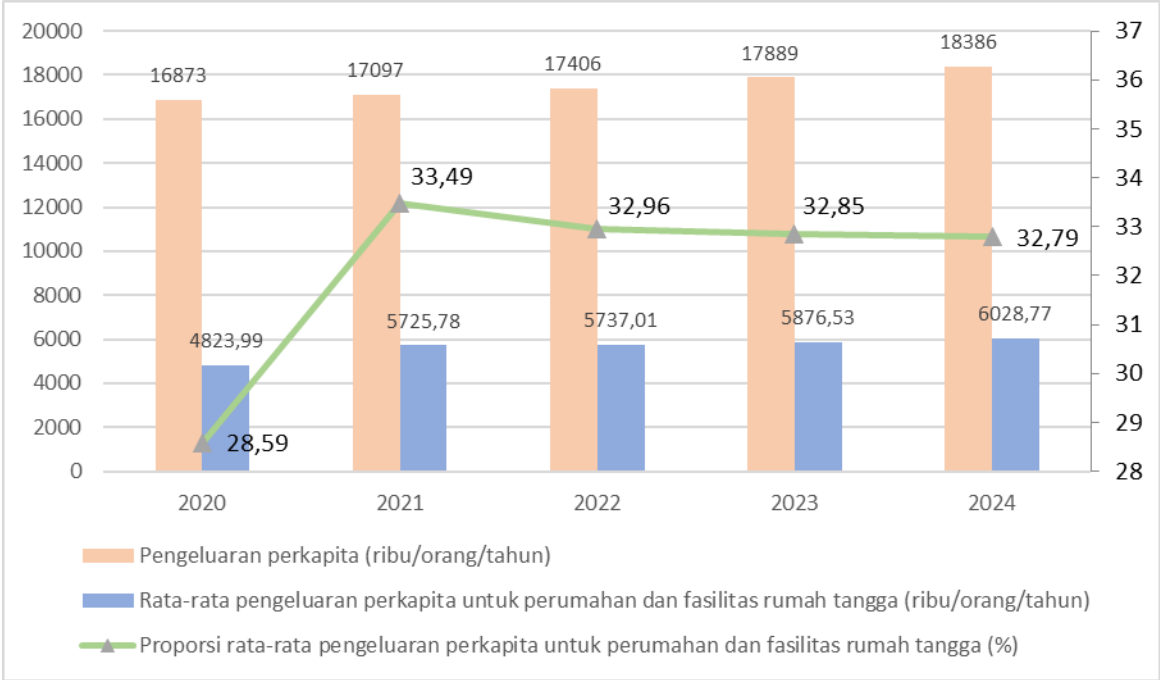
Grafik 2.110
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber : SUSENAS, data diolah Bappenas Tahun 2024

Selain itu kemampuan rumah tangga memiliki hunian layak terjangkau dan berkelanjutan, sangat dipengaruhi oleh aspek keterjangkauan, yang mengukur kemampuan pengeluaran perkapita untuk membiayai kebutuhan terkait hunian.

Grafik 2.111
Rata-Rata Pengeluaran untuk Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kota Makassar, data diolah Tahun 2025

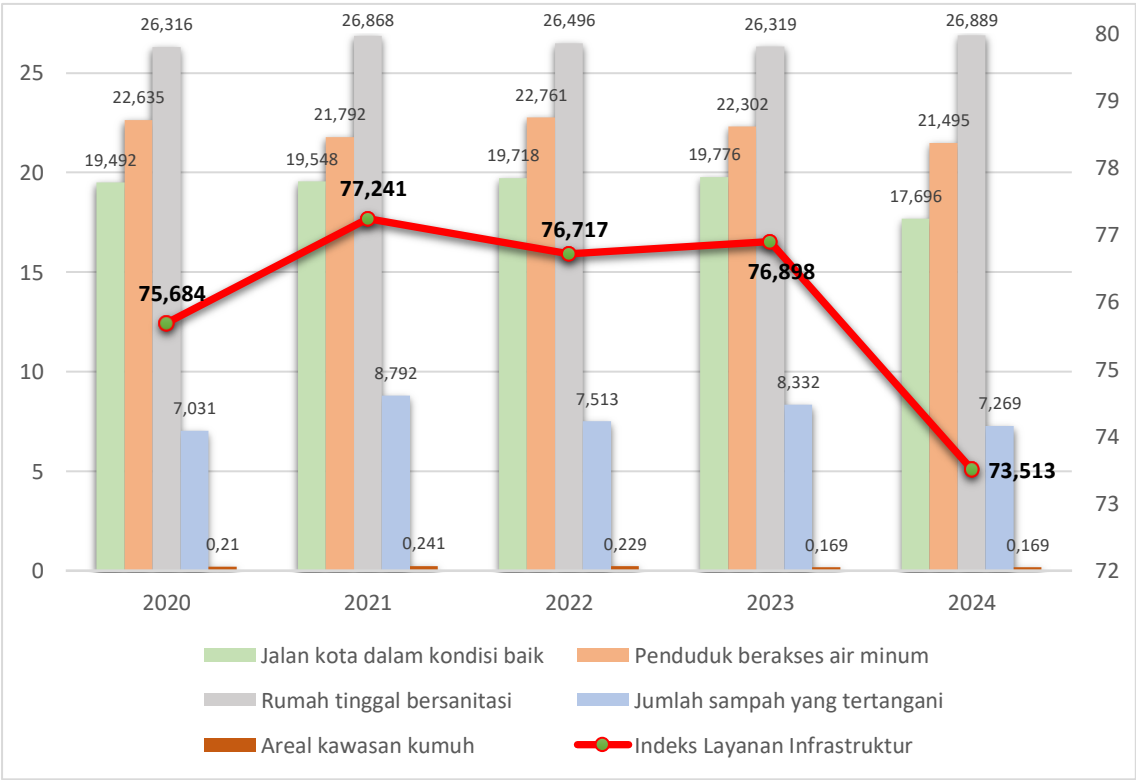
Grafik diatas menggambarkan rata-rata pengeluaran perkapita untuk membiayai kebutuhan hunian dan fasilitas rumah tangga berkisar 29%-34% untuk membiayai kredit kepemilikan rumah, perbaikan rumah, maupun biaya sewa rumah. Pemenuhan syarat kelayakhunian dan aspek keterjangkauan terhadap akses hunian layak juga didukung melalui kebijakan pembangunan perumahan baik oleh developer maupun perumahan swadaya serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) pada kawasan kumuh kewenangan kota.

2.3.6.4. Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur Kota Makassar menunjukkan tren fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 3,38 poin dan berada di angka 73,513. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai sektor. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan indeks perlu dievaluasi secara mendalam, terutama pada sektor yang mengalami stagnasi atau kemunduran.



Grafik 2.112
Indeks Layanan Infrastruktur Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Bappeda Kota Makassar, data diolah tahun 2025

Kota Makassar memiliki jaringan jalan yang terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota. Pada tahun 2024, panjang jalan yang berada dalam kewenangan kota tercatat sebesar 1.595,75 km, dengan 98% atau 1.563,81 km dalam kondisi baik. Sisanya sebesar 2% jalan dalam kondisi rusak ringan maupun berat menunjukkan bahwa meskipun cakupan jalan berkondisi baik cukup tinggi, masih ada tantangan dalam mempertahankan kualitas jalan di berbagai wilayah, terutama di area padat penduduk dan daerah berkembang.

Terkait akses air minum, sekitar 74,34% rumah tangga di Kota Makassar pada tahun 2024 memiliki akses terhadap jaringan air minum, baik perpipaan maupun bukan perpipaan yang terlindungi. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 64,58% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman sesuai standar kesehatan. Tantangan utama dalam sektor ini meliputi keterbatasan jaringan perpipaan oleh Perumda Air Minum serta kurangnya fasilitas pengolahan air minum yang memenuhi standar kesehatan. Wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang menjadi salah satu daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses air minum berkualitas.

Akses sanitasi rumah tinggal diukur dari jumlah rumah yang memiliki septic tank atau terhubung dengan jaringan IPAL komunal. Pada tahun 2024, sebanyak 88,66% rumah tinggal di Kota Makassar memiliki akses terhadap sanitasi yang memadai. Meskipun angka ini cukup tinggi, masih terdapat 11,34% rumah yang belum memiliki akses sanitasi layak, yang dapat menyebabkan permasalahan kesehatan lingkungan dan pencemaran air tanah.

Kota Makassar memiliki sistem pengelolaan sampah dengan fasilitas pengolahan sampah seperti TPA Tamangapa serta TPS3R Bank Sampah Unit (BSU). Pada tahun 2024, sebanyak 76,69% dari total timbunan sampah sebesar 297.869,70-ton tertangani melalui sistem pengangkutan dan pengolahan. Namun, hanya 2,01% sampah yang benar-benar terolah di fasilitas pengolahan, sementara sebagian besar langsung masuk ke TPA. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan sampah telah tersedia,

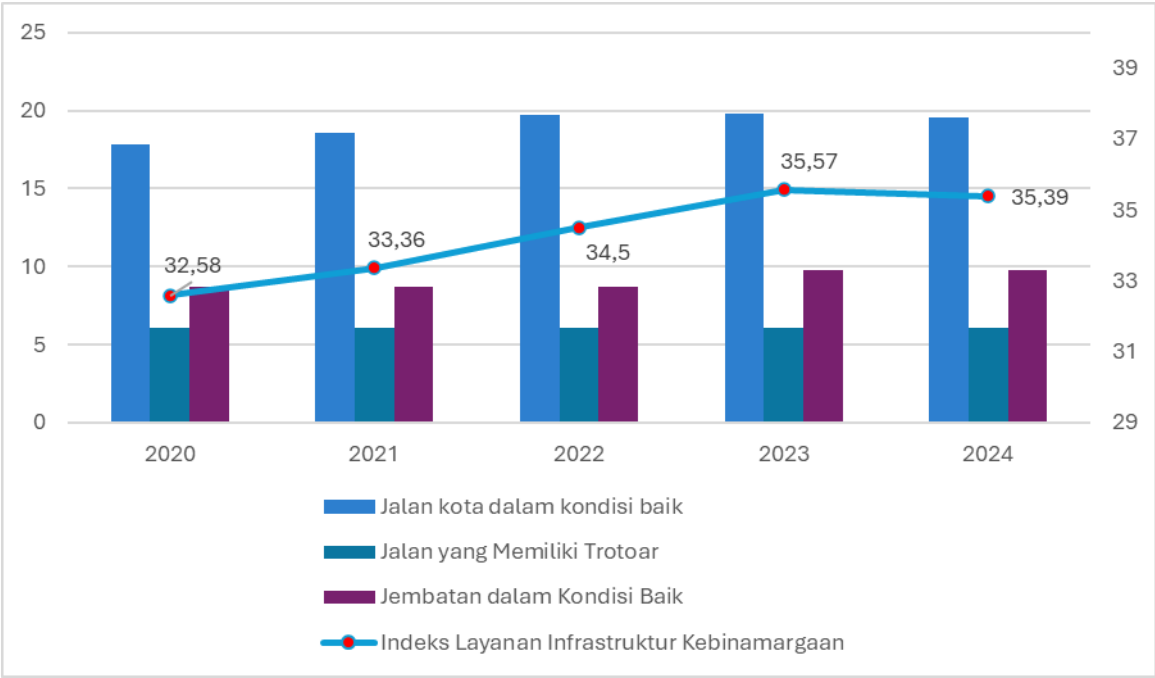
fasilitas pengolahan masih belum optimal dalam mengurangi timbunan sampah dan mencegah penumpukan di TPA.

Permasalahan kawasan kumuh masih menjadi tantangan di Kota Makassar, terutama di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dari total luas kota 17.685,2 hektar, sekitar 299,36 hektar masih dikategorikan sebagai kawasan kumuh dengan berbagai masalah seperti keteraturan bangunan yang tidak sesuai standar, kualitas jalan lingkungan yang buruk, terbatasnya akses air minum dan sanitasi, sistem drainase yang belum optimal, serta kurangnya pengelolaan sampah dan proteksi kebakaran. Kondisi ini menandakan perlunya upaya terpadu untuk mengatasi permasalahan kawasan kumuh secara berkelanjutan.

2.3.6.5. Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan

Infrastruktur Kebinamargaan, khususnya jalan dan jembatan sangat penting karena menjadi tulang punggung konektivitas dan mobilitas masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan kebinamargaan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

Grafik 2.113
Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan Kota Makassar
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025

Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan menunjukkan tren kenaikan sampai dengan tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024. Indikator yang paling berpengaruh adalah panjang jalan kota dalam kondisi baik yang pada tahun 2024 menjadi 1.411,90 km. Usaha telah maksimal untuk mendukung pembangunan jalan tetapi di sisi lain adanya penurunan kualitas jalan karena bertambahnya jalan yang rusak salah satunya karena pengaruh cuaca utamanya pada wilayah rawan genangan. Hal ini merupakan tantangan dan bahan evaluasi terkait peningkatan kualitas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan. Trotoar yang berfungsi untuk kenyamanan pejalan kaki dan penyandang disabilitas hanya dilaksanakan pada tahun 2021. Tantangan utamanya karena terbatasnya lahan untuk pembangunan trotoar. Adapun panjang trotoar sampai dengan tahun 2024 adalah 643,015 km atau 40,35%. Jembatan yang berfungsi menghubungkan dua bagian jalan



yang terputus pembangunannya menunjukkan tren positif setiap tahun. Salah satu kendala dalam pembangunan jembatan adalah masalah alas hak yang bukan milik Pemerintah Kota. Jumlah jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar sampai tahun 2024 berjumlah 69 unit.

2.3.6.6. Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakarya

Infrastruktur Keciaptakarya bertujuan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, berkelanjutan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakarya menunjukkan tren berfluktuasi sampai pada tahun 2024. Indikator yang berpengaruh adalah jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum serta jumlah rumah tinggal berakses sanitasi, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.114
Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakarya Kota Makassar
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025

Akses air minum diperoleh melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan untuk 15 Kecamatan. Kecuali Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sumber airnya dari non perpipaan. Sampai dengan tahun 2024 rumah tangga yang mendapatkan akses air minum mencapai 238.916 RT atau 82, 96%. Salah satu permasalahan akses air minum adalah kondisi letak geografis beberapa wilayah yang sulit dijangkau oleh air minum. Namun demikian hanya 9,15% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas pengolahan air minum yang memenuhi standar Kesehatan.

Jumlah rumah tinggal bersanitasi di Kota Makassar diukur berdasarkan jumlah rumah yang memiliki septic tank dan terhubung dengan jaringan ipal komunal. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi pada tahun 2024 sebanyak 258.103 RT atau 89,63%. Namun demikian dari 89,63% hanya 8,45% terakses sanitasi aman atau memiliki septic tank yang sesuai standar serta dilakukan penyedotan secara berkala minimal 3 tahun sekali serta rumah tangga yang terkoneksi melalui sambungan rumah (SR) pada IPAL Komunal skala lingkungan dan kawasan. Hal ini disebabkan karena faktor pemahaman dan ekonomi masyarakat sehingga penyedotan tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

Panjang drainase yang kondisinya baik sampai dengan tahun 2024 adalah 3.496,48 km atau 90,80%. Pembangunan drainase sangat berkaitan dengan pengendalian banjir. Titik genangan yang ada di Kota Makassar sebanyak 128 titik dengan luas genangan 8.213,24 Ha tersebar pada 14 Kecamatan. Penyebab utama adanya air tergenang/banjir adalah selain kondisi drainase yang tidak memadai, pembangunan pada kawasan dengan topografi rendah, juga perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke drainase. Pemecahan masalah ini harus bertahap dan melibatkan multi stakeholder dan pembiayaan inovatif.

Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun, dengan persentase bangunan dalam kondisi baik mencapai 57,87% atau sebanyak 114 unit hingga tahun 2024. Di antara bangunan tersebut, termasuk di dalamnya adalah Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. Saat ini, terdapat 15 unit Kantor Kecamatan yang telah bersertifikat hak milik. Sementara itu, dari total kebutuhan 153 unit Kantor Kelurahan, masih terdapat 49 unit yang mengalami permasalahan terkait status alas hak. Rinciannya, sebanyak 9 unit berada pada status sewa, 8 unit berstatus hak pakai, 1 unit menempati rumah warga, 1 unit dalam sengketa, 1 unit dalam proses pengurusan sertifikat, dan 29 unit belum memiliki kejelasan status hukum lahannya.

Permasalahan utama dalam pembangunan Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan adalah keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota. Kondisi ini mengakibatkan perlunya alternatif strategi, antara lain melalui pengadaan atau pembelian bangunan eksisting untuk difungsikan sebagai kantor pemerintahan.

2.3.6.7. Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Persentase ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kota Makassar mengacu kepada ketersediaan dokumen RDTR yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah, terintegrasi dalam bentuk digital, serta telah sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, ketersediaan RDTR Kota Makassar masih belum terisi dan tersedia, dengan penyampaian bahwa Penyusunan Dokumen RDTR masih dalam proses penyelesaian secara bertahap. Penyusunan RDTR Kota Makassar dilaksanakan sejak tahun 2024, namun masih perlu melalui beberapa tahapan untuk penetapan peraturan walikota.

Secara umum tata cara penyusunan dan pentahapannya diatur melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.



Gambar 2.2.
Capaian Kinerja Perencanaan Tata Ruang RDTR Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024



Sumber : Database Direktorat Binda I dan II Kementerian ATR/BPN, Tahun 2025

Jika mengacu kepada alur proses penetapan RDTR kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, ada percepatan dalam proses dimana penetapan RDTR dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah Persetujuan Substansi, serta berpedoman pada Petunjuk Teknis Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN tentang Penyusunan, Penetapan dan Integrasi Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota ke dalam Sistem Online Single Submission (OSS), Nomor 1/Juknis-HK.02.02/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, namun Pemerintah daerah tanpa terkecuali Kota Makassar mengalami keterlambatan dalam proses penyusunan dan penetapan karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Proses validasi KLHS yang masih menunggu jadwal dari DLHK Provinsi.
- 2) Jadwal asistensi dan klinik dari Kementerian ATR/BPN yang terbatas.
- 3) Koordinasi lintas sektor yang membutuhkan waktu karena melibatkan banyak pihak, yang selanjutnya ke tahap Persetujuan Substansi setelah pemaparan RDTR oleh WaliKota di Forum Lintas Sektor.
- 4) Persetujuan Gubernur sebagai tahapan penting sebelum Perwali, yang juga bergantung pada kesiapan administrasi dan teknis.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar, terus berupaya untuk proses percepatan penyusunan dan penetapan pengesahan RDTR Kota Makassar melalui penyusunan *timeline* yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Koordinasi intensif dengan DLHK Provinsi untuk percepatan proses validasi KLHS;
- b. Mengajukan percepatan jadwal asistensi dan klinik ke Kementerian ATR/BPN;
- c. Optimalisasi koordinasi lintas sektor secara paralel sambil menunggu proses validasi KLHS;
- d. Menyiapkan semua dokumen pendukung untuk mempercepat proses lintas sektor.
- e. Finalisasi draft Perwali RDTR agar proses penetapan berjalan lebih cepat saat persetujuan substansi terbit;
- f. Menyiapkan tim teknis untuk percepatan integrasi RDTR ke OSS pasca penetapan Perwali.



Berikut gambaran timeline dan progress yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam proses percepatan penyelesaian dokumen RDTR dan rencana pengesahannya kedalam perkara:

Gambar 2.3.
Timeline Proses Penetapan RDTR Kota Makassar



Sumber : Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Tahun 2025

2.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
2.3.7.1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Rasio pajak daerah mengukur seberapa besar penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian. Peningkatan tax ratio penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 2.32
Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Makassar, Tahun 2020 – 2024

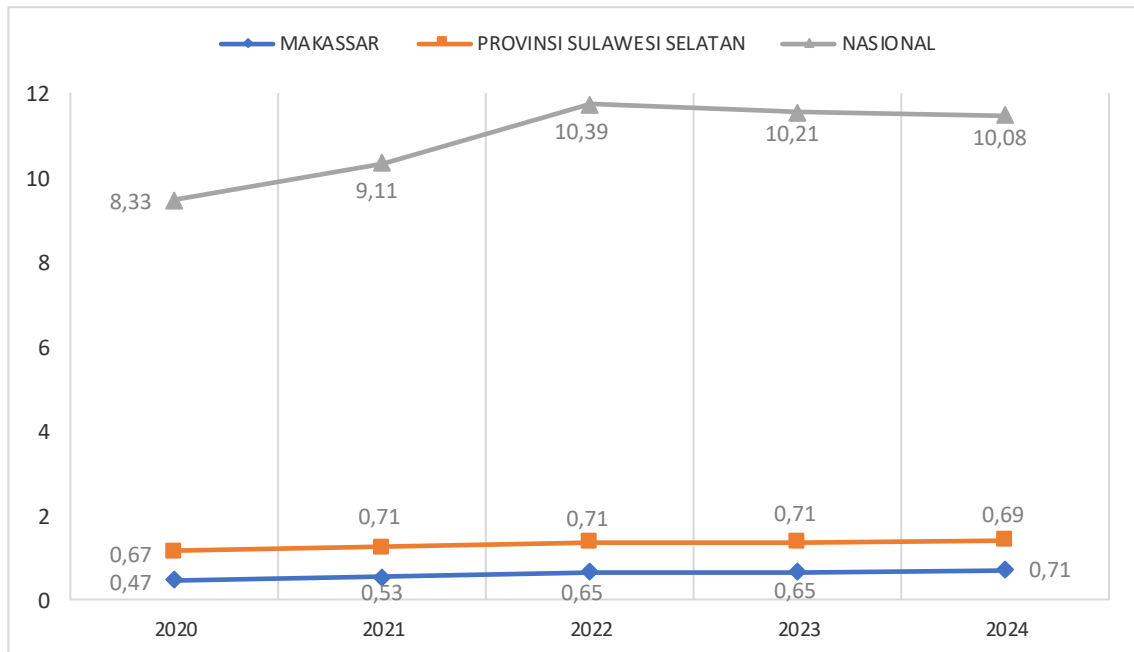
No	Tahun	Pajak Daerah	Nilai PDRB	Tax Ratio
1	2020	864.313.239.515,14	178.332.992.770.000,00	0,48
2	2021	924.347.962.910,12	190.318.065.290.000,00	0,49
3	2022	1.187.829.001.552,82	208.935.792.290.000,00	0,57
4	2023	1.354.471.619.336,98	226.902.788.870.000,00	0,60
5	2024 (UNAUDITED)	1.411.880.414.028,41	243.062.717.780.000,00	0,58

Sumber: BPKAD Kota Makassar, diolah 2025

Pada tahun 2020, tax ratio kota Makassar berada di angka 0.48 dan meningkat menjadi 0.49 pada tahun selanjutnya. Memasuki tahun 2022, tax ratio meningkat menjadi 0.57, didorong oleh kenaikan pajak daerah menjadi sekitar 1.18 triliun dan kenaikan nilai PDRB menjadi sekitar 208.9 triliun.

Pada tahun 2023, Tax Ratio berada di angka 0,60 dengan kondisi pajak daerah meningkat menjadi sekitar 1,35 triliun dan nilai PDRB meningkat menjadi sekitar 226,9 triliun. Tax ratio Kota Makassar pada tahun 2024 di angka 0,58, dengan pajak daerah meningkat menjadi sekitar 1,41 triliun dan nilai PDRB meningkat menjadi sekitar 243 triliun.

Grafik 2.115
Perbandingan Rasio Pajak Daerah Kota Makassar dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik diolah, Tahun 2024

Pada tingkat Nasional, rasio pajak mengalami peningkatan dari 8,33% pada tahun 2020 menjadi 9,11% pada tahun 2021, kemudian naik lagi mencapai 10,39 pada tahun 2022. Setelah itu, terjadi penurunan menjadi 10,21 pada tahun 2023 dan 10,08 pada tahun 2024.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, rasio pajak relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 0,67 pada tahun 2020 menjadi 0,74 pada tahun 2021, dan tetap bertahan di angka 0,74 pada tahun 2022 dan 2023, lalu sedikit menurun menjadi 0,69 pada tahun 2024.

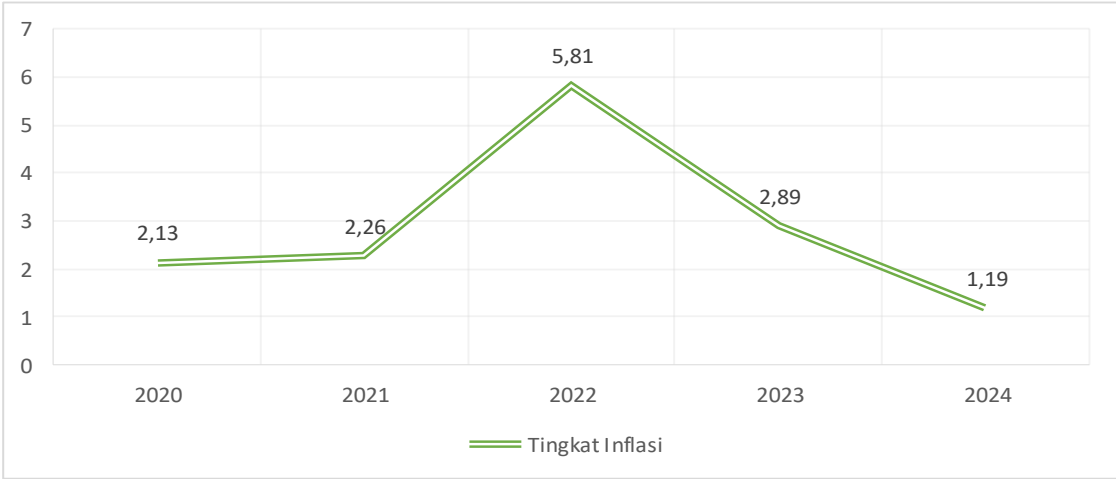
Sementara di Kota Makassar, rasio pajak dimulai dari posisi terendah yaitu 0,47 pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 0,53 pada tahun 2021, dan naik lagi menjadi 0,65 pada tahun 2022-2023. Pada tahun 2024, Makassar mencapai rasio pajak tertingginya yaitu 0,74, menyamai angka yang pernah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

2.3.7.2. Tingkat Inflasi Gabungan

Inflasi Kota Makassar dihitung berdasarkan Survei Harga Konsumen. Inflasi Kota Makassar tahun kalender selama 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, Kota Makassar mengalami inflasi tahun kalender sebesar 2,89 persen, sedangkan inflasi tahun kalender pada tahun 2024 sebesar 1,19 persen.



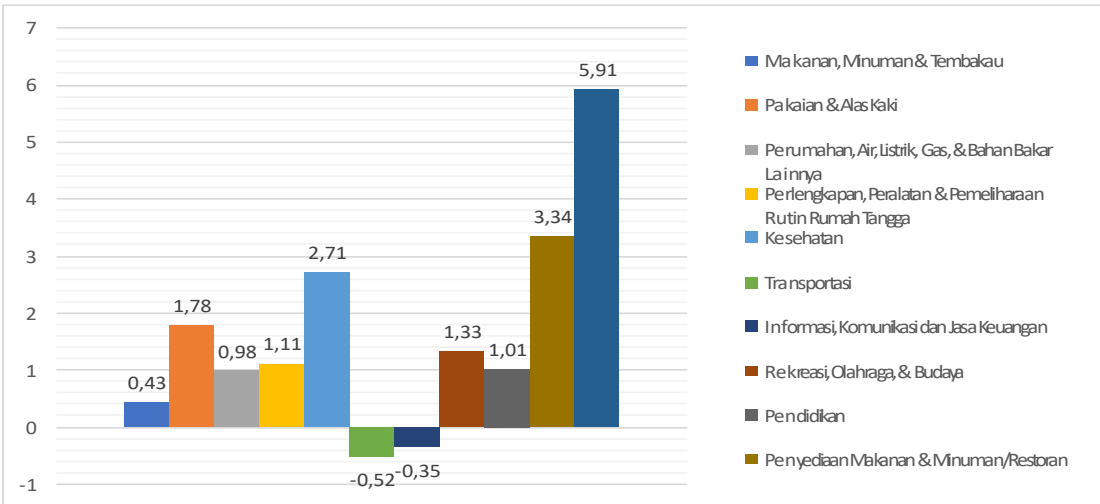
Grafik 2.116
Perkembangan Inflasi Kota Makassar Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024 terjadi inflasi di semua kelompok pengeluaran. Perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan kelompok komoditas yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2024.

Grafik 2.117
Indeks Harga Konsumen dan Inflasi
Kota Makassar Tahun 2024

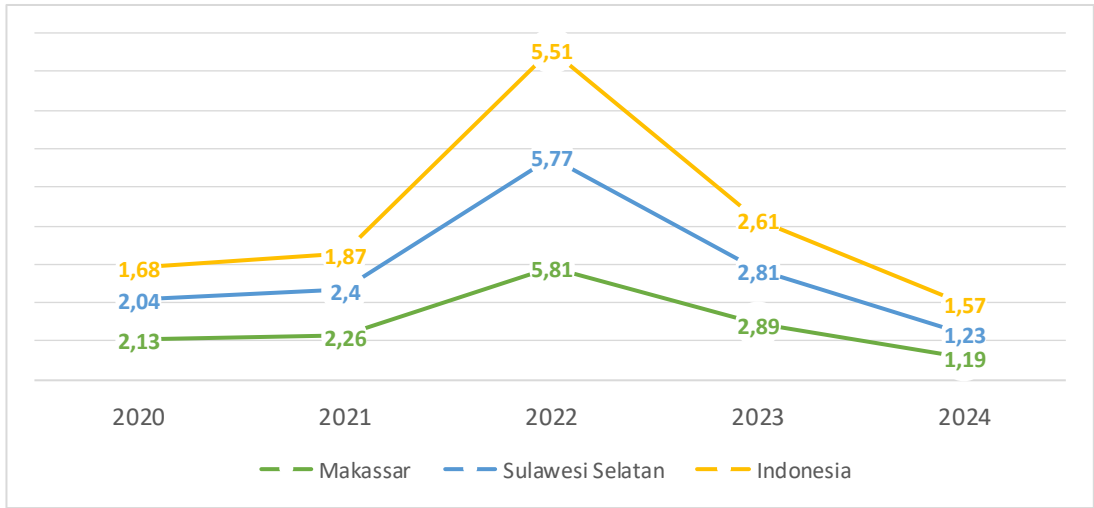


Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Makassar pada tahun 2024 untuk berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan data yang ditampilkan, sektor Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,91%, diikuti oleh sektor Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran dengan 3,34%. Sektor Kesehatan juga menunjukkan tingkat inflasi yang cukup signifikan sebesar 2,71%. Sementara itu, beberapa sektor mencatat inflasi moderat seperti Pakaian & Alas Kaki (1,78%), Rekreasi, Olahraga, & Budaya (1,33%), serta Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (1,11%). Sektor kebutuhan pokok seperti Makanan, Minuman & Tembakau justru menunjukkan inflasi yang relatif rendah yaitu hanya 0,43%. Hal ini mengindikasikan bahwa harga kebutuhan pokok di Kota Makassar relatif terkendali. Di sisi lain, terdapat dua sektor yang mengalami deflasi, yaitu sektor Transportasi (-0,52%) dan sektor Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan (-0,35%). Deflasi pada kedua sektor ini mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah, atau peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan.

Perbandingan perkembangan inflasi antara Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan tingkat Nasional selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat inflasi ketiga wilayah relatif berdekatan dengan Indonesia di angka 1,68%, Sulawesi Selatan 2,04%, dan Makassar 2,13%. Memasuki tahun 2021, terjadi kenaikan di semua wilayah dengan Indonesia mencapai 1,87%, Sulawesi Selatan 2,4%, dan Makassar 2,26%. Tahun 2022 menjadi titik puncak inflasi untuk ketiga wilayah, di mana Indonesia mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,51%, diikuti Sulawesi Selatan sebesar 5,77%, dan Makassar 5,81%. Setelah mencapai puncaknya di tahun 2022, tren inflasi mulai menunjukkan penurunan signifikan di tahun 2023 dengan Indonesia turun ke level 2,61%, Sulawesi Selatan 2,81%, dan Makassar 2,89%. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana tingkat inflasi Indonesia mencapai 1,57%, Sulawesi Selatan 1,23%, dan Makassar 1,19%.

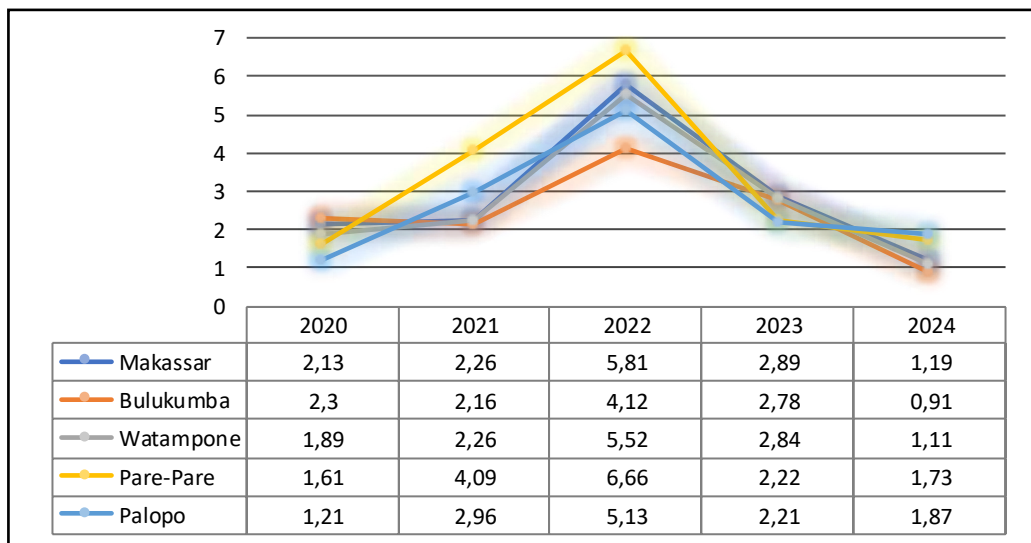
Grafik 2.118
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2020 – 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Tahun 2022 menjadi titik puncak inflasi untuk ketiga wilayah, di mana Indonesia mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,51%, diikuti Sulawesi Selatan sebesar 5,77%, dan Makassar 5,81%. Setelah mencapai puncaknya di tahun 2022, tren inflasi mulai menunjukkan penurunan signifikan di tahun 2023 dengan Indonesia turun ke level 2,61%, Sulawesi Selatan 2,81%, dan Makassar 2,89%. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana tingkat inflasi Indonesia mencapai 1,57%, Sulawesi Selatan 1,23%, dan Makassar 1,19%.

Grafik 2.119
Perkembangan Inflasi Kota Makassar, Bulukumba, Watampone, Parepare, dan Palopo Tahun 2020 - 2024



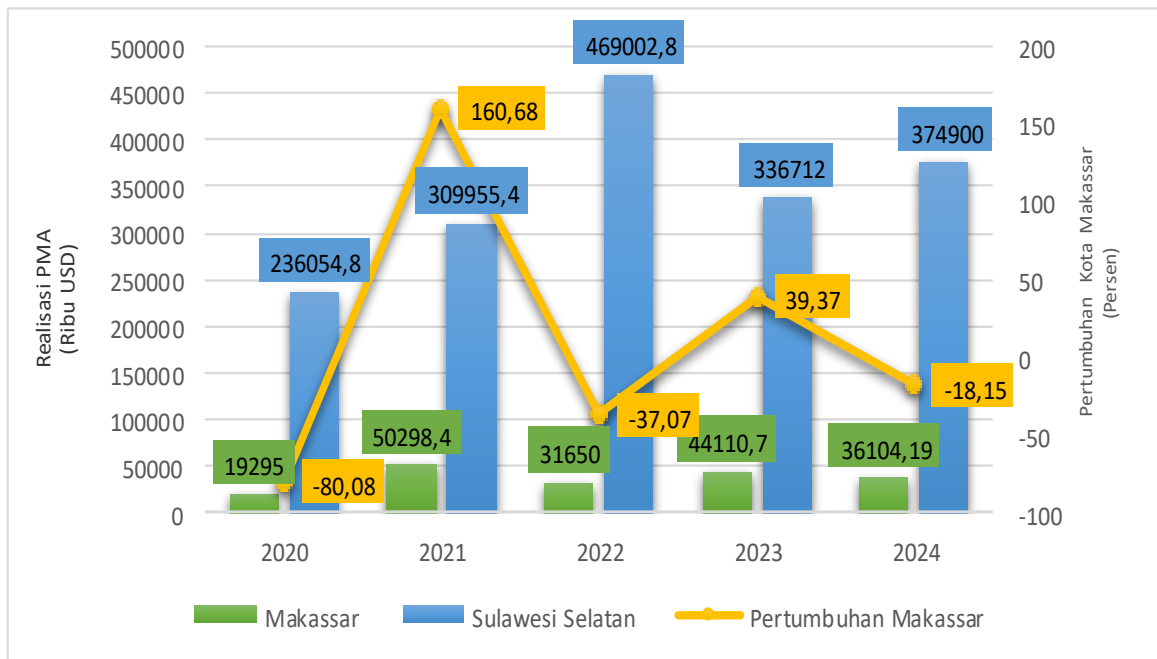
Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Secara keseluruhan, pola inflasi kelima wilayah menunjukkan tren yang serupa dengan puncak di tahun 2022 dan penurunan konsisten hingga 2024. Kota Parepare cenderung mengalami fluktuasi paling tinggi, sementara Bulukumba relatif lebih stabil. Penurunan signifikan inflasi pada 2023-2024 mengindikasikan keberhasilan pengendalian harga di wilayah-wilayah tersebut setelah mengalami tekanan tinggi pada 2022

2.3.7.3. Persentase Peningkatan Investasi Daerah

Persentase peningkatan investasi daerah merupakan indikator penting yang menggambarkan pertumbuhan aktivitas investasi dalam suatu wilayah geografis tertentu selama periode waktu tertentu. Peningkatan investasi daerah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Penanaman Modal Asing (PMA). Berikut adalah grafik PMA Kota Makassar Periode Tahun 2020 – 2024:

Grafik 2.120
Perkembangan PMA Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Serta
Pertumbuhan PMA Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (diolah), tahun 2025

Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, PMA Kota Makassar tercatat sebesar 19.295 Ribu USD dengan pertumbuhan -80,08%, sementara Sulawesi Selatan mencatatkan nilai 286.054,8 Ribu USD. Tahun 2021, dimana PMA Kota Makassar meningkat menjadi 50.298,4 Ribu USD dengan pertumbuhan yang signifikan mencapai 160,68%. Pada periode yang sama, Sulawesi Selatan juga menunjukkan peningkatan menjadi 309.855,4 Ribu USD. Tetapi, di tahun 2022 pertumbuhan PMA Kota Makassar mengalami penurunan ke sebesar -37,07%, dengan nilai investasi sebesar 31.650 Ribu USD. Di sisi lain, PMA Provinsi Sulawesi Selatan justru mendapatkan PMA yang cukup besar selama periode 5 Tahun dengan nilai 469.002,8 Ribu USD.

Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan PMA Kota Makassar ke angka positif 39,37% dengan nilai 44.110,7 Ribu USD, sedangkan Sulawesi Selatan mengalami penurunan nilai PMA menjadi 336.712 Ribu USD. Tahun 2024

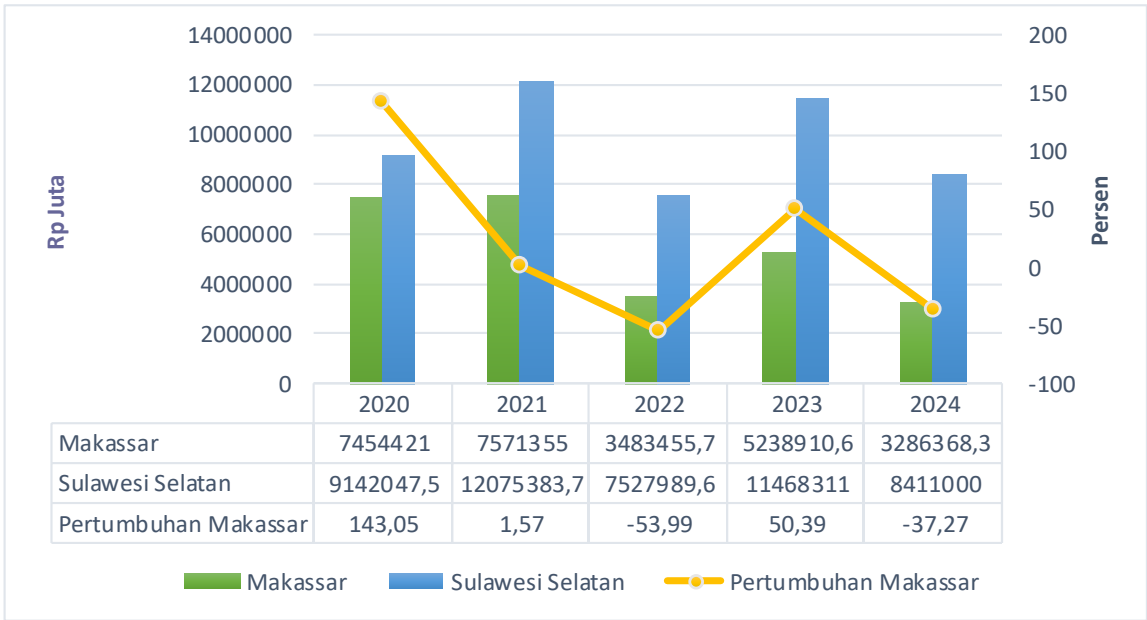


PMA Kota Makassar sebesar 36.104,19 Ribu USD disertai pertumbuhan -18,15 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 374.900 Ribu USD.

PMA di Kota Makassar dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan masih cukup jauh perbandingannya nilainya, hal ini disebabkan karena faktor cakupan wilayah, karakteristik investasi di Kota Makassar cenderung berfokus pada sektor jasa perhotelan, dan perdagangan. Kemudian faktor kompetisi antar daerah dalam menarik investasi asing juga merupakan faktor yang penting. realisasi PMA Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi berbagai faktor eksternal dan internal. Pada 2020, nilai investasi rendah akibat dampak pandemi COVID-19 yang membuat banyak investor menunda rencana bisnis. Tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan karena pemulihan ekonomi, masuknya proyek besar, serta implementasi kebijakan kemudahan berusaha. Namun, pada 2022 nilai PMA menurun seiring berakhirnya proyek besar tahun sebelumnya dan meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik Rusia-Ukraina. Tahun 2023 mencatat pemulihan moderat berkat proyek baru di sektor jasa, perdagangan, dan energi. Sementara itu, 2024 kembali mengalami penurunan ringan, kemungkinan karena minimnya investasi berskala besar, faktor tahun politik, dan persaingan antar daerah dalam menarik investor.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh investor domestik atau perusahaan dalam negeri untuk pengembangan usaha di wilayah Indonesia. Dalam konteks Kota Makassar, PMDN memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena posisinya sebagai pusat bisnis dan perdagangan di Indonesia Timur. Berikut adalah Perkembangan PMDN Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024.

Grafik 2.121
Perkembangan PMDN Kota Makassar dan
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2024



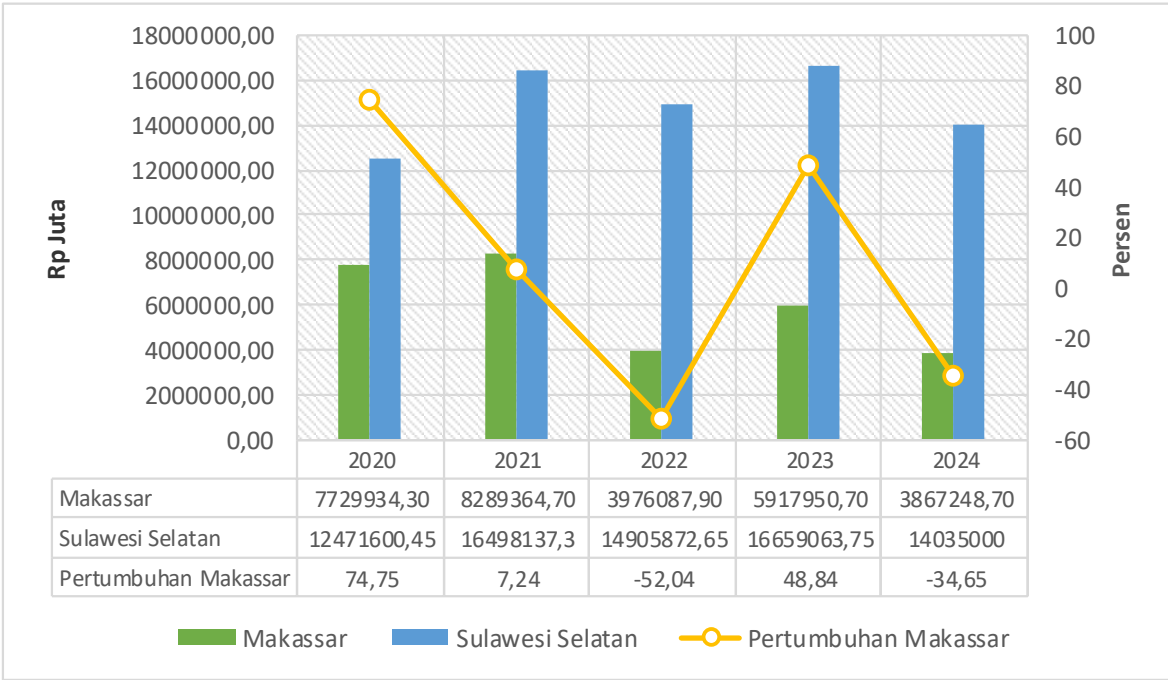
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar (diolah), tahun 2025

Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan selama periode Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, PMDN Kota Makassar mencapai Rp 7.454.421,00 dengan pertumbuhan sebesar 143,05%, sementara Sulawesi Selatan mencatatkan nilai Rp 9.142.047,5. Memasuki tahun 2021, PMDN Kota Makassar mengalami

peningkatan menjadi Rp 7.571.355 juta, dengan pertumbuhan sebesar 1,57%. Sulawesi Selatan pada tahun yang sama mengalami peningkatan mencapai Rp 12.075.383,7. Tahun 2022 menunjukkan penurunan di kedua wilayah, dengan PMDN Kota Makassar turun ke Rp 3.483.455,7 dengan pertumbuhan -53,99%, sedangkan Sulawesi Selatan mengalami penurunan menjadi Rp 7.527.989,6. Tahun 2023 Jumlah PMDN Kota Makassar meningkat menjadi Rp 5.238.910,6 dan pertumbuhan sebesar 50,39%, sementara Sulawesi Selatan mencatatkan nilai Rp 11.468.311,00. Tahun 2024 kembali menunjukkan penurunan nilai PMDN Kota Makassar turun ke Rp 3.286.368,3 dengan pertumbuhan negatif -37,27%.

Kinerja investasi Kota Makassar baik dalam bentuk PMA maupun PMDN tidak terlepas dari berbagai capaian pembangunan ekonomi Kota Makassar seperti fasilitas infrastruktur jalan yang semakin membaik, ketersediaan listrik, dan telekomunikasi, lembaga-lembaga perbankan dan non-perbankan, serta tak kalah pentingnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kota untuk menarik para investor. Kesemuanya ini merupakan faktor-faktor yang secara umum penyebab ketertarikan para investor untuk menanamkan modalnya. Di sisi lain, perubahan kebijakan nasional, perubahan iklim investasi dunia seperti nilai tukar, dan kondisi politik nasional dan dunia juga secara signifikan turut berpengaruh terhadap kegiatan investasi suatu daerah termasuk Kota Makassar.

Grafik 2.122
Perkembangan PMA dan PMDN Kota Makassar dan
Provinsi Selatan, Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar (diolah), tahun 2025

Kota Makassar mengalami fluktuasi investasi. Pada 2020, nilai investasi mencapai 7.729.934,30 juta rupiah dengan pertumbuhan 74,75%. Investasi meningkat pada 2021 menjadi 8.289.364,70 juta rupiah, dengan pertumbuhan menjadi 7,24%. Tahun 2022 terjadi penurunan dengan nilai investasi hanya 3.976.087,90 juta rupiah dan pertumbuhan negatif -52,04%. Kemudian meningkat kembali pada 2023 dengan nilai 5.917.950,70 juta rupiah dan pertumbuhan 48,84%, investasi kembali menurun pada 2024 menjadi Rp 3.867.248,70 juta dengan pertumbuhan negatif -34,65%.

Sementara itu, Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan menunjukkan nilai investasi yang lebih tinggi dan relatif lebih stabil

dibandingkan Kota Makassar. Nilai investasi Sulawesi Selatan berkisar antara 12.471.600,45 juta rupiah hingga Rp 16.659.063,75 juta selama periode tersebut, dengan puncaknya pada tahun 2023.

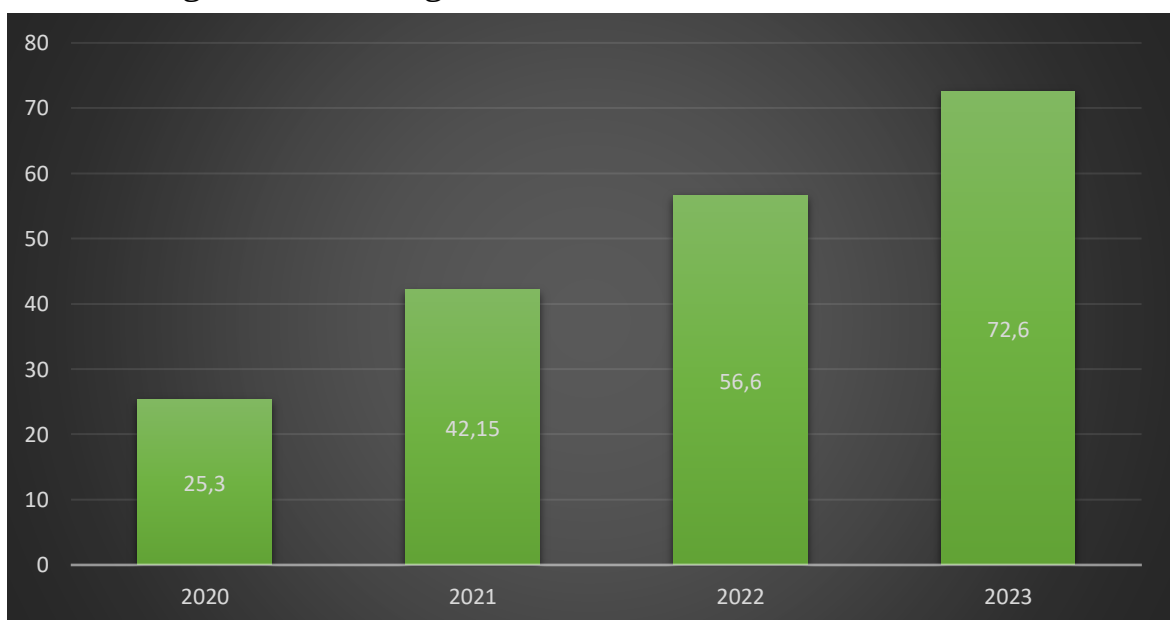
Tren ini menunjukkan bahwa meskipun Makassar merupakan kota utama di Sulawesi Selatan, kontribusinya terhadap total investasi provinsi berfluktuasi. Fenomena penurunan drastis pada tahun 2022 dan 2024 di Kota Makassar perlu menjadi perhatian khusus bagi pengambil kebijakan ekonomi daerah.

2.3.7.4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. IPKD ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Grafik 2.123

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2020 – 2023



Sumber: Badan Pengembangan dan Penelitian Kemendagri, Tahun 2025

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, indeks pengelolaan keuangan berada di angka 25,3 point, kemudian meningkat menjadi 42,15 poin pada tahun 2021, yang menunjukkan peningkatan hampir 70%. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan indeks mencapai 56,6 point, menandakan pertumbuhan sekitar 35% dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 IPKD Kota Makassar mencapai 72,6 point, yang berarti peningkatan sekitar 26% dari tahun 2022. Peningkatan secara konsisten ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar, yang mencerminkan upaya pemerintah kota dalam meningkatkan tata kelola dan transparansi keuangan. Adapun data tahun 2024 akan dirilis di bulan Desember 2025, namun jika melihat tren yang ada, kemungkinan besar juga akan bertumbuh positif.

2.3.7.5. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah tolok ukur penting untuk menilai tingkat kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses terhadap layanan keuangan di tingkat Kabupaten/Kota. Indeks ini merupakan turunan dari Indikator Inklusi Keuangan yang umumnya diterapkan pada level provinsi, menjadikannya indikator *proxy* yang relevan untuk analisis di tingkat



daerah. Perhitungan IKAD didasarkan pada data dari sisi supply (penyediaan layanan keuangan) dan demand (permintaan akan layanan keuangan), dan terdiri dari 14 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama: Penggunaan, Ketersediaan, dan Kedalaman akses keuangan. Dengan rentang nilai antara 0 hingga 10, semakin tinggi nilai IKAD menunjukkan semakin baiknya tingkat akses keuangan di suatu wilayah.

Dimensi Penggunaan dalam IKAD adalah salah satu komponen kunci yang mengukur pemanfaatan layanan keuangan formal oleh individu dan pelaku usaha di suatu wilayah. Secara spesifik, dimensi ini merepresentasikan rasio antara jumlah pengguna layanan keuangan formal dengan total populasi penduduk. Semakin tinggi nilai yang dicapai dalam dimensi ini, semakin banyak penduduk yang aktif memanfaatkan berbagai layanan dan produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Pemanfaatan ini mencakup beragam aktivitas finansial, mulai dari transaksi sehari-hari, penyimpanan dana, akses pembiayaan (pinjaman), hingga perlindungan melalui produk asuransi. Untuk mengukur tingkat pemanfaatan ini secara komprehensif, Dimensi Penggunaan terdiri dari sembilan (9) indikator spesifik. Indikator-indikator tersebut dirancang untuk menangkap berbagai aspek keterlibatan masyarakat dengan sistem keuangan formal, termasuk kepemilikan rekening bank atau lembaga keuangan lainnya, penggunaan dompet digital (*e-wallet*) untuk berbagai transaksi, akses dan pemanfaatan fasilitas pinjaman, serta kepemilikan polis asuransi sebagai bentuk perlindungan finansial.

Dimensi Ketersediaan adalah komponen kedua dari IKAD yang berfokus pada fasilitas layanan keuangan formal tersedia di suatu wilayah. Secara khusus, dimensi ini diukur dengan membandingkan jumlah fasilitas layanan keuangan formal per 100.000 penduduk dewasa. berarti semakin banyak fasilitas layanan keuangan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk dewasa, semakin tinggi nilai yang diperoleh suatu wilayah dalam dimensi ini, yang pada gilirannya menunjukkan tingkat ketersediaan layanan keuangan formal yang lebih baik. Untuk mengukur tingkat ketersediaan menggunakan tiga indikator utama mencakup Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang merupakan titik akses fisik penting untuk penarikan tunai dan transaksi dasar lainnya. Selanjutnya Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor), berdasarkan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif, yang memungkinkan layanan perbankan dasar di daerah-daerah tanpa kantor cabang. Terakhir, indikator merchant *QRIS* (*Quick Response Code Indonesian Standard*) menunjukkan ketersediaan opsi pembayaran digital di berbagai titik transaksi.

Dimensi Kedalaman merupakan komponen terakhir dalam IKAD yang mengukur tingkat pemanfaatan dan kontribusi layanan keuangan terhadap perekonomian daerah yang diukur melalui dua perbandingan kunci: nominal tabungan/deposito dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta nominal pinjaman UMKM dibandingkan dengan total nominal pinjaman. Kedua rasio ini secara kolektif mencerminkan seberapa efektif layanan dan produk keuangan dimanfaatkan di suatu wilayah, dan sejauh mana sektor keuangan berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal. Semakin tinggi nilai yang dicapai oleh suatu wilayah dalam Dimensi Kedalaman, semakin mendalam pula tingkat inklusi keuangannya, berarti bahwa tidak hanya semakin banyak penduduk yang memiliki akses dan menggunakan layanan keuangan, tetapi juga bahwa pemanfaatan layanan tersebut secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, nilai IKAD 6,01 untuk Kota Makassar pada tahun 2024 adalah indikasi positif memiliki ekosistem keuangan yang berkembang

dan relatif mudah diakses, juga berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan bahwa upaya inklusi keuangan perlu terus ditingkatkan.

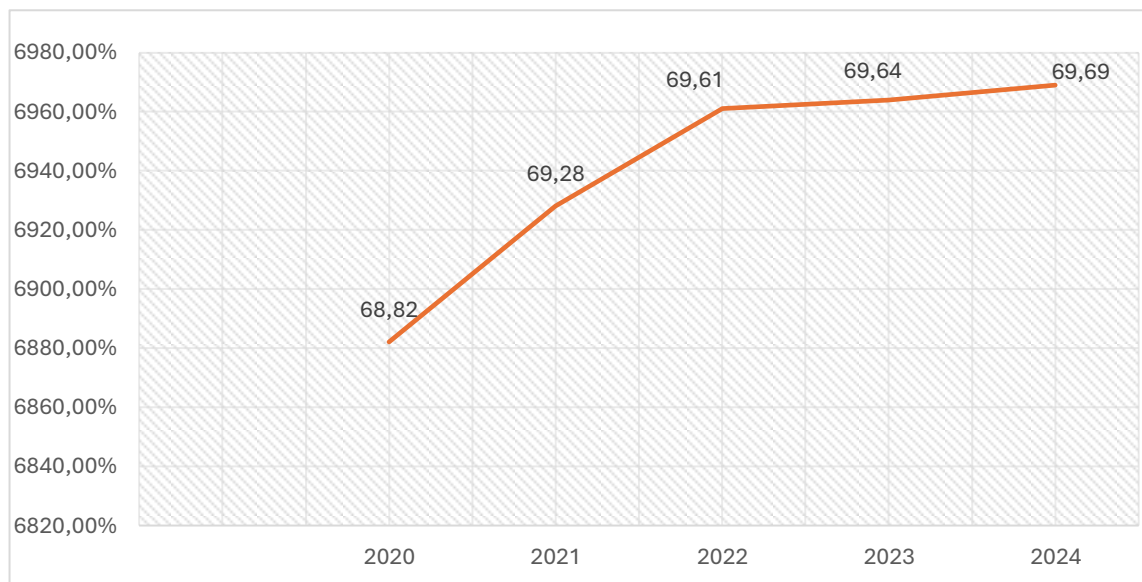
2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas, dan Adaptif

2.4.1.1. Nilai SAKIP

Berdasarkan data hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP Kota Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme Pemerintah Kota Makassar seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi. Meskipun demikian nilainya masih berada pada kisaran 68–69 yang berarti masih berada pada predikat B (interpretasi Baik). Hal ini menggambarkan bahwa nilai SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II per unit kerja.

Grafik 2.124
Nilai SAKIP Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2025

Predikat B juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Makassar sudah berjalan dengan baik namun perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut terutama melakukan pembenahan sistem dan kualitas kerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan implementasi.

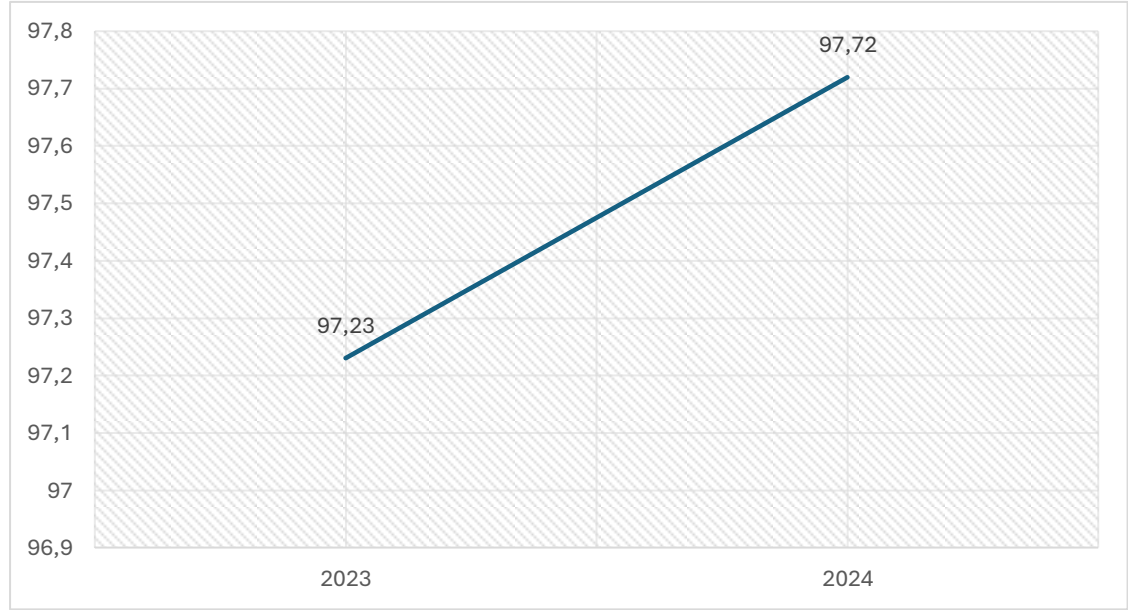
2.4.1.2. Indeks Reformasi Hukum

Capaian IRH Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023 sebesar 97,23 disebabkan karena nilai dari empat komponen hampir mendekati angka maksimal. Dari empat aspek yang dinilai dalam IRH, pemerintah kota mendapat nilai maksimum pada dua aspek yaitu Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas mendapat nilai 25 dan Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidu mendapat nilai 35.



Aspek tingkat koordinasi kementerian hukum dan hak asasi manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi mendapat nilai 22,4 dari bobot 25 dan aspek yang mendapat nilai paling rendah adalah penataan database peraturan perundang-undangan.

Grafik 2.125
Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023-2024



Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, Tahun 2025

Pada tahun 2024 capaian IRH Kota Makassar meningkat menjadi 97,72 dimana pemerintah kota mendapat nilai maksimum pada aspek penataan database peraturan perundang-undangan. Rekomendasi yang diberikan agar Pemerintah Kota Makassar dapat konsisten dalam pengelolaan JDIH sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Aspek Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas mendapat nilai 22,5 dari bobot 25. Aspek kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu mendapat nilai 23,5 dari bobot 25. Dan aspek yang mendapat nilai paling rendah adalah aspek Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi mendapat nilai 22,4 dari bobot 25. Catatan yang diberikan untuk tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah Kota Makassar menetapkan beberapa Perda dan Perkada, namun pada data dukung yang disampaikan hanya Perda dan Perkada yang dianggap memenuhi persyaratan dan data dukung surat selesai harmonisasinya berbeda dengan surat permohonan harmonisasi yang diajukan. Hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan agar nilai IRH Kota Makassar di masa yang akan datang lebih meningkat lagi dan semakin mendekati nilai 100.



Tabel 2.33
Rincian Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemerintah
Kota Makassar Tahun 2024

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	22,4	23.5
1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang- undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	16,8	16.5
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6	5.4
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6	6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	4,8	5.1
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa, kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, dan/atau DPRD di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau online	7		7
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	25	22,5
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7		6,3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6		5,4



No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai 2023	Nilai 2024
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12		10,8
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan	30	35	22.6
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8		6
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10		8.5
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6		5.1
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksisting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6		3
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	3,75	20
1	Pengelolaan JDIIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20		20
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	86,15	88,6
NILAI APRESIASI		0	11,08	9,12
NILAI AKHIR INDEKS REFORMASI HUKUM		0	97,23	97,72

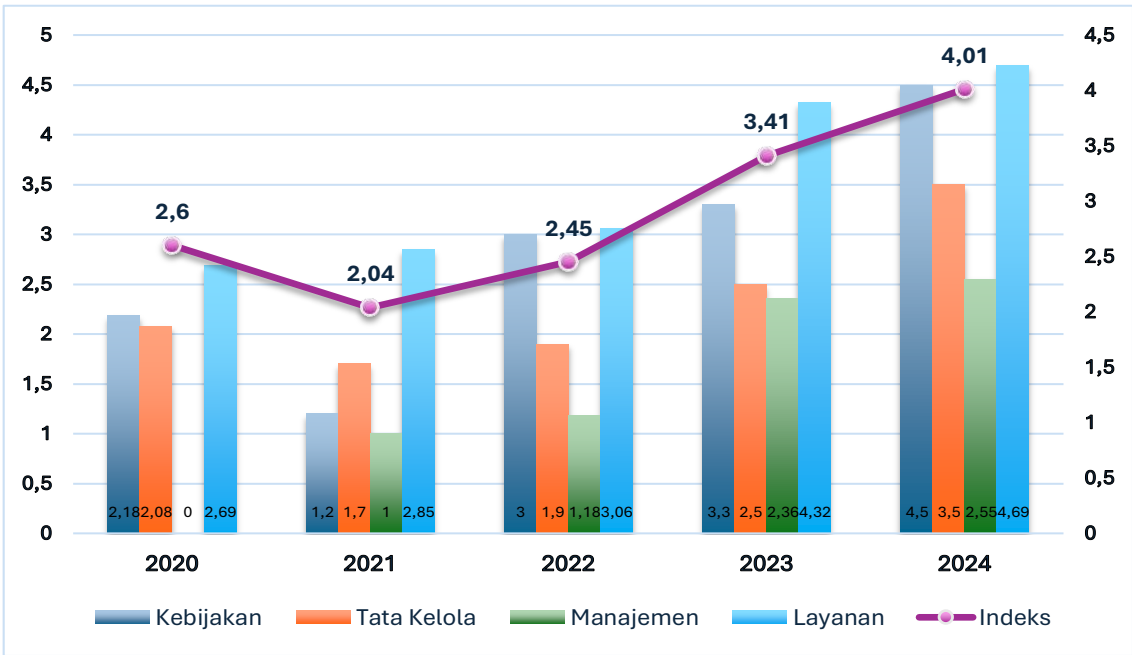
Sumber: Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2025

2.4.1.3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai Indeks SPBE mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari nilai predikat baik dengan nilai indeks 2,6 pada tahun 2020 menjadi sangat baik dengan nilai indeks 4,01 pada tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi secara nasional terhadap 4 domain dan 8 aspek penilaian. Indeks SPBE Kota Makassar lebih tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata capaian indeks secara nasional, provinsi, kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Lembaga Non Struktural dan instansi lainnya, dan lebih rendah 0,02 jika dibandingkan nilai SPBE Kementerian.

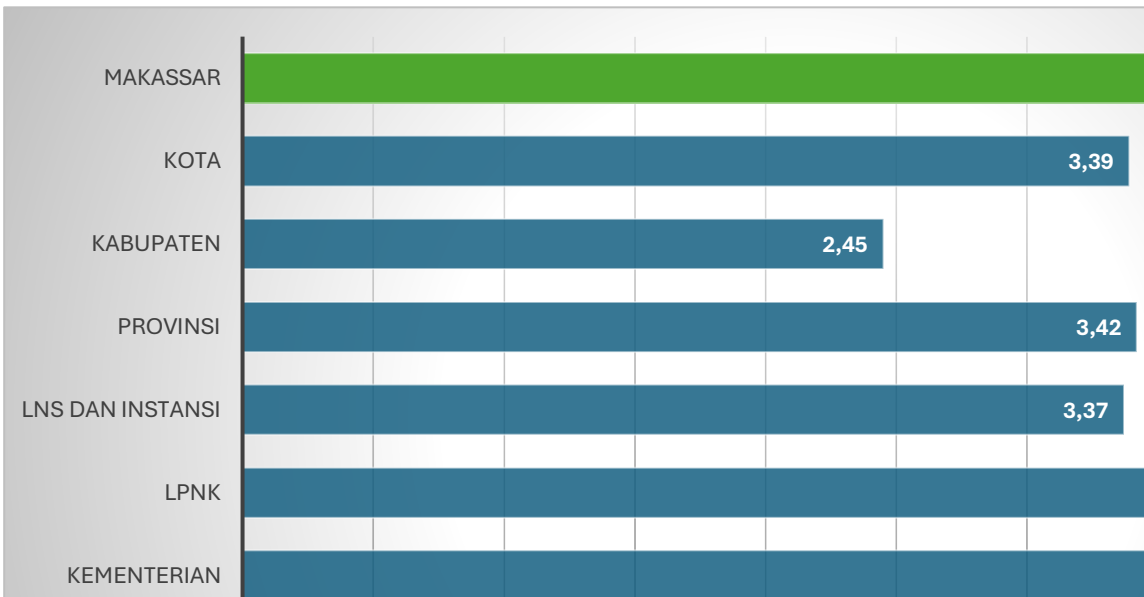


Grafik 2.126
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Makassar
Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2020-2024.

Grafik 2.127
Perbandingan Rata-Rata Capaian
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Nasional Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2025

Meningkatnya nilai Indeks SPBE Kota Makassar didukung oleh keunggulan pada penerapan Aspek Internal Tata Kelola SPBE, Penerapan Teknologi dan Informasi, Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik yang secara keseluruhan saling terkait dan memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kota Makassar.



Tabel 2.34
Rata-Rata Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kota Makassar berdasarkan Domain dan Aspek Tahun 2020-2024

Indeks	Nilai				
	2020	2021	2022	2023	2024
Domain Kebijakan SPBE	2,18	1,20	3,00	3.30	4,50
• Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,18	1,20	3,00	3.30	4,50
• Kebijakan Layanan	2,18				
Domain Tata Kelola SPBE	2,08	1,70	1,90	2.50	3,50
• Perencanaan Strategis SPBE	2,02	1,75	1,00	1.50	2,75
• Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,10	1,25	2,25	3.25	3,50
• Penyelenggara SPBE	2,12	2,50	3,00	3.00	5,00
Domain Manajemen SPBE	-	1,00	1,18	2.36	2,55
• Penerapan Manajemen SPBE	-	1,00	1,25	2.63	2,63
• Audit TIK	-	1,00	1,00	1.67	2,33
Domain Layanan SPBE	2,69	2,85	3,06	4.32	4,69
• Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,80	3,40	3,10	4.20	4,60
• Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,49	2,00	3,00	4.20	4,83
SPBE	2,60 Baik	2,04 Cukup	2,45 Cukup	3.41 Baik	4,01 Sangat Baik

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2025

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola dan Penerapan Teknologi dan Informatika, telah dilakukan percepatan penerapan arsitektur SPBE, integrasi layanan dan interoperabilitas data, telah mengatur siklus pembangunan aplikasi terkait proses konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK dilengkapi dengan Surat Edaran dan SOP pembangunan aplikasi, telah mewajibkan seluruh perangkat daerah mempergunakan layanan pusat data Pemerintah Kota Makassar, mengatur interkoneksi layanan pusat dengan pusat data nasional, serta dilengkapi SOP berkaitan dengan layanan pusat data, Layanan Jaringan Intra telah dilengkapi SOP dan mewajibkan kepada seluruh perangkat daerah yang telah terkoneksi dengan jaringan intra pada instansi pusat dan pemerintah daerah lainnya, tersedia aturan manajemen keamanan informasi dan kewajiban seluruh perangkat daerah menerapkan manajemen keamanan informasi serta telah mengatur pelaksanaan audit TIK mencakup audit infrastruktur SPBE, audit Aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE. Pada Aspek Penyelenggara SPBE telah dipenuhi dengan adanya Tim Koordinasi SPBE secara formal dilengkapi program kerja yang telah disosialisasikan dan kolaborasi penerapan SPBE bersama seluruh perangkat daerah dalam bentuk Forum Satu Data Indonesia.

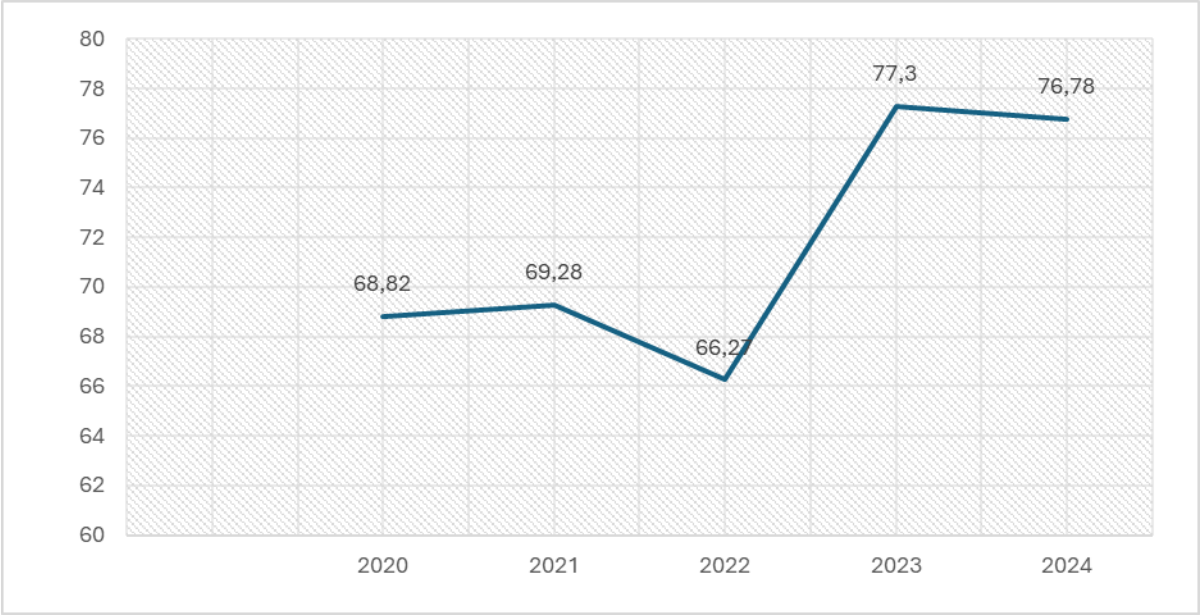
Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kota Makassar sudah dilaksanakan dengan baik dan telah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai yang telah ditetapkan secara nasional, atau melakukan replikasi dari layanan-layanan publik sejenis yang dibangun oleh Instansi lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi pendorong penerapan SPBE keseluruhan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian.



2.4.1.4. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran keberhasilan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah telah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas.

Grafik 2.128
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2024

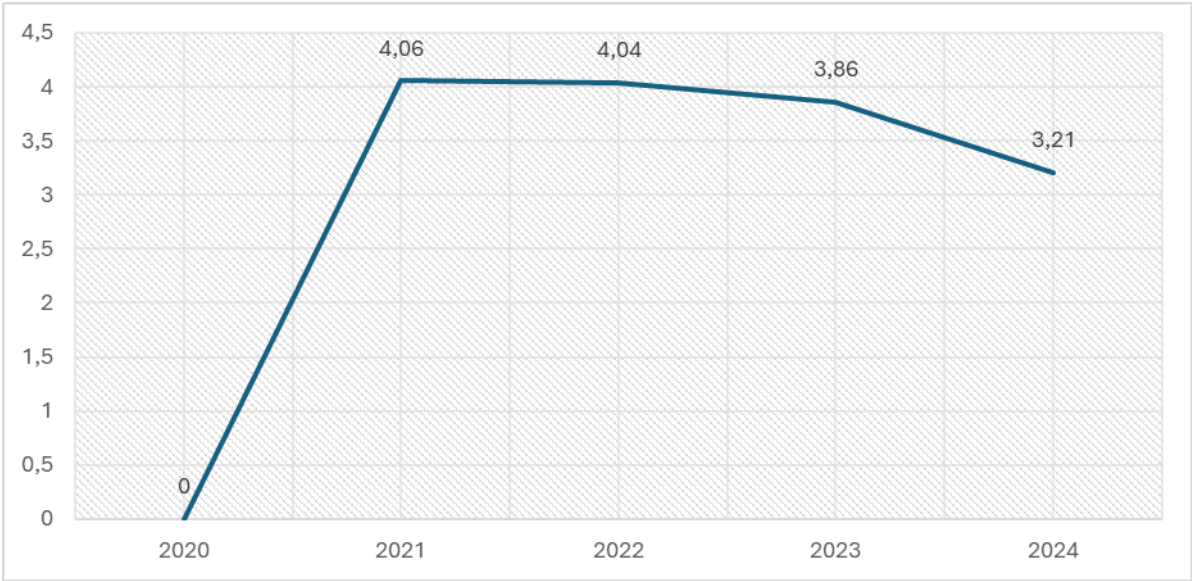
Nilai IRB Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 68,82 dan mengalami peningkatan mencapai 69,28 di tahun 2021. Namun demikian terjadi penurunan pada tahun 2022 dengan nilai IRH 66,27. Tahun 2023 IRB pemerintah Kota Makassar mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 77,30 atau naik 11,03 poin dan menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan catatan terkait dengan capaian tahun 2023 yaitu angka IRB tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 nilai IRB Kota Makassar mengalami penurunan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu 76,78. Meskipun demikian dengan capaian ini Kota Makassar masih termasuk dalam kategori BB atau baik. Kategori ini berada pada kategori ketiga dari tujuh kategori nilai IRB. Kategori baik yang dicapai Kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar berhasil memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Meskipun demikian sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Dampak nyata terhadap pembangunan yang masih rendah dapat dilihat dari nilai RB tematik yang masih rendah yaitu 9,70 dan masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek RB general meskipun pada aspek ini nilainya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 67,08.

2.4.1.5. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Grafik 2.129
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tahun 2025

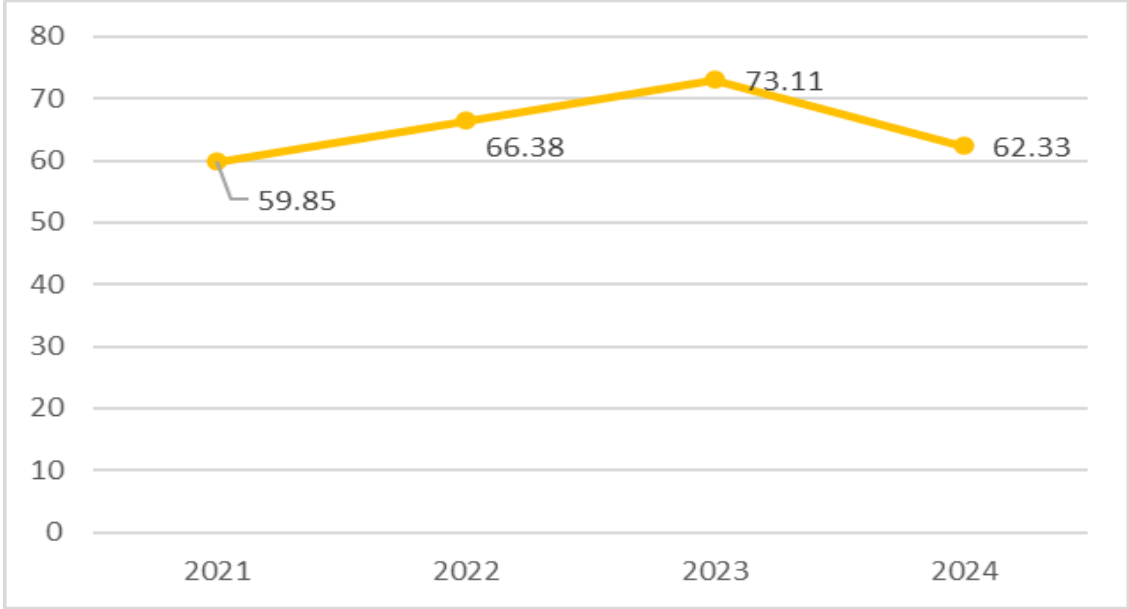
Selama 5 tahun terakhir terdapat perubahan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Makassar. Pada tahun 2020 nilai IPP 0 (Na) dan pada tahun 2021 nilai IPP mencapai 4,06, tapi tiga tahun berikutnya nilai tersebut terus menurun ke angka 4,04 dan 3,86 bahkan di tahun 2024 nilainya hanya 3,21. dimana salah satu perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian Nilai IPP KemenPANRB yang rendah mempengaruhi nilai Indeks Pelayanan Publik secara keseluruhan. Capaian IPP Kota Makassar tahun 2023 dan 2024 menempati kategori “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

Meskipun sudah mencapai kategori baik, pemerintah daerah masih perlu memberi perhatian pada nilai IPP karena belum mencapai nilai optimum dan karena tren dalam tiga tahun terakhir yang menurun. Pemerintah Kota Makassar perlu fokus pada formulir 02 dan 03. Pada formulir 02 dan 03, terdapat beberapa aspek yang penting diperhatikan yaitu kebijakan pelayanan yang di dalamnya terdiri dari dimensi yaitu standar pelayanan, mklumat pelayanan, SKM, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Semua aspek ini akan dinilai oleh tim penilai (untuk formulir 02) dan masyarakat (untuk formulir 03), sehingga penting melakukan perbaikan secara komprehensif pada semua aspek tersebut.

2.4.1.6. Indeks Survey Penilaian Integritas

Berdasarkan data yang tersedia pada tiga tahun terakhir, nilai indeks integritas pemerintah Kota Makassar mengalami kenaikan. Tahun 2021, pemerintah kota mendapat nilai 59,85, masih termasuk kategori rendah, dan secara relatif lebih rendah dari rata-rata indeks integritas dari seluruh peserta SPI yaitu 72,43. Tahun 2022, pemerintah kota berhasil melakukan beberapa perbaikan sehingga menaikkan angka indeks ke 66,38 atau bertambah 6,53 poin. Meski naik, indeks SPI pemerintah Kota Makassar masih lebih rendah dari seluruh peserta SPI yang mencapai 71,94 dan masih termasuk kategori “rentan”. Angka 66,38 memberikan gambaran bahwa risiko korupsi pada tujuh aspek yang dinilai relatif rendah. Memasuki tahun 2023, indeks SPI kembali naik 6,73 poin menjadi 73,11 atau masuk dalam kategori “waspada”. Capaian tahun 2024 lebih rendah dari nilai tahun sebelumnya 62,33. Nilai indeks menunjukkan bahwa pemerintah kota pada dimensi keyakinan bahwa petugas memberikan informasi dan prosedur layanan yang lengkap kepada pengguna layanan masuk dalam kategori Terjaga dengan angka tertinggi 78.0, hal ini berarti kota Makassar mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi.

Grafik 2.130
Indeks SPI Kota Makassar Tahun 2021-2024

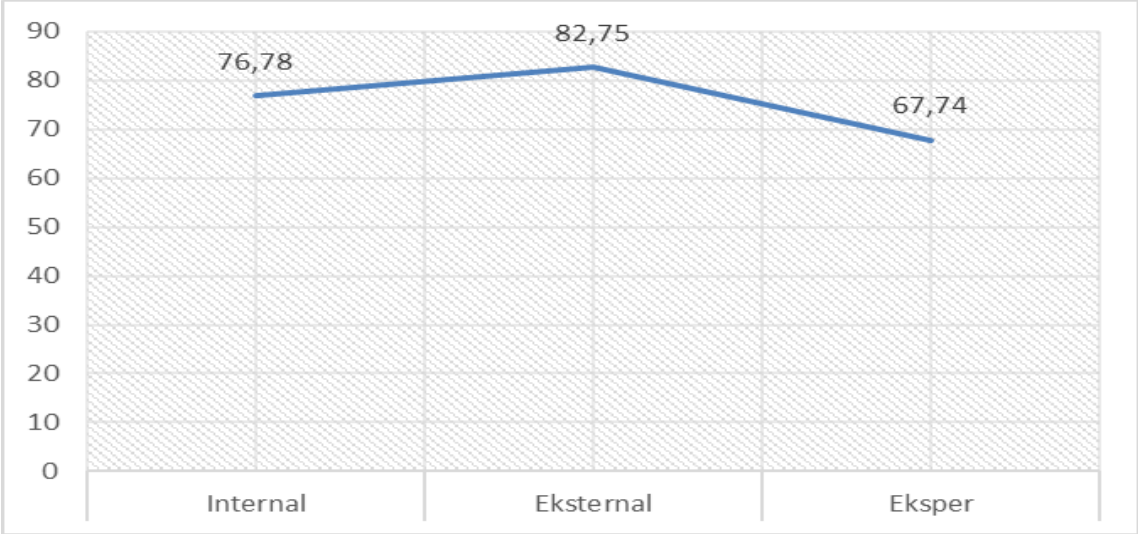


Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2025

Jika dilihat per komponen, pemerintah kota mendapat nilai tertinggi pada komponen penilaian eksternal yaitu penilaian yang dilakukan oleh pihak pengguna jasa atau pengguna layanan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan nilai indeks 82,75, sementara untuk komponen penilaian internal mendapat nilai 76,78 dan paling rendah adalah nilai dari komponen penilaian *expert* sebesar 67,74.



Grafik 2.131
Ringkasan Indeks SPI Tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2024

Pada lima aspek yang dinilai yaitu perdagangan pengaruh, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ dan integritas pelaksanaan tugas. Pada perdagangan pengaruh, responden dari internal organisasi pemerintah Kota Makassar menilai risiko korupsi pada semua indikator dalam aspek perdagangan pengaruh termasuk kategori tinggi. Itu artinya, menurut penilaian responden internal ada keterlibatan pihak lain dalam penentuan program, penentuan pemenang tender, pemberian izin/rekomendasi, negosiasi sanksi/denda, kebijakan SDM, dan dalam penetapan penerima dan penyaluran bantuan-bantuan.

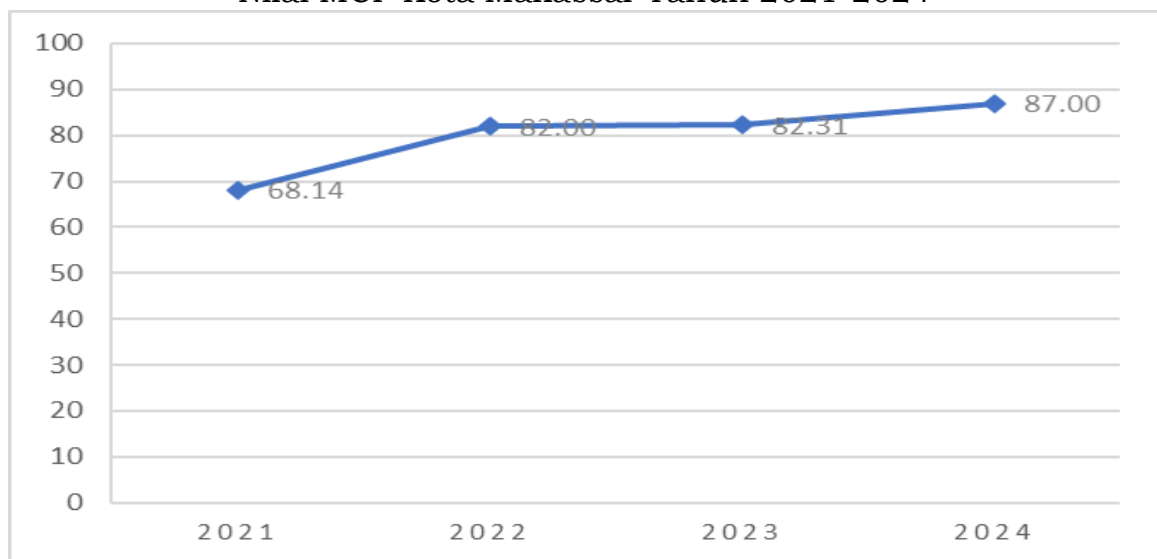
Hasil analisis nilai SPI menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar secara umum memiliki keberadaan korupsi dan risiko korupsi yang tinggi. Atas dasar tersebut, KPK memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota. Menurut KPK, perlu perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan dengan memastikan keberadaan hal-hal berikut: (1) Menegakkan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/ atau regulasi internal lainnya secara adil dan konsisten; (2) Internalisasi larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi disertai contoh dari pimpinan; (3) Implementasi kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi; (4) Mengintensifkan upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan; (5) Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.

Pemerintah kota juga perlu melakukan perbaikan mendasar pada upaya pencegahan korupsi. Perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap upaya pencegahan suap/ gratifikasi harus dilakukan dengan memastikan hal-hal berikut: (1) Menyusun kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/ pengelolaan gratifikasi di instansi; (2) Menegakkan aturan terkait larangan dan sanksi penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten; (3) Internalisasi melalui pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/ pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/ gratifikasi; (4) Membangun sistem pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.

2.4.1.7. Nilai *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK

Selama empat tahun terakhir, nilai MCP Kota Makassar mengalami kenaikan dari 68,14 di tahun 2021, kemudian 82 tahun 2022, dan di tahun 2023 menjadi 82,31 serta di tahun 2024 menjadi 87.00. Nilai MCP sebesar 87,00 yang dicapai oleh Kota Makassar pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah kota berada dalam kategori Klaster I (skor MCP 75 – 100), yang berarti Pemerintah Kota Makassar telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya pencegahan korupsi. Skor ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi sebagian besar indikator dan sub indikator yang ditetapkan dalam penilaian MCP, mencakup area-area seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah. Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan efektivitas Makassar dalam mengimplementasikan langkah-langkah antikorupsi yang telah ditentukan. Selain itu, capaian MCP Kota Makassar tahun 2024 merupakan yang tertinggi antara kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Grafik 2.132
Nilai MCP Kota Makassar Tahun 2021-2024



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2024

Meskipun demikian, jika komparasinya diperluas ke daerah se-indonesia yang termasuk kota, capaian kota Makassar masih rendah. Pemerintah kota Semarang mendapat nilai MCP sebesar 98 tahun 2023, Pemerintah kota Denpasar dan kota Surabaya nilai MCP-nya 97, Pemerintah kota Banda Aceh, kota Pasuruan, dan kota Blitar mencatat nilai MCP 96. Beberapa kota lainnya memiliki nilai MCP lebih tinggi dari kota Makassar. Dilihat dari peringkat, nilai MCP kota Makassar tahun 2023 berada di peringkat 263 dari total entitas pemerintah daerah yang dinilai. Masih relatif rendahnya nilai MCP Makassar dibandingkan daerah lain di Indonesia disebabkan karena masih ada beberapa area yang nilainya rendah.

Salah satu area yang nilainya rendah adalah perizinan. Tahun 2023, area perizinan kota Makassar hanya mendapat nilai 74, paling rendah dari area lainnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah berupaya cukup baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Daerah tersebut telah memenuhi banyak indikator yang ditetapkan, namun ada beberapa area yang memerlukan perbaikan lebih

lanjut untuk mencapai kategori yang lebih tinggi. Dari beberapa indikator dalam area perizinan, yang nilai paling rendah adalah transparansi dan akuntabilitas. Nilai transparansi dan akuntabilitas pada area perizinan Kota Makassar 0. Transparansi dan akuntabilitas dalam area perizinan merujuk pada keterbukaan informasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam proses pemberian izin. Angka 0 pada indikator transparansi dan akuntabilitas untuk area perizinan Kota Makassar menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan upaya transparansi dan akuntabilitas sama sekali dalam proses perizinan.

Selain ini nilai relatif rendah juga ada pada area manajemen ASN. Tahun 2023, nilai area manajemen ASN Kota Makassar hanya 77. Dari tiga indikator area manajemen ASN, paling rendah nilainya adalah sistem merit, hanya 50. Sistem merit merujuk pada sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa pengangkatan, promosi, dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja individu, bukan berdasarkan hubungan pribadi, suap, atau gratifikasi.

Area terakhir yang nilainya rendah adalah pengadaan barang dan jasa. Pada area ini, pemerintah Kota Makassar hanya mendapat nilai 78 karena nilai salah satu indikatornya rendah yaitu pengendalian pengadaan. Nilai indikator pengendalian pengadaan yang diperoleh Kota Makassar hanya 58 disebabkan beberapa sub indikator mendapat nilai sangat rendah yaitu tindak lanjut review dan tata kelola PBJ hanya mendapat nilai 73 poin, Pencegahan Korupsi Proyek Strategis Daerah hanya 10 poin, dan survey kepuasan Masyarakat hanya 10 poin.

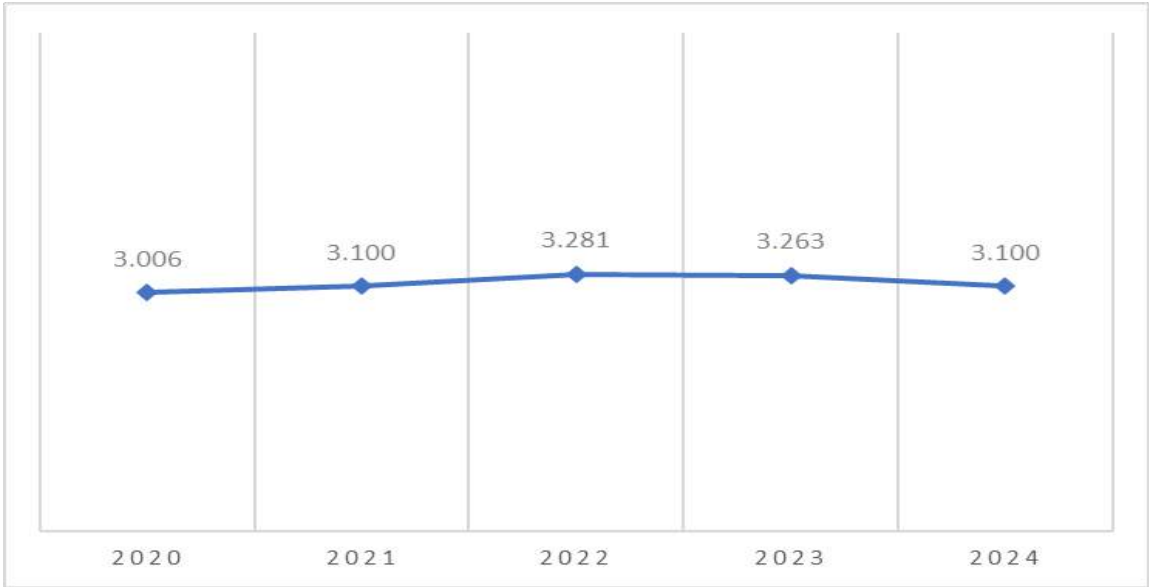
2.4.1.8. Indeks Maturitas SPIP

Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah landasan vital dalam memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta kesalahan dan kegagalan dalam proses pengambilan keputusan. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa indeks maturitas SPIP Kota Makassar cenderung naik walaupun kenaikannya relatif kecil, terkecuali pada tahun 2024 yang menunjukkan penurunan yakni berada pada angka 3.100. Hal ini disebabkan karena komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan diketahui terdapat sasaran strategis OPD yang belum relevan dengan tujuan Strategis Pemerintah Daerah, sehingga masih perlu dilakukan perbaikan kualitas Indikator pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Pemerintah Daerah maupun OPD serta indikator kinerja yang belum dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Penurunan indeks maturitas SPIP tahun 2024 pada sistem pengendalian intern pemerintah Kota Makassar yang belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi; manajemen risiko pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dan pengambilan keputusan; Organisasi perangkat daerah belum memiliki kebijakan risiko kemitraan; Sebagian besar OPD belum memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi; dan Belum dilakukan reuiu atas proses manajemen risiko oleh APIP. Lima catatan ini yang membuat indeks maturitas turun 0,163 poin tahun 2024.



Grafik 2.133
Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tahun 2025

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, nilai indeks maturitas pemerintah Kota Makassar sudah mencapai level 3 atau termasuk kategori “terdefinisi”. Tingkat maturitas “Terdefinisi” menunjukkan bahwa organisasi, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Selain itu Pemerintah Kota Makassar juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi. Level terdefinisi merupakan level ketiga dari lima level maturitas, dimana dua level di atasnya adalah Tingkat Terkelola dan Terukur dan Tingkat Optimum.

2.4.2. Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh Serta Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Ukuran kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum diukur melalui 3 dimensi yaitu Dimensi system, dimensi strategi dan dimensi Sumber Daya Manusia., 7 sub dimensi yaitu strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam menegakkan Perda, Strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan Tibumtranmas, Pemberdayaan SDM, peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, perencanaan dan anggaran dan akuntabilitas. Metode Pengukuran IPKKU berdasarkan beberapa indikator, seperti tingkat kejahatan, tingkat pelanggaran peraturan daerah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Satpol PP, dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut kemudian



diolah menjadi sebuah skor atau nilai IPKKU. Nilai IPKKU atau kategori Sangat baik (80,01-100). Baik (60,01-80,00). Cukup (40,01-60,00). Buruk (20,01-40,00) dan sangat buruk (0,00-20,00).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022, yang menetapkan indeks ini sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Makassar meliputi Penegakan Peraturan Daerah, Pengelolaan Keamanan Publik, termasuk pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat. Peningkatan Kesadaran Hukum melalui sosialisasi dan edukasi kepada warga.

Tabel 2.35
Konstruksi Dimensi dan Sub Dimensi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Konstruksi	Dimensi	Subdimensi
Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	STRATEGI (Bobot 0,198)	Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penegakkan Perda dan Perkada (Bobot 0,333)
		Strategi dalam mencapai Kinerja Satpol PP dalam Penyelenggaraan Tibumtranmas (Bobot 0,667)
	SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (Bobot 0,490)	Pemberdayaan SDM (Bobot 0,5)
		Peningkatan Kapasitas SDM (Boboty 0,5)
	SISTEM (Bobot 0,312)	Sarana dan Prasarana (Bobot 0,25)
		Perencanaan dan Anggaran (Bobot0,5)
		Akuntabilitas (Bobot 0,25)

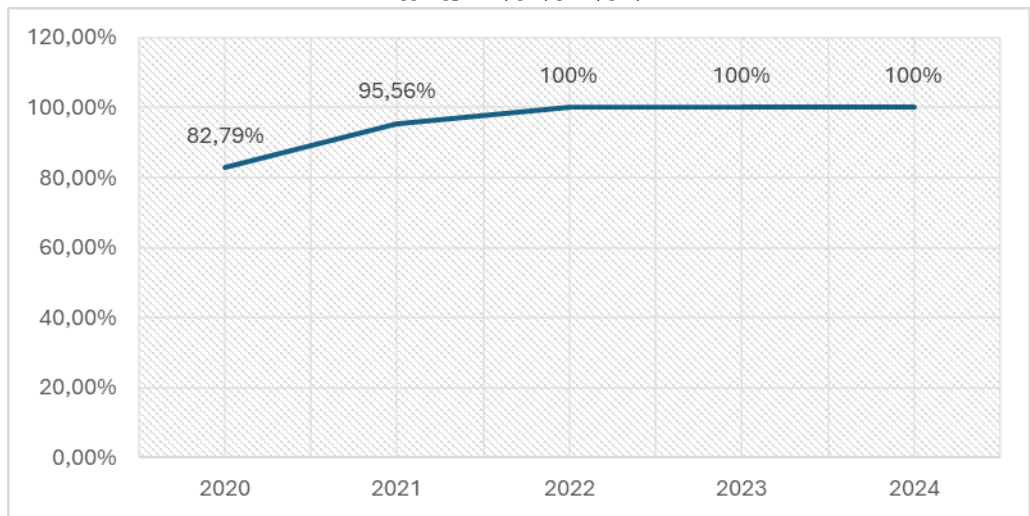
Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI (Kebijakan Strategis Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum), Tahun 2022

2.4.2.2. Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan

Ketertiban umum merupakan suatu kondisi masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, dan tertib, tanpa adanya gangguan atau ancaman yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Ketertiban umum meliputi beberapa aspek, antara lain: keamanan yakni terjaminnya keselamatan dan keamanan masyarakat dari ancaman kejahatan, kerusakan, atau bencana. Keteraturan yakni terjaminnya ketertiban dalam kehidupan sehari-hari, seperti lalu lintas, parkir, dan penggunaan ruang publik. Kedisiplinan yakni terjaminnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku.

Persentase gangguan ketertiban umum di Kota Makassar yang dapat diselesaikan pada tahun 2020 dan 2021 adalah 82,79% dan 95,56%. Untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 meningkat menjadi 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 hingga 2024, kinerja penyelesaian gangguan ketertiban umum terus membaik dimana Pemerintah Kota Makassar berhasil menyelesaikan semua gangguan ketertiban umum.

Grafik 2.134
Persentase Gangguan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan
Tahun 2020-2024



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Tahun 2025

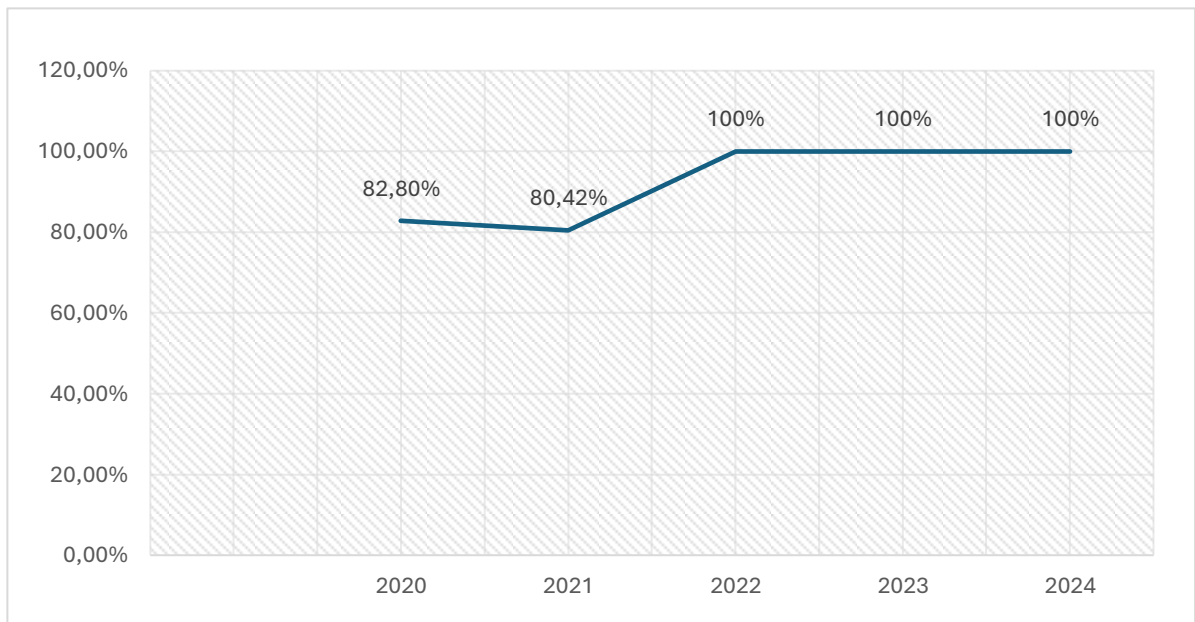
Upaya untuk meningkatkan ketertiban umum diantaranya adalah meningkatkan patroli keamanan, mengadakan kampanye kesadaran masyarakat, meningkatkan fasilitas umum, seperti lampu jalan dan tempat parkir, mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).

2.4.2.3. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah proses pelaksanaan dan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan bertujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mencegah dan menangani pelanggaran peraturan daerah. Langkah-langkah Penegakan Perda dan Perkada yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada, mengambil tindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, pengenaan sanksi terhadap pelanggar Perda dan Perkada, serta mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

Penegakan hukum berupa persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah menunjukkan kinerja yang baik. Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan pada tahun 2020 adalah 82,80%, tahun 2021 adalah 82,80%. Tahun 2022, 2023 dan 2024 menjadi kinerja terbaik pemerintah kota dalam penegakan hukum karena di tiga tahun ini angkanya mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada masyarakat Kota Makassar sehingga tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda yang ada di Kota Makassar semakin baik. Aspek pendukung lainnya adalah adanya ketersediaan anggaran dalam Penegakan Peraturan Daerah, tersedianya Sarana dan Prasarana, serta terbentuknya Tim Penegakan Perda dan Perwali.

Grafik 2.135
Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
yang Ditegakkan Tahun 2020-2024



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Tahun 2025

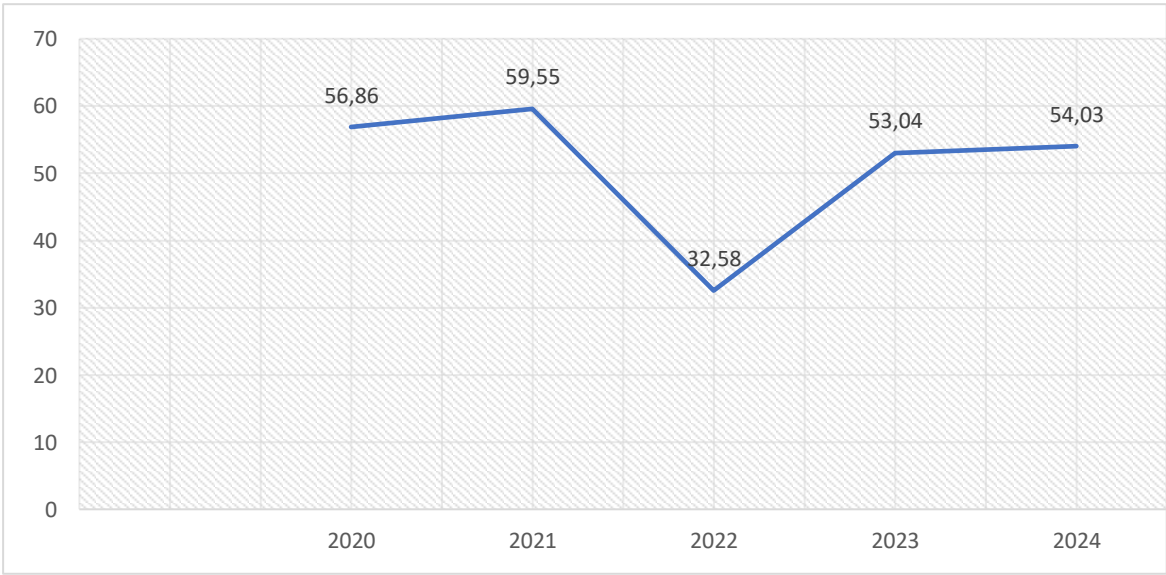
Dalam penegakan hukum Perda dan Perkada, Satpol PP Kota Makassar bekerja sama dengan instansi lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan bahwa pelanggaran Perda dan Perkada ditindak dengan tegas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya: Kepemimpinan yang kuat dan efektif dari Wali Kota dan jajarannya dapat mempengaruhi kinerja penegakan hukum, Ketersediaan aparat pemerintah daerah yang kompeten dan terlatih dalam penegakan hukum dapat meningkatkan kinerja, serta sistem dan prosedur yang efektif dalam penegakan hukum dapat memastikan bahwa pelanggaran hukum ditindak dengan cepat dan tepat. Adapun faktor eksternal meliputi kerja sama yang efektif dengan instansi lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, Dukungan masyarakat yang kuat, serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

2.4.2.4. Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani

Indikator persentase tindak kriminal yang ditangani dihitung dengan formulasi jumlah kasus kejahatan/kriminalitas dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah pada tahun berkenaan dan dikali 10.000. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas upaya penanggulangan kejahatan dan tingkat keamanan di wilayah Kota Makassar. Artinya terjadi beberapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti narkoba, pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.



Grafik 2.136
Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani Tahun 2020-2024



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa berdasarkan data tahun 2020 dan 2021 persentase tindak kriminal yang ditangani di Kota Makassar cenderung naik yakni 56,86% dan 59,55% dikarenakan turunnya jumlah kasus yang dilaporkan. Namun pada tahun 2022 persentase tindak kriminal yang ditangani di Kota Makassar turun menjadi 32,58% karena kasus yang dilaporkan menurun dan belum semua tindak kejahatan tersebut berhasil ditangani. Kenaikan kembali terjadi dua tahun berturut-turut, tahun 2023 menjadi 53,04 persen, dan sampai ke angka 54,03 persen pada tahun 2024.

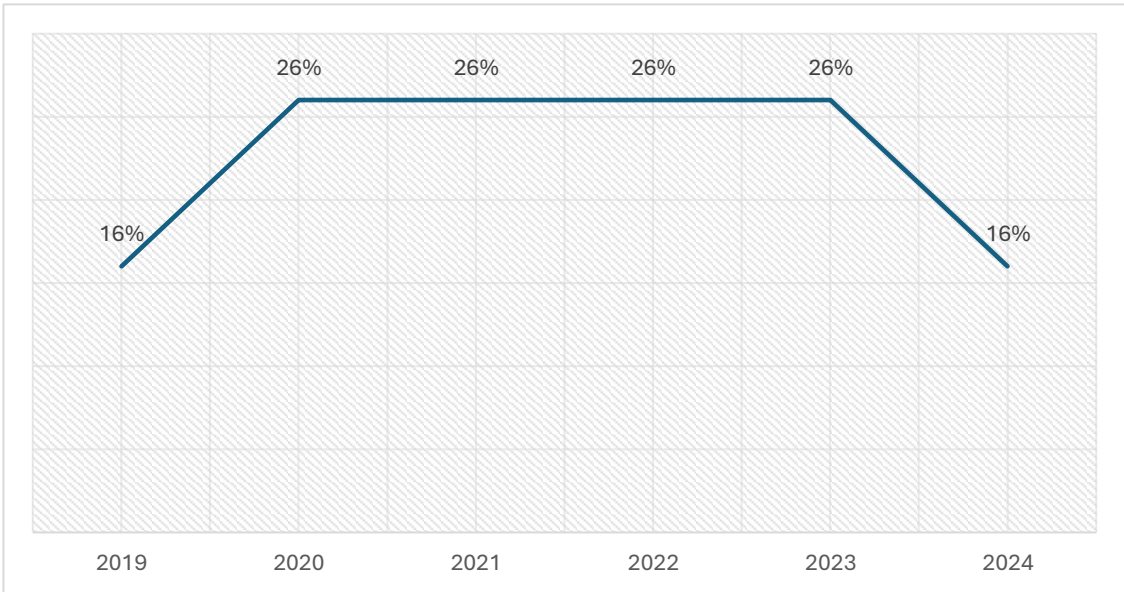
Kompleksitas suatu kasus terkadang membutuhkan waktu yang lama bagi pihak berwenang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Beberapa kasus kriminal memerlukan waktu yang lama serta sumber daya yang memadai untuk dapat diselesaikan. Faktor-faktor seperti jumlah terduga pelaku, wilayah geografis yang luas, dan keterlibatan lintas negara dapat membuat penanganan kasus menjadi kompleks dan memakan waktu

2.4.2.5. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD

Berdasarkan Undang-Undang, partai politik diwajibkan untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif termasuk DPRD. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Makassar masih belum mencapai target yang diharapkan di dua kali pemilihan anggota legislatif terakhir periode 2019-2024 dan periode 2024-2029. Pada akhir periode 2014-2019, di tahun 2019 perempuan terpilih di DPRD sebanyak 16%. Tetapi pada periode anggota DPRD Tahun 2019 sampai tahun 2024, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD di Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 26% dan kondisi ini cenderung stabil selama periode berjalan. Namun periode 2024-2029, keterwakilan perempuan kembali mengalami penurunan sebesar 16% dimana dari 50 kursi DPRD Kota Makassar hanya 8 kursi yang diduduki oleh legislator perempuan dengan persentase sebesar 16%.



Grafik 2.137
Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Anggota DPRD



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Makassar, Tahun 2025

Keterpilihan perempuan yang rendah di DPRD disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan politik membuat perempuan kurang siap untuk berpartisipasi dalam politik. Selain itu, stereotip gender dan norma sosial yang masih kuat di masyarakat juga menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya ekonomi dan jaringan sosial yang dimiliki perempuan. Hal ini membuat perempuan sulit untuk bersaing dengan laki-laki dalam pemilu. Selain itu, sistem politik yang masih didominasi oleh laki-laki juga membuat perempuan sulit untuk terpilih dalam politik. Akibatnya, meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan keterlibatan perempuan, representasi mereka masih jauh dari proporsional.

Untuk meningkatkan keterpilihan perempuan di DPRD, perlu dilakukan beberapa strategi, seperti meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan. Pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak politik dan pendampingan kepada perempuan yang ingin menjadi anggota DPRD, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan demikian, diharapkan keterpilihan perempuan di DPRD dapat meningkat dan peran perempuan dalam politik dapat lebih diperkuat.

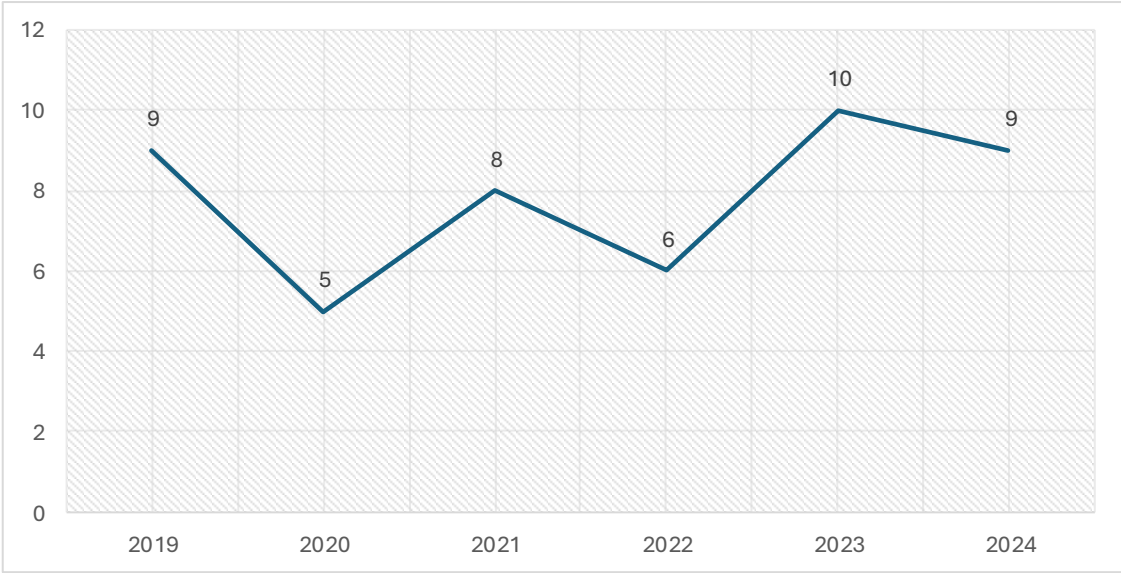
2.4.2.6. Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD

Perda inisiatif DPRD diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah terwakili dan terakomodir dalam regulasi. Beberapa contoh Perda inisiatif DPRD Kota Makassar adalah Perda tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (inisiatif Komisi A), Perda tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya dan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya (inisiatif Komisi B), dan Perda tentang Perlindungan Guru (inisiatif Komisi D).

Dalam menyusun Perda inisiatif, DPRD perlu melakukan komunikasi politik yang efektif dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga Perda yang dihasilkan dapat memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat.



Grafik 2.138
Perda Inisiatif DPRD Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Tahun 2025

Perda inisiatif yang dihasilkan DPRD Kota Makassar paling banyak di tahun 2023 yaitu 10 peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD semakin aktif dalam menjalankan fungsi legislasi dan menampung aspirasi masyarakat untuk kemudian diwujudkan dalam bentuk Perda. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan inisiatif Perda oleh DPRD antara lain adanya peningkatan pemahaman anggota DPRD tentang fungsi dan tugasnya termasuk hak inisiatif, peningkatan kemampuan anggota DPRD dalam mengolah dan menjaring aspirasi masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di DPRD, termasuk dalam hal menyusun rancangan Perda.

Pada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan jumlah Perda Inisiatif DPRD. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunan Perda memerlukan kajian mendalam, analisis dampak, dan penyusunan naskah akademik yang komprehensif. Proses ini bisa memakan waktu yang cukup signifikan, terutama jika berkaitan dengan isu-isu yang kompleks atau baru. Adanya keterbatasan dalam hal tenaga ahli atau sumber daya untuk melakukan penelitian dan analisis yang diperlukan juga dapat menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah Perda Inisiatif.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan oleh DPRD antara lain: meningkatkan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan Pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penghasilan Perda, meningkatkan akses ke data dan informasi yang memadai, meningkatkan kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penghasilan Perda.

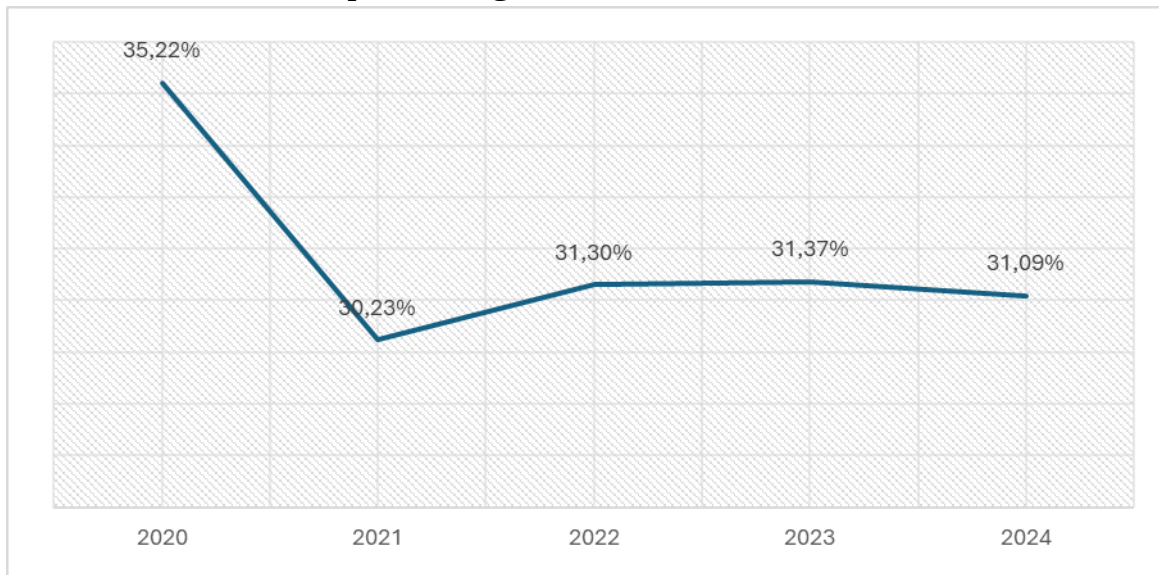
2.4.2.7. Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik

Perempuan pengurus partai politik memiliki peran penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur bahwa partai politik diwajibkan untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik. Untuk itu partai politik di Kota Makassar berupaya memenuhi kewajiban tersebut, dilihat dari indikator persentase perempuan pengurus partai politik yang rata-rata sudah mencapai angka 32,46% sepanjang tahun

2020 hingga 2024. Angka tertinggi 35,22% dicapai pada tahun 2020, dan terendah pada tahun 2021 sebesar 30,23%.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan ini antara lain: budaya dan stereotip gender dimana budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat dapat mempengaruhi kesempatan perempuan untuk terlibat aktif dalam politik dan menduduki posisi penting dalam partai politik. Selain itu perempuan mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya dan jaringan yang dibutuhkan untuk naik ke posisi kepengurusan. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya diskriminasi dan bias gender dalam proses rekrutmen dan seleksi pengurus partai politik sehingga terjadi penurunan jumlah perempuan yang menjadi pengurus partai politik.

Grafik 2.139
Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, Tahun 2025

Urgensi perempuan mengurus partai politik diantaranya adalah perempuan dapat meningkatkan keterwakilan mereka di DPRD untuk dapat membantu memastikan bahwa suara dan kepentingan perempuan didengar dan diwakili. Perempuan juga memiliki pengalaman dan perspektif yang unik yang dapat membantu memperkaya diskusi dan keputusan politik sehingga diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak. Dengan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partai politik, demokrasi dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

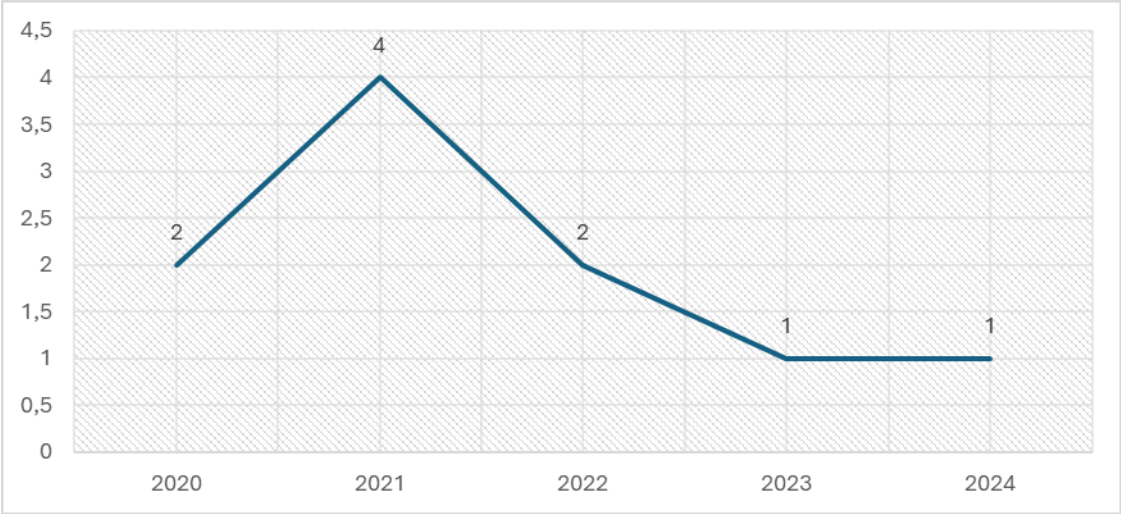
2.4.3. Daya Saing Daerah Tinggi

2.4.3.1. Jumlah Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya (Sister City)

Sister city adalah hubungan formal antara dua kota, daerah, atau wilayah di negara yang berbeda yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan pertukaran budaya, ekonomi, dan sosial. Konsep ini muncul untuk membangun hubungan persahabatan dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Manfaat adanya sister city antara lain: mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, sebagai ajang promosi budaya dengan memperkenalkan budaya dan tradisi masing-masing kota, berbagi pengetahuan, pengalaman dalam hal pengelolaan kota serta dapat membantu mengembangkan potensi daerah melalui berbagai bentuk kerjasama.



Grafik 2.140
Jumlah Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lainnya (*Sister City*)
Tahun 2020-2024



Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Makassar, Tahun 2025

Pada tahun 2021 jumlah kerja sama sister city Kota Makassar tercatat sebanyak 4 kerja sama yang menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencatat 2 kerja sama. Hal ini disebabkan karena keinginan Kota Makassar untuk saling belajar dan berbagi pengalaman dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan tata kelola kota. Selain itu, juga didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan bersama, seperti perubahan iklim atau bencana alam serta untuk mempromosikan potensi Kota Makassar di kancah internasional.

Namun demikian pada tahun 2022, 2023 dan 2024 jumlah kerjasama sister city kembali mengalami penurunan, dimana pada tahun 2024 Kota Makassar hanya mencatat satu kerjasama sister city yaitu dengan Kota Maniwa, Prefektur Okayama Jepang tentang proyek dekarbonisasi di Kota Makassar. Penurunan jumlah kerja sama dalam bentuk sister city dapat disebabkan oleh adanya birokrasi yang kurang efisien dimana waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus melewati berbagai tahapan persetujuan sampai ke lembaga tertinggi yang menaungi atau sebagai pelindung dari bentuk suatu kerja sama. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pasang surut kerja sama sister city adalah adanya paradigma yang memandang bahwa kerjasama sister city ini hanya sekedar seremonial saja.

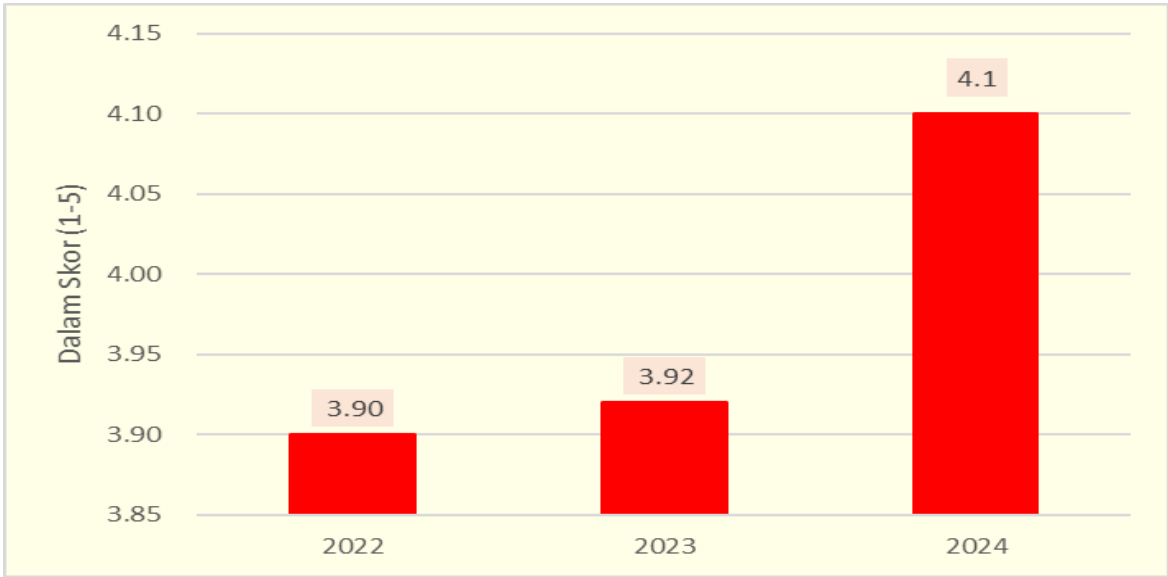
Diharapkan di masa yang akan datang berbagai kerjasama dapat dibangun lebih banyak lagi dalam kerangka sister city, sehingga Kota Makassar dapat saling transfer pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan bidang yang dikerjasamakan. Selain itu secara bersama-sama dapat melakukan stimulasi ide, gagasan, kreativitas, dan partisipasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Kerja sama dengan pihak luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya baik manusia maupun keuangan. Kerja sama tersebut juga dapat mempererat hubungan diplomasi dengan pihak luar negeri. Manfaat lain dari adanya sister city antara lain terciptanya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di daerah, terciptanya promosi kebudayaan dalam rangka memperkenalkan budaya, serta berbagi pengetahuan mengenai kebijakan tata kelola yang ada di daerah.

2.4.3.2. Indeks Daya Saing Daerah

Secara umum, capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di Kota Makassar dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari tahun 2022

hingga tahun 2024 sebesar 0.2 poin. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan bertahap dalam berbagai aspek pembangunan daerah seperti ukuran pasar, adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan pasar produk yang memberikan sumbangsih skor diatas 4,80 hingga 5,0. Meskipun peningkatannya tampak moderat, konsistensi pertumbuhan ini mengindikasikan adanya komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam menciptakan iklim yang kompetitif bagi investasi dan pembangunan ekonomi.

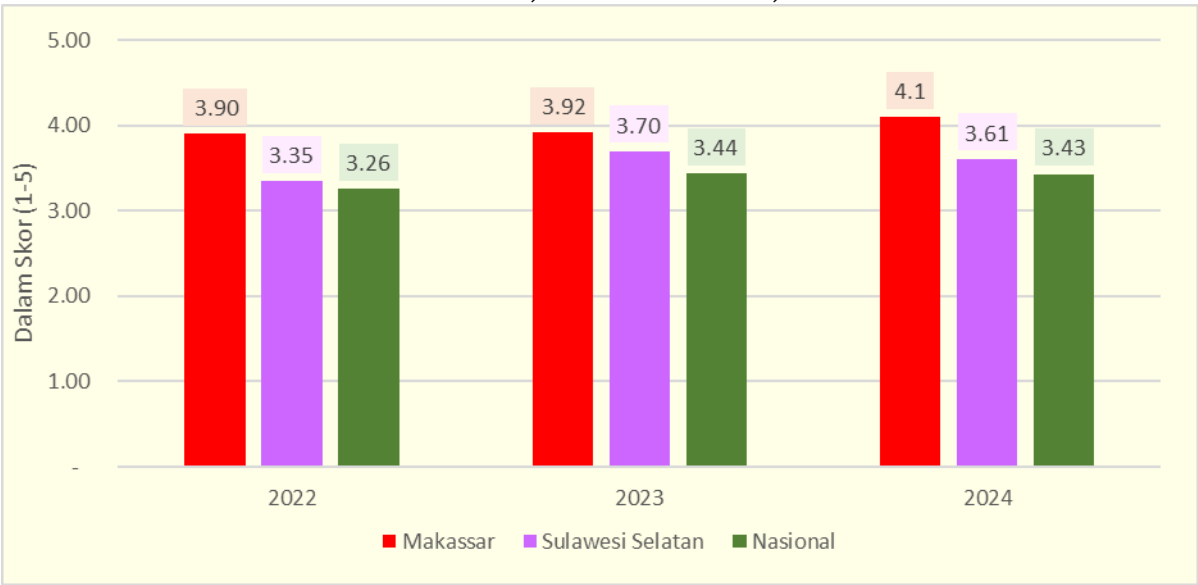
Grafik 2.141
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah
Kota Makassar Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (data diolah), Tahun 2025

Lebih lanjut, perolehan indeks daya saing daerah Kota Makassar lebih tinggi dan stabil, jika dikomparasi dengan tingkat provinsi (Sulawesi Selatan) dan Nasional (Indonesia). Selama tiga tahun terakhir, IDSD kota Makassar mengalami tren peningkatan

Grafik 2.142
Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah di Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan, dan Indonesia, Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (data diolah), Tahun 2025

Meskipun capaian IDSD pada tahun 2024 di Sulawesi Selatan meningkat menjadi 3.61 atau naik sebesar 0.26 poin, perolehan Makassar masih lebih

tinggi dengan perbedaan sekitar 0.20 poin. Nilai IDSD pada tingkat nasional juga relatif tidak stabil, bahkan menunjukkan penurunan di tahun 2024 menjadi 3.43 atau turun sebesar 0.01 poin dari tahun 2023. Grafik tersebut menunjukkan bahwa posisi daya saing Kota Makassar mampu melebihi capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

2.4.4. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

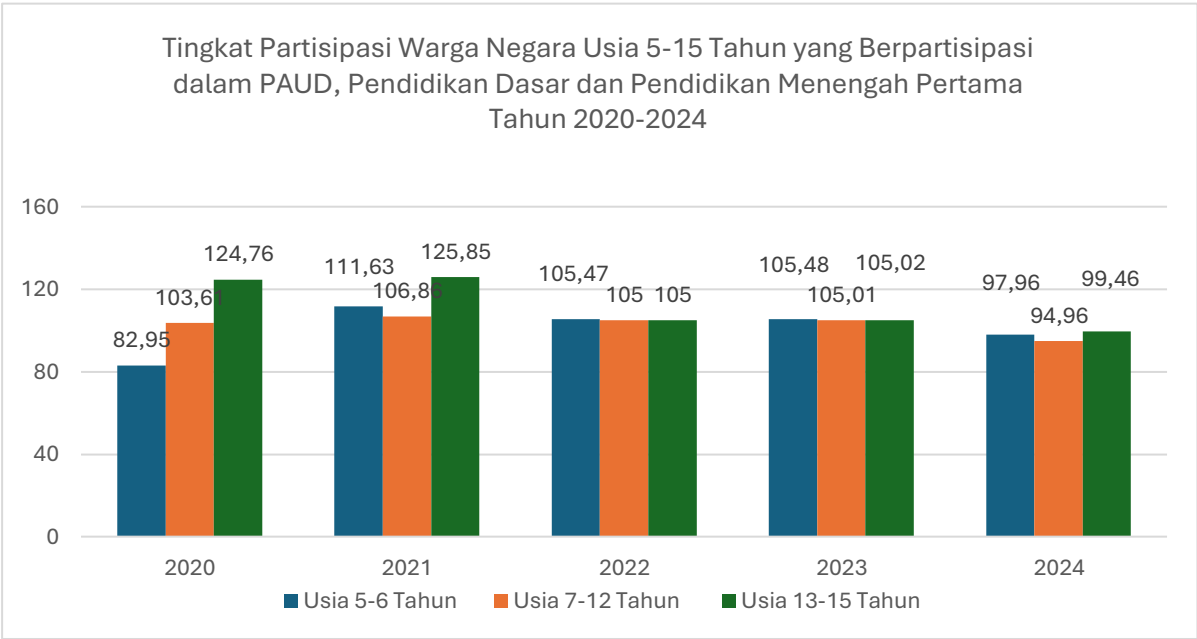
2.4.4.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Angka partisipasi PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama Kota Makassar cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir. Stagnasi tingkat partisipasi sekolah pada kategori PAUD tersebut dapat pula dipengaruhi dari masih rendahnya persepsi masyarakat terhadap pentingnya PAUD khususnya pada masyarakat kalangan ekonomi bawah. Keterbatasan jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi serta tenaga pendidik PAUD yang belum merata di beberapa tempat di Kota Makassar juga menjadi alasan kurangnya partisipasi pada kategori PAUD.

Grafik 2.143

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Pencapaian yang telah mendekati saturasi (hampir universal) juga mempengaruhi stagnasi pada tingkat partisipasi pendidikan di Kota Makassar, hal tersebut disebabkan bukan dari lemahnya intervensi kebijakan pemerintah daerah, melainkan karena tantangan peningkatan lanjutan yang berada pada wilayah yang lebih kompleks yaitu menjangkau populasi yang tersisa yang sulit dijangkau oleh mekanisme konvensional. Oleh karena itu, strategi pembangunan pendidikan Kota Makassar kedepannya perlu bergeser dari fokus kuantitatif menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kualitas, serta mendorong retensi, keberlanjutan, dan penyelesaian pendidikan seluruh peserta didik.

Grafik 2.144
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data menunjukkan konsistensi pada angka 100 setiap tahunnya dalam rentang lima tahun terakhir. Stabilitas ini menunjukkan adanya keberlanjutan dalam pelaksanaan program, sekaligus mencerminkan efektivitas upaya pemerintah dalam menjaga akses layanan pendidikan alternatif bagi kelompok usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Namun, kecenderungan angka partisipasi yang tetap tidak menunjukkan peningkatan signifikan juga menandakan bahwa segmen masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan tidak mengalami pertumbuhan yang besar. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa jumlah warga negara yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama relatif stagnan atau telah berkurang secara bertahap seiring dengan meningkatnya cakupan pendidikan formal. Dalam konteks yang lebih luas, kondisi ini selaras dengan kecenderungan angka partisipasi pendidikan formal yang mendekati titik saturasi, di mana sebagian besar penduduk usia sekolah telah terakomodasi dalam sistem pendidikan reguler.

Dengan demikian, peran pendidikan kesetaraan di Kota Makassar menjadi semakin strategis sebagai jalur alternatif yang menjangkau kelompok-kelompok yang secara struktural terpinggirkan dari pendidikan formal. Untuk menjaga relevansi dan efektivitas program ini, diperlukan pendekatan yang adaptif, termasuk pemetaan ulang kelompok sasaran potensial, integrasi dengan program pelatihan keterampilan, serta peningkatan mutu pembelajaran agar program kesetaraan tidak hanya menjadi sarana pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kompetensi dan produktivitas warga belajar

2. Urusan Kesehatan

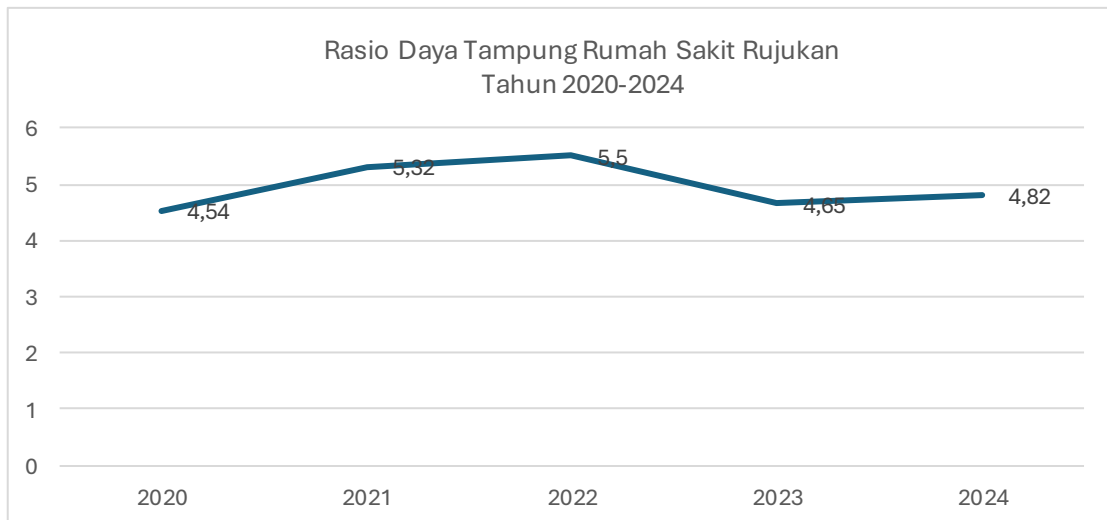
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kota Makassar menunjukkan pola fluktuatif selama lima tahun terakhir. Fenomena ini mencerminkan dinamika dalam kapasitas layanan kesehatan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk, peningkatan kasus penyakit tertentu, pengembangan infrastruktur kesehatan, serta kebijakan pemerintah daerah dan pusat.

Pada tahun-tahun tertentu, peningkatan rasio daya tampung dapat

dikaitkan dengan penambahan fasilitas baru, perluasan rumah sakit eksisting, atau adanya program investasi pada sektor kesehatan. Sebaliknya, penurunan rasio pada tahun-tahun lainnya bisa disebabkan oleh lonjakan kebutuhan layanan kesehatan yang tidak diimbangi dengan pertambahan kapasitas atau akibat dari pembatasan operasional rumah sakit karena renovasi, restrukturisasi layanan, dan bencana kesehatan seperti pandemi.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kapasitas layanan rujukan, keberlanjutan dan stabilitas daya tampung masih menjadi tantangan. Hal ini menuntut perencanaan yang lebih adaptif dan responsif, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk monitoring kapasitas, perencanaan pembangunan rumah sakit berbasis kebutuhan riil, serta penguatan koordinasi antar-fasilitas layanan kesehatan di Kota Makassar.

Grafik 2.145
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

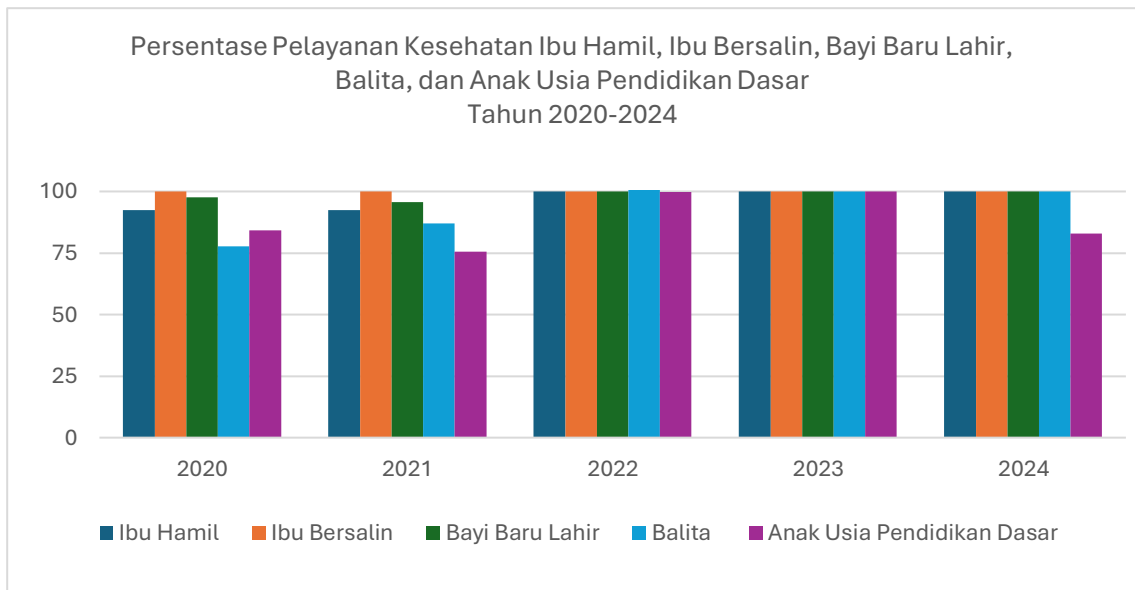
Cakupan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, dan anak usia pendidikan dasar di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan sesuai grafik. selama lima tahun terakhir. Peningkatan persentase ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi strategis yang dilakukan dalam rangka memperluas akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar kepada kelompok sasaran prioritas.

Peningkatan cakupan pelayanan kepada ibu hamil dan ibu bersalin menandakan adanya perbaikan akses terhadap pelayanan *antenatal care* (ANC) dan fasilitas persalinan yang aman. Hal ini berkontribusi langsung terhadap penurunan risiko komplikasi kehamilan, morbiditas, dan mortalitas maternal.

Pada kelompok bayi baru lahir dan balita, tren kenaikan cakupan layanan mengindikasikan penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan imunisasi, deteksi dini gangguan tumbuh kembang, serta intervensi pencegahan stunting. Pelayanan kesehatan terhadap anak usia pendidikan dasar juga menunjukkan progres yang positif, yang di antaranya didukung oleh pelaksanaan program UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dan skrining kesehatan berkala di lingkungan pendidikan.

Tren peningkatan ini menegaskan efektivitas kebijakan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan. Kedepan, diperlukan penguatan dalam hal pemerataan kualitas pelayanan di seluruh wilayah, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, serta optimalisasi sistem informasi kesehatan untuk memastikan layanan dapat diakses secara merata dan berkelanjutan.

Grafik 2.146
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin,
Bayi Baru Lahir, Balita, dan Anak Usia Pendidikan Dasar Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

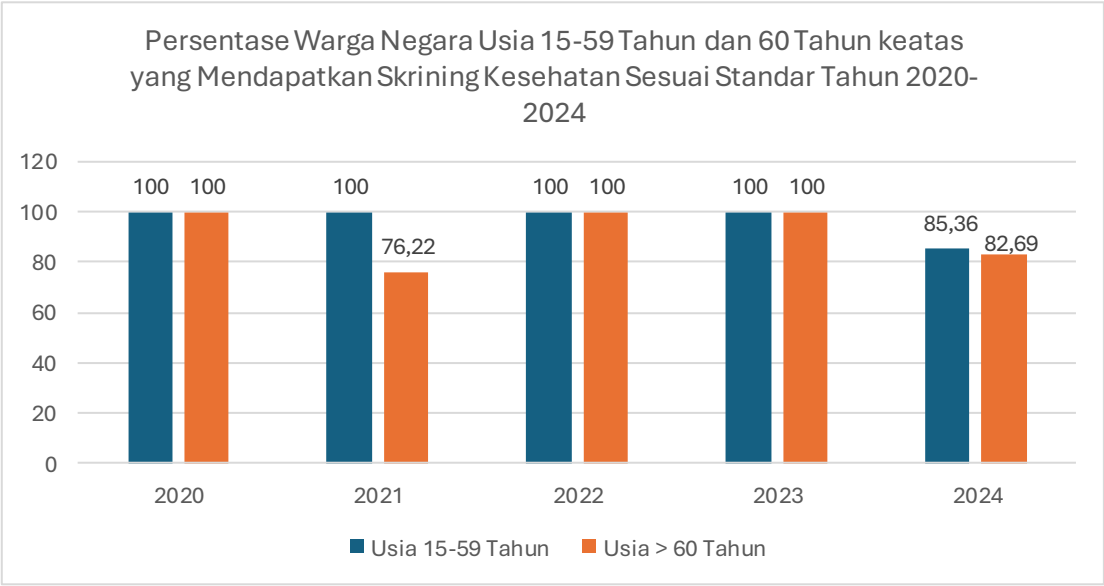
Peningkatan persentase warga negara usia 15-59 tahun dan 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar di Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir mencerminkan efektivitas program promotif dan preventif yang dijalankan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar, serta upaya memperluas akses layanan deteksi dini bagi kelompok usia produktif dan lanjut usia.

Pada kelompok usia 15-59 tahun, peningkatan persentase penerima layanan skrining kesehatan menunjukkan keberhasilan dalam memperluas cakupan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk kelompok usia 60 tahun ke atas, peningkatan cakupan mengindikasikan penguatan layanan kesehatan lansia, melalui skrining rutin untuk penyakit degeneratif dan pemeriksaan fungsi tubuh secara berkala.

Tahun 2024 terjadi penurunan persentase cakupan skrining dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini diperkirakan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan operasional layanan kesehatan, perubahan prioritas program akibat dinamika kebijakan kesehatan, serta potensi penurunan partisipasi masyarakat dalam program skrining. Kondisi ini menjadi catatan penting bahwa keberlanjutan program skrining memerlukan strategi adaptif untuk menjaga kesinambungan capaian, termasuk penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, serta perluasan cakupan layanan skrining berbasis komunitas. Dengan demikian, upaya promotif dan preventif dapat terus berjalan secara efektif untuk semua kelompok usia di Kota Makassar.



Grafik 2.147
Persentase Warga Negara Usia 15-59 Tahun
dan 60 Tahun keatas yang Mendapatkan Skrining Kesehatan
Sesuai Standar Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

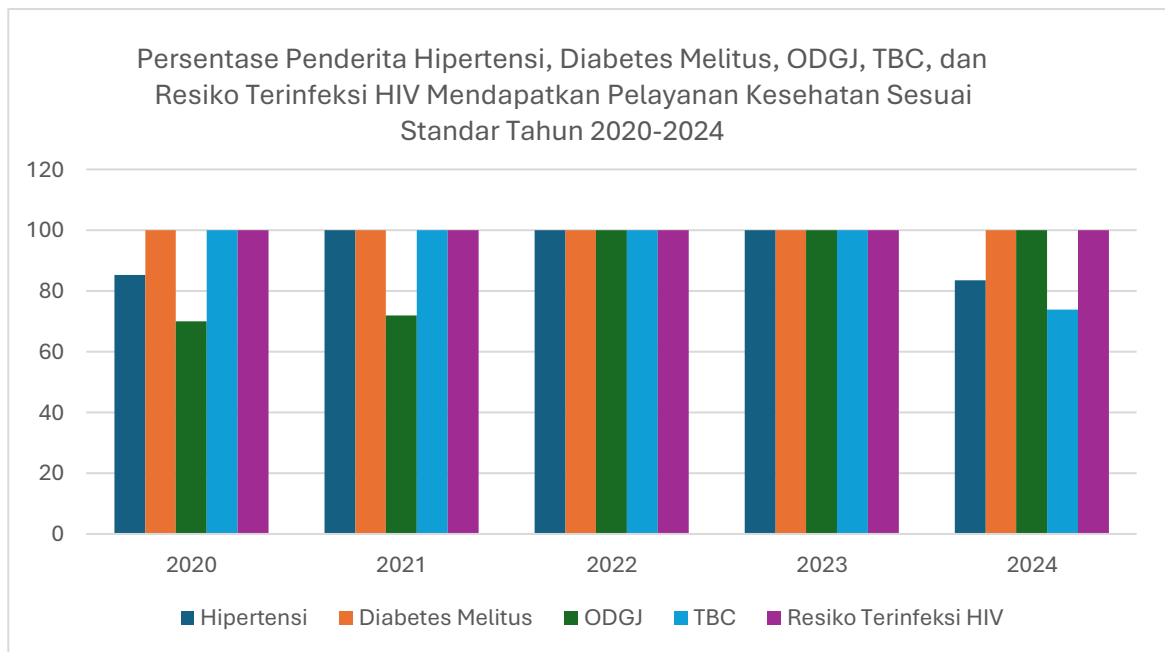
Selama periode 2020–2024, persentase penderita hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), tuberkulosis (TBC), serta individu yang berisiko terinfeksi HIV yang tercatat di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Makassar pada Grafik menunjukkan kecenderungan peningkatan.

Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari membaiknya sistem deteksi dini dan pelaporan kasus pada tingkat layanan kesehatan primer dan rujukan. Selain itu, tingginya angka ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin, meskipun di sisi lain menunjukkan perlunya penguatan program promotif dan preventif untuk menekan faktor risiko di masyarakat.

Persentase kasus hipertensi dan diabetes melitus yang terus meningkat memperlihatkan tingginya prevalensi faktor risiko penyakit tidak menular, yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, pola konsumsi, serta tingkat aktivitas fisik masyarakat. Untuk ODGJ, peningkatan data penderita menunjukkan adanya perluasan akses terhadap layanan kesehatan jiwa, meskipun tantangan stigma sosial masih perlu ditangani melalui edukasi masyarakat.

Pada kasus TBC, peningkatan kasus yang tercatat mengindikasikan keberhasilan program aktif penemuan kasus dan perluasan layanan pengobatan, sedangkan peningkatan angka individu berisiko HIV menegaskan perlunya penguatan program skrining, konseling, dan pencegahan berbasis komunitas. Secara keseluruhan, kecenderungan ini menegaskan pentingnya memperkuat intervensi pencegahan, pengelolaan penyakit kronis dan infeksius, serta penguatan sistem surveilans kesehatan di Kota Makassar, guna mengendalikan pertumbuhan kasus dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Grafik 2.148
Persentase Penderita Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ, TBC, dan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan data tahun 2020-2024 Kota Makassar, rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan kota menunjukkan tren yang terus meningkat secara konsisten. Peningkatan ini menggambarkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi risiko banjir melalui berbagai intervensi strategis, seperti pembangunan kolam retensi, penguatan tanggul sungai, pembangunan drainase skala kawasan, dan revitalisasi jaringan saluran air.

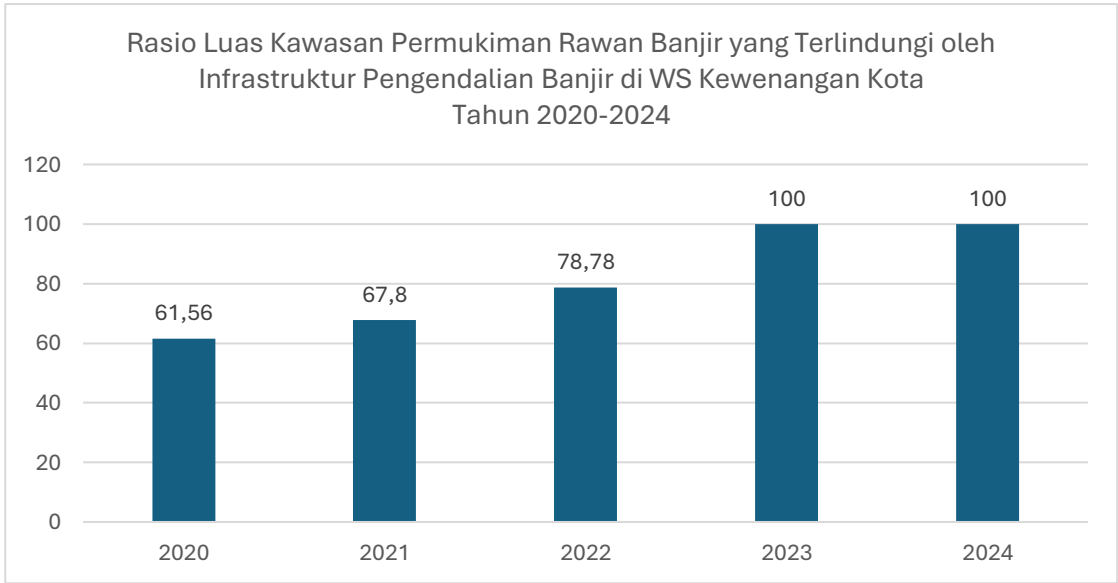
Pada awal periode tahun 2020, cakupan perlindungan terhadap kawasan rawan banjir masih dalam tahap penguatan, namun dengan perencanaan yang terarah dan dukungan investasi infrastruktur yang terus berkelanjutan, rasio ini mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hingga tahun 2024, capaian rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi mencapai angka 100%, menandakan bahwa seluruh kawasan permukiman yang teridentifikasi rawan banjir di wilayah kewenangan Kota Makassar telah dilengkapi dengan infrastruktur pengendalian banjir yang memadai.

Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan implementasi program-program strategis bidang sumber daya air serta efektifnya kolaborasi antar-instansi terkait dalam pengendalian risiko bencana banjir. Selain itu, hasil ini juga mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola lingkungan perkotaan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pembangunan wilayah.

Meskipun capaian 100% telah berhasil diraih, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, seperti pemeliharaan berkelanjutan terhadap infrastruktur yang telah dibangun, adaptasi terhadap potensi perubahan pola curah hujan, dan pengelolaan kawasan sempadan sungai agar tetap berfungsi optimal sebagai zona pengendali banjir. Dengan konsistensi program dan inovasi pengelolaan infrastruktur, Kota Makassar diharapkan dapat terus mempertahankan ketahanan kawasan permukimannya terhadap risiko banjir, serta mewujudkan kota yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.



Grafik 2.149
Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir
yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir
di WS Kewenangan Kota Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Dalam konteks pembangunan wilayah pesisir, pengelolaan kawasan pantai menjadi bagian penting dari urusan Pekerjaan Umum (PU), khususnya dalam upaya mitigasi risiko bencana alam seperti abrasi, erosi, dan akresi. Infrastruktur pengaman pantai menjadi salah satu instrumen vital untuk menjaga keberlanjutan kawasan permukiman pesisir, melindungi aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta mempertahankan garis pantai dari perubahan yang merugikan.

Pada tahun 2020-2024 rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Kota Makassar menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir melalui pembangunan dan rehabilitasi berbagai infrastruktur proteksi pantai, seperti pemasangan breakwater (pemecah gelombang), seawall (tanggul laut), revetment (perlindungan lereng pantai), serta vegetasi pantai berbasis ekosistem.

Pada awal periode 2020, cakupan perlindungan masih relatif terbatas, seiring dengan kebutuhan identifikasi prioritas lokasi rawan yang lebih komprehensif. Namun, berkat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pengaman pantai secara bertahap dan berkelanjutan, capaian rasio perlindungan meningkat signifikan setiap tahunnya. Tren ini menunjukkan efektivitas kebijakan mitigasi bencana pesisir yang diterapkan, serta adanya peningkatan kapasitas teknis dalam pelaksanaan proyek-proyek perlindungan pantai.

Dengan kecenderungan peningkatan tersebut, Kota Makassar semakin memperkuat daya tahan kawasan permukiman pesisir terhadap risiko perubahan lingkungan. Namun, tantangan ke depan seperti perubahan iklim global, kenaikan muka air laut, dan aktivitas antropogenik di sepanjang garis pantai perlu terus diantisipasi melalui inovasi teknologi perlindungan pantai dan penguatan regulasi tata ruang pesisir. Keberlanjutan upaya ini akan menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan wilayah pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menjaga ekosistem pantai secara berkelanjutan di Kota Makassar.

Grafik 2.150

Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, dan Akresi yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Pengelolaan sistem irigasi merupakan bagian penting dalam urusan Pekerjaan Umum (PU), khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas sektor pertanian. Ketersediaan jaringan irigasi yang andal sangat menentukan kelangsungan produksi pertanian, stabilitas ekonomi masyarakat, serta keberlanjutan ekosistem lahan pertanian di perkotaan. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Kota Makassar menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap selama periode 2020-2022. Peningkatan ini mencerminkan upaya konsisten pemerintah kota dalam memperbaiki dan memperluas layanan irigasi melalui pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas pelayanan air untuk lahan pertanian.

Pada tahun 2023-2024, rasio ini tercatat sebesar 0%. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam kebijakan, cakupan kewenangan, atau pergeseran penggunaan lahan yang berdampak pada hilangnya fungsi pelayanan irigasi di daerah irigasi kewenangan kota. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi ketahanan pangan lokal serta mempercepat penurunan jumlah lahan pertanian produktif di Kota Makassar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang, memperkuat perlindungan terhadap kawasan pertanian yang tersisa, serta merancang strategi adaptasi untuk mempertahankan fungsi irigasi secara berkelanjutan. Langkah-langkah strategis seperti perlindungan lahan pertanian berkelanjutan (PLP2B), pengembangan teknologi irigasi hemat air, serta integrasi fungsi irigasi dalam perencanaan kawasan perkotaan perlu menjadi prioritas agar kesinambungan layanan irigasi di Kota Makassar dapat terjaga.

Grafik 2.151
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota
yang dilayani oleh Jaringan Irigasi Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Penyediaan akses air minum yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam urusan Pekerjaan Umum (PU), khususnya di sektor pengelolaan sumber daya air dan sanitasi lingkungan. Ketersediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), baik melalui jaringan perpipaan maupun sumber non-perpipaan yang terlindungi, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan derajat kesehatan, kualitas hidup, serta produktivitas masyarakat di kawasan perkotaan.

Capaian persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non-perpipaan terlindungi menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari tahun 2020-2023. Peningkatan ini menggambarkan efektivitas program pembangunan dan perluasan jaringan layanan air minum yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk pengembangan kapasitas instalasi pengolahan air, pembangunan jaringan distribusi baru, serta optimalisasi pemanfaatan sumber air baku.

Upaya perluasan akses air minum juga didukung oleh berbagai program intervensi berbasis masyarakat dan kolaborasi dengan sektor swasta, sehingga semakin banyak rumah tangga yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan perpipaan kini dapat memperoleh air minum layak melalui sumber terlindungi.

Namun, pada tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses air minum tersebut mengalami penurunan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan kawasan permukiman baru yang lebih cepat dibandingkan dengan ekspansi layanan jaringan air minum.
- Gangguan operasional dan pemeliharaan infrastruktur SPAM akibat keterbatasan kapasitas produksi atau distribusi.
- Terjadinya degradasi kualitas sumber air baku di beberapa wilayah, yang mempengaruhi keandalan pasokan air minum.
- Tantangan dalam integrasi dan pemeliharaan sistem air minum berbasis komunitas di wilayah tertentu.

Kondisi ini menjadi perhatian penting untuk memastikan bahwa pencapaian akses air minum yang telah diperoleh tidak mengalami

kemunduran. Diperlukan upaya penguatan, baik dari sisi infrastruktur, kelembagaan, maupun pendanaan, agar akses terhadap air minum yang aman dan layak dapat terus diperluas dan dipertahankan, seiring dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat. Strategi peningkatan kapasitas produksi air, rehabilitasi jaringan distribusi, inovasi pengelolaan air berbasis teknologi, serta penguatan regulasi perlindungan sumber air menjadi langkah kunci untuk mendukung ketahanan layanan air minum di Kota Makassar secara berkelanjutan.

Grafik 2.152
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Pengelolaan air limbah domestik merupakan salah satu bagian penting dalam urusan Pekerjaan Umum (PU) untuk mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Layanan pengelolaan air limbah, baik melalui sistem terpusat maupun sistem setempat, bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam pengembangan infrastruktur air limbah serta tantangan-tantangan operasional yang dihadapi.

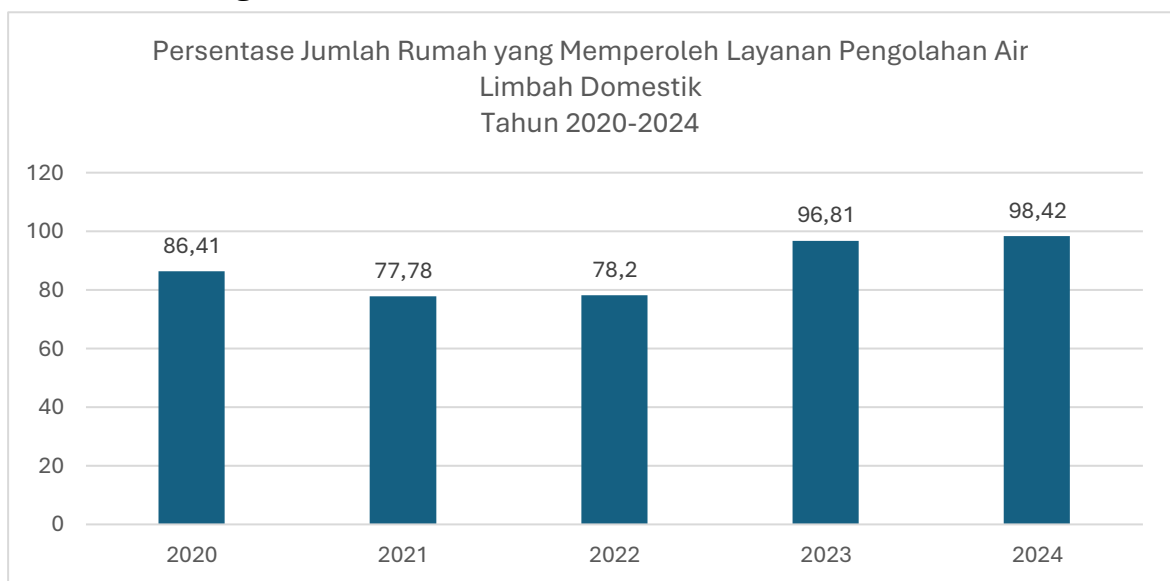
Peningkatan akses layanan pengelolaan air limbah domestik cukup terasa pada awal periode tahun 2020, seiring dengan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi sistem pengolahan air limbah skala kota maupun skala komunitas. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah dalam mendorong kesadaran masyarakat serta memperluas cakupan pelayanan. Namun, pada periode tertentu, terjadi penurunan persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan tersebut. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- Terbatasnya kapasitas infrastruktur eksisting dalam menampung pertumbuhan jumlah rumah tangga baru.
- Keterbatasan investasi pada pengembangan jaringan pengelolaan air limbah domestik.
- Tantangan teknis dalam pemeliharaan fasilitas pengolahan air limbah yang

- ada.
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan resmi pengelolaan limbah yang masih perlu ditingkatkan.

Fluktuasi ini menjadi indikator bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Makassar memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan infrastruktur, peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta, inovasi teknologi pengolahan air limbah, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan layanan in. Dengan memperbaiki sistem perencanaan, memperluas cakupan layanan, dan memperkuat sistem operasional, diharapkan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik dapat meningkat secara lebih stabil dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang air bersih dan sanitasi di Kota Makassar.

Grafik 2.153
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan
Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2020-2024



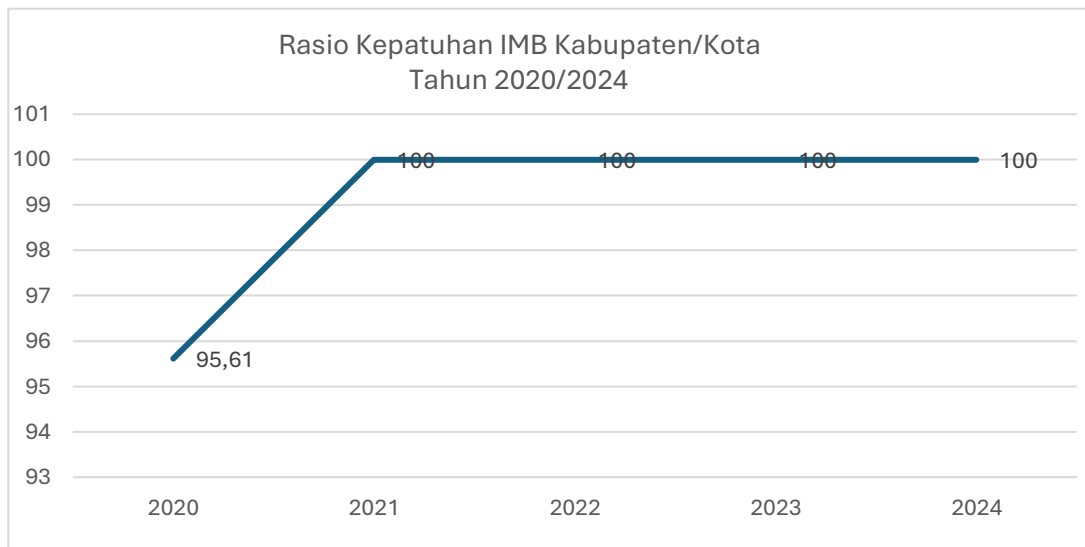
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), merupakan instrumen penting dalam pengaturan pembangunan wilayah, khususnya untuk memastikan bahwa pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan tata ruang, standar teknis bangunan, serta prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Tingkat kepatuhan terhadap IMB menjadi salah satu indikator kualitas tata kelola pembangunan di daerah.

Rasio kepatuhan terhadap IMB sepanjang tahun 2020-2024 tercatat stabil. Stabilitas ini menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan regulasi serta efektivitas mekanisme pengawasan dan penegakan hukum di bidang perizinan bangunan. Selain itu, tingginya rasio kepatuhan juga mencerminkan kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan terhadap pentingnya legalitas dalam proses mendirikan bangunan.

Dengan kondisi kepatuhan yang stabil, Kota Makassar berhasil menjaga kualitas pembangunan fisik kota agar tetap selaras dengan prinsip tata ruang, keselamatan publik, dan estetika kota. Keberlanjutan upaya ini akan menjadi kunci dalam mendukung pengembangan kawasan perkotaan yang lebih terstruktur, aman, dan berdaya saing di masa depan.

Grafik 2.154
Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan. Tingkat kemampuan jalan menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana jaringan jalan mampu mengakomodasi beban lalu lintas dan mendukung kelancaran transportasi secara efektif.

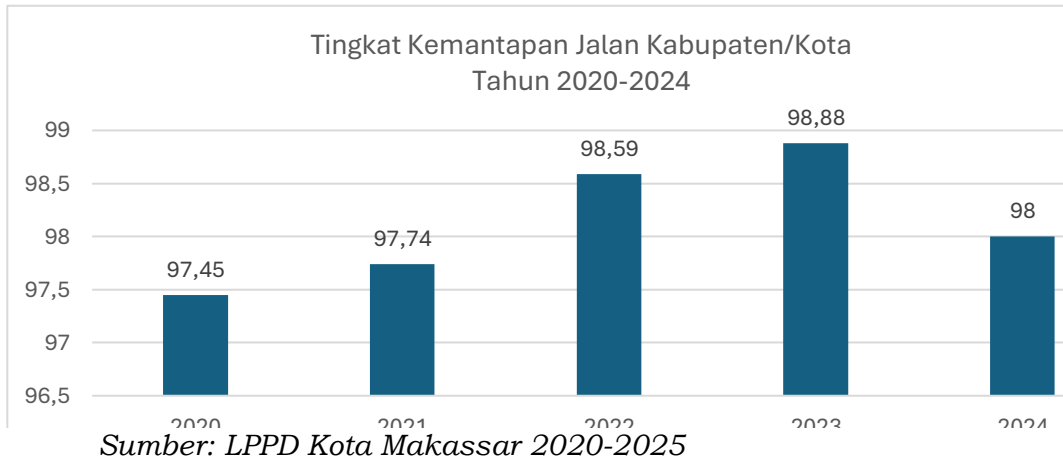
Tingkat kemampuan jalan pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuatif. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika antara peningkatan volume kendaraan, pengembangan infrastruktur jalan, dan upaya rehabilitasi atau pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Pada beberapa tahun, peningkatan kemampuan jalan tercapai seiring dengan program pembangunan jalan baru, pelebaran ruas jalan, serta rehabilitasi jalan yang rusak. Upaya ini berhasil meningkatkan kapasitas jaringan jalan untuk menampung lalu lintas harian serta mendukung aksesibilitas antar kawasan di dalam kota. Namun, pada tahun-tahun tertentu, terjadi penurunan tingkat kemampuan jalan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang lebih cepat dibandingkan pengembangan infrastruktur jalan, kerusakan jalan akibat faktor cuaca ekstrem, beban lalu lintas berat, atau keterbatasan dalam pemeliharaan rutin, peningkatan aktivitas pembangunan dan utilitas bawah tanah yang menyebabkan gangguan pada struktur jalan dan terbatasnya anggaran pemeliharaan dan pembangunan jalan di tengah kebutuhan infrastruktur lainnya.

Fluktuasi tingkat kemampuan jalan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam perencanaan dan pengelolaan jaringan jalan di Kota Makassar. Penguatan program pemeliharaan jalan berbasis kondisi aktual, pengendalian pertumbuhan kendaraan bermotor, serta pengembangan moda transportasi alternatif menjadi langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan kinerja sistem transportasi kota.

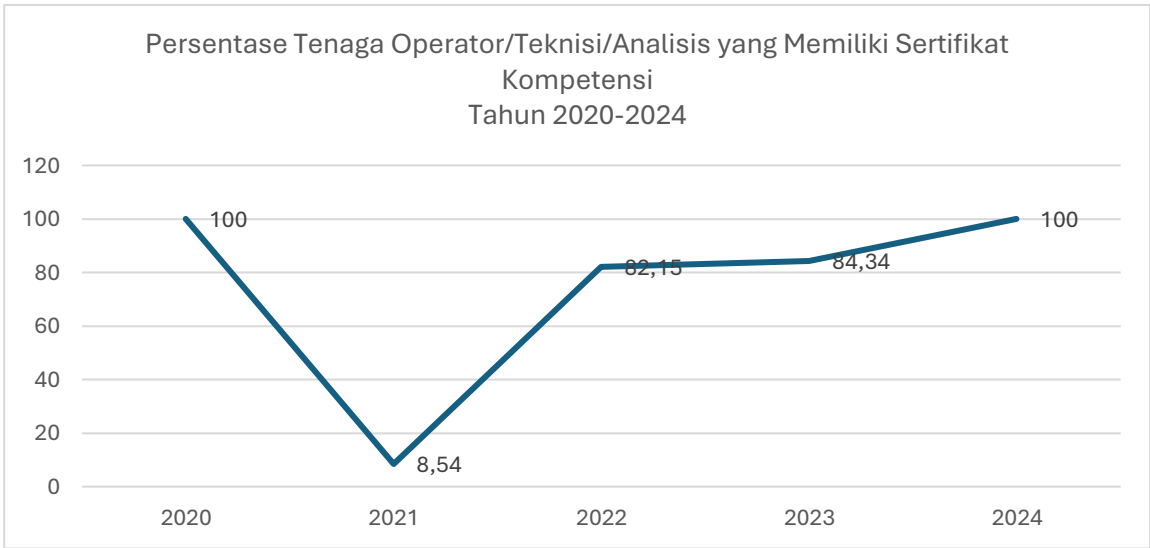


Grafik 2.155
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024



Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor teknis yang membutuhkan keterampilan spesifik. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga operator, teknisi, dan analis menjadi bukti pengakuan formal atas kemampuan profesional yang dimiliki, sekaligus memastikan standar mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Persentase tenaga operator, teknisi, dan analis yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Secara umum, tren ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur di bidang teknis. Peningkatan persentase tenaga bersertifikat ini berdampak positif terhadap kualitas layanan teknis, efektivitas operasional perangkat daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kota. Selain itu, penguatan kompetensi teknis juga menjadi pondasi penting dalam mendukung implementasi program-program pembangunan berbasis teknologi dan inovasi di Kota Makassar.

Grafik 2.156
Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

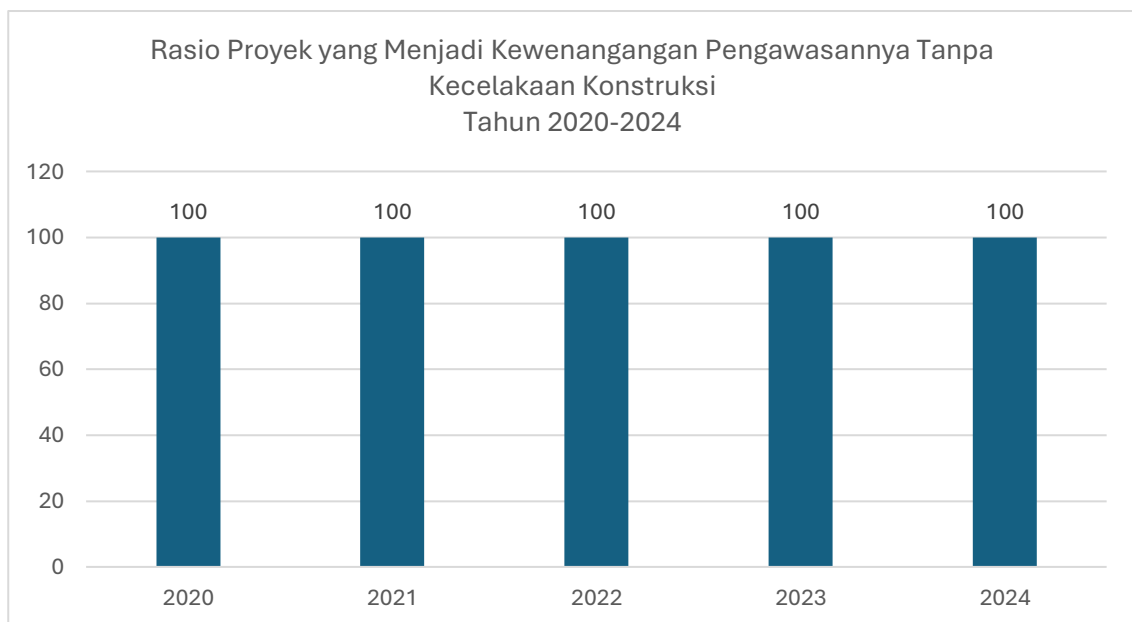
Keselamatan konstruksi merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Kecelakaan konstruksi tidak hanya berdampak . . .

berdampak pada keselamatan tenaga kerja, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran proyek, biaya pembangunan, dan citra penyelenggaraan konstruksi di suatu daerah. Oleh karena itu, rasio proyek yang diawasi tanpa terjadi kecelakaan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan dan penerapan standar keselamatan konstruksi.

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dan tercatat tanpa kecelakaan konstruksi selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi stabil. Stabilitas ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan kebijakan pengawasan proyek yang ketat, konsisten, dan berorientasi pada keselamatan kerja.

Stabilnya rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi menjadi refleksi dari komitmen Kota Makassar dalam memastikan setiap pembangunan infrastruktur berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini juga berkontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya proyek, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga reputasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan yang profesional.

Grafik 2.157
Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya
Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

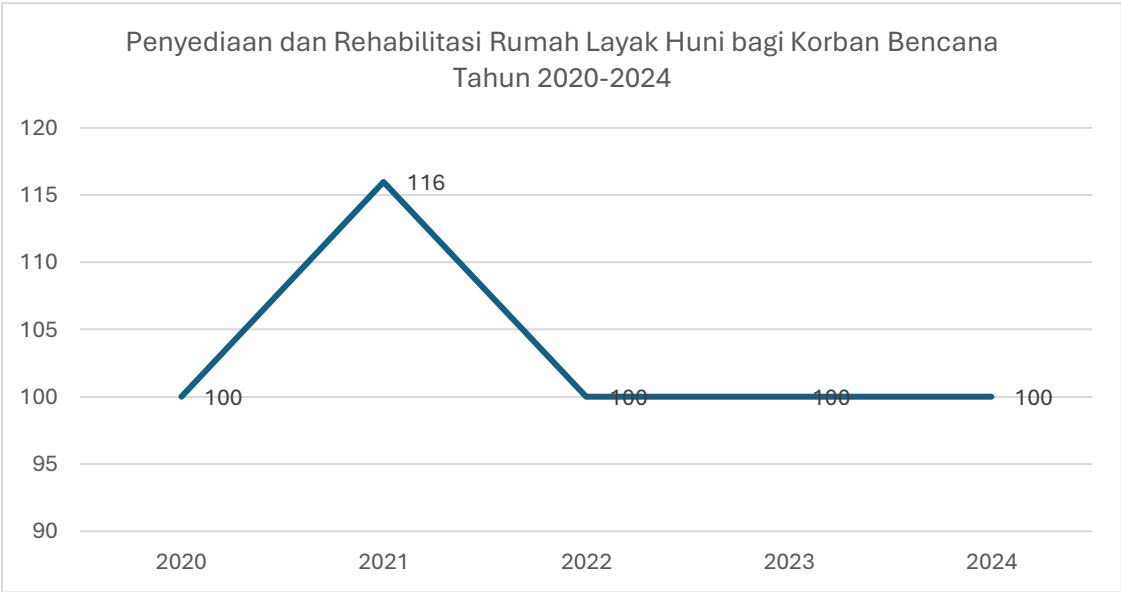
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan layak huni. Ketersediaan rumah layak huni, khususnya bagi kelompok rentan dan korban bencana, menjadi bagian integral dari upaya pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal. Dalam konteks kebencanaan, penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan fisik, tetapi juga sebagai fondasi penting untuk pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

Pemerintah Kota Makassar secara konsisten menunjukkan komitmennya dalam menangani kebutuhan perumahan bagi korban bencana, sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat pasca tanggap darurat.



Grafik 2.158
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni
bagi Korban Bencana Tahun 2020-2024



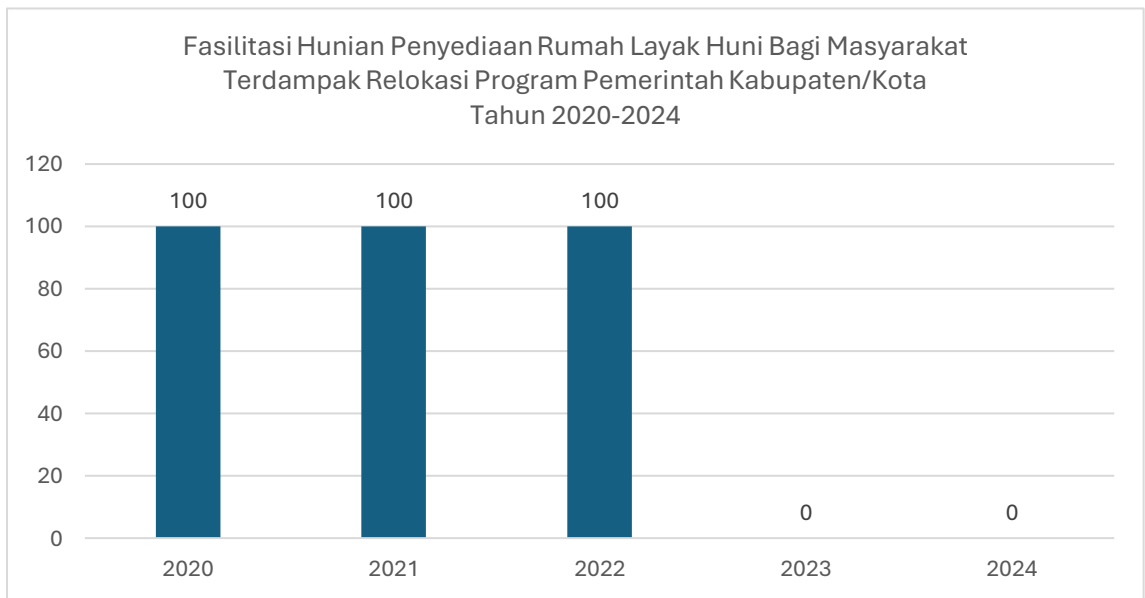
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Berdasarkan grafik penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kota Makassar menunjukkan tren capaian yang sangat baik, dengan tingkat realisasi yang cenderung mencapai 100% setiap tahunnya. Pencapaian ini mencerminkan respons cepat pemerintah daerah dalam menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat yang terdampak bencana, sehingga mempercepat proses pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Menarik untuk dicatat, pada tahun 2021, jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah justru mencapai 116%, melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam implementasi program, di mana pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan riil di lapangan yang mungkin melebihi estimasi awal akibat dinamika situasi bencana yang terjadi. Kecenderungan capaian yang mendekati atau bahkan melebihi target selama lima tahun terakhir mengindikasikan keberhasilan koordinasi lintas sektor, dukungan pendanaan yang memadai, serta efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi berbasis kebutuhan masyarakat terdampak. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas dalam proses rehabilitasi turut meningkatkan rasa kepemilikan dan keberlanjutan pemanfaatan rumah tersebut.

Meski capaian kuantitatif telah optimal, ke depan diperlukan penguatan pada aspek kualitas bangunan, standar ketahanan terhadap bencana, serta pengelolaan kawasan permukiman berbasis risiko. Dengan demikian, penyediaan rumah layak huni tidak hanya menjadi respons jangka pendek terhadap bencana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun komunitas yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan di Kota Makassar.

Grafik 2.159
Fasilitasi Hunian Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat
Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

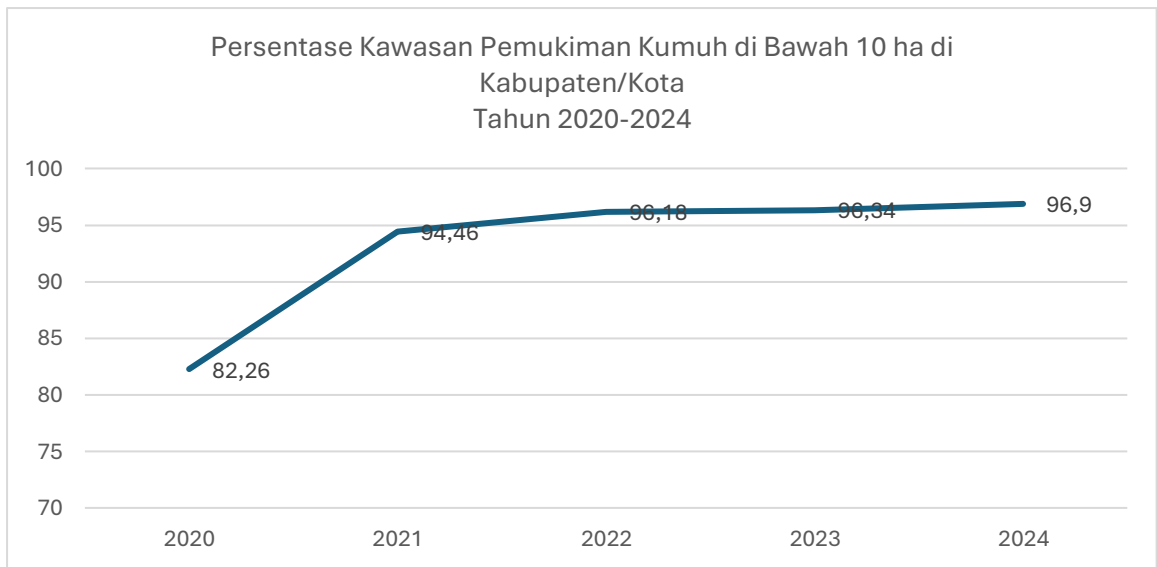


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Periode 2020–2022, penyediaan fasilitas hunian berupa rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak program relokasi Pemerintah Kota Makassar menunjukkan tingkat capaian sebesar 100% dari target. Hal ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal bagi kelompok terdampak relokasi, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan tanpa mengabaikan hak-hak sosial masyarakat. Penyediaan rumah layak huni selama tiga tahun tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan standar kelayakan, ketahanan bangunan, dan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Mekanisme pelaksanaan berbasis partisipasi serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah turut berkontribusi terhadap kelancaran proses relokasi dan pemulihan kehidupan masyarakat pasca-pemindahan.

Pada tahun 2023 dan 2024, capaian penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak relokasi tercatat 0%. Tidak adanya realisasi pada dua tahun terakhir mengindikasikan bahwa tidak terdapat program relokasi baru yang membutuhkan pengadaan fasilitas hunian atau adanya perubahan fokus kebijakan pembangunan yang mengurangi kebutuhan relokasi. Situasi ini mencerminkan dinamika kebutuhan lapangan yang dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun sekaligus menegaskan pentingnya keberlanjutan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi kebutuhan relokasi mendadak di masa mendatang.

Grafik 2.160
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh
di Bawah 10 ha di Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

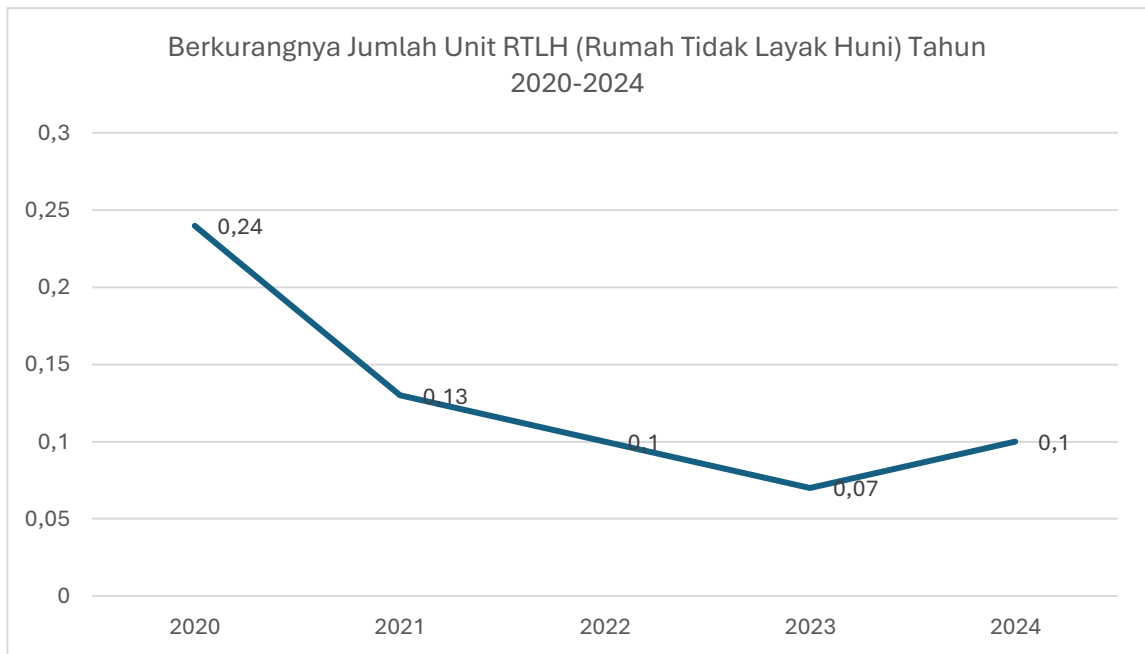


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Periode 2020–2024, persentase kawasan permukiman kumuh dengan luasan di bawah 10 ha di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan tata ruang dan keterbatasan dalam pengelolaan kawasan permukiman yang memerlukan perhatian lebih intensif. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain adalah tingginya laju urbanisasi yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan hunian layak, perkembangan kawasan informal yang tidak terkontrol, serta keterbatasan dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman. Selain itu, dampak pandemi COVID-19 turut memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat urban, yang berdampak pada bertambahnya kawasan berpotensi kumuh.

Peningkatan persentase kawasan kumuh juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data permukiman kumuh melalui survei lapangan yang lebih sistematis, sehingga cakupan kawasan teridentifikasi menjadi lebih akurat dan terperinci. Tren ini menjadi indikator bahwa intervensi pengurangan kawasan kumuh memerlukan penguatan strategi, khususnya dalam hal penanganan kawasan kumuh berbasis kawasan secara terintegrasi, peningkatan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hunian. Penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pembangunan.

Grafik 2.161
Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu indikator keberhasilannya adalah berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH) dari tahun ke tahun. Kota Makassar dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, jumlah rumah tidak layak huni menunjukkan tren penurunan meskipun dengan pola fluktuatif. Pada tahun 2020, persentase rumah tidak layak huni tercatat sebesar 0,24%. Angka ini kemudian menurun signifikan pada tahun 2021 menjadi 0,13%. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 0,1%, dan kembali mencapai titik terendah sebesar 0,07% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan kembali menjadi 0,1%

Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya dinamika pertumbuhan penduduk, keterbatasan anggaran program perumahan, serta dampak bencana alam dan sosial yang terjadi di beberapa wilayah. Meski demikian, secara umum, tren penurunan ini mencerminkan efektivitas program rehabilitasi dan peningkatan kualitas rumah layak huni yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar, termasuk melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan program perbaikan rumah berbasis komunitas.

Kenaikan tipis di tahun 2024 menunjukkan bahwa tantangan dalam mempertahankan pencapaian perumahan layak tetap perlu mendapatkan perhatian, khususnya melalui strategi pencegahan degradasi rumah layak menjadi tidak layak akibat faktor usia bangunan, perubahan kondisi ekonomi warga, dan bencana. Untuk menjaga kesinambungan tren penurunan rumah tidak layak huni, ke depan diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui peningkatan alokasi anggaran untuk rehabilitasi rumah bagi kelompok rentan, integrasi program perumahan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat, serta penguatan monitoring dan updating data rumah tidak layak huni secara berkala. Dengan upaya tersebut, diharapkan Kota Makassar dapat mempercepat pencapaian target nol rumah tidak layak huni sebagai bagian dari komitmen menuju kota layak huni dan berkelanjutan.



5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tahun 2020-2024 Kota Makassar mencapai jumlah perumahan yang telah dilengkapi dengan PSU dengan tingkat keberhasilan 100% setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap pengembangan perumahan baru memenuhi standar kelayakan infrastruktur dasar untuk mendukung ketertiban lingkungan dan kesejahteraan penghuni.

Keberhasilan mempertahankan capaian 100% ini juga mencerminkan efektivitas pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan oleh pemerintah daerah, termasuk sinergi antara pengembang, perangkat daerah terkait, dan masyarakat. Dengan terpenuhinya kebutuhan PSU, potensi permasalahan sosial seperti banjir dan keterbatasan akses layanan publik dapat ditekan secara signifikan.

Meskipun capaian 100% menunjukkan hasil yang sangat positif, tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam memastikan keberlanjutan pemeliharaan PSU dan mengantisipasi perkembangan kawasan baru yang membutuhkan pengelolaan terpadu. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar perlu terus memperkuat regulasi, pengawasan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Dengan pengelolaan yang baik, penyediaan PSU di kawasan perumahan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berkontribusi besar terhadap terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi tujuan utama urusan trantibum linmas di tingkat daerah.

Grafik 2.162
Jumlah Perumahan yang Sudah dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana, Utilitas Umum) Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Stabilitas dalam sektor ini menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

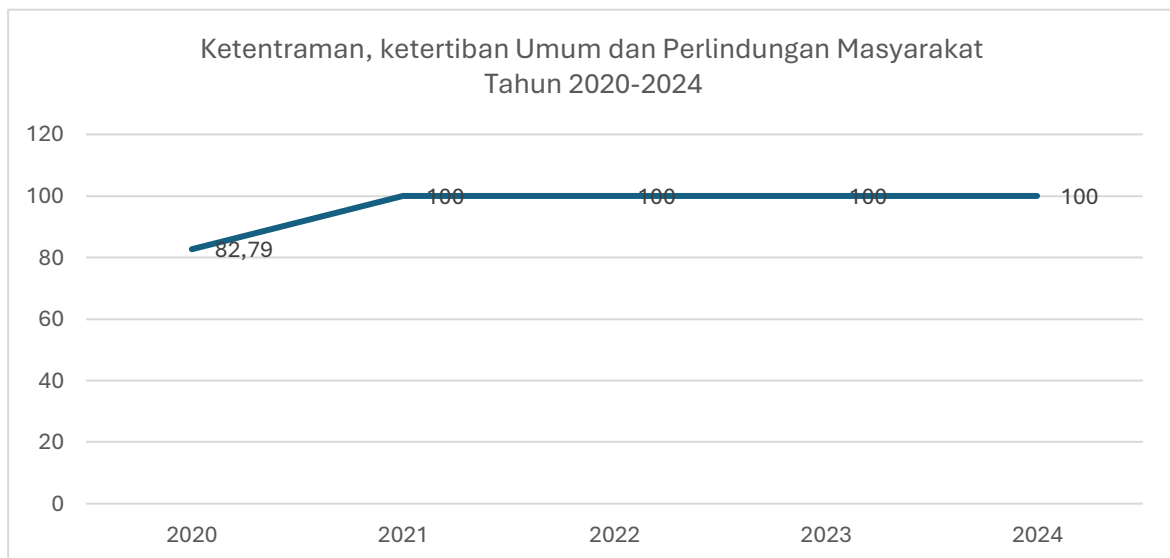
Di Kota Makassar, sepanjang tahun 2020 hingga 2024, kondisi ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan tingkat stabilitas yang cukup baik. Selama lima tahun terakhir, tidak terdapat lonjakan signifikan terhadap angka gangguan ketertiban atau eskalasi konflik sosial yang

berdampak luas. Stabilitas ini menandakan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga ruang publik tetap kondusif melalui peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi antar-instansi, serta optimalisasi peran satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas). Beberapa faktor yang mendukung stabilitas ini antara lain adalah pelaksanaan patroli rutin dan respons cepat terhadap potensi gangguan ketertiban, peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan komunitas lokal dalam menjaga lingkungan, dan adanya dukungan teknologi informasi dalam memantau dan merespons situasi ketertiban di ruang publik.

Selama periode tersebut, aktivitas perlindungan masyarakat, termasuk dalam penanganan bencana, pengamanan kegiatan sosial, dan pelayanan situasi darurat, juga berjalan dengan efektif dan responsif. Peran Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan serta menjaga ketertiban dalam pelaksanaan program-program daerah menjadi salah satu kunci terjaganya stabilitas trantibum linmas. Melihat capaian ini, Pemerintah Kota Makassar perlu terus memperkuat pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat, pemanfaatan teknologi berbasis aplikasi untuk mendukung pengawasan ketertiban di wilayah, dan peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

Dengan konsistensi kebijakan dan keterlibatan semua pihak, Kota Makassar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di masa yang akan datang, guna mendukung terciptanya kota yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Grafik 2.163
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan instrumen vital dalam memastikan tertib administrasi pemerintahan, ketertiban sosial, serta perlindungan hak dan kewajiban masyarakat. Stabilitas dalam tingkat penegakan peraturan mencerminkan efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip supremasi hukum di tingkat lokal. Persentase penegakan Perda dan Perkada Kota Makassar tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan atas pelaksanaan peraturan yang telah

ditetapkan, baik melalui pembinaan, sosialisasi, hingga penegakan hukum administratif.

Selama lima tahun terakhir, Kota Makassar mampu menjaga keseimbangan antara pendekatan persuasif dan represif dalam penegakan hukum daerah. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pada upaya preventif agar masyarakat lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Meskipun persentase penegakan Perda dan Perkada tetap stabil, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, khususnya dalam menghadapi dinamika urbanisasi, perubahan sosial, serta kompleksitas regulasi baru yang terus berkembang.

Grafik 2.164
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

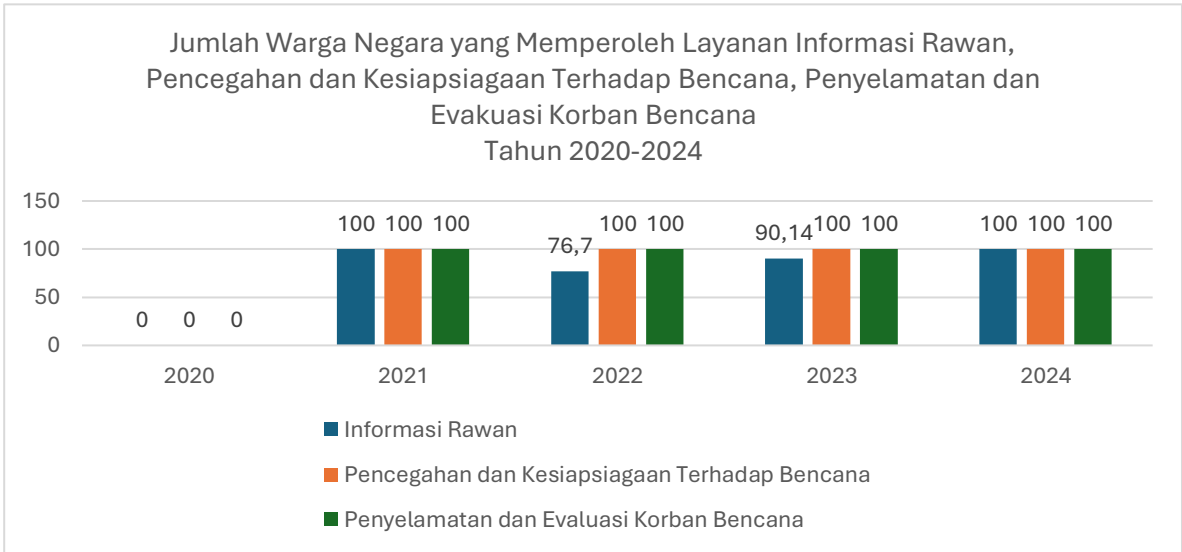
Data jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi terkait bencana belum tersedia (N/A). Hal ini mengindikasikan bahwa pada awal periode tersebut, sistem pendataan layanan informasi kebencanaan masih belum sepenuhnya terintegrasi.

Mulai tahun 2021 hingga 2024, jumlah warga yang memperoleh layanan ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperluas cakupan layanan edukasi kebencanaan kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan, seperti sosialisasi dan pelatihan mitigasi bencana di tingkat komunitas, sekolah, dan tempat kerja, penyebaran informasi berbasis digital melalui media sosial, aplikasi siaga bencana, dan website resmi pemerintah, pelaksanaan simulasi evakuasi bencana secara rutin di wilayah rawan bencana, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga kemanusiaan dalam penyuluhan dan edukasi kebencanaan.

Peningkatan ini menunjukkan hasil positif, tidak hanya dari segi jumlah penerima layanan, tetapi juga dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih siap dan sigap dalam menghadapi potensi bencana. Melalui penyebaran informasi yang efektif, warga Kota Makassar menjadi lebih

memahami risiko bencana di lingkungan mereka serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.

Grafik 2.165
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan,
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2020-2024

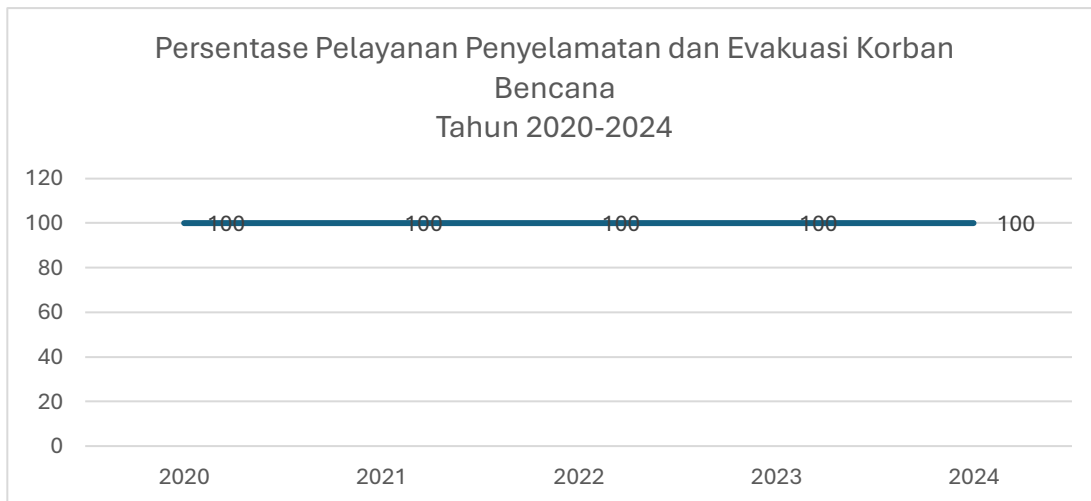


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan dampak kerusakan akibat kejadian bencana. Kecepatan dan ketepatan pelayanan dalam fase tanggap darurat menjadi indikator penting dalam menilai kesiapsiagaan dan responsivitas pemerintah daerah terhadap situasi darurat.

Pada tahun 2020-2024 persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercatat dalam kondisi stabil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar secara konsisten mampu mempertahankan tingkat kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta efektivitas operasional tim penyelamat dalam menghadapi berbagai jenis bencana, baik bencana alam maupun sosial. Stabilitas dalam pelayanan ini juga memperlihatkan tingkat kesiapan yang baik dalam manajemen risiko bencana di tingkat lokal, di mana protokol penyelamatan, jalur evakuasi, dan pusat-pusat pengungsian sudah diatur dan dijalankan secara efektif saat terjadi insiden. Meskipun capaian ini menunjukkan kinerja yang positif, tantangan dalam mempercepat waktu respons, memperluas cakupan evakuasi, serta memperbaharui sarana prasarana penyelamatan tetap harus menjadi perhatian. Dengan pendekatan yang sistematis dan adaptif, Kota Makassar diharapkan mampu mempertahankan tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara optimal, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota tangguh bencana dan melindungi keselamatan warganya

Grafik 2.166
Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Tahun 2020-2024



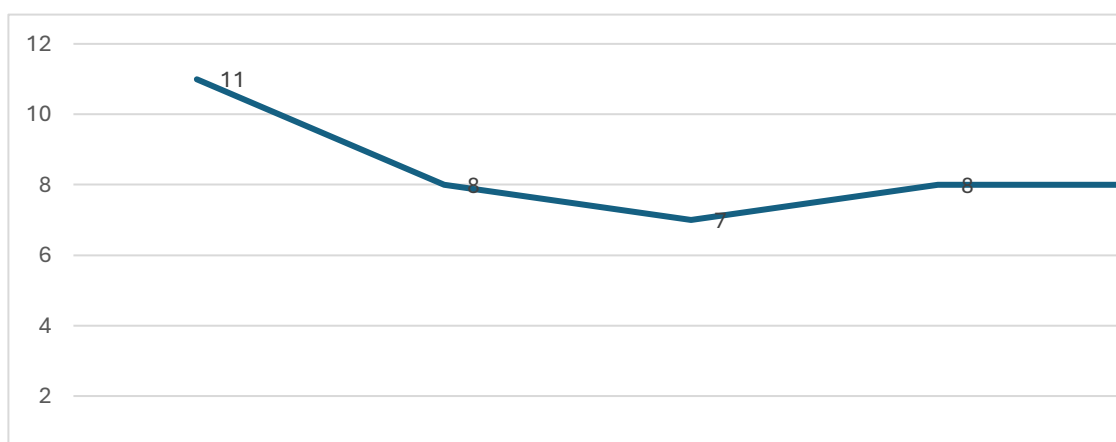
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Penanganan kebakaran secara cepat dan tepat menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kinerja layanan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat daerah. Waktu tanggap (response time) terhadap kejadian kebakaran sangat menentukan efektivitas penyelamatan jiwa, pengurangan kerugian material, dan pencegahan eskalasi bencana lebih besar.

Pada periode 2020-2024, Kota Makassar menunjukkan waktu tanggap penanganan kebakaran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem respons darurat terus diperkuat, terdapat berbagai faktor dinamis yang mempengaruhi kecepatan penanganan, seperti kondisi lalu lintas, distribusi lokasi pos damkar, kondisi geografis lokasi kejadian, serta faktor teknis operasional di lapangan.

Secara umum, beberapa tahun menunjukkan perbaikan dalam waktu tanggap, seiring dengan peningkatan jumlah armada dan penempatan pos pemadam kebakaran yang lebih strategis di beberapa kecamatan. Fluktuasi ini menjadi catatan penting bahwa, meskipun secara umum layanan pemadam kebakaran di Kota Makassar cukup responsif, upaya perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan, terutama dalam penguatan sistem early warning, optimalisasi jalur-jalur respons darurat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Grafik 2.167
Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

6. Urusan Sosial

Berdasarkan data tahun 2020–2024, persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang kebutuhan dasarnya terpenuhi di luar panti di Kota Makassar menunjukkan tren yang sangat positif, dengan capaian 100% setiap tahunnya. Capaian ini menandakan keberhasilan program perlindungan sosial berbasis komunitas, yang tidak hanya fokus pada pelayanan berbasis institusi (panti), melainkan juga memperkuat layanan berbasis keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *community-based care*, yang mendorong pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal secara lebih manusiawi dan adaptif terhadap kondisi sosial budaya setempat.

Peningkatan ketercapaian ini juga menunjukkan adanya penguatan sistem layanan sosial, mulai dari pengembangan data terpadu kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas pendamping sosial, hingga sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, organisasi sosial, dan komunitas lokal. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya penanganan kelompok rentan memperkuat keberlanjutan program-program perlindungan sosial di Kota Makassar. Secara keseluruhan, keberhasilan mempertahankan cakupan hampir 100% selama lima tahun terakhir mencerminkan konsistensi komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi hak dasar kelompok rentan, serta menjadi pondasi penting untuk mengembangkan kebijakan perlindungan sosial yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Grafik 2.168
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan
Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
di Luar Panti Tahun 2020-2024



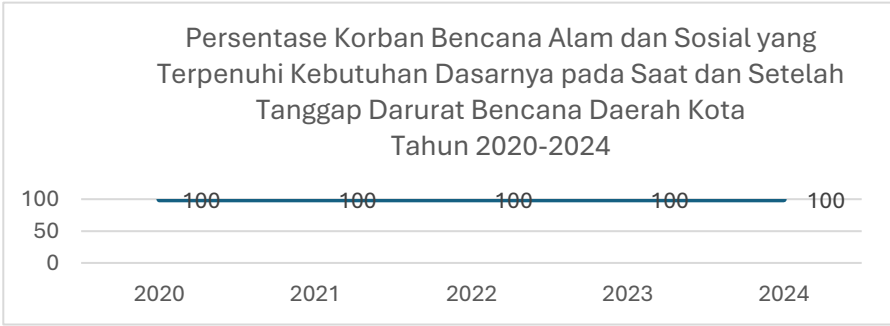
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Selama periode 2020–2024, persentase korban bencana alam dan sosial di Kota Makassar yang kebutuhan dasarnya terpenuhi, baik pada saat maupun setelah masa tanggap darurat, menunjukkan tingkat capaian yang tinggi dan relatif konsisten setiap tahunnya seperti yang disajikan pada grafik di atas. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi penyediaan pangan, sandang, layanan kesehatan darurat, tempat tinggal sementara, hingga perlindungan sosial. Tingginya capaian ini mencerminkan kesiapsiagaan Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan manajemen bencana, mulai dari kesiapan logistik, respons cepat melalui Posko Tanggap Darurat, pengelolaan data korban secara *real-time*, hingga penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait.



Capaian positif tersebut juga memperlihatkan efektivitas implementasi rencana kontinjensi daerah, pelaksanaan simulasi bencana secara berkala, serta peran kolaboratif antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam mendukung operasi tanggap darurat. Namun, keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar di fase tanggap darurat perlu diimbangi dengan penguatan fase pemulihan pascabencana. Tantangan yang masih dihadapi meliputi kebutuhan pendampingan psikososial jangka panjang, rehabilitasi sarana prasarana dasar, serta pemberdayaan ekonomi korban terdampak.

Grafik 2.169
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial
yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat
dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

2.4.4.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
1. Urusan Tenaga Kerja

Capaian indikator *outcome* dalam urusan tenaga kerja selama periode 2020 hingga 2024 untuk persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari capaian 49,02% pada tahun 2020, meningkat menjadi 67,35% di 2021, dan terus naik hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada rencana tenaga kerja.

Grafik 2.170
Persentase kegiatan yang dilaksanakan
mengacu ke rencana tenaga kerja Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Capaian indikator *outcome* dalam urusan tenaga kerja selama periode 2020 hingga 2024 untuk persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari capaian 49,02% pada tahun 2020, meningkat menjadi 67,35% di 2021, dan terus naik hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada rencana tenaga kerja.

Grafik 2.171
Persentase Tenaga Kerja
Bersertifikat Kompetensi Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Capaian indikator *outcome* dalam urusan tenaga kerja selama periode 2020 hingga 2024 untuk Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi juga mengalami peningkatan yang konsisten meskipun relatif kecil secara persentase. Dimulai dari 0,59% pada tahun 2020, naik menjadi 1,44% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui sertifikasi kompetensi.

Tabel 2.36
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tahun 2020-2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	30,62	32,62	34143,48	N/A	N/A

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Capaian indikator *outcome* dalam urusan tenaga kerja selama periode 2020 hingga 2024 untuk Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja mengalami lonjakan nilai yang sangat signifikan dan tidak proporsional, dari angka 30,62 di tahun 2020 menjadi lebih dari 24 juta pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 23 juta pada tahun 2024. Kenaikan drastis ini disebabkan oleh perubahan metode pengukuran atau variabel komponen produktivitas yang digunakan.



Grafik 2.172
Persentase Perusahaan yang menerapkan
tata kelola kerja yang layak Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025, berikut merupakan capaian indikator outcome dalam urusan tenaga kerja selama periode 2020 hingga 2024 untuk Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, termasuk penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), LKS Bipartit, struktur skala upah, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sempat mengalami penurunan dari 40,79% di tahun 2020 menjadi 29,06% di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan kembali hingga 51,81% pada tahun 2023, sebelum turun lagi menjadi 40,26% di tahun 2024. Fluktuasi ini dapat menggambarkan tantangan dalam mempertahankan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan.

Grafik 2.173
Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui
mekanisme layanan Antar Kerja Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

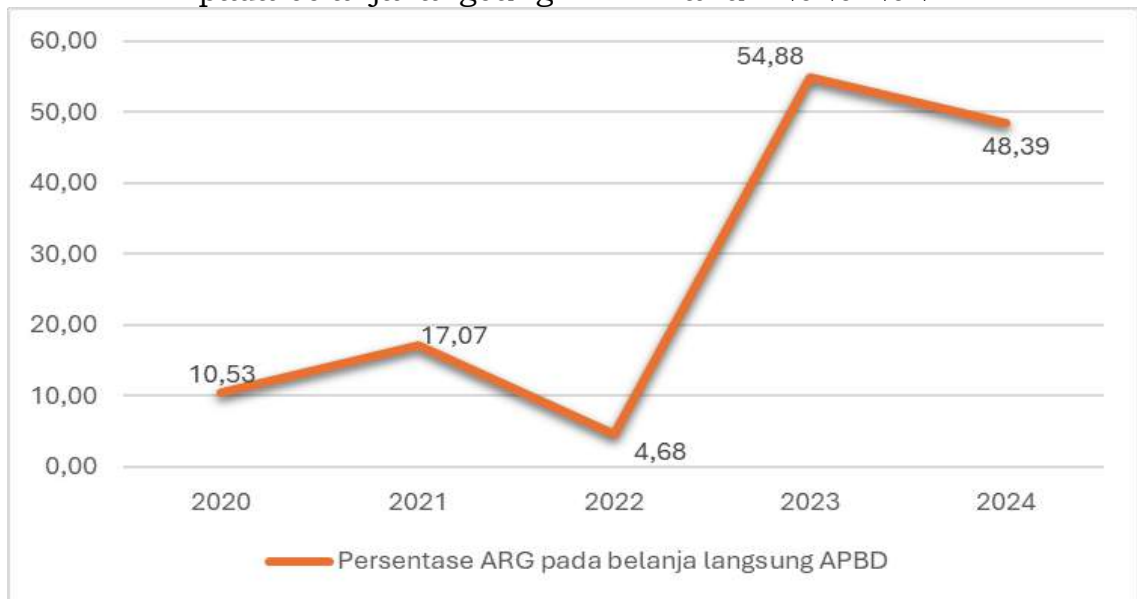
Capaian indikator outcome dalam urusan tenaga kerja selama periode 2020 hingga 2024 untuk Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

melalui mekanisme layanan Antar Kerja menunjukkan tren yang cukup positif. Meskipun terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 4,68%, namun kembali meningkat tajam menjadi 63,01% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme layanan antar kerja mulai kembali optimal dan diterima oleh tenaga kerja serta pemberi kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Terdapat beberapa indikator utama yang menggambarkan kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan PA selama lima tahun terakhir. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD mengalami fluktuasi signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, persentasenya mencapai 10,563%, meningkat menjadi 17,07% di 2021. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 ke angka 4,68%. Setelah itu, angkanya kembali naik menjadi 54,88% di tahun 2023 dan stabil meningkat menjadi 48,39% di tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada dinamika anggaran, komitmen terhadap pengarusutamaan gender semakin ditingkatkan pada dua tahun terakhir.

Grafik 2.174
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
pada belanja langsung APBD Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Terdapat beberapa indikator utama yang menggambarkan kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan PA selama lima tahun terakhir. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota menunjukkan capaian yang sangat tinggi dan konsisten. Dimulai dari capaian 0,0679% pada 2020, kemudian meningkat menjadi 0,20% di tahun 2021, dan mencapai 100% pada tahun 2022 hingga 2024. Ini mencerminkan keseriusan dan efektivitas instansi terkait dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak secara tuntas.



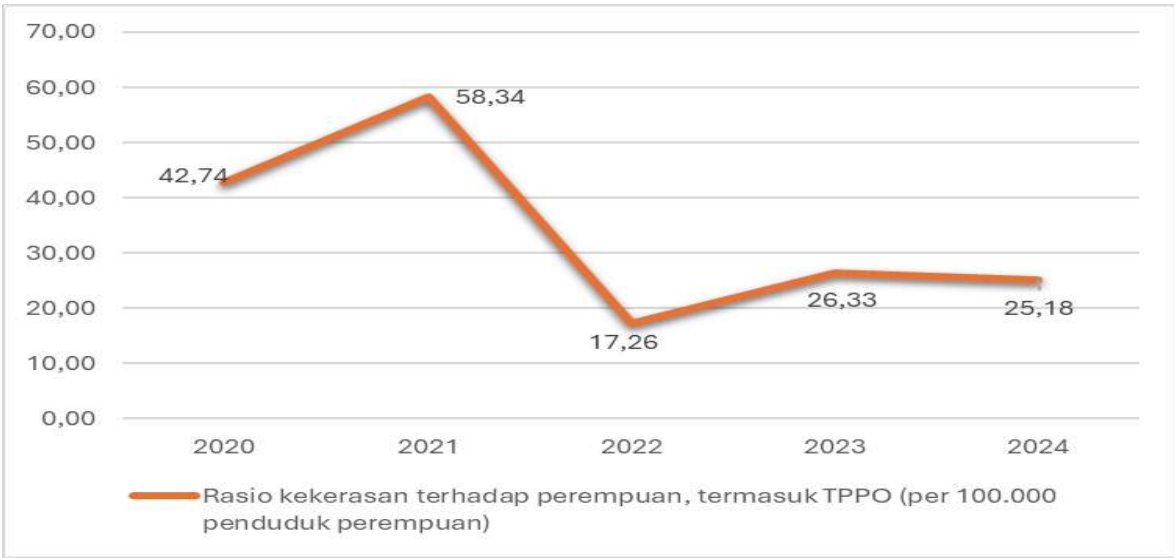
Grafik 2.175
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Terdapat beberapa indikator utama yang menggambarkan kinerja dalam urusan pemberdayaan perempuan dan PA selama lima tahun terakhir. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk perempuan menunjukkan tren menurun. Dari 42,745 kasus per 100.000 pada tahun 2020, rasio ini turun menjadi 58,34 di 2021, lalu terus menurun signifikan hingga mencapai 25,18 pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat, efektivitas kebijakan perlindungan perempuan, dan meningkatnya penanganan kasus kekerasan secara preventif maupun kuratif.

Grafik 2.176
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

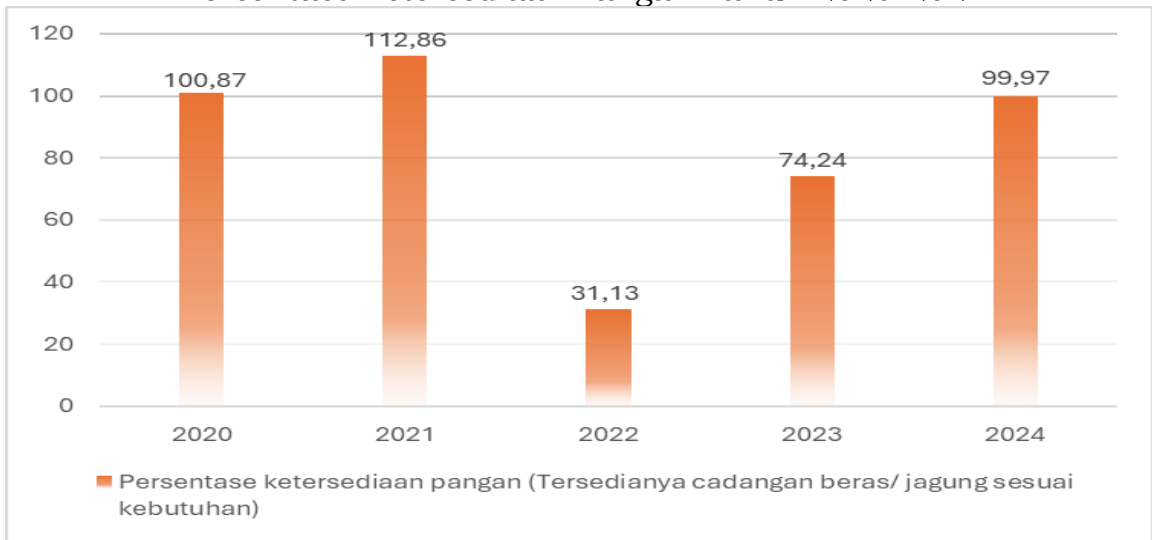
3. Urusan Pangan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pangan adalah persentase ketersediaan pangan yang diukur dari

tersedianya cadangan beras dan/atau jagung sesuai kebutuhan—mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Pada tahun 2020, capaian persentase ketersediaan pangan mencapai 100,87%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 112,86%. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2022 dengan capaian hanya sebesar 31,13%. Setelah itu, capaian kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 sebesar 74,24%, dan kembali mendekati target ideal di tahun 2024 dengan capaian sebesar 99,97%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan pokok, terutama pada tahun 2022. Namun demikian, peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan adanya upaya perbaikan dan penguatan sistem ketahanan pangan daerah.

Grafik 2.177
Persentase Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

4. Urusan Pertanahan

Berdasarkan data capaian urusan pertanahan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan menunjukkan konsistensi capaian sebesar 100% selama lima tahun berturut-turut (2020–2024), yang mencerminkan kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan lahan dengan izin lokasi yang diterbitkan.

Grafik 2.178
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan Tahun 2020-2024

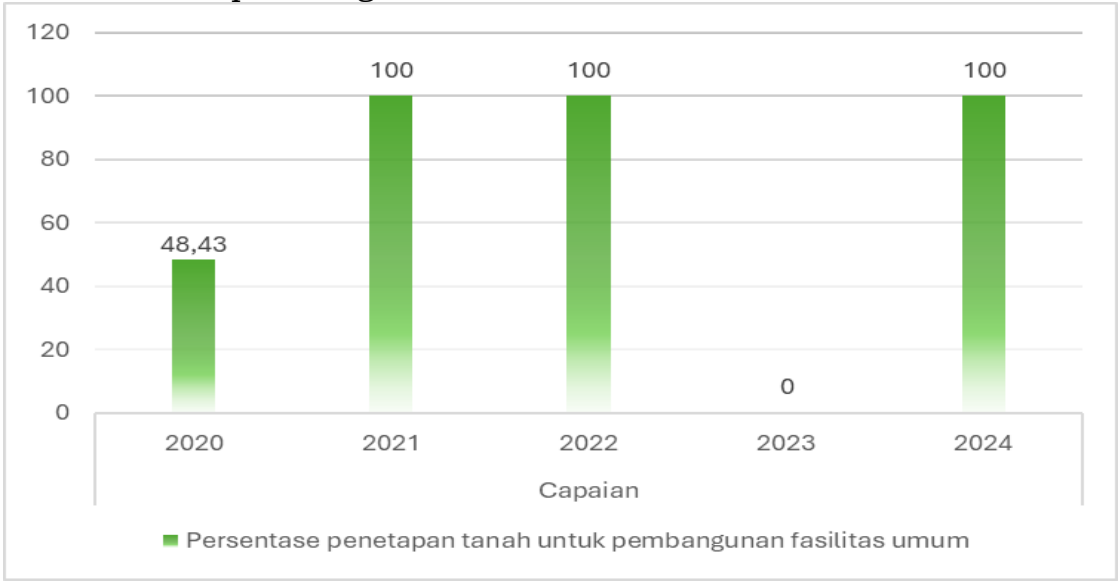


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025



Berdasarkan data capaian urusan pertanahan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum mengalami peningkatan tajam dari 48,43% di tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2021, namun kemudian stagnan di angka 0% dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa setelah tahun 2021, tidak ada lagi penetapan lahan baru untuk fasilitas umum, yang patut menjadi perhatian.

Grafik 2.179
Persentase penetapan tanah
untuk pembangunan fasilitas umum Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Berdasarkan data capaian urusan pertanahan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal selalu mencapai 100% sepanjang tahun pengamatan, menandakan dukungan pemerintah terhadap investasi dan pengembangan ekonomi melalui penyediaan lahan yang memadai.

Grafik 2.180
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Tahun 2020-2024

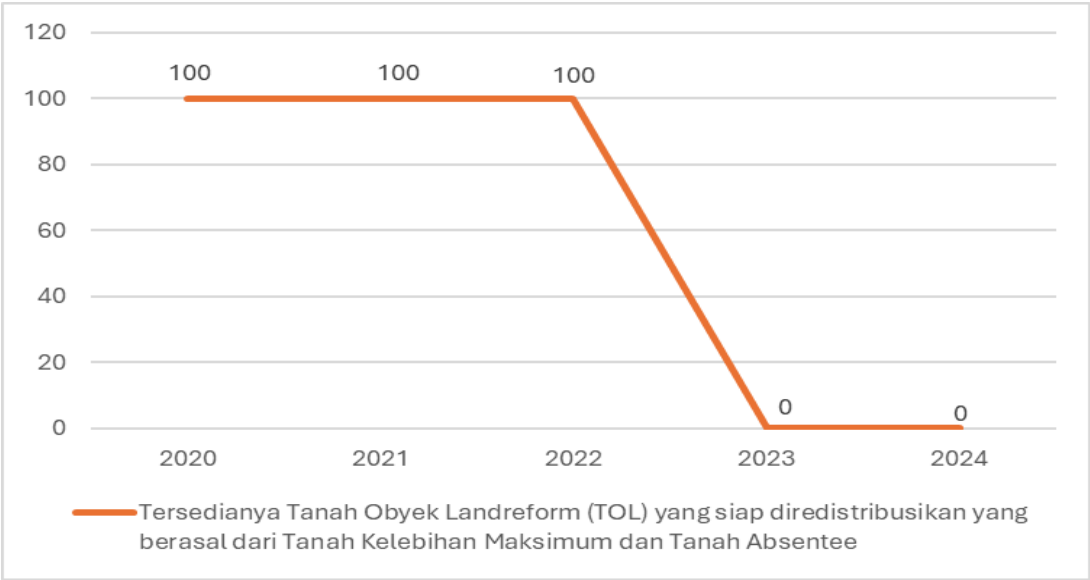


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025



Berdasarkan data capaian urusan pertanahan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan menunjukkan penurunan signifikan. Dari capaian 100% pada tahun 2020 dan 2021, indikator ini stagnan di angka 0% dari tahun 2022 hingga 2024. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada lagi tanah dari kelebihan maksimum dan tanah absentee yang tersedia atau siap didistribusikan dalam periode tersebut.

Grafik 2.181
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL)
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Berdasarkan data capaian urusan pertanahan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Tersedianya tanah untuk masyarakat juga menunjukkan penurunan serupa, dengan capaian 100% pada 2020 dan 2021, namun 0% pada tiga tahun berikutnya. Hal ini bisa menggambarkan keterbatasan ketersediaan lahan untuk program redistribusi kepada masyarakat.

Grafik 2.182
Tersedianya tanah untuk masyarakat Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025



Berdasarkan data capaian urusan pertanahan dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa Penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% di seluruh tahun (2020–2024), menunjukkan efektivitas penyelesaian konflik agraria secara damai melalui pendekatan mediasi.

Grafik 2.183
Penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara umum, meskipun beberapa indikator menunjukkan pencapaian maksimal secara konsisten, perlu adanya perhatian khusus terhadap indikator-indikator yang mengalami stagnasi atau penurunan pasca 2021, terutama terkait dengan penyediaan lahan untuk fasilitas umum dan redistribusi tanah.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan lingkungan hidup selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang bervariasi, mencerminkan tantangan dan kemajuan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami fluktuasi sepanjang lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, nilai IKLH tercatat sebesar 63,98 dan meningkat menjadi 65,20 di tahun 2021. Namun, setelah itu mengalami penurunan berturut-turut menjadi 60,96 (2022), 62,45 (2023), dan 61,42 (2024). Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan kualitas lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam aspek udara, air, dan lahan.



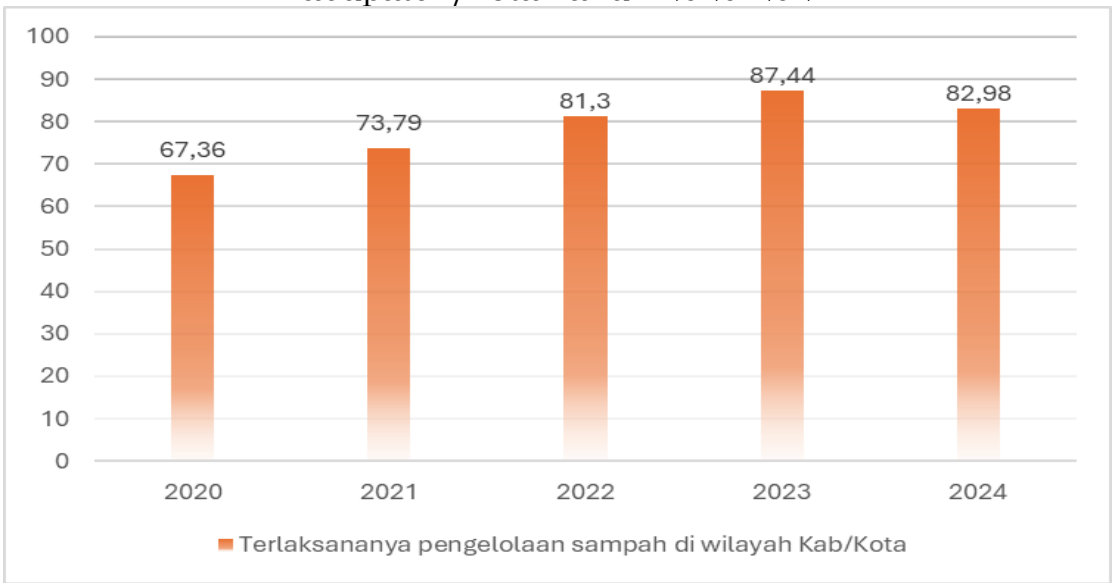
Grafik 2.184
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan lingkungan hidup selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang bervariasi, mencerminkan tantangan dan kemajuan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota menunjukkan tren positif yang cukup signifikan. Dari 67,36% pada tahun 2020, angka ini terus meningkat hingga mencapai 82,98% pada tahun 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 87,44%. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran dan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, pemilahan, serta pemrosesan akhir yang lebih efektif.

Grafik 2.185
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota Tahun 2020-2024



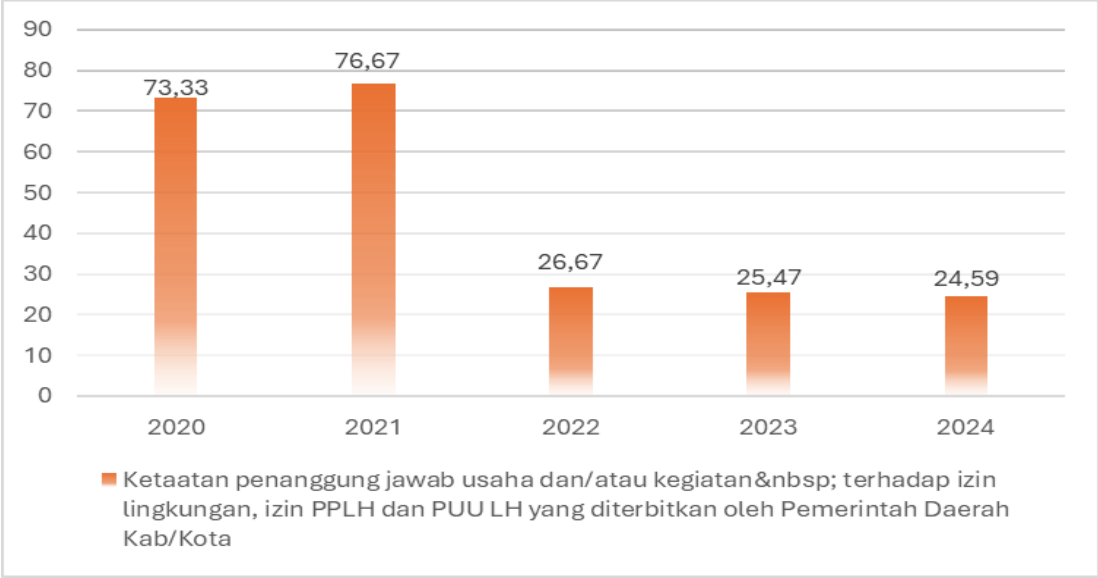
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada urusan lingkungan hidup selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang bervariasi, mencerminkan tantangan dan kemajuan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ketaatan



penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan seperti izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari capaian 73,33% di tahun 2020, angka ini menurun menjadi 76,67% di 2021, lalu anjlok ke angka 26,67% pada tahun 2022, dan terus menurun hingga mencapai titik terendah di tahun 2024 sebesar 24,59%. Penurunan ini mengindikasikan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha agar lebih patuh terhadap ketentuan lingkungan yang berlaku.

Grafik 2.186
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan lingkungan Tahun 2020-2024



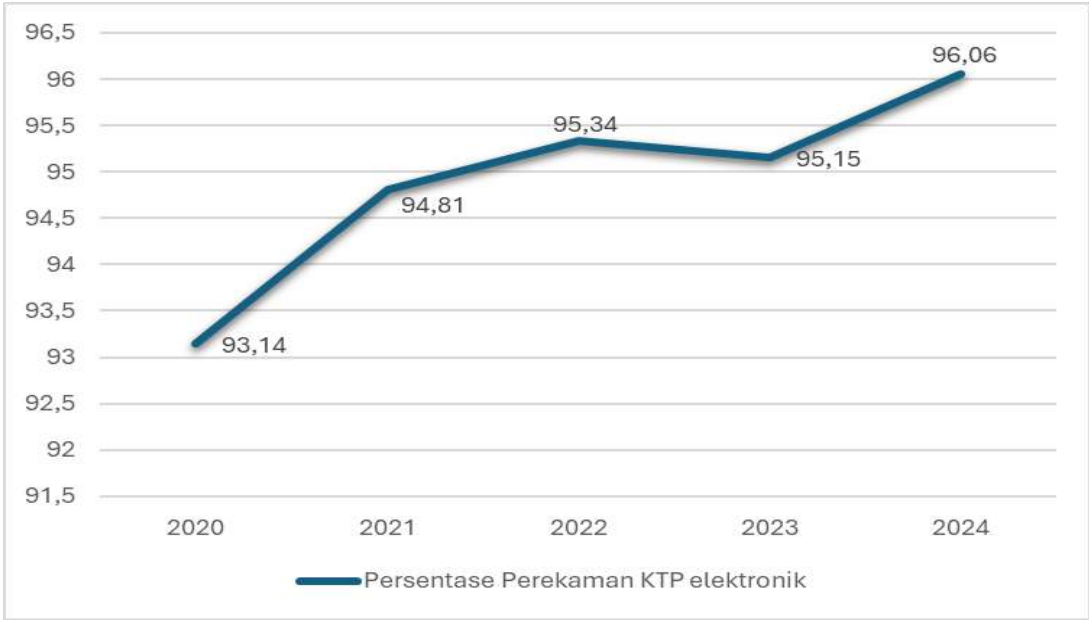
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan signifikan dalam hal pengelolaan sampah, namun tantangan besar masih dihadapi dalam menjaga kualitas lingkungan secara umum dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif serta sinergi antar pihak untuk mendorong perbaikan di sektor lingkungan hidup.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Data capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2020 hingga 2024. Persentase Perekaman KTP elektronik menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun. Dimulai dari 93,14% pada tahun 2020 dan meningkat hingga mencapai 96,06% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan upaya yang konsisten dalam memperluas cakupan kepemilikan KTP elektronik di masyarakat.

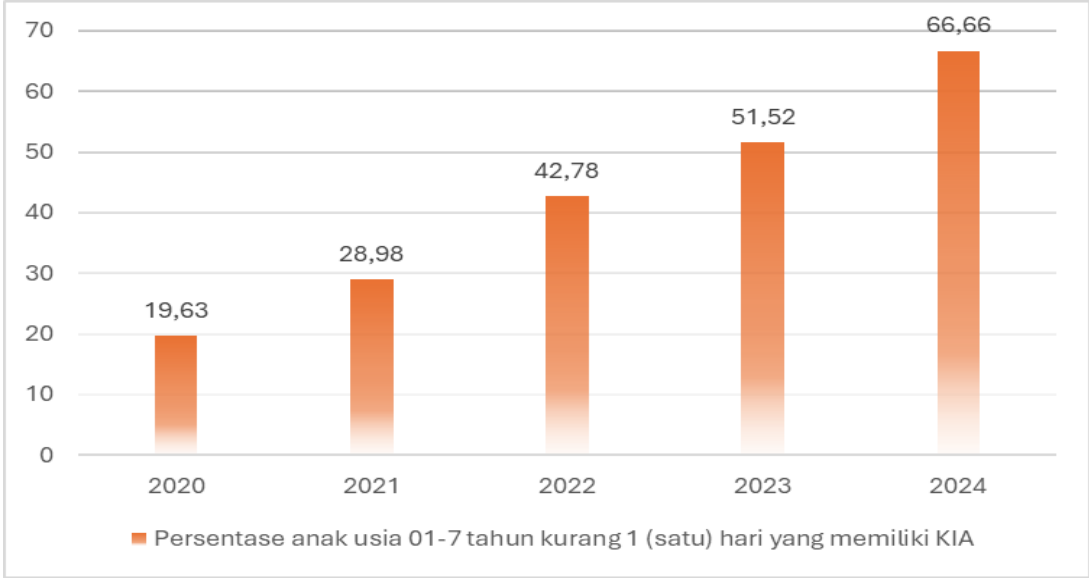
Grafik 2.187
Persentase Perekaman KTP elektronik Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2020 hingga 2024. Persentase anak usia 0–1 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) mengalami peningkatan signifikan. Dari hanya 19,63% pada tahun 2020, capaian meningkat drastis menjadi 66,66% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas program pemerintah dalam menerbitkan KIA sejak dini.

Grafik 2.188
Persentase anak usia 0–1 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2020 hingga 2024. Kepemilikan akta kelahiran (%) juga menunjukkan peningkatan yang baik. Pada tahun 2020, persentase kepemilikan akta kelahiran berada di angka 95,12% dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 97,79% pada



tahun 2024. Capaian ini mendekati angka ideal dan mencerminkan pelayanan pencatatan kelahiran yang semakin membaik.

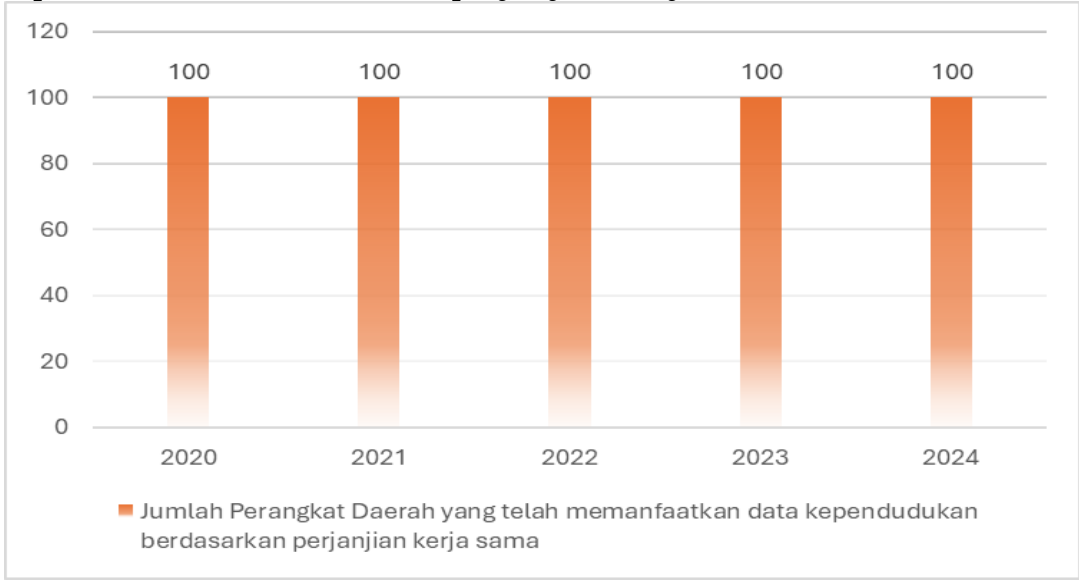
Grafik 2.189
Kepemilikan akta kelahiran (%) Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2020 hingga 2024. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama menunjukkan capaian maksimal dan konsisten, yakni 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Ini menandakan seluruh perangkat daerah telah terintegrasi dengan sistem data kependudukan nasional, memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan pelayanan publik.

Grafik 2.190
Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara keseluruhan, data dalam tabel mencerminkan kemajuan yang positif dan konsisten dalam pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tahun 2025.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama periode tahun 2020 hingga 2024. Terdapat dua indikator utama yang diukur dalam bentuk persentase (%), yaitu pengentasan desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri.

1. Persentase pengentasan desa tertinggal menunjukkan capaian maksimal sebesar 100% secara berturut-turut pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, capaian ini turun drastis menjadi 0%. Penurunan ini dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada lagi desa yang dikategorikan tertinggal untuk dientaskan, atau bisa juga mencerminkan tantangan dalam program lanjutan pada tahun-tahun tersebut.
2. Persentase peningkatan status desa mandiri juga menunjukkan pola capaian yang serupa. Program ini mencapai 100% pada tiga tahun awal (2020–2022), namun mengalami stagnasi pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian 0%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa seluruh target peningkatan status desa mandiri telah dicapai pada periode sebelumnya, atau terdapat hambatan dalam pelaksanaan program pada dua tahun terakhir.

Tabel 2.37
Capaian IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	IKK Outcome	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	100	100	0	0

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara umum, capaian maksimal pada awal periode menunjukkan efektivitas program pemberdayaan desa, namun nihilnya capaian di dua tahun terakhir menjadi catatan penting untuk evaluasi berkelanjutan dan perumusan strategi baru ke depan.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk menstabilkan angka kelahiran dan meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern. Angka Kelahiran Total (TFR) menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2020, angka TFR tercatat sebesar 2,11 anak per wanita usia subur, menurun menjadi 2,00 pada tahun 2021. Angka ini sempat naik kembali menjadi 2,13 di tahun 2022, lalu turun ke 2,02 pada 2023, dan kembali stabil di angka 2,00 pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh setiap wanita berada dalam kisaran dua anak, mendekati target pengendalian pertumbuhan penduduk. Data TFR Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada grafik berikut:



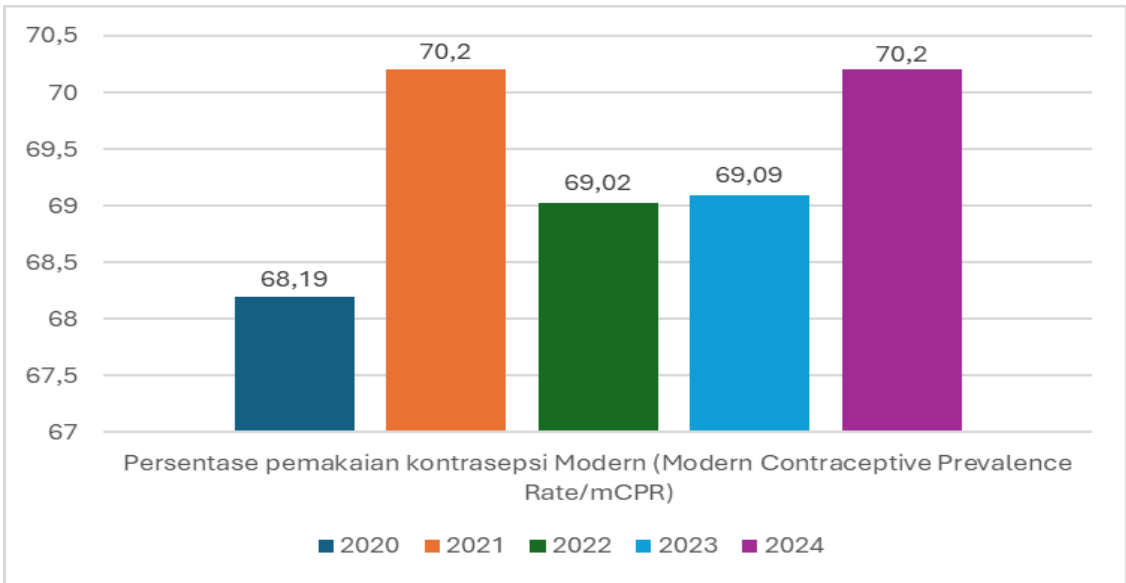
Grafik 2.191
Angka Kelahiran Total (TFR) Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Tahun 2025

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk menstabilkan angka kelahiran dan meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) mengalami fluktuasi namun cenderung stabil di angka sekitar 70%. Tahun 2020 mencatat angka 68,19%, kemudian meningkat menjadi 70,20% pada 2021. Namun, terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 69,02%, lalu kembali meningkat pada 2023 (69,09%) dan mencapai 70,20% di tahun 2024. Angka ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam menggunakan metode kontrasepsi modern sebagai upaya pengendalian kelahiran. Data mCPR Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir tersaji pada grafik berikut:

Grafik 2.192
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Tahun 2025



Grafik 2.193
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
Kota Makassar Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Tahun 2025

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk menstabilkan angka kelahiran dan meningkatkan pemakaian kontrasepsi modern. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) menunjukkan perbaikan signifikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020, unmet need sebesar 9,19%, menurun drastis menjadi 5,25% di tahun 2021. Namun, terjadi kenaikan cukup tinggi pada 2022 sebesar 15,04%, yang mungkin disebabkan oleh kendala akses layanan selama masa pandemi. Pada tahun-tahun berikutnya, capaian kembali membaik yaitu sebesar 9,06% di 2023 dan kembali turun ke angka 5,25% di tahun 2024.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam mempertahankan angka kelahiran yang moderat serta meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi modern. Meskipun masih terdapat tantangan terkait unmet need, upaya perbaikan terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat terhadap layanan KB dapat terpenuhi secara optimal.

9. Urusan Perhubungan

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah serta efisiensi lalu lintas di wilayah perkotaan. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, rasio konektivitas tercatat sebesar 0,85, namun menurun menjadi 0,75 pada tahun 2021 dan bertahan di angka yang sama hingga tahun 2023. Penurunan lebih lanjut terjadi pada 2024, yaitu menjadi 0,63. Tren ini menunjukkan perlunya peningkatan integrasi jaringan transportasi antar wilayah untuk mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang antar kabupaten/kota.



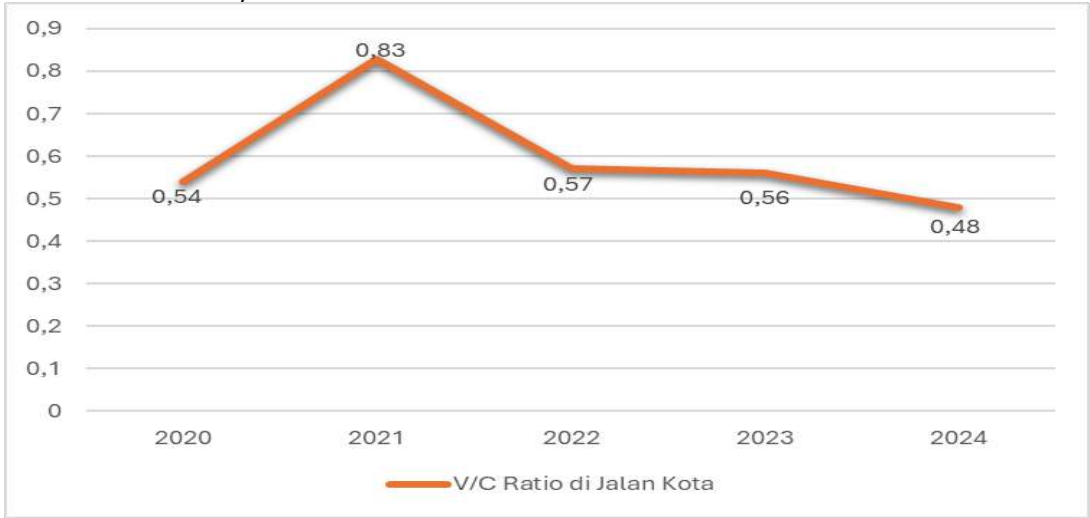
Grafik 2.194
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah serta efisiensi lalu lintas di wilayah perkotaan. V/C Ratio di Jalan Kota, yang menggambarkan tingkat kemacetan lalu lintas (rasio antara volume kendaraan terhadap kapasitas jalan), menunjukkan tren yang relatif fluktuatif. Pada 2020, rasio tercatat sebesar 0,54 dan meningkat menjadi 0,83 pada 2021, yang menandakan tingginya beban lalu lintas dibandingkan kapasitas jalan. Namun, terjadi perbaikan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 0,57 di 2022, 0,56 di 2023, dan membaik menjadi 0,48 pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi lalu lintas di jalan-jalan perkotaan, kemungkinan sebagai hasil dari kebijakan pengaturan lalu lintas dan pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik.

Grafik 2.195
V/C Ratio di Jalan Kota tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam menjaga dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, kondisi lalu lintas perkotaan menunjukkan tren perbaikan. Ke depan, perlu ada sinergi antara pembangunan infrastruktur dan manajemen lalu lintas untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, aman, dan efisien.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet mencapai tingkat maksimal, yaitu 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan kesiapan infrastruktur digital yang merata di seluruh perangkat daerah, sebagai fondasi penting bagi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-Government*).

Grafik 2.196
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet Tahun 2020-2024

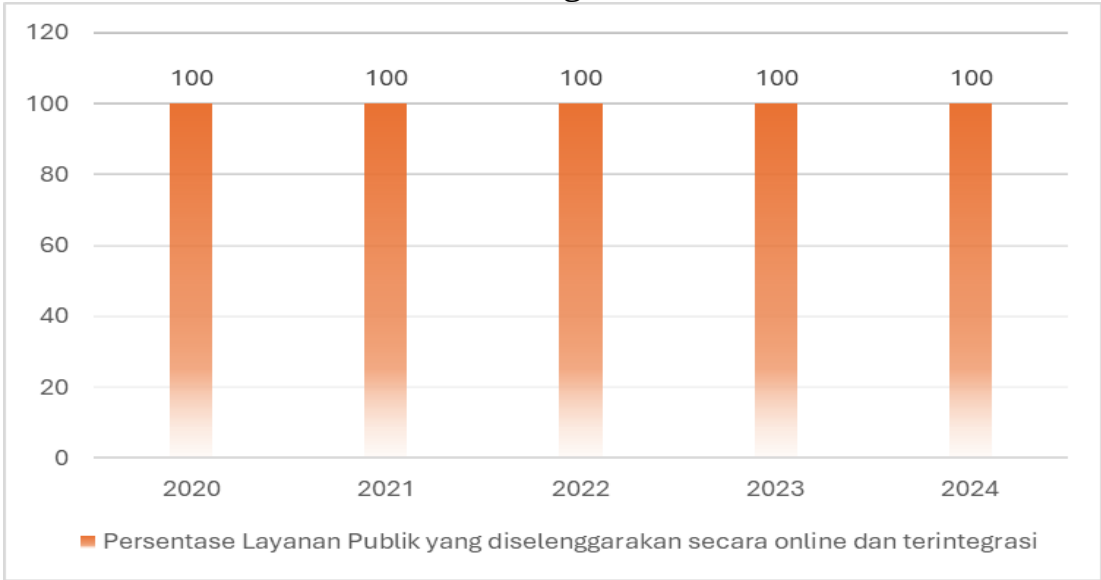


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga menunjukkan capaian sempurna sebesar 100% selama lima tahun berturut-turut. Ini menandakan bahwa seluruh layanan publik telah berhasil didigitalisasi dan terhubung dalam satu sistem layanan terpadu, memudahkan akses bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintahan.



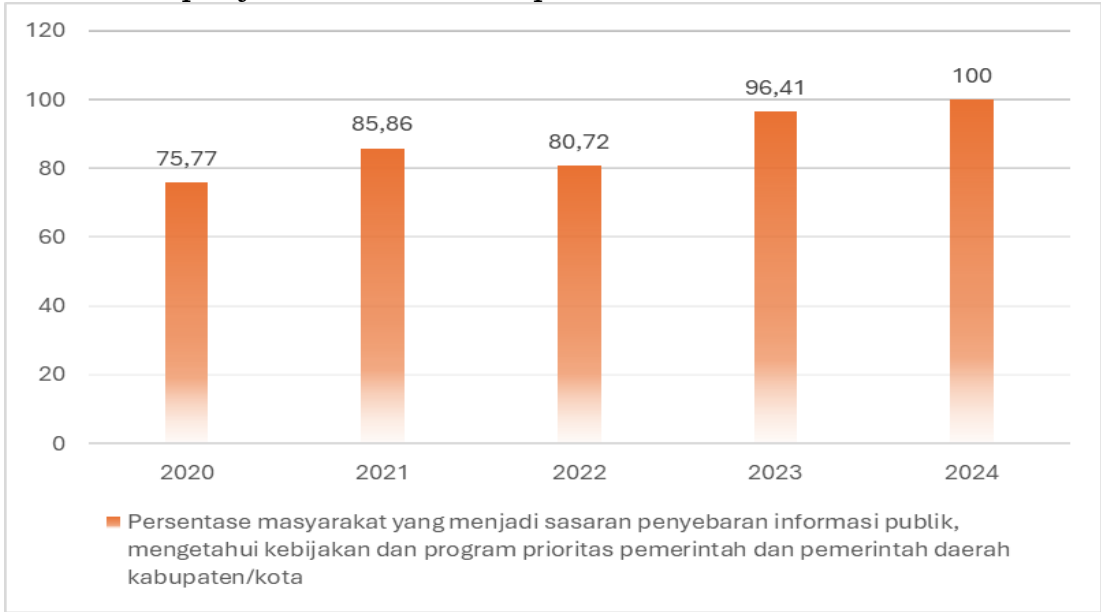
Grafik 2.197
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik terus meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 75,77%, kemudian meningkat ke 85,86% di tahun 2021. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2022 sebesar 80,72%, peningkatan kembali terjadi pada 2023 mencapai 96,41%, dan akhirnya mencapai 100% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Dinas Kominfo dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah secara luas dan merata kepada masyarakat.

Grafik 2.198
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis

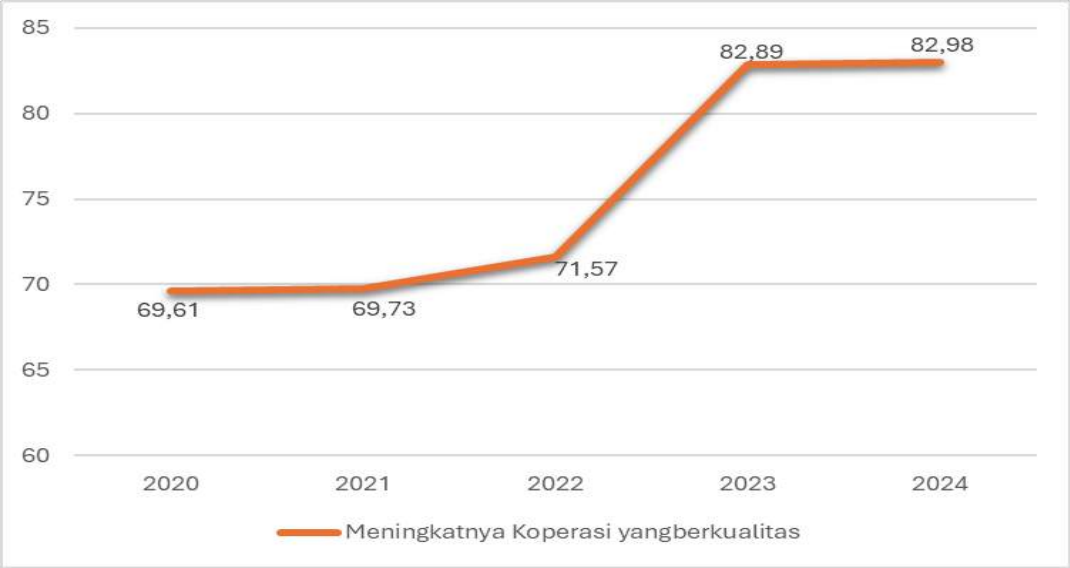
teknologi informasi yang efektif dan inklusif. Konsistensi dalam konektivitas, digitalisasi layanan, dan penyebaran informasi menjadi indikator penting dari keberhasilan transformasi digital yang berkelanjutan.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel di atas menyajikan data capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome dari Urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah selama periode tahun 2020 hingga 2024. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas, Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dimulai dari 69,61% pada tahun 2020, naik menjadi 69,73% pada 2021, dan terus meningkat hingga mencapai 82,98% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas koperasi melalui pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi.

Grafik 2.199

Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Tabel di atas menyajikan data capaian indikator kinerja kunci (IKK) outcome dari Urusan Koperasi, Usaha Mikro, dan Menengah selama periode tahun 2020 hingga 2024. Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha, Indikator ini mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, capaian sebesar 41,01% menurun menjadi 35,55% di tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 58,64% di tahun 2023 dan 58,86% pada tahun 2024. Ini menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro yang mulai menunjukkan hasil positif setelah mengalami penurunan di awal periode.

Grafik 2.200
Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara umum, kedua indikator ini memperlihatkan kinerja yang membaik di bidang koperasi dan UMKM, yang mencerminkan peningkatan efektivitas kebijakan dan program pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

12. Urusan Penanaman Modal

Tabel di atas menampilkan capaian indikator outcome untuk urusan Penanaman Modal di kabupaten/kota selama periode tahun 2020 hingga 2024. Indikator yang diukur adalah Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota, yang menggambarkan seberapa besar pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020, capaian investasi menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi sebesar 143,03%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pemulihan ekonomi atau adanya proyek investasi besar. Namun, capaian ini menurun drastis pada tahun 2021 menjadi 7,39%, dan bahkan mengalami penurunan tajam hingga negatif -52,59% pada tahun 2022. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, hambatan regulasi, atau dampak lanjutan dari pandemi.

Memasuki tahun 2023, capaian mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan dengan pertumbuhan sebesar 48,80%, dan angka ini tetap stabil pada tahun 2024. Stabilitas capaian pada dua tahun terakhir ini menunjukkan bahwa kondisi iklim investasi mulai membaik dan terdapat konsistensi dalam upaya pemerintah daerah untuk menarik dan mempertahankan investor.

Grafik 2.201
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun, tren dua tahun terakhir memperlihatkan sinyal positif terhadap upaya penguatan sektor penanaman modal di daerah.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja Pemerintah Kota Makassar menunjukkan perkembangan positif dalam mendorong partisipasi pemuda serta peningkatan prestasi olahraga selama lima tahun terakhir. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020, partisipasi tercatat sangat rendah yaitu 0,039%, namun meningkat menjadi 1,45% di tahun 2021 dan terus naik menjadi 1,97% (2022) dan 3,76% (2023). Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dengan capaian maksimal sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program-program pemberdayaan ekonomi pemuda yang semakin masif dan inklusif.

Grafik 2.202
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Kinerja Pemerintah Kota Makassar menunjukkan perkembangan positif dalam mendorong partisipasi pemuda serta peningkatan prestasi olahraga selama lima tahun terakhir. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial juga mengalami peningkatan tajam. Dari 2,55% di tahun 2020, meningkat ke 4,50% pada 2021, lalu melonjak menjadi 23,85% pada 2022. Tren ini terus naik hingga 28,58% (2023) dan mencapai 29,00% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan keterlibatan aktif pemuda dalam kegiatan sosial serta kepemudaan sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kepemimpinan generasi muda.

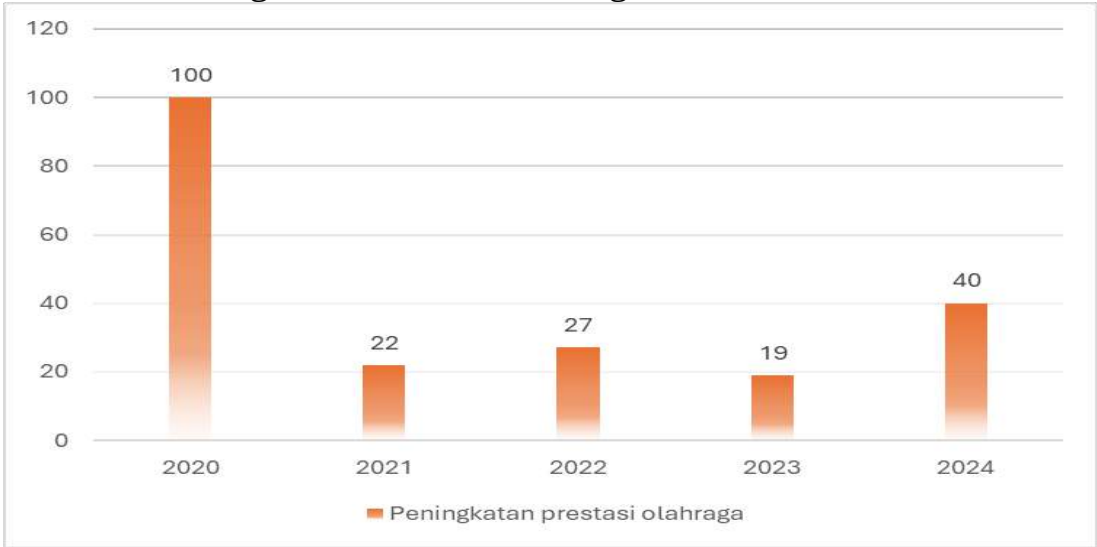
Grafik 2.203
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi
Kepemudaan dan Sosial Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Kinerja Pemerintah Kota Makassar menunjukkan perkembangan positif dalam mendorong partisipasi pemuda serta peningkatan prestasi olahraga selama lima tahun terakhir. Peningkatan Prestasi Olahraga mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren positif secara keseluruhan. Tahun 2020 merupakan capaian tertinggi dengan nilai 100 (kemungkinan karena adanya event besar atau capaian prestasi nasional). Tahun berikutnya menurun menjadi 22 (2021), 27 (2022), dan 19 (2023), sebelum kembali meningkat secara signifikan menjadi 40 pada tahun 2024. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti agenda pertandingan, pembinaan atlet, dan dukungan anggaran, namun peningkatan di tahun terakhir menunjukkan bahwa pembinaan prestasi olahraga mulai kembali menunjukkan hasil yang positif.

Grafik 2.204
Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020-2024



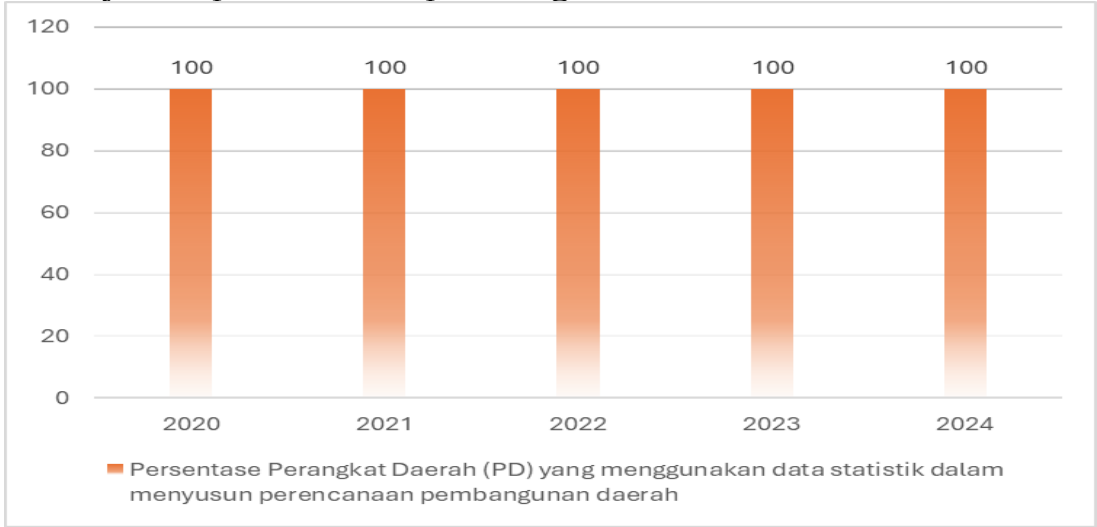
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan olahraga. Meningkatnya partisipasi dan prestasi ini diharapkan dapat terus berlanjut dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

14. **Urusan Statistik**

Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis data, Pemerintah Kota Makassar berhasil mendorong pemanfaatan data statistik secara optimal oleh perangkat daerah selama periode lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dalam capaian indikator kinerja kunci (IKK) pada Urusan Statistik. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah menunjukkan capaian yang konsisten dan sempurna, yaitu 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Ini menandakan bahwa seluruh perangkat daerah telah menyadari pentingnya pendekatan berbasis data dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Grafik 2.205
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020-2024

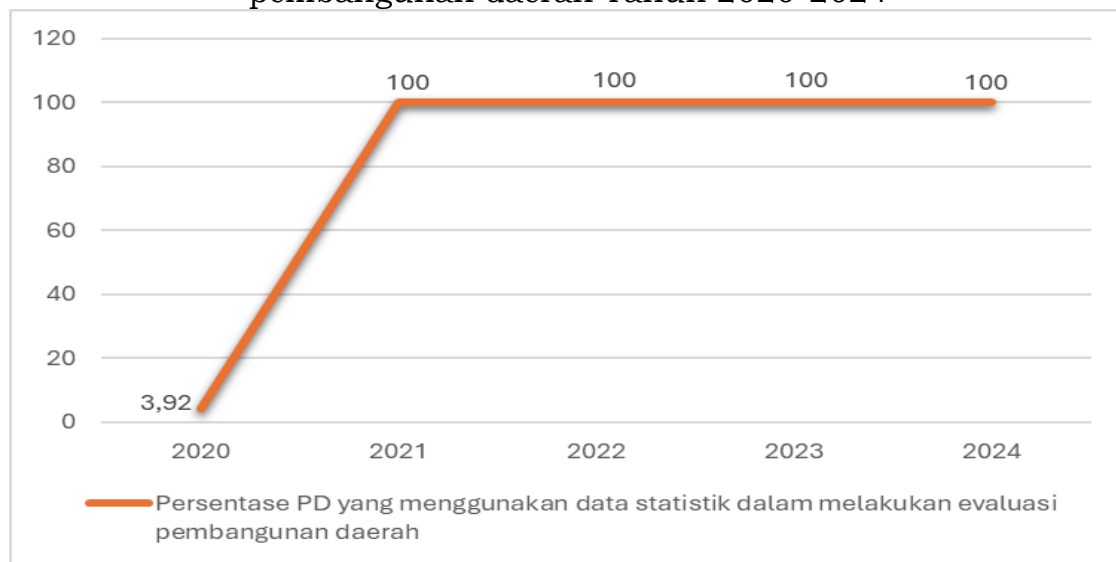


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Dalam rangka mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis data, Pemerintah Kota Makassar berhasil mendorong pemanfaatan data statistik secara optimal oleh perangkat daerah selama periode lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dalam capaian indikator kinerja kunci (IKK) pada Urusan Statistik. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah juga mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020, capaian masih sangat rendah, yakni 3,92%. Namun, peningkatan drastis terjadi mulai tahun 2021 hingga 2024, di mana capaian mencapai 100% secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah tidak hanya mengandalkan data dalam proses perencanaan, tetapi juga mulai menjadikan data sebagai alat utama dalam mengevaluasi hasil pembangunan secara objektif dan terukur.

Grafik 2.206

Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi budaya kerja birokrasi yang semakin mengedepankan prinsip evidence-based policy. Ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang maksimal telah menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

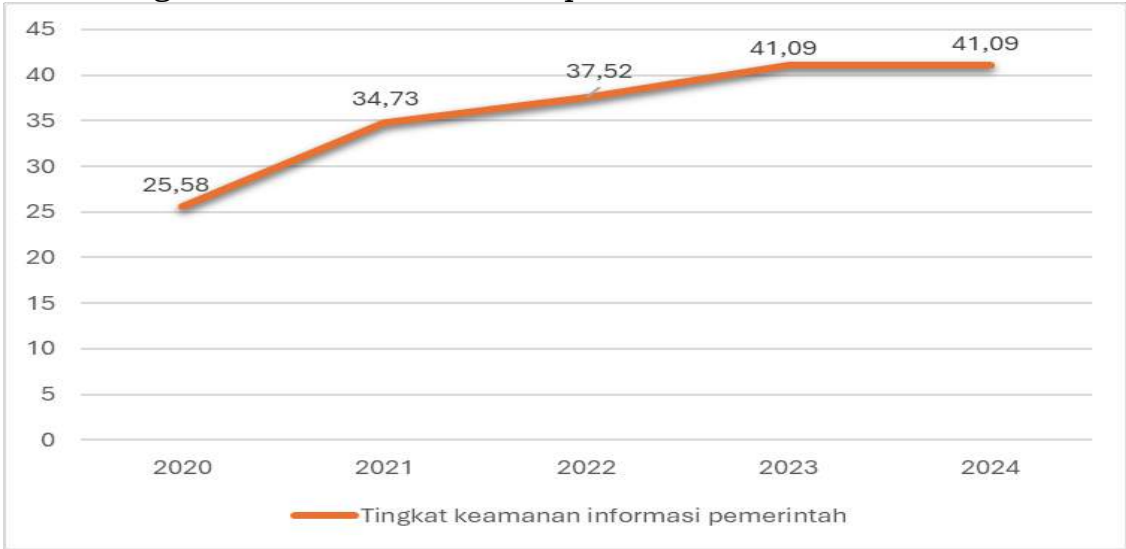
15. Urusan Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terpercaya dan terlindungi dari potensi ancaman siber. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, capaian awal berada di angka 25,58%, kemudian meningkat menjadi 34,73% pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 37,52%, dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dan 2024 dengan capaian stabil sebesar 41,09%.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya penguatan sistem pengamanan informasi, seperti pengembangan kebijakan keamanan informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi keamanan digital, mulai membuahkan hasil. Meskipun belum mencapai 100%, tren positif ini mencerminkan adanya kesadaran dan komitmen dari instansi pemerintah terhadap pentingnya menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pemerintah.



Grafik 2.207
Tingkat keamanan informasi pemerintah Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Ke depan, perlu upaya yang lebih intensif, termasuk integrasi sistem keamanan antar SKPD dan peningkatan infrastruktur digital yang lebih canggih, guna memperkuat ketahanan informasi di era transformasi digital.

16. **Urusan Kebudayaan**

Pelestarian Cagar Budaya merupakan aspek penting dalam menjaga identitas, nilai sejarah, dan warisan budaya suatu daerah. Data capaian Urusan Kebudayaan selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diukur melalui persentase terlestariannya Cagar Budaya menunjukkan capaian maksimal sebesar 100% secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024.

Hal ini mencerminkan bahwa seluruh Cagar Budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah mampu dijaga dan dilestarikan sesuai dengan standar perlindungan yang berlaku. Capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek fisik pelestarian, tetapi juga dalam hal regulasi, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi antar instansi dalam pengawasan dan pemeliharaan situs budaya.

Grafik 2.208
Terlestariannya Cagar Budaya Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen Dinas Kebudayaan dalam mempertahankan kekayaan sejarah dan budaya daerah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal. Untuk menjaga capaian ini, langkah ke depan perlu difokuskan pada penguatan peran masyarakat dalam pelestarian budaya dan digitalisasi data cagar budaya untuk meningkatkan akses informasi dan edukasi publik.

17. Urusan Perpustakaan

Upaya peningkatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Dari angka 44,81 pada tahun 2020, terjadi peningkatan setiap tahun hingga mencapai 84,52 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program literasi dan promosi membaca yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan semakin efektif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Grafik 2.209

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2020-2024

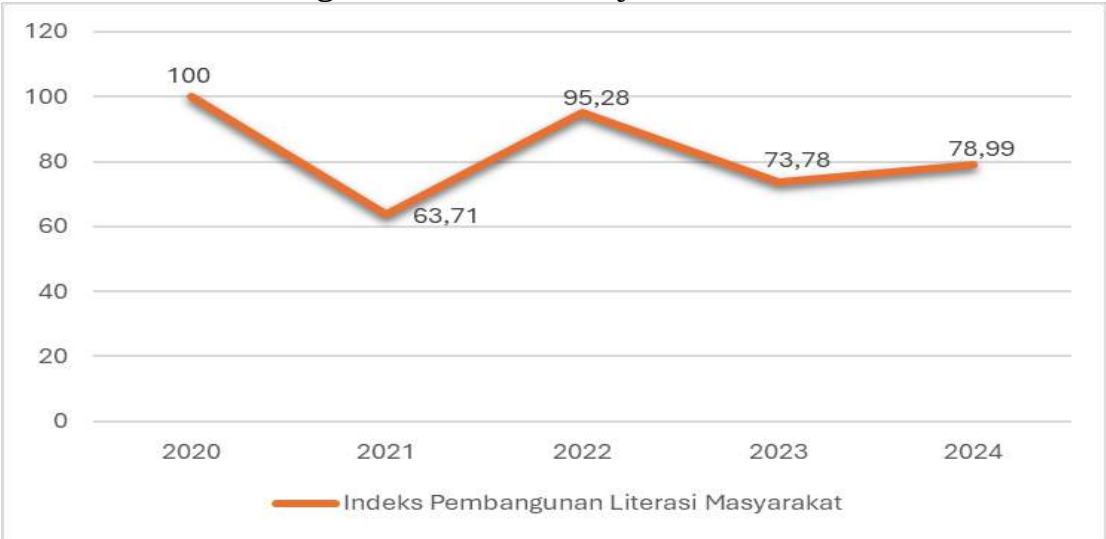


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Upaya peningkatan literasi masyarakat melalui layanan perpustakaan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2020 mencatat capaian tertinggi sebesar 100, namun pada tahun 2021 turun menjadi 63,71. Meskipun demikian, capaian kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 95,28, kemudian sedikit menurun lagi pada 2023 dan 2024, masing-masing menjadi 73,78 dan 78,99. Penurunan ini dapat menjadi perhatian untuk evaluasi terhadap program penguatan literasi, khususnya dalam aspek pemerataan akses dan efektivitas pemanfaatan fasilitas literasi.



Grafik 2.210
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2020-2024



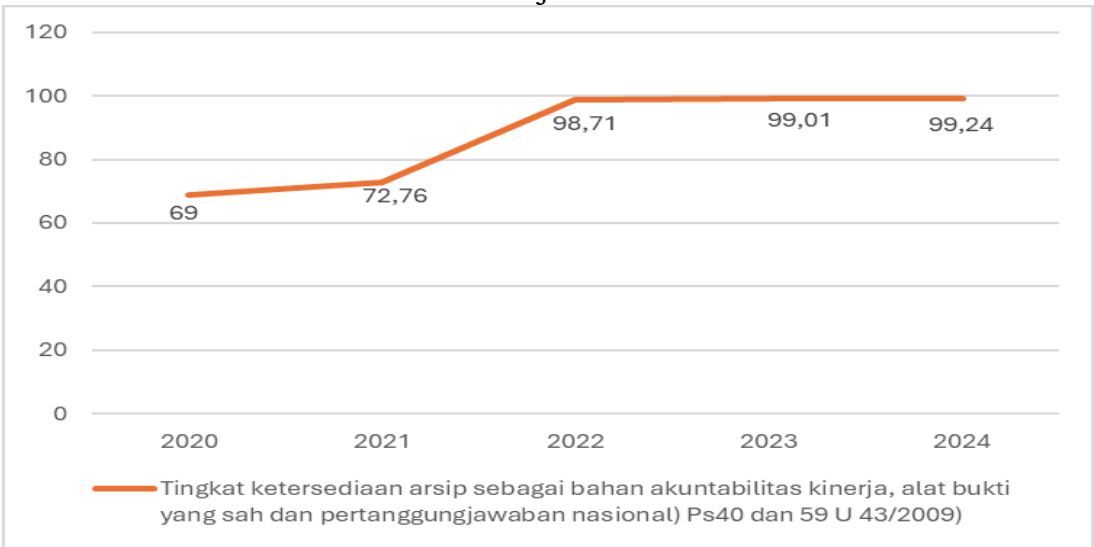
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Secara umum, data ini menggambarkan adanya peningkatan minat baca masyarakat serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong terciptanya ekosistem literasi yang lebih baik. Keberhasilan ini dapat diperkuat lebih lanjut melalui kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan peran perpustakaan sebagai pusat belajar sepanjang hayat.

18. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti yang sah dalam pertanggungjawaban nasional. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, Indikator ini menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip berada di angka 69%, kemudian meningkat menjadi 72,76% pada tahun 2021. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 98,71%, diikuti dengan peningkatan menjadi 99,01% pada tahun 2023 dan mencapai 99,24% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan upaya dalam menyediakan arsip yang andal untuk keperluan akuntabilitas.

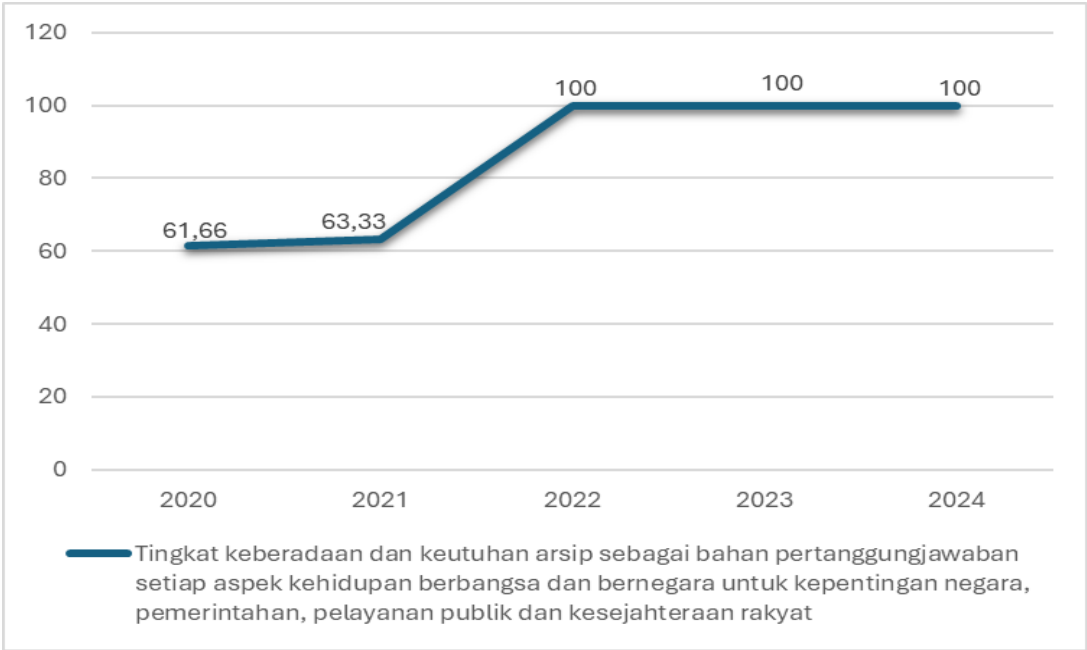
Grafik 2.211
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Urusan kearsipan memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas kinerja dan sebagai alat bukti yang sah dalam pertanggungjawaban nasional. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan, Indikator ini juga menunjukkan kemajuan yang konsisten. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 61,66%, meningkat menjadi 63,33% pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2024, tingkat capaian mencapai angka maksimal yaitu 100%. Hal ini menandakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, arsip yang tersedia telah memenuhi standar keberadaan dan keutuhan secara menyeluruh, sebagai dasar pertanggungjawaban yang sah dalam pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Grafik 2.212
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai
bahan pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data ini menunjukkan bahwa urusan kearsipan mengalami perkembangan signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran aktif instansi terkait, yaitu Dinas Kearsipan, yang terus berupaya meningkatkan pengelolaan arsip sesuai regulasi dan kebutuhan strategis nasional.

2.4.4.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Jumlah total produksi perikanan merupakan data yang mencerminkan tingkat pemanfaatan sumber daya perairan dan kapasitas produksi yang telah dihasilkan oleh para pelaku usaha perikanan. Berikut merupakan tren data yang dimulai dari tahun 2020 hingga 2024

Tabel 2.38
Jumlah total produksi perikanan
Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
20.208	20,429	102.55	104.1	101.28

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025



Data di atas menunjukkan bahwa jumlah total produksi perikanan di Kota Makassar dalam rentang waktu lima tahun terakhir sangat berfluktuatif. Capaian total produksi perikanan tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 104.1 persen tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemanfaatan sumber daya perairan dan kapasitas produksi.

2. **Urusan Pariwisata**

Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah wisatawan sebesar -72,16%, yang kemudian berlanjut dengan penurunan lebih tajam pada tahun 2021 sebesar -88,58%. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas internasional. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 1945,5%, menandakan adanya pemulihan besar dalam sektor pariwisata. Tren pertumbuhan positif ini berlanjut, meskipun dengan angka yang lebih moderat, yakni sebesar 19,93% pada tahun 2023 dan 11,55% pada tahun 2024. Data ini menunjukkan bahwa setelah mengalami masa krisis yang berat, sektor pariwisata Kota Makassar mampu bangkit dan menunjukkan pemulihan secara bertahap.

Tabel 2.39
Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan
Mancanegara per Kebangsaan Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
-72.16	-88.58	1945.5	19.93	11.55

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Tabel di atas menunjukkan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terjadi penurunan cukup tajam sebesar -65,456%, yang kemudian berlanjut dengan penurunan lebih ringan sebesar -8,95% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, sektor pariwisata mulai pulih dengan sangat signifikan, mencatatkan peningkatan sebesar 147,01%. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan 27,4%, dan meskipun sedikit melambat sebesar 25,13% pada tahun 2024. Data ini menggambarkan adanya pemulihan bertahap dalam sektor perjalanan wisata domestik, setelah mengalami keterpurukan akibat pandemi dan berbagai pembatasan mobilitas

Tabel 2.40
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara
Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
-65,456	-8,95	147,01	27,4	25,13

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Tabel di atas memperlihatkan tingkat hunian akomodasi di Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tingkat hunian tercatat sangat rendah, hanya sebesar 2,91%, yang mencerminkan dampak besar dari pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan perhotelan. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 22,91%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan tingkat hunian sebesar 44,79%, dan semakin meningkat pada tahun 2023 menjadi 53,55%. Pada tahun 2024, tingkat hunian mencapai angka tertinggi dalam periode tersebut, yaitu sebesar 55,48%. Data ini menunjukkan adanya pemulihan bertahap dan

pertumbuhan yang stabil pada sektor akomodasi di Kota Makassar, seiring dengan membaiknya kondisi pariwisata secara umum.

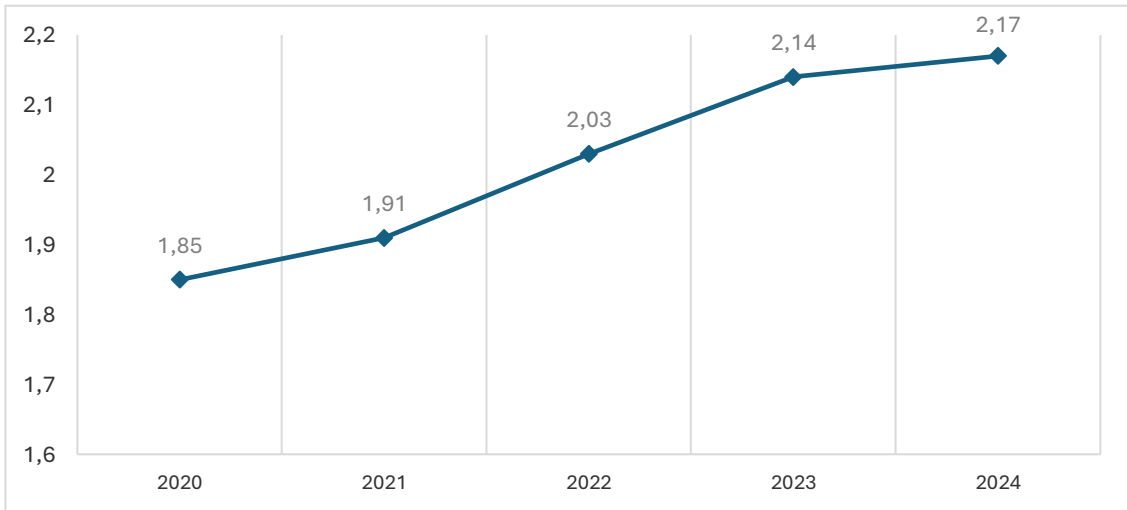
Tabel 2.41
Tingkat Hunian Akomodasi

2020	2021	2022	2023	2024
2,91	22,91	44,79	53,55	55,48

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data menunjukkan tren kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pariwisata tercatat sebesar 1,85%. Angka ini mengalami kenaikan bertahap pada tahun 2021 menjadi 1,91%, lalu meningkat lebih signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai 2,03%. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana kontribusi sektor pariwisata mencapai 2,14%. Pada tahun 2024, kontribusi tersebut kembali mengalami kenaikan kecil namun tetap stabil, menjadi 2,17%. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kota Makassar antara lain: Adanya promosi dan branding destinasi pariwisata; diversifikasi produksi wisata dalam bidang kuliner, budaya, dan Bahari; serta adanya penyelenggaraan berbagai even dan festival dengan skala lokal, nasional, maupun internasional yang dapat mendorong kunjungan wisatawan dan meningkatkan belanja mereka di Kota Makassar.

Grafik 2.213
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku

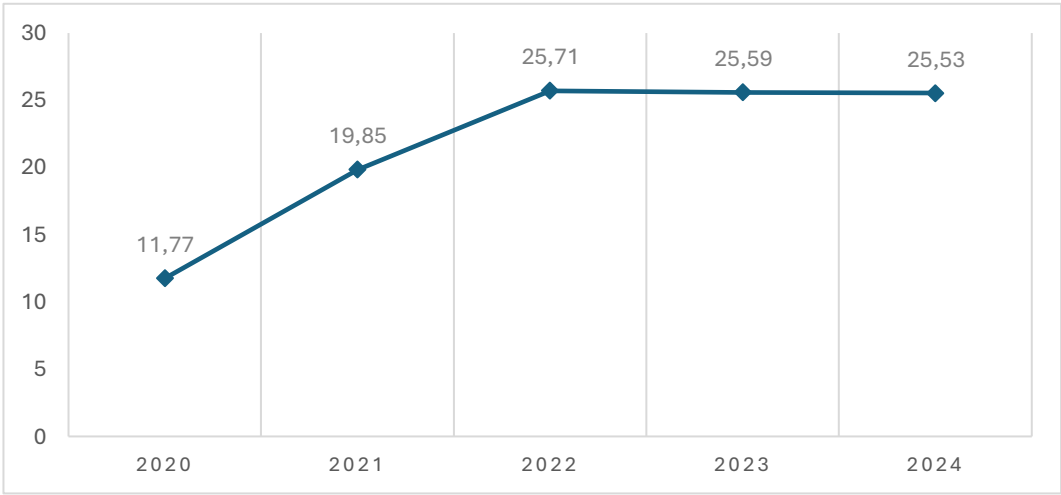


Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Grafik tersebut memperlihatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pariwisata tercatat sebesar 11,77%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 19,85%. Pertumbuhan kontribusi terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 25,71%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, kontribusi tersebut mengalami sedikit penurunan dan stabil di angka 25,59% dan 25,53%. Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan sumbangan yang semakin penting terhadap PAD Kota Makassar.



Grafik 2.214
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

3. Urusan Pertanian

Tabel di atas menunjukkan perkembangan produktivitas pertanian per hektar per tahun di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, produktivitas pertanian tercatat sebesar 6,64 ton per hektar, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021 menjadi 6,72 ton per hektar. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan produktivitas menjadi 6,32 ton per hektar. Secara drastis, pada tahun 2023, produktivitas melonjak sangat signifikan menjadi 647,46 ton per hektar, dan sedikit menurun namun tetap tinggi pada tahun 2024 sebesar 647,09 ton per hektar. Data ini memperlihatkan adanya lonjakan besar produktivitas pertanian mulai tahun 2023, yang disebabkan oleh perubahan metode produksi, penggunaan teknologi baru, atau adanya revisi cakupan pengukuran produktivitas

Tabel 2.42
Produktivitas pertanian per hektar per tahun

2020	2021	2022	2023	2024
6.64	6.72	6.32	647.46	647.09

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Tabel tersebut menunjukkan persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh kasus penyakit hewan menular berhasil ditekan. Namun, pada tahun 2021, terdapat lonjakan kasus dengan angka positif sebesar 209,65%, yang mengindikasikan adanya peningkatan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, tren kembali membaik dengan penurunan kasus sebesar 22,66%. Pada tahun 2023 tercatat kembali adanya peningkatan kasus sebesar -62,82% . Kemudian pada tahun 2024, kasus kembali turun sebesar 35,4%.

Tabel 2.43
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
-100	209.65	22.66	-62.82	35.4

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

4. **Urusan Perdagangan**

Tabel tersebut menunjukkan persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai ketentuan (meliputi IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, persentase pelaku usaha yang memperoleh izin tercatat konsisten mencapai 100% setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha di sektor ini telah mematuhi regulasi yang berlaku terkait perizinan usaha, tanpa adanya penurunan tingkat kepatuhan selama periode tersebut.

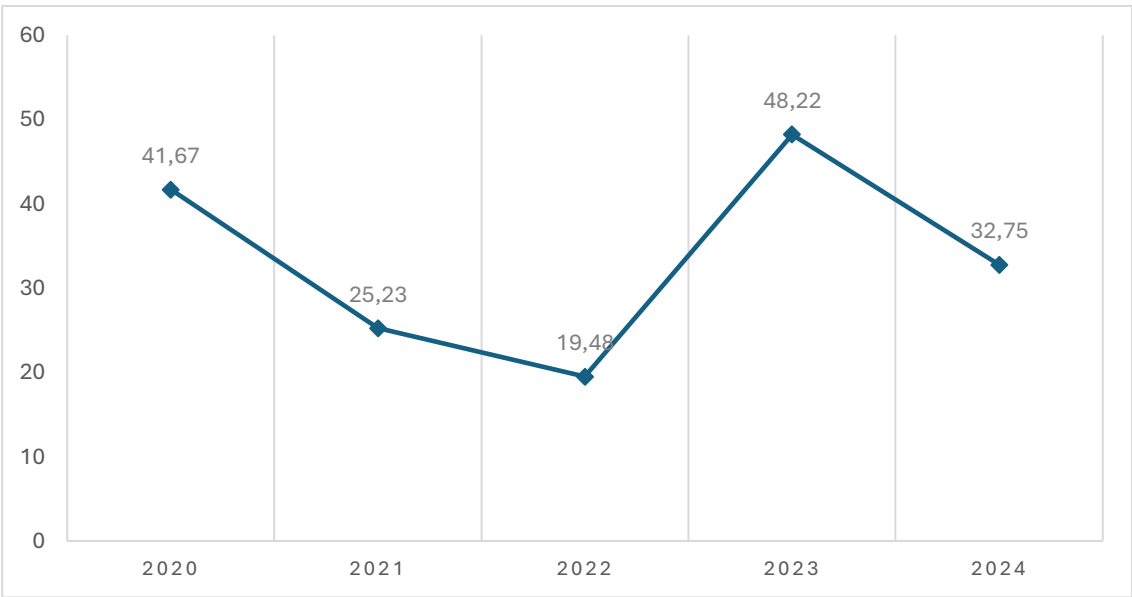
Tabel 2.44
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan
Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Grafik menunjukkan fluktuasi persentase kinerja realisasi pupuk di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi pupuk mencapai 41,67%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 25,23%, dan semakin turun lagi di tahun 2022 menjadi 19,49%, yang merupakan titik terendah selama periode tersebut. Setelah itu, pada tahun 2023, realisasi pupuk mengalami kenaikan hingga mencapai 48,22%, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, persentase realisasi kembali menurun menjadi 32,75%. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan adanya ketidakstabilan dalam realisasi pupuk setiap tahunnya, dengan tren penurunan di awal periode dan peningkatan sebelum akhirnya kembali menurun.

Grafik 2.215
Persentase kinerja realisasi pupuk



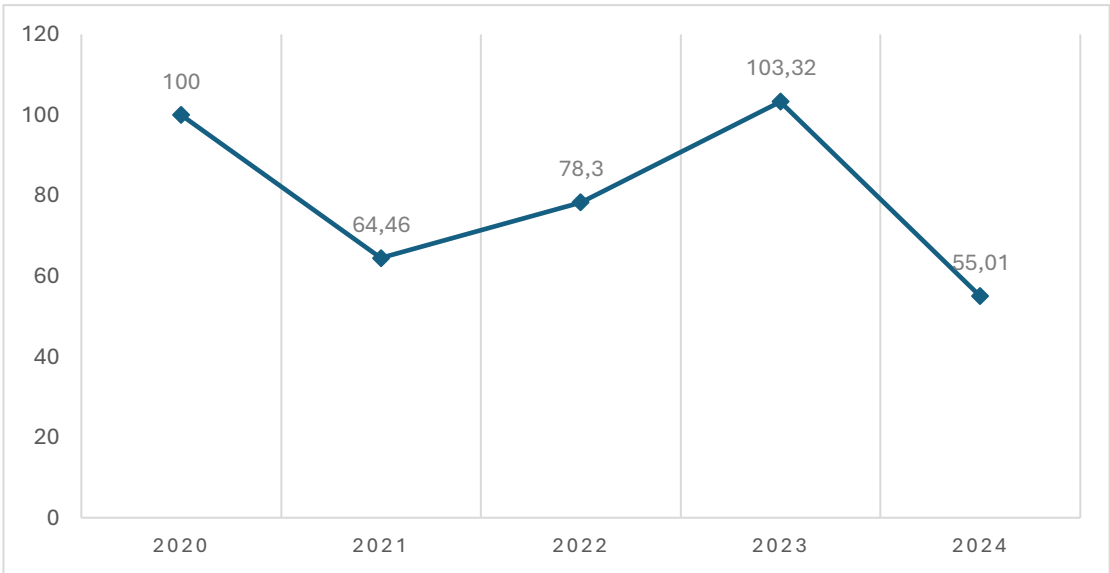
Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Grafik memperlihatkan perkembangan persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang memiliki tanda tera sah di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase UTTP bertanda sah mencapai 100%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan cukup drastis menjadi 64,46%. Pada tahun 2022, terjadi sedikit perbaikan dengan kenaikan persentase menjadi 78,3%. Hal ini kemudian meningkat



signifikan pada tahun 2023 dengan persentase tertinggi sepanjang periode yaitu sebesar 103,32%. Akan tetapi, di tahun 2024, kembali terjadi penurunan hingga mencapai 55,01%. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar dalam pelaksanaan tera sah UTTP, dengan tren kenaikan setelah penurunan awal, diikuti oleh lonjakan signifikan, namun akhirnya kembali turun di akhir periode.

Grafik 2.216
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
bertanda tera sah yang berlaku



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

5. Urusan Perindustrian

Data menunjukkan pertumbuhan jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, terjadi penurunan dengan angka pertumbuhan negatif sebesar -22,85 yang menandakan adanya pengurangan jumlah industri pada tahun tersebut. Namun, situasi berubah pada tahun 2021 dengan lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan mencapai 902,8. Pada tahun 2022, meskipun masih mengalami pertumbuhan, angkanya menurun menjadi 392,14. Tren penurunan ini berlanjut di tahun 2023, di mana pertambahan hanya sebesar 110,33. Pada tahun 2024 pertumbuhan kembali menurun menjadi 67,07. Secara umum, meskipun sempat mengalami lonjakan luar biasa pada 2021, pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah cenderung melambat dalam tiga tahun berikutnya.

Tabel 2.45
Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar
Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
-22.85	902.8	392.14	110.33	67.07

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data memperlihatkan bahwa persentase pencapaian sasaran pembangunan industri, termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK di Kota Makassar pada periode 2020 hingga 2024 selalu mencapai 100% setiap tahunnya. Artinya, selama lima tahun berturut-turut, seluruh target pembangunan industri yang telah direncanakan berhasil dicapai.



Tabel 2.46
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Data memperlihatkan bahwa persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kota Makassar pada periode 2020 hingga 2024 selalu mencapai 100% setiap tahunnya. Artinya, selama lima tahun berturut-turut, seluruh target berhasil dicapai.

Tabel 2.47
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Tabel tersebut menunjukkan persentase hasil pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait di Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, tingkat pemantauan dan pengawasan mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh izin perluasan industri yang dikeluarkan telah dipantau dan diawasi. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 data tidak tersedia (NA), sehingga tidak dapat diketahui tingkat pemantauan dan pengawasan untuk dua tahun tersebut. Hal tersebut karena Pemerintah Kota Makassar tidak memiliki laporan hasil pemantauan izin.

Tabel 2.48
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	NA	NA

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Tabel tersebut menunjukkan jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Makassar selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, 2021, dan 2022, tingkat pemantauan dan pengawasan mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan telah dipantau dan diawasi dengan baik. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 data tidak tersedia (NA). Hal tersebut karena tidak memiliki laporan pemantauan izin dikarenakan pemerintah kota tidak pernah menerbitkan izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri.

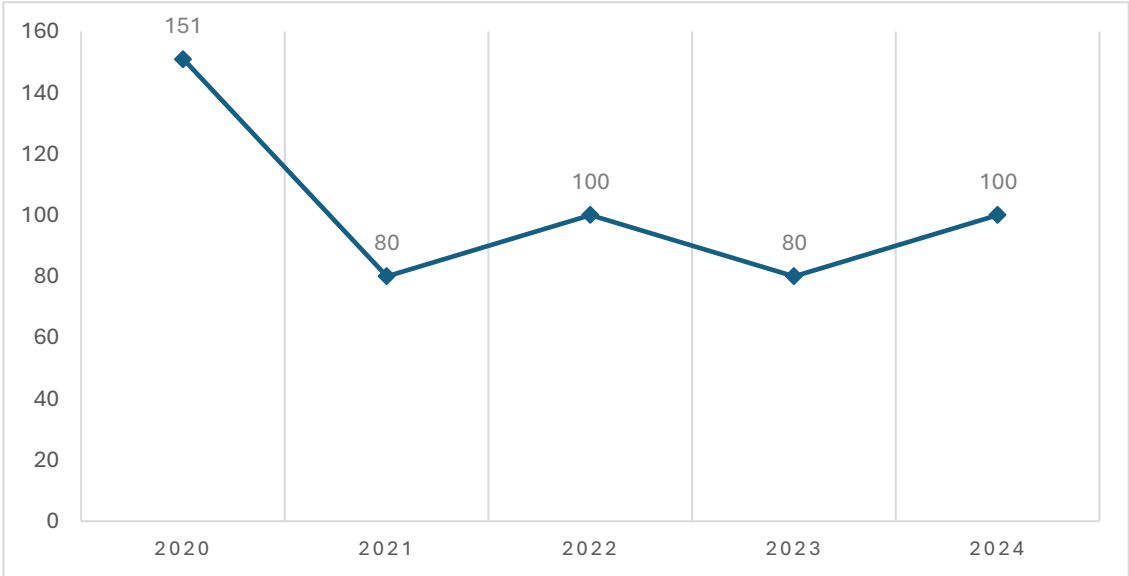
Tabel 2.49
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
100	100	100	NA	NA

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Grafik tersebut menunjukkan persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri menengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar selama periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase hasil pemantauan dan pengawasan terhadap IPUI mencapai angka tertinggi yaitu 151%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan hingga 80% yang mencerminkan berkurangnya aktivitas pengawasan atau perubahan kebijakan dalam penerbitan izin. Tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 100%, yang menandakan adanya perbaikan atau peningkatan kembali dalam pelaksanaan pengawasan. Pada tahun 2023 angka tersebut kembali turun ke 80% dan di tahun 2024, terlihat ada upaya perbaikan kembali dengan peningkatan persentase ke 100%. Fluktuasi ini menunjukkan dinamika dalam proses pemantauan dan pengawasan izin perluasan industri, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, kapasitas pengawasan, atau tingkat permintaan terhadap izin perluasan industri dari pelaku usaha.

Grafik 2.217
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah
Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

2.4.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Dan Keuangan

Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan menunjukkan tren penurunan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio ini berada pada angka 100 sebagai nilai dasar. Tidak tersedia data untuk tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023 rasio ini menurun tajam menjadi 9,93, dan terus menurun menjadi 2,85 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya efisiensi dalam pengeluaran pegawai yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan

Tabel 2.50
Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
100			9.93	2.85

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025



Rasio PAD

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio PAD hanya sebesar 0,98. Tidak tersedia data untuk tahun 2021 dan 2022. Namun, pada tahun 2023, rasio PAD melonjak drastis menjadi 38,73, kemudian sedikit menurun menjadi 38,17 pada tahun 2024. Peningkatan tajam ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam menggali potensi PAD daerah secara optimal, yang berkontribusi besar terhadap kemandirian fiskal.

Tabel 2.51
Rasio PAD Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
0.98			38.73	38.17

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam lima tahun terakhir, indeks maturitas SPIP pemerintah Kota Makassar cenderung naik. Tahun 2021, angka indeks mengalami kenaikan, meski relatif kecil menjadi 3,1. BPKP memberikan catatan terhadap pencapaian indeks tahun 2021 tersebut yaitu sistem pengendalian intern pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi; manajemen risiko pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dan pengambilan keputusan; Organisasi perangkat daerah belum memiliki kebijakan risiko kemitraan; Sebagian besar OPD belum memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi; dan belum dilakukan reuiu atas proses manajemen risiko oleh APIP.

Memasuki tahun 2022, indeks maturitas naik ke 3,281 atau meningkat 0,181 poin, disebabkan karena kenaikan nilai pada komponen pencapaian tujuan. Tahun 2021, nilai komponen pencapaian tujuan naik dari 0,660 ke 0,866 meningkat 0,206 poin, sementara untuk komponen penetapan tujuan tidak berubah dari angka 1,600 dan untuk komponen struktur dan proses mengalami penurunan dari 0,840 ke 0,826 atau turun 0,014 poin. Tahun 2023, indeks maturitas pemerintah Kota Makassar turun 0,018 poin menjadi 3,263. Penurunan tersebut disebabkan karena terjadi penurunan nilai pada komponen penetapan tujuan, yang di tahun sebelumnya 1,600 turun ke 1,400, meski disatu sisi terjadi kenaikan nilai pada dua komponen yaitu struktur dan proses dan pencapaian tujuan masing-masing menjadi 0,903 dan 0,960.

Tabel 2.52
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
3	3	3	3	3

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, tingkat kapabilitas APIP berada secara konsisten pada level 3. Ini menunjukkan bahwa kapabilitas pengawasan internal pemerintah telah mencapai tingkat yang memadai dan stabil, dengan kemampuan untuk memberikan jaminan yang objektif dan independen atas tata kelola pemerintahan. Meskipun tidak terjadi peningkatan



level selama lima tahun berturut-turut, konsistensi ini mencerminkan keberlangsungan dan pemeliharaan standar kapabilitas yang baik.

Tabel 2.53
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
3	3	3	3	3,04

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)

Rasio belanja untuk urusan pemerintahan umum yang telah dikurangi dengan transfer expenditures menunjukkan tren penurunan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio berada pada angka 74,88. Tidak tersedia data untuk tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, rasio ini menurun menjadi 69,43 dan kembali turun secara signifikan pada tahun 2024 menjadi 38,37. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya efisiensi anggaran dalam urusan pemerintahan umum atau adanya pergeseran prioritas belanja ke sektor-sektor lain yang lebih strategis.

Tabel 2.54
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
74.88			69.43	38.37

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Opini Laporan Keuangan

Dalam lima tahun terakhir, opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, opini yang diberikan adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang menunjukkan masih terdapat beberapa pengecualian dalam penyajian laporan keuangan. Namun, mulai tahun 2021 hingga 2024 opini meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara konsisten. Hal ini mencerminkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Capaian ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Opini WTP yang bertahan selama empat tahun berturut-turut juga menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Tabel 2.55
Opini Laporan Keuangan Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024*
WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

2. Pengadaan

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Selama periode 2020 hingga 2024, persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya dan ditandatangani pada kuartal pertama tercatat sebesar 0% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proyek konstruksi yang direncanakan setiap tahun berhasil



diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan, tanpa ada penundaan atau pengalihan ke tahun berikutnya. Capaian ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek konstruksi oleh pemerintah daerah

Tabel 2.56
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun
berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Persentase jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan metode kompetitif menunjukkan tren penurunan dalam periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase pengadaan melalui metode kompetitif mencapai 60,55%. Tidak tersedia data untuk tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, angkanya menurun menjadi 54,07% dan sedikit turun lagi menjadi 53,42% pada tahun 2024. Penurunan ini dapat menjadi indikasi menurunnya tingkat persaingan dalam proses pengadaan, yang bisa disebabkan oleh berkurangnya jumlah penyedia yang memenuhi syarat atau adanya preferensi terhadap metode pengadaan lainnya

Tabel 2.57
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
53	72	52	57	53

Sumber: Data Sirup LKPP, Tahun 2024

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Tabel menunjukkan perkembangan rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 68,85. Namun, tidak terdapat data yang tercantum untuk tahun 2021 dan 2022. Rasio kembali tercatat pada tahun 2023 sebesar 66,75, yang menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020. Penurunan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024, di mana rasio belanja melalui pengadaan turun drastis menjadi 24,63. Penurunan ini dapat menjadi indikator adanya perubahan kebijakan, mekanisme pengadaan, atau faktor efisiensi lain yang mempengaruhi proporsi belanja yang dilakukan melalui proses pengadaan

Tabel 2.58
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
68,85	53,19	59,97	66,71	58,01

Sumber: Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar 2025

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Tabel ini menyajikan data peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKMK) dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah daerah dari tahun 2020 hingga 2024.



Pada tahun 2020, tidak terdapat peningkatan yang tercatat, dengan nilai 0. Sementara untuk tahun 2021 dan 2022, data tidak tersedia. Tahun 2023 menunjukkan lonjakan signifikan dengan nilai 137,61, yang mengindikasikan adanya peningkatan besar dalam penggunaan produk lokal dan UMKMK dalam pengadaan pemerintah. Namun, tren ini tidak berlanjut di tahun 2024, yang justru menunjukkan angka negatif sebesar -45,97. Nilai negatif ini dapat diartikan sebagai penurunan tajam dan menunjukkan adanya fluktuasi signifikan yang patut dicermati dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan berbasis produk dalam negeri dan UMKMK.

Tabel 2.59
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
0			137.61	-45.97

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

3. Kepegawaian
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar

Pada tahun 2020, rasio tercatat sangat tinggi yakni sebesar 287,51. Namun, tidak terdapat data untuk tahun 2021 dan 2022, sehingga tidak diketahui bagaimana tren berlangsung pada dua tahun tersebut. Pada tahun 2023, rasio ini mengalami penurunan drastis menjadi 78,27, dan hanya mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 79,09. Penurunan tajam dari tahun 2020 ke 2023 mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam komposisi tingkat pendidikan pegawai, yang disebabkan oleh rekrutmen baru, mutasi, pensiun, serta perubahan klasifikasi data.

Tabel 2.60
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
287.51			78.27	79.09

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Rasio pegawai Fungsional

Rasio pegawai fungsional dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dan mencerminkan dinamika yang cukup tajam dalam pengelolaan pegawai fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Pada tahun 2020, rasio pegawai fungsional tercatat sebesar 4,41 menunjukkan jumlah yang relatif rendah. Tidak terdapat data yang tersedia untuk tahun 2021 dan 2022, sehingga perkembangan pada periode tersebut tidak dapat dianalisis. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan rasio mencapai 75,66. Pada tahun 2024, rasio ini kembali mengalami penurunan tajam menjadi 17,77, yang dapat mengindikasikan peralihan jabatan atau validasi ulang data pegawai.

Tabel 2.61
Rasio pegawai Fungsional Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
4.41			75.66	17.77

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025



Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi

Pada tahun 2020, rasio pegawai fungsional yang tersertifikasi kompetensi tercatat 0 yang mengindikasikan belum adanya pegawai fungsional dengan sertifikasi tersebut. Data untuk tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia. Tahun 2023 menunjukkan lonjakan yang signifikan dengan rasio mencapai 100, menandakan bahwa seluruh pegawai fungsional pada tahun tersebut telah memiliki sertifikasi kompetensi. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 61,98, yang disebabkan oleh penambahan pegawai fungsional baru yang belum tersertifikasi, masa berlaku sertifikat yang habis, atau perubahan kebijakan sertifikasi

Tabel 2.62
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
0			100	61.98

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

4. Manajemen dan Keuangan

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Tabel ini menyajikan data mengenai besarnya deviasi antara realisasi belanja dengan total belanja yang direncanakan dalam APBD, dari tahun 2020 hingga 2024 dan memberikan gambaran penting tentang efektivitas perencanaan anggaran dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kota Makassar. Pada tahun 2020, deviasi tercatat sebesar 19,91, menunjukkan adanya selisih antara anggaran belanja yang direncanakan dengan yang terealisasi. Data untuk tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia sehingga tren pada periode tersebut tidak dapat dianalisis. Pada tahun 2023, deviasi sedikit meningkat menjadi 20,19, dan pada tahun 2024, deviasi meningkat lebih lanjut menjadi 26,1. Peningkatan deviasi ini mengindikasikan bahwa terjadi penyesuaian anggaran dalam pelaksanaannya serta adanya hambatan pelaksanaan program.

Tabel 2.63
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
19.91			20.19	26.1

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Tingkat deviasi antara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan anggaran PAD yang telah ditetapkan dalam APBD selama periode 2020 hingga 2024 dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas perencanaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020, deviasi tercatat sebesar 5,75. Tidak tersedia data untuk tahun 2021 dan 2022, sehingga tren perkembangan pada periode tersebut tidak dapat dianalisis. Namun, pada tahun 2023, deviasi melonjak signifikan menjadi 33,56, dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 35,59.

Tabel 2.64
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
5.75			33.56	35.59

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025



Manajemen Aset

Skor atau tingkat kinerja dalam pengelolaan aset daerah dari tahun 2020 hingga 2024 dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, nilai manajemen aset berada pada angka 3 yang mencerminkan tingkat sedang dalam kualitas tata kelola aset daerah. Tidak terdapat data untuk tahun 2021 dan 2022, sehingga tren perkembangan selama periode tersebut tidak dapat diukur. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, nilai meningkat dan stabil di angka 4 yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan aset, seperti pencatatan, pemanfaatan, dan pengamanan aset milik pemerintah daerah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar telah melakukan perbaikan dalam manajemen aset yang bisa mencakup implementasi sistem informasi aset yang lebih baik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penataan aset secara administratif dan fisik.

Tabel 2.65
Manajemen Aset
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
3			4	4

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Rasio anggaran sisa (atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Silpa) terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya selama periode 2020 hingga 2024 dan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2020, rasio tercatat sebesar 14,19%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat anggaran cukup besar yang tidak terealisasi pada tahun sebelumnya. Tidak tersedia data untuk tahun 2021 dan 2022, sehingga analisis tren selama dua tahun tersebut tidak dapat dilakukan. Namun, terdapat penurunan signifikan pada tahun 2023 menjadi 5,93%, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 4,38%. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran, di mana anggaran yang tersedia dapat direalisasikan secara lebih optimal. Semakin kecil rasio ini, semakin baik pula efisiensi penggunaan anggaran, karena menunjukkan bahwa dana yang dianggarkan pada tahun sebelumnya telah dimanfaatkan dengan maksimal.

Tabel 2.66
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
14.19			5.93	4.38

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

5. Transparansi dan Partisipasi Publik

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 200 satuan sumber daya tersedia. Data untuk tahun 2021 dan 2022 tidak tersedia, sehingga tidak dapat dianalisis secara menyeluruh untuk periode tersebut. Namun, pada tahun 2023, jumlah sumber daya yang tersedia menurun drastis menjadi 90,26, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 118,84.



Tabel 2.67
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
200			90.26	118.84

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Pada tahun 2020, tingkat akses publik tercatat sebesar 100. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, tidak terdapat data yang tersedia atau tercatat. Akses kembali tercatat pada tahun 2023 dan 2024 dengan angka yang konsisten, yaitu 100 pada kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut, informasi keuangan daerah sepenuhnya dapat diakses oleh publik.

Tabel 2.68
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah
Kota Makassar Tahun 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
100			100	100

Sumber: LPPD Kota Makassar 2020-2025

2.4.5. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM dilaksanakan atas ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintahan Daerah yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut, mengamanahkan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal harus mampu dicapai oleh setiap daerah sesuai dengan batas waktu capaian yang ditentukan. Cakupan Standar Pelayanan Minimal meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

1. Bidang Urusan Pendidikan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Nomor 32 tahun 2018 kemudian peraturan ini dipandang tidak sesuai lagi kebutuhan dengan standar teknis pelayanan minimal sehingga peraturan ini ganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Tujuan SPM Pendidikan untuk memberikan panduan dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai jenjang dan jalur Pendidikan dengan prinsip sesuai kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Penerapan SPM Pendidikan Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan terdiri dari Pendidikan Anak Usia dini, Pendidikan Dasar yakni Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.



❖ Pendidikan Dasar (Usia 7-15 tahun)

Pendidikan Dasar dengan Data Indikator Utama adalah jumlah Warga Negara yang berusia (7-15 Tahun) yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI – SMP/MTs, baik sekolah Negeri maupun Swasta). Pada Tahun 2022 Jumlah Total yang harus dilayani sebesar 221.496 anak dan jumlah total yang terlayani sebesar 221.300 anak, sehingga diperoleh jumlah anak yang belum terlayani sebesar 196 anak, diperoleh persentase capaian sebesar 99,91%. Faktor penyebab layanan Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) tidak dapat mencapai 100% adalah ketidaksesuaian Data antara Data Capil dengan Data Dapodik. Pada Tahun 2022 Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan menggunakan Data Capil sebagai Data Jumlah Total yang harus dilayani (yang merupakan Target) dan Data Dapodik sebagai Data Jumlah Total yang Terlayani (yang merupakan Realisasi).

Barulah pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan perubahan bahwa untuk Data Target dan Realisasi menggunakan Data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan Data Emis Kanwil Kemenag Kota Makassar. Untuk Sub Indikator Pendidikan Dasar Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) Jenis layanan berupa Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM, yaitu (1). Buku Teks Pelajaran mencapai 100%, (2). Perlengkapan Pelajaran mencapai 100%, (3). Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S-1/DIV mencapai 100%, (4). Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi/Tenaga Lab./Admin Lainnya) yang berkualifikasi SMA/ sederajat mencapai 97%, jumlah yang dibutuhkan 2.154 orang dan jumlah tersedia 2.100 orang sehingga jumlah yang tidak tersedia 54 orang, artinya ada 54 orang berpendidikan SD atau SMP sebagai Tenaga Kependidikan, (5). Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) di Satuan Pendidikan Dasar mencapai 100%, (6). Penyediaan Biaya Personil Peserta didik mencapai 100%, (7). Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV mencapai 100%, dan (8). Satuan Pendidikan yang terakreditasi Minimal C mencapai 99,88%, Jumlah yang dibutuhkan 831 Sekolah SD/SMP dan Jumlah yang tersedia 830 Sekolah SD/SMP sehingga jumlah yang tidak tersedia 1 Sekolah SD/SMP. Faktor penyebab sehingga tidak mencapai 100%, karena ada 1 Sekolah yang Tidak Terakreditasi (TT). Akreditasi sekolah merupakan penilaian kelayakan satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Tahun 2023 dan Tahun 2024 Sesuai Tabel. 4 (Halaman IV-4) Pelayanan Pendidikan Dasar sudah sesuai Capaian SPM 100% dengan perubahan dengan tidak lagi menggunakan Data Capil hanya menggunakan Data Dapodik dan Data Emis Kanwil Kemenag Kota Makassar.

Tabel 2.69
Pelayanan Pendidikan Dasar Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	99,71%	100%	99,91	99,91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2025



❖ **Pendidikan Kesetaraan (Usia 7-18 Tahun).**

Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan Data Indikator Utama adalah Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar (Setingkat SD dan SMP atau Paket A dan B) dan atau Menengah (Setingkat SMA atau Paket C) yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan. Untuk Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 Data yang digunakan murni dari Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Pada Tahun 2022 Jumlah Total yang harus dilayani sebesar 6.000 anak dan jumlah yang terlayani sebesar 5.900 anak, sehingga diperoleh jumlah anak yang belum terlayani sebesar 100 anak, diperoleh persentase capaian sebesar 98,33%. Faktor penyebab tidak dapat mencapai 100% adalah bahwa sejumlah 6.000 Anak yang terdaftar mengikuti Pendidikan Paket A, B dan C, ada sejumlah 100 orang yang gagal mengikuti proses Pendidikan tersebut sehingga yang berhasil menyelesaikan Pendidikan dan dinyatakan lulus ujian sejumlah 5.900 anak.

Untuk Sub Indikator Pendidikan Kesetaraan Tahun 2022 terdapat 8 (delapan) Jenis layanan berupa Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM, yaitu (1). Modul Belajar mencapai 100%, (2). Jumlah Rombongan Belajar (Rombel) di Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mencapai 100%, (3). Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik. Jumlah yang dilayani Rp.4.806.000.000.- (yang merupakan Target) dan Jumlah terlayani (yang merupakan Realisasi) Rp.4.800.000.000.-, sehingga diperoleh jumlah Biaya yang belum terlayani Rp.6.000.000.-, diperoleh persentase capaian 99,88%. Faktor penyebab sehingga tidak dapat mencapai 100% adalah bahwa pembiayaan Personil Pendidikan Peserta Didik Pendidikan kesetaraan hanya sampai kepada batas pembiayaan sebesar Rp.4.800.000.000.- sehingga terjadi kekurangan biaya sebesar Rp.6.000.000.-. Biaya Personil Pendidikan Kesetaraan tersebut digunakan untuk membayar personil yang terlibat dalam kegiatan Pendidikan Kesetaraan. (4). Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV mencapai 100%, (5). Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S-1/D-IV mencapai 100%, (6). Kualitas Tenaga Kependidikan (Tenaga Administrasi/Tenaga Lab./Admin) yang berkualifikasi SMA/Sederaja) mencapai 100%, (7). Perlengkapan Pelajaran mencapai 100%, dan (8). PKBM Terakreditasi Minimal C, PKBM Terakreditasi minimal C mencapai 84,44%, Jumlah yang dilayani 45 PKBM dan Jumlah yang terlayani 38 PKBM sehingga jumlah yang tidak terlayani 7 PKBM. Faktor Penyebab ada 7 PKBM yang Tidak Terakreditasi (TT). Akreditasi PKBM adalah proses penilaian untuk menentukan kelayakan program dan satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Akreditasi ini dilakukan oleh Pemerintah atau Lembaga mandiri yang berwenang. PKBM yang terakreditasi menunjukkan bahwa program pendidikannya berkualitas, berstandar Nasional dan berkelanjutan. Standar yang dinilai dalam Akreditasi PKBM meliputi: Standar kompetensi lulusan, Standar isi, Standar proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar sarana dan prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, Standar penilaian.



Tabel 2.70
Pelayanan Pendidikan Kesetaraan Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	72,34%	100%	98,33%	98,33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2025

❖ **Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD (Usia 5-6 Tahun)**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dasar dengan Data Indikator Utama adalah jumlah Warga Negara yang berusia (5-6 Tahun) yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (baik sekolah Negeri maupun Swasta). Pada Tahun 2022 Jumlah Total yang harus dilayani (yang merupakan Target) sebesar 47.000 anak dan jumlah total yang terlayani (yang merupakan realisasi) sebesar 45.500 anak, sehingga diperoleh jumlah anak yang belum terlayani sebesar 1.500 anak, diperoleh persentase capaian sebesar 96.81%. Faktor penyebab layanan Pendidikan PAUD (5-6 Tahun) tidak dapat mencapai 100% adalah ketidaksesuaian Data antara Data Capil dengan Data Dapodik. Pada Tahun 2022 Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan menggunakan Data Capil sebagai Data Jumlah Total yang harus dilayani dan Data Dapodik sebagai Data Jumlah Total yang Terlayani.

Barulah pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan perubahan bahwa untuk Data Target dan Realisasi menggunakan Data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan Data Emis Kanwil Kemenag Kota Makassar. Untuk Sub Indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2022 terdapat 5 (lima) Jenis layanan berupa Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM, yaitu (1). Buku Gambar mencapai 99,98%,

Jumlah yang dibutuhkan 294.066 Buku Gambar dan Jumlah yang tersedia 294.000 Buku Gambar sehingga jumlah yang belum tersedia 66 Buku Gambar. Faktor Penyebab kesalahan perhitungan jumlah Buku Gambar pada saat awal perhitungan kebutuhan. (2). Alat mewarnai mencapai 99,98%, Jumlah yang dibutuhkan 49.011 alat mewarnai, jumlah yang tersedia 49.000 alat mewarnai sehingga jumlah yang belum tersedia 11 alat mewarnai. Faktor penyebab kesalahan perhitungan jumlah alat mewarnai pada saat awal perhitungan kebutuhan. (3). Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD. Jumlah yang dibutuhkan Rp.29.406.600.000.- (yang merupakan Target) dan Jumlah yang tersedia (yang merupakan Realisasi) Rp.29.400.000.000.-, sehingga diperoleh jumlah Biaya yang belum terlayani Rp.6.600.000.-, diperoleh persentase capaian 99,98%. Faktor penyebab sehingga tidak dapat mencapai 100% adalah bahwa pembiayaan Personil Pendidikan Peserta Didik PAUD hanya sampai kepada batas pembiayaan sebesar Rp.29.400.000.000.- sehingga terjadi kekurangan biaya sebesar Rp.6.600.000.-. Biaya Personil Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menggunakan Dana BOP (Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan. (4). Kualitas Tenaga Pendidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S-1/D-IV mencapai 100%, dan (5). Kualitas Pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV mencapai 100%.



Tabel 2.71
Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	44,60%	100%	96,81%	96,81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2025

Pada penerapan SPM Bidang Pendidikan dengan 3 (tiga) indikator dimana Pendidikan Dasar dengan Indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS). Pada tingkat SD ini terdapat 13 (tigabelas) sub indikator layanan dan tingkat SMP juga terdapat 13 (tigabelas) sub indikator layanan. Sedangkan Pendidikan Kesetaraan dengan indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan melaksanakan 13 (tigabelas) sub indikator layanan serta Pendidikan Anak Usia Dini dengan indikator jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD terdapat 9 (Sembilan) sub indikator layanan. Dari semua sub indikator dalam layanan SPM Pendidikan capaiannya bersumber dari aplikasi Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Bidang Urusan Kesehatan

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah terdiri atas 12 (duabelas) jenis layanan (indikator) yang terdiri dari : a).Pelayanan kesehatan ibu hamil; b).Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d) Pelayanan kesehatan balita; e).Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f).Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, I) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k). Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

❖ Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan indikator Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 94,95% atau capaian 94,95%. Jumlah yang terlayani hanya 28.285 dari target 29.789 atau terdapat 1.505 yang belum terlayani, karena belum semua ibu hamil mencapai umur kehamilan mendapat pelayanan sesuai standar (umur kehamilan belum mencapai waktu maksimal layanan tersebut) dan beberapa ibu hamil mengalami komplikasi (abortus). sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaiannya 100% dari target.



Tabel 2.72
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	92,30%	100%	94,95%	94,95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan indikator Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 93,69% atau capaian 93,69% Terdapat 1.795 ibu bersalin yang belum terlayani dari target 28.434 calon ibu bersalin atau terlayani sebanyak 26.639 ibu bersalin. Hal ini karena penetapan target jumlah ibu bersalin terlalu tinggi. Sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaiannya 100% dari target.

Tabel 2.73
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	97,50%	100%	93.69%	93.69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan indikator Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 96,33% atau capaian 96,33%. Realisasi yang tidak mencapai target dari jumlah yang harus dilayani 26.636 bayi hanya terlayani 25.659 atau terdapat 977 bayi yang belum terlayani karena ada beberapa bayi baru lahir yang mengalami komplikasi, adanya mobilitas penduduk, dan usia bayi yang belum memungkinkan mendapat layanan Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaiannya 100% dari target.

Tabel 2.74
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	77,76%	100%	96.33%	96.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita dengan indikator Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 92,38% atau capaian 92,38%. Realisai jumlah yang terlayani 117.203 dari target 127.232 balita atau terdapat 10.029 (7,88%) Balita yang



belum terlayani, hal ini disebabkan penetapan target terlalu tinggi tanpa menggunakan data riil, tidak semua masyarakat datang ke fasilitas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan balita. Sedangkan pada tahun 2023 dan tahun 2024 capaiannya 100% dari target.

Tabel 2.75
Pelayanan Kesehatan Balita Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	25,17%	100%	92.12%	92.12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ **Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan indikator Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 92,38%, atau capaian 92,38%, terdapat 7,62% yang belum terlayani atau 11.545 warga negara usia Pendidikan Dasar dari target 151.423 atau yang terlani sebanyak 139.878. hal ini disebabkan pada saat skrining dilakukan terdapat beberapa siswa yang tidak hadir dan tidak semua guru dan dokter terlatih untuk melakukan skrining. Pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 101,43% dengan capaian 101,43% dari target 100%.

Tabel 2.76
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	35,99 %	100 %	92.38 %	92.38 %	100 %	100 %	100 %	100 %	101,43 %	101,43 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ **Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**

Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan indikator Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 80,56% atau capaian 80,56%, dari target 963.594 terdapat 9,44% atau sebanyak 187.338 warga negara usia produktif yang belum terlayani karena skrining hanya dilakukan oleh petugas puskesmas, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 85,40% dengan capaian 85,40% dari target 100%. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,84% dari tahun 2022 tetapi Tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 14,6% dari tahun 2023, hal ini karena rentang usia sasaran yang besar (15-59) dan terdapat beberapa sasaran yang sulit di jangkau terutama yang bermukim di permukiman elit dan yang masih aktif bekerja.



Tabel 2.77
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	61,48%	100 %	80.56 %	80.56 %	100 %	100%	100%	100 %	85,40 %	85,40 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ **Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan indikator Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 94,30% atau capaian 94,30% artinya masih terdapat 5,70% usia lanjut yang belum mendapat pelayanan Kesehatan atau belum terlayani 119.826 dari target 127.075 usia lanjut. Pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 94,59% dengan capaian 94,59% dari target 100% atau terdapat 5,41% yang tidak tercapai. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 4,56% dari 2023. Hal ini disebabkan kompleksnya masalah penjangkauan sasaran daerah perkotaan dan masih adanya wilayah kepulauan yang masih sulit di jangkau.

Tabel 2.78
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	85,28%	100%	94.30%	94.30%	100%	100%	100%	100%	94,59%	94,59%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2024

❖ **Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan indikator Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 97,68% % atau capaian 97,68%, atau terdapat 2,32% warga negara penderita hipertensi yang tidak terlayani karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini hipertensi, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 88,58% dengan capaian 88,58% % dari target 100%. Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 1,42% dari 2023. Hal ini disebabkan kompleksnya masalah penjangkauan sasaran daerah perkotaan dan masih adanya wilayah kepulauan yang masih sulit dijangkau.



Tabel 2.79
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	61,39%	100%	97.68%	97.68%	100%	100%	100%	100%	88,58%	88,58%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan indikator Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 101,94% dengan realisasi 101,94% atau capaian lebih dari 100%, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% tahun 2024 realisasi melebihi target sebesar 118,72% dengan capaian 118,72% dari target 100%.

Tabel 2.80
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	70,07 %	100 %	101.94 %	101.94 %	100 %	100 %	100 %	100 %	118,72 %	118,72 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan indikator Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 79.79% atau capaian 79.79%, Terdapat 20,21% orang dengan gangguan jiwa berat belum terlayani. Hal ini disebabkan karena sasaran orang dengan gangguan jiwa berat sulit diarahkan untuk mendapat pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan, dan kurangnya dukungan keluarga untuk mendapatkan pengobatan rutin, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 122,07 dengan capaian 122,07% dari target 100%.



Tabel 2.81
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	20,52%	100%	79.79%	79.79%	100%	100%	100%	100%	122,07%	122,07%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ **Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan indikator Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 118,53% dengan capaian 118,53% dari target 100%.

Tabel 2.82
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100 %	100.45 %	100.45 %	100 %	100 %	100 %	100 %	118,53 %	118,53 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

❖ **Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan daya Tahan Tubuh Manusia**

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) dengan indikator Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan Kesehatan. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 100,84% atau capaian 100,84%, sedangkan pada tahun 2023 dan Tahun 2024 target dan capaiannya 100%.



Tabel 2.83
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian
Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	75%	100%	100.84%	100.84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2025

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
❖ Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Tabel 2.84
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	72,82%	72,82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025.

Pada tahun 2020 kondisi awal capaian indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kota Makassar telah mencapai 100%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan di mana capaian realisasi hanya sebesar 72,82%, meskipun target tetap ditetapkan 100%. Hal ini menunjukkan adanya kendala dalam pemenuhan kebutuhan air minum pokok bagi masyarakat sehingga capaian target belum terpenuhi.

Memasuki tahun 2023, terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Target yang ditetapkan 100% dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian indikator kembali sesuai harapan. Tren positif ini berhasil dipertahankan pada tahun 2024, dengan capaian realisasi tetap berada di angka 100% sesuai target.

Secara keseluruhan, capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dalam periode 2022–2024 menunjukkan adanya dinamika. Tahun 2022 menjadi catatan penting karena penurunan capaian, namun melalui upaya perbaikan, pada tahun 2023 dan 2024 capaian kembali meningkat dan stabil pada target 100%. Hal ini menandakan keberhasilan Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, dalam melakukan intervensi dan peningkatan pelayanan dasar penyediaan air minum bagi masyarakat

❖ Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Pada tahun 2020, kondisi awal capaian pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Makassar tercatat sebesar 100%. Namun, pada tahun 2022 capaian realisasi mengalami penurunan cukup signifikan, yakni hanya



sebesar 87,56% dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian warga belum sepenuhnya memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Memasuki tahun 2023, capaian kembali menunjukkan peningkatan positif. Target yang ditetapkan 100% berhasil tercapai dengan realisasi yang juga mencapai 100%, sehingga pelayanan kembali optimal sebagaimana kondisi awal. Akan tetapi, pada tahun 2024 capaian mengalami penurunan yang cukup tajam, dengan realisasi hanya sebesar 73,75% dari target 100%. Penurunan ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, baik dari aspek infrastruktur, pengelolaan, maupun keterjangkauan layanan bagi seluruh masyarakat.

Tabel 2.85
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	87,56%	87,56%	100%	100%	100%	100%	100%	73,75%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025.

Secara keseluruhan, capaian penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik periode 2022–2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Setelah mengalami penurunan di tahun 2022, capaian sempat kembali optimal pada tahun 2023, namun kembali menurun di tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Makassar agar dapat melakukan langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan layanan pengolahan air limbah domestik secara merata dan berkesinambungan.

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
❖ **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**

Tabel 2.86
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Tahun 2025.

Berdasarkan data capaian tahun 2022 hingga 2024, pelaksanaan pelayanan dasar ini berjalan secara konsisten dan optimal. Pada tahun 2022, target realisasi sebesar 100% telah tercapai sepenuhnya, dengan realisasi dan capaian masing-masing juga sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh warga korban bencana yang terdata pada tahun tersebut berhasil memperoleh hunian yang layak sesuai standar yang ditetapkan.



Capaian maksimal ini berhasil dipertahankan pada tahun 2023 dan 2024. Pada kedua tahun tersebut, baik target, realisasi, maupun capaian masing-masing tetap berada di angka 100%, yang menandakan stabilitas dan keberhasilan pelaksanaan program selama tiga tahun berturut-turut.

Keberhasilan ini mencerminkan sinergi yang baik antara perencanaan, pendataan korban bencana, kesiapan anggaran, serta pelaksanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi rumah. Selain itu, hal ini juga menjadi indikator bahwa Pemerintah Kota Makassar telah mampu menjalankan fungsi pelayanan dasar secara efektif dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Dengan capaian ini, Kota Makassar diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam penyelenggaraan SPM sektor perumahan, khususnya dalam penanganan warga terdampak bencana.

❖ **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota**

Pada tahun 2022, meskipun target capaian ditetapkan sebesar 100%, realisasi baru mencapai 20,89%. Namun demikian, capaian tetap dinilai 100%, karena indikator SPM mengukur apakah seluruh warga terdampak yang telah terdata difasilitasi secara layak sesuai kriteria, meskipun pelaksanaannya bertahap atau berlanjut ke tahun berikutnya. Selanjutnya, kinerja pelayanan dasar ini menunjukkan perbaikan signifikan. Pada tahun 2023, baik target, realisasi, maupun capaian masing-masing tercatat 100%, yang menandakan seluruh masyarakat yang terkena relokasi telah difasilitasi dengan rumah layak huni sesuai standar.

Tabel 2.87
Fasilitasi Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah	100%	100%	20,89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Tahun 2025.

Keberhasilan ini kembali dipertahankan pada tahun 2024, dengan capaian penuh di seluruh indikator. Hal ini mencerminkan sistem pelaksanaan yang semakin efektif, mulai dari pendataan masyarakat terdampak, perencanaan teknis, penyediaan lahan, hingga pembangunan dan penyerahan rumah secara layak. Secara keseluruhan, dalam periode 2022 hingga 2024, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menunjukkan performa yang sangat baik dalam memastikan hak dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak tetap terpenuhi, khususnya bagi mereka yang harus direlokasi akibat pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah daerah



5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

❖ Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada

Tabel 2.88
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	80%	100%	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, 2025

❖ Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target 100%, tahun 2022 realisasi capaian layanan informasi rawan bencana 80.27 % atau capaian 80,27% artinya terdapat 9,73 yang belum terlayani karena belum optimalnya upaya pengurangan resiko bencana termasuk pada wilayah pesisir dan pulau-pulau, sedangkan pada tahun 2023 realisasi capaian layanan informasi rawan bencana 100% dari target layanan informasi rawan bencana 100%. Pada tahun 2024 juga terealisasi 100%, dari 4 (empat) sub indikator layanan dengan capaian 100%.

Tabel 2.89
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	80%	100%	80,27%	80,27%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kota Makassar, 2025

❖ Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, tahun 2022 realisasi capaian layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 95.10% dari target layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%. Pada tahun tersebut terdapat 4,90% yang belum mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Hal ini kurangnya sarana prasarana bencana pada wilayah padat penduduk, sedangkan tahun 2023 realisasi capaian layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% dari target layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%. Pada tahun 2024 capaian layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% dari target 4 (empat) sub indikator layanan dengan capaian 100%.



Tabel 2.90
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99,04%	100%	95,10%	95,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kota Makassar, 2025

❖ **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pada tahun 2022 realisasi capaian layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 99.73 % atau capaian 99,73% dari target 100%. Masih terdapat 0,37% yang belum terlayani karena kurangnya koordinasi kebencanaan pada tingkat kelurahan sampai RT/RW, sedangkan pada tahun 2023 realisasi capaian layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% dari target layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%.

Tabel 2.91
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,85%	100%	99,73%	99,73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPBD Kota Makassar, 2025

❖ **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Pada tahun 2022, pelayanan berjalan sangat baik. Target pelayanan sebesar 100% berhasil direalisasikan secara penuh, dengan capaian juga mencapai 100%, menunjukkan bahwa seluruh masyarakat terdampak telah menerima layanan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Kinerja yang optimal ini berlanjut pada tahun 2023, di mana target, realisasi, dan capaian kembali mencapai 100%, menandakan kesinambungan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar oleh perangkat daerah terkait.

Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan cukup signifikan. Meskipun target tetap dipertahankan pada angka 100%, realisasi turun menjadi hanya 14,93%, dan capaian tercatat sebesar 94,93%. Penurunan ini mengindikasikan adanya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pelayanan, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, penurunan intensitas penegakan, atau kendala administratif dan teknis di lapangan.



Tabel 2.92
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di kabupaten /kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	14,93%	94,93%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, 2025

Secara umum, meskipun terjadi penurunan realisasi pada tahun terakhir, capaian SPM masih menunjukkan bahwa sebagian besar warga terdampak tetap berhasil dilayani. Namun, kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan konsistensi dan keberlanjutan pelayanan di masa mendatang

6. Bidang Urusan Sosial
❖ Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti

Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100%. Tahun 2024 realisasi yaitu 100% dengan 614 orang penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan capaian 100% dari target 100%.

Tabel 2.93
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di Luar Panti
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisas	Capaian	Target	Realisas	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2025

❖ Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 100% dengan 140 orang anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan capaian 100% dari target 100%.



Tabel 2.94
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di Luar Panti
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2025

❖ **Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Panti**

Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 100% dengan 42 orang lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan capaian 100% dari target 100%.

Tabel 2.95
Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia di Luar Panti
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2024

❖ **Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar realisasi tahun 2024 yaitu 100% dengan 80 orang gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan capaian 100% dari target 100%.



Tabel 2.96
Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial di Luar Panti
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisas	Capaiar	Target	Realisas	Capaiar	Target	Realisas	Capaiar
Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2025

❖ **Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota dengan indikator Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Tahun 2022 pada indikator ini target 100% dengan realisasi 100% atau capaian 100%, sedangkan pada tahun 2023 target dan capaiannya 100% dan tahun 2024 realisasi sebesar 100% dengan jumlah korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 4.907 orang, dengan capaian 100% dari target 100%. Capaian tersebut tetap dari tahun 2022 ke tahun 2023 dan tahun 2020.

Tabel 2.97
Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kota Makassar Tahun 2022-2024

Indikator Pencapaian	2020 Kondisi Awal	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2025

2.4.6. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;



3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Makassar, dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Tabel 2.98
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Makassar Tahun 2022-2024

Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
TUJUAN 1: MENGAKHIRI SEGALA BENTUK KEMISKINAN											
Target 1.2: mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional											
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	%	4,37	4,34	4,58	4,30	5,07	4,27	4,97	Secara umum mengalami kenaikan
		Dinas Kesehatan	%	4,37	4,34	4,58	4,30	5,07	4,27	4,97	Secara umum mengalami kenaikan
1.3: Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan											
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	%	89,77	99,91	95,22	100	99,71	100	99,1	
1.3.1(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Dinas Sosial	KK	21251	24751	23966 KK	23966	21188 KK	24000	31596	
1.4: Pada Tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi bau, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.											
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	95,52	96,52	93,69	97,53	100	98,53	100	Secara umum mengalami kenaikan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15- 49 tahun yang berstatus kawin.	DP2KB	%	68,25	68,3	53,43	68,35	68,46	68,4	70,2	Secara umum mengalami kenaikan
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Dinas PU	%	100	100	50,64	100	83,49	100	82,96	
1.4.1.(e)	persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Dinas PU	%	52,39	53,47	88,32	54,55	94,24	55,62	89,63	Secara umum mengalami kenaikan
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	97,61	98,28	92,41	98,25	98,06	99,63	85,36	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	82,19	84,46	72,06	86,74	79,51	89,01	73,99	
1.4.1.(j)	persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Disdukcapil	%	98	98	98,5	98	98,55	99	98,68	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana											
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Damkar	Kejadian	150	150	150	150	150	150	150	
		BPBD	%	100	100	99,19	100	90,66	100	96,94	
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Dinas Sosial	%	100	100	100%	100	100%	100	100	
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial	Jiwa	0	100	300	100	200	100	137	
1.a: Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.											
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Dinas Ketahanan Pangan	Klp	43	500	491	500	619	500	283	
TUJUAN 2: MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN											
2.1: Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1. (a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	6,06	5,79	4,34	5,52	1,83	5,25	100	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	%	3,92	N/A	5,23 %	N/A	0	N/A	0,65	
2.2: Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang telah disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus dibawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita	Dinas Ketahanan Pangan	Klp	43	43	494 lorong	500	619 lorong	300	283	
		DP2KB	%	69,89	70,19	33,33	70,49	3,14	70,79	6,12	
2.2.2	Prevalensi malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	Dinas Kesehatan	%	6,06	5,79	3,64	5,52	0,29	5,25	12,07	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	%	40	45	65,8	50	70,02	55	78,81	
2.2.2. (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai ; dan tingkat konsumsi ikan	Dinas Ketahanan Pangan	Skor	84	80	83,9	82	85,20	85	89,73	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun								KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024			
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2.c: Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.												
2.c.1	Indikator anomali harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Energi	Energi:2.400 Protein:63	nergi:2.600 Protein:126	Energi:2.716 Protein:71,3 1	Energi:2.60 0 Protein:126	Energi:2782 Protein: 80,69	Energi:2.70 0 Protein:127	Energi:2812 Protein: 88,21		
2.3: Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang amandan sama terhadap lahan, sumberdaya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.												
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian di bagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah pertenaga kerja).	Dinas Perikanan dan Pertanian	Ton	6,7 Ton Per Hektar Per tahun	6,8 Ton Per Hektar Per tahun	6,33 Ton Per hektar Per tahun	6,9 Ton Per Hektar Per tahun	6,47 Ton Per hektar Per tahun	7,0 Ton Per Hektar Per tahun	6,5 Ton Per hektar Per tahun		
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	Dinas Perikanan dan Pertanian	Ton	6,7 Ton Per Hektar Per tahun	6,8 Ton Per Hektar Per tahun	6,33 Ton Per hektar Per tahun	6,9 Ton Per Hektar Per tahun	6,47 Ton Per hektar Per tahun	7,0 Ton Per Hektar Per tahun	6,5 Ton Per hektar Per tahun		
TUJUAN 3: MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA												
3.1: Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup												
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	%		42,17	92,31	35,4	76,67	28,63	76,43		
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	100	100	77,88	100	100	100	100		
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	100	100	77,88	100	100	100	100		
3.2: Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000												
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan		2,55	1,29	3,81	1,25	7,59	0,91	0,08		
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan		2,55	1,29	3,56	1,25	3,43	0,91	5,18		
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan		2,55	1,29	0,37	1,25	7,3	0,91	0,80		

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.3: Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya											
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan		0,04	0,041	0,05	0,038	0,069	0,035	0,06	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan		0,2	0,2	0,31	0,2	0,45	0,188	0,06	
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan		0,01	0,01	0,01	0,01	N/A	0,01	0,05	Untuk Realisasi Tahun 2023 data belum tersedia
3.4: Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan											
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	Dinas Kesehatan		1,8	1,7	3,44	1,5	N/A	1,4	N/A	Untuk Realisasi Tahun 2023, 2024 data belum tersedia
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan		2,4	2,4	20,07	2,4	15,36	2,4	18,6	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	Dinas Kesehatan	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin								
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan		1	1	1	1	1	1	1	
3.5 : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan											
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Dinas Kesehatan	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin								
3.5.2	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Dinas Kesehatan	data tidak tersedia dalam format pelaporan rutin								

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
3.7: Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DP2KB		68,25	68,3	53,43	68,35	27,75	68,4	31,23	
3.8: mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan askes terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang											
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dinas Kesehatan		82,49	89,63	97,79	96,76	100.11	100	99,1	
3.a : Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat											
3.a.1	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	Dinas Kesehatan		20,52	20,29	23,76	20,06	16,67	19,82	0,36	
3.b : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua											
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan		100	100	100	100	100	100	100	
3.c: Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil											
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan		1,31	1,51	5,42	1,51	5,55	1,51	0,07	
TUJUAN 4: MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA											
4.1: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan		54,00	79,25	78,9	80,50	79,93	82,35	86,47	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan		40,30	63,20	62,61	68,00	65,33	75,20	72,5	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Dinas Pendidikan		100	100	102,3	100	105,51	100	93,09	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Dinas Pendidikan		100	100	89,56	100	90,85	100	86,32	
4.1.1.(f)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan		11,25	11,5	11,55	11,8	11,56	12	11,57	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.2: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar											
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan		30	33,25	35,58	40,59	39,49	50,91	34,29	
4.4: Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.											
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dispora		150	150	150	150	520	150	520	
4.5: Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan											
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan		100	100	SD/MI = 99,16 SMP/MTs = 102,43	100	SD/MI = 99,57 SMP/MTs = 105,30	100	SD/MI = 100,49 SMP/MTs = 105,50	
4.6: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi											
4.6.1	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin	Dinas Perpustakaa n	%	45,31	50	64,56%	55	74,14%	60,00%	78,99%	
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan		100	100	100	100	99,17	100	98,84	
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	Dinas Pendidikan		100	100	100	100	15-24=100	100	15-24=100	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4.a: Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Dinas Pendidikan		(a) listrik=92% (b) internet untuk tujuan pengajaran=90%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran=15%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=2,5, (e) air minum layak=80%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=50%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=5%	(a) listrik=95% (b) internet untuk tujuan pengajaran=90,01%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran=20%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=2,5, (e) air minum layak=81,5%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=55%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=10%	(a) listrik=96% (b) internet untuk tujuan pengajaran=95%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran=50%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=0, (e) air minum layak=96,7%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=78%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=20%	(a) listrik=95,5% (b) internet untuk tujuan pengajaran=91%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran=25%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=3, (e) air minum layak=82%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=60%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=15%	(a) listrik=96,8% (b) internet untuk tujuan pengajaran=96,8%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran=78,99%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8,6%, (e) air minum layak=100%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=90,4%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=90,4%	(a) listrik=96,5% (b) internet untuk tujuan pengajaran=91,5%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran=30%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=3,5, (e) air minum layak=82,5%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=65%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=20%	(a) listrik=100% (b) internet untuk tujuan pengajaran=98,14%, (c) komputer untuk tujuan pengajaran=73,93%, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas=8,6%, (e) air minum layak=100%, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin=93,27%, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)=100%	
4.c : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil											
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan		PAUD= 36% SD= 42% SMP= 45%	PAUD= 36.49% SD= 42.18% SMP= 45.43%	PAUD= 34,88% SD= 38,87% SMP= 47,34%	PAUD= 37,49% SD= 43,83% SMP= 46,23%	PAUD= 46,65% SD= 36,23% SMP= 42%	PAUD= 38.49% SD= 45.83% SMP= 47.03%	PAUD= 34,46% SD= 35,23% SMP= 41,33%	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
TUJUAN 5: MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN											
5.1: mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimanapun											
5.1.1	Jumlah Kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	DP3A	%	60	70	51	80	80	85	100	
5.2: Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya											
5.2.1.a	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3A	%	100	100	82,84	100	98	100	100	
5.2.2	Proporsi Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DP3A	%	100	100	98%	100	98	100	100	
5.2.2.a	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3A	%	100	100	98%	100	100	100	100	
5.5: Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3A	%	24	24	26	31	26	31	13	
5.6: Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.											
5.6.1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DP2KB		68,25	68,3	56.71	68,35	68.46	68,4	5,25	
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERAT PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA											
6.1: Pada Tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas PU	%	100	100	50,64	100	83,49	100	82,96	
		Dinas Kesehatan	%	100	100	95,76	100	77,07	100	83,49	
6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Dinas PU	%	100	100	50,64	100	83,49	100	83,49	
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PU	%	100	100	50,64	100	83,49	100	83,49	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
6.2: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1.(a)	Proporsi Populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Dinas Kesehatan	%	100	100	87,22	100	92,87	100	81,62	
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas PU	%	52,39	53,47	88,32	54,55	94,24	55,62	89,63	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	%	100	100	81,05	100	97,27	100	92,24	
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas PU	%	52,39	53,47	88,32	54,55	94,24	55,62	89,63	
6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Dinas PU	%	52,39	53,47	88,32	54,55	94,24	55,62	89,63	
6.3: Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.											
6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PU	%	52,39	53,47	-	54,55	-	55,62	-	
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Dinas PU	%	52,39	53,47	65	54,55	66,25	55,62	60,70	
6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLH		-	58,11	56,67	58,61	51,74	59,11	58,7	
TUJUAN 8: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA											
8.1: Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	PTSP	%	100	100%	115,24%	100%	330,24%	100%	68,81%	
8.3: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan											
8.3.1	Persentase tenaga kerja formal	Disnaker	%	68,54	69	60,61%	69,5	67,18%	70,00%	59,70%	
8.3.1 (c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan Keuangan	Dinas Koperasi &UKM	%	(-)	18.78	40,16	25.13	42	26,83	21	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
8.5: Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Disnaker	%	13,18	10,31	11,82%	9,81	10,60%	8,81	9,71	
8.9 : Pada Tahun 2030, meyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal											
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata	%	1,06	1,21	2,02	1,26	2,14	1,31	2,16	
8.9.1.(a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	29.945	30.844	71.388	31.923	85.614	33.200	160.295	
8.9.1.(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	1.578.980	1.657.929	3.465.141	1.765.694	4.414.466	1.906.950	5.684.295	
		Dinas Kebudayaan	%	100	100	516,5	100	1800	100	11000	
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Pariwisata	Orang	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165	
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI											
9.1 : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dishub		7	7	2	10	2	10	2	
9.5 : Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.											
9.5.1	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Balitbangda	%	70%	80%	100%	85%	100%	90%	100%	
9.5.2.	Jumlah peneliti (ekuivalen penuh waktu) per satu juta penduduk.	Balitbangda	%	-	-	100%	90%	100%	90%	100%	
9.b : Mendukung pengembangan teknologi domestic, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industry dan peningkatan nilai tambah komoditas											
9.b.1.	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	Balitbangda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
TUJUAN 11: MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN											
11.1: Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.											
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan	%	100%	100%	50%	100%	95%	100%	95%	
		Kec. Panakukkang	%	100%	100%	37,33%	100%	39,01%	70%	74,97%	
		Kec. Manggala	%	60%	63%	63%	65%	64%	68%	70%	
		Kec. Tallo	%	64%	65%	65%	68%	68%	70%	70%	
		Kec. Biringkanaya	%	64%	65%	60%	68%	65%	70%	70%	
		Kec. Tamalanrea	%	64%	65%	62%	68%	65%	70%	65%	
		Kec. Ujung Tanah	%	100%	100%	71%	100%	78%	100%	60%	
		Kec. Wajo	%	64%	65%		68%		70%	17,8%	
		Kec. Mariso	%	64%	65%	80%	68%	80%	70%	80%	
		Kec. Mamajang	%	64%	65%		68%		70%		
		Kec. Ujung Pandang	%	64%	65%	65%	68%	68%	70%	70%	
		Kec. Makassar	%	64%	65%	53%	68%	25%	70%	26%	
		Kec. Bontoala	%	64%	65%	65%	68%	68%	70%	74,97%	
		Kec. Rappocini	%	64%	65%	63%	68%	65%	70%	65%	
		Kec. Tamalate	%	64%	65%		68%		70%		
		Kec. Sangkarrang	%	64%	65%	65%	68%	68%	70%	70%	
11.1.1.(b)	jumlah Kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)	Dinas Pertanahan		75	75	114	75	85	75%	N/A	Tidak ada data terkait Target TPB ditahun 2024

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
11.2: Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.											
11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dishub	%	5%	5%	4,28%	5%	4,30%	5%	4,70%	
11.4: Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia											
11.4.1 (a)	Jumlah Kota Pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	dinas kebudayaan		100	100	100	100	100	100	55	
11.5: Pada Tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak , dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB Global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	%	100	100	99,19	100	90,66	100	96,94	
11.6: Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1.(a)	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	Kec. Panakukkang	%	75%	80%	80%	83%	83%	85%	85%	
		Kec. Manggala	%	90%	90%	90%	92%	79%	94%	84%	
		Kec. Tallo	%	75%	80%	80%	83%	83%	85%	85%	
		Kec. Biringkanaya	%	75%	80%	98%	83%	83%	85%	85%	
		Kec. Tamalanrea	%	75%	80%	75%	83%	80%	85%	82%	
		Kec. Ujung Tanah	%	100%	100	95%	100%	96%	100%	98%	
		Kec. Wajo	%	75%	80%		83%		85%	96,67%	
		Kec. Mariso	%	75%	80%	95%	83%	95%	85%	90%	
		Kec. Mamajang	%	75%	80%		83%		85%		
		Kec. Ujung Pandang	%	75%	80%	97%	83%	99,47 %	85%	85%	
		Kec. Makassar	%	75%	80%	90%	83%	77%	85%	79%	
		Kec. Bontoala	%	75%	80%	80%	83%	83%	85%	85%	
		Kec. Rappocini	%	95%	95%	96%	95%	92%	95%	94,80%	
		Kec. Sangkarrang	%	75%	80%	80%	83%	83%	85%	85%	
		Kec. Tamalate	%	95%	96%	100%	97%	95%	98%	95%	
		DLH	%	74 %	73 %	75,17%	72 %	87,44%	71%	76,7%	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
11.7: Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.											
11.7.1 (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DLH	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.7.1 (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas Tata ruang	%	9,007 %	13,85 %	10,99 %	14,542 %	13,85%	15,234%	13,92%	
TUJUAN 12: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN											
12.4: Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.											
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	DLH		Limbah B3 = 4.636,19 Ton B3 = 1.542.393,00 Ton	Limbah B3 = 5.608,00 Ton B3 = 1.573.240,00 Ton	4.843,46 Ton	Limbah B3 = 6.729,60 Ton B3 = 1.604.705,67 Ton	7.333,78 Ton (Total B3 (2023) = 16.066.503,74 Ton/ Tahun)	Limbah B3 = 8.075,52 Ton B3 = 1.636.799,78 Ton	6.476,34 Ton	
12.5: Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.											
12.5.1 (a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	DLH		65.549	65.549	22.395,77 ton	65.549	14.629,22 Ton	65.549	7601,7	
12.b: Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal											
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah disepakati	Dinas Pariwisata		1	1	1	1	1	1	1	
TUJUAN 13: MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN											
13.2: Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.											
13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH		1	1	1	1	1	1	1	
TUJUAN 15: MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI											
15.9: Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.											
15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DLH		-	2	2	2	2	2	2	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
TUJUAN 16: MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN											
16.2: Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
16.2.3.a	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3A	%	100%	100%	98%	100%	98%	100%	100%	
16.2.1.b	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3A	%	100%	100%	98%	100%	98%	100%	100%	
16.3: Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua											
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	HUKUM & HAM	Perkara	12 Perkara	12 Perkara	0	12 Perkara	5 perkara	12 Perkara	6 Perkara	
16.5: Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Inspektorat	Laporan	21 Laporan	21 Laporan	18	21 Laporan	8	21 Laporan	23	
16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1.(A)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
16.6.1.(D)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BKPSDMD	%	50	55	67,4	60	77,3	62	76,8	
16.7: Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.											
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	Kesbangpol	%	-	-	-	-	-			
16.9: Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	Dukcapil	%	98	98	98,5	98	98,55	99	98,68	
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Dukcapil	%	98	98	98,5	98	98,55	99	98,68	
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dukcapil	%	98	98	98,5	98	98,55	99	98,68	

..



Kode Indikator	Nama Indikator SDGS	Sumber Data	Satuan	Tahun							KET
				(Baseline) Tahun 2021	2022		2023		2024		
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
16.10: Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
16.10.2. (a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	DISKOMINF O		800	800	800	800	300	800	24	
16.b: Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Satpol PP	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
TUJUAN 17: MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN											
17.1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BAPENDA	Rp.	Rp 3.577.236.761.303,82	Rp 3.986.429.637.856,00	Rp 3.587.333.930.242,50	Rp 4.517.197.053.787,00	Rp4.049.344.772.471,05	Rp 4.997.480.596.068,00	Rp 4.205.629.621.340,50	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BAPENDA	Rp.	Rp 1.000.025.000.000,00	Rp 1.350.049.800.000,00	Rp 1.187.382.697.963,82	Rp 1.485.065.000.000,00	Rp1.364.187.042.905,98	Rp 1.730.000.000.000,00	Rp 1.401.378.637.369,17	
17.5: Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang											
17.5.1	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan rezim promosi investasi untuk negara-negara kurang berkembang	PTSP		320 Investor dan Rp. 3.437.500.000.000	520 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	165 Investor PMA, 579 Investor PMDN, US\$ 19.512.700, Rp 2.741.046.000.000	620 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	295 Investor PMA & 1568 Investor PMDN, US\$ 44.110,69 Investasi PMA & Rp. 5.238.910.614.347 Investasi PMDN	720 Investor dan Rp. 2.734.750.000.000	90 Investor PMA & 280 Investor PMDN,Rp.1,8 Triliun dan US\$ 28,4 Juta	

...



2.5. Gambaran Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Gambaran keuangan daerah Kota Makassar menyajikan analisis terhadap dinamika pengelolaan keuangan daerah yang berlangsung selama satu periode kepemimpinan Wali Kota terakhir, serta fase transisi menuju periode berikutnya. Analisis ini mencakup tinjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu, kebijakan-kebijakan pengelolaan fiskal yang telah diterapkan, serta kerangka pendanaan yang mendasari belanja dan pembiayaan daerah. Bagian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi kemampuan keuangan Kota Makassar dalam lima tahun terakhir sebagai kondisi eksisting. Informasi tersebut menjadi dasar pijakan yang penting dalam merumuskan proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk lima tahun mendatang, yang akan mendukung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan strategis di periode pemerintahan selanjutnya.

2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan pelaksanaan APBD dan perkembangan neraca daerah, yang mencakup efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja serta posisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir.

2.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD Kota Makassar menguraikan perkembangan pendapatan daerah, yang mencakup sumber-sumber utama seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Selain itu, analisis ini juga mencakup belanja daerah, yang meliputi belanja operasional, belanja modal, serta belanja pegawai. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan juga dijelaskan dalam analisis ini. Bagian ini menyajikan gambaran realisasi komponen-komponen pokok APBD Kota Makassar selama periode 2020-2024, dengan data yang telah melalui proses audit dan pertanggungjawaban APBD. Realisasi APBD disajikan dalam bentuk time series untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan daerah dalam lima tahun terakhir.



Tabel 2.99
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
2	Pendapatan Asli Daerah	1.078.328.561.269,15	1.140.328.483.697,93	1.410.813.774.025,23	1.568.267.701.812,65	1.605.016.943.364,19
3	Pajak Daerah	864.313.239.515,14	924.347.962.910,12	1.187.829.001.552,82	1.354.471.619.336,98	1.411.880.414.028,41
4	Retribusi Daerah	67.204.193.741,00	54.184.449.344,56	71.490.482.421,00	68.510.860.369,73	55.577.902.505,81
5	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	31.875.688.803,93	22.251.084.159,45	17.444.726.095,00	27.203.181.889,15	26.626.360.688,39
6	Lain-lain PAD yang Sah	114.935.439.209,08	139.544.987.283,80	134.049.563.956,41	118.082.040.216,79	110.932.266.141,58
7	PENDAFTARAN TRANSFER	2.053.495.450.619,13	1.979.478.474.976,00	2.167.571.812.217,27	2.448.087.150.383,63	2.565.727.060.604,00
8	Dana Bagi Hasil Pajak	113.943.184.588,00	148.295.851.881,00	129.554.582.950,00	138.395.728.402,00	138.202.971.437,00
9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.842.507.754,00	7.438.257.946,00	10.477.493.670,00	4.091.202.000,00	7.355.863.000,00
10	Dana Alokasi Umum	1.249.647.391.000,00	1.233.440.789.380,00	1.230.822.405.656,00	1.397.191.068.397,00	1.636.174.131.002,00
11	Dana Alokasi Khusus	307.688.439.945,00	298.376.496.834,00	429.664.970.095,27	472.299.558.534,00	496.656.149.344,00
12	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Penyesuaian	74.623.320.000,00	30.304.767.000,00	18.033.979.000,00	0,00	0,00
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	302.750.607.332,13	261.622.311.935,00	349.018.380.846,00	436.109.593.050,63	287.337.945.821,00
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	191.838.274.714,00	166.241.538.720,00	8.948.344.000,00	33.022.649.750,50	34.069.234.597,00
17	Pendapatan Hibah	165.818.274.714,00	0,00	246.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00
18	Bantuan Keuangan	26.020.000.000,00	7.004.400.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pendapatan Lainnya	0,00	159.237.138.720,00	8.702.344.000,00	33.022.649.750,50	32.269.234.597,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.323.662.286.602,28	3.286.048.497.393,93	3.587.333.930.242,50	4.049.377.501.946,78	4.204.813.238.565,19
21	BELANJA					



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
22	BELANJA OPERASI	2.594.304.738.544,81	2.665.273.234.471,50	3.081.067.816.510,34	3.374.420.647.297,40	3.528.770.369.199,25
23	Belanja Pegawai	1.218.380.837.302,00	1.208.914.475.888,00	1.186.402.637.709,00	1.253.282.428.095,60	1.495.540.330.391,26
24	Belanja Barang	1.188.897.135.242,81	1.352.754.719.951,50	1.678.033.622.882,34	1.876.356.145.729,80	1.779.756.213.624,99
25	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Hibah	185.766.766.000,00	103.207.048.632,00	205.442.950.919,00	238.974.773.472,00	253.473.825.183,00
28	Belanja Bantuan Sosial	1.260.000.000,00	396.990.000,00	11.188.605.000,00	5.807.300.000,00	0,00
29	BELANJA MODAL	291.202.740.534,87	322.972.030.025,57	450.295.828.749,00	1.130.808.481.698,00	739.218.123.965,00
30	Belanja Tanah	0,00	6.598.942.100,00	9.985.028.700,00	0,00	4.039.070.800,00
31	Belanja Peralatan dan Mesin	59.823.460.691,87	110.252.404.448,00	264.759.654.213,00	385.762.710.688,00	243.016.044.630,00
32	Belanja Gedung dan Bangunan	65.093.458.020,00	34.540.693.805,57	37.320.249.236,00	237.970.651.002,00	145.556.511.472,00
33	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	113.433.294.536,00	149.470.608.679,00	115.752.976.983,00	486.632.963.599,00	321.143.365.576,00
34	Belanja Aset Tetap Lainnya	52.537.877.891,00	22.109.380.993,00	20.403.101.867,00	17.473.131.370,00	15.039.119.493,00
35	Belanja Aset Lainnya	314.649.396,00	0,00	2.074.817.750,00	2.969.025.039,00	10.424.011.994,00
36	BELANJA TAK TERDUGA	83.108.628.693,00	162.251.464.497,00	17.699.338.950,00	2.498.442.975,00	811.487.833,00
37	Belanja Tak Terduga	83.108.628.693,00	162.251.464.497,00	17.699.338.950,00	2.498.442.975,00	811.487.833,00
38	BELANJA TRANSFER	1.169.896.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
39	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	1.000.000.000,00		0,00
40	Bantuan Keuangan Lainnya	1.169.896.000,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL BELANJA	2.969.786.003.772,68	3.150.496.728.994,07	3.550.062.984.209,34	4.507.727.571.970,40	4.268.799.980.997,25
41	PEMBIAYAAN					
42	Penerimaan Pembiayaan	239.051.988.218,19	592.714.926.737,79	722.764.822.643,65	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19
43	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	239.051.988.218,19	587.714.926.737,79	715.264.822.643,65	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19



No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	592.928.271.047,79	723.266.695.137,65	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19	
	<i>Koreksi SILPA</i>	0,00	501.872.494,00	0,00	0,00	230.198.956.221,13
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SETELAH KOREKSI	592.928.271.047,79	722.764.822.643,65	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19	230.243.575.021,13

Sumber: LRA Kota Makassar Tahun 2020-224, data diolah



Selama periode 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp1,07 triliun lebih pada tahun 2020 menjadi Rp1,60 triliun lebih pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,52 persen per tahun. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami lonjakan pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, pendapatan transfer cenderung stabil namun menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan lain-lain daerah yang sah bersifat fluktuatif, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 yang disebabkan tidak diterimanya bantuan keuangan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, total pendapatan daerah meningkat dari Rp. 3,32 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 4,20 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 6 persen per tahun.

Belanja daerah juga mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, dari Rp2,97 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,26 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 9,5 persen per tahun. Belanja operasi merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, meningkat dari Rp2,59 triliun menjadi Rp3,52 triliun, dengan porsi terbesar berada pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja modal menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023, mencapai Rp1,13 triliun, yang mencerminkan adanya proyek-proyek infrastruktur berskala besar, meskipun menurun kembali pada tahun 2024. Belanja tak terduga dan belanja transfer memiliki proporsi yang sangat kecil dibandingkan jenis belanja lainnya.

Dari sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan didominasi oleh penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan relatif kecil dan hanya terjadi pada tahun 2021 dan 2022. SILPA menunjukkan tren menurun, dari Rp592 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp230 miliar pada tahun 2024, yang mengindikasikan semakin optimalnya pemanfaatan anggaran dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah dari tahun ke tahun.

2.5.1.2. Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah Kota Makassar menguraikan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dana daerah. Neraca ini mencerminkan hubungan antara aset yang dimiliki oleh daerah dengan kewajiban dan ekuitas yang ada, memberikan gambaran mengenai stabilitas keuangan daerah dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2024, neraca daerah Kota Makassar menunjukkan pengelolaan yang baik terhadap kewajiban dan aset daerah. Data rinci mengenai perkembangan neraca daerah ini disajikan dalam tabel yang mencatatkan posisi keuangan daerah secara periodik.

Tabel 2.100
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	1.145.512.567.105,46	1.294.275.578.887,13	1.345.221.817.114,80	881.646.839.075,77	904.154.702.984,87
	B. Investasi Jangka Panjang	744.676.329.433,52	753.629.892.610,25	817.405.909.288,34	825.831.679.702,30	827.901.101.221,17
	C. Aset Tetap	27.653.198.515.934,60	27.949.213.411.785,10	28.541.409.383.746,10	31.002.951.272.228,40	33.122.896.876.522,60



NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
	D. Aset Lainnya	364.067.561.605,26	339.078.302.866,23	356.900.486.364,86	403.826.453.912,30	368.569.147.816,22
	JUMLAH ASET	29.907.454.974.078,80	30.336.197.186.148,70	31.060.937.596.514,10	33.114.256.244.918,80	35.223.521.828.544,90
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	51.969.291.941,47	74.739.201.960,42	66.670.292.858,65	73.480.376.803,42	126.608.170.683,51
	B. Kewajiban Jangka Panjang	78.621.467.603,34	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	130.590.759.544,81	74.739.201.960,42	66.670.292.858,65	73.480.376.803,42	126.608.170.683,51
3	EKUITAS					
	Ekuitas	29.776.864.214.534,00	30.261.457.984.188,20	30.994.267.303.655,40	33.040.775.868.115,40	35.095.669.387.771,80
	JUMLAH EKUITAS	29.776.864.214.534,00	30.261.457.984.188,20	30.994.267.303.655,40	33.040.775.868.115,40	35.095.669.387.771,80
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29.907.454.974.078,80	30.336.197.186.148,70	31.060.937.596.514,00	33.114.256.244.918,80	35.222.277.558.455,30

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Dalam periode 2020 hingga 2024, neraca keuangan Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kinerja yang solid dengan rata-rata pertumbuhan total aset sebesar 4,74 persen per tahun. Peningkatan ini terutama didorong oleh bertambahnya aset tetap dan investasi jangka panjang. Di sisi lain, kewajiban daerah menurun rata-rata 11,64 persen per tahun, seiring pelunasan kewajiban jangka panjang sejak 2020. Ekuitas daerah juga tumbuh stabil sebesar 4,80 persen per tahun, mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Kondisi ini memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

2.5.1.3. Aset Daerah

Selama periode 2020 hingga 2024, kewajiban Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan disebabkan oleh tidak adanya lagi kewajiban jangka panjang setelah tahun 2020, yang menunjukkan adanya pelunasan atau penyelesaian utang jangka panjang secara penuh. Sementara itu, kewajiban jangka pendek bersifat fluktuatif, dengan lonjakan tertinggi pada 2021 dan penurunan kembali di tahun-tahun berikutnya. Meskipun kewajiban jangka pendek tetap ada, proporsinya relatif terkendali, yang mencerminkan kemampuan manajemen keuangan daerah dalam menjaga likuiditas dan mengelola beban utang secara hati-hati. Struktur kewajiban yang semakin ringan ini memberikan ruang fiskal lebih luas untuk mendukung belanja pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 2.101
Aset Daerah Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Asset Lancar	1.145.512.567.105,46	1.294.275.578.887,13	1.345.221.817.114,80	881.646.839.075,77	904.154.702.984,87
	B. Investasi Jangka Panjang	744.676.329.433,52	753.629.892.610,25	817.405.909.288,34	825.831.679.702,30	827.901.101.221,17
	C. Aset Tetap	27.653.198.515.934,60	27.949.213.411.785,10	28.541.409.383.746,10	31.002.951.272.228,40	33.122.896.876.522,60
	D. Aset Lainnya	364.067.561.605,26	339.078.302.866,23	356.900.486.364,86	403.826.453.912,30	368.569.147.816,22
	JUMLAH ASET	29.907.454.974.078,80	30.336.197.186.148,70	31.060.937.596.514,10	33.114.256.244.918,80	35.223.521.828.544,90

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)



2.5.1.4. Kewajiban

Selama periode 2020 hingga 2024, kewajiban Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan disebabkan oleh tidak adanya lagi kewajiban jangka panjang setelah tahun 2020, yang menunjukkan adanya pelunasan atau penyelesaian utang jangka panjang secara penuh. Sementara itu, kewajiban jangka pendek bersifat fluktuatif, dengan lonjakan tertinggi pada 2021 dan penurunan kembali di tahun-tahun berikutnya. Meskipun kewajiban jangka pendek tetap ada, proporsinya relatif terkendali, yang mencerminkan kemampuan manajemen keuangan daerah dalam menjaga likuiditas dan mengelola beban utang secara hati-hati. Struktur kewajiban yang semakin ringan ini memberikan ruang fiskal lebih luas untuk mendukung belanja pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Tabel 2.102
Kewajiban Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	51.969.291.941,47	74.739.201.960,42	66.670.292.858,65	73.480.376.803,42	126.608.170.683,51
	B. Kewajiban Jangka Panjang	78.621.467.603,34	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	130.590.759.544,81	74.739.201.960,42	66.670.292.858,65	73.480.376.803,42	126.608.170.683,51

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

2.5.1.5. Ekuitas Dana

Selama periode 2020 hingga 2024, ekuitas Pemerintah Kota Makassar menunjukkan tren pertumbuhan positif. Peningkatan ekuitas ini mencerminkan akumulasi aset bersih yang konsisten dari tahun ke tahun, seiring dengan menurunnya total kewajiban daerah. Kondisi ini menandakan pengelolaan keuangan daerah yang *prudent* dan transparan, yang turut mendukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertumbuhan ekuitas yang stabil memperkuat struktur neraca daerah dan memberikan landasan fiskal yang kokoh untuk membiayai pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Tren ini juga tercermin dalam peningkatan jumlah kewajiban dan ekuitas secara keseluruhan dan mempertegas komitmen Kota Makassar dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan terpercaya.

Tabel 2.103
Ekuitas Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	EKUITAS					
	Ekuitas	29.776.864.214.534,00	30.261.457.984.188,20	30.994.267.303.655,40	33.040.775.868.115,40	35.095.669.387.771,80
	JUMLAH EKUITAS	29.776.864.214.534,00	30.261.457.984.188,20	30.994.267.303.655,40	33.040.775.868.115,40	35.095.669.387.771,80

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

2.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar selama periode 2020–2024 sebagaimana tergambar dalam APBD, mencerminkan dua hal utama dari sudut pandang perencanaan, yakni proporsi penggunaan



anggaran dan strategi pembiayaan daerah. Alokasi belanja daerah secara dominan diarahkan pada belanja operasi yang terus meningkat setiap tahun, menunjukkan fokus pada pemenuhan layanan dasar dan operasional pemerintahan. Sementara itu, peningkatan signifikan pada belanja modal di tahun 2023 mencerminkan dorongan terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang bersifat jangka panjang. Dari sisi pembiayaan, struktur pembiayaan netto yang konsisten positif memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah memanfaatkan ruang pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sekaligus menjaga kesinambungan fiskal. Orientasi pembiayaan dan alokasi belanja ini secara keseluruhan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung prioritas pembangunan Kota Makassar.

2.5.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah: Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD

Kebijakan pendapatan daerah Kota Makassar selama periode 2020–2024 diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, dan memperluas ruang fiskal daerah. Hal ini terlihat dari tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup konsisten, dari Rp1,07 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp1,6 triliun pada tahun 2024. PAD tumbuh rata-rata sekitar 10,45% per tahun dan menjadi indikasi menguatnya kapasitas fiskal daerah. Meskipun pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur pendapatan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan peran yang semakin penting dalam menopang kebutuhan belanja prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan Kota Makassar dalam periode ini secara faktual telah menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi tercermin dari optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, yang dikelola lebih baik dari sisi perencanaan hingga pemungutannya. Sementara ekstensifikasi mulai tampak melalui pengembangan potensi pendapatan baru meskipun masih terbatas, seperti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meskipun kecil nilainya, menandakan upaya menggali sumber-sumber pendapatan alternatif. Optimalisasi pengelolaan PAD juga melibatkan pembenahan sistem dan peningkatan kinerja BUMD sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendapatan.

Dalam konteks jangka panjang, kebijakan pendapatan Kota Makassar juga diarahkan untuk menopang pembangunan strategis melalui penguatan belanja pembangunan, seperti belanja modal yang melonjak tajam pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas fiskal tidak hanya dilakukan dari sisi penerimaan, tetapi juga dikaitkan dengan strategi pengeluaran yang bersifat produktif. Dukungan pada sektor-sektor ekonomi strategis diharapkan akan menciptakan efek berganda yang dapat meningkatkan basis penerimaan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pendapatan Kota Makassar tidak hanya bersifat reaktif terhadap kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan fiskal berkelanjutan yang berbasis pada peningkatan kapasitas dan kemandirian daerah.

2.5.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar adalah proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran. Hal ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kapasitas fiskal pemerintah daerah mampu menjamin kesejahteraan pegawai serta



mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh aparat di berbagai perangkat daerah. Kebutuhan aparatur ini tidak hanya terbatas pada belanja pegawai, tetapi juga mencakup komponen-komponen lain dalam struktur belanja daerah seperti belanja barang dan jasa, belanja hibah, serta belanja transfer yang berkaitan langsung dengan fungsi-fungsi pelayanan publik dan manajemen internal pemerintahan. Dengan alokasi belanja yang tepat dan proporsional, keberlangsungan aktivitas pemerintahan dapat terjaga, sekaligus memastikan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 2.104
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Makassar Tahun 2022-2025

URAIAN	APBD TAHUN				
	2020 (Juta Rp)	2021 (Juta Rp)	2022 (Juta Rp)	2023 (Juta Rp)	2024 (Juta Rp)
Belanja Daerah	2.969.786.003 .772,68	3.150.496.728.9 94,07	3.550.062.984.2 09,34	4.507.727.571.9 70,40	4.268.799.980.9 97,25
Belanja Pegawai	1.218.380.837 .302,00	1.208.914.475.8 88,00	1.186.402.637.7 09,00	1.253.282.428.0 95,60	1.495.540.330.3 91,26
(Tunjangan Profesi Guru - TPG)	195.319.001.0 00,00	207.160.316.00 0,00	203.917.405.62 0,00	184.268.253.00 0,00	213.268.876.11 1,00
(Tambahan Penghasilan Bagi Guru)	1.386.300.000 ,00	2.571.000.000,0 0	3.733.453.000,0 0	4.901.750.000,0 0	5.586.403.000,0 0
Belanja Pegawai setelah dikurangi TPG dan Tamsil	1.021.675.536 .302,00	999.183.159.88 8,00	978.751.779.08 9,00	1.064.112.425.0 95,60	1.276.685.051.2 80,26
% Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah	34,40	31,72	27,57	23,61	29,91

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Dari Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Makassar selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun. Pada tahun 2020 proporsinya sebesar 34,40%, sempat menurun menjadi 31,72% di tahun 2021, hingga mencapai 29,91% pada 2024. Perubahan ini mencerminkan semakin fluktuasi porsi anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, baik dalam bentuk gaji pokok maupun tunjangan dan penghasilan tambahan. Jika komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) dikeluarkan, belanja pegawai murni tetap menunjukkan tren kenaikan signifikan. Kondisi ini perlu dicermati untuk memastikan agar belanja aparatur tidak mendominasi struktur belanja daerah secara berlebihan, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang produktif tetap terjaga.

2.5.2.3. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan pembangunan daerah Kota Makassar bertujuan untuk melihat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah dalam tiga tahun terakhir. Fokus utama adalah pada apakah daerah mengalami pembiayaan surplus atau defisit setiap tahunnya. Jika terjadi defisit, kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup kekurangan tersebut melalui berbagai sumber penerimaan, seperti pinjaman atau dana cadangan. Sebaliknya, jika terjadi surplus, maka kelebihan pendapatan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan yang mendukung pembangunan daerah



lebih lanjut. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan ini memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Tabel 2.105
Perhitungan Surplus/ Defisit Riil Anggaran
Kota Makassar Tahun 2020-2024

URAIAN	APBD TAHUN				
	2020 (Juta Rp)	2021 (Juta Rp)	2022 (Juta Rp)	2023 (Juta Rp)	2024 (Juta Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	3.323.662,29	3.286.048,50	3.587.333,93	4.049.377,50	4.204.813,24
Dikurangi realisasi :					
Belanja Daerah	2.969.786,00	3.150.496,73	3.550.062,98	4.507.727,55	4.268.799,98
Pengeluaran Pembiayaan	0	5.000,00	7.500,00	0	0
Surplus / (Defisit) Riil	353.876,29	130.551,77	29.770,95	-458.350,05	-63.986,74

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Kondisi anggaran Kota Makassar tahun 2020-2024 menunjukkan fluktuasi dengan surplus pada 2020 hingga 2022 yang menurun dari Rp 353,88 miliar menjadi Rp 29,77 miliar, lalu defisit signifikan sebesar Rp 458,35 miliar pada 2023 akibat lonjakan belanja daerah, terutama belanja modal, dan defisit yang menyusut menjadi Rp 63,98 miliar pada 2024. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah kota dalam menjaga keseimbangan fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan, meskipun menghadapi tekanan belanja untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, sehingga menunjukkan komitmen menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Selama periode 2020-2024, komposisi penutup defisit riil anggaran kota Makassar sepenuhnya ditutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Komponen penerimaan pembiayaan lainnya defisit tidak berkontribusi dalam menutup defisit APBD kota Makassar. Fakta ini mengindikasikan bahwa kebijakan penganggaran yang ditempuh oleh pemerintah kota Makassar belum didasarkan pada sebuah kebijakan yang berorientasi ekspansif fiskal. Berikut disajikan tabel penutup defisit APBD kota Makassar.

Tabel 2.106
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	100	100	100	100	100
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, defisit anggaran sebagian besar disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi pendapatan, langkah penghematan, serta optimalisasi pengelolaan keuangan. Selain itu, terdapat



sejumlah program dan kegiatan pembangunan yang belum sepenuhnya terlaksana dan harus berlanjut ke tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu, kebijakan defisit anggaran yang diterapkan oleh Kota Makassar perlu lebih dipahami sebagai strategi ekspansi fiskal, bukan sekadar masalah teknis dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Defisit anggaran harus dapat mengaitkan antara kebijakan perencanaan program pembangunan dengan kebijakan penganggaran. Hal ini sangat diperlukan untuk melahirkan kebijakan pembangunan untuk melahirkan *outcome* yang berdampak nyata bagi masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi APBD kota Makassar, secara keseluruhan SiLPA yang dihasilkan secara konsisten terealisasi dengan rata-rata persentase 100 persen

Tabel 2.107
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Riil Anggaran
Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SiLPA	238.994.035.090,52	592.928.271.047,79	722.764.822.643,65	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19
2	Total Realisasi	239.051.988.218,19	592.714.926.737,79	722.764.822.643,65	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19
3	Persentase Realisasi (%)	100,02	99,96	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

2.5.3. Analisis Keuangan Daerah
2.5.3.1. Analisis Fiskal Daerah
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 2.108
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	Total Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah
1	2020	3.323.662.286.602,28	1.078.328.561.269,15	32,44
2	2021	3.286.048.497.393,93	1.140.328.483.697,93	34,70
3	2022	3.587.333.930.242,50	1.410.813.774.025,23	39,33
4	2023	4.049.377.501.946,78	1.568.267.701.812,65	38,73
5	2024	4.204.813.238.565,19	1.605.016.943.364,19	38,17

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Rasio kemandirian daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah (PAD) tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Rasio ini dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin besar kemampuan daerah tersebut untuk mandiri secara finansial.

Kenaikan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dari 32.44% pada tahun 2020 menjadi 38.17% pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Makassar. Rasio yang meningkat ini mengindikasikan bahwa kontribusi PAD terhadap total



pendapatan daerah semakin besar, yang berarti pemerintah semakin mampu mengandalkan sumber-sumber pendapatan daerah daripada bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan rasio ini termasuk kebijakan yang lebih efektif dalam peningkatan kualitas layanan publik, digitalisasi proses pemungutan pajak/retribusi, ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta inovasi dalam pengelolaan aset daerah yang menghasilkan pendapatan tambahan.

2. Rasio Fiskal Daerah

Tabel 2.109
Rasio Fiskal Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Total Pendapatan Daerah	3.323.662.286.602,28	3.286.048.497.393,93	3.587.333.930.242,50	4.049.377.501.946,78	4.204.813.238.565,19
Pembiayaan Tertentu (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA))	239.051.988.218,19	592.714.926.737,79	722.764.822.643,65	752.535.768.676,81	294.185.698.653,19
Pendapatan yang Penggunaannya sudah ditentukan (Dana Otonomi khusus)	-	-	-	-	-
Belanja Tertentu:					
a) Belanja Pegawai	1.218.380.837.302,00	1.208.914.475.888,00	1.186.402.637.709,00	1.253.282.428.095,60	1.495.540.330.391,26
b) Belanja Bunga	-	-	-	-	-
c) Belanja Bagi Hasil ke Desa	-	-	-	-	-
Pengeluaran pembiayaan tertentu (pembayaran cicilan pokok pinjaman Daerah)	-	-	-	-	-
Kapasitas Fiskal Daerah	2.344.333.437.518,47	2.669.848.948.243,72	3.123.696.115.177,15	3.548.630.842.527,99	3.003.458.606.827,12
Rasio KFD	1,92	2,21	2,63	2,83	2,01
Kategori KFD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif. Untuk mengukur tingkat Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dengan formula tertentu sehingga dihasilkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD). Rasio Kapasitas Fiskal Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan keuangan mereka. Semakin tinggi RKFD, semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahnya.

Pada tahun 2020, rasio KFD berada di angka 1.92 dan meningkat menjadi 2.21 di tahun 2021, dengan kategori KFD tetap berada pada tingkat "sangat tinggi". Peningkatan ini disebabkan penurunan belanja pegawai dan peningkatan SiLPA dari sekitar 239 miliar menjadi sekitar 593 miliar, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien. Pada tahun 2022, rasio KFD meningkat menjadi 2.63. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan total pendapatan daerah menjadi sekitar 3.58 triliun dan peningkatan SiLPA menjadi sekitar 722 miliar. Tahun 2023, rasio KFD mencapai puncaknya di



angka 2.83, dengan kategori KFD "Sangat Tinggi". Total pendapatan daerah meningkat menjadi sekitar 4.04 triliun lebih dan SiLPA mencapai sekitar 723 miliar, mencerminkan pengelolaan anggaran yang semakin baik.

Namun, pada tahun 2024, rasio KFD mengalami penurunan menjadi 2.01. Meskipun total pendapatan daerah terus meningkat menjadi sekitar 4.2 triliun, penurunan SiLPA dari sekitar 753 miliar menjadi sekitar 294 miliar menunjukkan adanya pengeluaran yang lebih besar atau pengelolaan anggaran yang kurang efisien. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun pendapatan daerah meningkat, tantangan dalam pengelolaan anggaran tetap ada dan perlu diatasi.

3. Rasio Pajak Daerah (Tax Ratio)

Tabel 2.110
Rasio Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	Tahun	Pajak Daerah	Nilai PDRB	Tax Ratio
1	2020	864.313.239.515,14	178.332.992.770.000,00	0,48
2	2021	924.347.962.910,12	190.318.065.290.000,00	0,49
3	2022	1.187.829.001.552,82	208.935.792.290.000,00	0,57
4	2023	1.354.471.619.336,98	226.902.788.870.000,00	0,60
5	2024	1.411.880.414.028,41	243.062.717.780.000,00	0,58

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Rasio pajak daerah mengukur seberapa besar penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian. Peningkatan tax ratio penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pada tahun 2020, tax ratio kota Makassar berada di angka 0.48 dan meningkat menjadi 0.49 pada tahun selanjutnya. Memasuki tahun 2022, tax ratio meningkat menjadi 0.57, didorong oleh kenaikan pajak daerah menjadi sekitar 1.18 triliun dan kenaikan nilai PDRB menjadi sekitar 208.9 triliun.

Pada tahun 2023, Tax Ratio berada di angka 0.60 dengan kondisi pajak daerah meningkat menjadi sekitar 1.35 triliun dan nilai PDRB meningkat menjadi sekitar 226.9 triliun. Tax ratio Kota Makassar pada tahun 2024 di angka 0,58, dengan pajak daerah meningkat menjadi sekitar 1,41 triliun dan nilai PDRB meningkat menjadi sekitar 243 triliun.

4. Rasio Belanja Pegawai

Tabel 2.111
Rasio Belanja Pegawai Kota Makassar Tahun 2020-2024

URAIAN	APBD TAHUN				
	2020 (Juta Rp)	2021 (Juta Rp)	2022 (Juta Rp)	2023 (Juta Rp)	2024 (Juta Rp)
Belanja Daerah	2.969.786.003 .772,68	3.150.496.728.9 94,07	3.550.062.984.2 09,34	4.507.727.571.9 70,40	4.268.799.980.9 97,25
Belanja Pegawai	1.218.380.837 .302,00	1.208.914.475.8 88,00	1.186.402.637.7 09,00	1.253.282.428.0 95,60	1.495.540.330.3 91,26
(Tunjangan Profesi Guru - TPG)	195.319.001.0 00,00	207.160.316.00 0,00	203.917.405.62 0,00	184.268.253.00 0,00	213.268.876.11 1,00
(Tambahan	1.386.300.000	2.571.000.000,0	3.733.453.000,0	4.901.750.000,0	5.586.403.000,0



URAIAN	APBD TAHUN				
	2020 (Juta Rp)	2021 (Juta Rp)	2022 (Juta Rp)	2023 (Juta Rp)	2024 (Juta Rp)
Penghasilan Bagi Guru)	,00	0	0	0	0
Belanja Pegawai setelah dikurangi TPG dan Tamsil	1.021.675.536.302,00	999.183.159.888,00	978.751.779.089,00	1.064.112.425.095,60	1.276.685.051.280,26
% Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah	34,40	31,72	27,57	23,61	29,91

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pengaturan proporsi belanja pegawai ini tidak lepas dari usaha untuk mencapai kualitas layanan publik dan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi keuangan daerah, perubahan persentase belanja pegawai terhadap belanja daerah memberikan gambaran tentang prioritas pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2023, terjadi penurunan sebesar 3,96% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya upaya efisiensi dalam pengelolaan anggaran pegawai. Namun, pada tahun 2024, persentase ini kembali meningkat sebesar 6,3%, mencerminkan peningkatan kebutuhan untuk membayar pegawai akibat kenaikan gaji, penambahan jumlah pegawai, atau peningkatan tunjangan. Kenaikan ini juga menunjukkan investasi dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan public. Secara keseluruhan, perubahan ini mencerminkan dinamika dalam prioritas pengeluaran daerah yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan kebutuhan operasional.

5. Rasio Belanja Modal

Tabel 2.112
Rasio Belanja Modal Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja
1	2020	291.202.740.534,87	2.969.786.003.772,68	9,81
2	2021	322.972.030.025,57	3.150.496.728.994,07	10,25
3	2022	450.295.828.749,00	3.550.062.984.209,34	12,68
4	2023	1.130.808.481.698,00	4.507.727.571.970,40	25,09
5	2024	739.218.123.965,00	4.268.799.980.997,25	17,32

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio ini menunjukkan proporsi belanja modal dalam total anggaran belanja daerah, yang menggambarkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal. Nilai Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk investasi, yang dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah jangka panjang.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan tren yang menarik dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, rasio belanja



modal adalah 9,81%, yang naik menjadi 10,25% pada tahun 2021. Rasio belanja modal meningkat signifikan menjadi 25,09% pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan investasi dalam infrastruktur atau aset modal dari program pemerintah kota Makassar pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, rasio belanja modal sedikit menurun menjadi 17,32%. Secara keseluruhan, perubahan rasio ini mencerminkan dinamika dalam prioritas pengeluaran daerah, kebijakan pemerintah dan kebutuhan akses pelayanan publik.

6. Rasio Belanja Per Kapita Penduduk

Tabel 2.113
Rasio Belanja Per Kapita Penduduk Kota Makassar Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	Total Belanja	Jumlah Penduduk	Belanja Daerah Per Kapita
1	2020	2.969.786.003.772,68	1.423.880,00	2.085.699,64
2	2021	3.150.496.728.994,07	1.434.440,00	2.196.325,21
3	2022	3.550.062.984.209,34	1.444.880,00	2.456.995,03
4	2023	4.507.727.571.970,40	1.454.960,00	3.098.179,72
5	2024	4.268.799.980.997,25	1.464.640,00	2.914.572,85

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Belanja daerah per kapita adalah ukuran yang menunjukkan jumlah rata-rata uang yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk setiap individu dalam wilayah tersebut. Ini dihitung dengan membagi total belanja daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Angka ini memberikan gambaran tentang seberapa besar investasi atau pengeluaran pemerintah daerah untuk layanan publik, infrastruktur, dan kebutuhan lainnya per orang di wilayah tersebut.

Berdasarkan tabel diatas belanja daerah per kapita Kota Makassar menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun dari 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 ke 2021, belanja daerah per kapita meningkat menjadi Rp. 2.196.325,21. Selanjutnya, dari tahun 2022 ke 2023, belanja daerah per kapita meningkat sebesar Rp. 260.669,82. Pada tahun 2023 ke 2024, terdapat sedikit penurunan sebesar Rp. 183.606,87s dalam belanja daerah per kapita. Secara keseluruhan, tren belanja daerah pemerintah kota Makassar telah menunjukkan tren positif yang baik.

2.5.3.2. Analisis Share APBD terhadap Nilai PDRB

Perekonomian kota Makassar berdasarkan besaran Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran dalam kurun periode Tahun 2020- 2024 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB secara keseluruhan. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, dan pengeluaran konsumsi LNPRT. Berdasarkan analisis kontribusi PDRB kota Makassar Tahun 2020- 2024, dapat terlihat dominasi komponen rumah tangga sebesar Rp.93 Triliun pada Tahun 2020, naik menjadi Rp.122 Triliun pada Tahun 2024. Berdasarkan capaian tersebut Perekonomian kota Makassar menurut pengeluaran masih didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga. Untuk komponen pembentukan PMTB pada Tahun 2020 sebesar Rp.90 Triliun lebih meningkat menjadi Rp.109 Triliun pada Tahun 2024 dari total PDRB. Kontribusi PDRB menurut



pengeluaran kota Makassar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.114
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Ribuan Rupiah)

Jenis Pengeluaran	PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Ribuan Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	93.001.926.920	97.357.472.670	103.621.568.130	113.504.960.570	122.177.972.430
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.239.761.300	3.255.888.180	3.687.209.830	4.058.924.850	5.173.347.340
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15.419.637.300	16.698.002.450	16.392.855.070	17.730.401.860	18.886.480.160
Pembentukan Modal Tetap Bruto	90.104.812.340	94.562.517.550	99.426.442.260	105.805.700.460	109.308.517.590
Perubahan Inventori	- 451.554.040	- 493.365.960	280.424.600	- 63.307.470	288.204.220
Net Ekspor Barang dan Jasa	-22.981.591.050	-21.076.535.930	- 14.472.707.590	- 14.133.891.400	- 12.771.803.960
PDRB	178.332.992.800	190.318.065.300	208.935.792.290	226.902.788.870	243.062.717.780

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Selanjutnya Peran Kontribusi APBD Pemerintah kota Makassar dalam Pertumbuhan Ekonomi kota Makassar dapat dilihat dari share APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD kota dalam waktu 5 tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami kenaikan dari 19,26 persen pada tahun 2020 menjadi 22,60 persen pada Tahun 2024 meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan di tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.115
Kontribusi APBD terhadap PDRB
pada Komponen Konsumsi Pemerintah

TAHUN	Konsumsi Pemerintah		Total Belanja APBD		Share APBD Terhadap Konsumsi Pemerintah
2020	Rp	15.419.637.300.000	Rp	2.969.786.003.773	19,26
2021	Rp	16.698.002.450.000	Rp	3.150.496.728.994	18,87
2022	Rp	16.392.855.070.000	Rp	3.550.062.984.209	21,66
2023	Rp	17.730.401.860.000	Rp	4.507.727.551.970	25,42
2024	Rp	18.886.480.160.000	Rp	4.268.755.362.197	22,60

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan meskipun terdapat penurunan di tahun 2024. Belanja modal kota Makassar dapat dikatakan cukup berkontribusi terhadap pertumbuhan PMTB yang dapat dilihat dari kontribusi belanja APBD terhadap PMTB seperti tabel di bawah ini.



Tabel 2.116
Kontribusi APBD terhadap PDRB pada Komponen PMTB

TAHUN	Komponen PMTB		Total Belanja Modal	Share Belanja Modal Terhadap Konsumsi PMTB
2020	Rp	90.104.812.340.000	Rp 291.202.740.535	0,32
2021	Rp	94.562.517.550.000	Rp 322.972.030.026	0,34
2022	Rp	99.426.442.260.000	Rp 450.295.828.749	0,45
2023	Rp	105.805.700.460.000	Rp 1.130.808.481.698	1,07
2024	Rp	109.308.517.590.000	Rp 739.218.123.965	0,68

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

2.5.4. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Likuiditas)

Tabel 2.117
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Likuiditas)
Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	TAHUN	KAS	Utang Jangka Pendek	Persentase (%)
1	2020	593.384.094.655,11	51.969.291.941,47	11,42
2	2021	722.987.437.483,37	74.739.201.960,42	9,67
3	2022	752.811.557.469,81	66.670.292.858,65	11,29
4	2023	294.444.694.726,60	73.480.376.803,42	4,01
5	2024	230.522.163.909,13	127.852.440.773,03	1,80

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Rasio likuiditas adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Rasio ini penting untuk menilai kesehatan keuangan jangka pendek suatu entitas. Rasio likuiditas dapat dihitung dengan membagi aset lancar (seperti kas) dengan kewajiban jangka pendek (utang jangka pendek).

Rasio likuiditas kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 ke 2021, rasio likuiditas menurun menjadi 9,67%, yang menunjukkan penurunan kemampuan daerah untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Namun, pada tahun 2021 ke 2022, rasio likuiditas meningkat sebesar 11,29%, menunjukkan perbaikan dalam kemampuan tersebut. Sayangnya, tren ini tidak berlanjut karena pada tahun 2022 ke 2023, rasio likuiditas menurun drastis menyentuh angka 4,01%, yang mengindikasikan penurunan signifikan dalam kesehatan keuangan jangka pendek daerah. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 ke 2024, dengan rasio likuiditas 1,80%. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan aset lancar dan kewajiban jangka pendek untuk memastikan stabilitas keuangan jangka pendek yang lebih baik.



2. Rasio Solvabilitas Daerah

Tabel 2.118
Rasio Solvabilitas Daerah Kota Makassar Tahun 2020-2024

No	TAHUN	Total Kewajiban	Total Aset	Persentase (%)
1	2020	130.590.759.544,81	29.907.454.974.078,80	0,44
2	2021	74.739.201.960,42	30.336.197.186.148,70	0,25
3	2022	66.670.292.858,65	31.060.937.596.514,10	0,21
4	2023	73.480.376.803,42	33.114.256.244.918,80	0,22
5	2024	127.852.440.773,03	35.223.521.828.554,80	0,36

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas: Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan besarnya risiko yang dihadapi oleh Pemerintah. Rasio solvabilitas pemerintah kota Makassar menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 ke 2021, rasio solvabilitas menurun menjadi 0,25%, yang menunjukkan penurunan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan aset yang dimiliki. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 ke 2022, dengan rasio solvabilitas 0,21%. Namun, pada tahun 2023, rasio solvabilitas mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,22, menunjukkan perbaikan dalam kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Pada tahun 2024, rasio solvabilitas kembali naik di angka 0,36. Secara keseluruhan, rasio solvabilitas mengalami penurunan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, meskipun ada sedikit perbaikan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan aset dan kewajiban jangka panjang untuk memastikan stabilitas keuangan kota Makassar.

2.5.5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu bentuk transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketimpangan antar daerah. DBH terdiri atas bagian dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah, seperti pajak dan sumber daya alam, sesuai dengan proporsi tertentu. Dalam konteks Kota Makassar, DBH mencerminkan kontribusi dan peran daerah dalam perekonomian nasional maupun provinsi, serta menjadi sumber pendanaan penting untuk pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.119
Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Makassar Tahun 2020-2024

Jenis DBH	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
DBH dari Pemerintah Pusat					
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5,346,193,736.00	8,747,384,417.00	6,490,120,402.00	1,599,241,000.00	1,882,401,000.00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal	108,596,990,852.00	139,286,973,615.00	122,887,128,838.00	136,499,937,402.00	136,037,966,437.00



Jenis DBH	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
29/WPOPDN					
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	261,493,849.00	177,333,710.00	296,550,000.00	282,604,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	91,656.00	200.00	53,000.00	-	145,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	289,197,800.00	1,195,798,368.00	729,644,000.00	212,760,000.00	377,474,000.00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3,735,851,609.00	4,790,021,181.00	7,677,202,670.00	1,817,718,000.00	5,078,634,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	29,090,400.00	94,819,047.00	112,283,000.00	55,513,000.00	155,998,000.00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	788,276,289.00	1,357,619,150.00	1,958,311,000.00	2,005,211,000.00	1,743,612,000.00
Jumlah	118,785,692,342.00	155,734,109,827.00	140,032,076,620.00	142,486,930,402.00	145,558,834,437.00
DBH dari Pemerintah Provinsi					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	120,577,459,771.00	105,251,371,783.00	133,190,125,432.00	169,328,650,926.75	102,865,384,320.00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	58,100,209,411.00	44,654,969,382.00	70,449,036,694.00	88,896,410,920.00	48,562,233,455.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	72,063,497,550.00	59,951,515,940.00	88,628,343,105.00	120,349,277,775.88	90,733,546,750.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	995,779,570.00	904,387,676.00	1,110,332,918.00	1,416,404,542.00	476,597,612.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	178,658,130.00	50,860,067,154.00	55,640,542,697.00	56,118,848,886.00	44,700,183,684.00
Jumlah	251,915,604,432.00	261,622,311,935.00	349,018,380,846.00	436,109,593,050.63	287,337,945,821.00

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu bentuk transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan mengurangi ketimpangan antar daerah. DBH terdiri atas bagian dari pendapatan negara yang dibagikan kepada daerah, seperti pajak dan sumber daya alam, sesuai dengan proporsi tertentu. Dalam konteks Kota Makassar, DBH mencerminkan kontribusi dan peran daerah dalam perekonomian nasional maupun provinsi, serta menjadi sumber pendanaan penting untuk pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan data realisasi DBH Kota Makassar tahun 2020–2024, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada DBH dari Pemerintah Pusat yang sempat menurun di tahun 2022 dan 2023 namun kembali meningkat di 2024 menjadi Rp145,56 miliar. Di sisi lain, DBH dari Pemerintah Provinsi mengalami tren meningkat tajam hingga 2023 (Rp436,10 miliar), sebelum menurun cukup drastis di tahun 2024 menjadi Rp287,33 miliar. Penurunan ini terutama terlihat pada jenis pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan, yang mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan potensi penerimaan daerah serta perlunya antisipasi terhadap perubahan kebijakan fiskal pusat maupun provinsi yang berdampak langsung pada pendapatan daerah.



2.5.6. Kerangka Pendanaan
2.5.6.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Kota Makassar memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap keuangan daerah di masa mendatang. Indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan tingkat pengangguran tidak hanya mencerminkan kinerja pembangunan, tetapi juga menjadi dasar dalam mengidentifikasi peluang peningkatan pendapatan daerah. Sebagai kota metropolitan dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, dinamika sektor perdagangan, jasa, dan konsumsi masyarakat yang terus berkembang memberikan ruang bagi perluasan basis pajak dan retribusi. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan layanan publik akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi mendorong belanja daerah yang lebih besar, sekaligus membuka potensi pengelolaan pendapatan daerah secara lebih inovatif dan berkelanjutan.

Tabel 2.120
Proyeksi Indikator Makro
Kota Makassar Tahun 2025-2030

No	Indikator	Baseline 2024	Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	5,73	6,43	7,43	7,73	8,13	8,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,71	9,62	9,53	9,44	9,35	9,26	9,17
3	Indeks Gini Rasio	0,372	0,366	0,359	0,353	0,347	0,341	0,334
4	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	165,95	175,46	186,75	200,62	216,13	233,71	246,34
5	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,62	3,46	3,40	3,28	3,15	3,02
6	Indeks Pembangunan Manusia	85,23	85,46	85,86	86,03	86,31	86,56	86,84
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	NA	32,46	34,98	37,36	39,74	42,13	44,60

Sumber: Bappeda Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

Kinerja pembangunan Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan capaian yang cukup positif pada sebagian besar indikator makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi terus mengalami perbaikan seiring pulihnya aktivitas pascapandemi, yang berdampak pada peningkatan PDRB per kapita masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan merata pada kualitas hidup, karena tingkat pengangguran masih menghadapi tantangan, meskipun tren kemiskinan menunjukkan penurunan. Indeks Gini mengindikasikan masih adanya kesenjangan distribusi pendapatan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif tinggi dan konsisten meningkat, menggambarkan perbaikan pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai tolok ukur efektivitas pembangunan rendah karbon. Indikator ini sejatinya menunjukkan seberapa besar emisi dapat ditekan untuk setiap satuan PDRB yang dihasilkan. Meskipun data resmi penurunan intensitas emisi GRK belum dapat dihitung karena belum tersedianya baseline melalui RAD-GRK, capaian potensi penurunan emisi yang tercatat dalam aplikasi AKSARA menunjukkan peningkatan signifikan, dari 3.081,20 Ton CO₂eq pada tahun 2020 menjadi 237.763,95 Ton CO₂eq pada tahun 2024. Kontribusi Kota Makassar mencapai 4,28% dari total penurunan emisi Sulawesi Selatan, dengan kegiatan utama meliputi pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan transportasi berkelanjutan.

Arah pembangunan Kota Makassar akan difokuskan pada konsistensi menjaga pertumbuhan ekonomi agar inklusif dan berkualitas, menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan, mempersempit kesenjangan pendapatan, serta terus meningkatkan IPM. Sementara itu, pada aspek lingkungan, indikator penurunan intensitas emisi GRK akan diperkuat dengan penyusunan baseline emisi resmi, penyusunan dokumen RAD-GRK, dan penguatan aksi mitigasi lintas sektor. Dengan demikian, enam indikator makroekonomi utama beserta tambahan indikator lingkungan ini dapat menjadi pondasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan rendah karbon.

Asumsi indikator makroekonomi yang telah dianalisis, meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, gini ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia, akan dijadikan dasar dalam menyusun proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar pada periode RPJMD 2025–2025. Pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita menjadi acuan penting dalam menghitung potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pajak dan retribusi yang sangat bergantung pada aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Indikator tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gini ratio akan menjadi pertimbangan utama dalam pengalokasian belanja daerah yang diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan. Sementara itu, IPM digunakan untuk memastikan bahwa belanja daerah mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selain itu, arah pembangunan rendah karbon melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca juga akan menjadi pertimbangan dalam proyeksi, mengingat relevansinya dengan keberlanjutan ekonomi dan efisiensi belanja di masa mendatang. Dengan demikian, seluruh indikator makro beserta isu strategis yang terkait dijadikan sebagai asumsi dasar dalam kerangka proyeksi pendapatan dan belanja yang akan dituangkan ke dalam RPJMD 2025–2030.

2.5.6.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi yang pada sisi pendapatan didasarkan atas beberapa determinan utama, yakni (1) asumsi indikator makro ekonomi daerah yang mencerminkan prospek pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan PDRB, (2) kebijakan di bidang keuangan negara yang mempengaruhi besaran transfer ke daerah dan dana bagi hasil, (3) kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi keuangan daerah yang diarahkan pada optimalisasi pajak, retribusi, serta perluasan basis penerimaan, dan (4) angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah sesuai tren historis. Sedangkan untuk proyeksi belanja daerah, selain memperhitungkan asumsi indikator makro ekonomi, juga memperhatikan (1) analisis kebijakan pembiayaan daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal, (2) kebijakan pemerintah yang berdampak pada belanja tidak langsung seperti penyesuaian gaji ASN dan mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan, serta (3) angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat maupun prioritas utama pembangunan daerah, sehingga secara keseluruhan proyeksi pendapatan dan belanja mencerminkan kapasitas fiskal Kota Makassar sekaligus menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah.



2.5.6.2.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kota Makassar dalam periode RPJMD 2025–2030 memperlihatkan tren yang meningkat meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif moderat. Pada tahun 2025, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp2,15 triliun dan meningkat secara bertahap menjadi Rp2,77 triliun pada tahun 2030. Pertumbuhan ini terutama bersumber dari Pajak Daerah sebagai kontributor terbesar, yang naik dari Rp1,88 triliun di tahun 2025 menjadi Rp2,49 triliun pada tahun 2030. Komponen PAD lainnya seperti Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah juga menunjukkan tren yang stabil meski kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Sementara itu, Pendapatan Transfer juga tetap menjadi pilar penting dalam struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2025, nilai transfer dari pemerintah pusat dan provinsi tercatat sebesar Rp2,74 triliun, lalu meningkat menjadi Rp3,12 triliun pada tahun 2030. Dana Bagi Hasil Pajak masih menjadi sumber dominan dengan proyeksi naik dari Rp2,47 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp2,93 triliun pada tahun 2030. Sementara Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam cenderung fluktuatif, yaitu dari Rp278 miliar pada tahun 2025 turun menjadi Rp167 miliar pada tahun 2026, namun kembali meningkat secara bertahap hingga Rp190,73 miliar pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah Kota Makassar memperlihatkan pertumbuhan positif dengan dukungan yang relatif seimbang antara peningkatan PAD dan pendapatan transfer. Meskipun ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, tren pertumbuhan pajak daerah yang konsisten menunjukkan adanya ruang bagi penguatan kemandirian fiskal Kota Makassar. Ke depan, arah pertumbuhan pendapatan ini akan menopang prioritas pembangunan daerah, terutama dalam memperluas kapasitas pelayanan publik, mendorong investasi infrastruktur perkotaan, serta memperkuat program-program strategis yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat



Tabel 2.121
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
	P - 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PENDAPATAN						
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.150.902.258.978,87	2.206.350.556.000,00	2.328.491.805.000,00	2.458.822.151.000,00	2.605.116.991.000,00	2.774.802.583.000,00
Pajak Daerah	1.876.102.441.000,00	1.954.987.697.000,00	2.064.230.799.000,00	2.186.133.301.000,00	2.324.859.887.000,00	2.486.054.033.000,00
Retribusi Daerah	205.591.102.446,80	174.847.759.000,00	180.172.056.000,00	185.949.600.000,00	191.761.754.000,00	197.427.200.000,00
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	24.368.548.085,07	27.205.600.000,00	34.555.600.000,00	36.905.600.000,00	38.355.600.000,00	40.905.600.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	44.840.167.447,00	49.309.500.000,00	49.533.350.000,00	49.833.650.000,00	50.139.750.000,00	50.415.750.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	2.747.808.516.000,00	2.695.751.271.000,00	2.794.495.647.000,00	2.898.206.016.000,00	3.007.262.856.000,00	3.121.756.492.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.469.808.516.000,00	2.528.751.271.000,00	2.636.895.647.000,00	2.730.596.016.000,00	2.828.641.856.000,00	2.931.023.392.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	278.000.000.000,00	167.000.000.000,00	157.600.000.000,00	167.610.000.000,00	178.621.000.000,00	190.733.100.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	4.898.710.774.978,87	4.902.101.827.000,00	5.122.987.452.000,00	5.357.028.167.000,00	5.612.379.847.000,00	5.896.559.075.000,00

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

2.5.6.2.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja Kota Makassar periode RPJMD 2025–2030 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2025 (P-APBD) total belanja tercatat sebesar Rp5,13 triliun, sedikit menurun pada 2026 menjadi Rp5,11 triliun, lalu kembali meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp6,05 triliun pada 2030. Pergerakan ini mencerminkan adanya penyesuaian fiskal jangka pendek, namun secara keseluruhan menggambarkan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dalam jangka menengah.

Struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi, yang pada 2025 mencapai Rp4,16 triliun atau sekitar 81% dari total belanja, kemudian relatif stabil di kisaran Rp4,09–Rp4,23 triliun sepanjang periode hingga 2030. Di dalamnya, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai sekitar Rp2,01 triliun pada 2025 dan tetap konsisten mendekati Rp2,0 triliun per tahun hingga akhir periode. Belanja barang dan jasa juga stabil pada kisaran Rp1,96–Rp1,98 triliun, sementara belanja hibah cenderung fluktuatif dengan puncak tertinggi Rp260,92 miliar pada 2029 sebelum turun kembali ke Rp146,92 miliar pada 2030.

Di sisi lain, belanja modal tercatat sebesar Rp933,02 miliar pada 2025 dan terus meningkat signifikan menjadi Rp1,89 triliun pada 2030. Peningkatan ini terutama didorong oleh belanja gedung dan bangunan yang naik dari Rp149,20 miliar pada 2025 menjadi Rp901,68 miliar pada 2030, serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang meningkat dari Rp497,72 miliar pada 2025 menjadi Rp761,46 miliar pada 2030. Tren ini menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dasar maupun strategis guna mendukung daya saing kota.

Sementara itu, belanja tak terduga diproyeksikan tetap terjaga pada kisaran Rp30–40 miliar per tahun sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Adapun belanja transfer tidak dialokasikan dalam periode ini, sehingga konsentrasi belanja diarahkan sepenuhnya pada kebutuhan internal pemerintahan dan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, arah kebijakan belanja daerah 2025–2030 menegaskan keseimbangan antara pembiayaan operasional rutin dan investasi pembangunan jangka panjang. Meski terdapat proyeksi defisit anggaran antara Rp77,05 miliar hingga Rp230,24 miliar per tahun, jumlah tersebut masih dalam kategori moderat dan dapat dikelola melalui optimalisasi pembiayaan daerah, pemanfaatan SiLPA, maupun sumber pembiayaan sah lainnya. Dengan demikian, struktur belanja ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan layanan publik sekaligus memperkuat pembangunan infrastruktur strategis demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.



Tabel 2.122
Proyeksi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2030

URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
	P - 2025	2026	2027	2028	2029	2030
BELANJA						
BELANJA OPERASI	4.155.936.114.856,00	4.116.788.735.646,90	4.093.010.747.422,90	4.163.330.476.812,90	4.234.351.122.412,90	4.126.002.701.512,90
Belanja Pegawai	2.010.901.443.276,00	1.989.911.677.755,00	1.989.911.999.131,00	1.992.997.300.379,00	1.997.314.346.926,00	1.998.567.299.868,00
Belanja Barang dan Jasa	1.988.067.633.469,00	1.969.020.391.226,90	1.968.183.406.726,90	1.964.417.834.868,90	1.976.121.433.921,90	1.980.520.060.079,90
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi						
Belanja Hibah	156.967.038.111,00	157.856.666.665,00	134.915.341.565,00	205.915.341.565,00	260.915.341.565,00	146.915.341.565,00
Belanja Bantuan Sosial						
BELANJA MODAL	933.018.235.144,00	959.672.876.353,10	1.077.026.704.577,10	1.251.297.690.187,10	1.492.728.724.587,10	1.892.556.373.487,10
Belanja Tanah	35.352.087.100,00	31.300.571.047,00	9.604.348.897,00	31.444.795.047,00	31.300.571.047,00	31.300.571.047,00
Belanja Peralatan dan Mesin	229.648.230.481,00	141.972.138.033,00	141.440.759.033,00	169.153.434.433,00	190.105.412.533,00	186.352.097.433,00
Belanja Gedung dan Bangunan	149.203.965.787,00	431.188.612.930,00	522.956.352.346,00	624.648.607.546,00	778.304.991.546,00	901.683.679.546,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	497.724.099.776,00	343.337.089.061,10	391.267.917.961,10	414.293.526.821,10	481.260.421.921,10	761.462.697.921,10
Belanja Aset Tetap Lainnya	13.149.852.000,00	9.941.498.942,00	9.824.360.000,00	9.824.360.000,00	9.824.361.200,00	9.824.361.200,00
Belanja Aset Lainnya	7.940.000.000,00	1.932.966.340,00	1.932.966.340,00	1.932.966.340,00	1.932.966.340,00	1.932.966.340,00
BELANJA TAK TERDUGA	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	40.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00
BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	5.128.954.350.000,00	5.106.461.612.000,00	5.200.037.452.000,00	5.444.628.167.000,00	5.757.079.847.000,00	6.048.559.075.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(230.243.575.021)	(204.359.785.000,00)	(77.050.000.000,00)	(87.600.000.000,00)	(144.700.000.000,00)	(152.000.000.000,00)

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)

2.5.6.2.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah Kota Makassar dalam periode 2025–2030 berperan penting tidak hanya sebagai instrumen teknis untuk menutup defisit APBD, tetapi juga sebagai strategi fiskal dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan relatif stabil, dari Rp230,24 miliar pada tahun 2025, turun menjadi Rp147,05 miliar pada 2027, lalu kembali meningkat hingga Rp168,00 miliar pada tahun 2030. Pola ini mencerminkan adanya ruang fiskal tambahan yang dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Jika pada tahun 2025 belum dialokasikan, maka pada 2026 mulai digunakan sebesar Rp5,00 miliar, meningkat signifikan menjadi Rp70,00 miliar pada tahun 2027, lalu menurun kembali menjadi Rp16,00 miliar pada tahun 2029 dan 2030. Fluktuasi ini menggambarkan adanya konsolidasi fiskal yang berhati-hati sesuai kebutuhan kas dan strategi pengelolaan keuangan daerah.

Secara neto, pembiayaan daerah tetap positif dengan nilai tertinggi pada awal periode sebesar Rp230,24 miliar di tahun 2025, dan terendah Rp77,05 miliar pada 2027, sebelum kembali naik menjadi Rp152,00 miliar pada 2030. Kondisi ini menegaskan bahwa pembiayaan daerah bukan sekadar angka pelengkap dalam laporan, melainkan wujud strategi fiskal yang berfungsi menjaga stabilitas keuangan, menopang pembiayaan infrastruktur serta pelayanan dasar, dan memastikan pembangunan Kota Makassar dapat berjalan berkelanjutan.



Tabel 2.123
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Makassar Tahun 2026-2030

URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
	P - 2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	230.243.575.021,13	209.359.785.000,00	147.050.000.000,00	153.600.000.000,00	160.700.000.000,00	168.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5.000.000.000,00	70.000.000.000,00	66.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO	230.243.575.021,13	204.359.785.000,00	77.050.000.000,00	87.600.000.000,00	144.700.000.000,00	152.000.000.000,00
SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)



2.5.7. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah guna mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan ke dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan Prioritas Ketiga, untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Makassar selama 5 tahun mendatang dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut:

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, dengan alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan alokasi minimal 10 persen dari APBD;
- c. Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, paling rendah 40 persen dari total belanja daerah tidak termasuk belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau kelurahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- d. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya.

Selain itu, Prioritas Pertama juga mencakup dukungan terhadap prioritas nasional. Prioritas Kedua dialokasikan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih tahun 2025–2030, sedangkan Prioritas Ketiga digunakan untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya.



Tabel 2.124
Kapabilitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kota Makassar untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2026 – 2030

No	Uraian	Proyeksi (Rp.)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Asli Daerah	2.206.350.556.000,00	2.328.491.805.000,00	2.458.822.151.000,00	2.605.116.991.000,00	2.774.802.583.000,00
2	Dana Alokasi Umum	1.859.580.029.000,00	1.940.819.986.000,00	2.026.019.852.000,00	2.115.376.600.000,00	2.209.097.043.000,00
3	Dana Bagi Hasil	150.955.295.000,00	153.974.401.000,00	157.053.890.000,00	160.194.967.000,00	163.398.866.000,00
	Total Penerimaan	4.216.885.880.000,00	4.423.286.192.000,00	4.641.895.893.000,00	4.880.688.558.000,00	5.147.298.492.000,00
	Dikurangi:					
4	Belanja Pegawai	1.989.911.677.755,00	1.989.911.999.131,00	1.992.997.300.379,00	1.997.314.346.926,00	1.998.567.299.868,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	2.226.974.202.245,00	2.433.374.192.869,00	2.648.898.592.621,00	2.883.374.211.074,00	3.148.731.192.132,00

Sumber: BPKAD Kota Makassar, Tahun 2025 (data diolah)



Berdasarkan proyeksi kerangka pendanaan Kota Makassar tahun 2026–2030, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan tren peningkatan dari Rp2,23 triliun pada 2026 menjadi Rp2,89 triliun pada 2030. Peningkatan ini mencerminkan adanya ruang fiskal yang semakin luas untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Total penerimaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2026, total penerimaan mencapai Rp4,22 triliun dan terus meningkat hingga Rp5,15 triliun pada 2030.

- PAD menjadi komponen terbesar dengan pertumbuhan stabil dari Rp2,21 triliun pada 2026 menjadi Rp2,77 triliun pada 2030.
- DAU juga meningkat secara bertahap dari Rp1,86 triliun menjadi Rp2,21 triliun pada periode yang sama.
- DBH, meskipun kontribusinya relatif kecil, tetap menunjukkan pertumbuhan dari Rp150,96 miliar menjadi Rp163,40 miliar.

Di sisi lain, belanja pegawai diproyeksikan relatif stabil pada kisaran Rp1,99 triliun per tahun, sehingga menjadi faktor pengurang utama dalam menghitung kapasitas riil. Stabilitas belanja pegawai ini menjadi peluang positif karena pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi akan langsung berkontribusi pada peningkatan kapasitas riil keuangan daerah.

Dengan demikian, tren ini memperlihatkan kekuatan fiskal Kota Makassar yang ditopang oleh pertumbuhan penerimaan yang konsisten. Tantangan utama yang tetap perlu dikelola adalah ketergantungan pada transfer pusat serta tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur belanja daerah. Untuk memperkuat kemandirian fiskal jangka panjang, langkah strategis yang dapat ditempuh antara lain:

1. Optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi.
2. Diversifikasi sumber penerimaan daerah melalui inovasi kebijakan fiskal.
3. Pengembangan kerja sama pembiayaan inovatif dengan sektor swasta dan lembaga keuangan.

Secara keseluruhan, kapasitas riil keuangan daerah Kota Makassar pada periode 2026–2030 menunjukkan prospek positif untuk mendukung pembangunan, dengan catatan penting pada pengelolaan belanja rutin agar ruang fiskal untuk program prioritas tetap terjaga.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

1. Masih Terdapat Tingkat Kerentanan yang Signifikan pada Sektor Energi, Air, dan Pangan

Kerentanan terhadap ketahanan energi tercermin dari ketergantungan pasokan energi listrik serta rendahnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan, termasuk wilayah kecamatan kepulauan yang belum terpenuhi kebutuhan energi secara optimal dan merata. Demikian pula layanan air bersih melalui jaringan perpipaan yang belum merata pada beberapa wilayah yang belum memiliki akses terhadap air bersih.

Ketahanan energi dan air, memerlukan penguatan kebijakan dan strategi dalam penyediaan infrastruktur energi berkelanjutan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air. Selain itu, diperlukan percepatan penerapan energi baru terbarukan, untuk memastikan ketahanan energi dan air yang lebih baik di Kota Makassar.

Mengingat keterbatasan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kota Makassar, kota ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dari hasil laut, pertanian, dan peternakan. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan angka yang stabil dan relatif tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pola Pangan Harapan (PPH) termasuk kategori



"Cukup", realita keterbatasan produksi pangan lokal tetap menjadi masalah. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada pasokan dari luar daerah untuk mencukupi konsumsi, yang berpotensi menimbulkan kerentanan dalam sistem pangan jika terjadi gangguan pada rantai pasok.

Masalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri ini diperburuk oleh tren fluktuasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang terjadi antara tahun 2020 dan 2024. Meskipun nilai IKP cenderung stabil, fluktuasi ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap pangan berkualitas tidak selalu terjamin, terutama bagi kelompok rentan. Stabilitas IKP yang tidak diimbangi dengan stabilitas prevalensi ketidakcukupan konsumsi menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi dan akses pangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Makassar harus mengambil kebijakan yang lebih tegas untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan lokal, meskipun dengan segala keterbatasan DDLH yang ada. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu harus ada upaya untuk memperkuat rantai pasok pangan dari luar daerah dan menciptakan kemandirian pangan yang lebih baik dengan diversifikasi sumber pasokan. Ketiga, program edukasi dan intervensi harus ditingkatkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) secara konsisten.

2. Belum Optimalnya Kualitas Kesehatan

Peningkatan indikator usia harapan hidup (UHH) di Kota Makassar bukan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Data BPS Sulawesi Selatan mencatat masih ada dua daerah yang UHH-nya berada di atas Kota Makassar yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara dengan UHH masing-masing 73,99 tahun dan 73,83 tahun. Oleh karena itu, isu tentang kesehatan masih perlu menjadi prioritas pembangunan daerah, begitupun Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2022 dan 2023 terjadi tren kenaikan angka Kematian ibu yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terlalu tua hamil (hamil di atas usia 35 tahun), terlalu muda untuk hamil (hamil di bawah usia 20 tahun), terlalu banyak (jumlah anak lebih dari 4), atau terlalu dekat (jarak antar kelahiran kurang dari 2 tahun).

Selama kurun waktu 2019-2023 terjadi peningkatan angka kematian ibu dari 37,12 menjadi 76,67. Peningkatan ini lebih banyak terkait dengan semakin rapi dan akuratnya pelaporan jumlah kematian ibu sejak sistem SISRUITE diterapkan. Dari data SISRUITE menunjukkan bahwa peningkatan angka kematian ibu ini terkait dengan peningkatan infeksi dan *sepsis*, perdarahan, kejadian *eclampsia* pada ibu yang hamil dan melahirkan. Masalah lain yang juga penting adalah masih adanya ibu yang melahirkan di rumah sehingga rentan mengalami komplikasi. Yang menjadi perhatian terkait penyakit menular bahwa di Kota Makassar bahwa angka keberhasilan pengobatan kasus Tuberkulosis (TB) karena perbandingan cakupan penemuan dan pengobatan Kasus TB dan angka keberhasilan pengobatan TB cenderung tinggi karena tahun 2023 berada di angka 82,10 persen. Hal ini disebabkan tingginya kasus penemuan baru TB di Kota Makassar karena adanya program yang gencar dalam penemuan kasus TB.

Dalam menjamin kesehatan nasional Kota Makassar masih belum mencapai 100% masih berada pada angka 99,71% artinya masinya ada 0,29% peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu belum dibayarkan oleh Pemerintah hal ini disebabkan dan hal ini disebabkan masih ada beberapa penduduk miskin yang belum memahami proses pendaftaran menjadi kepesertaan JKN dan proses validasi data kepesertaan Penerima



Bantuan Iuran/PBI APBD yang cukup memakan waktu lama sehingga berdampak pada kepesertaan dan pembayaran iuran yang tidak tepat waktu.

3. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan

Belum optimalnya kualitas pendidikan diindikasikan dari masih rendahnya jumlah satuan Pendidikan di Kota Makassar yg memenuhi standar minimum kemampuan literasi dimana proporsinya baru mencapai 21,71% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya kualitas guru pada beberapa satuan pendidikan yang berpengaruh pada kualitas pembelajaran, baik materi ajar maupun metode belajar. Belum optimalnya kualitas pendidik juga tercermin Harapan Lama Sekolah Kota Makassar yang pada tahun 2023 hanya menempatkannya pada peringkat 15, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Juga untuk Rata-Rata Lama Sekolah Kota Makassar, hanya berada pada peringkat 23 dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Untuk Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di tahun 2023, proporsinya masih berada pada 21,91 persen Atau 243.183. Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat juga terlihat dari masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang pada tahun 2023 hanya mencapai 73,78 atau kategori “memenuhi standar”, yang masih relatif rendah dibandingkan daerah lain dan provinsi. Untuk Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan juga cenderung turun. Untuk mengoptimalkan kualitas pendidikan penting untuk memprioritaskan implementasi wajib belajar 13 tahun, yang disertai dengan upaya komprehensif dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), serta peningkatan kualitas pembelajaran guna meningkatkan kualitas literasi dan numerasi, peningkatan kualifikasi pendidikan penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi, serta peningkatan kualitas pekerja yang ditunjukkan dengan kesesuaian bidang keahlian pekerja dengan bidang keahlian pendidikan menengah dan tinggi yang telah ditempuh.

4. Belum Optimalnya Kesejahteraan Sosial

Belum optimalnya Kesejahteraan Sosial diindikasikan dengan angka kemiskinan di tahun 2022 sebesar 4,58% mengalami kenaikan pada angka 5,07%. Tahun 2023, dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 4,97% tetapi secara jumlah penurunannya tidak signifikan meskipun secara nasional Kota Makassar berada pada kategori rendah, tertinggal dari 70 kabupaten/kota lainnya. Kemiskinan Kota Makassar cenderung naik dan tertinggal dari daerah lain, mencerminkan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, membuat pekerja harus bekerja dengan upah murah. Pada sisi perlindungan sosial, mengindikasikan kurang tepat sasaran dan tidak didesain secara cermat, sehingga tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Kesejahteraan sosial yang belum optimal juga tercermin dari kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang cukup tinggi, dimana indeks gini Kota Makassar yang di tahun 2024 mencapai 0,360, lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional berada pada angka 0,373 dan 0,381. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar konsumsi rumah tangga dikuasai oleh segelintir kelompok terkaya, sementara pengeluaran rendah didominasi oleh banyak rumah tangga, yang disebabkan adanya ketimpangan peluang, pekerjaan yang tidak merata, tingginya konsentrasi kekayaan, dan ketahanan ekonomi rendah. Untuk itu pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan skill sehingga memungkinkan mereka bekerja di pekerjaan berupah tinggi.



Kesenjangan sosial juga tercermin dari cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih rendah berada dibawah 50%, hal tersebut karena umumnya pekerja sektor informal mengalami kesulitan untuk menyisihkan sebagian pendapatan mereka membayar iuran karena berupah rendah. Untuk meningkatkan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga salah satunya melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal sebagai konteks inklusivitas terhadap penyandang disabilitas, menunjukkan Kota makassar masih belum inklusif dalam serapan tenaga kerja di sektor formal.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu perhatian pada penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan yang berupah UMR (Upah Minimum Regional), peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan kelompok miskin dan disabilitas serta keterlibatan sebanyak mungkin penyandang disabilitas dan pekerjaan-pekerjaan di sektor formal.

5. Masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan ekonomi hijau dan biru.

Pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pilar tersebut harus berjalan selaras agar pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan pemerataan manfaat serta menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang. Pendekatan ekonomi hijau dan ekonomi biru menjadi landasan strategis dalam mewujudkan hal tersebut, karena keduanya menekankan pentingnya efisiensi sumber daya, keadilan sosial, serta perlindungan lingkungan dalam proses pembangunan. Makassar memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi biru, kota ini masih dihadapkan pada tantangan signifikan. Industri pengolahan maritim masih lemah, dan pengelolaan lingkungan laut belum optimal. Di sisi lain, transisi menuju ekonomi hijau juga terkendala oleh masalah mendasar seperti penanganan sampah yang belum terintegrasi, kurangnya ruang terbuka hijau, dan kualitas air yang perlu ditingkatkan. Tanpa adanya tindakan nyata, potensi besar Makassar tidak akan terwujud, dan keberlanjutan lingkungan akan terus terancam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif harus menjadi prioritas. Hal ini menuntut adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, ini berarti adanya upaya nyata untuk meningkatkan kapasitas industri pengolahan maritim melalui investasi pada teknologi modern dan berkelanjutan, serta pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, pengelolaan lingkungan laut harus diperkuat, baik melalui regulasi yang lebih ketat maupun program konservasi. Di sisi lain, untuk mewujudkan ekonomi hijau, kota harus mempercepat implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang terintegrasi, membangun lebih banyak ruang terbuka hijau, dan meningkatkan kualitas air melalui perbaikan tata kelola. Upaya tersebut memerlukan kolaborasi komprehensif yang melibatkan seluruh pihak dalam pendekatan *hexahelix* pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, mitra pembangunan, dan media. Kolaborasi ini akan memastikan implementasi strategi ekonomi hijau dan biru berjalan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing di pasar global.

6. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang pesat di Kota Makassar menjadi pemicu utama rendahnya kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi secara langsung mendorong peningkatan timbulan sampah domestik.



Selain itu, pesatnya urbanisasi juga meningkatkan emisi gas buang dari aktivitas transportasi dan menuntut adanya pembangunan infrastruktur yang berpotensi mengurangi Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta meningkatkan beban terhadap ketersediaan dan kualitas air tanah. Peningkatan ini menciptakan dasar permasalahan lingkungan yang kompleks dan saling berkaitan.

Peningkatan timbunan sampah domestik dan industri membebani pengelolaan kota, sehingga terjadi penumpukan sampah di TPA. Peningkatan emisi gas buang kendaraan bermotor berakibat pada polusi udara. Di samping itu, masifnya pembangunan infrastruktur dan perumahan untuk menampung penduduk baru juga menekan ketersediaan RTH dan meningkatkan beban terhadap air tanah melalui eksploitasi berlebihan.

Kondisi saat ini menunjukkan adanya potensi penurunan emisi GRK di Kota Makassar pada tahun 2024 mencapai 237.763,95 Ton CO₂eq. Namun, peningkatan volume kendaraan telah menyebabkan titik-titik kemacetan yang konsisten di beberapa ruas jalan utama, sementara nilai IKLH berfluktuasi dan menurun. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami penurunan bertahap dari 77,22 pada tahun 2020 menjadi 74,92 di tahun 2024. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menurun dari 62,57 pada 2020 menjadi 61,41 di tahun 2024. Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) masih dalam kategori kurang dengan nilai 28,92. Jumlah sampah terkelola di fasilitas pengolahan sampah hanya 2,01 dan jumlah bank sampah aktif juga menurun.

Dampak dari kondisi ini terlihat dari peningkatan risiko kesehatan masyarakat dan penurunan kualitas air bersih serta kesuburan tanah akibat pencemaran. Secara keseluruhan, kondisi ini menyebabkan penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar. Selain itu, berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya mengurangi estetika kota tetapi juga melemahkan fungsi ekologisnya, seperti sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota, yang berdampak pada risiko banjir.

Respons yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini berfokus pada langkah-langkah strategis untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Respons ini mencakup penguatan sistem pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem terpadu yang modern, seperti mengurangi sampah dari sumbernya, meningkatkan daur ulang, dan menggunakan teknologi pengolahan sampah yang efisien. Selain itu, pengendalian emisi gas buang menjadi prioritas utama. Respons terhadap emisi GRK ini berfokus pada transisi menuju energi bersih dan pengurangan emisi dari sektor transportasi dan limbah. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret seperti mendorong penggunaan energi terbarukan, misalnya melalui pemasangan panel surya, serta mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Peningkatan RTH juga diperlukan dengan merevitalisasi RTH yang sudah ada dan menambah RTH baru di area padat penduduk. Secara keseluruhan, semua tindakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan strategi pembangunan kota, sehingga tercapai target penurunan emisi GRK yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

7. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang belum Adaptif dan Integratif

Belum optimalnya tata kelola yang adaptif dan integratif tercermin dari beberapa parameter. Salah satu diantaranya yaitu Indeks Survei Penilaian Integritas Kota Makassar pada tahun 2024 yang berada pada nilai 62,33 menurun dari tahun sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar secara umum memiliki keberadaan korupsi dan



risiko korupsi yang tinggi. Atas dasar tersebut, KPK memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi.

Parameter kedua yang menunjukkan tata kelola pemerintahan yang lemah adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang belum berjalan optimal. Tahun 2024, Kota Makassar mendapat nilai IRB 76,78 meskipun termasuk kategori “baik” yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar berhasil memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing. Namun demikian pada sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, dan belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Penurunan juga terjadi pada Indeks Maturitas SPIP dimana pada tahun 2024 berada di angka 3,100. Penurunan ini antara lain disebabkan pengendalian intern pemerintah Kota Makassar yang belum sepenuhnya mampu mengarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selain itu manajemen risiko pemerintah Kota Makassar juga belum sepenuhnya diimplementasikan dan dijadikan dasar dalam penilaian kinerja serta belum memanfaatkan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan.

Selain ketiga parameter di atas, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Makassar juga mengalami penurunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. IPP Kota Makassar berada di angka 3,21 pada tahun 2024. Meskipun masih termasuk dalam kategori “baik” tetapi Pemerintah Kota Makassar perlu fokus terhadap beberapa aspek termasuk diantaranya kebijakan pelayanan yang di dalamnya terdapat dimensi standar pelayanan, maklumat pelayanan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, inovasi serta sistem informasi pelayanan publik.

Terkait sistem informasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kota Makassar menghadapi tantangan dengan adanya perkembangan teknologi digital dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan publik yang efektif. Permasalahan ini diperparah oleh keterlambatan adopsi teknologi digital dalam sistem pemerintahan dan kurangnya integrasi data serta sistem antar-perangkat daerah. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2024, hanya 49% layanan publik yang telah diselenggarakan secara daring dan terintegrasi, yaitu sebanyak 21 dari 43 layanan publik daring. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat, tidak transparan, dan tidak efisien. Hal ini diperparah oleh adanya duplikasi data dan inefisiensi anggaran, yang merupakan akibat langsung dari kurangnya koordinasi antar-perangkat daerah. Pengembangan aplikasi yang dilakukan secara terpisah tanpa memperhatikan interoperabilitas semakin memperburuk keadaan, menyebabkan kesulitan dalam menyatukan berbagai sistem yang saling terkait.

Kondisi ini menimbulkan dampak terhadap efektivitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Akibat dari kurangnya koordinasi dan sistem yang terpisah, terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik yang terasa lambat dan berbelit. Kondisi ini juga memicu inefisiensi anggaran karena adanya duplikasi data dan sistem yang tidak terintegrasi. Selain itu, rendahnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta sulitnya pengambilan keputusan berbasis data yang akurat menjadi dampak dari data yang tidak terkelola dengan baik. Untuk merespons permasalahan ini, diperlukan pembangunan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government) yang terintegrasi, peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam literasi digital, dan penyusunan regulasi yang mendukung tata kelola digital.



8. Sistem Hukum dan Keamanan Ketertiban serta Demokrasi belum Sepenuhnya Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Aman Masyarakat

Keamanan, ketertiban serta demokrasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan rasa aman masyarakat, terindikasikan dari jumlah aksi tindak kriminalitas di Kota Makassar yang masih tinggi. Jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2023 sebanyak 4.195 kasus (crime total) dan angka kriminalitas (crime rate) sebesar 287 tindak kejahatan kriminalitas per 100.000 penduduk di Kota Makassar. Faktor yang mempengaruhi adalah arus urbanisasi di Kota Makassar yang belum sepenuhnya terkendali khususnya pada daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Faktor lain adalah belum optimalnya pengentasan kemiskinan, dan penanganan pengangguran terbuka khususnya pada usia angkatan kerja muda yang rentan melakukan aksi tindak kriminalitas. Dari sisi pelaksanaan demokrasi, tercermin dari keterwakilan Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD, yang berada pada angka 26%, masih rendah jika dibandingkan amanah peraturan perundang-undangan yang sebesar 30%. Keterlibatan perempuan di parlemen masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti struktural, kultural, dan institusional. Dari proporsi Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD, juga masih rendah dimana hingga Tahun 2022 tidak ada satu pun Perda yang merupakan inisiatif DPRD. Pada tahun 2023, dari 10 (sepuluh) Perda yang diundangkan, sebanyak 5 (lima) perda inisiatif dari DPRD. Dari sisi persentase perempuan pengurus Partai Politik, keterwakilannya masih rendah, belum memenuhi kuota 30% seperti yang diamanatkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Penguatan terhadap ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh serta demokrasi dapat diwujudkan dengan upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal ini membutuhkan partisipasi dan pelibatan masyarakat termasuk dalam hal peningkatan partisipasi yang inklusif dalam partai politik. Menjaga Ketertiban umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat guna mendukung iklim investasi yang kondusif dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

9. Masih Rendahnya Implementasi Beragama Maslahat dan Kurang Berkembangnya Kebudayaan Maju

Belum optimalnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju salah satunya tercermin dari masih rendahnya Indeks Kota Toleran (IKT) yang diperoleh Kota Makassar. Pada tahun 2020, Kota Makassar mengalami beberapa peristiwa yang dinilai mencederai toleransi. Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga Kota Makassar dimasukkan dalam 10 kota dengan indeks paling rendah pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, di Kota Makassar telah terjadi 11 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Posisi Kota Makassar sebagai 10 kota dengan IKT paling rendah bertahan hingga tahun 2021. Kota Makassar baru keluar dari 10 kota IKT terbawah di tahun 2022 dengan nilai 4,517 dan menunjukkan tren meningkat di tahun 2023 dengan nilai IKT 4,787. Pada Tahun 2024 nilai IKT Kota Makassar kembali menurun menjadi 4,363 dan kembali masuk dalam 10 kota dengan skor toleransi terendah.

Masih rendahnya beragama maslahat juga perlu didukung dengan alokasi anggaran yang cukup, Pemerintah Kota Makassar dapat melaksanakan berbagai program yang mendukung dialog antar umat beragama, meningkatkan pemahaman antar kelompok agama, dan mengurangi potensi konflik sosial yang akan terjadi. Dengan alokasi anggaran yang cukup, Pemerintah Kota Makassar dapat melaksanakan berbagai program yang mendukung dialog antar umat beragama, meningkatkan pemahaman antar kelompok agama, dan mengurangi potensi konflik sosial yang akan terjadi.



Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan di masyarakat yang multikultural. Dengan proporsi anggaran yang mencukupi, berbagai program yang mendukung seperti dialog antar umat beragama, kegiatan bersama, dan upaya untuk memperkuat pemahaman lintas agama dapat terlaksana. Dalam konteks ini diperlukan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika dan moral, demikian halnya penguatan kerukunan antar umat beragama, termasuk pembenahan ekosistem toleransi dan dialog pembauran kebangsaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perkuatan keimanan dan pemberdayaan umat.

Dalam konteks pemajuan kebudayaan, perlu diperhatikan optimalisasi tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif, pengembangan inovasi ekonomi berbasis perlindungan dan pemanfaatan seni budaya, penguatan pelestarian nilai-nilai budaya positif di tengah masyarakat dan keluarga, penguatan koordinasi, kerja sama dan sinergitas antara pemerhati budaya dengan pemerintah daerah dalam upaya pembinaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, sinergitas dalam perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta pengembangan informasi teknologi digital dalam mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

10. Masih Tingginya Ketimpangan Gender serta Masih Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga, Perlindungan Anak dan Pembangunan Pemuda

Belum optimalnya pembangunan keluarga, perlindungan anak, pembangunan pemuda dan ketimpangan gender, terindikasi dari beberapa faktor. Tahun 2022, pembangunan keluarga berada pada angka 84,85 atau masuk pada kategori baik (tangguh), namun angka tersebut tidak menggambarkan kecilnya permasalahan keluarga di Kota Makassar. Tingginya tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga tergambar dari jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 sebanyak 2.030 kasus dan kasus kekerasan sebanyak 504 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga di Kota Makassar masih penanganan secara bertahap.

Faktor lain tercermin dari rendahnya perlindungan anak, dimana capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) masih jauh dibawah target nasional. Klaster IPA yang masih perlu diperhatikan adalah Hak Sipil dan Kebebasan dengan nilai 47,32 dan Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan nilai 39,64. Kondisi tersebut perlu upaya kolaboratif multi Sektor peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Meskipun secara relatif IPA Kota Makassar lebih tinggi dari provinsi dan semua kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, tapi angka tersebut masih berada dibawah target nasional. Indeks Ketimpangan Gender berada dibawah angka nasional dan provinsi, berada pada nilai 0,188. Masih terdapat ketimpangan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan yang masih rendah dan keterwakilan perempuan dalam legislatif yang belum memenuhi angka minimal 30%. Kondisi tersebut tentunya Pemerintah Kota Makassar dan masyarakat bersinergi untuk menciptakan kesetaraan gender terutama Pasar tenaga Kerja, serta meningkatkan peran perempuan dalam pendidikan politik sehingga dapat menciptakan daya saing yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan Pemuda belum optimal yang diindikasikan dari IPP Kota Makassar tahun 2023 mencapai 54,50, yang lebih rendah dari IPP Nasional



yang sebesar 55,33. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan dengan pembinaan dan pengembangan bakat pemuda serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas kepemudaan.

11. Masih Rendahnya Koperasi yang Memenuhi Kriteria Aktif.

Kondisi koperasi di Kota Makassar menunjukkan gambaran yang paradoks. Di satu sisi, ada pertumbuhan positif pada jumlah koperasi sehat, yang meningkat signifikan dari 9,82% di tahun 2019 menjadi 22,31% di tahun 2023. Tren ini mengindikasikan bahwa sebagian koperasi telah berhasil beradaptasi, meningkatkan kualitas manajemen, dan memanfaatkan peluang seperti digitalisasi pasca-pandemi. Hal ini juga menunjukkan keberhasilan pembinaan dari pemerintah dan kesadaran anggota yang semakin tinggi. Kenaikan persentase ini adalah sinyal baik bahwa ada potensi besar bagi koperasi untuk menjadi pilar ekonomi yang lebih kuat. Namun, di sisi lain, data menunjukkan bahwa dari 1.976 koperasi yang ada, hanya 1.059 (53,59%) yang berstatus aktif. Ini berarti hampir separuh (sekitar 46,41%) dari seluruh koperasi di Makassar berada dalam kondisi non-aktif. Angka tersebut mencerminkan tantangan besar dan kelemahan fundamental dalam ekosistem koperasi. Koperasi yang tidak aktif disebabkan manajemen yang buruk, kurangnya partisipasi anggota, atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi koperasi, diperlukan pendekatan yang terstruktur. Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan audit menyeluruh terhadap koperasi yang tidak aktif. Bangun platform digital yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar-koperasi, serta mempromosikan produk-produk mereka kepada konsumen yang lebih luas.

12. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan pengangguran Kota Makassar mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4,19 persen dan tingkat nasional sebesar 4,91 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan keberhasilan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satu faktor berkontribusi yaitu kembali beroperasinya berbagai sektor ekonomi, pertumbuhan signifikan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta peningkatan investasi di sektor properti dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan. Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Makassar menunjukkan pola yang stabil dengan sedikit fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023, namun mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024 hingga mencapai 62,04%. Kenaikan tajam tersebut mengkonfirmasi adanya dorongan kuat dari masyarakat untuk terlibat dalam pasar kerja. Hal ini terjadi seiring dengan pemulihan ekonomi yang telah mencapai titik penuh, yang kemudian menciptakan lebih banyak peluang kerja dan mendorong keberanian masyarakat untuk kembali memasuki dunia kerja. Secara khusus, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Kota Makassar juga menunjukkan tren positif, meskipun sempat fluktuatif. Pola ini mengarah pada peningkatan signifikan di tahun terakhir, yang mencerminkan membaiknya ekonomi, peningkatan akses terhadap pekerjaan yang fleksibel, serta program-program pemberdayaan dan pelatihan yang lebih efektif dalam menjangkau perempuan di berbagai lapisan masyarakat.

13. Belum Optimalnya Kinerja Investasi PMA dan PMDN

Perkembangan investasi di Kota Makassar, baik dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Meskipun pada



beberapa tahun tertentu terdapat lonjakan investasi, secara umum tren ini mencerminkan belum optimalnya iklim investasi di kota ini. Ketidakpastian pertumbuhan, minimnya stabilitas kebijakan, dan keterbatasan dukungan infrastruktur menjadi faktor utama yang menghambat investor untuk menanamkan modal secara berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada kurang maksimalnya kontribusi Kota Makassar terhadap total investasi di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) memungkinkan pemerintah kota untuk bermitra dengan swasta dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur berskala besar sehingga pemerintah tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sementara Kerjasama Pembiayaan Infrastruktur (KSPI) menjadi kerangka kerja untuk proyek-proyek yang melibatkan langsung sektor swasta dan pemerintah pusat membantu mengalirkan investasi nasional ke proyek-proyek strategis di Makassar. Dengan memanfaatkan skema KPBU dan KSPI secara efektif, Pemerintah Kota Makassar dapat mengikis kendala investasi yang ada. Kemitraan ini menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan menciptakan ekosistem investasi yang lebih stabil dan menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

14. Pendapatan per Kapita yang Tidak Merata

Pendapatan per kapita di Kota Makassar menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antar wilayah dan kelompok masyarakat, meskipun secara umum mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif akan tetapi distribusi pendapatan belum merata. Di beberapa kawasan pusat kota, penduduk menikmati fasilitas dan akses ekonomi yang lebih baik, sementara masyarakat di pinggiran kota masih berjuang dengan keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang harus segera diatasi agar pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh. Dari keseluruhan sektor, terdapat tiga lapangan usaha utama yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Makassar. Ketiganya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran termasuk Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Industri Pengolahan, dan sektor Konstruksi. Ketiga sektor ini secara konsisten mencatatkan kontribusi tertinggi terhadap total nilai PDRB. Pada tahun 2024, kontribusi sektor Perdagangan mencapai 20,02% atau sekitar Rp48,68 triliun, disusul oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 18,99% atau sebesar Rp46,17 triliun, dan sektor Konstruksi sebesar 17,29% atau sekitar Rp42,03 triliun. Meskipun sektor ini menciptakan banyak lapangan kerja, sebagian besar posisi berada di tingkat buruh dengan upah minimum yang rendah. Para pekerja di industri pengolahan, seperti makanan dan minuman atau tekstil tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan produktivitas sementara pemilik modal dan manajer tingkat atas menikmati pendapatan yang jauh lebih tinggi. Kontribusi pada sektor Konstruksi, dengan beberapa proyek infrastruktur dan pembangunan properti menyerap banyak tenaga kerja, namun sebagian besar adalah pekerja kasar atau buruh harian dengan upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan sosial yang memadai. Pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah agar tidak tertinggal dalam arus perkembangan kota.

15. Rendahnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan

Pertambahan jumlah penduduk Kota Makassar tidak diimbangi dengan pertambahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana infrastruktur. Hal ini berdampak pada timbulnya permasalahan – permasalahan diantaranya



persoalan banjir yang sangat berkaitan dengan drainase. Titik genangan yang ada di Kota Makassar sebanyak 128 titik dengan luas genangan 8.213,24 Ha tersebar pada 14 Kecamatan. Kondisi drainase pada beberapa wilayah seperti Antang dan pettarani sudah tidak mampu menampung air hujan pada saat hujan deras. Untuk rumah tidak layak huni masih ada sebanyak 8.140 Rumah tangga yang belum menempati rumah layak huni. Hal ini disebabkan pembangunan rumah swadaya yang tidak terkendali. Kondisi akses air minum di Kota Makassar tidak hanya terletak pada ketersediaan, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan. Dari total 238.610 sambungan Rumah rumah (SR) perpipaan, hanya 64,58% atau 84.757-unit yang memenuhi aspek kualitas air minum. Hal ini mendorong sebagian besar rumah tangga untuk bergantung pada sumber air non-perpipaan seperti sumur bor, air sungai, dan air hujan yang belum terjamin kebersihannya. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa masih ada satu kecamatan yaitu Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang belum mendapatkan layanan air perpipaan. Tantangan di bidang sanitasi adalah rendahnya pemahaman masyarakat serta kemampuan ekonomi untuk mengikuti penyedotan lumpur tinja secara berkala maksimal 3 tahun sekali dan kurangnya pemeliharaan ipal Kawasan maupun ipal komunal. Dari 161 ipal yang dibangun hanya 68,3% yang berfungsi sehingga akses sanitasi aman hanya 8,45%. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur drainase, rumah layak huni, air minum dan sanitasi bisa berdampak pada risiko kesehatan dan menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Terkait infrastruktur jalan dan trotoar masih dibutuhkan adanya peningkatan kualitas berupa pemeliharaan. Jalan masih 98% dalam kondisi baik tetapi apabila tidak dipertahankan akan menurun kualitasnya karena penambahan jumlah kendaraan yang tidak terkendali. Demikian pula halnya dengan trotoar yang merupakan bagian dari jalan raya panjangnya hanya 40,35% dari panjang jalan. Selain itu kondisinya juga tidak representatif karena tidak ramah terhadap kaum rentan. Kondisi kantor - kantor Pemerintah juga masih banyak yang bermasalah yang mana hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan. Saat ini, kualitas pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari antrian panjang, fasilitas kantor yang sudah tua, ruang tunggu yang sempit dan kurang nyaman, serta lokasi yang sulit dijangkau oleh sebagian warga. Situasi ini diperburuk oleh beban kerja yang tinggi pada para aparat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Akibatnya, proses birokrasi menjadi lambat, tidak efisien, dan berisiko menurunkan tingkat kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari 153 Kantor Kelurahan masih ada 49 Kantor Lurah yang bermasalah dengan alas haknya. Hal ini juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja pelayanan karena adanya kebijakan untuk tidak diintervensi melalui APBD karena bukan aset Pemerintah Kota.

2.6.2. Isu Strategis Daerah

1. Pencapaian Target-Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan global yang memuat 17 (tujuh belas) tujuan (goals) global sampai tahun 2030. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind”. Terdapat 241 indikator Pencapaian TPB secara global yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, sebanyak 319 indikator, dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap 303 indikator, pemerintah



provinsi 235 indikator, pemerintah kabupaten 220 indikator, dan pemerintah kota 222 indikator, dan indikator yang relevan di Kota Makassar berjumlah 114. Dari 114 indikator tersebut, sebanyak 69 indikator (60,53%), telah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, 39 indikator (34,21%), telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Sedangkan untuk Indikator TPB yang tidak ada data (NA) berjumlah 6 indikator atau 5,26% dan Indikator TPB Kota Makassar, yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, tidak tersedia datanya. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, dan KLHS RPJMD 2025-2029, pencapaian TPB/SDGs merupakan arahan dan rekomendasi program untuk menjadi prioritas dalam RPJMD.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar pada Tujuan 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia yang Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB) untuk mengentaskan Angka Kematian Ibu (AKI), angka keberhasilan pengobatan kasus Tuberkulosis (TB), menjamin kesehatan nasional Kota Makassar khususnya masyarakat penerima PBI yang menjadi perhatian pembangunan Kesehatan Nasional. Yang menjadi perhatian terhadap pencapaian TPB/SDGs yang ada pada tujuan 4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, Pemerintah kota Makassar harus memprioritaskan wajib belajar 13 tahun serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan cenderung turun, hal ini akan mencerminkan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah, membuat pekerja harus bekerja dengan upah murah yang mempengaruhi Peningkatan Angka Kemiskinan Kota Makassar.

2. IPTEKIN dan Digitalisasi

Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 menjelaskan bahwa transformasi ekonomi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu penguatan transformasi antara tahun 2025 dan 2029, akselerasi transformasi pada 2030-2034, serta ekspansi global 2035-2039 dan perwujudan Indonesia Emas 2040-2045. Tahap pertama atau penguatan transformasi ekonomi akan mulai berlangsung tahun 2025. Dalam fase ini, hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja jadi fokus pemerintah demi mengejar pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1 persen. Kemajuan IPTEKIN sangat penting untuk membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan IPTEKIN secara efektif, SDM dapat menjadi lebih kompeten, produktif, dan inovatif, sehingga berkontribusi pada kemajuan ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, perkembangan IPTEKIN yang begitu pesat mendorong dunia saat ini memasuki digitalisasi. Digitalisasi ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah saat ini dan di masa mendatang. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi bergerak menuju digitalisasi dan otomatisasi. Harapannya akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari proses produksi, begitu halnya aktivitas konsumen menjadi mudah dan nyaman. Dalam proses pembangunan di berbagai bidang, digitalisasi dan otomatisasi telah banyak digunakan seperti, pertahanan dan keamanan dengan *cyber security*, inklusi keuangan dengan *fin-tech*, pendidikan dengan *e-learning*, pengembangan UMKM dengan adanya e-commerce, artificial intelligence (AI) untuk pengajaran dan pembelajaran, pertanian melalui mekanisasi alat mesin pertanian (Alsintan), digitalisasi yang



mendukung konektivitas, inovasi mesin multifungsi, digitalisasi di sektor pelayanan publik, teknologi hijau hingga penyediaan energi terbarukan.

Dapat disimpulkan bahwa selain membawa dampak positif, digitalisasi bisa berpotensi mendisrupsi berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya menghilangkan jenis pekerjaan hingga berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Berbagai studi mengungkapkan hal tersebut bahwa sektor-sektor pekerjaan yang berisiko hilang karena terdampak adanya digitalisasi dan otomatisasi seperti sektor perhotelan dan restoran, perdagangan eceran, serta konstruksi dan manufaktur. IPTEKIN dan digitalisasi ini memerlukan kesiapan adaptif dari masyarakat di Kota Makassar.

3. Implementasi Ekonomi Hijau dan Biru

Pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk mengakibatkan implementasi ekonomi hijau dan biru di Makassar masih belum optimal sehingga menciptakan risiko serius terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan dasar seperti energi, pangan, dan ruang hidup terus meningkat, namun kondisi ini diperburuk oleh degradasi ekosistem pesisir, pengelolaan sampah yang tidak efisien, keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan penurunan kualitas air. Hal tersebut secara sistemik mengancam fondasi pembangunan berkelanjutan dan potensi ekonomi maritim, berisiko menurunkan daya saing global, dan menghilangkan peluang investasi. Untuk mengatasinya diperlukan langkah strategis dan kolaboratif. Penguatan industri maritim berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan, percepatan pengelolaan sampah terintegrasi, serta peningkatan kualitas dan jumlah RTH sangat penting dan harus didukung oleh kolaborasi hexahelix yang melibatkan berbagai pihak, serta edukasi dan pelatihan tenaga kerja lokal untuk menciptakan green jobs. Tanpa respons yang cepat dan terintegrasi, Makassar akan terus menghadapi tekanan lingkungan yang besar, tertinggal dari tren global, dan kehilangan kesempatan untuk menjadi kota yang maju dan lestari.

4. Kinerja Koperasi Terhadap Potensi Ekonomi Lokal.

Belum optimalnya kinerja koperasi di Kota Makassar akibat manajemen lemah, rendahnya partisipasi anggota, dan ketidakmampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi dan digitalisasi, sehingga mengurangi potensi ekonomi lokal dan menurunkan daya saing UMKM. Kinerja koperasi di Kota Makassar masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat kelemahan manajerial yang menghambat pertumbuhan. Terdapat beberapa koperasi yang beroperasi dengan tata kelola yang tidak profesional, kurangnya transparansi, dan minimnya inovasi, sehingga sulit bersaing di pasar modern. Manajemen yang lemah ini berdampak langsung pada operasional harian, mulai dari pencatatan keuangan yang tidak akurat hingga pengambilan keputusan yang lambat. Akibatnya, koperasi kesulitan mendapatkan kepercayaan dari calon anggota maupun lembaga keuangan, membatasi akses mereka terhadap modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha. Selain itu rendahnya partisipasi anggota menjadi faktor krusial yang melemahkan koperasi. Banyak anggota tidak terlibat aktif dalam kegiatan maupun rapat-rapat koperasi, menganggapnya hanya sebagai tempat pinjaman atau simpanan semata. Kurangnya rasa kepemilikan membuat koperasi kehilangan salah satu kekuatan utamanya, yaitu kolaborasi dan gotong royong. Padahal, partisipasi aktif anggota sangat penting untuk meningkatkan permodalan, mengawasi kinerja pengurus, dan memastikan bahwa koperasi benar-benar melayani kebutuhan anggotanya. Tanpa partisipasi yang kuat, koperasi sulit berkembang dan berinovasi.



Ketidakmampuan koperasi dalam beradaptasi dalam era digital semakin memperparah kondisi. Sebagian besar koperasi di Makassar masih menggunakan sistem manual dan konvensional, jauh tertinggal dari perkembangan teknologi sehingga kehilangan jangkauan pasar yang lebih luas dan tidak mampu menawarkan layanan yang efisien kepada anggota. Ketidakmampuan beradaptasi membuat koperasi menjadi kurang relevan yang pada akhirnya mengurangi potensi ekonomi lokal dan melemahkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian kota.

5. Penguatan Kapasitas UMKM dalam Menciptakan Lapangan Kerja

Penyerapan tenaga kerja di Kota Makassar masih belum optimal, menuntut perbaikan mendasar dalam tata kelola dan program ketenagakerjaan. Lapangan kerja yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan kualifikasi angkatan kerja, menciptakan kesenjangan antara permintaan dan penawaran. Kondisi ini diperburuk oleh birokrasi yang lambat dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga informasi lowongan kerja sulit diakses oleh masyarakat luas. Untuk mengatasinya diperlukan tata kelola ketenagakerjaan yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi, yang mampu mempertemukan kebutuhan industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh para pencari kerja. Salah satu kunci untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah dengan menguatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan motor penggerak ekonomi lokal dan memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun banyak UMKM di Makassar masih menghadapi tantangan keterbatasan modal, kurangnya akses ke pasar, dan minimnya pengetahuan manajemen modern. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program pendampingan, memberikan pelatihan kewirausahaan, serta memfasilitasi akses permodalan dan teknologi bagi UMKM. Dengan UMKM yang lebih tangguh dan produktif, daya serap tenaga kerja akan meningkat secara signifikan. Banyak angkatan kerja memiliki kualifikasi yang tidak lagi relevan dengan tuntutan pasar kerja terutama di sektor-sektor yang berkembang pesat seperti ekonomi digital dan industri kreatif. Pemerintah dan swasta perlu berkolaborasi untuk menyelenggarakan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga berdaya saing di masa depan.

6. Fluktuasi Investasi PMA dan PMDN

Kinerja investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Makassar masih belum optimal. Salah satu penyebab utamanya adalah fluktuasi investasi yang tinggi, di mana masuknya modal tidak stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor yang mencari lingkungan bisnis yang prediktif dan aman. Kondisi diperparah oleh minimnya kepastian kebijakan di mana regulasi sering berubah-ubah atau implementasinya tidak konsisten yang membuat investor ragu untuk menanamkan modal jangka panjang sehingga kontribusi kota terhadap total investasi provinsi menjadi rendah, menghambat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi kendala utama dalam menarik investasi meskipun Makassar dikenal sebagai gerbang Indonesia timur, ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pada jaringan jalan, pasokan listrik yang tidak stabil, dan minimnya akses terhadap air bersih di beberapa kawasan industri membuat biaya operasional bagi perusahaan menjadi tinggi. Untuk mengatasi permasalahan diperlukan langkah strategis dan terpadu dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dengan memberikan kepastian kebijakan



transparan. Penyederhanaan birokrasi dan perizinan investasi juga sangat krusial agar prosesnya menjadi lebih cepat dan efisien. Peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama terutama pembangunan jalan, perluasan jaringan listrik, dan peningkatan kualitas pelabuhan akan membuat Makassar lebih kompetitif.

7. Keterbatasan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan masih jauh dari merata disebabkan oleh dominasi sektor-sektor tertentu seperti Perdagangan, Industri Pengolahan, dan Konstruksi. Ketiga sektor-sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian dan berkontribusi besar pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), keuntungan yang dihasilkan cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal dan manajemen tingkat atas. Sementara sebagian besar pekerja yang berada di sektor-sektor ini hanya menerima upah minimum atau bahkan upah yang tidak stabil terjadi kesenjangan sosial-ekonomi yang signifikan. Sektor Perdagangan memperlihatkan ketimpangan yang nyata. Perusahaan besar, pusat perbelanjaan modern, dan distributor besar meraih keuntungan yang masif, sementara para pedagang kecil dan pemilik warung tradisional hanya mendapatkan margin keuntungan yang sangat tipis dan minimnya jaminan sosial. Pada sektor Industri Pengolahan menghadapi hal yang sama menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sektor Konstruksi tidak jauh berbeda banyak menyerap tenaga kerja tetapi buruh harian dengan upah yang tidak stabil dan tanpa jaminan kerja yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergerakan pertumbuhan ekonomi tetapi distribusi pendapatan yang terjadi tidak adil dan merata.

8. Sistem Hukum, Keamanan dan Ketertiban serta Implementasi Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Sistem hukum, keamanan dan ketertiban menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Adanya gangguan terhadap keamanan dan peristiwa kriminal yang terjadi akan menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat, dan meningkatkan kecemasan pemerintah. Hal ini akan berdampak pada perekonomian terutama minat investor terhadap Kota Makassar. Sistem hukum akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban dengan memberikan batasan perilaku, menjamin rasa aman, mencegah konflik, melindungi hak individu, dan membangun kepercayaan publik, sehingga menciptakan masyarakat yang taat akan hukum.

Keamanan dan ketertiban juga erat kaitannya dengan konsep beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju karena nilai-nilai agama yang mengajarkan kebaikan, toleransi, dan kerjasama yang dapat menjadi landasan kuat bagi perkembangan budaya yang positif dan progresif. Budaya yang maju ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Makassar terhadap kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya yang belum optimal dan belum melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu pentingnya literasi budaya yang komprehensif akan meningkatkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai budaya. Dengan memahami agama secara moderat dan berkebudayaan maju, potensi konflik dapat diminimalkan karena akan mendorong sikap saling menghormati dan menjaga keseimbangan dalam menjalankan keyakinan yang pada akhirnya secara signifikan akan mendukung stabilitas keamanan.



9. Ketimpangan Gender, Pembangunan Keluarga Perlindungan Anak dan Pembangunan Pemuda

Isu terkait ketimpangan gender, pembangunan keluarga dan perlindungan anak merupakan isu global hal terkait dengan pentingnya peran keluarga sebagai unit terkecil dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk menghadapi tantangan tersebut Pemerintah Kota Makassar bersama-sama dengan masyarakat perlu memberikan edukasi yang tepat mengenai peran sosial yang sesuai dengan gender masing-masing individu, sehingga budaya patriarki bukan sebagai cara memunculkan ketimpangan gender, meningkatkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini mencakup edukasi yang komprehensif untuk mengubah norma sosial, meningkatkan pengetahuan tentang hak perempuan, dan mendorong aksi pencegahan kekerasan terhadap perempuan secara efektif. Di sisi lain, penguatan kebijakan dan penegakan hukum penting dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.

Adapun yang menjadi tantangan pembangunan keluarga yaitu perceraian, masalah Stunting, Perkawinan Usia Anak, Kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kasus hukum pada anak. Pembangunan Keluarga erat kaitannya perlindungan anak yaitu mencegah terjadinya penelantaran, kekerasan dan pelecehan terhadap anak sehingga Pembangunan Keluarga merupakan isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Keluarga berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sangat menentukan kualitas bangsa, Generasi masa depan menciptakan generasi muda dalam pembangunan tentunya pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berkualitas dan terintegrasi mulai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan tidak diskriminasi.

10. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Integratif, dan Berbasis Data

Transformasi digital menjadi isu strategis yang krusial untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal berpotensi mempercepat proses birokrasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dampak positif dari transformasi digital ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Meskipun demikian, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kota Makassar belum optimal karena masih menghadapi tantangan utama. Tantangan ini bersumber dari belum optimalnya kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kota Makassar dalam hal kemampuan digital, analisis data, dan pola pikir adaptif. Banyak aparatur yang belum sepenuhnya menguasai teknologi baru atau terbiasa dengan pengambilan keputusan berbasis data, yang menyebabkan resistensi terhadap perubahan dan adopsi sistem baru.

Selain itu, tantangan juga datang dari kurangnya integrasi antar perangkat daerah. Perangkat daerah seringkali beroperasi dalam unit terpisah yang tidak terhubung satu sama lain. Setiap unit memiliki data, sistem, dan kebijakan sendiri yang mengakibatkan data tidak terintegrasi, tumpang tindih kebijakan, dan pelayanan publik yang rumit. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat, tidak transparan, dan tidak efisien. Oleh karena itu, kondisi ini perlu diatasi melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.



11. Peningkatan Daya Dukung Lingkungan dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi masif di Kota Makassar memberikan tekanan luar biasa pada daya dukung lingkungan dan kualitas layanan infrastruktur. Peningkatan populasi memicu konversi lahan hijau, termasuk lahan pertanian dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjadi area terbangun. Hal ini tidak hanya mengurangi area resapan air alami, yang meningkatkan risiko banjir, tetapi juga meningkatkan timbunan sampah dan emisi gas buang dari sektor transportasi.

Semakin langkanya lahan di pusat kota juga menyebabkan harga properti melonjak, memaksa penduduk berpenghasilan rendah dan menengah untuk tinggal di pinggiran kota. Kondisi ini memicu masalah transportasi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan mendorong munculnya permukiman kumuh, baik di bantaran sungai maupun di kawasan pesisir.

Di sisi lain, penambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan. Masalah banjir, yang sudah berlangsung bertahun-tahun di daerah Antang, Pettarani, dan Biringkanaya, menjadi salah satu isu utama. Selain itu, akses terhadap kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi, dan rumah layak huni masih perlu ditingkatkan. Pemenuhan air baku dan pemerataan akses sangat dibutuhkan. Meskipun sebagian besar rumah tangga telah menggunakan septictank, masih banyak yang belum melakukan penyedotan secara berkala, yang membuat pengelolaan sanitasi aman menjadi tantangan. Rumah layak huni juga terkendala oleh sulitnya pengendalian pembangunan rumah swadaya yang tidak memenuhi standar.

Kondisi gedung pemerintahan, khususnya kantor kelurahan, juga masih belum optimal. Sebagian kantor masih rusak dan tidak memadai, menyebabkan birokrasi menjadi lambat dan menurunkan tingkat kepuasan masyarakat. Banyak kantor kelurahan juga masih bermasalah dengan alas haknya.

Infrastruktur jalan dan trotoar juga menjadi isu penting. Meskipun kondisi jalan sudah baik, tantangan terbesarnya adalah mempertahankan kualitasnya seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Selain itu, panjang trotoar juga masih terbatas dan membutuhkan pembenahan, terutama untuk mengakomodasi kaum rentan.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah setempat, dan masyarakat dalam menangani permasalahan ini secara terintegrasi dan berkelanjutan. Tanpa intervensi, tantangan ini akan terus membesar dan mengancam keberlanjutan Kota Makassar.

12. Ketahanan Energi, Air, Pangan dan Infrastruktur Dasar

Isu ketahanan dan aksesibilitas energi, air, dan pangan di Kota Makassar merupakan tantangan yang saling terkait dan menuntut solusi terintegrasi. Sebagai pusat konsumsi energi terbesar di Sulawesi Selatan, Kota Makassar sangat bergantung pada sumber energi terbatas dan pasokan dari luar daerah. Hal ini diperparah dengan minimnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yang membuat kota rentan terhadap fluktuasi harga global dan isu ketersediaan.

Sama halnya dengan air, sumber daya air bersih terus mengalami tekanan akibat urbanisasi, polusi, dan perubahan iklim. Keterbatasan sumber dan ketersediaan air baku serta belum meratanya akses air bersih dan sanitasi yang layak di sejumlah wilayah menjadi tantangan utama. Sementara itu, kerentanan pangan di kota ini berakar pada dua masalah utama: ketidakstabilan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Kenaikan harga pangan dan inflasi membatasi daya beli masyarakat, diperparah oleh ketergantungan



pada impor. Di sisi lain, perubahan iklim menyebabkan cuaca ekstrem yang merusak produksi pangan lokal, sementara produksi pangan lokal yang terbatas serta kurangnya pengembangan urban farming dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin memperparah kondisi.

Ketahanan energi, air, dan pangan, yang merupakan fondasi pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat, harus segera diperkuat. Jika tidak segera diatasi, ketidakmerataan distribusi dan keterbatasan produksi lokal akan menimbulkan konsekuensi serius, seperti kesenjangan wilayah yang melebar, menurunnya daya saing kota, dan ancaman terhadap stabilitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan komprehensif dan terpadu untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi penggunaan air, serta memperkuat produksi pangan lokal guna mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan bagi seluruh warga Makassar.

13. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Daya Dukung Lingkungan, dan Pelayanan Publik

Pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi masif di Kota Makassar memberikan tekanan luar biasa pada daya dukung lingkungan dan kualitas layanan infrastruktur. Peningkatan populasi memicu konversi lahan hijau menjadi area terbangun, yang tidak hanya mengurangi area resapan air alami dan meningkatkan risiko banjir, tetapi juga meningkatkan timbulan sampah serta emisi gas buang dari sektor transportasi.

Kelangkaan lahan di pusat kota juga menyebabkan harga properti melonjak, memaksa penduduk berpenghasilan rendah dan menengah untuk tinggal di pinggiran. Kondisi ini memicu masalah transportasi, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, dan mendorong munculnya permukiman kumuh, baik di bantaran sungai maupun di kawasan pesisir.

Di sisi lain, penambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur berdampak pada berbagai permasalahan. Masalah banjir, yang sudah berlangsung bertahun-tahun di daerah Antang, Pettarani, dan Biringkanaya, menjadi salah satu isu utama. Selain itu, akses terhadap kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi, dan rumah layak huni masih perlu ditingkatkan. Pemenuhan air baku dan pemerataan akses sangat dibutuhkan. Meskipun sebagian besar rumah tangga telah menggunakan septictank, masih banyak yang belum melakukan penyedotan secara berkala, yang membuat pengelolaan sanitasi aman menjadi tantangan. Rumah layak huni juga terkendala oleh sulitnya pengendalian pembangunan rumah swadaya yang tidak memenuhi standar.

Tantangan lainnya adalah optimalisasi kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sarana dan prasarana yang ada seringkali sudah tua dan tidak memadai, menyebabkan antrian panjang, ruang tunggu yang tidak nyaman, dan proses birokrasi yang lambat. Kondisi ini secara langsung menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di samping itu, infrastruktur jalan dan trotoar juga menjadi isu penting. Meskipun kondisi jalan sudah baik, tantangannya adalah mempertahankan kualitasnya seiring bertambahnya jumlah kendaraan.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik dan kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah setempat, dan masyarakat dalam menangani permasalahan ini secara terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya optimalisasi pelayanan publik, pembangunan dan revitalisasi kantor lurah serta camat, dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi investasi krusial untuk memodernisasi birokrasi dan meningkatkan kinerja pelayanan. Tanpa intervensi, tantangan ini akan terus membesar dan mengancam keberlanjutan Kota Makassar.

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah





BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi
3.1.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi Kota Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 adalah: “Makassar Kota Dunia, Maju dan Berkelanjutan Yang *Sombere*’ dan *Smart* Untuk Semua”. Terhadap Visi Kota Makassar, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arah RPJPD untuk periode 2020-2025 yang hendak diwujudkan adalah masyarakat Kota Makassar yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang sehingga tercapai struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas tinggi. Pada tahapan ini, identitas sebagai kota maritim, niaga, pendidikan dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan bersahabat diharapkan memanifestasikan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Berdasarkan pemahaman dan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka Visi Pembangunan Daerah Kota Makassar untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan”

Visi pembangunan Kota Makassar memiliki konsistensi dengan Visi Jangka Panjang Daerah Tahun 2045, yang termuat dalam Perda RPJPD Kota Makassar, khususnya visi “Kota Dunia dan Maju”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “Makassar Unggul”, serta visi “*Sombere*’ dan *Smart* Untuk Semua”, dirumuskan sebagai “Inklusi dan Aman”, serta visi “Berkelanjutan”, bersesuaian dengan visi pembangunan Kota Makassar “Berkelanjutan”.

Rumusan visi pembangunan Kota Makassar, merupakan pernyataan mengenai keadaan (*clarity of direction*) yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima), yang menunjukkan gambaran ideal masa depan bagi Kota Makassar berdasarkan kondisi dan situasi saat ini. Rumusan visi ini mengandung 4 (empat) Pokok Visi, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 3.1
Penjelasan Visi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN dan BERKELANJUTAN	Unggul	Makassar sebagai kota yang maju dengan kualitas modal manusia yang unggul, masyarakat yang sejahtera, perekonomian yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)
	Inklusif	Makassar sebagai kota dimana semua lapisan dan golongan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan kota, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, latar belakang budaya, atau kelompok sehingga dapat hidup, bekerja, dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Makassar yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, membuka panggung partisipasi dan inisiatif untuk berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota
	Aman	Makassar sebagai kota yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kriminalitas dan konflik sosial, serta menjamin keselamatan publik
	Berkelanjutan	Makassar sebagai kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien serta tangguh dalam penanganan bencana dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini didukung oleh tata kelola yang berintegritas serta masyarakat sipil yang partisipatif

Sesuai amanat Pasal 260, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, wajib selaras dengan Visi RPJMN Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2
Penyelarasan Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dan
RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2-29
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045	MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN dan BERKELANJUTAN

Visi RPJMN mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. RPJMD Kota Makassar juga mengedepankan kesetaraan melalui visi inklusif serta mendukung Indonesia Maju, melalui visi Makassar unggul dan berkelanjutan. Visi RPJMN dicapai



melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita, yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

3.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi, disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mewujudkan visi. Visi dan misi calon kepala daerah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai bagian penting dalam proses pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana dokumen visi dan misi ini menjadi dasar penilaian publik terhadap arah dan tujuan calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota. Rumusan misi yang disampaikan ke KPUD dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik namun harus dipastikan perumusan ulang misi tersebut tidak merubah janji politik yang disampaikan. Perumusan ulang terhadap misi Wali Kota dan Wakil Walikota Makassar terpilih memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis dan pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah. Perumusan ulang misi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam misi RPJMD dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perumusan Misi Janji Politik (Sapta Mulya)
ke Dalam Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

Misi (Sapta Mulia)	Penyesuaian Misi Pendekatan Teknokratik
MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN dan BERKELANJUTAN	
Misi 1 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, Penciptaan Lapangan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat, Khususnya Masyarakat Pesisir dan Pulau	Misi 1 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan Secara Merata	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan dan Ramah Lingkungan	Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan
Misi 4 : Mengembangkan Pusat Inovasi, Kepemudaan dan Pengembangan Olahraga, Seni Budaya, serta Pariwisata	Misi 4 : Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata
Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing	Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum
Misi 6 : Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas	Misi 6 : Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga



Misi 7: Menegakkan Ketertiban Umum dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Mitigasi Bencana	Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana
---	--

Memperhatikan reformulasi misi di atas, maka rumusan Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja
- Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan
- Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata
- Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum
- Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
- Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian misi, serta dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Misi disusun untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Keterkaitan antara pokok-pokok visi dengan, dengan penjelasan misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

Visi: MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN, DAN BERKELANJUTAN		
Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
MAKASSAR UNGGUL	Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja	Misi ini mencakup upaya mewujudkan Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi makro daerah yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan produktivitas sektor industri, perdagangan, dan sektor unggulan lainnya yang berkontribusi dominan terhadap PDRB. Upaya ini juga meliputi perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM. Stabilitas ekonomi makro diwujudkan melalui penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, serta ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.



Visi: MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN, DAN BERKELANJUTAN		
Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
MAKASSAR UNGGUL	Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi ini mencakup upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau; penyelenggaraan pendidikan yang adaptif dan inovatif; serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, diarahkan pada pembudayaan perilaku hidup sehat, pemenuhan akses layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, percepatan eliminasi penyakit, penerapan kebijakan promotif-preventif, dan penguatan sistem surveilans kesehatan. Sementara itu, peningkatan daya beli masyarakat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan usaha produktif masyarakat.
MAKASSAR UNGGUL	Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan	Misi ini mencakup upaya mewujudkan peningkatan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, dan terintegrasi untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebinamargaan, dan keciptakaryaan, serta prasarana publik lainnya yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Di sisi lain, penataan ruang difokuskan pada peningkatan ketersediaan dan keterpenuhan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Penataan ruang ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, daya saing, dan mitigasi risiko bencana, sehingga mampu menciptakan kota yang tertata, nyaman, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
MAKASSAR UNGGUL	Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata	Misi ini mencakup upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi meningkatnya kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta meningkatnya daya saing pariwisata. Peningkatan kualitas penguasaan Iptek diwujudkan melalui rangkaian kinerja berupa penguatan kapabilitas inovasi daerah dan peningkatan kualitas transformasi digital. Pada saat yang sama, pengembangan sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pariwisata, yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif, serta pemajuan seni dan budaya. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan ekosistem inovasi, seni budaya, dan pariwisata yang saling



Visi: MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN, DAN BERKELANJUTAN		
Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		menguatkan, sehingga mampu mendorong daya saing Kota Makassar di tingkat nasional maupun internasional.
MAKASSAR AMAN	Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum	Misi ini mencakup upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. Pencapaian good governance dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten, penguatan integritas aparatur, dan peningkatan kapasitas manajerial organisasi perangkat daerah. Selain itu, misi ini juga mengakomodasi peningkatan kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal tersebut mencakup upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, bebas dari gangguan keamanan, kriminalitas, dan konflik sosial, serta terjaminnya keselamatan publik.
MAKASSAR INKLUSIF	Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Misi ini mencakup upaya peningkatan kualitas kesetaraan gender, perlindungan anak, dan perlindungan sosial yang adaptif serta tepat sasaran. Peningkatan kesetaraan gender diarahkan pada penurunan ketimpangan gender dan penguatan perlindungan anak, termasuk upaya memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi disparitas pendapatan, dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, misi ini juga mencakup pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebagai sarana pembinaan karakter, peningkatan prestasi, dan penguatan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
MAKASSAR BERKELANJUTAN	Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana	Misi ini mencakup upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan kualitas air dan udara, penambahan dan perbaikan ruang terbuka hijau, serta optimalisasi pengelolaan persampahan. Selain itu, misi ini juga mencakup peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi, guna menjaga keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan wilayah.

Misi RPJMD Kota Makassar merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi RPJMD Kota Makassar juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dari Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang merupakan delapan prioritas nasional dari *Asta Cita*, yang merupakan langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan Nasional dalam periode jangka menengah. Pelaksanaan dan



pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029. Keselarasan antara misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Keselarasan Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan
Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

No	Misi RPJMN Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029
1	Asta Cita 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum
2	Asta Cita 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata
3	Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Modal	Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata
4	Asta Cita 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
5	Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja



No	Misi RPJMN Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029
6	Asta Cita 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
7	Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum
8	Asta Cita 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana

3.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, maka diturunkan (*cascading*) hingga tujuan dan sasaran. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD, yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja, ditetapkan menjadi Program Prioritas, ataw Program Pembangunan Daerah. Program yang tidak menjadi penunjang tujuan dan sasaran akan menjadi Program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran yang merupakan penurunan kinerja visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran secara sistematis untuk menciptakan keselarasan visi dan misi yang diturunkan menjadi tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran, RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, dapat dijelaskan sebagai berikut:



MISI 1

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan
Penciptaan Lapangan Kerja

Dalam upaya mewujudkan misi 1, diturunkan menjadi 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, yang diturunkan kembali menjadi 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sasaran. Pencapaian Misi 1 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. *Cascading* rangkaian kinerja tujuan dan sasaran pada Misi 1, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan
			2. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
			2. PDRB Per Kapita
Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	1. Tingkat Inflasi
			2. Indeks Ketahanan Pangan
		Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Untuk mewujudkan misi 1, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan, sebagai *cascading* pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan dari misi 1 adalah “Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi” dan “Meningkatnya Daya Saing



Ekonomi Daerah”, yang diukur dari pencapaian indikator kinerja “Pertumbuhan Ekonomi” dan “Indeks Daya Saing Daerah”, yang dapat diturunkan menjadi sasaran, sebagai berikut:

B. Sasaran

- 1) Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
- 2) Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan PDRB Per Kapita
- 3) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
- 4) Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Tingkat Inflasi, dan Indeks Ketahanan Pangan
- 5) Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah

MISI 2

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Dalam upaya mewujudkan misi 2, diturunkan menjadi 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, yang diturunkan kembali menjadi 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Pencapaian misi 2 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. *Cascading* rangkaian kinerja tujuan dan sasaran pada misi 2, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita



Untuk mewujudkan misi 2, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan, sebagai *cascading* pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan dari misi 2 adalah “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, yang diukur dari pencapaian indikator kinerja “Indeks Pembangunan Manusia”, yang dapat diturunkan menjadi sasaran, sebagai berikut:

B. Sasaran

- 1) Meningkatkan Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Pendidikan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Usia Harapan Hidup
- 3) Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Pengeluaran Per Kapita

MISI 3
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan

Dalam upaya mewujudkan misi 3, diturunkan menjadi 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan, yang diturunkan kembali menjadi 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Pencapaian misi 3 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. *Cascading* rangkaian kinerja tujuan dan sasaran pada misi 3, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	1. Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan
			2. Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakarya
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Untuk mewujudkan misi 3, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan, sebagai *cascading* pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



- A. Tujuan
- Tujuan dari misi 3 adalah “Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata” yang diukur dari pencapaian indikator kinerja “Indeks Layanan Infrastruktur”, yang dapat diturunkan menjadi sasaran, sebagai berikut:
- B. Sasaran
- 1) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan, dan Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakarya
 - 2) Meningkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

MISI 4

Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata

Dalam upaya mewujudkan misi 4, diturunkan menjadi 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, yang diturunkan kembali menjadi 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sasaran. Pencapaian misi 4 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. *Cascading* rangkaian kinerja tujuan dan sasaran pada misi 4, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 4

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 4.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah
Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
			2. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	1. Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda 2. Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi dan Dimanfaatkan



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif yang aktif
			2. Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital

Untuk mewujudkan misi 4, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan, sebagai *cascading* pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Tujuan
Tujuan dari misi 4 adalah “Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah” dan “Meningkatnya Daya Saing Pariwisata” yang diukur dari pencapaian indikator kinerja “Indeks Inovasi Daerah” dan “Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB”, yang dapat diturunkan menjadi sasaran, sebagai berikut:

- B. Sasaran
- 1) Meningkatkan Penguasaan IPTEK
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Kapabilitas Inovasi.
 - 2) Meningkatkan Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah
 - 3) Meningkatkan Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara, dan Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan
 - 4) Meningkatkan Pengelolaan dan Pelestarian Budaya
Indikator Yang Menggambarkan Pencapaian Kinerja Ini Adalah Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda, dan Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi Dan Dimanfaatkan
 - 5) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Persentase Industri Ekonomi kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital

MISI 5

Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum

Dalam upaya mewujudkan misi 5, diturunkan menjadi 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, yang diturunkan kembali menjadi 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator sasaran. Pencapaian misi 5 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. *Cascading* rangkaian kinerja tujuan dan sasaran pada misi 5, dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 3.10
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
			2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			3. Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK
Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	1. Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani
		Sasaran 5.2.2: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	2. Indeks Kota Toleran

Untuk mewujudkan misi 5, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan, sebagai *cascading* pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Tujuan
- Tujuan dari misi 5 adalah “Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif” dan “Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum” yang diukur dari pencapaian indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi” dan “Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” yang dapat diturunkan menjadi sasaran, sebagai berikut:
- B. Sasaran
- 1) Meningkatkan Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK
 - 2) Meningkatkan Kualitas Keamanan Masyarakat
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani
 - 3) Meningkatkan Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Kota Toleran



MISI 6

Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam upaya mewujudkan misi 6, diturunkan menjadi 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, yang diturunkan kembali menjadi 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran. Pencapaian misi 6 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. *Cascading* rangkaian kinerja tujuan dan sasaran pada misi 6, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 6

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	1. Indeks Pembangunan Pemuda 2. Indeks Pembangunan Keolahragaan
Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan	Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Untuk mewujudkan misi 6, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan, sebagai *cascading* pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- A. Tujuan
- Tujuan dari misi 6 adalah “Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender”, “Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif dan Tepat Sasaran” yang diukur dari pencapaian indikator kinerja “Indeks Pembangunan Keluarga”, dan “Tingkat Kemiskinan”, yang dapat diturunkan menjadi sasaran, sebagai berikut:



- B. Sasaran
- 1) Menurunnya Ketimpangan Gender
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Ketimpangan Gender.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Perlindungan Anak
 - 3) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Keolahragaan
 - 4) Menurunnya Disparitas Pendapatan
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Gini Rasio
 - 5) Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

MISI 7
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Dalam upaya mewujudkan misi 7, diturunkan menjadi 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) indikator tujuan, yang diturunkan kembali menjadi 2 (dua) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran. Pencapaian misi 7 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. *Cascading* rangkaian kinerja tujuan dan sasaran pada misi 7, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Cascading Tujuan dan Sasaran Misi 7

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air
			2. Indeks Kualitas Udara
			3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
			4. Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah
			Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Untuk mewujudkan misi 7, akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan/sub kegiatan, sebagai *cascading* pencapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:



A. Tujuan

Tujuan dari misi 7 adalah “Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari” dan “Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim” yang diukur dari pencapaian indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan “Indeks Risiko Bencana”, yang dapat diturunkan menjadi sasaran, sebagai berikut:

B. Sasaran

- 1) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dan Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.
- 2) Meningkatkan Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
Indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja ini adalah Indeks Ketahanan Daerah dan Penurunan Intensitas Emisi GRK.

Dari *cascading* visi dan misi menjadi tujuan dan sasaran di atas, dapat diketahui bahwa visi dan misi pemerintah Kota Makassar diturunkan menjadi 12 (dua belas) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator tujuan dan 25 (dua puluh lima) sasaran dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran. Indikator tujuan dan indikator sasaran yang berjumlah 51 (lima puluh satu) indikator inilah yang akan menjadi Indikator Utama (IKU) Walikota dan Walikota Makassar Tahun 2025-2029. Dalam upaya pencapaian visi dan misi, akan dilaksanakan program-program pada SKPD, guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Program-program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja, ditetapkan menjadi Program Prioritas, ataw Program Pembangunan Daerah. *Cascading* Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 2025-2029 beserta target kinerja untuk setiap indikator, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.13
Target Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030

Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan									
Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja	Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	5,73	6,43	7,43	7,73	8,13	8,20
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17	19,29	19,46	19,64	19,94	20,24	20,26
		2. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,10	20,30	20,40	20,50	20,60	20,80
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71	9,62	9,53	9,44	9,35	9,26	9,17
		2. PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165.95	175.46	186.75	200.62	216.13	233.71	246.34



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Skor)	4,10	4,17	4,23	4,28	4,32	4,34	4,35
	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,67
	Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	1. Tingkat Inflasi (%)	1,19	1,52	1,77	1,92	2,03	2,12	2,20
		2. Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	87,95	88,00	88,05	88,10	88,15	88,20	88,25
	Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	-50,26	8,75	8,85	9	9,2	9,36	9,5
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	85,23	85,46	85,86	86,03	86,31	86,56	86,84
	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (Nilai)	81,96	82,03	82,10	82,17	82,24	82,31	82,38



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33	75,51	75,66	75,81	75,96	76,12	76,27
	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	18.386	19.301	20.543	22.068	23.774	25.708	27.097
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan	Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Indeks Layanan Infrastruktur (Nilai)	74,25	78,69	79,46	80,23	81	81,77	82,54
	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	1. Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan (Nilai)	35,40	83,59	84,45	86,08	87,15	90,30	91,99
		2. Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakaryaan (Nilai)	49,39	26,49	27,35	29,30	31,13	32,95	34,77
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10	10	25	50	75	100	100



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata	Tujuan 4.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah (Skor)	76,56	77,59	79,23	80,87	81,52	82,58	83,81
	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi (Skor)	4,46	4,51	4,56	4,6	4,65	4,7	4,75
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	2	4	6	8	10	10
	Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Terhadap PDRB (%)	2,18	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48
	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	5.619.596	5.626.657	5.634.009	5.641.941	5.648.719	5.657.295	5.665.491
		2. Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,51	1,63	1,65	1,7	1,73	1,75	1,8



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	1. Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	33,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33
		2. Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan (%)	72	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
	Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	1. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif (Industri)	4.220	4.515	4.831	5.170	5.532	5.919	6.310
		2. Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital (%)	N/A	12,44	15,43	18,55	19,48	22,96	24,31
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih	Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	76,78	79,97	81,31	82,64	83,98	85,31	86,65



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)	69,69	69,75	70,50	71,50	75,00	80,50	81,50
		2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	4,01	4,02	4,03	4,04	4,05	4,06	4,1
		3. Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK (Nilai)	87,00	87,48	87,98	88,49	88,99	89,50	90,00
	Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Nilai)	NA	75	77	79	81	83	85
	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03	55,03	56,02	57,02	58,01	59,01	60,01



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 5.2.2: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran (Skor)	4,363	4,688	4,862	5,062	5,168	5,289	5,357
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	63,13	63,14	63,15	63,16	63,17	63,18	63,19
	Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (Nilai)	0,183	0,179	0,177	0,174	0,170	0,168	0,165
	Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (Nilai)	67,04	69,44	70,60	71,78	72,98	74,20	75,44
	Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	1. Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57,67	59,00	61,00	63,00	65,00	67,00	69,00
		2. Indeks Pembangunan Keolahragaan (Skor)	0,476	0,497	0,518	0,539	0,560	0,581	0,602



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,62	3,46	3,40	3,28	3,15	3,02
	Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio (Nilai)	0,372	0,366	0,359	0,353	0,347	0,341	0,334
	Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1	41,81	42,51	43,22	43,93	44,63	45,34
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Serta Mitigasi Bencana	Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Nilai)	61,41	66,17	66,38	66,59	66,80	67,01	67,23
	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (Nilai)	58,70	73,95	74,15	74,35	74,55	74,75	74,95
		2. Indeks Kualitas Udara (Nilai)	74,92	75,22	75,52	75,82	76,12	76,42	76,72
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai)	28,92	36,06	36,13	36,20	36,27	36,34	36,41



Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		4. Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,01	6	10	18	25	30	35
	Tujuan 7.2: Meningkatkan Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (Skor)	113,71	110	107	105	103	100	100
	Sasaran 7.2.1: Meningkatkan Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1. Indeks Ketahanan Daerah (Nilai)	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
		2. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	NA	32,46	34,98	37,36	39,74	42,13	44,60



3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana dalam perencanaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinergi, dan konsisten dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar, dilaksanakan program-program prioritas pada SKPD yang merupakan perwujudan dari tujuan dan sasaran serta strategi pada masing-masing misi.

3.3.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan rangkaian tahapan yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan. Arah Kebijakan merupakan rumusan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan perodesasi pertama dari RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045, dimana arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kota Makassar adalah “Penguatan Landasan Transformasi”, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, memantapkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2025-2029, dapat dijabarkan sebagai berikut:



Table 3.14
Strategi dan Pentahapan Pembangunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030

Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan melalui peningkatan kualitas SDM yang adaptif, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kawasan industri terintegrasi, mendorong adopsi teknologi dan inovasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan deregulasi dan kepastian hukum.	1. Peningkatan kualitas SDM di sektor industri dan perdagangan melalui assessment kebutuhan industri yang terintegrasi, pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi yang relevan, serta membangun Makassar Creative Hub di setiap kecamatan sebagai pusat pengembangan keterampilan, kreativitas, dan kolaborasi.	1. Perkuatan kerjasama dengan lembaga pendidikan vokasi dan perguruan tinggi untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri serta mendorong pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan nilai tambah.	1. Memperluas jangkauan pelatihan ke wilayah pinggiran kota dan mengembangkan pusat-pusat pelatihan keahlian khusus untuk sektor-sektor unggulan melalui pertukaran tenaga ahli dan mentoring antara pelaku industri dan tenaga kerja muda.	1. Mengembangkan pelatihan lanjutan dan spesialisasi untuk memenuhi kebutuhan industri dan mendorong mobilitas tenaga kerja antar sektor dan wilayah.	1. Optimalisasi pelatihan lanjutan dan kurikulum berstandar global melalui kerjasama internasional untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif yang mendorong mobilitas antar sektor dan wilayah.
			2. Peningkatan akses permodalan dan pemasaran bagi 153 Kelurahan melalui pembentukan gerai UMKM, yang didukung oleh program peningkatan kompetensi seperti Makassar Skill Competition dan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP).	2. Peningkatan ekosistem bisnis bidang pangan yang memacu inovasi dan efisiensi	2. Perkuatan kerjasama internasional dalam pertukaran tenaga ahli dan pengembangan kurikulum berstandar global	2. Memperkuat kerjasama internasional dalam pertukaran tenaga ahli dan pengembangan kurikulum berstandar global	2. Optimalisasi pelatihan lanjutan dan kurikulum berstandar global melalui kerjasama internasional untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif yang mendorong mobilitas antar sektor dan wilayah.



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			3. Pengembangan dan Pembinaan melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	3. Perkuatan ekosistem bisnis pada perluasan kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi dan perguruan tinggi untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, sekaligus mendorong pengembangan industri berbasis teknologi tinggi dan nilai tambah dan memacu inovasi serta efisiensi di bidang pangan			
	Sasaran 1.1.2: Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsif. melalui revitalisasi vokasi berorientasi kompetensi dan sertifikasi. penyelarasan kurikulum dengan industri, serta pemberdayaan ekonomi wilayah melalui pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis potensi lokal	1. Melakukan assessment komprehensif terhadap kondisi ekosistem ketenagakerjaan	1. Pengembangan standar kompetensi bersama antara lembaga vokasi dan industri dan perdagangan.	1. Pengembangan program pelatihan dan spesialisasi yang relevan dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	1. Pemenuhan dan distribusi tenaga kerja yang berkualitas termasuk kebutuhan spesifik di setiap wilayah	1. Optimalisasi kelompok kerja teknis yang lebih spesifik termasuk infrastruktur pendukung ekonomi di wilayah unggulan
			2. Perkuatan akses pembentukan startup teknologi yang fokus pada solusi untuk masalah industri dan perdagangan lokal.	2. Memfasilitasi akses kelompok usaha ke pasar yang lebih luas melalui <i>platform e commerce</i> , kerjasama dengan ritel modern dan partisipasi dalam pameran.	2. Mendorong mobilitas tenaga kerja antar sektor dan wilayah melalui sertifikasi dan pengakuan kompetensi yang terstandardisasi.		
			3. Merancang skema pemberian modal usaha UMKM tahap awal dengan persyaratan yang terukur dan fokus pada kelompok usaha unggulan di wilayah pesisir dan pulau.	3. Pengembangan sentra perdagangan dan jaringan distribusi termasuk pembentukan Gerai UMKM di 153 kelurahan, optimalisasi gudang logistik, penataan 10 titik akses PKL, serta	3. Perkuatan kolaborasi internasional untuk pertukaran tenaga ahli dan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan standar global.		



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
		dan pemberian modal UMKM secara bertahap		pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Tempat Pembuangan Akhir (TPA).			
			4. Modernisasi proses produksi melalui penerapan teknologi tepat guna, otomasi industri, dan peremajaan mesin/peralatan dengan dukungan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi industri, UMKM, dan pelaku usaha kreatif, termasuk pembentukan dan pemanfaatan Koperasi Merah Putih di kelurahan sebagai pusat permodalan dan distribusi usaha.	4. Revitalisasi pasar tradisional			
			5. Penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi dengan fasilitasi kemitraan antara UMKM, industri menengah, dan perusahaan besar, serta pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal	5. Revitalisasi pasar tradisional			
Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan	1. Pemutakhiran penataan Sistem dan Penguatan Basis Data melalui pemetaan potensi PAD yang belum optimal atau belum tereksplorasi di berbagai	1. Pengembangan dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi (IT) yang terintegrasi untuk pengelolaan PAD dan Menerapkan sistem e	1. Meningkatkan efektivitas pemungutan dan penagihan PAD melalui penegakan hukum yang lebih tegas. termasuk pemberian sanksi bagi	1. Mengembangkan instrumen ekonomi daerah yang dapat menghasilkan PAD secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan	1. Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan PAD untuk mencegah potensi kebocoran dan



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
		bertanggung jawab dengan membangun sistem pengelolaan PAD yang inovatif. Transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi daerah	sektor ekonomi daerah.	<i>billing</i> dan <i>e-payment</i> secara luas untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran PAD	pelanggar	memperhatikan aspek lingkungan dan sosial	penyalahgunaan
			2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi Pejabat Negara. Guru. Polri. Pensiunan BUMN/BUMD dan Veteran Pejuang.	2. Perkuatan sistem keamanan siber untuk melindungi data PAD dan transaksi online.			
	Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui penerapan teknologi pertanian modern dan pendampingan berkelanjutan kepada petani.	1. Pemetaan komoditas pangan unggulan di berbagai wilayah Makassar dan mengidentifikasi potensi peningkatan produksi serta produktivitas dengan konsep urban farming pada 15 lokasi.	1. Pengembangan dan merevitalisasi sarana prasarana, menguatkan kelembagaan, dan adopsi teknologi.	1. Peningkatan kapasitas petani dalam budidaya. pengendalian hama dan penyakit tanaman serta pengelolaan pasca panen berbasis teknologi	1. Optimalisasi akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih baik melalui kerjasama dengan perbankan. lembaga keuangan mikro. atau program pemerintah dengan skema yang menguntungkan	1. Fasilitasi akses petani ke pasar yang lebih luas. termasuk kerjasama dengan pasar modern, platform <i>e-commerce</i> dan program pengadaan pemerintah daerah
			2. Pengadaan Mobile Storage Pangan.	2. Fasilitasi MoU Kelompok Tani/ KWT bersama Distributor / Toko Pangan			
				3. Fasilitasi Distribusi dan pemasaran hasil urban farming pada Gerakan Pangan Murah / MBG. 3. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)			
				4. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang			



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Mewujudkan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi. bersinergi dengan sektor swasta dan institusi syariah untuk menarik investasi padat karya dan berwawasan lingkungan melalui skema KPBU dan KSPI	1. Membangun tata kelola investasi yang efisien dan transparan dengan mengembangkan sistem dan prosedur investasi yang sederhana. cepat. dan akuntabel melalui digitalisasi dan integrasi layanan	1. Peningkatan daya tarik investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui insentif yang terarah. kepastian hukum. dan penyediaan infrastruktur pendukung	1. Perkuatan sinergi dengan sektor swasta serta mengembangkan instrumen dan skema investasi syariah yang menarik dan sesuai dengan karakteristik Kota Makassar	1. Mendorong Investasi Padat Karya dan Berwawasan Lingkungan dengan memberikan prioritas dan insentif khusus bagi investasi yang menciptakan lapangan kerja signifikan dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan	1. Fasilitasi skema KPBU dan KSPI dengan mengidentifikasi proyek-proyek strategis yang potensial untuk dikembangkan melalui skema KPBU dan KSPI. serta memastikan prosesnya transparan dan kompetitif
Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Mengoptimalkan Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan. serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dengan pemberian seragam gratis untuk Siswa SD dan SMP di kota Makassar	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dengan pemberian seragam gratis untuk Siswa SD dan SMP di kota Makassar	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dengan pemberian seragam gratis untuk Siswa SD dan SMP di kota Makassar	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dengan pemberian seragam gratis untuk Siswa SD dan SMP di kota Makassar	1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar dengan pemberian seragam gratis untuk Siswa SD dan SMP di kota Makassar
				2. Peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan Pembangunan gedung Dinas Pendidikan (Education City Hall)			
			3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka tercapainya proses belajar, mengajar yang efektif dan berkualitas khususnya	3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka tercapainya proses belajar, mengajar yang efektif dan berkualitas khususnya	3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka tercapainya proses belajar, mengajar yang efektif dan berkualitas khususnya	3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka tercapainya proses belajar, mengajar yang efektif	3. Peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka tercapainya proses belajar, mengajar yang efektif



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			di wilayah kepulauan Kota Makassar dan pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru yang berprestasi	di wilayah kepulauan Kota Makassar dan pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru yang berprestasi	di wilayah kepulauan Kota Makassar dan pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru yang berprestasi	dan berkualitas khususnya di wilayah kepulauan Kota Makassar dan pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru yang berprestasi	dan berkualitas khususnya di wilayah kepulauan Kota Makassar dan pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru yang berprestasi
			4. Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan	4. Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan	4. Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan	4. Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan	4. Penyediaan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan
			5. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.	5. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.	5. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.	5. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.	5. Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana fisik seperti gedung sekolah ramah lingkungan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga yang inklusif dan aksesibilitas dengan mengutamakan pemerataan akses pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.
			6. Peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembangunan Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan.	6. Peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembangunan Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan	6. Peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembangunan Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan.	6. Peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembangunan Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan.	6. Peningkatan akses dan kualitas layanan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan pembangunan Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan.



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Mengoptimalkan Pembudayaan perilaku hidup sehat dan Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan. melalui pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif. percepatan eliminasi penyakit dan penerapan kebijakan promotif preventif. perkuatan sistem surveilans kesehatan untuk memantau penyakit	7. Peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan	7. Peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan	7. Peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan	7. Peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan	7. Peningkatan angka partisipasi sekolah dengan mengembalikan Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah dengan pemberian bantuan pendidikan
			1. Pemerataan dan penguatan layanan kesehatan dengan penyediaan ambulance secara gratis	1. Pemerataan dan penguatan layanan kesehatan dengan penyediaan ambulance secara gratis	1. Pemerataan dan penguatan layanan kesehatan dengan penyediaan ambulance secara gratis	1. Pemerataan dan penguatan layanan kesehatan dengan penyediaan ambulance secara gratis	1. Pemerataan dan penguatan layanan kesehatan dengan penyediaan ambulance secara gratis
			2. Pemenuhan dan distribusi Tenaga Kesehatan dan Paramedis di wilayah kepulauan Kota Makassar dengan pemberian insentif kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di fasilitas kesehatan Pemerintah di Pulau-pulau	2. Pemenuhan dan distribusi Tenaga Kesehatan dan Paramedis di wilayah kepulauan Kota Makassar dengan pemberian insentif kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di fasilitas kesehatan Pemerintah di Pulau-pulau	2. Pemenuhan dan distribusi Tenaga Kesehatan dan Paramedis di wilayah kepulauan Kota Makassar dengan pemberian insentif kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di fasilitas kesehatan Pemerintah di Pulau-pulau	2. Pemenuhan dan distribusi Tenaga Kesehatan dan Paramedis di wilayah kepulauan Kota Makassar dengan pemberian insentif kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di fasilitas kesehatan Pemerintah di Pulau-pulau	2. Pemenuhan dan distribusi Tenaga Kesehatan dan Paramedis di wilayah kepulauan Kota Makassar dengan pemberian insentif kepada tenaga medis dan paramedis yang bekerja di fasilitas kesehatan Pemerintah di Pulau-pulau
			3. Perluasan cakupan layanan pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari Rumah sakit ke rumah pasien	3. Perluasan cakupan layanan pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari Rumah sakit ke rumah pasien	3. Perluasan cakupan layanan pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari Rumah sakit ke rumah pasien	3. Perluasan cakupan layanan pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari Rumah sakit ke rumah pasien	3. Perluasan cakupan layanan pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari Rumah sakit ke rumah pasien
			4. Perluasan akses penyediaan pusat layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan Pulau	4. Perluasan akses penyediaan pusat layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan Pulau	4. Perluasan akses penyediaan pusat layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan Pulau	4. Perluasan akses penyediaan pusat layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan Pulau	4. Perluasan akses penyediaan pusat layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan Pulau
			5. Pengembangan unit pelayanan kesehatan ibu dan anak.	5. Pengembangan unit pelayanan kesehatan ibu dan anak.	5. Pengembangan unit pelayanan kesehatan ibu dan anak.	5. Pengembangan unit pelayanan kesehatan ibu dan anak.	5. Pengembangan unit pelayanan kesehatan ibu dan anak.



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			6. Perluasan dan penguatan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih serta penyehatan lingkungan	6. Perluasan dan penguatan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih serta penyehatan lingkungan	6. Perluasan dan penguatan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih serta penyehatan lingkungan	6. Perluasan dan penguatan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih serta penyehatan lingkungan	6. Perluasan dan penguatan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih serta penyehatan lingkungan
			7. Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas dan rumah sakit.	7. Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas dan rumah sakit.	7. Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas dan rumah sakit.	7. Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas dan rumah sakit.	7. Penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas dan rumah sakit.
			8. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya terpadu secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan kesehatan inklusif yang lebih menjangkau kelompok rentan	8. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya terpadu secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan kesehatan inklusif yang lebih menjangkau kelompok rentan	8. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya terpadu secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan kesehatan inklusif yang lebih menjangkau kelompok rentan	8. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya terpadu secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan kesehatan inklusif yang lebih menjangkau kelompok rentan	8. Peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan upaya terpadu secara berkelanjutan dalam rangka pelayanan kesehatan inklusif yang lebih menjangkau kelompok rentan
			9. Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dalam mendukung kualitas layanan kesehatan	9. Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dalam mendukung kualitas layanan kesehatan	9. Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dalam mendukung kualitas layanan kesehatan	9. Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dalam mendukung kualitas layanan kesehatan	9. Peningkatan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan dalam mendukung kualitas layanan kesehatan
			10. Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	10. Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	10. Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	10. Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat	10. Peningkatan pendayagunaan SDM Kesehatan dengan pendidikan dan pelatihan agar mampu melaksanakan praktik pelayanan kesehatan dengan kompetensi sesuai standar dan kebutuhan masyarakat
			11. Peningkatan Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dalam upaya	11. Peningkatan Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dalam upaya	11. Peningkatan Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dalam upaya	11. Peningkatan Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dalam upaya	11. Peningkatan Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dalam upaya



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Optimalisasi peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, berkarakter dan mampu berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan .	pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan masyarakat.	pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan masyarakat.	pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan masyarakat.	pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan masyarakat.	pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan masyarakat.
			12. Pengembangan sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk;	12. Pengembangan sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk;	12. Pengembangan sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk;	12. Pengembangan sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk;	12. Pengembangan sistem insentif kepada masyarakat dan pihak terkait sebagai stimulan dalam upaya percepatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting dan gizi buruk;
			1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global melalui pendidikan vokasi yang relevan, penguatan karakter dan etika, serta akselerasi ekosistem kewirausahaan	1. Penyederhanaan regulasi Investasi untuk menarik investasi baik domestik maupun asing yang padat karya dan berkelanjutan.	1. Pemberian insentif dan fasilitas bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor serta membuka pasar-pasar baru untuk produk-produk Indonesia yang berkualitas.	1. Pemberian insentif dan fasilitas bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor serta membuka pasar-pasar baru untuk produk-produk Indonesia yang berkualitas.	1. Fokus pada ekspansi pasar dan mendukung pelaku usaha ekspor dengan fasilitas serta kemudahan regulasi.
			2. Pengembangan pusat-pusat keunggulan yang spesifik pada sektor ekonomi yang potensial antara lain agribisnis, pusat kreatif digital, atau pusat pelatihan pariwisata berkelanjutan.	2. Mendorong hilirisasi di sektor-sektor strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dengan upah yang lebih tinggi.	2. Penerapan kebijakan makroekonomi yang prudent untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga	2. Penerapan kebijakan makroekonomi yang prudent untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga	2. Peningkatan akses pasar internasional dengan promosi aktif dan bantuan insentif untuk produk-produk unggulan nasional
			3. Pendampingan intensif bagi UMKM untuk adopsi teknologi digital yaitu pemasaran online, e-commerce, payment gateway, serta fasilitasi				



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			akses ke permodalan murah				
Tujuan 3.1: Meningkatnya a Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan secara merata, inklusif dan terintegrasi melalui kolaborasi, pemanfaatan teknologi dan pengembangan skema pembiayaan inovatif	1. Penguatan data dan perencanaan pembangunan infrastruktur melalui identifikasi kebutuhan, kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang serta penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.	1. Penguatan data dan perencanaan pembangunan infrastruktur melalui identifikasi kebutuhan, kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang serta penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.	1. Penguatan data dan perencanaan pembangunan infrastruktur melalui identifikasi kebutuhan, kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang serta penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.	1. Penguatan data dan perencanaan pembangunan infrastruktur melalui identifikasi kebutuhan, kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang serta penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.	1. Penguatan data dan perencanaan pembangunan infrastruktur melalui identifikasi kebutuhan, kepastian lahan dan kesesuaian tata ruang serta penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur.
			2. Pengembangan alternatif pendanaan dan peluang kerjasama dalam implementasi pembangunan infrastruktur	2. Pengembangan alternatif pendanaan dan peluang kerjasama dalam implementasi pembangunan infrastruktur	2. Pengembangan alternatif pendanaan dan peluang kerjasama dalam implementasi pembangunan infrastruktur	2. Pengembangan alternatif pendanaan dan peluang kerjasama dalam implementasi pembangunan infrastruktur	2. Pengembangan alternatif pendanaan dan peluang kerjasama dalam implementasi pembangunan infrastruktur
			3. Peningkatan cakupan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih melalui keringanan sambungan rumah utamanya bagi masyarakat kurang mampu, wilayah sulit akses air bersih dan padat penduduk, serta pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas penyediaan air bersih berkualitas.	3. Peningkatan cakupan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih melalui keringanan sambungan rumah utamanya bagi masyarakat kurang mampu, wilayah sulit akses air bersih dan padat penduduk, serta pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas penyediaan air bersih berkualitas.	3. Peningkatan cakupan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih melalui keringanan sambungan rumah utamanya bagi masyarakat kurang mampu, wilayah sulit akses air bersih dan padat penduduk, serta pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas penyediaan air bersih berkualitas.	3. Peningkatan cakupan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih melalui keringanan sambungan rumah utamanya bagi masyarakat kurang mampu, wilayah sulit akses air bersih dan padat penduduk, serta pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas penyediaan air bersih berkualitas.	3. Peningkatan cakupan layanan dan akses masyarakat terhadap air bersih melalui keringanan sambungan rumah utamanya bagi masyarakat kurang mampu, wilayah sulit akses air bersih dan padat penduduk, serta pengembangan infrastruktur dan peningkatan kapasitas penyediaan air bersih berkualitas.
			4. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur pada seluruh wilayah kota melalui perencanaan	4. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur pada seluruh wilayah kota melalui perencanaan	4. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur pada seluruh wilayah kota melalui perencanaan	4. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur pada seluruh wilayah kota melalui perencanaan	4. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan inklusif



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			dan pembangunan infrastruktur termasuk penataan ruang publik pada wilayah pesisir di Kecamatan Ujung Pandang. Serta peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur pada wilayah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.	dan pembangunan infrastruktur termasuk penataan ruang publik pada wilayah pesisir di Kecamatan Ujung Pandang. Serta peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur pada wilayah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.	dan pembangunan infrastruktur termasuk penataan ruang publik pada wilayah pesisir di Kecamatan Ujung Pandang. Serta peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur pada wilayah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.	dan pembangunan infrastruktur termasuk penataan ruang publik pada wilayah pesisir di Kecamatan Ujung Pandang. Serta peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur pada wilayah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.	
			5. Optimalisasi penanganan banjir dan pengendalian daya rusak air melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir utamanya pada lokasi strategis, wilayah rawan banjir, wilayah pesisir serta koridor penghubung antar wilayah kota.	5. Optimalisasi penanganan banjir dan pengendalian daya rusak air melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir utamanya pada lokasi strategis, wilayah rawan banjir, wilayah pesisir serta koridor penghubung antar wilayah kota.	5. Optimalisasi penanganan banjir dan pengendalian daya rusak air melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir utamanya pada lokasi strategis, wilayah rawan banjir, wilayah pesisir serta koridor penghubung antar wilayah kota.	5. Optimalisasi penanganan banjir dan pengendalian daya rusak air melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir utamanya pada lokasi strategis, wilayah rawan banjir, wilayah pesisir serta koridor penghubung antar wilayah kota.	5. Optimalisasi penanganan banjir dan pengendalian daya rusak air melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir utamanya pada lokasi strategis, wilayah rawan banjir, wilayah pesisir serta koridor penghubung antar wilayah kota.
			6. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik melalui pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan dan penyediaan operasional bangunan gedung pemerintah	6. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik melalui pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan dan penyediaan operasional bangunan gedung pemerintah	6. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik melalui pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan dan penyediaan operasional bangunan gedung pemerintah	6. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik melalui pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan dan penyediaan operasional bangunan gedung pemerintah	6. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan publik melalui pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan dan penyediaan operasional bangunan gedung pemerintah
			7. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan melalui	7. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan melalui	7. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan melalui	7. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan melalui	7. Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan melalui



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana; penanganan permukiman kumuh dan mendukung penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan.	pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana; penanganan permukiman kumuh dan mendukung penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan.	pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana; penanganan permukiman kumuh dan mendukung penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan.	pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana; penanganan permukiman kumuh dan mendukung penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan.	pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana; penanganan permukiman kumuh dan mendukung penyediaan perumahan publik vertikal perkotaan.
			8. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga termasuk perencanaan kawasan dan infrastruktur Stadion yang terintegrasi di Kecamatan Biringkanaya.	8. Pembangunan infrastruktur stadion di Kecamatan Biringkanaya	8. Pembangunan infrastruktur stadion di Kecamatan Biringkanaya		
			9. Perencanaan infrastruktur stadion serta pematangan lahan di Kecamatan Biringkanaya				



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			10. Penguatan penanganan kemacetan serta penguatan konektivitas darat dan wilayah pulau melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan termasuk wilayah pulau, dukungan pengembangan dan penataan transportasi publik ramah lingkungan berupa angkutan umum massal perkotaan baik melalui pengadaan maupun skema kerjasama.	10.Penguatan penanganan kemacetan dan penguatan konektivitas darat dan wilayah pulau melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, dukungan pengembangan dan penataan transportasi publik ramah lingkungan berupa angkutan umum massal perkotaan baik melalui pengadaan maupun skema kerjasama.	10.Penguatan penanganan kemacetan dan penguatan konektivitas darat dan wilayah pulau melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, dukungan pengembangan dan penataan transportasi publik ramah lingkungan berupa angkutan umum massal perkotaan baik melalui pengadaan maupun skema kerjasama.	10.Penguatan penanganan kemacetan dan penguatan konektivitas darat dan wilayah pulau melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, dukungan pengembangan dan penataan transportasi publik ramah lingkungan berupa angkutan umum massal perkotaan baik melalui pengadaan maupun skema kerjasama.	10.Penguatan penanganan kemacetan dan penguatan konektivitas darat dan wilayah pulau melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, dukungan pengembangan dan penataan transportasi publik ramah lingkungan berupa angkutan umum massal perkotaan baik melalui pengadaan maupun skema kerjasama.
			11.Pemenuhan sanitasi aman melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik baik individual maupun terpusat skala kota dan skala permukiman khususnya di wilayah pulau dan wilayah kumuh	11.Pemenuhan sanitasi aman melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik baik individual maupun terpusat skala kota dan skala permukiman khususnya di wilayah pulau dan wilayah kumuh	11.Pemenuhan sanitasi aman melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik baik individual maupun terpusat skala kota dan skala permukiman khususnya di wilayah pulau dan wilayah kumuh	11.Pemenuhan sanitasi aman melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik baik individual maupun terpusat skala kota dan skala permukiman khususnya di wilayah pulau dan wilayah kumuh	11.Pemenuhan sanitasi aman melalui pembangunan, pengembangan dan pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik baik individual maupun terpusat skala kota dan skala permukiman khususnya di wilayah pulau dan wilayah kumuh
			12.Peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional melalui revitalisasi pasar tradisional.	12.Peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional melalui revitalisasi pasar tradisional.	12.Peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional melalui revitalisasi pasar tradisional.	12.Peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional melalui revitalisasi pasar tradisional.	12.Peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional melalui revitalisasi pasar tradisional.



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui percepatan penetapan, integrasi dan implementasi RDTR	1. Percepatan legalisasi RDTR melalui penyempurnaan dokumen teknis dan harmonisasi substansi teknis RDTR di wilayah strategis dan kawasan pertumbuhan dengan melibatkan partisipasi publik dan tenaga ahli	1. Penguatan pengendalian pembangunan berbasis RDTR melalui optimalisasi RDTR sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan ruang, dan penerapan insentif dan disinsentif	1. Penguatan pengendalian pembangunan berbasis RDTR melalui optimalisasi RDTR sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan ruang, dan penerapan insentif dan disinsentif	1. Penguatan pengendalian pembangunan berbasis RDTR melalui optimalisasi RDTR sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan ruang, dan penerapan insentif dan disinsentif	1. Penguatan pengendalian pembangunan berbasis RDTR melalui optimalisasi RDTR sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, pengembangan sistem pengawasan pemanfaatan ruang, dan penerapan insentif dan disinsentif
			2. Legalisasi RDTR sesuai tahapan serta Implementasi Perda RDTR melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, perangkat daerah dan dunia usaha serta integrasi informasi geospasial dengan Online Submission System (OSS) untuk perizinan berbasis RDTR				
Tujuan 4.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Kualitas Penguasaan IPTEK	Peningkatan daya saing daerah melalui penguasaan IPTEK yang mendorong produktivitas	1. Penguatan IPTEKIN melalui transformasi sumber daya dan transformasi ekosistem iptek dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah	1. Penguatan IPTEKIN melalui transformasi sumber daya dan transformasi ekosistem iptek dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah	1. Penguatan IPTEKIN melalui transformasi sumber daya dan transformasi ekosistem iptek dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah	1. Penguatan IPTEKIN melalui transformasi sumber daya dan transformasi ekosistem iptek dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah	1. Penguatan IPTEKIN melalui transformasi sumber daya dan transformasi ekosistem iptek dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
		daerah	2. Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK, serta kesadaran dan pemanfaatan teknologi digital.	2. Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK, serta kesadaran dan pemanfaatan teknologi digital.	2. Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK, serta kesadaran dan pemanfaatan teknologi digital.	2. Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK, serta kesadaran dan pemanfaatan teknologi digital.	2. Membangun kolaborasi dan kemitraan dengan lembaga dan perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM, kemampuan penelitian dan pengembangan di bidang IPTEK, serta kesadaran dan pemanfaatan teknologi digital.
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kualitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Penguatan kreativitas dan inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta peningkatan daya saing melalui pengembangan kebijakan dan ekosistem yang mendukung riset dan penerapan inovasi	1. Penguatan data dan informasi riset untuk mendukung kebijakan berbasis bukti dalam seluruh sektor pembangunan	1. Mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik	1. Mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik	1. Mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik	1. Mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik
			2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan riset, inovasi dan penerapan teknolog	2. Penyusunan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya	2. Penyusunan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya	2. Penyusunan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya	3. Penyusunan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya
			3. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya dalam pengembangan riset dan penerapan teknologi	3. Mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi baik di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah	3. Mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi baik di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah	3. Mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi baik di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah	4. Mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi baik di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah
				4. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta pengembangan kapasitas SDM secara menyeluruh	4. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta pengembangan kapasitas SDM secara menyeluruh	4. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta pengembangan kapasitas SDM secara menyeluruh	4. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta pengembangan kapasitas SDM secara menyeluruh
Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas	Meningkatkan PDRB sektor makan-minum melalui	1. Pengembangan daya tarik wisata lewat kurasi destinasi, kompetisi ide, revitalisasi kawasan,	1. Pengembangan pariwisata melalui penciptaan paket wisata kuliner tematik,	1. Mengintegrasikan seluruh layanan wisata dalam platform digital terpadu dan	1. Menjalin dan penguatan jaringan dengan pemangku kolaborasi kepentingan	1. Mengoptimalkan operasional dan kualitas layanan secara berkelanjutan,



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Kunjungan Wisatawan	fasilitasi daya tarik dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.	dan promosi digital yang didukung oleh pembangunan basis data terpadu untuk memperkuat daya saing Makassar sebagai kota wisata kuliner dan budaya	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi, serta digitalisasi layanan pariwisata.	mengevaluasi dampak terhadap PDRB sektor kuliner dan jumlah kunjungan wisatawan	lainnya dalam penciptaan paket wisata yang lebih menarik dan terintegrasi.	memperkuat pemasaran dan branding destinasi secara cerdas, serta memastikan regulasi dan infrastruktur pendukung terus kondusif untuk pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan
			2. Pemetaan ekosistem mangrove dan potensi wisata pada 3 lokasi (Untia, Lantebung dan Lakkang)	2. Pengembangan pariwisata melalui penciptaan paket wisata kuliner tematik, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi, serta digitalisasi layanan pariwisata.	2. Penciptaan paket wisata terpadu: “Makassar Etnik-Ekowisata 3 Hari 2 Malam”	2. Pengembangan pariwisata melalui penciptaan paket wisata kuliner tematik, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi, serta digitalisasi.	
			3. Pelatihan pengembangan Kelompok Sadar Wisata (KSW) wisata mangrove Untia, Lantebung, Lakkang, Laelae, Samalona dan Pantai Layar Putih).	3. Penyusunan paket wisata Mangrove.	3. Melaksanakan co-working space antara akademisi, operator tur, pengelola destinasi melalui Kelompok Sadar Wisata (KSW), dan pelaku ekonomi kreatif pada daya tarik wisata mangrove	3. Pengintegrasian seluruh layanan wisata dalam platform digital terpadu dan mengevaluasi dampak terhadap PDRB sektor kuliner dan jumlah kunjungan wisatawan mangrove	
			4. Pemetaan kawasan pesisir dan potensi ekoturisme di Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo serta mengadakan pelatihan pengembangan ekoturisme di 10 kawasan pulau dan	4. Pelatihan Wisata Digital pada 9 Kelompok Sadar Wisata (KSW) di Kota Makassar			
				5. Pembangunan dermaga kecil, jalur tracking, dan fasilitas edukasi lingkungan di 3 lokasi yakni Untia, Lantebung dan			



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			pesisir untuk mendorong pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan, dan peningkatan ekonomi masyarakat pesisir	Lakkang.			
				6. Sertifikasi CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>) untuk lokasi Wisata Mangrove			
				7. Pelatihan hospitality berkelanjutan dan customer experience bagi 9 Kelompok Sadar Wisata (KSW) di Kota Makassar			
				8. Pembangunan pusat informasi ekowisata di Lantebung			
	Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pemajuan Seni dan Budaya	Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini	1. Pengembangan zonasi kawasan cagar budaya yang produktif secara ekonomi, terjaga nilai sejarahnya, dan berdaya guna bagi masyarakat lokal	1. Pengembangan zonasi kawasan cagar budaya yang produktif secara ekonomi, terjaga nilai sejarahnya, dan berdaya guna bagi masyarakat lokal.	1. Pengembangan zonasi kawasan cagar budaya yang produktif secara ekonomi, terjaga nilai sejarahnya, dan berdaya guna bagi masyarakat lokal.	1. Pengembangan zonasi kawasan cagar budaya yang produktif secara ekonomi, terjaga nilai sejarahnya, dan berdaya guna bagi masyarakat lokal	1. Pengembangan zonasi kawasan cagar budaya yang produktif secara ekonomi, terjaga nilai sejarahnya, dan berdaya guna bagi masyarakat lokal.
			2. Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini	2. Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini	2. Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini	2. Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini	2. Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini
			3. Penguatan pelestarian Pemasaran dan promosi budaya oleh generasi muda dan komunitas seni untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	3. Penguatan pelestarian Pemasaran dan promosi budaya oleh generasi muda dan komunitas seni untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	3. Penguatan pelestarian Pemasaran dan promosi budaya oleh generasi muda dan komunitas seni untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	3. Penguatan pelestarian Pemasaran dan promosi budaya oleh generasi muda dan komunitas seni untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	3. Penguatan pelestarian Pemasaran dan promosi budaya oleh generasi muda dan komunitas seni untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal
			4. Penguatan pelestarian kepada generasi muda dan komunitas seni	4. Penguatan pelestarian kepada generasi muda dan komunitas seni	4. Penguatan pelestarian kepada generasi muda dan komunitas seni	4. Penguatan pelestarian kepada generasi muda dan komunitas seni	4. Penguatan pelestarian kepada generasi muda dan komunitas seni



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal	untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya lokal
	Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Penguatan Pusat Inovasi menjadi katalisator yang kuat untuk meningkatkan daya saing pariwisata didorong oleh kekayaan seni budaya dan kreativitas lokal yang inovatif.	1. Membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kondusif dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri ekonomi kreatif melalui regulasi yang adaptif, infrastruktur yang memadai, dan aksesibilitas terhadap sumber daya.	1. Perkuatan hilirisasi dan komersialisasi produk kreatif dengan mendorong inovasi, desain, dan pengembangan produk serta layanan kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi dan berdaya saing di pasar lokal, nasional, dan internasional.	1. Membangun pusat inovasi pariwisata untuk menginkubasi ide-ide kreatif dan teknologi baru yang didasarkan pada kekayaan seni, budaya, dan kearifan lokal.	1. Perkuatan jaringan dan kolaborasi serta mendorong sinergi antar pelaku ekonomi kreatif, akademisi, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk menciptakan ekosistem yang solid dan inovatif.	1. Mendorong sinergi antara industri pariwisata, seniman, dan komunitas lokal untuk menghasilkan produk dan pengalaman wisata yang unik, didukung oleh kekayaan seni dan kearifan budaya.
			2. Peningkatan kapasitas SDM kreatif dengan penguatan kompetensi dan keahlian pelaku ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pertukaran pengetahuan	2. Melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya kekayaan intelektual, memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual, dan mendorong pemanfaatannya untuk pertumbuhan ekonomi	2. Mendorong kolaborasi antara pelaku industri pariwisata, seniman, dan komunitas lokal untuk menciptakan produk dan pengalaman wisata yang unik dan inovatif.	2. Menciptakan sinergi yang kuat antara pelaku ekonomi kreatif, akademisi, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem yang solid dan inovatif.	2. Menciptakan pusat inovasi yang berfungsi sebagai inkubator bagi ide-ide kreatif dan teknologi baru, dengan fokus pada pengembangan pariwisata berbasis budaya.
					3. Pengembangan pariwisata berbasis budaya dengan menjadikan pusat inovasi sebagai wadah untuk menciptakan nilai tambah dari warisan seni dan budaya, sehingga meningkatkan daya saing destinasi.	3. Membangun ekosistem yang terintegrasi dengan mempererat hubungan antara pelaku industri kreatif, institusi pendidikan, dan sektor publik demi menciptakan inovasi dan peluang baru	3. Membangun ekosistem yang terintegrasi dengan memperkuat kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, akademisi, dan pemerintah untuk mendorong inovasi



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas	1. Penguatan aspek pemerintahan Digital melalui peningkatan kapabilitas dan budaya digital aparatur sipil negara, peningkatan interoperabilitas dan keterpaduan data lintas instansi pemerintah, penyediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan tangguh, serta penguatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan digital.	1. Penguatan aspek pemerintahan Digital melalui peningkatan kapabilitas dan budaya digital aparatur sipil negara, penguatan keamanan data dan konektivitas antar pusat data dan perangkat daerah, penyediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan tangguh, serta penguatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan digital.	1. Penguatan aspek pemerintahan Digital melalui peningkatan kapabilitas dan budaya digital aparatur sipil negara, peningkatan interoperabilitas dan keterpaduan data lintas instansi pemerintah, penyediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan tangguh, serta penguatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan digital.	1. Penguatan aspek pemerintahan Digital melalui peningkatan kapabilitas dan budaya digital aparatur sipil negara, peningkatan interoperabilitas dan keterpaduan data lintas instansi pemerintah, penyediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan tangguh, serta penguatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan digital.	1. Penguatan aspek pemerintahan Digital melalui peningkatan kapabilitas dan budaya digital aparatur sipil negara, peningkatan interoperabilitas dan keterpaduan data lintas instansi pemerintah, penyediaan infrastruktur digital yang berkualitas dan tangguh, serta penguatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan digital.
			2. Pengembangan digitalisasi layanan publik melalui integrasi layanan perizinan usaha, layanan administrasi kependudukan tambahan dan layanan sosial	2. Pengembangan digitalisasi layanan publik melalui integrasi layanan kesehatan, pendidikan dan kerjasama dengan sektor swasta.	2. Pengembangan digitalisasi layanan publik melalui integrasi layanan layanan transportasi, logistik dan pengembangan dashboard kontrol operasional terpusat pemkot serta Integrasi pusat data daerah dengan sistem layanan Makassar Super Apps serta implementasi green data center untuk efisiensi energi dan ramah lingkungan.	2. Pengembangan digitalisasi layanan publik melalui integrasi layanan sistem pembayaran terintegrasi untuk pajak, retribusi, denda layanan dan antrean online. serta integrasi layanan pendukung pariwisata dan budaya serta kolaborasi dengan aplikasi pihak ketiga.	2. Penyempurnaan integrasi layanan, evaluasi menyeluruh dan pengembangan lanjutan digitalisasi layanan publik.
Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketenteraman. dan Ketertiban Umum	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Memperkuat stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran serta masyarakat	1. Penguatan institusionalisasi partisipasi warga melalui forum komunikasi Kelurahan dan Kecamatan, (antara warga. RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas)	1. Peningkatan dan Pemanfaatan Infrastruktur Ruang yang Aman serta Pelibatan warga (RT/RW), komunitas pemuda, organisasi perlindungan masyarakat) dalam	1. Peningkatan dan Pemanfaatan Infrastruktur Ruang yang Aman serta Pelibatan warga (RT/RW), komunitas pemuda, organisasi Perlindungan masyarakat) dalam pemeliharaan keamanan	1. Peningkatan dan Pemanfaatan Infrastruktur Ruang yang Aman serta Pelibatan warga (RT/RW), komunitas pemuda, organisasi Perlindungan masyarakat) dalam	1. Peningkatan dan Pemanfaatan Infrastruktur Ruang yang Aman serta Pelibatan warga (RT/RW), komunitas pemuda, organisasi Perlindungan masyarakat) dalam



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
				pemeliharaan keamanan berbasis kewilayahan	berbasis kewilayahan	pemeliharaan keamanan berbasis kewilayahan	pemeliharaan keamanan berbasis kewilayahan
			2. Pemberdayaan kelompok rentan (anak muda, perempuan, disabilitas) dalam sistem keamanan lingkungan dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk menjamin rasa aman dan kebutuhan ruang publik yang sehat dan nyaman				
	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Memperkuat kehidupan beragama yang maslahat, mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi, dan saling menghargai antar umat beragama	1. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat komitmen kebangsaan yang menghargai keberagaman.	1. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat komitmen kebangsaan yang menghargai keberagaman.	1. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat komitmen kebangsaan yang menghargai keberagaman	1. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat komitmen kebangsaan yang menghargai keberagaman	1. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat komitmen kebangsaan yang menghargai keberagaman
			2. Penguatan dialog antar penganut umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme	2. Penguatan dialog antar penganut umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme	2. Penguatan dialog antar penganut umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme	2. Penguatan dialog antar penganut umat beragama dan penghayat kepercayaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme	2. Penguatan nilai-nilai moderasi beragama dan memperkuat komitmen kebangsaan yang menghargai keberagaman
			3. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu sebagai bentuk penghargaan, kepedulian, dan motivasi.	3. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu sebagai bentuk penghargaan, kepedulian, dan motivasi	3. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu sebagai bentuk penghargaan, kepedulian, dan motivasi	3. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu sebagai bentuk penghargaan, kepedulian, dan motivasi	3. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan melalui pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu sebagai bentuk penghargaan, kepedulian, dan motivasi



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya	1. Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dengan Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	1. Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dengan Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	1. Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dengan Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	1. Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dengan Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	1. Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya dengan Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan
			2. Peningkatan Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	2. Peningkatan Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	2. Peningkatan Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	2. Peningkatan Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	2. Peningkatan Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan
	Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, Berkelanjutan, dan berbasis hak anak	1. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial. Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan. Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender. Advokasi dan Kesadaran Sosial, dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender	1. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial. Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan. Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender. Advokasi dan Kesadaran Sosial, dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender	1. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial. Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan. Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender. Advokasi dan Kesadaran Sosial, dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender	1. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial. Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan. Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender. Advokasi dan Kesadaran Sosial, dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender	1. Peningkatan Akses Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Perempuan. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Kesehatan Reproduksi dan Perlindungan Sosial. Peningkatan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan. Pemberantasan Kekerasan Berbasis Gender. Advokasi dan Kesadaran Sosial, dan Penguatan Infrastruktur dan Kebijakan Gender
			2. Peningkatan koordinasi multipihak dengan pendekatan holistik	2. Peningkatan koordinasi multipihak dengan pendekatan holistik	2. Peningkatan koordinasi multipihak dengan pendekatan holistik	2. Peningkatan koordinasi multipihak dengan pendekatan holistik	2. Peningkatan koordinasi multipihak dengan pendekatan holistik



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			yang mencakup aspek pencegahan, penanganan langsung, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial	yang mencakup aspek pencegahan, penanganan langsung, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial	yang mencakup aspek pencegahan, penanganan langsung, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial	yang mencakup aspek pencegahan, penanganan langsung, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial	yang mencakup aspek pencegahan, penanganan langsung, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial
			3. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	3. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	3. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	3. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	3. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan
			4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak. kualitas pendidikan yang diterima	4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak. kualitas pendidikan yang diterima	4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak. kualitas pendidikan yang diterima	4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak. kualitas pendidikan yang diterima	4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak. kualitas pendidikan yang diterima
			5. Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. berkelanjutan. dan berbasis hak anak. Dengan Menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah	5. Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. berkelanjutan. dan berbasis hak anak. Dengan Menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah	5. Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. berkelanjutan. dan berbasis hak anak. Dengan Menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah	5. Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. berkelanjutan. dan berbasis hak anak. Dengan Menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah	5. Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. berkelanjutan. dan berbasis hak anak. Dengan Menjamin anak yang berstatus ATS dan APS untuk kembali bersekolah
			6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi	6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi	6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi	6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi	6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak.	Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak.	Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak.	Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak.	Perlindungan Anak dan sistem hukum terkait tindak kekerasan dan eksploitasi anak.
			7. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak, kualitas pendidikan yang diterima	7. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak, kualitas pendidikan yang diterima	7. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak, kualitas pendidikan yang diterima	7. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak, kualitas pendidikan yang diterima	7. Penyuluhan dan Pendidikan Publik yang Intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak anak dan pentingnya melibatkan masyarakat dalam melindungi anak-anak, terjaminnya akses terhadap layanan kesehatan anak, kualitas pendidikan yang diterima
			1. Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga.	1. Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga.	1. Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga.	1. Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga.	1. Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga.
			2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan melalui Pembangunan gelanggang remaja dan sport center di setiap kecamatan	2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan melalui Pembangunan gelanggang remaja dan sport center di setiap kecamatan	2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan melalui Pembangunan gelanggang remaja dan sport center di setiap kecamatan	2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan melalui Pembangunan gelanggang remaja dan sport center di setiap kecamatan	2. Penguatan Infrastruktur dan Fasilitas Olahraga serta Pengembangan tempat latihan olahraga yang terjangkau dan ramah bagi pemuda di kecamatan melalui Pembangunan gelanggang remaja dan sport center di setiap kecamatan
	Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga	3. Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. terjaminnya aspek	3. Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. terjaminnya aspek	3. Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. terjaminnya aspek	3. Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. terjaminnya aspek	3. Menciptakan peluang kerja yang layak dan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. terjaminnya aspek



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial	kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial	kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial	kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial	kesehatan fisik dan mental pemuda serta keterlibatan Partisipasi Politik dan Sosial
Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Memperluas peluang ekonomi yang lebih merata. peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	1. Penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan dan bantuan teknis untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.	1. Penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan dan bantuan teknis untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.	1. Penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan dan bantuan teknis untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.	1. Penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan dan bantuan teknis untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.	1. Penciptaan lapangan kerja, pelatihan kewirausahaan dan bantuan teknis untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
			2. Pengurangan beban pengeluaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah	2. Pengurangan beban pengeluaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah	2. Pengurangan beban pengeluaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah	2. Pengurangan beban pengeluaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah	2. Pengurangan beban pengeluaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah
			3. Peningkatan kualitas dan Keterampilan dengan pelatihan vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	3. Peningkatan kualitas dan Keterampilan dengan pelatihan vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	3. Peningkatan kualitas dan Keterampilan dengan pelatihan vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	3. Peningkatan kualitas dan Keterampilan dengan pelatihan vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja	3. Peningkatan kualitas dan Keterampilan dengan pelatihan vokasional sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
			4. Fasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	4. Fasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	4. Fasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	4. Fasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan	4. Fasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan
	Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM). mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan.	1. Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM), mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan melalui Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	1. Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM). mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan melalui Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	1. Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM). mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan melalui Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	1. Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM). mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan melalui Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	1. Penguatan pembangunan inklusif yang menghormati hak asasi manusia (HAM). mengurangi kesenjangan sosial bagi penyandang disabilitas dan memastikan aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan melalui Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan
			2. Pelatihan soft skills dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta Sertifikasi	2. Pelatihan soft skills dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta Sertifikasi	1. Pelatihan soft skills dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta Sertifikasi	2. Pelatihan soft skills dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta Sertifikasi	2. Pelatihan soft skills dan literasi digital bagi penyandang disabilitas serta Sertifikasi



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			kompetensi untuk penyandang disabilitas melalui Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel	kompetensi untuk penyandang disabilitas melalui Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel	kompetensi untuk penyandang disabilitas melalui Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel	kompetensi untuk penyandang disabilitas melalui Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel	kompetensi untuk penyandang disabilitas melalui Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel
Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan tata kelola lingkungan melalui pengendalian pencemaran, inovasi pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan penanganan sampah dari hulu ke hilir melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber dengan pelibatan komunitas; serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan mendorong dukungan alternatif pembiayaan dan kerjasama pihak swasta.	1. Peningkatan penanganan sampah dari hulu ke hilir melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber dengan pelibatan komunitas; serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan mendorong dukungan alternatif pembiayaan dan kerjasama pihak swasta.	1. Peningkatan penanganan sampah dari hulu ke hilir melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber dengan pelibatan komunitas; serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan mendorong dukungan alternatif pembiayaan dan kerjasama pihak swasta.	1. Peningkatan penanganan sampah dari hulu ke hilir melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber dengan pelibatan komunitas; serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan mendorong dukungan alternatif pembiayaan dan kerjasama pihak swasta.	1. Peningkatan penanganan sampah dari hulu ke hilir melalui edukasi pemilahan sampah sejak dari sumber dengan pelibatan komunitas; serta penyediaan sarana dan prasarana persampahan dengan mendorong dukungan alternatif pembiayaan dan kerjasama pihak swasta.
			2. Optimalisasi pengurangan timbulan sampah sejak dari sumber dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan termasuk TPS3R dan Bank Sampah, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	2. Optimalisasi pengurangan timbulan sampah sejak dari sumber dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan termasuk TPS3R dan Bank Sampah, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	2. Optimalisasi pengurangan timbulan sampah sejak dari sumber dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan termasuk TPS3R dan Bank Sampah, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	2. Optimalisasi pengurangan timbulan sampah sejak dari sumber dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan termasuk TPS3R dan Bank Sampah, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.	2. Optimalisasi pengurangan timbulan sampah sejak dari sumber dengan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah di tingkat kelurahan termasuk TPS3R dan Bank Sampah, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
			3. Peningkatan cakupan layanan persampahan secara inklusif melalui	3. Peningkatan cakupan layanan persampahan secara inklusif melalui	3. Peningkatan cakupan layanan persampahan secara inklusif melalui	3. Peningkatan cakupan layanan persampahan secara inklusif melalui	3. Peningkatan cakupan layanan persampahan secara inklusif melalui



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			penyusunan regulasi dan penerapan pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	penyusunan regulasi dan penerapan pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	penyusunan regulasi dan penerapan pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	penyusunan regulasi dan penerapan pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	penyusunan regulasi dan penerapan pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
			4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dengan mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemar termasuk pembersihan sampah pada saluran drainase sekunder dan primer dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dengan mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemar termasuk pembersihan sampah pada saluran drainase sekunder dan primer dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dengan mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemar termasuk pembersihan sampah pada saluran drainase sekunder dan primer dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dengan mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemar termasuk pembersihan sampah pada saluran drainase sekunder dan primer dengan melibatkan partisipasi masyarakat.	4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dengan mengoptimalkan pencegahan, pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemar termasuk pembersihan sampah pada saluran drainase sekunder dan primer dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
			5. Penguatan pengembangan RTH melalui pemetaan dan identifikasi lokasi potensial RTH baru serta penguatan regulasi terkait pengelolaan Keanekaragaman Hayati	5. Penguatan pengembangan RTH melalui pemetaan dan identifikasi lokasi potensial RTH baru serta penguatan regulasi terkait pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
			6. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berbasis adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan RTH, pengembangan taman berbasis komunitas sebagai taman bermain dan kreatif dan penanaman vegetasi mangrove pada wilayah	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berbasis adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan RTH, pengembangan taman berbasis komunitas sebagai taman bermain dan kreatif dan penanaman vegetasi mangrove pada wilayah	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berbasis adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan RTH, pengembangan taman berbasis komunitas sebagai taman bermain dan kreatif dan penanaman vegetasi mangrove pada wilayah	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berbasis adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan RTH, pengembangan taman berbasis komunitas sebagai taman bermain dan kreatif dan penanaman vegetasi mangrove pada wilayah	6. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH berbasis adaptasi perubahan iklim melalui pembangunan RTH, pengembangan taman berbasis komunitas sebagai taman bermain dan kreatif dan penanaman vegetasi mangrove pada wilayah



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			pesisir dengan mendorong partisipasi swasta melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya.	pesisir dengan mendorong partisipasi swasta melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya.	pesisir dengan mendorong partisipasi swasta melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya.	wilayah pesisir dengan mendorong partisipasi swasta melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya.	wilayah pesisir dengan mendorong partisipasi swasta melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya.
Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada edukasi, infrastruktur hijau, pemanfaatan teknologi adaptif, kolaborasi multipihak dan pendekatan partisipatif	1. Mendorong upaya penurunan emisi GRK melalui penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta mendorong penggunaan kendaraan listrik maupun kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan;	1. Mendorong upaya penurunan emisi GRK melalui penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta mendorong penggunaan kendaraan listrik maupun kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan;	1. Mendorong upaya penurunan emisi GRK melalui penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta mendorong penggunaan kendaraan listrik maupun kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan;	1. Mendorong upaya penurunan emisi GRK melalui penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta mendorong penggunaan kendaraan listrik maupun kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan;	1. Mendorong upaya penurunan emisi GRK melalui penguatan tata kelola dan pelaksanaan aksi kegiatan yang mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK serta mendorong penggunaan kendaraan listrik maupun kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan;
			2. Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan melalui dukungan dan pengembangan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan utamanya di wilayah Kec.Kepulauan Sangkarrang.	2. Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan melalui dukungan dan pengembangan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan utamanya di wilayah Kec.Kepulauan Sangkarrang.	2. Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan melalui dukungan dan pengembangan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan utamanya di wilayah Kec.Kepulauan Sangkarrang.	2. Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan melalui dukungan dan pengembangan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan utamanya di wilayah Kec.Kepulauan Sangkarrang.	2. Peningkatan ketahanan energi yang ramah lingkungan melalui dukungan dan pengembangan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana energi baru terbarukan utamanya di wilayah Kec.Kepulauan Sangkarrang.
			3. Mendorong efisiensi energi melalui penguatan regulasi, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur hijau	3. Mendorong efisiensi energi melalui penguatan regulasi, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur hijau	3. Mendorong efisiensi energi melalui penguatan regulasi, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur hijau	3. Mendorong efisiensi energi melalui penguatan regulasi, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur hijau	3. Mendorong efisiensi energi melalui penguatan regulasi, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan infrastruktur hijau



Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			didukung penerapan insentif dan disinsentif.	didukung penerapan insentif dan disinsentif.	didukung penerapan insentif dan disinsentif.	didukung penerapan insentif dan disinsentif.	didukung penerapan insentif dan disinsentif.
			4. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana banjir melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah rawan banjir dan pengaman pesisir pantai	4. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana banjir melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah rawan banjir dan pengaman pesisir pantai	4. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana banjir melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah rawan banjir dan pengaman pesisir pantai	4. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana banjir melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah rawan banjir dan pengaman pesisir pantai	4. Peningkatan ketangguhan terhadap bencana banjir melalui perencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada wilayah rawan banjir dan pengaman pesisir pantai
			5. Penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada pemerintah dan masyarakat serta penguatan layanan peringatan dini bencana.	5. Penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada pemerintah dan masyarakat serta penguatan layanan peringatan dini bencana.	5. Penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada pemerintah dan masyarakat serta penguatan layanan peringatan dini bencana.	5. Penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada pemerintah dan masyarakat serta penguatan layanan peringatan dini bencana.	5. Penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada pemerintah dan masyarakat serta penguatan layanan peringatan dini bencana.



3.3.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi lingkungan strategis pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan perodesasi pertama dari RPJPD Kota Makassar Tahun 2025-2045, dimana arah kebijakan tahap pertama RPJPD Kota Makassar adalah “Penguatan Landasan Transformasi”, yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Arah Kebijakan Pembangunan
RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030

Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan			
Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah. dan Penciptaan Lapangan Kerja	Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan melalui peningkatan kualitas SDM yang adaptif. pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan kawasan industri terintegrasi, mendorong adopsi teknologi dan inovasi serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan deregulasi dan kepastian hukum.
		Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsif. melalui revitalisasi vokasi berorientasi kompetensi dan sertifikasi. penyelarasan kurikulum dengan industri, serta pemberdayaan ekonomi wilayah melalui pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis potensi lokal dan pemberian modal UMKM secara bertahap
	Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan membangun sistem pengelolaan PAD yang inovatif. Transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika ekonomi daerah.
		Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui penerapan teknologi pertanian modern dan pendampingan berkelanjutan kepada petani.
		Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Mewujudkan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi. bersinergi dengan sektor swasta dan institusi syariah untuk menarik investasi padat karya dan berwawasan lingkungan melalui skema KPBU dan KSPI



Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan	Mengoptimalkan Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan. serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik sistem pendidikan maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Mengoptimalkan Pembudayaan perilaku hidup sehat dan Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan. melalui pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif. percepatan eliminasi penyakit dan penerapan kebijakan promotif preventif. perkuatan sistem surveilans kesehatan untuk memantau penyakit
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Optimalisasi peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, berkarakter dan mampu berkontribusi dalam pengembangan kewirausahaan.
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan	Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan secara merata, inklusif dan terintegrasi melalui kolaborasi. pemanfaatan teknologi dan pengembangan skema pembiayaan inovatif
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penguatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui percepatan penetapan, integrasi dan implementasi RDTR
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi. Seni Budaya. dan Pariwisata	Tujuan 4.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Peningkatan daya saing daerah melalui penguasaan IPTEK yang mendorong produktivitas daerah
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kualitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Penguatan kreativitas dan inovasi dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan serta peningkatan daya saing melalui pengembangan kebijakan dan ekosistem yang mendukung riset dan penerapan inovasi
	Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Meningkatkan PDRB sektor makan-minum melalui fasilitasi daya tarik dan peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.
		Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Penguatan ketangguhan masyarakat melalui pendidikan keagamaan dan penguatan budaya serta kearifan lokal sejak dini
		Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi	Penguatan Pusat Inovasi menjadi katalisator yang kuat untuk meningkatkan daya saing pariwisata didorong oleh kekayaan seni budaya dan kreativitas lokal yang inovatif.



Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		Kreatif	
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing. Serta Menegakkan Ketertiban Umum	Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis kinerja yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas
	Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan. Ketenteraman. dan Ketertiban Umum	Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Memperkuat stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dengan melibatkan peran serta masyarakat
		Sasaran 5.2.2: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Memperkuat kehidupan beragama yang maslahat, mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi, dan saling menghargai antar umat beragama
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan Dan Perlindungan Perempuan. Anak. Dan Penyandang Disabilitas. serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender	Mengoptimalkan penurunan ketimpangan gender melalui pendekatan holistik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan budaya
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan berbasis hak anak
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Penguatan terciptanya generasi muda yang unggul, berdaya saing, serta peningkatan prestasi olahraga,
	Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran	Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan	Memperluas peluang ekonomi yang lebih merata. peningkatan Sumber Daya Manusia dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
		Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Penguatan tata kelola lingkungan melalui pengendalian pencemaran, inovasi pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup
			Penguatan tata kelola lingkungan melalui pengendalian pencemaran, inovasi pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. dan Mitigasi	Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan tata kelola lingkungan melalui pengendalian pencemaran, inovasi pengelolaan sampah dan pengelolaan ruang terbuka hijau secara partisipatif dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup



Misi	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Bencana	Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berfokus pada edukasi, infrastruktur hijau, pemanfaatan teknologi adaptif, kolaborasi multipihak dan pendekatan partisipatif

3.3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program-program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja, ditetapkan menjadi Program Prioritas, ataw Program Pembangunan Daerah.

Selain dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, program prioritas juga memperhatikan program strategis kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun program prioritas Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar dapat dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan Program Strategis MULIA (Janji Politik)

Visi/Misi	Program Strategis MULIA (Janji Politik)	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
Visi: MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN, DAN BERKELANJUTAN		
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja	1. Membangun <i>Makassar Creative Hub</i> sebagai wadah kreatifitas, pengembangan <i>skill</i> , dan <i>Co-Working Space</i> di setiap Kecamatan	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan <i>skill</i> dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi
	2. Pemberian akses modal usaha UMKM	
	3. Membentuk Gerai UMKM pada 153 kelurahan	
	4. Pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW	
	5. Penciptaan 10 titik akses PKL	
	6. Pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir	
	7. Pembangunan pusat budidaya dan wisata mangrove di wilayah pesisir dan pulau	
	8. Menggalakkan konsep <i>urban farming</i> pada masyarakat	
	9. Relaksasi PBB Bagi Pensiunan Pejabat Negara, Guru, Polri, Pensiunan BUMN/BUMD dan Veteran Pejuang	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan
	10. Relaksasi Pajak Reklame bagi UMKM	
	11. Relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri	
	12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
	13. Perlindungan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja	



Visi/Misi	Program Strategis MULIA (Janji Politik)	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
Visi: MAKASSAR UNGGUL. INKLUSIF. AMAN. DAN BERKELANJUTAN		
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14. Gratis seragam dan Peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD dan SMP	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
	15. Penyediaan ambulance secara gratis	
	16. Penambahan Insentif Nakes pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau	
	17. Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan dari RS ke Rumah Pasien	
	18. Penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau	
	19. Pembangunan gedung Dinas Pendidikan (<i>Education City Hall</i>)	
	20. Pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi	
	21. Pemberian Tunjangan bagi Wali Kelas SD dan SMP yang bertugas di pulau-pulau	
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan	22. Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD di setiap kecamatan	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan
	23. Perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i> ;	
	24. Pembangunan stadion sepak bola	
	25. Revitalisasi pasar tradisional	
	26. Penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan	
	27. Bedah Rumah bagi KK Prasejahtera	
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata	28. Gratis pemasangan instalasi air bersih dan memastikan kebutuhan air bersih warga terpenuhi	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal
	29. Pembuatan <i>blue print</i> pembangunan situs kota tua di Makassar	
	30. Menghidupkan etnoturisme di kota makassar	
	31. Penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah	
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum	32. Penataan Pesisir dan Pulau sebagai sentra baru ekoturisme	6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital
	33. Digitalisasi Pelayanan publik dan informasi publik melalui <i>Makassar Super Apps</i>	
	34. Desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan	
	35. Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi	
	36. Pemberian insentif dan pencairan TPP bagi pegawai secara proporsional dan tepat waktu	



Visi/Misi	Program Strategis MULIA (Janji Politik)	Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD
Visi: MAKASSAR UNGGUL. INKLUSIF. AMAN. DAN BERKELANJUTAN		
	37. Pemilihan langsung RT/RW 38. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW 39. Pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu	7. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	40. Penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas 41. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan. anak dan difabel korban kekerasan 42. Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel 43. Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan 44. Menjamin siwa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah 45. Makassar bebas Anak Jalanan 46. Pembangunan gelanggang remaja dan <i>sport center</i> di setiap kecamatan	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Serta Mitigasi Bencana	47. Meningkatkan persentase ruang terbuka hijau 48. Revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif 49. Gratis iuran sampah bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem 50. Penguatan Mitigasi bencana pada warga masyarakat	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim

Program Prioritas atau program pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029. merupakan program-program yang secara spesifik langsung terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran. dan program untuk menjawab prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah disampaikan pada proses politik (Pilkada). Adapun Program Prioritas RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029. dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.17

Program Prioritas RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030

Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan

Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja				
Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi		Pertumbuhan Ekonomi (%)		
Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah		1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 2. Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Kota Makassar	Program Pengembangan Ekspor	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat		1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 2. PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya produktivitas dan kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	Program Penempatan Tenaga Kerja	peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Pertumbuhan Wirausaha		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah		Indeks Daya Saing Daerah		
Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan		Tingkat Inflasi (%)		
		Indeks Ketahanan Pangan		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok		



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	Outcome: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
	Outcome: Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian (<i>urban farming</i>)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
		Peningkatan Produksi Hortikultura		
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan di masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi		
	Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Outcome: Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan kota	Persentase daerah rentan rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar		Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)		
	Outcome: Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Total terhadap Target Investas	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Efektivitas Kerja Sama Daerah		



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia		
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan		Indeks Pendidikan		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dan kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
		Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)		
		Skor Kemampuan Literasi SD		
		Skor Kemampuan Literasi SMP		
		Skor Kemampuan Numerasi SD		
		Skor Kemampuan Numerasi SMP		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B		
		Iklim Inklusivitas SD		
		Iklim Inklusivitas SMP		
		Iklim Keamanan SD		
		Iklim Keamanan SMP		
		Iklim Kebinekaan SD		
		Iklim Kebinekaan SMP		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)		
	Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan Pelayanan persalinan		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase warga negara usia 15- 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar		
		Persentase penderita hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
		Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan Pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
		Persentase Orang terduga TBC Mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)		
	Outcome: Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Total terhadap Target Investas	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Pertumbuhan Wirausaha		
	Outcome: Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	Program Penempatan Tenaga Kerja	
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan				
Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata		Indeks Layanan Infrastruktur		
Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi		1. Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan		
		2. Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakarya		
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan perkotaan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	Program Penyelenggaraan Jalan	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU permukiman	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	Outcome: Meningkatnya jumlah rumah layak huni pada kawasan kumuh	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan
	Outcome: Meningkatnya perlindungan masyarakat dari banjir, dan genangan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi. erosi. dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar		
	Outcome: Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi		
	Outcome: Meningkatnya akses rumah tinggal terhadap akses sanitasi aman	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
		Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman		
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung	
Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata				
Tujuan 4.1: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah		
Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK		Indeks Kapabilitas Inovasi		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan		Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni
Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata		Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Terhadap PDRB (%)		



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan		Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)		budaya lokal
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kuantitas daya tarik pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya		Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam Warisan Budaya Takbenda (%)		
		Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif		Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif		
		Persentase Industri Ekonomi kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing. Serta Menegakkan Ketertiban Umum				



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi		
Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
		Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
		Persentase Penurunan SILPA		
		Persentase laporan keuangan tepat waktu		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Program Kepegawaian Daerah	
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya		



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya integrasi aplikasi pemerintah daerah (<i>Makassar super apps</i>)	Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat		Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Kabupaten/Kota	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan	Persentase gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Sasaran 5.2.2: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat		Indeks Kota Toleran		
	<i>Outcome:</i> Menurunnya jumlah konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalagunaan, Narkotika, Fasilitas Kerukunan, Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga				
Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesenjangan Gender		Indeks Pembangunan Keluarga		
Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Program Perlindungan Perempuan	
Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	Program Perlindungan Khusus Anak	
Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga		1. Indeks Pembangunan Pemuda		
		2. Indeks Pembangunan Keolahragaan		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran		Tingkat Kemiskinan (%)		
Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas Pendapatan		Gini Rasio		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	bagi PPKS di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti		
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Serta Mitigasi Bencana				
Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		1. Indeks Kualitas Air		
		2. Indeks Kualitas Udara		
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
		4. Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya kualitas pemenuhan baku mutu lingkungan	Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya keterpenuhan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
	<i>Outcome:</i> Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana		
Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim		Indeks Ketahanan Daerah		
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)		
	Outcome: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
	Outcome: Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	
	Outcome: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (response time 15 Menit)		



Misi/ Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/ Program	Program Prioritas	Prioritas Pembangunan Daerah
	Outcome: Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	
	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Kinerja Lalu Lintas Kota Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	



Sebagai langkah konkret mencapai tujuan dan sasaran, di dalam RPJMN Tahun 2025-2029, diidentifikasi beberapa Kegiatan Prioritas. Kegiatan Prioritas merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian visi, misi dan Program Strategis (Janji Politik). Kegiatan Prioritas ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, yang disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik SKPD, BUMD, Swasta dan *Stakeholder* lainnya. Kegiatan Prioritas RPJMD dalam pencapaian Program Strategis dan Program Unggulan (Janji Politik) Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Tabel 3.18
Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja RPJMD Dalam Pencapaian Janji Politik
Kota Makassar Tahun 2025-2029

Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja								
1. Membangun <i>Makassar Creative Hub</i> sebagai wadah kreatifitas, pengembangan <i>skill</i> , dan <i>Co-Working Space</i> di setiap Kecamatan	• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Berbasis Komunitas 200 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Berbasis Komunitas 500 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Berbasis Komunitas 500 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Berbasis Komunitas 500 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Berbasis Komunitas 500 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif sebanyak 500 Orang 2. Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi bagi pekerja industri Pariwisata 200 orang 3. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 300 orang 4. Fasilitasi Pelatihan Berbasis Komunitas 500 orang	Dinas Pariwisata
	• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak	Pembangunan dan Pembentukan <i>Makassar Creative Hub</i> pada 2 Lokasi	Pembangunan dan Pembentukan <i>Makassar Creative Hub</i> pada 5 Lokasi	Pembangunan dan Pembentukan <i>Makassar Creative Hub</i> pada 5 Lokasi	Pembangunan dan Pembentukan <i>Makassar Creative Hub</i> pada 3 Lokasi	--	--	



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kekayaan Intelektual							
	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar <i>Skill Competition</i> (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 80 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar <i>Skill Competition</i> (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 100 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar <i>Skill Competition</i> (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 100 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar <i>Skill Competition</i> (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 100 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar <i>Skill Competition</i> (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 100 orang	1. Pelatihan Berbasis Kompetensi SDM siap pakai sebanyak 150 Orang 2. Makassar <i>Skill Competition</i> (1 kali) 3. Sertifikasi Kompetensi sebanyak 100 orang	
2. Pemberian modal usaha UMKM	Program Pengembangan UMKM	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (Target 100 Koperasi dan 300 UMKM) 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR (Target 153 KKMP, 50 Koperasi non KKMP dan 150 UMKM)	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (Target 100 Koperasi dan 300 UMKM) 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR (Target 153 KKMP, 50 Koperasi non KKMP dan 150 UMKM)	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (Target 100 Koperasi dan 300 UMKM) 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR (Target 153 KKMP, 50 Koperasi non KKMP dan 150 UMKM)	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (Target 100 Koperasi dan 300 UMKM) 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR (Target 153 KKMP, 50 Koperasi non KKMP dan 150 UMKM)	1. Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi dan UMKM (Target 100 Koperasi dan 300 UMKM) 2. Fasilitasi Akses pembiayaan KUR (Target 153 KKMP, 50 Koperasi non KKMP dan 150 UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3. Membentuk Gerai UMKM pada 153 kelurahan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (15 Kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (30 kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (30 kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (30 kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (30 kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan	1. Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik (18 Kelurahan) 2. Peningkatan Kualitas Mutu produk dan Penumbuhan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	Kemampuan Usaha sebanyak 1000 UMKM	
4. Pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	1. Pengembangan dan Pembinaan Melalui Inkubator Center sebanyak 1000 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Penciptaan 10 titik akses PKL	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)		1. Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2 titik akses PKL) 2. Penataan dan Pembinaan UMKM	1. Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2 titik akses PKL) 2. Penataan dan Pembinaan UMKM	1. Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2 titik akses PKL) 2. Penataan dan Pembinaan UMKM	1. Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2 titik akses PKL) 2. Penataan dan Pembinaan UMKM	1. Pelatihan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) (2 titik akses PKL) 2. Penataan dan Pembinaan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	1. Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik (280 orang yang dilatih untuk daur ulang sampah plastik)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Pembangunan pusat budidaya dan wisata mangrove di wilayah pesisir dan pulau	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pemetaan ekosistem mangrove dan potensi wisata pada 3 lokasi (Untia, Lantebung dan Lakkang) 2. Pelatihan pengembangan wisata mangrove pada 6 KSW (Untia, Lantebung, Lakkang, Laelae, Samalona dan Pantai Layar Putih)	1. Penyusunan masterplan dan DED pengembangan Kawasan ekowisata Mangrove (Lantebung, Untia dan Lakkang); 2. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi 6 KSW	1. Penyusunan paket wisata Mangrove Digital pada 6 KSW di Kota Makassar 2. Pelatihan Wisata Dermaga kecil, jalur tracking, dan fasilitas edukasi lingkungan di 3 lokasi yakni Untia, Lantebung dan Lakkang	1. Sertifikasi CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>) untuk lokasi Wisata Mangrove 2. Pelatihan hospitality berkelanjutan dan customer experience bagi 6 KSW 3. Pembangunan pusat informasi ekowisata di Lantebung	1. Penciptaan paket wisata terpadu: “Makassar Etnik-Ekowisata 3 Hari 2 Malam” 2. Melaksanakan <i>co-working space</i> antara akademisi, operator tur, pengelolaan destinasi (KSW), dan pelaku ekonomi kreatif pada daya tarik wisata mangrove	1. Penyusunan regulasi investasi hijau dan inklusif di kawasan wisata. 2. Monitoring dampak lingkungan dan sosial pariwisata berbasis indikator berkelanjutan. 3. Pembentukan Forum Eko-Etnotourisme Kota Makassar	Dinas Pariwisata



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8. Menggalakkan konsep <i>urban farming</i> pada masyarakat	• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pembentukan Kelompok <i>Urban Farming</i> Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan <i>Urban Farming</i>	1. Pembentukan Kelompok <i>Urban Farming</i> Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan <i>Urban Farming</i>	1. Pembentukan Kelompok <i>Urban Farming</i> Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan <i>Urban Farming</i>	1. Pembentukan Kelompok <i>Urban Farming</i> Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan <i>Urban Farming</i>	1. Pembentukan Kelompok <i>Urban Farming</i> Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan <i>Urban Farming</i>	1. Pembentukan Kelompok <i>Urban Farming</i> Pada 15 Lokasi 2. Pengadaan Bibit/Peralatan <i>Urban Farming</i>	Dinas Perikanan dan Pertanian
	• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengadaan <i>Mobile Storage</i> Pangan 2. Perencanaan Pembangunan Storage Pangan	1. Pembangunan Storage Pangan	1. Fasilitasi MoU Kelompok Tani/ KWT bersama Distributor / Toko Pangan 2. Fasilitasi Distribusi/pemasaran hasil <i>urban farming</i> pada Gerakan Pangan Murah/MBG	1. Fasilitasi MoU Kelompok Tani/ KWT bersama Distributor / Toko Pangan 2. Fasilitasi Distribusi/pemasaran hasil <i>urban farming</i> pada Gerakan Pangan Murah/MBG	1. Fasilitasi MoU Kelompok Tani/ KWT bersama Distributor / Toko Pangan 2. Fasilitasi Distribusi/pemasaran hasil <i>urban farming</i> pada Gerakan Pangan Murah/MBG	1. Fasilitasi MoU Kelompok Tani/ KWT bersama Distributor / Toko Pangan 2. Fasilitasi Distribusi/pemasaran hasil <i>urban farming</i> pada Gerakan Pangan Murah/MBG	Dinas Ketahanan Pangan
9. Relaksasi PBB Bagi Pensiunan Pejabat Negara, Guru, Polri, Pensiunan BUMN/BUMD dan Veteran Pejuang	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan	1. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 50% bagi WP Pensiunan Pejabat Negara, PNS, TNI/Polri, Pensiunan BUMN, Pensiunan BUMD termasuk istri/suami, dan/atau janda/dudanya 2. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2, 75% bagi WP orang pribadi Veteran Pejuang Kemerdekaan	Badan Pendapatan Daerah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3. janda/dudanya Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk janda/dudanya 3. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk janda/dudanya 3. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk janda/dudanya 3. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk janda/dudanya 3. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	dan Veteran Pembela Kemerdekaan, dan penerima Tanda Jasa Bintang Gerilya termasuk janda/dudanya 3. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi pensiunan swasta dengan penghasilan terakhir di bawah Rp. 4 jt 4. Pengurangan pokok pembayaran PBB-P2 sebesar 50% bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu secara ekonomi	
10. Relaksasi Pajak Reklame bagi UMKM	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan	1. Izin penyelenggaraan reklame tidak berlaku bagi: Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan	Badan Pendapatan Daerah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m ² (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/dikuasai	sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m ² (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/dikuasai	sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m ² (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/dikuasai	sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m ² (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/dikuasai	sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m ² (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/dikuasai	sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, dengan ketentuan luas tidak melebihi 2 m ² (dua meter persegi) dan menempel di bangunan miliknya/dikuasai	
11. Relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penguatan regulasi daerah tata kelola dan kemudahan investasi daerah Kota Makassar, serta pemutakhiran peta potensi dan promosi investasi berbasis data. 2. Penyusunan standar nilai-nilai budaya kerja yang berfokus pelayanan prima dan terintegrasi	1. Penataan regulasi daerah dan tata Kelola Investasi daerah Kota Makassar dan investasi tumbuh serta pembentukan <i>command center</i> (fasilitasi investasi) investasi daerah untuk layanan proaktif 2. Pelatihan dan intervensi <i>MINDSPACE Service Excellent</i>	1. Peningkatan kapasitas pengelola investasi peningkatan kapasitas pengelola konsultasi dan pengaduan investasi serta pengawasan investasi daerah kota makassar 2. Evaluasi kinerja dan survey kepuasan masyarakat	1. Evaluasi tata Kelola investasi pengembangan sistem untuk memenuhi kebutuhan investor penegakkan kepatuhan terhadap hasil pengawasan pengawasan kompetensi pelayanan publik SDA 2. Peningkatan kompetensi pelayanan publik SDA	1. Penyesuaian kebijakan berbasis hasil evaluasi serta penerapan sistem persetujuan investasi otomatis untuk investasi daerah dan proyek strategis nasional 2. Penerapan budaya kerja digital dan berbasis teknologi informasi	1. Layanan investasi <i>ultimate</i> (paripurna) yang respon terhadap dinamika global	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. <i>Updating</i> data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk pembayaran	1. <i>Updating</i> data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk	1. <i>Updating</i> data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk	1. <i>Updating</i> data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk	1. <i>Updating</i> data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk	1. <i>Updating</i> data PBB-P2 2. Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB 3. Koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi untuk	Badan Pendapatan Daerah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (<i>host to host</i> Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah 6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih <i>massif</i>	pembayaran retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (<i>host to host</i> Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah 6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih <i>massif</i> 8. GIS pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	pembayaran retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (<i>host to host</i> Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah 6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih <i>massif</i> 8. GIS pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	pembayaran retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (<i>host to host</i> Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah 6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih <i>massif</i> 8. GIS pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	pembayaran retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (<i>host to host</i> Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah 6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih <i>massif</i> 8. GIS pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	pembayaran retribusi secara non tunai 4. Integrasi data dengan SKPD terkait (<i>host to host</i> Makassar Super Apps) 5. Pemasangan stiker pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah 6. Sosialisasi semua jenis Pajak Daerah 7. Mengintensifkan pengawasan, pengendalian, penindakan, dan penagihan piutang Pajak Daerah secara lebih <i>massif</i> 8. GIS pemutakhiran data dan pendaftaran potensi seluruh Objek Pajak Daerah	
13. Perlindungan dan bantuan hukum bagi tenaga kerja dan Makassar Berbagi Jaminan Sosial (Berjasa)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Sosialisasi terkait perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja 2. MOU dan mendorong SKPD terkait dalam isu	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Perlindungan Hukum bagi tenaga kerja . 3. Penyuluhan Hukum dan pendampingan hukum secara non litigasi bagi tenaga kerja yang terlibat perselisihan ketenagakerjaan						
	- Program Hubungan Industrial - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa bantuan iuran Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada 81.466 orang pekerja rentan	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua) bagi 45.000 pekerja rentan 2. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 36.466 pekerja rentan 3. Pemberian Jaminan Sosial bagi 17.217 pekerja keagamaan, Kader Kesehatan/KB, Rt/Rw	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua) bagi 45.000 pekerja rentan 2. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 36.466 pekerja rentan 3. Pemberian Jaminan Sosial bagi 17.217 pekerja keagamaan, Kader Kesehatan/KB, Rt/Rw	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua) bagi 45.000 pekerja rentan 2. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 36.466 pekerja rentan 3. Pemberian Jaminan Sosial bagi 17.217 pekerja keagamaan, Kader Kesehatan/KB, Rt/Rw	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua) bagi 45.000 pekerja rentan 2. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 36.466 pekerja rentan 3. Pemberian Jaminan Sosial bagi 17.217 pekerja keagamaan, Kader Kesehatan/KB, Rt/Rw	1. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Hari Tua) bagi 45.000 pekerja rentan 2. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi 36.466 pekerja rentan 3. Pemberian Jaminan Sosial bagi 17.217 pekerja keagamaan, Kader Kesehatan/KB, Rt/Rw	Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk KB, Sekretariat Daerah, dan Seluruh Kecamatan



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing								
14. Gratis seragam dan Peralatan sekolah bagi siswa-siswi SD dan SMP	Program Pengelolaan Pendidikan	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Pemberian Seragam Gratis untuk siswa SD dan SMP di Kota Makassar	Dinas Pendidikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15. Penyediaan ambulance secara gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Ambulans Laut/ <i>Speed Boat</i> 1 unit untuk Puskesmas dan Pustu di Kepulauan	Operasional Ambulans Laut	Operasional Ambulans Laut	Operasional Ambulans Laut	Operasional Ambulans Laut	Operasional Ambulans Laut	Dinas Kesehatan
		Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	Operasional ambulans Puskesmas dan RSUD	
16. Penambahan Insentif Nakes pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kenaikan tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan akses jauh dan dekat	Pemberian tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan zonasi wilayah	Pemberian tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan zonasi wilayah	Pemberian tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan zonasi wilayah	Pemberian tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan zonasi wilayah	Pemberian tunjangan tenaga medis dan paramedis pulau berdasarkan zonasi wilayah	Dinas Kesehatan
17. Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan dari RS ke Rumah Pasien	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Pengadaan motor operasional pengantaran obat sebanyak 2 unit	Operasional Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan	Operasional Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan	Operasional Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan	Operasional Layanan Gratis pemeriksaan dan Pengantaran Obat Pasien Rawat Jalan	Dinas Kesehatan
18. Penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (2 kali dalam	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (4 kali dalam	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (4 kali dalam	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (4 kali dalam	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (4 kali dalam	Pemeriksaan kesehatan terpadu dokter spesialis untuk masyarakat pulau (4 kali dalam	Dinas Kesehatan



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		setahun)	setahun)	setahun)	setahun)	setahun)	setahun)	
19. Pembangunan gedung Dinas Pendidikan (<i>Education City Hall</i>)	Program Pengelolaan Pendidikan		1 unit Gedung Kantor Dinas Pendidikan/ <i>Educator City Hall</i>	Pengadaan Meubelair				Dinas Pendidikan
20. Pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi	Program Kepegawaian Daerah	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Peningkatan kompetensi guru melalui lanjut studi dengan pemberian beasiswa sebanyak 15 Orang untuk jenjang S2, dan 10 Orang untuk jenjang S3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
21. Pemberian Tunjangan bagi Wali Kelas SD dan SMP yang bertugas di pulau-pulau	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau kecil)	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau)	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau)	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau)	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau)	Pemberian tunjangan khusus sebagai bentuk kompensasi kepada tenaga Pendidik dan Kependidikan di daerah khusus (perbatasan, atau pulau-pulau)	Dinas Pendidikan
22. Pembangunan Sekolah terintegrasi PAUD/SD	Program Pengelolaan Pendidikan		Pembangunan unit sekolah baru terintegrasi (PAUD/SD)	Pembangunan unit sekolah baru terintegrasi (PAUD/SD)	Pembangunan unit sekolah baru terintegrasi (PAUD/SD)	Pembangunan unit sekolah baru terintegrasi (PAUD/SD)	Pembangunan unit sekolah baru terintegrasi (PAUD/SD)	Dinas Pendidikan
Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan								
23. Perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1	1. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (1	Dinas Pekerjaan Umum



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggungjawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i> ;		unit);	unit);	unit);	unit);	unit);	unit);	
		2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit);	2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit);	2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit);	2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit);	2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit);	2. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Perkotaan (1 unit);	
		3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m ³ /hari atau 1000 SR;	3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m ³ /hari atau 1000 SR;	3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m ³ /hari atau 1000 SR;	3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m ³ /hari atau 1000 SR;	3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m ³ /hari atau 1000 SR;	3. Pembangunan SPALD skala Perkotaan dengan sambungan IPAL Losari 480 m ³ /hari atau 1000 SR;	
		4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit);	4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit);	4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit);	4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit);	4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit);	4. Optimalisasi SPALD terpusat Skala Permukiman (1 unit);	
		5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (2000 rumah tangga);	5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1500 rumah tangga);	5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1500 rumah tangga);	5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1500 rumah tangga);	5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1500 rumah tangga);	5. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (1500 rumah tangga);	
		6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit);	6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit);	6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit);	6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit);	6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit);	6. Operasi dan pemeliharaan SPALD (10 unit);	
		7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (540 orang);	7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (210 orang);	7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (210 orang);	7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (210 orang);	7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (210 orang);	7. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPALD (210 orang);	
		8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (12 Penyelenggara)	8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (100 Penyelenggara)Pe	8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (100 Penyelenggara)	8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (100 Penyelenggara)	8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (100 Penyelenggara)	8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara SPALD (100 Penyelenggara)	
		9. Penyediaan Unit Pengolahan Setempat (1640 Rumah Tangga);	9. Penyediaan Unit	9. Penyediaan Unit	9. Penyediaan Unit	9. Penyediaan Unit	9. Penyediaan Unit	



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		10.Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	Pengolahan Setempat (1167 Rumah Tangga); 9. Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	Pengolahan Setempat (1500 Rumah Tangga); 10.Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	Pengolahan Setempat (1500 Rumah Tangga); 10.Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	Pengolahan Setempat (1500 Rumah Tangga); 10.Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	Pengolahan Setempat (1500 Rumah Tangga); 10.Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPALD (3 dokumen)	
	• Program Kawasan Permukiman		Penataan Kawasan Pelabuhan Baru, Kawasan Tamalanrea-Biringkanaya dan Kawasan Bantaran Kanal Jongaya	Penataan Kawasan Pampang, Kawasa Tallo-Panakukang dan Kawasan Panakukang-Makassar	Penataan Kawasan Panakukang-Rappocini, Kawasan Mamajang-Mariso dan Kawasan Mariso	Penataan Kawasan Manggala-Panakukang, Kawasan Tamalate dan Kawasan Bisnis Ujung Pandang, Kawasan Bontoala-Tallo	Penataan Kawasan Pulau Terpadu, Kawasan DAS Jeneberang dan Kawasan Konservasi DAS Tallo dan Kawasan Maritim	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 perumahan dilengkapi PSU	20 perumahan dilengkapi PSU	20 perumahan dilengkapi PSU	20 perumahan dilengkapi PSU	20 perumahan dilengkapi PSU	20 perumahan dilengkapi PSU	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24. Pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional	Program Penataan Bangunan Gedung	Tahap Perencanaan (1 dokumen <i>Feasibility Study</i>)	1. Dokumen Amdal dan Andal Lalin Stadion; 2. Penimbunan/pe matangan lahan; 3. Konstruksi Stadion Sepak Bola	Pengerjaan Konstruksi tahun jamak Ke-I (tahap I)	Pengerjaan Konstruksi tahun jamak ke-II (tahap II)			Dinas Pekerjaan Umum
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tahap Perencanaan (1 dokumen <i>Masterplan</i> Kawasan Untia)						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					Penyerahan Aset dan Pengelolaan Stadion dari Dinas Pekerjaan Umum	Pengelolaan Stadion	Dinas Pemuda dan Olahraga



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
						ke Dinas Pemuda dan Olahraga		
25. Revitalisasi pasar tradisional di Barombong	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdagangan 2. Mengembangkan sistem logistik terpadu untuk memperlancar distribusi barang di wilayah kota Makassar	1. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti gudang penyimpanan modern di lokasi strategi	1. Memperkuat jaringan transportasi antar pasar guna meningkatkan efisiensi distribusi barang dagangan	1. Mengimplementasikan sistem monitoring kualitas sarpras secara berkala menggunakan teknologi digital	1. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur perdagangan berbasis kemitraan. 2. Cakupan layanan fasilitas pendukung seperti pusat informasi pasar bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM)	1. Menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan sarpras serta perencanaan pembaruan jangka panjang 2. Mengembangkan program inovatif untuk mendukung keberlanjutan infrastruktur perdagangan ramah lingkungan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26. Penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kota Makassar 2. Pengamanan Kegiatan <i>Car Free Day</i> 3. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan/Pemeliharaan Bus Listrik 2 unit 2. Penyusunan Masterplan Perparkiran 3. Pengamanan Kegiatan <i>Car Free Day</i> 4. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan/Pemeliharaan Bus Listrik 1 unit 2. Pengamanan Kegiatan <i>Car Free Day</i> 3. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan/Pemeliharaan Bus Listrik 1 unit 2. Pengamanan Kegiatan <i>Car Free Day</i> 3. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan/Pemeliharaan Bus Listrik 1 unit 2. Pengamanan Kegiatan <i>Car Free Day</i> 3. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	1. Penyediaan/Pemeliharaan Bus Listrik 1 unit 2. Pengamanan Kegiatan <i>Car Free Day</i> 3. Pengujian Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
27. Bedah Rumah bagi KK Prasejahtera	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan 25 unit RTLH	Perbaikan 130 unit RTLH	Perbaikan 130 unit RTLH	Perbaikan 130 unit RTLH	Perbaikan 130 unit RTLH	Perbaikan 115 unit RTLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh							



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28. Memastikan kebutuhan air bersih warga terpenuhi, gratis pemasangan instalasi air bersih	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (400 SR). 3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (400 SR). 3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (400 SR). 3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (400 SR). 3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (400 SR). 3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	1. Peningkatan SPAM, 4 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (200 SR); 2. Pembangunan pengolahan air minum dan SPAM jaringan perpipaan 8 unit dengan kapasitas 1,2 liter/detik/unit (400 SR). 3. Operasi dan Pemeliharaan sarana air siap minum dan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 5 unit. 4. Perluasan jaringan perpipaan dan sambungan rumah 200 SR.	Dinas Pekerjaan Umum PDAM
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, serta Pariwisata								
29. Pembuatan <i>blue print</i> pembangunan situs kota tua di Makassar	Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya	Kajian Zonasi Kawasan Kota lama Makassar	Penyusunan Regulasi Hukum terkait Zonasi kawasan Kota lama Makassar	Rencana Induk atau Master Plan Kawasan Kota Lama Makassar	Rencana Pengembangan Destinasi Budaya Kawasan Kota Lama Makassar	Rencana Pengembangan Destinasi Budaya Kawasan Kota Lama Makassar	Destinasi Budaya Kawasan Kota Lama Makassar	Dinas Kebudayaan
30. Menghidupkan etnoturisme di kota makassar	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pemetaan kawasan budaya dan potensi etnoturisme pada	1. Pembentukan Kelompok sadar Wisata di 2 Lokasi yakni	1. Penyusunan paket wisata Etno 2. Pelatihan Wisata	1. Sertifikasi CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>)	1. Pembuatan QR storytelling, platform pemesanan	1. Monitoring dampak lingkungan dan sosial pariwisata	Dinas Pariwisata



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3 lokasi (Kampung Paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan) 2. Pelatihan pengembangan etnoturisme pada 3 kawasan	(Kampung Rama dan Kawasan Pecinan) 2. Penyusunan dokumen masterplan dan DED pengembangan Kawasanekturisme (Kampung Paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan); 3. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi masyarakat di kawasan Kampung Paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan	Digital pada 3 KSW di Kota Makassar 3. Pembuatan mural etnik, signage tematik di 3 lokasi yakni Kampung paropo, Kampung Rama dan Kawasan Pecinan	untuk lokasi Wisata Etno 2. Pelatihan hospitality berkelanjutan dan customer experience bagi 3 KSW di Kota Makassar 3. Pembangunan pusat informasi Etnowisata di Kampung Paropo	budaya lokal, jejaring komunitas budaya digital. 2. Melaksanakan co-working space antara akademisi, operator tur, pengelolaan destinasi (KSW), dan pelaku ekonomi kreatif pada daya tarik wisata etno	berbasis Etno. 2. Pembentukan Forum Eko-Etnoturisme Kota Makassar	
31. Penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah	Program Pengelolaan Persampahan	1. Membentuk 4 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal 2. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 3. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi	1. Membentuk 8 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal 2. Menyediakan 12 tempat sampah pilah sepanjang kanal 3. Melakukan sosialisasi di 4 lokasi kepada masyarakat di sekitar kanal terkait peran serta masyarakat	1. Membentuk 8 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal 2. Menyediakan 12 tempat sampah pilah sepanjang kanal 3. Melakukan sosialisasi di 4 lokasi kepada masyarakat di sekitar kanal terkait peran serta masyarakat	1. Membentuk 8 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal 2. Menyediakan 12 tempat sampah pilah sepanjang kanal 3. Melakukan sosialisasi di 4 lokasi kepada masyarakat di sekitar kanal terkait peran serta masyarakat	1. Membentuk 8 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal Menyediakan 12 tempat sampah pilah sepanjang kanal 2. Melakukan sosialisasi di 4 lokasi kepada masyarakat di sekitar kanal terkait peran serta masyarakat	1. Membentuk 8 BSU pada kecamatan yang memiliki kanal Menyediakan 12 tempat sampah pilah sepanjang kanal 2. Melakukan sosialisasi di 5 lokasi kepada masyarakat di sekitar kanal terkait peran serta masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		pengelolaan sampah sepanjang kanal.	dalam pengelolaan sampah 4. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 4. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi pengelolaan sampah sepanjang kanal	dalam pengelolaan sampah 4. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 4. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi pengelolaan sampah sepanjang kanal	dalam pengelolaan sampah 4. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 4. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi pengelolaan sampah sepanjang kanal	dalam pengelolaan sampah 3. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 3. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi pengelolaan sampah sepanjang kanal	dalam pengelolaan sampah 3. Menerbitkan surat edaran terkait penataan kanal 3. Menjalin kemitraan dengan 5 pihak swasta untuk penyediaan sarana persampahan, edukasi, dan sosialisasi pengelolaan sampah sepanjang kanal	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Koordinasi teknis dengan BBWS dan melaksanakan pembersihan kanal setiap minggu, dan pengangkatan sedimen 2 kali sebulan (3 kanal: Jongaya, Sinrijala dan Pannampu)	Dinas Pekerjaan Umum
32. Penataan Pesisir dan Pulau sebagai sentra baru ekoturisme	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1. Pemetaan kawasan Pesisir dan potensi Ekoturisme pada 3 lokasi (Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo) 2. Pelatihan pengembangan Ekoturisme pada	1. Pembentukan Kelompok sadar Wisata di 2 Lokasi yakni (Pulau Barrang caddi dan Pulau Langkai) 2. Penyusunan dokumen masterplan dan pengembangan	1. Penyusunan paket Ekowisata 2. Pelatihan Wisata Digital pada 3 KSW 3. Pengadaan Keramba Jaring Apung (sarana diving) di 2 lokasi Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo	1. Sertifikasi CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety, Environment</i>) untuk lokasi Ekoturisme 2. Pelatihan hospitality berkelanjutan dan customer experience bagi KSW di Kota	1. Pembuatan QR storytelling, platform pemesanan budaya lokal, jejaring komunitas budaya digital. 2. Melaksanakan co-working space antara akademisi,	1. Monitoring dampak lingkungan dan sosial pariwisata berbasis Etno. 2. Pembentukan Forum Eko-Etnoturisme Kota Makassar	Dinas Pariwisata



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		10 Kawasan Pulau dan pesisir	Kawasan ekoturisme (Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo); 3. Pelatihan tata kelola destinasi dan pelatihan manajemen kepariwisataan bagi masyarakat dan KSW di Pulau Lanjukang, Pulau Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo		3. Makassar pusat informasi Ekoturisme di Lanjukang	operator tur, pengelolaan destinasi (KSW), dan pelaku ekonomi kreatif pada daya tarik wisata etno		
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum								
33. Digitalisasi Pelayanan publik, <i>Mulia Super Apps</i>	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Integrasi Layanan dan Informasi Publik melalui <i>Super Apps</i> : pengembangan dan peluncuran Makassar Super Apps (membangun pondasi digital layanan publik dengan optimalisasi pengelolaan aduan, penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata)	Integrasi Layanan Publik melalui <i>Super Apps</i> : perluasan layanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pendidikan, pajak, dan bantuan sosial.	Integrasi Layanan Publik melalui <i>Super Apps</i> : Penyempurnaan data kependudukan, Program Sosial, dan Penguatan Fitur Pendidikan serta Pariwisata	Integrasi Layanan Publik melalui <i>Super Apps</i> : Integrasi sektor kesehatan, kebencanaan, pendidikan dan transportasi	Integrasi Layanan Publik melalui <i>Super Apps</i> : penyempurnaan layanan sosial, transportasi, hukum, dan pelaporan kinerja pemerintah kota.	Evaluasi kinerja layanan dan tingkat kepuasan pengguna (rekomendasi layanan prediksi kebutuhan pengguna)	Dinas Komunikasi dan Informatika



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
34. Desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan	• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Penyediaan sarana pelayanan administrasi berupa komputer dan jaringan internet pada 153 kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika							Dinas Komunikasi dan Informatika
35. Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi	Program Kepegawaian Daerah	1. Peninjauan dan pemutakhiran dokumen analisis jabatan (Anjab) dan evaluasi jabatan (Evjab)	1. Peninjauan dan pemutakhiran dokumen analisis jabatan (Anjab) dan evaluasi jabatan (Evjab)	1. Pelaksanaan seleksi terbuka pada jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama dan/atau administrator secara terbatas	1. Pelaksanaan seleksi terbuka untuk lebih banyak jabatan struktural secara sistematis	1. Penerbitan kebijakan internal atau regulasi kepala daerah/pimpinan instansi tentang kewajiban promosi terbuka berbasis merit	1. Pelaksanaan seleksi terbuka sepenuhnya untuk seluruh jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
		2. Penyusunan pedoman internal pelaksanaan seleksi terbuka berbasis meritokrasi	2. Penyusunan pedoman internal pelaksanaan seleksi terbuka berbasis meritokrasi	2. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan seleksi terbuka pertama	2. Pelibatan pihak eksternal (akademisi, psikolog, profesional) dalam proses uji kompetensi dan asesmen	2. Penguatan pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal (BKN)	2. Penerapan sistem informasi promosi jabatan secara digital dan terintegrasi (<i>e-merit promotion</i>)	
		3. Penyesuaian dan digitalisasi sistem manajemen kepegawaian untuk mendukung seleksi terbuka (integrasi dengan SIASN/BKPSDM)	3. Penyesuaian dan digitalisasi sistem manajemen kepegawaian untuk mendukung seleksi terbuka (integrasi dengan SIASN/BKPSDM)	3. Penyempurnaan sistem pengelolaan data dan mekanisme umpan balik masyarakat terhadap peserta seleksi	3. Standardisasi alat ukur kompetensi (assessment tools)	3. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi terbuka tiga tahun terakhir.	3. Pemanfaatan artificial intelligence dan big data dalam penilaian rekam jejak dan kompetensi	
		4. Penyusunan database rekam jejak dan kompetensi ASN	4. Penyusunan database rekam jejak dan kompetensi ASN	4. Peningkatan literasi ASN terhadap proses promosi berbasis merit	4. Pembentukan panel penguji berbasis bidang kompetensi jabatan.	4. Penyesuaian mekanisme reward dan punishment terhadap hasil pelaksanaan sistem merit.	4. Evaluasi dampak penerapan sistem merit terhadap kinerja organisasi	
					5. Pengembangan sistem merit internal dan pemetaan talent pool.	5. Integrasi sistem seleksi dengan manajemen kinerja ASN.	5. Penyusunan laporan kinerja sistem merit ke	



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggungjawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
							BKN sebagai bentuk akuntabilitas publik	
36. Pemberian insentif dan pencairan TPP bagi pegawai secara proporsional dan tepat waktu	• Program Kepegawaian Daerah	Menetapkan kebijakan dasar pemberian TPP berbasis kinerja dan meninjau kembali sistem klasifikasi serta peta jabatan	Menerapkan sistem digital dalam pengelolaan TPP dan mengembangkan formula perhitungan TPP yang lebih berbasis pada kinerja aktual	Menerapkan secara penuh mekanisme pemberian TPP berbasis kinerja aktual dan memastikan pencairan dilakukan tepat waktu	Meningkatkan kualitas sistem pemberian TPP serta memastikan pelaksanaan berjalan secara transparan dan akuntabel	Mewujudkan sistem pemberian TPP yang otomatis, berkeadilan, dan selaras dengan capaian kinerja organisasi	Mewujudkan sistem pemberian TPP yang otomatis, berkeadilan, dan selaras dengan capaian kinerja organisasi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
	• Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Melakukan evaluasi Perhitungan dan pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2. Penyusunan kebijakan perhitungan dan pelaksanaan tambahan penghasilan ASN	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2026	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2027	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2028	1. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2029	1. Melakukan evaluasi Perhitungan dan pelaksanaan pemberian Tambahan penghasilan ASN 2. Penyusunan kebijakan perhitungan dan pelaksanaan tambahan penghasilan ASN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
37. Pemilihan langsung RT/RW	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Penyusunan Peraturan Walikota pemilihan RT RW 2. Penyusunan Juknis Tentang Pemilihan RT/RW Kota Makassar	1. Monitoring dan Evaluasi Ketua RT/RW 2. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT/RW, bila diperlukan	1. Monitoring dan Evaluasi Ketua RT/RW 2. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT/RW, bila diperlukan	1. Monitoring dan Evaluasi Ketua RT/RW 2. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT/RW, bila diperlukan	1. Monitoring dan Evaluasi Ketua RT/RW 2. Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua RT/RW, bila diperlukan	1. Penyusunan Peraturan Walikota pemilihan RT RW 2. Penyusunan Juknis Tentang Pemilihan RT/RW	Bagian Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3. Sosialisasi Perwali Pemilihan dan Juknis Pelaksanaan pemilihan RT/RW di 15 Kecamatan 4. Pencalonan					3. Sosialisasi Perwali Pemilihan dan Juknis Pelaksanaan pemilihan RT/RW di 15	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		RT/RW 5. Pemberkasan Calon 6. Penetapan Calon Ketua RT/RW 7. Pemungutan Suara 8. Penetapan Hasil Pemungutan Suara RT/RW dan Pengukuhan 9. Pelantikan dan Penerimaan SK					Kecamatan 4. Pencalonan RT/RW 5. Pemberkasan Calon 6. Penetapan Calon Ketua RT/RW 7. Pemungutan Suara 8. Penetapan Hasil Pemungutan Suara RT/RW dan Pengukuhan 9. Pelantikan dan Penerimaan SK	
38. Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Pelaksanaan Posko KAMTIBMAS di 996 RW pada 153 Kelurahan	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
39. Pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pendataan Pekerja Keagamaan/PKA (Mubaligh, Guru Mengaji, Pengurus Jenazah, Imam Rawatib, Guru Sekolah Minggu Hindu/Budha, Guru Sekolah Minggu Kristen), 2. Pemetaan Pekerja Keagamaan (PKA) berbasis wilayah kecamatan dan kelurahan 3. Verifikasi data penerima insentif PKA 4. Pemberian insentif bagi PKA 2025 sebanyak 5104 orang	1. Monitoring dan verifikasi data penerima insentif PKA tahun 2026 2. Pemberian insentif bagi PKA 2026	1. Monitoring dan verifikasi data penerima insentif PKA tahun 2027 2. Pemberian insentif bagi PKA 2027	1. Monitoring dan verifikasi data penerima insentif PKA tahun 2028 2. Pemberian insentif bagi PKA 2028	1. Monitoring dan pendataan kembali penerima insentif PKA tahun 2029 2. Pemberian insentif bagi PKA 2029	1. Monitoring dan verifikasi data penerima insentif PKA tahun 2030 2. Pemberian insentif bagi PKA 2030	Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga								
40. Penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas	• Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Pembangunan dan/atau rehabilitasi 1 km pedestrian	Dinas Pekerjaan Umum
	• Program Penataan Bangunan Gedung	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	1. Pembangunan 15 unit Bangunan Gedung Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum
41. Pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	• Program Perlindungan Perempuan • Program Perlindungan Khusus Anak	Penambahan Konselor Bantuan Hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, dan penambahan honor jasa bantuan hukum	Penambahan honor jasa bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	Penambahan Konselor Bantuan Hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, dan penambahan honor jasa bantuan hukum	Penambahan honor jasa bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	Penambahan Konselor Bantuan Hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, dan penambahan honor jasa bantuan hukum	Penambahan honor jasa bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Perbaiki data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak yang berhadapan hukum (50 anak	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak korban tindak kekerasan dan disabilitas 2. Pendampingan pekerja sosial kepada anak	Dinas Sosial



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	yang berhadapan hukum (50 anak) 3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	yang berhadapan hukum (50 anak) 3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	yang berhadapan hukum (50 anak) 3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	yang berhadapan hukum (50 anak) 3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	yang berhadapan hukum (50 anak) 3. Fasilitasi anak balita terlantar untuk mendapatkan orang tua asuh (31 Anak)	
42. Pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel	• Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Peningkatan kapasitas dan pelatihan keterampilan bagi perempuan dan difabel (100 orang)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	• Program Rehabilitasi Sosial	1. Perbaikan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemberian pelatihan keterampilan bagi disabilitas	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemberian pelatihan keterampilan bagi disabilitas	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemberian pelatihan keterampilan bagi disabilitas	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemberian pelatihan keterampilan bagi disabilitas	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemberian pelatihan keterampilan bagi disabilitas	Dinas Sosial
43. Pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Bimtek Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Kelompok Rentan bekerjasama dengan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum, Shelter warga dan Pos bantuan Hukum (Posbankum)	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Melakukan Pendampingan Hukum: a. Litigasi b. Non Litigasi	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2. Sosialisasi Penanganan Bantuan Hukum bagi Pekerja Rentan di 15 Kecamatan 3. Pelatihan Kompetensi Penyelenggara Bantuan Hukum Bagi Kelompok Pekerja Rentan 4. Pendampingan Hukum bagi Kelompok Pekerja Rentan.						
44. Menjamin siwa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah dengan mengembalikan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah dengan pemberian beasiswa (SD 200 Siswa dan SMP 200 Siswa)	Dinas Pendidikan
45. Makassar bebas Anak Jalanan	• Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemantapan dan penertiban awal dengan fokus utama penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas internal, dan penertiban awal yang terstruktur.	1. Pemantapan dan penertiban awal dengan fokus utama penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas internal, dan penertiban awal yang terstruktur. 2. Intensifikasi penertiban dan sinkronisasi data	Intensifikasi penertiban dan sinkronisasi data meliputi peningkatan intensitas dan jangkauan penertiban, serta memperkuat koordinasi dengan dinas sosial	Konsolidasi dan keberlanjutan program dengan melakukan penindakan tegas dan berulang, melaksanakan evaluasi kinerja dan mengintegrasikan pengawasan berbasis teknologi	Konsolidasi dan keberlanjutan program dengan melakukan penindakan tegas dan berulang, melaksanakan evaluasi kinerja dan mengintegrasikan pengawasan berbasis teknologi	Memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan, penertiban, dan koordinasi	Satuan Polisi Pamong Praja



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			meliputi peningkatan intensitas dan jangkauan penertiban, serta memperkuat koordinasi dengan dinas sosial					
	• Program Rehabilitasi Sosial	1. Perbaikan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak jalanan 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 30 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi 60 anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 20 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi 50 anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 20 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 20 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi 50 anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 20 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi 50 anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	1. Verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya disabilitas 2. Pemenuhan kebutuhan dasar 20 anak jalanan dan pengemis (fasilitasi NIK, fasilitasi ke layanan pendidikan dan kesehatan) 3. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi anak jalanan dan pengemis 4. Pelatihan keterampilan bagi 50 anak jalanan usia 15-18 tahun dan pengemis produktif	Dinas Sosial
46. Pembangunan gelanggang remaja dan <i>sport center</i>	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	1. Pembangunan sebanyak 1 unit Gelanggang	1. Pembangunan sebanyak 1 unit Gelanggang	1. Pembangunan sebanyak 1 unit Gelanggang	-	Dinas Pemuda dan Olahraga



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Saing Keolahragaan	Pembangunan		olahraga dan remaja di Kecamatan Biringkanaya 2. Rehabilitasi prasarana olahraga/ gelanggang remaja di Kecamatan	olahraga dan remaja di Kecamatan Biringkanaya 2. Rehabilitasi prasarana olahraga/ gelanggang remaja di Kecamatan	olahraga dan remaja di Kecamatan Tamalanrea 2. Rehabilitasi prasarana olahraga/ gelanggang remaja di Kecamatan		
Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Serta Mitigasi Bencana								
47. Meningkatkan persentase ruang terbuka hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	- 1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Penyusunan PERDA Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (1 naskah akademik) 4. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 5. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH (1 Mobil tangki penyiram) 6. Penambahan 1 lahan pemakaman (DPPT)	- 1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Pendampingan Penyusunan PERDA 4. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 5. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH 6. Penambahan 1 lahan pemakaman	Pengadaan Lahan Taman KEHATI (5 Ha) 1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan KEHATI 5. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 6. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH	Pembangunan Taman KEHATI 1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Asuransi Pohon (Se-Kota Makassar) 4. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 5. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH	- 1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Asuransi Pohon (Se-Kota Makassar) 4. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 5. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH	- 1. Identifikasi Potensi RTH (1 Dokumen) 2. Inventarisasi RTH (15 Kecamatan) 3. Asuransi Pohon (Se-Kota Makassar) 3. Pengelolaan Mangrove melalui CSR 4. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan RTH	Dinas Lingkungan Hidup



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
48.Revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif	• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Revitalisasi Taman Hasanuddin (CSR) 2. Pengadaan bibit/pohon	1. Pengadaan bibit/pohon) 2. Revitalisasi Taman Kota	1. Pengadaan bibit/pohon) 2. Revitalisasi Taman Kota	1. Pengadaan bibit/pohon) 2. Revitalisasi Taman Kota	1. Pengadaan bibit/pohon) 2. Revitalisasi Taman Kota	1. Pengadaan bibit/pohon) 2. Revitalisasi Taman Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	• Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Pemetaan kondisi eksisting taman kota (fungsi, aksesibilitas, aspek ramah anak dan ramah gender). 2. Konsultasi publik dengan anak, remaja, perempuan, kelompok difabel, masyarakat sekitar. 3. Penyusunan masterplan revitalisasi taman bermain dan kreatif (standar KLA, SNI taman bermain). 4. Penyusunan regulasi/Perwali/Surat Edaran teknis tentang taman ramah anak.	1. Pemetaan kondisi eksisting taman kota (fungsi, aksesibilitas, aspek ramah anak dan ramah gender). 2. Konsultasi publik dengan anak, remaja, perempuan, kelompok difabel, masyarakat sekitar. 3. Penyusunan masterplan revitalisasi taman bermain dan kreatif (standar KLA, SNI taman bermain). 4. Penyusunan regulasi/Perwali/Surat Edaran teknis tentang taman ramah anak.	1. Revitalisasi pilot project (1–2 taman kota) dengan sarana bermain aman, ruang ekspresi kreatif, dan fasilitas inklusif 2. Pelibatan komunitas anak dan remaja dalam desain mural, panggung kreatif, dll. 3. Penguatan kolaborasi lintas OPD untuk dukungan teknis dan anggaran. 4. Monitoring awal dampak sosial (akses anak, kepuasan masyarakat).	1. Revitalisasi beberapa taman tambahan dengan konsep yang sudah diuji coba. 2. Integrasi dengan kegiatan sosial-budaya: festival anak, lomba kreatif, edukasi lingkungan. 3. Penyediaan ruang interaksi keluarga dan ibu-anak. 4. Peningkatan kapasitas kader/relawan pengelola taman ramah anak.	1. Pengembangan model pengelolaan partisipatif (kelompok masyarakat/komunitas menjaga taman). 2. Penambahan fasilitas inovatif: perpustakaan mini, wifi publik, area seni kreatif, taman sensorik untuk anak difabel. 3. Kolaborasi dengan sektor swasta (CSR untuk peralatan taman). 4. Evaluasi tengah periode (mid-term review).	1. Standarisasi dan sertifikasi taman ramah anak dan kreatif. 2. Dokumentasi praktik baik dan replikasi ke kelurahan/RT-RW. 3. Integrasi pengelolaan dalam sistem Kota Layak Anak (KLA). 4. Rencana keberlanjutan (maintenance, pendanaan jangka panjang, SDM pengelola). 5. Evaluasi akhir dan rekomendasi Renstra berikutnya 6. Mendorong sertifikasi standarisasi nasional Taman Bermain Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
49.Gratis iuran sampah bagi masyarakat kategori kemiskinan ekstrem	• Program Pengelolaan Persampahan	1. Penyusunan Peraturan Walikota Makassar Terkait Tarif Retribusi Sampah (1 Perwali)	Sosialisasi Perwali dan monev terkait iuran sampah gratis					Dinas Lingkungan Hidup



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2. Studi Rencana Teknis Penanganan Persampahan Berbasis Kawasan di Kota Makassar (1 dokumen) 3. Monitoring dan Reviu terkait Implementasi Retribusi Persampahan di 14 Kecamatan						
	• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pendataan rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan	Pemutakhiran data rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan	Pemutakhiran data rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan.	Pemutakhiran data rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan.	Pemutakhiran data rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan.	Pemutakhiran data rumah tangga kategori miskin sebagai calon penerima layanan gratis iuran sampah, dengan daya listrik R1-450 VA dan R1-900 VA pada 153 kelurahan.	Unsur Kewilayahan (Seluruh Kecamatan)
50. Penguatan Mitigasi bencana pada warga masyarakat	• Program Penanggulangan Bencana	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan EWS (Early Warning System)	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan (Early Warning	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan (Early Warning	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan (Early Warning	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan (Early Warning	1. Peningkatan kapasitas kawasan di kecamatan rawan bencana 2. Pelatihan Pencegahan dan mitigasi kepada masyarakat rawan bencana terutama kepada kelompok rentan 250 orang 3. Penyediaan Peralatan kebencanaan (Early Warning	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Misi/Program Strategis (Janji Politik)	Program Prioritas	Rencana Kegiatan Prioritas dan Target Kinerja						SKPD Penanggung-jawab
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			<i>System)</i>	<i>System)</i>	<i>System)</i>	<i>System)</i>	<i>System)</i>	
	• Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (target 90 Orang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan dan Diklat Aparatur Pemadam Kebakaran (Target 459 Orang)	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (Target 90 Orang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan dan Diklat Aparatur Pemadam Kebakaran	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (Target 90 Orang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (Target 90 Orang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 5. Penambahan 1 Unit Posko pemadam kebakaran	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (Target 90 Orang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 5. Penambahan 1 Unit Posko pemadam kebakaran	1. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (53 Kelurahan) 2. Pelatihan Relawan Kebakaran (Target 90 Orang) 3. Tanggap kebakaran Rumah Tangga (Target 22 Keluarga) 4. Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 5. Penambahan 1 Unit Posko pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



3.3.4. Arah Pembangunan Kewilayahan

Arah pembangunan kewilayahan merupakan upaya perwujudan prioritas pembangunan Kota Makassar berdasarkan wilayah kecamatan, selaras dan mendukung arah pembangunan kewilayahan berdasarkan lokasi prioritas, kegiatan prioritas utama dan proyek strategis nasional. Selaras dengan arah pembangunan kewilayahan provinsi Sulawesi Selatan serta sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, sebagai berikut:

1. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya, merupakan Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi utama sebagai simpul transportasi, perdagangan, dan sentra industri maritim didukung oleh fungsi penunjang perdagangan dan jasa, pendidikan, permukiman, dan perkantoran serta pelayanan pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; fasilitasi kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; dukungan pengembangan pelabuhan perikanan Samudera Untia; peningkatan produktivitas pertanian, dan perikanan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Biringkanaya diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas



dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir; dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan pengembangan TOD, peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, serta dukungan pengembangan transportasi publik ramah lingkungan; mendorong pertumbuhan kawasan baru kota melalui penataan dan pengembangan Kawasan multifungsi termasuk pembangunan stadion di Untia untuk mendorong perkembangan ekonomi, sosial, infrastruktur, pariwisata dan jasa serta meningkatkan kualitas lingkungan pesisir melalui pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan



jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare. **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism*; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan



keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Biringkanaya diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.



2. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea, merupakan Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi utama simpul transportasi dan pendidikan didukung oleh fungsi penunjang perdagangan dan jasa, permukiman dan perkantoran serta pelayanan umum pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Tamalanrea diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD



dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA yang terintegrasi dengan simpul transportasi berbasis TOD serta dukungan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energy listrik berbasis



teknologi ramah lingkungan. **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism* dan pembangunan pusat budidaya wisata mangrove di wilayah pesisir; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi

perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Tamalanrea diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

3. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi utama pelayanan umum dan pelestarian lingkungan didukung oleh fungsi penunjang perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pelayanan umum pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga



kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif termasuk pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhir serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi; serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Manggala diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit



menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien; dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan. **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas



kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Manggala diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan



hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

4. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi utama pemerintahan dan pertahanan keamanan didukung oleh fungsi penunjang permukiman dan perdagangan dan jasa, pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan



pangan diarahkan pada optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Panakkukang diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD dan pembangunan Gedung Dinas Pendidikan (*Educational City Hall*); peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan



kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk pembangunan stadion sepak bola di Kelurahan Untia dan penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare

Kelima peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner.

Keenam transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.

Ketujuh penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat



mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Panakkukang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian

banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

5. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang, dengan fungsi utama sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Budaya yang didukung oleh fungsi penunjang Perdagangan dan Jasa, Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Ujung Pandang diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola



investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi dan pemberian tunjangan bagi wali kelas SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital dengan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau, penyediaan ambulance gratis dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan utamanya pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir; dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM



termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism* dan pembuatan blue print pembangunan situs kota tua; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender



melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Ujung Pandang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.



6. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Makassar diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan



terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan. **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan



menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan



kemiskinan, pada Kecamatan Makassar diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

7. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini, merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor



informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Rappocini diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang



berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare

Kelima peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner.

Keenam transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan



pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Rappocini diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien. **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan



kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

8. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Mariso diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan



insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik



yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare

Kelima peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah serta penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism*; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner.

Keenam transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.

Ketujuh penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.

Kedelapan peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel



dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Mariso diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

9. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Mamajang

Kecamatan Mamajang merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang



didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi dan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Mamajang diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata



kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan



masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Mamajang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui

pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

10. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Tamalate

Kecamatan Tamalate, merupakan Pusat Pelayanan Kota dengan fungsi utama sebagai Perdagangan Jasa dan Simpul Transportasi didukung oleh fungsi penunjang Permukiman, Pariwisata dan Perkantoran serta Pelayanan Umum pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal;



pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi dan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Tamalate diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan



transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparaturnya serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism*; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparaturnya sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta



perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Tamalate diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien. **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan



kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

11. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Bontoala

ecamatan Bontoala merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi dan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Bontoala diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI;



penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada



dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan



akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Bontoala diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

12. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan



pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Tallo diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan



berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar perkotaan termasuk pembangunan stasiun yang terintegrasi dengan sistem TOD. **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah dan penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism*; pengembangan pariwisata berbasis



kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya termasuk pembuatan blue print pembangunan situs kota tua; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner.

Keenam transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.

Ketujuh penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.

Kedelapan peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan

kemiskinan, pada Kecamatan Tallo diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

13. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah merupakan Sub Pusat Pelayanan Kotapada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM;



pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; fasilitasi kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; dukungan pengembangan pelabuhan perikanan; peningkatan produktivitas pertanian, dan perikanan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas, luas areal dan produktivitas; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Ujung Tanah diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional

dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan pengembangan pelabuhan utama MNP dan terminal khusus **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism*; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara



proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Ujung Tanah diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa



pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

14. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Wajo

Kecamatan Wajo merupakan Sub Pusat Pelayanan Kota pada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan



pada Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Wajo diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan penyediaan ambulance gratis; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman



kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; serta dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare **Kelima** peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism*; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner. **Keenam** transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan



penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Wajo diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan

pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

15. Arah pembangunan wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan Sub Pusat Pelayanan Kotapada kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada prioritas pembangunan **Pertama** mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi berupa Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu juga diarahkan pada Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui pemberian modal dan pendampingan UMKM; pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal; peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; serta Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang. **Kedua** penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan diarahkan pada Optimalisasi potensi PAD melalui: pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan untuk peningkatan produksi pangan lokal diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat. Dalam penciptaan iklim investasi yang kompetitif, pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diarahkan pada perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri; penguatan tata kelola investasi; peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; dan penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan. **Ketiga** peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan melalui pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; peningkatan kompetensi dan kapasitas



serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; dan peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Pada sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan; perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau; pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital dengan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan utamanya pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau; penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak; peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir; dan pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis. **Keempat** peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan pada kurun 5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh *slum* dan *squatter area*; peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; peningkatan kualitas saluran drainase; peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan. **Kelima** peningkatan



daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal difokuskan pada Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru *ecotourism* dan pembangunan pusat budidaya wisata mangrove di wilayah pesisir dan pulau; pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner.

Keenam transformasi tata kelola pemerintahan daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital difokuskan pada Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar *Super Apps*, penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; pengendalian inflasi serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. **Ketujuh** penciptaan ketentraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi berupa Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; pemilihan langsung RT/RW; dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW. **Kedelapan** peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marginal serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan difokuskan pada optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan; peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan serta peningkatan partisipasi



politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Pada sektor kepemudaan dan keolahragaan diarahkan pada penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diarahkan pada dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui pengembangan tata kelola registrasi Regsosek, dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; serta penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien **Kesembilan** pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim diarahkan pada penguatan tata kelola lingkungan melalui penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program *Corporate Social Responsibility* dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta. Dalam pengelolaan kebencanaan difokuskan pada penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; serta penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.

Arah pembangunan kewilayahan kota makassar berdasarkan lokasi prioritas seluruh wilayah kota pada 15 kecamatan dengan keterkaitan dan bentuk dukungan prioritas daerah Kota Makassar terhadap prioritas daerah provinsi Sulawesi selatan serta bentuk dukungan terhadap prioritas nasional, sebagai mana tersaji pada Tabel berikut:



Tabel 3.19
Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kota Makassar Tahun 2025-2030

NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
1	BIRINGKANA YA	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya; ▪ fasilitasi kerjasama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan; ▪ dukungan pengembangan pelabuhan perikanan Samudera Untia; ▪ peningkatan produktivitas pertanian, dan perikanan yang diprioritaskan berdasarkan potensi komoditas,



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				luas areal dan produktivitas; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi; ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis. ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir; ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur,	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	pengembangan transportasi publik ramah lingkungan; ▪ mendorong pertumbuhan kawasan baru kota melalui penataan dan pengembangan Kawasan multifungsi termasuk pembangunan stadion di Untia untuk mendorong perkembangan ekonomi, sosial, infrastruktur, pariwisata dan jasa serta meningkatkan kualitas lingkungan pesisir melalui pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; ▪ dukungan terhadap PSN berupa pembangunan jalur KA Antar Kota Makassar-Parepare.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru <i>ecotourism</i>; ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan pemanfaatan teknologi digital	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>,



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				- penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; - optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; - penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; - optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; - pengendalian inflasi - perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketenteraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: - penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; - peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; - peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; - dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; - pemilihan langsung RT/RW; - pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: - pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, - peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; - peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; - peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; - peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan - peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: - peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; - penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan - penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
2.	TAMALANREA	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
			berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; • Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, dan penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; ▪ dukungan terhadap PSN yaitu pembangunan jalur KA yang terintegrasi dengan simpul transportasi berbasis TOD.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, penataan pesisir sebagai sentra baru <i>ecotourism</i> serta pembangunan pusat budidaya wisata mangrove di wilayah pesisir; ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta; ▪ dukungan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energy listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
3.	MANGGALA	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif termasuk pemberdayaan ekonomi wilayah tempat pembuangan akhirok serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; • penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.
				Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur,	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme, termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi • perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketenteraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
4.	PANAKKUKANG	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD dan pembangunan Gedung Dinas Pendidikan (<i>Educational City Hall</i>) ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme, termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi; ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien; ▪



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
5.	UJUNG PANDANG	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP); ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi dan pemberian tunjangan bagi wali kelas SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital dengan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau, penyediaan ambulance gratis dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan utamanya pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme; ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya termasuk pembuatan <i>blueprint</i> pembangunan situs kota tua; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; • pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal		
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
6.	MAKASSAR	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD; ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi n ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				pemberian bantuan pendidikan; - dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: - penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, - perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: - pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk, penyediaan ambulance gratis; - penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak - peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; - pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; - dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: - penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; - penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; - penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, - peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; - dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; - peningkatan kualitas saluran drainase; - peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghadirkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mendedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
7.	RAPPOCINI	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi • intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	- dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: - penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; - penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; - penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, - peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; - dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; - peningkatan kualitas saluran drainase; - peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: - pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; - diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, - pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya - penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		pelibatan kelompok marjinal		Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
8.	MARISO	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
				Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; • pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP; ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				pemberian bantuan pendidikan; - dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: - penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, - perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: - pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau, penyediaan ambulance gratis; - penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak - peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan - pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; - dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: - penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; - penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; - penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, - peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; - dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; - peningkatan kualitas saluran drainase; - peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparaturnya serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru <i>ecotourism</i> ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan aset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketenteraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		marjinal 2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien; ▪
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
9.	MAMAJANG	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat.
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan; ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
10.	TAMALATE	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i> , ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi • perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		pelibatan kelompok marjinal		
				Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; • penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
11.	BONTOALA	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang	Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
			berkelanjutan	▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;
		3.Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan • penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
12.	TALLO	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; ▪ dukungan terhadap PSN yaitu pembangunan jalu KA antar perkotaan termasuk pembangunan stasiun yang terintegrasi dengan system TOD
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru <i>ecotourism</i> ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya termasuk pembuatan <i>blue print</i> pembangunan situs kota tua; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		pelibatan kelompok marjinal		Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				• penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
13.	UJUNG TANAH	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; • penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir, penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparaturnya serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan; ▪ dukungan pengembangan pelabuhan utama MNP dan terminal khusus.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah, penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru <i>ecotourism</i> ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketenteraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		pelibatan kelompok marjinal		Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda
		5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien; ▪
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
14.	WAJO	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektifitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi • intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk penyediaan ambulance gratis; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
			berkelanjutan	▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>; ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan;
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme dan penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru ecotourism; ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>; ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah;



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketenteraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi. Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien.
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.
15.	KEPULAUAN SANGKARRANG	4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja,	Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, peningkatan produktivitas sektor unggulan dan perdagangan, pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya melalui: ▪ peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi dan kapasitas tenaga kerja di industri komoditas unggulan dan modernisasi proses produksi serta penguatan ekosistem inovasi lokal termasuk pembangunan



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
			dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi	Makassar Creative Hub, dan pembinaan kelompok usaha unggulan berbasis RW; ▪ pengembangan sentra perdagangan termasuk pembentukan gerai UMKM, relaksasi pajak reklame bagi UMKM dan penciptaan dan penataan titik PKL; ▪ penguatan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP), ▪ penguatan klaster industri dan perdagangan terintegrasi serta penguatan transformasi pemasaran dan promosi; ▪ pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru		Penguatan ekosistem ketenagakerjaan terintegrasi dan responsive melalui ▪ pemberian modal dan pendampingan UMKM; ▪ pengembangan sektor informal dan pemberdayaan komunitas lokal; ▪ pemberian bantuan dan perlindungan hukum termasuk bagi pekerja informal ▪ peningkatan kualitas tenaga kerja industri dan perdagangan; ▪ Pemberian relaksasi PBB bagi pensiunan, pejabat negara, guru, polri, pensiunan BUMN/BUMD dan veteran pejuang.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan kemandirian fiskal daerah yang didukung stabilitas harga dan ketahanan pangan, yang diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal	Optimalisasi potensi PAD melalui: ▪ pemutakhiran penataan sistem dan penguatan basis data potensi PAD; ▪ penguatan optimalisasi pengelolaan, dan penguatan sistem keamanan data; ▪ peningkatan efektivitas pemungutan dan penagihan PAD, serta ▪ penguatan mekanisme pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan PAD berbasis sistem informasi ▪ intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal melalui: ▪ pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan; ▪ fasilitasi stabilisasi pasokan dan harga pangan; ▪ pengembangan pertanian perkotaan berupa penerapan konsep urban farming pada masyarakat
		4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing		Perwujudan tata kelola investasi daerah yang efisien dan terdigitalisasi melalui: ▪ sinergitas dengan sektor swasta dan institusi syariah melalui skema KPBU dan KSPI; ▪ penyederhanaan regulasi dan insentif usaha termasuk relaksasi kebijakan investasi bagi investor dalam dan luar negeri ▪ penguatan tata kelola investasi; ▪ peningkatan daya tarik investasi dengan pemberian insentif yang terarah serta kepastian hukum dan penyediaan infrastruktur pendukung; ▪ penguatan upaya investasi padat karya dan berwawasan lingkungan.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan melalui: ▪ pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan termasuk pembangunan sekolah terintegrasi PAUD dan SD ▪ peningkatan kualitas layanan Pendidikan dasar termasuk pemberian seragam gratis dan peralatan sekolah untuk siswa SD dan SMP, ▪ peningkatan kompetensi dan kapasitas serta kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk pemberian beasiswa lanjut studi S2 dan S3 bagi guru berprestasi dan pemberian tunjangan bagi wali kelas SD dan SMP yang bertugas di wilayah kepulauan, dan ▪ peningkatan angka partisipasi sekolah bagi Anak Tidak Sekolah dan Anak Putus Sekolah melalui pemberian bantuan pendidikan; • dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya Pembangunan Sekolah Rakyat. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui: ▪ penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, ▪ perluasan akses dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau: ▪ pengembangan unit pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital dengan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir dan pulau, penyediaan ambulance gratis dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan utamanya pada fasilitas kesehatan pemerintah di pulau-pulau; ▪ penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, eliminasi penyakit tropis terabaikan, serta pencegahan dan penurunan stunting dan kematian ibu dan anak ▪ peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi termasuk layanan gratis pemeriksaan dan pengantaran obat pasien rawat jalan dari RS ke rumah pasien rawat jalan dan penyediaan pusat pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat pesisir; ▪ pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik serta penyehatan lingkungan; ▪ dukungan terhadap proyek strategis nasional dalam kerangka pembangunan manusia dan kebudayaan, utamanya program Makan Bergizi Gratis
		7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan	peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya melalui: ▪ penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD melalui peningkatan dan preservasi jalan dan jembatan kewenangan kota, dukungan pengembangan transportasi angkutan umum massal perkotaan, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan keselamatan angkutan darat serta pemerataan dan kemudahan akses layanan infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah termasuk penataan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan; ▪ penyediaan sarana dan prasarana utilitas perumahan dan permukiman termasuk revitalisasi pasar tradisional sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing infrastruktur perdagangan tradisional; ▪ penanganan permukiman kumuh termasuk rehabilitasi rumah tidak layak huni utamanya bagi keluarga



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
				pra sejahtera dan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh <i>slum</i> dan <i>squatter area</i>, ▪ peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum layak dan/atau aman termasuk pembangunan SPAM BJP dan dukungan terhadap pengembangan SPAM terintegrasi Hulu-Hilir melalui peningkatan rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman meliputi peningkatan jumlah, kapasitas, dan jumlah pengelola SPAM termasuk pemasangan instalasi air bersih secara gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ dukungan fasilitasi peningkatan konektivitas ketenagalistrikan, digital dan transisi energi listrik yang diarahkan pada dukungan dan fasilitasi pembangunan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan serta fasilitasi pemerataan jangkauan dan kualitas infrastruktur digital dan peningkatan literasi digital dan keterampilan SDM; ▪ peningkatan kualitas saluran drainase; ▪ peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan serta pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur berbasis Rencana Tata Ruang yang didukung oleh peningkatan kapasitas Lembaga dan aparatur serta pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan.
		3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal	Peningkatan PDRB sektor pariwisata melalui: ▪ pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan didukung pengembangan keterampilan SDM, layanan pariwisata, kolaborasi dan integrasi layanan dalam platform digital terpadu serta pengembangan industri penunjang pariwisata; ▪ diversifikasi atraksi pariwisata diiringi dengan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat dengan menghidupkan etnoturisme termasuk penataan pesisir dan pulau sebagai sentra baru <i>ecotourism</i> serta pembangunan pusat budidaya wisata mangrove di wilayah pesisir dan pulau; ▪ pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, pemanfaatan kawasan cagar budaya termasuk pembuatan <i>blue print</i> pembangunan situs kota tua; ▪ penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan penguatan ekosistem kuliner
		6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	6. Perwujudan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penataan keuangan dan asset daerah, peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan melalui: ▪ perwujudan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien; ▪ transformasi tata kelola pelayanan publik termasuk desentralisasi pelayanan publik berbasis kelurahan; ▪ pemberian insentif dan pencairan TPP secara proporsional dan tepat waktu; ▪ penguatan integrasi layanan dan digitalisasi pelayanan dan informasi publik melalui pengembangan Makassar <i>Super Apps</i>, ▪ penerapan prinsip meritokrasi dan penguatan manajemen aparatur sipil Negara termasuk pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka dan berbasis meritokrasi; ▪ optimalisasi pengawasan internal dan eksternal berbasis risiko; ▪ penguatan regulasi dan penataan produk hukum daerah; ▪ optimalisasi pendapatan dan belanja daerah; ▪ pengendalian inflasi ▪ perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan pembangunan.



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	7. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai-nilai agama dan toleransi	Penciptaan ketentraman dan ketertiban didukung penguatan kehidupan beragama yang maslahat mengedepankan pemahaman moderasi beragama, toleransi dan saling menghargai melalui: ▪ penumbuhan sikap toleransi antar umat beragama dan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari; ▪ peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dialog antar penganut agama, dan pengembangan sarana dan prasarana rumah ibadah termasuk pemberian insentif bagi mubaligh dan guru sekolah minggu; ▪ peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan degradasi moral, intoleransi dan radikalisme; ▪ dukungan terhadap pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; ▪ pemilihan langsung RT/RW; ▪ pengaktifan sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW.
		2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan melibatkan kelompok marjinal	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Optimalisasi penurunan ketimpangan gender melalui: ▪ pemberian bantuan hukum bagi perempuan, anak dan difabel korban kekerasan, ▪ peningkatan pembinaan keterampilan bagi perempuan dan difabel dan pendampingan hukum secara gratis bagi kelompok rentan; ▪ peningkatan akses pendidikan untuk perempuan dan anak perempuan termasuk menjamin siswa/i ATS dan APS untuk kembali bersekolah dan perwujudan Makassar bebas anak jalanan; ▪ peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia termasuk penambahan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas; ▪ peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kesehatan reproduksi, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan dan perlindungan dari kekerasan ▪ peningkatan partisipasi politik dan pengambilan keputusan, serta pemberantasan kekerasan berbasis gender dan advokasi.
				Penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, melalui: ▪ peningkatan pembinaan prestasi olahraga yang diarahkan pada pelatihan, pembinaan, serta pemberian penghargaan kepada atlet dan pengembangan kapasitas pemuda yang kreatif dan inovatif; ▪ penguatan infrastruktur dan fasilitas olahraga termasuk pembangunan gelanggang remaja dan sport center, dan ▪ penciptaan peluang kerja yang layak dan penguatan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda



NO	KECAMATAN	ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		
		PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKASI HIGHLIGHT INTERVENSI
		PROVINSI SUL-SEL	KOTA MAKASSAR	
		5.Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan		Dukungan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, melalui: • pengembangan tata kelola registrasi Regrosek, • dukungan penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran; • integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu; • penguatan peran data dalam perencanaan dan penyaluran bantuan sosial secara adaptif dan efisien;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	Penguatan tata kelola lingkungan melalui: ▪ penanganan sampah terpadu yang optimal dari hulu hingga hilir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan berbasis 3R serta penerapan ekonomi sirkuler pengelolaan sampah termasuk upaya peningkatan akses layanan persampahan berupa pembebasan retribusi sampah bagi masyarakat kategori miskin ekstrim dan penataan kanal sebagai kawasan bebas sampah; ▪ peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan RTNH dengan pengembangan lahan yang potensial dan partisipasi masyarakat melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> dan kemitraan lainnya serta revitalisasi taman kota sebagai taman bermain dan kreatif; ▪ peningkatan pengendalian tanah, air dan udara; ▪ penyediaan sarana dan prasarana persampahan melalui pembiayaan alternatif dan kerjasama pihak swasta;
		8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi		Penguatan kapasitas penanganan bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui: ▪ peningkatan ketangguhan terhadap bencana hidrometeorologi termasuk pembangunan infrastruktur sistem pengendalian banjir, pengendalian risiko bencana berbasis pemberdayaan masyarakat dan penguatan layanan peringatan dini bencana; ▪ penguatan kapasitas penanganan bencana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana; ▪ pengelolaan risiko bencana berbasis penataan ruang; ▪ penguatan aksi penurunan emisi gas rumah kaca di setiap sektor dengan didukung program penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan non-motorized sebagai angkutan umum massal maupun perorangan; ▪ penguatan regulasi adopsi teknologi ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur hijau melalui mekanisme penerapan insentif dan disinsentif.



BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah





BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Perumusan program perangkat daerah dan dalam mencapai kinerja pembangunan daerah beserta kerangka pendanaannya (pagu indikatif program) merupakan langkah teknokratis sesuai arsitektur perencanaan dalam mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah. Program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dikategorikan ke dalam 2 (dua), yaitu program prioritas (program pembangunan daerah) dan program perangkat daerah. Program prioritas adalah program berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah berdasarkan *cascading* visi dan misi. Program perangkat daerah adalah operasionalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Makassar. Penyusunan program pembangunan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah. Perumusan indikasi rencana program prioritas dan program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil hasil verifikasi terhadap rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari seluruh Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, dimana program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Program perangkat daerah, indikator dan target kinerja *outcome* serta pagu indikatif setiap program disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Program dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2026 - 2030 Kota Makassar
Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN				2.828.579.344.000,00		2.938.678.138.000,00		3.130.129.078.000,00		3.384.617.572.000,00		3.810.134.849.000,00		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				1.227.015.573.000,00		1.252.013.238.000,00		1.352.073.738.000,00		1.488.073.738.000,00		1.483.108.738.000,00		
1	01		Dinas Pendidikan				1.227.015.573.000,00		1.252.013.238.000,00		1.352.073.738.000,00		1.488.073.738.000,00		1.483.108.738.000,00		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Keseekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	946.570.341.473,00	100%	946.568.006.815,00	100%	946.628.506.815,00	100%	946.628.505.615,00	100%	946.663.505.615,00	Dinas Pendidikan
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Outcome: Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	65.82%	72.19%	72.19%	280.112.708.127,00	75.23%	305.112.707.785,00	78.27%	405.112.707.785,00	81.31%	541.112.708.985,00	84.27%	536.112.708.985,00	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	98.72%	99.80%	99.80%		100%		100%		100%		100%		
				Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	11.45%	12.98%	12.98%		13.74%		14.51%		15.27%		16.03%		
				Skor Kemampuan Literasi SD	62.86%	65.36%	67.86%		70.36%		72.86%		75.36%		77.86%		
				Skor Kemampuan Literasi SMP	71.66%	72.76%	73.86%		74.96%		76.06%		77.16%		78.26%		
				Skor Kamampuan Numerasi SD	54.38%	57.28%	60.18%		63.08%		65.98%		68.88%		71.78%		
				Skor Kamampuan Numerasi SMP	62.85%	64.35%	65.85%		67.35%		68.85%		70.35%		71.85%		
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	77.81%	81.45%	81.45%		83.42%		85.89%		88.86%		91,82%		
				Iklim Inklusivitas SD	60.15%	65.15%	65.15%		67.65%		70.15%		72.65%		75.15%		
				Iklim Inklusivitas SMP	58.62%	63.42%	63.42%		65.82%		68.22%		70.62%		73.02%		
				Iklim Keamanan SD	75.23%	77.03%	77.03%		77.93%		78.83%		79.73%		80.63%		
				Iklim Keamanan SMP	70.02%	73.02%	73.02%		74.52%		76.02%		77.52%		79.02%		
				Iklim Kebinekaan SD	73.50%	75.50%	75.50%		76.50%		77.50%		78.50%		79.50%		
				Iklim Kebinekaan SMP	70.62%	72.62%	72.62%		73.62%		74.62%		75.62%		76.62%		
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Outcome: Meningkatnya Penerapan Kurikulum Muatan Lokal pada Seluruh Satuan Pendidikan SD/SMP	Persentase satuan pendidikan yang Mengembangkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	100%	111.195.400,00	100%	111.195.400,00	100%	111.195.400,00	100%	111.195.400,00	100%	111.195.400,00	Dinas Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Outcome: Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	N.A	100%	100%	123.015.000,00	100%	123.015.000,00	100%	123.015.000,00	100%	123.015.000,00	100%	123.015.000,00	Dinas Pendidikan
				Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	52.82	77.22%	77.22%		77.72%		78.22%		78.72%		79.22%		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat</i>	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	36.38%	38.38%	38.38%	98.313.000,00	40.38%	98.313.000,00	42.38%	98.313.000,00	44.38%	98.313.000,00	46.38%	98.313.000,00	Dinas Pendidikan
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					653.064.509.000,00		653.601.389.000,00		653.661.889.000,00		703.661.889.000,00		703.696.889.000,00	
1	02		Dinas Kesehatan					653.064.509.000,00		653.601.389.000,00		653.661.889.000,00		703.661.889.000,00		703.696.889.000,00	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	448.056.814.983,00	100%	448.593.694.983,00	100%	448.654.194.983,00	100%	448.654.194.983,00	100%	448.689.194.983,00	Dinas Kesehatan
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat</i>	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	192.872.820.257,00	100%	192.872.820.257,00	100%	192.872.820.257,00	100%	242.872.820.257,00	100%	242.872.820.257,00	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82.88%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	93.61%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83.56%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN <i>Outcome: Meningkatnya mutu dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan</i>	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100%	90%	90%	344.365.500,00	95%	344.365.500,00	100%	344.365.500,00	100%	344.365.500,00	100%	344.365.500,00	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minum</i>	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	85.61%	100%	100%	517.110.080,00	100%	517.110.080,00	100%	517.110.080,00	100%	517.110.080,00	100%	517.110.080,00	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN <i>Outcome: Meningkatnya dukungan, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap semua objek kesehatan</i>	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	10%	25%	25%	11.273.398.180,00	57%	11.273.398.180,00	75%	11.273.398.180,00	100%	11.273.398.180,00	100%	11.273.398.180,00	Dinas Kesehatan
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					762.360.437.000,00		841.975.874.000,00		932.659.804.000,00		1.001.148.299.000,00		1.431.420.575.000,00	
1	03		Dinas Pekerjaan Umum					735.351.098.000,00		815.607.799.000,00		906.231.229.000,00		974.719.724.000,00		1.404.957.000.000,00	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	57.457.252.345,20	100%	57.348.364.045,20	100%	57.408.865.185,20	100%	57.408.865.085,20	100%	57.443.865.085,20	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%				
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%				
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) <i>Outcome: Meningkatnya perlindungan masyarakat dari banjir, dan genangan</i>	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar	89.15%	54.85%	54.85%	16.755.034.000,00	57.22%	64.685.862.900,00	59.60%	66.285.862.900,00	61.98%	79.855.034.000,00	64.35%	81.455.034.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kota Makassar	54.45%	55.64%	55.64%		55.64%		55.64%		55.64%				
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM <i>Outcome: Meningkatnya akses rumah tangga terhadap layanan air minum</i>	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	3.75%	4.12%	4.12%	29.938.498.440,00	4.28%	29.938.498.440,00	4.45%	29.938.498.440,00	4.61%	29.938.498.440,00	4.77%	79.938.498.440,00	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	0.08%	0.19%	0.19%		0.24%		0.30%		0.35%		0.40%		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD Penanggung Jawab	
						2025 Target	Tahun 2026 Target Pagu Indikatif (Rp)		Tahun 2027 Target Pagu Indikatif (Rp)		Tahun 2028 Target Pagu Indikatif (Rp)		Tahun 2029 Target Pagu Indikatif (Rp)		Tahun 2030 Target Pagu Indikatif (Rp)		
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH <i>Outcome: Meningkatnya akses rumah tinggal terhadap akses sanitasi aman</i>	Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) akses aman Persentase rumah yang memperoleh layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) akses aman	8.45%	10.28%	10.28%	46.076.421.650,80	12.12%	46.076.421.650,80	13.91%	46.076.421.650,80	15.66%	46.076.421.650,80	17.38%	46.076.421.650,80	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem drainase perkotaan</i>	Persentase drainase dalam kondisi baik	69.08%	57.81%	57.81%	80.545.042.788,00	60.16%	80.545.042.788,00	62.5%	80.545.042.788,00	64.84%	80.545.042.788,00	67.19%	80.545.042.788,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah</i>	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	49.65%	49.65%	293.222.389.350,00	52.13%	328.002.193.050,00	54.73%	395.538.193.050,00	57.47%	397.059.793.050,00	60.34%	547.059.793.050,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan bangunan dan lingkungannya</i>	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	N/A	4.06%	4.06%	1.290.769.500,00	4.47%	1.290.769.500,00	4.91%	1.290.769.500,00	5.4%	1.290.769.500,00	5.94%	1.290.769.500,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan perkotaan</i>	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	98.00%	88.74%	88.74%	204.380.997.746,00	90.52%	202.035.954.446,00	91.64%	223.462.883.306,00	95.20%	276.860.607.306,00	97.05%	505.462.883.306,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI <i>Outcome: Meningkatnya kompetensi tenaga operator/teknisi/analisis konstruksi</i>	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	17.66%	37.44%	37.44%	5.684.692.180,00	41.44%	5.684.692.180,00	45.44%	5.684.692.180,00	49.44%	5.684.692.180,00	53.44%	5.684.692.180,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	03		Dinas Penataan Ruang				27.009.339.000,00		26.368.075.000,00		26.428.575.000,00		26.428.575.000,00		26.463.575.000,00		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	20.367.049.700,00	100%	20.065.785.700,00	100%	20.126.285.700,00	100%	20.126.285.700,00	100%	20.161.285.700,00	Dinas Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan bangunan</i>	Persentase pengendalian penyelenggaraan perizinan bangunan gedung	N/A	100%	100%	1.777.287.620,00	100%	1.777.287.620,00	100%	1.777.287.620,00	100%	1.777.287.620,00	100%	1.777.287.620,00	Dinas Penataan Ruang



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	N/A	100%	100%	4.865.001.680,00	100%	4.525.001.680,00	100%	4.525.001.680,00	100%	4.525.001.680,00	100%	4.525.001.680,00	Dinas Penataan Ruang
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					45.348.554.000,00		45.009.306.000,00		45.069.806.000,00		45.069.806.000,00		45.104.806.000,00	
1	04		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman					45.348.554.000,00		45.009.306.000,00		45.069.806.000,00		45.069.806.000,00		45.104.806.000,00	
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	19.790.132.385,00	100%	19.486.076.885,00	100%	19.546.576.885,00	100%	19.546.576.885,00	100%	19.581.576.885,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Outcome: Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	3.905.394.100,00	100%	3.905.394.100,00	100%	3.905.394.100,00	100%	3.905.394.100,00	100%	3.905.394.100,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Outcome: Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase luas kawasan kumuh < 10 Ha yang ditangani	N/A	10%	15%	10.779.803.615,00	15%	10.779.803.615,00	15%	10.779.803.615,00	15%	10.779.803.615,00	15%	10.779.803.615,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Outcome: Meningkatnya jumlah rumah layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	N/A	0,31%	3.69%	3.055.410.500,00	3.81%	3.055.410.500,00	3.93%	3.055.410.500,00	4.05%	3.055.410.500,00	4.18%	3.055.410.500,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU perumahan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana, dan utilitas umum)	20 Perumahan	100%	100%	7.817.813.400,00	100%	7.782.620.900,00	100%	7.782.620.900,00	100%	7.782.620.900,00	100%	7.782.620.900,00	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman



Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD Penanggung Jawab
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN				116.139.291.000,00		121.412.678.000,00		121.937.688.000,00		121.937.688.000,00		122.042.688.000,00		
1	05	Satuan Polisi Pamong Praja				41.388.278.000,00		41.408.936.000,00		41.469.436.000,00		41.469.436.000,00		41.504.436.000,00		
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	16.152.377.800,00	100%	16.173.035.800,00	100%	16.233.535.800,00	100%	16.233.535.800,00	100%	16.268.535.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
1	05	02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dalam upaya menegakkan ketenteraman dan ketertiban	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	25.235.900.200,00	100%	25.235.900.200,00	100%	25.235.900.200,00	100%	25.235.900.200,00	100%	25.235.900.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan					51.693.138.000,00		51.357.553.000,00		57.418.053.000,00		57.418.053.000,00		57.453.053.000,00	
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	33.017.529.760,00	100%	32.681.944.760,00	100%	38.742.444.760,00	100%	38.742.444.760,00	100%	38.777.444.760,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasaratur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
1	05	04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Outcome: Meningkatkan kualitas pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	18.675.608.240,00	100%	18.675.608.240,00	100%	18.675.608.240,00	100%	18.675.608.240,00	100%	18.675.608.240,00	Dinas Pemadam Kebakaran
			Persentase Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Response Time 15 Menit)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
1	05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					23.057.875.000,00		28.646.189.000,00		23.050.199.000,00		23.050.199.000,00		23.085.199.000,00	
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	15.242.703.040,00	100%	20.831.017.040,00	100%	15.235.027.040,00	100%	15.235.027.040,00	100%	15.270.027.040,00	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	7.815.171.960,00	100%	7.815.171.960,00	100%	7.815.171.960,00	100%	7.815.171.960,00	100%	7.815.171.960,00	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
			Outcome: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					24.650.980.000,00		24.665.653.000,00		24.726.153.000,00		24.726.152.000,00		24.761.153.000,00	
1	06		Dinas Sosial					24.650.980.000,00		24.665.653.000,00		24.726.153.000,00		24.726.152.000,00		24.761.153.000,00	
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	14.027.739.714,00	100%	14.042.412.714,00	100%	14.102.912.714,00	100%	14.102.911.714,00	100%	14.137.912.714,00	Dinas Sosial
			Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	N/A	50%	50%	1.281.764.400,00	50%	1.281.764.400,00	60%	1.281.764.400,00	65%	1.281.764.400,00	70%	1.281.764.400,00	Dinas Sosial
			Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan kesejahteraan sosial di luar panti	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial Yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kab/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai	N/A	50%	50%		50%		60%		65%		70%		
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	4.474.269.706,00	100%	4.474.269.706,00	100%	4.474.269.706,00	100%	4.474.269.706,00	100%	4.474.269.706,00	Dinas Sosial
			Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	100%	2.382.505.700,00	100%	2.382.505.700,00	100%	2.382.505.700,00	100%	2.382.505.700,00	100%	2.382.505.700,00	Dinas Sosial
			Outcome: Meningkatnya kualitas perlindungan dan jamninan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	N/A	80%	80%		80%		90%		90%		100%		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab	
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA Outcome: Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	2.353.160.480,00	100%	2.353.160.480,00	100%	2.353.160.480,00	100%	2.353.160.480,00	100%	2.353.160.480,00	Dinas Sosial	
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Outcome: Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Kota	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	100%	131.540.000,00	100%	131.540.000,00	100%	131.540.000,00	100%	131.540.000,00	100%	131.540.000,00	Dinas Sosial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					904.346.343.556,00		876.387.406.556,00		875.633.596.556,00		880.017.717.556,00		864.056.427.556,00		
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					45.300.538.000,00		45.249.434.000,00		45.309.934.000,00		56.109.934.000,00		56.144.934.000,00		
2 07	Dinas Ketenagakerjaan					45.300.538.000,00		45.249.434.000,00		45.309.934.000,00		56.109.934.000,00		56.144.934.000,00		
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100% 100% 90%	100% 100% 90%	100% 100% 90%	13.447.520.520,00	100% 100% 90%	13.396.416.520,00	100% 100% 90%	13.456.916.520,00	100% 100% 90%	13.456.916.520,00	100% 100% 90%	13.491.916.520,00	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Outcome: Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	96.67%	97.50%	97.50%	121.615.100,00	98.33%	121.615.100,00	99.17%	121.615.100,00	100%	121.615.100,00	100%	121.615.100,00	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Outcome: Meningkatnya produktivitas dan kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitas-nya	20.49%	21.21%	21.21%	1.725.506.000,00	22.22%	1.725.506.000,00	23.21%	1.725.506.000,00	24.29%	1.725.506.000,00	25.4%	1.725.506.000,00	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Outcome: Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	60.05%	61%	61%	1.620.504.300,00	62%	1.620.504.300,00	63%	1.620.504.300,00	64%	1.620.504.300,00	65%	1.620.504.300,00	Dinas Ketenagakerjaan	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Outcome: Meningkatnya kualitas hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan pekerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	40.26%	41%	41%	28.385.392.080,00	41.50%	28.385.392.080,00	42%	28.385.392.080,00	42.50%	39.185.392.080,00	43%	39.185.392.080,00	Dinas Ketenagakerjaan	



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				21.081.710.000,00		16.071.453.000,00		21.131.953.000,00		16.131.953.000,00		21.166.953.000,00		
2	08		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				21.081.710.000,00		16.071.453.000,00		21.131.953.000,00		16.131.953.000,00		21.166.953.000,00		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11.172.517.808,00	100%	11.162.260.808,00	100%	11.222.760.808,00	100%	11.222.760.808,00	100%	11.257.760.808,00	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan</i>	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71%	75%	75%	5.521.945.100,00	80%	521.945.100,00	85%	5.521.945.100,00	90%	521.945.100,00	95%	5.521.945.100,00	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas penanganan kekerasan terhadap perempuan</i>	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1.05%	1%	1%	2.186.910.844,00	0.90%	2.186.910.844,00	0.80%	2.186.910.844,00	0.70%	2.186.910.844,00	0.60%	2.186.910.844,00	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA <i>Outcome: Meningkatnya kuantitas keluarga yang mendukung perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan HAK anak</i>	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Utama (285)	Utama (292)	Utama (293)	470.002.300,00	Utama (303)	470.002.300,00	Utama (307)	470.002.300,00	Utama (308)	470.002.300,00	Utama (313)	470.002.300,00	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK <i>Outcome: Meningkatnya kualitas ketersediaan data gender dan anak</i>	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	60%	65%	65%	89.540.700,00	70%	89.540.700,00	75%	89.540.700,00	80%	89.540.700,00	85%	89.540.700,00	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) <i>Outcome: Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif</i>	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61.65%	65.55%	65.55%	396.841.200,00	67.05%	396.841.200,00	68.55%	396.841.200,00	70.05%	396.841.200,00	71.55%	396.841.200,00	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK <i>Outcome: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak</i>	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100%	100%	100%	1.243.952.048,00	100%	1.243.952.048,00	100%	1.243.952.048,00	100%	1.243.952.048,00	100%	1.243.952.048,00	Dinas Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				17.002.874.000,00		17.017.875.000,00		17.078.375.000,00		17.078.375.000,00		17.113.375.000,00		
2	09		Dinas Ketahanan Pangan				17.002.874.000,00		17.017.875.000,00		17.078.375.000,00		17.078.375.000,00		17.113.375.000,00		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11.149.980.200,00	100%	11.164.981.200,00	100%	11.225.481.200,00	100%	11.225.481.200,00	100%	11.260.481.200,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas penganekaragaman pangan di masyarakat</i>	Tingkat ketersediaan energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2812 kkal/ kapita	2825 kkal/ kapita	2850 kkal/ kapita	4.295.230.500,00	2875 kkal/ kapita	4.295.230.500,00	3000 kkal/ kapita	4.295.230.500,00	3025 kkal/ kapita	4.295.230.500,00	3050 kkal/ kapita	4.295.230.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Energi	2041 kkal/ kapita	2042 kkal/ kapita	2043 kkal/ kapita		2044 kkal/ kapita		2045 kkal/ kapita		2046 kkal/ kapita		2047 kkal/ kapita		
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN <i>Outcome: Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan kota</i>	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1.31%	1.30%	1.30%	544.825.300,00	1.29%	544.825.300,00	1.28%	544.825.300,00	1.27%	544.825.300,00	1.26%	544.825.300,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN <i>Outcome: Meningkatnya keamanan dan mutu pangan</i>	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	80%	80%	1.012.838.000,00	80%	1.012.838.000,00	80%	1.012.838.000,00	80%	1.012.838.000,00	80%	1.012.838.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				17.052.128.000,00		16.370.378.000,00		16.478.878.000,00		16.478.878.000,00		16.513.878.000,00		
2	10		Dinas Pertanahan				17.052.128.000,00		16.370.378.000,00		16.478.878.000,00		16.478.878.000,00		16.513.878.000,00		
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	7.611.725.168,00	100%	6.929.975.168,00	100%	7.038.475.168,00	100%	7.038.475.168,00	100%	7.073.475.168,00	Dinas Pertanahan
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN <i>Outcome: Meningkatnya penanganan sengketa tanah</i>	Persentase penanganan sengketa tanah	100%	100%	100%	190.693.040,00	100%	190.693.040,00	100%	190.693.040,00	100%	190.693.040,00	100%	190.693.040,00	Dinas Pertanahan
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah</i>	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	20%	100%	100%	5.689.697.192,00	100%	5.689.697.192,00	100%	5.689.697.192,00	100%	5.689.697.192,00	100%	5.689.697.192,00	Dinas Pertanahan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD	
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab		
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Outcome: Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum atas tanah	Persentase Tanah Aset Pemerintah Kota yang disertifikatkan	30.6%	40.20%	40.20%	3.560.012.600,00	48%	3.560.012.600,00	56%	3.560.012.600,00	65%	3.560.012.600,00	72%	3.560.012.600,00	Dinas Pertanahan
			Persentase tanah aset pemerintah kota yang diamankan melalui pengamanan fisik	41%	46%	46%		55%		64%		73%		83%			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				123.934.597.000,00		102.201.067.000,00		124.052.013.000,00		124.743.789.000,00		124.278.789.000,00		
2	11		Dinas Lingkungan Hidup				123.934.597.000,00		102.201.067.000,00		124.052.013.000,00		124.743.789.000,00		124.278.789.000,00		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	32.763.472.181,00	100%	31.481.164.331,00	100%	31.591.664.181,00	100%	31.927.664.181,00	100%	31.962.664.181,00	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Terpenuhinya dokumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	1 Dokumen	0%	0%	-	100%	100.000.000,00	0%	-	100%	500.000.000,00	0%	-	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Outcome: Meningkatnya kualitas pemenuhan baku mutu lingkungan	Persentase penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	2.676.955.080,00	100%	2.676.955.080,00	100%	2.676.955.080,00	100%	2.676.955.080,00	100%	2.676.955.080,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Outcome: Meningkatnya pengelolaan RTH Publik	Persentase pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	5.66%	6.23%	6.23%	26.057.559.260,00	6.51%	27.157.559.260,00	6.80%	27.157.559.260,00	7.08%	27.157.559.260,00	7.36%	27.157.559.260,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Outcome: Meningkatnya pengendalian pengelolaan limbah yang ramah lingkungan	Persentase limbah B3 yang terkelola	97%	100%	100%	601.597.500,00	100%	601.597.500,00	100%	601.597.500,00	100%	601.597.500,00	100%	601.597.500,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Outcome: Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap regulasi Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	24.59%	61.50%	61.50%	605.570.400,00	53.80%	605.570.400,00	46%	605.570.400,00	38.40%	605.570.400,00	30.77%	605.570.400,00	Dinas Lingkungan Hidup



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT <i>Outcome: Peningkatnya kualitas dan kuantitas penggerak peduli Lingkungan Hidup Kota</i>	Persentase pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang diselenggarakan	100%	100%	100%	1.413.344.100,00	100%	1.413.344.100,00	100%	1.413.344.100,00	100%	1.413.344.100,00	100%	1.413.344.100,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP <i>Outcome: Meningkatnya penyelesaian pengaduan/sengketa/ tindak pidana lingkungan hidup</i>	Persentase penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	100%	100%	388.362.260,00	100%	433.362.260,00	100%	433.362.260,00	100%	433.362.260,00	100%	433.362.260,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN <i>Outcome: Meningkatnya pengelolaan persampahan</i>	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	2.01%	6%	10%	59.427.736.219,00	18%	37.731.514.069,00	25%	59.571.960.219,00	30%	59.427.736.219,00	35%	59.427.736.219,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					20.552.872.000,00		20.558.179.000,00		20.618.679.000,00		20.618.679.000,00		20.653.679.000,00	
2	12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					20.552.872.000,00		20.558.179.000,00		20.618.679.000,00		20.618.679.000,00		20.653.679.000,00	
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	15.978.077.020,00	100%	15.983.384.020,00	100%	16.043.884.020,00	100%	16.043.884.020,00	100%	16.078.884.020,00	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK <i>Outcome: Meningkatnya cakupan layanan pendaftaran penduduk</i>	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	11.48%	13.7%	13.7%	3.632.709.460,00	16%	3.632.709.460,00	18.3%	3.632.709.460,00	20.3%	3.632.709.460,00	22.9%	3.632.709.460,00	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	72%	74.3%	74.3%		76.6%		78.9%		81.2%		83.5%		
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL <i>Outcome: Meningkatnya cakupan pelayanan layanan pencatatan sipil</i>	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99.84%	100%	100%	530.296.780,00	100%	530.296.780,00	100%	530.296.780,00	100%	530.296.780,00	100%	530.296.780,00	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	98.97%	98.99%	99.01%		99.03%		99.05%		99.07%		99.09%		
				Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	59.03%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	63.62%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Jawab
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Outcome: Meningkatnya kualitas pemenuhan dan pemanfaatan data kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	20%	20%	20%	257.693.380,00	40%	257.693.380,00	60%	257.693.380,00	80%	257.693.380,00	100%	257.693.380,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Outcome: Meningkatnya kualitas penyajian profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	154.095.360,00	100%	154.095.360,00	100%	154.095.360,00	100%	154.095.360,00	100%	154.095.360,00	Dinas Kependudukan dan Capil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN				208.694.380.556,00		205.899.540.556,00		204.259.061.556,00		204.259.061.556,00		204.259.061.556,00		
2	13		Sekretariat Daerah				208.694.380.556,00		205.899.540.556,00		204.259.061.556,00		204.259.061.556,00		204.259.061.556,00		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	195.641.231.856,00	100%	192.846.391.856,00	100%	191.205.912.856,00	100%	191.205.912.856,00	100%	191.205.912.856,00	Sekretariat Daerah
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
			Persentase ketersediaan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang di Fasilitasi		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Indeks Kematangan Organisasi		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Outcome: Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan	Persentase PKK aktif	100%	100%	100%	13.053.148.700,00	100%	13.053.148.700,00	100%	13.053.148.700,00	100%	13.053.148.700,00	100%	13.053.148.700,00	Sekretariat Daerah
			Persentase Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lingkup Kelurahan		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				27.134.951.000,00		27.088.439.000,00		27.148.939.000,00		27.148.939.000,00		27.183.939.000,00		
2	14		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				27.134.951.000,00		27.088.439.000,00		27.148.939.000,00		27.148.939.000,00		27.183.939.000,00		
2	14	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	17.067.975.140,00	100%	17.021.463.140,00	100%	17.081.963.140,00	100%	17.081.963.140,00	100%	17.116.963.140,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD	
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab		
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Outcome: Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR)	2.01%	2.008%	2.008%	662.742.740,00	2.006%	662.742.740,00	2.004%	662.742.740,00	2.002%	662.742.740,00	2%	662.742.740,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	18%	17.6%	17.6%		17.2%		16.8%		16.4%		16%			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Outcome: Meningkatnya kualitas layanan KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	59.8 %	61.6%	61.6%	8.946.335.780,00	63.2%	8.946.335.780,00	64.8%	8.946.335.780,00	66.4%	8.946.335.780,00	68%	8.946.335.780,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Kebutuhan BerKB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12%	11%	11%		10%		9%		8%		7%			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	75%	76%	76%	457.897.340,00	77%	457.897.340,00	78%	457.897.340,00	79%	457.897.340,00	80%	457.897.340,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					142.137.181.000,00		159.720.236.000,00		169.658.430.000,00		160.433.377.000,00		139.693.430.000,00	
2	15		Dinas Perhubungan					142.137.181.000,00		159.720.236.000,00		169.658.430.000,00		160.433.377.000,00		139.693.430.000,00	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	45.617.403.929,00	100%	38.031.039.029,00	100%	44.289.727.929,00	100%	38.714.257.929,00	100%	44.324.727.929,00	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota	0.48	0.47	0.46	92.803.401.091,00	0.45	89.475.758.991,00	0.44	91.678.576.091,00	0.43	89.505.681.091,00	0.42	91.678.576.091,00	Dinas Perhubungan
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	57.22%	60%	60%		63%		66.5%		75%		100%			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Outcome: Meningkatnya layanan penyeberangan pulau	Rasio Konektivitas Penyeberangan	0.74%	0.76%	0.76%	3.716.375.980,00	0.77%	32.213.437.980,00	0.78%	33.690.125.980,00	0.79%	32.213.437.980,00	0.8%	3.690.125.980,00	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					80.583.666.000,00		80.597.068.000,00		80.657.568.000,00		80.993.568.000,00		81.028.568.000,00	
2	16		Dinas Komunikasi dan Informatika					80.583.666.000,00		80.597.068.000,00		80.657.568.000,00		80.993.568.000,00		81.028.568.000,00	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	14.149.796.134,00	100%	14.163.198.134,00	100%	14.223.698.134,00	100%	14.559.698.134,00	100%	14.594.698.134,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan informasi publik</i>	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah	N/A	75%	75%	16.250.865.380,00	77%	16.250.865.380,00	79%	16.250.865.380,00	81%	16.250.865.380,00	83%	16.250.865.380,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA <i>Outcome: Meningkatnya integrasi aplikasi pemerintah daerah</i>	Persentase SKPD yang mengimplemen-tasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	N/A	100%	100%	50.183.004.486,00	100%	50.183.004.486,00	100%	50.183.004.486,00	100%	50.183.004.486,00	100%	50.183.004.486,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN					19.922.929.000,00		19.759.268.000,00		19.819.768.000,00		19.819.768.000,00		19.854.768.000,00	
2	17		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					19.922.929.000,00		19.759.268.000,00		19.819.768.000,00		19.819.768.000,00		19.854.768.000,00	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	9.935.963.120,00	100%	9.772.302.120,00	100%	9.832.802.120,00	100%	9.832.802.120,00	100%	9.867.802.120,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam</i>	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	4.45%	15.63%	15.63%	552.073.800,00	16.0%	552.073.800,00	15.80%	552.073.800,00	15.80%	552.073.800,00	16%	552.073.800,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI <i>Outcome: Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi</i>	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	26.40%	27%	27%	994.391.980,00	25%	994.391.980,00	25.5%	994.391.980,00	27%	994.391.980,00	28%	994.391.980,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi</i>	Persentase koperasi aktif	44.43%	44.50%	44.50%	563.932.480,00	44.50%	563.932.480,00	44.50%	563.932.480,00	44.50%	563.932.480,00	46.00%	563.932.480,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas SDM Koperasi</i>	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	26.94%	20.55%	20.55%	437.358.100,00	14%	437.358.100,00	12%	437.358.100,00	21.92%	437.358.100,00	21.92%	437.358.100,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI <i>Outcome: Meningkatnya produktivitas koperasi</i>	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	27.23%	27.50%	27.50%	1.264.618.200,00	27.50%	1.264.618.200,00	27.80%	1.264.618.200,00	28%	1.264.618.200,00	29%	1.264.618.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD Penanggung Jawab	
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) <i>Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri</i>	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10.45%	15%	15%	2.539.227.300,00	20%	2.539.227.300,00	20%	2.539.227.300,00	30%	2.539.227.300,00	40%	2.539.227.300,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				Pertumbuhan Wirausaha	12.43%	14.5%	14.5%		16.5%		18%		19%		20%		
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM <i>Outcome: Meningkatnya daya saing UMKM</i>	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	N/A	1%	1%	3.635.364.020,00	1%	3.635.364.020,00	1%	3.635.364.020,00	0.75%	3.635.364.020,00	0.75%	3.635.364.020,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					22.548.655.000,00		22.436.903.000,00		22.497.403.000,00		22.497.403.000,00		22.532.403.000,00	
2	18		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu					22.548.655.000,00		22.436.903.000,00		22.497.403.000,00		22.497.403.000,00		22.532.403.000,00	
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	17.122.462.700,00	100%	17.010.710.700,00	100%	17.071.210.700,00	100%	17.071.210.700,00	100%	17.106.210.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL <i>Outcome: Meningkatnya realisasi investasi</i>	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp.3.827. 931.439. 043	Rp 3000000 000000	Rp 3000000 000000	805.948.240,00	Rp 326250 000000 0	805.948.240,00	Rp 3551231 250000	805.948.240,00	Rp 3870842 062500	805.948.240,00	Rp 42269595 32250	805.948.240,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL <i>Outcome: Meningkatnya kualitas promosi penanaman modal</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan promosi penanaman modal	90%	90%	90%	1.974.583.700,00	100%	1.974.583.700,00	100%	1.974.583.700,00	100%	1.974.583.700,00	100%	1.974.583.700,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanaan perizinan</i>	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80%	90%	90%	1.227.850.640,00	100%	1.227.850.640,00	100%	1.227.850.640,00	100%	1.227.850.640,00	100%	1.227.850.640,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL <i>Outcome: Meningkatnya kuantitas penyelesaian permasalahan penanaman modal</i>	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	80%	90%	90%	302.456.200,00	100%	302.456.200,00	100%	302.456.200,00	100%	302.456.200,00	100%	302.456.200,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Outcome: Meningkatnya kualitas data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	80%	90%	90%	1.115.353.520,00	100%	1.115.353.520,00	100%	1.115.353.520,00	100%	1.115.353.520,00	100%	1.115.353.520,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				111.257.178.000,00		99.970.434.000,00		64.893.963.000,00		70.075.361.000,00		71.499.018.000,00		
2	19		Dinas Pemuda dan Olahraga				111.257.178.000,00		99.970.434.000,00		64.893.963.000,00		70.075.361.000,00		71.499.018.000,00		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11.303.027.700,00	100%	10.587.156.950,00	100%	10.783.326.750,00	100%	10.647.656.750,00	100%	10.818.326.750,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Outcome: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	16.61%	17.75%	17.75%	7.028.413.000,00	17.75%	6.028.413.000,00	18.32%	6.028.413.000,00	18.89%	7.028.413.000,00	19.46%	7.028.413.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Outcome: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100%	100%	100%	92.925.737.300,00	100%	82.354.864.050,00	100%	47.082.223.250,00	100%	51.399.291.250,00	100%	52.652.278.250,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas kepramukaan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	2.15%	2.20%	2.20%	-	2.25%	1.000.000.000,00	2.30%	1.000.000.000,00	2.35%	1.000.000.000,00	2.40%	1.000.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		
2	20		Dinas Komunikasi dan Informatika				1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		1.594.818.880,00		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Outcome: Meningkatnya ketersediaan data statistik kewenangan Kota	Persentase OPD Yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	76%	88.23%	89%	1.594.818.880,00	90%	1.594.818.880,00	91%	1.594.818.880,00	92%	1.594.818.880,00	93%	1.594.818.880,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	76%	88.23%	89%		90%		91%		92%		93%		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD Penanggung Jawab	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			3.444.285.120,00		3.444.285.120,00		3.444.285.120,00		3.444.285.120,00		3.444.285.120,00			
2	21		Dinas Komunikasi dan Informatika			3.444.285.120,00		3.444.285.120,00		3.444.285.120,00		3.444.285.120,00		3.444.285.120,00			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Outcome: Meningkatnya kualitas keamanan siber dan sandi lingkup Pemerintah Kota	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	41%	46%	49%	3.444.285.120,00	52%	3.444.285.120,00	55%	3.444.285.120,00	58%	3.444.285.120,00	62%	3.444.285.120,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			16.521.066.000,00		16.586.444.000,00		16.646.944.000,00		16.646.944.000,00		16.681.944.000,00			
2	22		Dinas Kebudayaan			16.521.066.000,00		16.586.444.000,00		16.646.944.000,00		16.646.944.000,00		16.681.944.000,00			
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11.257.571.880,00	100%	11.404.405.880,00	100%	11.464.905.880,00	100%	11.464.905.880,00	100%	11.499.905.880,00	Dinas Kebudayaan
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100% (350 Orang)	100%	100%	1.641.976.780,00	100%	1.641.976.780,00	100%	1.641.976.780,00	100%	1.641.976.780,00	100%	1.641.976.780,00	Dinas Kebudayaan
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	N/A	20%	20%	1.655.232.220,00	20%	1.655.232.220,00	20%	1.655.232.220,00	20%	1.655.232.220,00	20%	1.655.232.220,00	Dinas Kebudayaan
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Outcome: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	87%	100%	100%	579.450.460,00	100%	497.994.460,00	100%	497.994.460,00	100%	497.994.460,00	100%	497.994.460,00	Dinas Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Outcome: Meningkatnya kuantitas cagar budaya yang dilestarikan	Persentase Objek Cagar Budaya yang ditetapkan	23% (36 Objek)	20%	20%	733.285.560,00	20%	733.285.560,00	20%	733.285.560,00	20%	733.285.560,00	20%	733.285.560,00	Dinas Kebudayaan
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Outcome: Meningkatnya kualitas pengelolaan museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	59.303 Orang	1.08%	1.08%	653.549.100,00	1.01%	653.549.100,00	1.12%	653.549.100,00	1.15%	653.549.100,00	5.58%	653.549.100,00	Dinas Kebudayaan



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.415.122.000,00		12.147.449.000,00		10.607.949.000,00		12.207.949.000,00		10.642.949.000,00	
2	23		Dinas Perpustakaan					13.415.122.000,00		12.147.449.000,00		10.607.949.000,00		12.207.949.000,00		10.642.949.000,00	
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8.545.940.100,00	100%	10.136.395.100,00	100%	8.596.895.100,00	100%	10.196.895.100,00	100%	8.631.895.100,00	Dinas Perpustakaan
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%				
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%				
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	84.52%	84.60%	84.60%	4.567.555.200,00	84.63%	1.765.428.200,00	84.66%	1.765.428.200,00	84.69%	1.765.428.200,00	84.72%	1.765.428.200,00	Dinas Perpustakaan
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Outcome: Meningkatnya pelestarian naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	704 Judul	0.14%	0.14%	301.626.700,00	0.14%	245.625.700,00	0.14%	245.625.700,00	0.14%	245.625.700,00	0.14%	245.625.700,00	Dinas Perpustakaan
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					12.167.392.000,00		9.674.135.000,00		9.734.635.000,00		9.734.635.000,00		9.769.635.000,00	
2	24		Dinas Kearsipan					12.167.392.000,00		9.674.135.000,00		9.734.635.000,00		9.734.635.000,00		9.769.635.000,00	
2	24	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	11.104.106.460,00	100%	8.610.849.460,00	100%	8.671.349.460,00	100%	8.671.349.460,00	100%	8.706.349.460,00	Dinas Kearsipan
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%				
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%				
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Outcome: Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	Persentase Ketersediaan Arsip	6.89% (5.570 Arsip)	25.76%	25.76%	478.011.500,00	44.32%	478.011.500,00	62.88%	478.011.500,00	81.44%	478.011.500,00	100%	478.011.500,00	Dinas Kearsipan
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Outcome: Meningkatnya kuantitas arsip yang diamankan dan dilestarikan	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	9.42% (1.171 arsip)	27.60%	27.60%	529.221.340,00	45.70%	529.221.340,00	63.80%	529.221.340,00	81.90%	529.221.340,00	100%	529.221.340,00	Dinas Kearsipan
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Outcome: Meningkatnya pengelolaan pemberian izin penggunaan arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	100%	100%	100%	56.052.700,00	100%	56.052.700,00	100%	56.052.700,00	100%	56.052.700,00	100%	56.052.700,00	Dinas Kearsipan



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD	
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab	
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				102.523.982.000,00		100.080.207.000,00		96.349.487.000,00		100.349.487.000,00		96.454.487.000,00		
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				40.648.075.900,00		35.222.873.700,00		35.371.153.700,00		35.371.153.700,00		35.406.153.700,00		
3	25	Dinas Perikanan dan Pertanian				40.648.075.900,00		35.222.873.700,00		35.371.153.700,00		35.371.153.700,00		35.406.153.700,00		
3	25	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	36.283.411.800,00	100%	30.858.209.600,00	100%	31.006.489.600,00	100%	31.006.489.600,00	100%	31.041.489.600,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
3	25	03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	20603.90 Ton	21401 Ton	21722 Ton	2.467.155.780,00	22048 Ton	2.467.155.780,00	22378 Ton	2.467.155.780,00	22714 Ton	2.467.155.780,00	23355 Ton	2.467.155.780,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
3	25	04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1519.58 Ton	1559 Ton	1568.35 Ton	1.337.593.720,00	1577.76 Ton	1.337.593.720,00	1587.23 Ton	1.337.593.720,00	1596.75 Ton	1.337.593.720,00	1606.33 Ton	1.337.593.720,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
3	25	05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Outcome: Meningkatnya cakupan pengawasan perikanan	Persentase Sumber Daya Perikanan Yang Diawasi	100%	100%	100%	29.918.700,00	100%	29.918.700,00	100%	29.918.700,00	100%	29.918.700,00	100%	29.918.700,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
3	25	06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Outcome: Meningkatnya produksi dan nilai pengolahan hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan	48.55 Kg/ Kapita/ Tahun	48.74 Kg/ Kapita/ Tahun	48.94 Kg/ Kapita/ Tahun	529.995.900,00	49.13 Kg/ Kapita/ Tahun	529.995.900,00	49.33 Kg/ Kapita/ Tahun	529.995.900,00	49.53 Kg/ Kapita/ Tahun	529.995.900,00	49.73 Kg/ Kapita/ Tahun	529.995.900,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				32.848.622.000,00		32.356.680.000,00		32.417.180.000,00		32.417.180.000,00		32.452.180.000,00		
3	26	Dinas Pariwisata				32.848.622.000,00		32.356.680.000,00		32.417.180.000,00		32.417.180.000,00		32.452.180.000,00		
3	26	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	15.793.372.147,00	100%	15.602.964.547,00	100%	15.663.464.547,00	100%	15.663.464.547,00	100%	15.698.464.547,00	Dinas Pariwisata
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
3	26	02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Outcome: Meningkatnya kuantitas daya tarik pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	24.88%	5%	7%	4.735.612.600,00	10%	4.434.078.200,00	12%	4.434.078.200,00	15%	4.434.078.200,00	18%	4.434.078.200,00	Dinas Pariwisata
3	26	03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Outcome: Meningkatnya kualitas pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	N/A	4%	5.88%	3.895.274.400,00	11.11%	3.895.274.400,00	12.50%	3.895.274.400,00	15.56%	3.895.274.400,00	19.23%	3.895.274.400,00	Dinas Pariwisata



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD Penanggung Jawab
						2025 Target	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL <i>Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif</i>	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2.20 %	2.75%	3.03%	5.673.751.003,00	3.63%	5.673.751.003,00	4.34%	5.673.751.003,00	5.17%	5.673.751.003,00	6.11%	5.673.751.003,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF <i>Outcome: Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif</i>	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	10%	12.92%	2.750.611.850,00	16.16%	2.750.611.850,00	19.39%	2.750.611.850,00	22.62%	2.750.611.850,00	25.85%	2.750.611.850,00	Dinas Pariwisata
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.658.318.100,00		6.580.289.300,00		6.580.289.300,00		6.580.289.300,00		6.580.289.300,00	
3	27		Dinas Perikanan dan Pertanian					6.658.318.100,00		6.580.289.300,00		6.580.289.300,00		6.580.289.300,00		6.580.289.300,00	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN <i>Outcome: Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian (urban farming)</i>	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15614 Ton	15615 Ton	15616 Ton	5.008.335.760,00	15617 Ton	5.008.335.760,00	15618 Ton	5.008.335.760,00	15619 Ton	5.008.335.760,00	15620 Ton	5.008.335.760,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		5.4 Ton	7 Ton	8 Ton	9 Ton		10 Ton		11 Ton		12 Ton				
		Peningkatan Produksi Hortikultura		310.1 Ton	320.10 Ton	330.60 Ton	340.60 Ton		350 Ton		360 Ton		370 Ton				
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN <i>Outcome: Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian (urban farming)</i>	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	N/A	40 Ha	40 Ha	148.437.200,00	40 Ha	148.437.200,00	40 Ha	148.437.200,00	40 Ha	148.437.200,00	40 Ha	148.437.200,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER <i>Outcome: Meningkatnya pengendalian dan penanganan penyakit hewan</i>	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	70%	77.5%	80%	1.163.627.640,00	82.50%	1.163.627.640,00	85%	1.163.627.640,00	87.50%	1.163.627.640,00	90%	1.163.627.640,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		12%	13.3%	14.60%	16%		17.30%		18.60%		20%				
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN <i>Outcome: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</i>	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100%	80%	80%	98.733.300,00	80%	98.733.300,00	80%	98.733.300,00	80%	98.733.300,00	80%	98.733.300,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		100%	80%	80%	80%		80%		80%						
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian</i>	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	80%	100%	100%	7.241.600,00	100%	7.241.600,00	100%	7.241.600,00	100%	7.241.600,00	100%	7.241.600,00	Dinas Perikanan dan Pertanian



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD	
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab		
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas binaan penyuluh pertanian	Persentase kelompok tani yang aktif	100%	100%	100%	231.942.600,00	100%	153.913.800,00	100%	153.913.800,00	100%	153.913.800,00	100%	153.913.800,00	Dinas Perikanan dan Pertanian
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				20.237.177.580,00		19.788.575.580,00		19.849.075.580,00		19.849.075.580,00		19.884.075.580,00		
3	30		Dinas Perdagangan dan Perindustrian				20.237.177.580,00		19.788.575.580,00		19.849.075.580,00		19.849.075.580,00		19.884.075.580,00		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	16.023.563.940,00	100%	15.663.933.540,00	100%	15.724.433.540,00	100%	15.724.433.540,00	100%	15.759.433.540,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%				100%				100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%				90%				90%		
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Outcome: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	90%	100%	100%	199.320.860,00	100%	199.320.860,00	100%	199.320.860,00	100%	199.320.860,00	100%	199.320.860,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Outcome: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	100%	100%	54.362.000,00	100%	54.362.000,00	100%	54.362.000,00	100%	54.362.000,00	100%	54.362.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	100%	100%	748.728.080,00	100%	748.728.080,00	100%	748.728.080,00	100%	748.728.080,00	100%	748.728.080,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%				100%				100%		
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	11.95%	12.10%	12.10%	1.606.565.580,00	13%	1.606.565.580,00	13.95%	1.606.565.580,00	14%	1.606.565.580,00	14.95%	1.606.565.580,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Outcome: Meningkatnya kualitas tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrolagian	70%	90%	90%	1.310.692.320,00	90%	1.221.720.720,00	90%	1.221.720.720,00	90%	1.221.720.720,00	90%	1.221.720.720,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI <i>Outcome: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</i>	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	60%	70%	70%	293.944.800,00	75%	293.944.800,00	80%	293.944.800,00	85%	293.944.800,00	90%	293.944.800,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.131.788.420,00		6.131.788.420,00		2.131.788.420,00		6.131.788.420,00		2.131.788.420,00	
3	31		Dinas Perdagangan dan Perindustrian					2.131.788.420,00		6.131.788.420,00		2.131.788.420,00		6.131.788.420,00		2.131.788.420,00	
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI <i>Outcome: Meningkatnya realisasi pembangunan industri</i>	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	4.8%	4.8%	1.975.441.820,00	4.8%	5.975.441.820,00	4.8%	1.975.441.820,00	4.8%	5.975.441.820,00	4.8%	1.975.441.820,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI <i>Outcome: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian</i>	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	67.03%	0.41%	0.41%	39.410.400,00	0.41%	39.410.400,00	0.41%	39.410.400,00	0.41%	39.410.400,00	0.41%	39.410.400,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL <i>Outcome: Meningkatnya pemanfaatan informasi industri</i>	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100%	100%	100%	116.936.200,00	100%	116.936.200,00	100%	116.936.200,00	100%	116.936.200,00	100%	116.936.200,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					240.566.139.444,00		249.067.146.444,00		248.961.975.444,00		249.911.495.444,00		241.046.495.444,00	
4	01		SEKRETARIAT DAERAH					49.038.369.444,00		49.038.369.444,00		49.038.369.444,00		49.038.369.444,00		49.038.369.444,00	
4	01		Sekretariat Daerah					49.038.369.444,00		49.038.369.444,00		49.038.369.444,00		49.038.369.444,00		49.038.369.444,00	
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT <i>Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</i>	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%	43.439.409.440,00	100%	43.439.409.440,00	100%	43.439.409.440,00	100%	43.439.409.440,00	100%	43.439.409.440,00	Sekretariat Daerah
				Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase kegiatan keagamaan yang mendapat dukungan/ fasilitas	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase produk hukum yang dihasilkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Efektivitas kerja sama daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan</i>	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100%	100%	100%	5.598.960.004,00	100%	5.598.960.004,00	100%	5.598.960.004,00	100%	5.598.960.004,00	100%	5.598.960.004,00	Sekretariat Daerah
				Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
				Tingkat kematangan UKPBJ	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
4	02		SEKRETARIAT DPRD					191.527.770.000,00		200.028.777.000,00		199.923.606.000,00		200.873.126.000,00		192.008.126.000,00	
4	02		Sekretariat DPRD					191.527.770.000,00		200.028.777.000,00		199.923.606.000,00		200.873.126.000,00		192.008.126.000,00	
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	107.009.817.520,00	100%	115.510.824.520,00	100%	115.405.653.520,00	100%	116.355.173.520,00	100%	107.490.173.520,00	Sekretariat DPRD
				Persentase ketersediaan layanan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan layanan administrasi anggota DPRD	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD <i>Outcome: Meningkatnya fasilitas kinerja DPRD</i>	Ketepatan penetapan Perda APBD tahun N	100%	100%	100%	84.517.952.480,00	100%	84.517.952.480,00	100%	84.517.952.480,00	100%	84.517.952.480,00	100%	84.517.952.480,00	Sekretariat DPRD
				Persentase penetapan Ranperda tahun N	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					299.687.107.000,00		299.601.959.000,00		299.969.030.000,00		297.703.469.000,00		299.976.276.000,00	
5	01		PERENCANAAN					38.576.590.000,00		38.728.111.000,00		38.853.182.000,00		39.022.451.000,00		41.155.258.000,00	
5	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					38.576.590.000,00		38.728.111.000,00		38.853.182.000,00		39.022.451.000,00		41.155.258.000,00	
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	27.812.750.476,00	100%	27.832.171.476,00	100%	27.892.472.476,00	100%	27.892.453.876,00	100%	27.927.418.476,00	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH <i>Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</i>	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPd	100%	100%	100%	3.060.051.644,00	100%	3.192.151.644,00	100%	3.256.921.644,00	100%	3.426.209.244,00	100%	5.524.051.644,00	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH <i>Outcome: Meningkatnya keselarasan perencanaan Perangkat Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Kota</i>	Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	100%	7.703.787.880,00	100%	7.703.787.880,00	100%	7.703.787.880,00	100%	7.703.787.880,00	100%	7.703.787.880,00	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah
				Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase keselarasan RKPd dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan wilayah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab	
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
5 02		KEUANGAN				223.618.746.000,00		223.552.780.000,00		223.673.780.000,00		220.902.950.000,00		220.972.950.000,00		
5 02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				92.337.242.000,00		92.288.704.000,00		92.349.204.000,00		92.349.204.000,00		92.384.204.000,00		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	37.863.929.780,00	100%	36.815.391.780,00	100%	36.875.891.780,00	100%	36.875.891.780,00	100%	36.910.891.780,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%					
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%					
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Outcome: Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	26.59%	29.69%	30%	47.017.935.500,00	30%	47.017.935.500,00	30%	47.017.935.500,00	30%	47.017.935.500,00	30%	47.017.935.500,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	26.99%	40.58%	40%		40%		40%		40%					
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	80.71%	85%	85%		90%		90%		90%					
		Persentase Penurunan SILPA	5.59%	4.35%	3%		2.98%		2.96%		2.94%					
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%		100%		100%		100%					
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Outcome: Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4%	4%	4%	7.455.376.720,00	4%	8.455.376.720,00	4%	8.455.376.720,00	4%	8.455.376.720,00	4%	8.455.376.720,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 02		Badan Pendapatan Daerah				131.281.504.000,00		131.264.076.000,00		131.324.576.000,00		128.553.746.000,00		128.588.746.000,00		
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100.628.646.774,00	100%	100.611.218.774,00	100%	100.671.718.774,00	100%	97.900.888.774,00	100%	97.935.888.774,00	Badan Pendapatan Daerah	
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%					
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%					
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Outcome: Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	38.17%	44.46%	45.01%	30.652.857.226,00	45.46%	30.652.857.226,00	45.91%	30.652.857.226,00	46.42%	30.652.857.226,00	47.06%	30.652.857.226,00	Badan Pendapatan Daerah	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD Penanggung Jawab
				2025 Target	Tahun 2026 Target		Tahun 2027 Target		Tahun 2028 Target		Tahun 2029 Target		Tahun 2030 Target		
5 03	KEPEGAWAIAN					20.654.078.900,00		20.668.603.900,00		20.729.103.900,00		21.065.103.900,00		21.100.103.900,00	
5 03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					20.654.078.900,00		20.668.603.900,00		20.729.103.900,00		21.065.103.900,00		21.100.103.900,00	
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	16.366.735.100,00	100%	16.381.260.100,00	100%	16.441.760.100,00	100%	16.777.760.100,00	100%	16.812.760.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%				
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH <i>Outcome: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan kepegawaian</i>	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	65%	73%	73%	4.287.343.800,00	74%	4.287.343.800,00	75%	4.287.343.800,00	76%	4.287.343.800,00	77%	4.287.343.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	55%	71%	71%		72%		73%		74%		75%		
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.883.692.100,00		4.883.692.100,00		4.883.692.100,00		4.883.692.100,00		4.883.692.100,00	
5 04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					4.883.692.100,00		4.883.692.100,00		4.883.692.100,00		4.883.692.100,00		4.883.692.100,00	
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA <i>Outcome: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN</i>	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	40.72%	41%	41%	4.883.692.100,00	41.5%	4.883.692.100,00	42%	4.883.692.100,00	42.5%	4.883.692.100,00	43%	4.883.692.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	11.20%	12%	12%		12.5%		13%		13.5%		14%		
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					11.954.000.000,00		11.768.772.000,00		11.829.272.000,00		11.829.272.000,00		11.864.272.000,00	
5 05	Badan Riset dan Inovasi Daerah					11.954.000.000,00		11.768.772.000,00		11.829.272.000,00		11.829.272.000,00		11.864.272.000,00	
5 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8.791.954.200,00	100%	8.806.719.300,00	100%	8.867.219.300,00	100%	8.867.219.300,00	100%	8.902.219.300,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
5 05 03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH <i>Outcome: Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah</i>	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	N/A	100%	100%	3.162.045.800,00	100%	2.962.052.700,00	100%	2.962.052.700,00	100%	2.962.052.700,00	100%	2.962.052.700,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah



Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD Penanggung Jawab
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				50.428.400.000,00		51.095.581.000,00		53.489.986.000,00		54.199.950.000,00		56.144.818.000,00		
6	01	INSPEKTORAT DAERAH				50.428.400.000,00		51.095.581.000,00		53.489.986.000,00		54.199.950.000,00		56.144.818.000,00		
6	01	Inspektorat Daerah				50.428.400.000,00		51.095.581.000,00		53.489.986.000,00		54.199.950.000,00		56.144.818.000,00		
6	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	46.613.620.580,00	100%	46.509.201.580,00	100%	49.515.898.938,00	100%	50.234.200.985,00	100%	52.171.201.227,00	Inspektorat Daerah
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
6	01	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Outcome: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	76.21	78.21%	78.21%	2.960.628.020,00	79.21%	3.103.241.800,00	80.21%	3.119.935.662,00	81.21%	3.111.597.615,00	82.21%	3.119.465.373,00	Inspektorat Daerah
6	01	03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Outcome: Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	854.151.400,00	Level 3	1.483.137.620,00	Level 3	854.151.400,00	Level 3	854.151.400,00	Level 3	854.151.400,00	Inspektorat Daerah
7		UNSUR KEWILAYAHAN				649.881.426.000,00		653.839.973.000,00		648.747.473.000,00		648.932.615.000,00		649.363.181.000,00		
7	01	KECAMATAN				649.881.426.000,00		653.839.973.000,00		648.747.473.000,00		648.932.615.000,00		649.363.181.000,00		
7	01	Kecamatan Biringkanaya				54.038.985.000,00		54.016.717.000,00		54.077.217.000,00		54.092.217.000,00		54.125.485.000,00		
7	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	18.692.856.488,00	100%	18.704.783.488,00	100%	18.765.283.488,00	100%	18.780.283.488,00	100%	18.813.551.488,00	Kecamatan Biringkanaya
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	18.807.906.600,00	90%	18.807.906.600,00	90%	18.807.906.600,00	90%	18.807.906.600,00	90%	18.807.906.600,00	Kecamatan Biringkanaya
7	01	03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	5.682.777.000,00	90%	5.648.582.000,00	90%	5.648.582.000,00	90%	5.648.582.000,00	90%	5.648.582.000,00	Kecamatan Biringkanaya
			Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	580.414.000,00	90%	580.414.000,00	90%	580.414.000,00	90%	580.414.000,00	90%	580.414.000,00	Kecamatan Biringkanaya
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome: Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	10.275.030.912,00	100%	10.275.030.912,00	100%	10.275.030.912,00	100%	10.275.030.912,00	100%	10.275.030.912,00	Kecamatan Biringkanaya
7	01		Kecamatan Bontoala					38.316.416.000,00		38.353.950.000,00		38.414.450.000,00		38.414.450.000,00		38.434.734.000,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Keseekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	16.755.598.320,00	100%	16.793.132.320,00	100%	16.853.632.320,00	100%	16.853.632.320,00	100%	16.873.916.320,00	Kecamatan Bontoala
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis keluhan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	7.992.524.600,00	90%	8.105.262.100,00	90%	8.105.262.100,00	90%	8.105.262.100,00	90%	8.105.262.100,00	Kecamatan Bontoala
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	6.279.564.700,00	90%	6.166.827.200,00	90%	6.166.827.200,00	90%	6.166.827.200,00	90%	6.166.827.200,00	Kecamatan Bontoala
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	612.800.000,00	90%	612.800.000,00	90%	612.800.000,00	90%	612.800.000,00	90%	612.800.000,00	Kecamatan Bontoala
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	6.675.928.380,00	100%	6.675.928.380,00	100%	6.675.928.380,00	100%	6.675.928.380,00	100%	6.675.928.380,00	Kecamatan Bontoala

RPJMD KOTA MAKASSAR
2025-2029



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD Penanggung Jawab	
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	25%	90%	90%	6.673.635.000,00	90%	6.673.635.000,00	90%	6.673.635.000,00	90%	6.673.635.000,00	90%	6.673.635.000,00	Kecamatan Mamajang
			Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	51%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	866.104.500,00	90%	866.104.500,00	90%	866.104.500,00	90%	866.104.500,00	90%	866.104.500,00	Kecamatan Mamajang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	7.347.230.086,00	100%	7.347.230.086,00	100%	7.347.230.086,00	100%	7.347.230.086,00	100%	7.347.230.086,00	Kecamatan Mamajang
7	01		Kecamatan Manggala				44.369.278.000,00		46.298.878.000,00		44.359.378.000,00		44.359.378.000,00		44.384.931.000,00		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	16.816.625.040,00	100%	18.746.225.040,00	100%	16.806.725.040,00	100%	16.806.725.040,00	100%	16.832.278.040,00	Kecamatan Manggala
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%			
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	13.125.407.860,00	90%	13.125.407.860,00	90%	13.125.407.860,00	90%	13.125.407.860,00	90%	13.125.407.860,00	Kecamatan Manggala
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	62.5%	90%	90%	4.193.675.900,00	90%	4.193.675.900,00	90%	4.193.675.900,00	90%	4.193.675.900,00	90%	4.193.675.900,00	Kecamatan Manggala
			Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	78.64%	90%	90%		90%		90%		90%		90%			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	69.97%	90%	90%	96.000.000,00	90%	96.000.000,00	90%	96.000.000,00	90%	96.000.000,00	90%	96.000.000,00	Kecamatan Manggala
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	10.137.569.200,00	100%	10.137.569.200,00	100%	10.137.569.200,00	100%	10.137.569.200,00	100%	10.137.569.200,00	Kecamatan Manggala



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
7	01		Kecamatan Mariso			Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Keseekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	14.802.766.648,00	100%	14.903.022.648,00	100%	14.963.522.648,00	100%	14.978.522.648,00	100%	15.007.456.648,00	Kecamatan Mariso
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	8.380.802.700,00	90%	8.380.802.700,00	90%	8.380.802.700,00	90%	8.380.802.700,00	90%	8.380.802.700,00	Kecamatan Mariso
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	4.651.594.020,00	90%	4.651.594.020,00	90%	4.651.594.020,00	90%	4.651.594.020,00	90%	4.651.594.020,00	Kecamatan Mariso
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentrman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	483.309.000,00	90%	483.309.000,00	90%	483.309.000,00	90%	483.309.000,00	90%	483.309.000,00	Kecamatan Mariso
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	5.982.585.632,00	100%	5.982.585.632,00	100%	5.982.585.632,00	100%	5.982.585.632,00	100%	5.982.585.632,00	Kecamatan Mariso
7	01		Kecamatan Panakkukang					54.542.258.000,00		54.621.444.000,00		54.681.944.000,00		54.696.944.000,00		54.726.289.000,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Keseekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	18.803.509.659,00	100%	18.942.010.059,00	100%	19.002.510.059,00	100%	19.017.510.059,00	100%	19.046.855.059,00	Kecamatan Panakkukang
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	17.901.040.280,00	90%	17.901.040.280,00	90%	17.901.040.280,00	90%	17.901.040.280,00	90%	17.901.040.280,00	Kecamatan Panakkukang



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	5.684.766.019,00	90%	5.684.766.019,00	90%	5.684.766.019,00	90%	5.684.766.019,00	90%	5.684.766.019,00	Kecamatan Panakkukang
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	583.968.000,00	90%	583.968.000,00	90%	583.968.000,00	90%	583.968.000,00	90%	583.968.000,00	Kecamatan Panakkukang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	11.568.974.042,00	100%	11.509.659.642,00	100%	11.509.659.642,00	100%	11.509.659.642,00	100%	11.509.659.642,00	Kecamatan Panakkukang
7	01		Kecamatan Rappocini				53.819.314.000,00		53.753.657.000,00		53.814.157.000,00		53.843.814.000,00		53.870.640.000,00		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.250.955.560,00	100%	20.185.298.560,00	100%	20.245.798.560,00	100%	20.275.455.560,00	100%	20.302.281.560,00	Kecamatan Rappocini
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	14.622.640.400,00	90%	14.622.640.400,00	90%	14.622.640.400,00	90%	14.622.640.400,00	90%	14.622.640.400,00	Kecamatan Rappocini
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	5.637.059.000,00	90%	5.637.059.000,00	90%	5.637.059.000,00	90%	5.637.059.000,00	90%	5.637.059.000,00	Kecamatan Rappocini
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	584.378.260,00	90%	584.378.260,00	90%	584.378.260,00	90%	584.378.260,00	90%	584.378.260,00	Kecamatan Rappocini
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	12.724.280.780,00	100%	12.724.280.780,00	100%	12.724.280.780,00	100%	12.724.280.780,00	100%	12.724.280.780,00	Kecamatan Rappocini



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung	
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Jawab	
7 01		Kecamatan Tallo			52.821.435.000,00		52.299.435.000,00		52.359.935.000,00		52.395.935.000,00		52.430.513.000,00			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.065.590.029,00	100%	19.543.590.029,00	100%	19.604.090.029,00	100%	19.640.090.029,00	100%	19.674.668.029,00	Kecamatan Tallo	
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%					
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%					
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	100%	90%	90%	11.938.041.332,00	90%	11.938.041.332,00	90%	11.938.041.332,00	90%	11.938.041.332,00	90%	11.938.041.332,00	Kecamatan Tallo	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	53.33%	90%	90%	7.754.070.200,00	90%	7.754.070.200,00	90%	7.754.070.200,00	90%	7.754.070.200,00	90%	7.754.070.200,00	Kecamatan Tallo	
		Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	66.66%	90%	90%		90%		90%		90%					
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentrman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	852.080.400,00	90%	852.080.400,00	90%	852.080.400,00	90%	852.080.400,00	90%	852.080.400,00	Kecamatan Tallo	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	12.211.653.039,00	100%	12.211.653.039,00	100%	12.211.653.039,00	100%	12.211.653.039,00	100%	12.211.653.039,00	Kecamatan Tallo	
7 01		Kecamatan Tamalanrea				44.322.948.000,00		46.298.020.000,00		44.358.520.000,00		44.373.520.000,00		44.403.438.000,00		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	15.236.534.094,00	100%	17.211.606.094,00	100%	15.272.106.094,00	100%	15.287.106.094,00	100%	15.317.024.094,00	Kecamatan Tamalanrea	
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%					
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%					
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	93%	90%	90%	15.394.438.642,00	90%	15.444.106.802,00	90%	15.444.106.802,00	90%	15.444.106.802,00	90%	15.444.106.802,00	Kecamatan Tamalanrea	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program												SKPD	
				2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab		
				Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	4.215.677.160,00	90%	4.166.009.000,00	90%	4.166.009.000,00	90%	4.166.009.000,00	90%	4.166.009.000,00	Kecamatan Tamalanrea
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	94%	90%	90%	688.703.000,00	90%	688.703.000,00	90%	688.703.000,00	90%	688.703.000,00	90%	688.703.000,00	Kecamatan Tamalanrea
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	97%	100%	100%	8.787.595.104,00	100%	8.787.595.104,00	100%	8.787.595.104,00	100%	8.787.595.104,00	100%	8.787.595.104,00	Kecamatan Tamalanrea
7	01		Kecamatan Tamalate					56.678.540.000,00		56.353.833.000,00		56.414.333.000,00		56.414.333.000,00		56.450.713.000,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	19.972.442.137,00	100%	19.647.735.137,00	100%	19.708.235.137,00	100%	19.708.235.137,00	100%	19.744.615.137,00	Kecamatan Tamalate
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	16.698.807.700,00	90%	16.698.807.700,00	90%	16.698.807.700,00	90%	16.698.807.700,00	90%	16.698.807.700,00	Kecamatan Tamalate
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	5.688.436.055,00	90%	5.688.436.055,00	90%	5.688.436.055,00	90%	5.688.436.055,00	90%	5.688.436.055,00	Kecamatan Tamalate
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	687.871.200,00	90%	687.871.200,00	90%	687.871.200,00	90%	687.871.200,00	90%	687.871.200,00	Kecamatan Tamalate
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	13.630.982.908,00	100%	13.630.982.908,00	100%	13.630.982.908,00	100%	13.630.982.908,00	100%	13.630.982.908,00	Kecamatan Tamalate



Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD	
					2025 Target	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab	
7	01		Kecamatan Ujung Pandang				42.079.262.000,00		43.095.437.000,00		42.155.937.000,00		42.155.937.000,00		42.183.942.000,00		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	15.463.395.516,00	100%	16.479.570.516,00	100%	15.540.070.516,00	100%	15.540.070.516,00	100%	15.568.075.516,00	Kecamatan Ujung Pandang
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	99%	90%	90%	16.190.709.700,00	90%	16.190.709.700,00	90%	16.190.709.700,00	90%	16.190.709.700,00	90%	16.190.709.700,00	Kecamatan Ujung Pandang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	85.38%	90%	90%	5.164.058.404,00	90%	5.164.058.404,00	90%	5.164.058.404,00	90%	5.164.058.404,00	90%	5.164.058.404,00	Kecamatan Ujung Pandang
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	655.205.000,00	90%	655.205.000,00	90%	655.205.000,00	90%	655.205.000,00	90%	655.205.000,00	Kecamatan Ujung Pandang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	4.605.893.380,00	100%	4.605.893.380,00	100%	4.605.893.380,00	100%	4.605.893.380,00	100%	4.605.893.380,00	Kecamatan Ujung Pandang
7	01		Kecamatan Ujung Tanah				32.358.163.000,00		32.151.095.000,00		32.211.595.000,00		32.211.595.000,00		32.237.241.000,00		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	13.092.504.124,00	100%	12.916.757.924,00	100%	12.977.257.924,00	100%	12.977.257.924,00	100%	13.002.903.924,00	Kecamatan Ujung Tanah
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	98%	90%	90%	8.974.107.460,00	90%	9.182.228.260,00	90%	9.182.228.260,00	90%	9.182.228.260,00	90%	9.182.228.260,00	Kecamatan Ujung Tanah



Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program										SKPD	
						2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab
						Target	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	90%	90%	90%	4.905.406.200,00	90%	4.665.963.600,00	90%	4.665.963.600,00	90%	4.665.963.600,00	90%	4.665.963.600,00	Kecamatan Ujung Tanah
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	33%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	89%	90%	90%	723.577.660,00	90%	723.577.660,00	90%	723.577.660,00	90%	723.577.660,00	90%	723.577.660,00	Kecamatan Ujung Tanah
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	4.662.567.556,00	100%	4.662.567.556,00	100%	4.662.567.556,00	100%	4.662.567.556,00	100%	4.662.567.556,00	Kecamatan Ujung Tanah
7	01		Kecamatan Wajo					31.153.758.000,00		30.829.721.000,00		30.890.221.000,00		30.890.221.000,00		30.919.731.000,00	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	13.721.716.364,00	100%	13.397.679.364,00	100%	13.458.179.364,00	100%	13.458.179.364,00	100%	13.487.689.364,00	Kecamatan Wajo
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	90%	90%	90%	8.195.200.000,00	90%	8.195.200.000,00	90%	8.195.200.000,00	90%	8.195.200.000,00	90%	8.195.200.000,00	Kecamatan Wajo
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	0%	90%	90%	4.188.800.000,00	90%	4.188.800.000,00	90%	4.188.800.000,00	90%	4.188.800.000,00	90%	4.188.800.000,00	Kecamatan Wajo
				Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	10%	90%	90%		90%		90%		90%		90%		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	97%	90%	90%	472.342.600,00	90%	472.342.600,00	90%	472.342.600,00	90%	472.342.600,00	90%	472.342.600,00	Kecamatan Wajo
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	4.575.699.036,00	100%	4.575.699.036,00	100%	4.575.699.036,00	100%	4.575.699.036,00	100%	4.575.699.036,00	Kecamatan Wajo



Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD Penanggung Jawab	
					2025 Target	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
7	01		Kecamatan Kepulauan Sangkarrang			14.665.753.000,00		14.762.452.000,00		14.822.952.000,00		14.837.952.000,00		14.876.751.000,00			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA <i>Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah</i>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	9.509.707.232,00	100%	9.606.406.232,00	100%	9.666.906.232,00	100%	9.681.906.232,00	100%	9.720.705.232,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
			Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%		100%		100%						
			Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%	90%		90%		90%						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK <i>Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan</i>	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	96%	90%	90%	1.509.578.400,00	90%	1.509.578.400,00	90%	1.509.578.400,00	90%	1.509.578.400,00	90%	1.509.578.400,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN <i>Outcome: Meningkatnya kualitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat</i>	Persentase sarana dan prasarana lingkup Kelurahan dalam kondisi baik	4%	90%	90%	1.605.204.300,00	90%	1.605.204.300,00	90%	1.605.204.300,00	90%	1.605.204.300,00	90%	1.605.204.300,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
			Persentase masyarakat/ kelompok masyarakat lingkup Kelurahan yang mendapat pemberdayaan	4%	90%	90%	90%		90%		90%						
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan</i>	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	90%	37.577.500,00	90%	37.577.500,00	90%	37.577.500,00	90%	37.577.500,00	90%	37.577.500,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM <i>Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum lingkup Kecamatan</i>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan	92%	100%	100%	2.003.685.568,00	100%	2.003.685.568,00	100%	2.003.685.568,00	100%	2.003.685.568,00	100%	2.003.685.568,00	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang



Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ SKPD/ Program / Outcome	Indikator Kinerja	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Program											SKPD	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Penanggung Jawab	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.448.870.000,00		31.287.041.000,00		91.347.541.000,00		141.347.541.000,00		31.382.541.000,00		
8	01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				30.448.870.000,00		31.287.041.000,00		91.347.541.000,00		141.347.541.000,00		31.382.541.000,00		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	9.276.888.760,00	100%	9.375.059.760,00	100%	9.435.559.760,00	100%	9.435.559.760,00	100%	9.470.559.760,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%				100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90%	90%				90%		90%		90%		
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Outcome: Meningkatnya kualitas pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	64%	80%	80%	3.004.829.360,00	90%	3.504.829.360,00	95%	3.504.829.360,00	95%	3.504.829.360,00	95%	3.504.829.360,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Outcome: Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	100%	85%	85%	3.790.853.200,00	90%	3.790.853.200,00	90%	63.790.853.200,00	95%	113.790.853.200,00	95%	3.790.853.200,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Outcome: Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	100%	85%	85%	210.231.060,00	90%	210.231.060,00	90%	210.231.060,00	95%	210.231.060,00	95%	210.231.060,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Outcome: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100%	85%	85%	1.502.342.600,00	90%	1.502.342.600,00	90%	1.502.342.600,00	95%	1.502.342.600,00	95%	1.502.342.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Outcome: Menurunnya jumlah konflik sosial	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100%	85%	85%	12.663.725.020,00	90%	12.903.725.020,00	90%	12.903.725.020,00	90%	12.903.725.020,00	95%	12.903.725.020,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			JUMLAH				5.106.461.612.000,00		5.200.037.452.000,00		5.444.628.167.000,00		5.757.079.847.000,00		6.048.559.075.000,00		



4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan/program/sasaran yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana pencapaian kinerja yang telah direncanakan, keberhasilan maupun kegagalannya, dalam periode waktu tertentu perlu ditetapkan suatu indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja Kota Makassar terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), yang terdiri dari Indikator Utama Pembangunan (IUP) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.2.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator kinerja makro merupakan parameter utama yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah secara menyeluruh, yang meliputi kondisi ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Penetapan target indikator kinerja makro Kota Makassar dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebelumnya dan tantangan pembangunan kedepan, yang tersaji pada tabel berikut:

Table 4.2
Indikator Kinerja Makro Kota Makassar Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Makro	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Makro Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	85,23	85,46	85,86	86,03	86,31	86,56	86,84
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,62	3,46	3,40	3,28	3,15	3,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,71	9,62	9,53	9,44	9,35	9,26	9,17
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	5,73	6,43	7,43	7,73	8,13	8,20
5	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165,95	175,46	186,75	200,62	216,13	233,71	246,34
6	Rasio Gini (Nilai)	0,372	0,366	0,359	0,353	0,347	0,341	0,334
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Nilai)	61,41	66,17	66,38	66,59	66,80	67,01	67,23
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	NA	32,46	34,98	37,36	39,74	42,13	44,60

4.2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang terseleksi, sebagai penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target IKU pembangunan Kota Makassar merupakan ukuran pencapaian Visi dan Misi Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar (impact based) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar tahun 2025-2029. Target IKU Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun mendatang, tercantum pada tabel berikut:



Table 4.3
Indikator Kinerja Utama Kota Makassar Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	5,73	6,43	7,43	7,73	8,13	8,20
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17	19,29	19,46	19,64	19,94	20,24	20,26
3	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,10	20,30	20,40	20,50	20,60	20,80
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71	9,62	9,53	9,44	9,35	9,26	9,17
5	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	165,95	175,46	186,75	200,62	216,13	233,71	246,34
6	Indeks Daya Saing Daerah (Skor)	4,10	4,17	4,23	4,28	4,32	4,34	4,35
7	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58	0,59	0,61	0,62	0,64	0,66	0,67
8	Tingkat Inflasi (%)	1,19	1,52	1,77	1,92	2,03	2,12	2,20
9	Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	87,95	88,00	88,05	88,10	88,15	88,20	88,25
10	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	-50,26	8,75	8,85	9	9,2	9,36	9,5
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	85,23	85,46	85,86	86,03	86,31	86,56	86,84
12	Indeks Pendidikan (Nilai)	81,96	82,03	82,10	82,17	82,24	82,31	82,38
13	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33	75,51	75,66	75,81	75,96	76,12	76,27
14	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)	18,386	19,301	20,543	22,068	23,774	25,708	27,097
15	Indeks Layanan Infrastruktur (Nilai)	74,25	78,69	79,46	80,23	81,00	81,77	82,54
16	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan (Nilai)	35,40	83,59	84,45	86,08	87,15	90,30	91,99
17	Indeks Layanan Infrastruktur Keciaptakaryaan (Nilai)	49,39	26,49	27,35	29,30	31,13	32,95	34,77
18	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10%	10%	25%	50%	75%	100%	100%
19	Indeks Inovasi Daerah (Skor)	76,56	77,59	79,23	80,87	81,52	82,58	83,81



No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	Indeks Kapabilitas Inovasi (Skor)	4,46	4,51	4,56	4,60	4,65	4,70	4,75
21	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	2	4	6	8	10	10
22	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Terhadap Total PDRB (%)	2,18	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43	2,48
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	5.619.596	5.626.657	5.634.009	5.641.941	5.648.719	5.657.295	5.665.491
24	Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,51	1,63	1,65	1,7	1,73	1,75	1,8
25	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	33,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33
26	Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi Dan Dimanfaatkan (%)	72	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66
27	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif (Industri)	4.220	4.515	4.831	5.170	5.532	5.919	6.310
28	Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital (%)	N/A	12,44	15,43	18,55	19,48	22,96	24,31
29	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	76,78	79,97	81,31	82,64	83,98	85,31	86,65
30	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)	69,69	69,75	70,50	71,50	75,00	80,50	81,50
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	4,01	4,02	4,03	4,04	4,05	4,06	4,1
32	Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK (Nilai)	87,00	87,48	87,98	88,49	88,99	89,50	90,00
33	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Nilai)	NA	75	77	79	81	83	85



No	Indikator Kinerja Utama	Baseline Tahun 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
34	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03	55,03	56,02	57,02	58,01	59,01	60,01
35	Indeks Kota Toleran (Skor)	4,363	4,688	4,862	5,062	5,168	5,289	5,357
36	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	63,13	63,14	63,15	63,16	63,17	63,18	63,19
37	Indeks Ketimpangan Gender (Nilai)	0,183	0,179	0,177	0,174	0,170	0,168	0,165
38	Indeks Perlindungan Anak (Nilai)	6	69,44	70,60	71,78	72,98	74,20	75,44
39	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57,67	59,00	61,00	63,00	65,00	67,00	69,00
40	Indeks Pembangunan Keolahragaan (Skor)	0,476	0,497	0,518	0,539	0,560	0,581	0,602
41	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97	3,62	3,46	3,40	3,28	3,15	3,02
42	Gini Rasio (Nilai)	0,372	0,366	0,359	0,353	0,347	0,341	0,334
43	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1	41,81	42,51	43,22	43,93	44,63	45,34
44	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Nilai)	61,41	66,17	66,38	66,59	66,80	67,01	67,23
45	Indeks Kualitas Air (Nilai)	58,70	73,95	74,15	74,35	74,55	74,75	74,95
46	Indeks Kualitas Udara (Nilai)	74,92	75,22	75,52	75,82	76,12	76,42	76,72
47	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai)	28,92	36,06	36,13	36,20	36,27	36,34	36,41
48	Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,01	6	10	18	25	30	35
49	Indeks Risiko Bencana (Skor)	113,71	110	107	105	103	100	100
50	Indeks Ketahanan Daerah (Nilai)	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
51	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	NA	32,46	34,98	37,36	39,74	42,13	44,60

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah

Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD). IKD membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Makassar. Target IKD Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun mendatang. tercantum pada tabel berikut:



Table 4.4
Indikator Kinerja Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Aspek Geografi dan Demografi							
1.1	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan							
1	Konsumsi Listrik Per Kapita (KwH)	1,565	1,627	1,668	1,706	1,744	1,778	1,782
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	3,97%	3,96%	3,95%	3,94%	3,93%	3,92%	3,91%
3	Indeks Ketahanan Pangan (Skor)	87,95	88,00	88,05	88,10	88,15	88,20	88,25
4	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	89,73	89,74	89,75	89,76	89,77	89,78	89,79
5	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	3,36 m ³ /detik	4,04 m ³ /detik	4,07 m ³ /detik	4,07 m ³ /detik	4,07 m ³ /detik	4,07 m ³ /detik	4,07 m ³ /detik
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	64,58%	66,38%	67,63%	68,92%	70,25%	71,63%	73,05%
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,26%	0,64%	0,59%	0,58%	0,53%	0,50%	0,46%
8	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin) (%)	98,68	99,09	99,04	99,98	98,92	98,86	98,79
9	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)	8.360	8.385	8.435	8.485	8.529	8.571	8.611
1.2	Lingkungan Hidup Berkualitas							
10	Proporsi Realisasi Penyaluran Pupuk Organik Terhadap Pupuk Kimia (%)	8,98	13,66	16,85	20,04	23,23	26,45	29,61
11	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1519,58 Ton	1559 Ton	1568,35 Ton	1577,76 Ton	1587,23 Ton	1596,75 Ton	1606,33 Ton
12	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita)	48,55 Kg/Kapita	48,74 Kg/Kapita	48,94 Kg/Kapita	49,13 Kg/Kapita	49,33 Kg/Kapita	49,53 Kg/Kapita	49,73 Kg/Kapita
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	61,41	66,17	66,38	66,59	66,80	67,01	67,23
14	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	8,45%	8,67%	10,85%	13,00%	15,14%	17,26%	19,36%
15	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,01%	6%	10%	18%	25%	30%	35%
16	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	3,18%	6,00%	8,00%	10,00%	12,00%	15,00%	17,00%
17	Indeks Risiko Bencana (Skor)	113,71	110	107	105	103	100	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
18	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	N/A	1,17%	1,55%	1,92%	2,30%	2,67%	3,70%
19	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	N/A	32,46%	34,98%	37,36%	39,74%	42,13%	44,60%
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	N/A	0,23%	0,34%	0,44%	0,55%	0,65%	0,82%
2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
2.1	Kesejahteraan Ekonomi							
21	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56%	5,73%	6,43%	7,43%	7,73%	8,13%	8,20%
22	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	165,95 Jt	175,46 Jt	186,75 Jt	200,62 Jt	216,13 Jt	233,71 Jt	246,34 Jt
23	PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (Rp Triliun)	243,06 T	265,79 T	289,14 T	316,76 T	347,67 T	382,37 T	420,75 T
24	Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta)	18,386 Jt	19,301 Jt	20,543 Jt	22,068 Jt	23,774 Jt	25,708 Jt	27,097 Jt
2.2	Kesehatan Untuk Semua							
25	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75,33 Thn	75,51 Thn	75,66 Thn	75,81 Thn	75,96 Thn	76,12 Thn	76,27 Thn
26	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	71,53	69,09	66,65	64,21	61,77	59,33	56,89
27	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Prevalensi <i>Stunting</i> Pada Balita (%)	19,8%	18,8%	17,9%	17,5%	16,9%	16,2%	15,5%
29	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%)	92%	82%	82,81%	83,63%	84,46%	85,3%	86,15%
30	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	82%	82,5%	83%	83,5%	84%	84,5%	85%
31	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	Pendidikan Berkualitas Yang Merata							
32	Literasi (%)	SD= 62,86% SMP= 71,66%	SD= 65,36% SMP= 72,76%	SD= 67,86% SMP= 73,86%	SD= 70,36% SMP= 74,96%	SD= 72,86% SMP= 76,06%	SD= 75,36% SMP= 77,16%	SD= 77,86% SMP= 78,26%
33	Numerasi (%)	SD= 54,38% SMP= 62,85%	SD= 57,28% SMP= 64,35%	SD= 60,18% SMP= 65,85%	SD= 63,08% SMP= 67,35%	SD= 65,98% SMP= 68,85%	SD= 68,88% SMP= 70,35%	SD= 71,78% SMP= 71,85%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
34	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)	11,57 Thn	11,58 Thn	11,59 Thn	11,60 Thn	11,61 Thn	11,62 Thn	11,63 Thn
35	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	15,62	15,63	15,64	15,65	15,66	15,67	15,68
36	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	21,91%	22,91%	23,91%	24,91%	25,91%	26,91%	27,91%
37	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan (%)	15,03%	29,63%	30,27%	30,90%	31,54%	32,17%	32,81%
38	Angka Putus Sekolah (%)	1,54%	1,29%	1,04%	0,79%	0,54%	0,29%	0
2.4	Perlindungan Sosial Yang Adaptif							
39	Tingkat Kemiskinan (%)	4,97%	3,62%	3,46%	3,40%	3,28%	3,15%	3,02%
40	Indeks Gini (Nilai)	0,372	0,366	0,359	0,353	0,347	0,341	0,334
41	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1%	41,81%	42,51%	43,22%	43,93%	44,63%	45,34%
42	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	56,19%	61,81%	67,99%	70,78%	82,26%	90,49%	100%
2.5	Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju							
43	Indeks Kota Toleran (Skor)	4,363	4,688	4,862	5,062	5,168	5,289	5,357
44	Persentase Benda Bangunan Struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi (%)	23%	14,51%	20%	20%	20%	20%	20%
45	Persentase Kegiatan Keagamaan Yang Mendapat Dukungan/ Fasilitas (%)	0,50%	1,15%	1,19%	1,23%	1,27%	1,32%	1,36%
2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif							
46	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	63,13	63,14	63,15	63,16	63,17	63,18	63,19
47	Indeks Perlindungan Anak (Nilai)	67,04	69,44	70,60	71,78	72,98	74,20	75,44
48	Indeks Pembangunan Gender (Nilai)	94,92	95,18	95,43	95,67	95,90	96,12	96,33



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
49	Indeks Pemberdayaan Gender (Nilai)	78,64	79,14	79,63	80,11	80,58	81,04	81,49
50	Indeks Ketimpangan Gender (Nilai)	0,183	0,179	0,177	0,174	0,170	0,168	0,165
51	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	57,67	59	61	63	65	67	69
3	Aspek Daya Saing Daerah							
3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)							
52	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	85,23	85,46	85,86	86,03	86,31	86,56	86,84
53	Angka Ketergantungan (%)	42,52%	42,49%	42,72%	42,88%	43,61%	44,23%	44,81%
3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
54	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17%	19,29%	19,46%	19,64%	19,94%	20,24%	20,26%
55	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (%)	2,18%	2,23%	2,28%	2,33%	2,38%	2,43%	2,48%
56	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik (Orang)	5.524.000	5.531.025	5.538.157	5.545.813	5.552.251	5.560.528	5.568.371
57	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	95,596	95,632	95,852	96,128	96,468	96,767	97,120
58	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif (Industri)	4.220	4.515	4.831	5.170	5.532	5.919	6.310
59	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Kota Makassar (Industri)	24,815	24,915	25,015	25,115	25,215	25,315	25,415
60	Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar (%)	26,96	27,24	27,51	27,79	28,06	28,34	28,61
61	Return on Assets (ROA) BUMD (%)	1,41	1,60	1,90	2,20	2,50	2,81	3,00
62	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	6,48 Ton/Ha	6,77 Ton/Ha	6,87 Ton/Ha	6,97 Ton/Ha	7,07 Ton/Ha	7,18 Ton/Ha	7,23 Ton/Ha
63	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	1,2 Ton	1,25 Ton	1,25 Ton	1,25 Ton	1,3 Ton	1,3 Ton	1,3 Ton
64	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,71%	9,62%	9,53%	9,44%	9,35%	9,26%	9,17%
65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	62,04%	62,27%	62,51%	62,74%	62,98%	63,23%	63,47%
66	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	47,06%	47,23%	47,41%	47,59%	47,77%	47,96%	48,14%
67	Indeks Kapabilitas inovasi (Skor)	4,46	4,51	4,56	4,60	4,65	4,70	4,75



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.3	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru							
68	Indeks Ekonomi Hijau (Nilai)	55,1	51,4	55,2	59	62,8	66,6	70,4
69	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Nilai)	78	101,4	113,1	124,8	136,5	148,2	159,9
3.4	Transformasi Digital							
70	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi (%)	49%	49,25%	49,50%	50%	50,50%	51%	52%
3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global							
71	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
72	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	44,97%	45,11%	45,86%	46,32%	47,24%	48,10%	49,22%
73	Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	US \$ 34,700,607,67	US \$ 47,488,263,30	US \$ 60,310,094,39	US \$ 77,196,920,82	US \$ 99,584,027,85	US \$ 129,459,236,21	US \$ 169,591,599,43
3.6	Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
74	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional (%)	1,10%	1,12%	1,14%	1,16%	1,19%	1,22%	1,26%
75	Proporsi Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (%)	34,91%	35,04%	35,14%	35,23%	35,10%	35,04%	34,97%
76	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	80,39%	81,63%	82,87%	84,11%	85,35%	86,60%	87,84%
77	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Nilai)	74,25	78,69	79,46	80,23	81,00%	81,77%	82,54
3.7	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah							
78	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58%	0,59%	0,61%	0,62%	0,64%	0,66%	0,67%
79	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	1,19	1,52	1,77	1,92	2,03	2,12	2,20
80	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	-50,26%	8,75%	8,85%	9%	9,2%	9,36%	9,5%
81	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Nilai)	B	B	B	B	A	A	A



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
82	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) (Indeks)	6,01	6,02	6,03	6,03	6,03	6,04	6,04
4	Aspek Pelayanan Umum							
4.1	Tata Kelola Yang Berintegritas Adaptif dan Inovatif							
83	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	97,72	98,02	98,42	98,81	99,21	99,60	99,70
84	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	4,01	4,02	4,03	4,04	4,05	4,05	4,1
85	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	78,64	79,97	81,31	82,64	83,98	85,31	86,65
86	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	3,21	4,28	4,37	4,46	4,55	4,64	4,73
87	Indeks Survey Penilaian Integritas (Nilai)	62,33	75,55	76,78	78,00	79,22	80,44	81,67
88	Nilai <i>Monitoring Center for Prevention</i> (MCP) KPK (Nilai)	87,0	87,48	87,98	88,49	88,99	89,50	90,00
89	Indeks Maturitas SPIP (Nilai)	3,10	3,42	3,50	3,58	3,66	3,74	3,82
4.2	Ketaatan Hukum, Ketertiban dan Keamanan Tangguh Serta Demokrasi Substansial							
90	Persentase Gangguan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
91	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
92	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)	54,03%	55,03%	56,02%	57,02%	58,01%	59,01%	60,00%
93	Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD (%)	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	20,00%
94	Proporsi Perda yang Merupakan Inisiatif DPRD (Perda)	9	9	9	9	9	9	10
95	Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik (%)	31,1%	31,6%	32,0%	32,5%	33,0%	33,5%	33,9%
4.3	Daya Saing Daerah Tinggi							
96	Jumlah Kerja Sama Dengan Pemerintah Daerah Lainnya (<i>Sister City</i>) (PKS)	1	1	2	1	3	3	4



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
97	Indeks Daya Saing Daerah (Skor)	4,10	4,17	4,23	4,28	4,32	4,34	4,35
98	Indek Inovasi Daerah (Skor)	76,56	77,59	79,23	80,87	81,52	82,58	83,81
5	Indikator Kinerja Kunci							
5.1	Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	61,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	89,93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	94,93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	44,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Kesehatan							
5	Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk (Rasio)	1 : 207	1 : 207	1 : 220	1 : 220	1 : 220	1 : 220	1 : 220
6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota Makassar yang terakreditasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	82,88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	93,61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	83,56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar (%)	89,15%	52,47%	54,85%	57,22%	59,6%	61,98%	64,35%
20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang	54,45%	55,64%	55,64%	55,64%	55,64%	55,64%	55,64%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar (%)							
21	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota Makassar (%)	82,96%	83,66%	83,88%	84,1%	84,32%	84,54%	84,76%
22	Persentase Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	89,63%	91,48%	91,94%	92,4%	92,87%	93,33%	93,72%
23	Rasio kepatuhan IMB Kota Makassar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	Tingkat Kemantapan Jalan Kota Makassar (%)	98,00%	87,87%	88,74%	90,52%	91,64%	95,20%	97,05%
25	Rasio Tenaga operator/teknisi/ analis yang memiliki sertifikat Kompetensi (%)	17,66%	33,44%	37,44%	41,44%	45,44%	49,44%	53,44%
26	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
27	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota Makassar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota Makassar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kota Makassar yang ditangani (%)	10%	10%	15%	15%	15%	15%	15%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
30	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	N/A	3,69%	3,69%	3,81%	3,93%	4,05%	4,18%
31	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
32	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase Perda dan Perkada Yang ditegakkan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan informasi rawan bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran (menit)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
5.6	Sosial							
39	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
40	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota Makassar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.7	Tenaga Kerja							
41	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	96,67%	97,50%	98,33%	99,17%	100%	100%	100%
42	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	1,40%	1,45%	1,49%	1,57%	1,62%	1,67%	1,75%
43	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	23,52	24,05	24,80	25,57	26,39	27,26	28,18
44	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	40,26%	40,50%	41,00%	41,50%	42,00%	42,50%	43,00%
45	Persentase Tenaga kerja Yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar (%)	60,05%	60,50%	61%	62%	63%	64%	65%
5.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
46	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	71%	75%	75%	80%	85%	90%	95%
47	Persentase anak korban kekerasan Yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
48	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)	1,05	1,04	1,00	0,90	0,80	0,70	0,60
5.9	Pangan							
49	Persentase ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.10	Pertanahan							
50	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5.11	Lingkungan Hidup							
51	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar (Nilai)	61,41	66,17	66,38	66,59	66,80	67,01	67,23
52	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Makassar (%)	2,01%	3%	4%	6%	8%	10%	12%
53	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar (%)	24,59%	69,20%	61,50%	53,80%	46,15%	38,40%	30,77%
5.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
54	Perekaman KTP Elektronik (%)	96,05%	96,2%	96,5%	97%	97,1%	98%	98,50%
55	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (%)	72%	74,3%	76,6%	78,9%	81,2%	83,5%	83,5%
56	Kepemilikan akta kelahiran (%)	98,97%	98,99%	99,01%	99,03%	99,05%	99,07%	99,09%
57	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
5.13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
58	TFR (Angka Kelahiran Total) (Angka)	2,01	2,010	2,008	2,006	2,004	2,002	2
59	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	59,80%	59,80%	61,60%	63,20%	64,80%	66,40%	68%
60	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	12%	12%	11%	10%	9%	8%	7%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.14	Perhubungan							
61	Rasio Konektivitas Kota Makassar (Rasio)	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
62	Kinerja lalu lintas Kota Makassar (Poin)	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42
5.15	Komunikasi dan Informatika							
63	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
64	Persentase Layanan Publik Yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	49%	49,25%	49,50%	50%	50,50%	51%	52%
65	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Makassar %	82,50%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
5.16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
66	Meningkatnya Koperasi Yang berkualitas (%)	10,02%	10,97%	12,03%	13,20%	14,49%	15,89%	17,41%
67	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	3,10%	3,37%	3,70%	4,07%	4,47%	4,91%	5,40%
5.17	Penanaman Modal							
68	Persentase peningkatan investasi di Kota Makassar (%)	-50,26%	8,75%	8,85%	9%	9,2%	9,36%	9,5%
5.18	Kepemudaan dan Olahraga							
69	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	17,07%	17,44%	18,01%	18,58%	19,15%	19,71%	20,25%
70	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	11,69%	12,69%	13,69%	14,69%	15,69%	16,69%	17,69%
71	Peningkatan prestasi olahraga (%)	5,82%	6,20%	15,42%	15,47%	15,54%	15,87%	16,35%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.19	Statistik							
72	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.20	Persandian							
74	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	41%	46%	49%	52%	55%	58%	62%
5.21	Kebudayaan							
75	Terlestarikannya Cagar Budaya (%)	23%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
5.22	Perpustakaan							
76	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	84,52	84,60	84,63	84,66	84,69	84,72	84,75
77	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	78,99	81,10	82,20	83,30	84,40	85,50	86,60
5.23	Kearsipan							
78	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (%)	99,24%	99,24%	99,24%	99,24%	99,24%	99,24%	99,24%
79	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.24	Kelautan dan Perikanan							
80	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota Makassar (Ton)	22,123,48 Ton	22,960 Ton	23,290,35 Ton	23,625,8 Ton	23,965 Ton	24,310 Ton	24,661,33 Ton



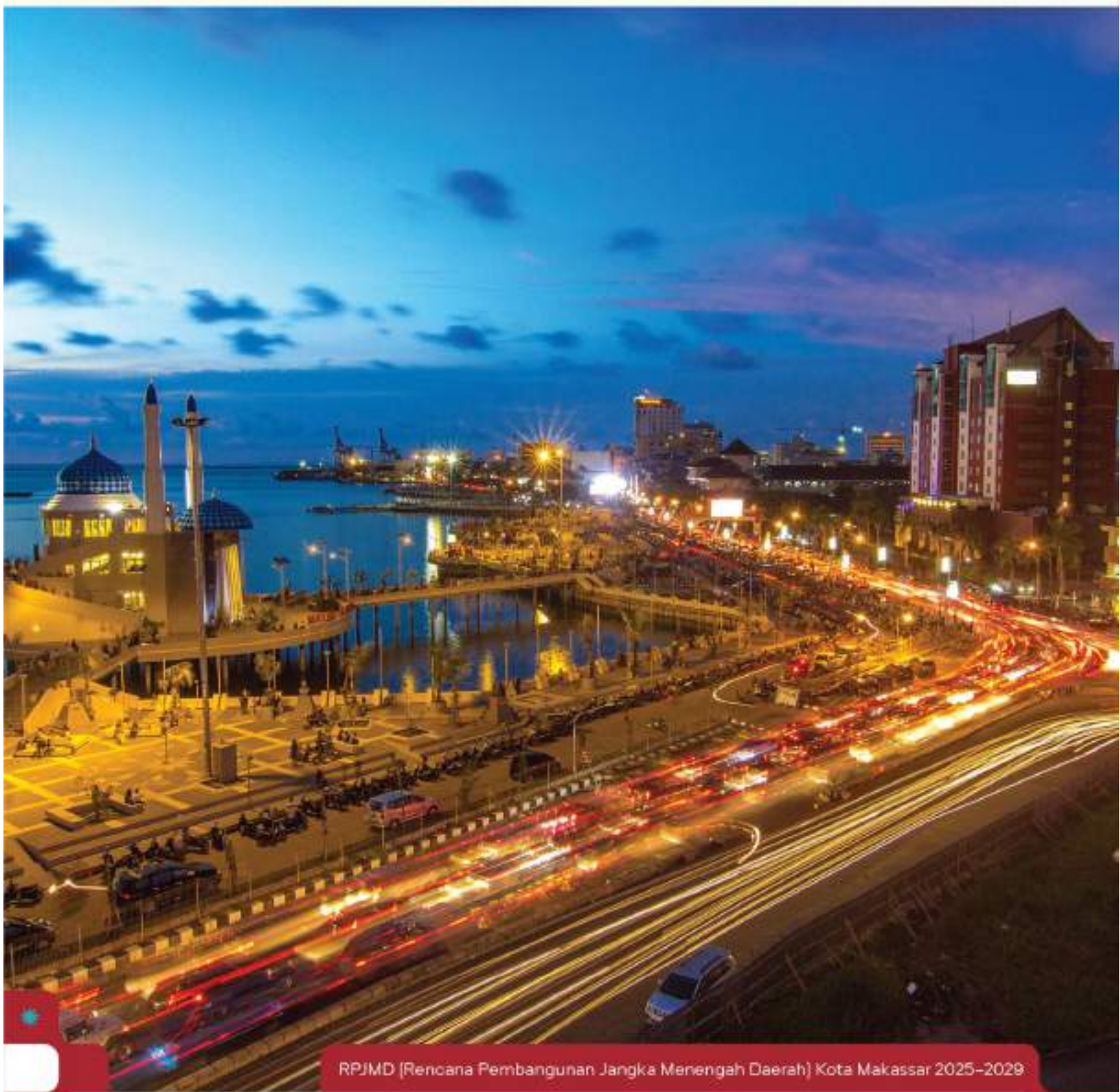
No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.25	Pariwisata							
81	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	25,13%	5%	6%	7%	8%	9%	19
82	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota Makassar (%)	11,55%	2%	3%	4%	5%	6%	7%
83	Tingkat hunian Akomodasi (%)	55,48%	56,27%	57,56%	58,71%	59,94%	60,24%	61,64%
84	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,14%	2,15%	2,16%	2,17%	2,18%	2,19%	2,20%
85	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	25,53%	25,55%	25,60%	25,75%	25,80%	25,90%	26%
5.26	Pertanian							
86	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Ton/Ha)	12,14 Ton/Ha	12,47 Ton/Ha	12,67 Ton/Ha	12,87 Ton/Ha	13,07 Ton/Ha	13,28 Ton/Ha	13,43 Ton/Ha
87	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	35,40%	65%	70%	75%	80%	85%	90%
5.29	Perdagangan							
88	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (%)	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
89	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
90	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (%)	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
5.30	Perindustrian							
91	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Makassar (Industri)	24.815	24.915	25.015	25.115	25.215	25.315	25.415
92	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	N/A	40%	60%	70%	80%	90%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
93	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	2,42%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
94	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
95	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota Makassar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
96	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.32	Perencanaan dan Keuangan							
97	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (%)	11,70%	9,51%	11,19%	11,37%	11,55%	11,73%	12,28%
98	Rasio PAD (%)	38,17%	44,46%	45,01%	45,46%	45,91%	46,42%	47,06%
99	Opini Laporan Keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
100	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	3	3	3	3	3	3
101	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	3	3	3	3	3
102	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi Transfer expenditures) (%)	76,73%	69,88%	72,27%	71,33%	70,08%	68,81%	69,62%
5.33	Pengadaan							
103	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang	N/A	2%	2%	2%	2%	2%	2%



No	Indikator Kinerja Daerah	Baseline Thn 2024	Target Kinerja Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	ditandatangani pada kuartal pertama (%)							
104	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	53,41%	55,24%	57,56%	60,45%	63,40%	66,45%	70,05%
105	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	59,01%	61,91%	63,15%	64,50%	66,12%	67,98%	69,95%
5.34	Kepegawaian							
106	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	64,69%	80%	81%	82%	83%	84%	85%
107	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	8,24%	73,5%	74%	74,5%	75%	75,5%	76%
108	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	8,24%	26,5%	27%	27,5%	28%	28,5%	29%
5.35	Manajemen Keuangan							
109	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	-26%	-23%	-20%	-17%	-14%	-11%	-10%
110	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	-26,01%	-25,00%	-24,00%	-23,00%	-22,00%	-21,00%	-20,00%
111	Manajemen Aset	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
112	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	6,53%	4,75%	4,49%	3,47%	2,85%	2,35%	2,35%
5.36	Transparansi dan Partisipasi Publik							
113	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
114	Akses publik terhadap informasi Keuangan daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

Penutup





BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Dokumen ini juga memuat program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Makassar periode tahun 2025–2029 adalah: “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.” Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan tujuh misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan;
4. Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, dan pariwisata;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum;
6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Berdasarkan misi pembangunan tersebut, dirumuskan 12 (dua belas) tujuan dengan 12 (dua belas) indikator tujuan dan 25 (dua puluh lima) sasaran dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator sasaran, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan serta selaras dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJPD Kota Makassar. Untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan. Berdasarkan tahapan pembangunan tersebut, dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai pedoman umum dalam menetapkan arahan dan prioritas pembangunan yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan pembangunan.

5.1. Perencanaan dan Penganggaran

RPJMD Kota Makassar disusun melalui pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Secara substansi, pendekatan yang digunakan adalah holistik-tematik, integratif, dan spasial. Selain itu, pada perspektifnya, RPJMD ini diarahkan untuk menjawab isu strategis, potensi, dan tantangan pembangunan Kota Makassar dengan tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dalam perspektif ekonomi hijau dan ekonomi biru, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan daya saing daerah melalui pendekatan kemandirian lokal. Seluruh desain perencanaan tersebut bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa depan.

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari persiapan penyusunan, orientasi penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum Konsultasi Publik, konsultasi Rancangan Awal ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD, penyusunan rancangan akhir, review APIP, pembahasan Ranperda RPJMD oleh DPRD Kota Makassar, evaluasi/fasilitasi pemerintah Provinsi



Sulawesi Selatan, hingga penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029.

RPJMD selanjutnya dijabarkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD dan bersifat indikatif. Dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja SKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD (RAPBD).

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk mengoptimalkan implementasi RPJMD Tahun 2025–2029, pelaksanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja, KUA-PPAS, hingga APBD, menjadi kunci keberhasilan pencapaian sasaran Pembangunan di Kota Makassar. Penyusunan setiap dokumen harus saling berkesinambungan dan memuat indikator yang selaras. Konsistensi ini akan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, pendanaan tersedia secara memadai, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Upaya menjaga konsistensi juga mencakup penerapan prinsip Kerangka Kerja Logis berbasis pendekatan THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial), yang memastikan keterhubungan antara input–proses–output–outcome–impact secara terukur.

2. Pendanaan Pembangunan

Ketersediaan dan keberlanjutan pendanaan merupakan prasyarat utama bagi pencapaian target RPJMD Kota Makassar. Optimalisasi pendanaan dilakukan dengan mengembangkan inovasi pembiayaan, memperluas sumber pendanaan, dan mengintegrasikan perencanaan dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Sumber pendanaan mencakup:

- Sektor publik, melalui perkuatan perencanaan pembiayaan, kerja sama dengan badan usaha, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
- Sektor nonpublik, melalui pemanfaatan dana filantropi, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), dana keagamaan, dan inovasi pembiayaan.



Pengelolaan pendanaan harus disertai manajemen investasi yang berkualitas agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Mitigasi Fiskal

Perubahan kebijakan, guncangan ekonomi global, bencana, dan permasalahan domestik dapat memengaruhi stabilitas fiskal Kota Makassar. Oleh karena itu, diperlukan strategi mitigasi fiskal yang mencakup:

- Penyiapan kerangka fiskal adaptif untuk mengantisipasi ketidakpastian.
- Penyusunan cadangan fiskal untuk keadaan darurat.
- Penyesuaian prioritas belanja secara cepat berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi dan sosial.

Mitigasi fiskal ini menjadi instrumen untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian Kota Makassar, menjaga kepercayaan publik, dan mempertahankan kinerja pelayanan dasar masyarakat.

4. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pembangunan di Kota Makassar dilaksanakan secara terstruktur melalui dukungan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Kerangka ini bertujuan untuk:

- Menyelaraskan regulasi pemantauan, evaluasi, manajemen risiko, dan manajemen kinerja.
- Mendorong koordinasi lintas perangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih program.
- Mengintegrasikan sistem data dan informasi pembangunan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dengan kerangka ini, pengendalian menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

5. Mekanisme Perubahan RPJMD

RPJMD bersifat adaptif dan dapat disesuaikan bila terjadi dinamika pembangunan yang disebabkan faktor eksternal di luar kendali Pemerintah Kota Makassar, seperti krisis global, perubahan geopolitik, atau bencana alam. Mekanisme perubahan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, serta didukung pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

6. Komunikasi Publik

Keberhasilan pembangunan Kota Makassar membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Komunikasi publik yang efektif akan:

- menyampaikan informasi kebijakan dan program secara jelas, tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- mengajak partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan.
- membangun kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan.

Komunikasi publik dilakukan secara dua arah sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

7. Masa Transisi

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Kota Makassar pada masa pergantian periode pemerintahan, RPJMD memuat pengaturan masa transisi. Hal ini meliputi penyelesaian target yang belum tercapai, penyusunan RPJMD



periode berikutnya sesuai RPJPD, serta menjaga keselarasan dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan masa transisi yang baik akan mencegah terjadinya kekosongan program dan menjaga kesinambungan pembangunan.

8. Sistem Insentif

Pemberian insentif menjadi strategi untuk memotivasi perangkat daerah, masyarakat, dan sektor swasta agar berkontribusi aktif dalam Pembangunan di Kota Makassar. Sistem insentif dapat berupa penghargaan kinerja, kemudahan akses program, dukungan fasilitas, hingga insentif fiskal bagi pihak yang mendukung pencapaian target RPJMD. Dengan demikian, tercipta iklim kompetitif yang sehat untuk mendorong percepatan pembangunan Kota Makassar.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kota Makassar, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian didukung oleh tatanan regulasi dan sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Tatanan regulasi diharapkan dapat menyinergikan regulasi pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja, serta mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Ruang lingkup pengendalian pembangunan Kota Makassar terbagi menjadi dua bagian, yakni Pengendalian perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas prioritas pembangunan Daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD, ke RPJMD, dan RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iii) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah; (ii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iii) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek/tahunan (RKPD). Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan Daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah.

Pelaksanaan Pengendalian juga mempertimbangkan aspek seperti: a. Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan; b. Capaian Kinerja dan Indikator; c. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran; d. Kualitas Pelayanan Publik terutama dalam urusan wajib pelayanan dasar; e. Keterlibatan Masyarakat dan



Stakeholder; f. Ketepatan Waktu Pelaksanaan; g. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi; h. Koordinasi Antar-Perangkat Daerah khususnya beberapa OPD yang mempunyai *crosscutting*.

Dengan semangat kolaborasi dan gotong royong, Pemerintah Kota Makassar mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD tahun 2025–2029. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan dalam mewujudkan Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

WALI KOTA MAKASSAR,

ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

ttd

Muh. Izhar Kurniawan, SH, MH
Nip. 19851228 200801 1 003



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

—Kota Makassar

Gedung Balaikota, Jalan Ahmad Yani No. 2
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 9011, Indonesia.



[0411]—3616940



makassarkota.go.id